

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Audited

KOTA BOGOR

2024



LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2024

(Audited)

PEMERINTAH KOTA BOGOR

KATA PENGANTAR

Alhamdulillaahirobbil'aalamiin, berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, buku Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor *Audited* Tahun Anggaran 2024 telah selesai disusun. Seluruh rangkaian pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bogor sepanjang tahun anggaran 2024, yang senantiasa mengacu pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan pengelolaan keuangan negara.

Ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang dimaksud adalah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor *Audited* Tahun Anggaran 2024, disusun dengan kelengkapan sebuah laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2024 dan 2023, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2024 dan 2023, Neraca per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dan 2023, Laporan Operasional Tahun Anggaran 2024 dan 2023, Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2024 dan 2023, Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2024 dan 2023, serta Catatan atas Laporan Keuangan yang seluruhnya dilengkapi dengan lampiran.

Dengan demikian, diharapkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor *Audited* Tahun Anggaran 2024 ini, dapat memberikan informasi yang lengkap dan transparan tentang pengelolaan keuangan daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2024. Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan semua pihak, untuk dapat mengetahui secara utuh pengelolaan keuangan daerah Kota Bogor sepanjang Tahun Anggaran 2024.

Bogor, Mei 2025

WALI KOTA BOGOR,

DEDIE A. RACHIM

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bogor, Mei 2025

WALI KOTA BOGOR,

DEDIE A. RACHIM

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor *Audited* Tahun Anggaran 2024 adalah laporan keuangan yang merupakan gabungan (konsolidasian) keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi yang terdapat pada Pemerintah Kota Bogor. Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Daerah Bogor yang merupakan pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Disamping ketentuan tersebut, Laporan Keuangan ini juga disusun dan disajikan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
   Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Daerah. Yang didasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)
   LP SAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL Awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi, dan SAL Akhir.
3. Neraca
   Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya. Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek, dan Kewajiban Jangka Panjang.
4. Laporan Operasional (LO)
   LO menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
5. Laporan Arus Kas (LAK)
   LAK disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) serta penerimaan dan pengeluaran kas non rekening umum kas daerah selama Tahun Anggaran 2024.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
   LPE menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Lain-lain dan Ekuitas Akhir.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
   CaLK menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.
   Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, LO, dan LPE untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		I
Pernyataan Tanggung Jawab		Ii
Ikhtisar Laporan Keuangan		iii
Daftar Isi		iv
Bagian I	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023	1
Bagian II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023	3
Bagian III	Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023	4
Bagian IV	Laporan Operasional Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023	6
Bagian V	Laporan Arus Kas Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023	8
Bagian VI	Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023	12
Bab I	Informasi umum	13
Bab II	Ekonomi Makro Dan Kebijakan Keuangan Daerah	18
Bab III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	37
Bab IV	Dasar Penyajian Laporan Keuangan Dan Kebijakan Akuntansi	44
Bab V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	125
Bab VI	Informasi Tambahan	323
Bab VII	Penutup	327
Lampiran		

PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER 31 DESEMBER 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	REF	Anggaran 2024	Realisasi 2024 (Audited)	Realisasi 2023 (Audited)
PENDAPATAN	**5.1.1**			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**5.1.1.1**	**1.461.100.063.862,00**	**1.458.619.452.757,24**	**1.338.618.268.168,80**
Pajak Daerah	5.1.1.1.1	984.800.000.000,00	973.768.860.850,00	897.753.380.910,00
Retiribusi Daerah	5.1.1.1.2	417.231.785.419,00	417.445.452.990,24	31.081.390.548,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	34.537.163.762,00	34.287.163.763,00	33.960.776.435,00
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	24.531.114.681,00	33.117.975.154,00	375.822.720.275,80
PENDAPATAN TRANSFER	**5.1.1.2**	**1.731.609.984.212,00**	**1.711.878.175.798,00**	**1.628.857.302.371,00**
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	**5.1.1.2.1**	**1.352.594.849.566,00**	**1.341.380.091.442,00**	**1.243.743.075.523,00**
Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1.1	103.238.232.000,00	114.423.344.000,00	102.205.851.687,00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	858.600.617.000,00	853.803.503.264,00	792.504.632.043,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.2.1.4	46.140.365.566,00	44.829.645.150,00	55.796.999.805,00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.2.1.4	344.615.635.000,00	328.323.599.028,00	293.235.591.988,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**5.1.1.2.2**	**28.047.664.000,00**	**28.047.664.000,00**	**5.912.254.000,00**
Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.2.1	28.047.664.000,00	28.047.664.000,00	5.912.254.000,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**5.1.1.2.3**	**350.967.470.646,00**	**342.450.420.356,00**	**379.201.972.848,00**
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.3.1	311.531.583.096,00	303.076.793.631,00	301.185.316.222,00
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.2	39.435.887.550,00	39.373.626.725,00	78.016.656.626,00
JUMLAH PENDAPATAN		**3.192.710.048.074,00**	**3.170.497.628.555,24**	**2.967.475.570.539,80**
BELANJA	**5.1.2**			
BELANJA OPERASI	**5.1.2.1**	**2.846.195.789.921,00**	**2.774.250.053.629,00**	**2.508.123.306.971,00**
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.270.881.665.338,00	1.242.957.964.907,00	1.063.654.426.888,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	1.342.955.429.587,00	1.304.164.987.240,00	1.236.457.277.949,00
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	7.500.000.000,00	7.027.746.595,00	6.191.682.700,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	180.077.750.496,00	176.519.335.387,00	147.381.004.434,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	44.780.944.500,00	43.580.019.500,00	54.438.915.000,00
BELANJA MODAL	**5.1.2.2**	**426.595.630.347,00**	**400.367.986.619,00**	**518.164.968.738,00**
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	5.425.147.300,00	2.477.717.100,00	1.287.152.960,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	144.788.452.254,00	133.226.642.367,00	97.928.993.032,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	150.827.313.763,00	141.166.601.172,00	178.951.840.395,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	114.562.031.641,00	112.729.496.656,00	238.985.747.391,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	10.917.685.389,00	10.693.173.754,00	911.157.960,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	75.000.000,00	74.355.570,00	100.077.000,00
BELANJA TAK TERDUGA	**5.1.2.3**	**6.359.952.269,00**	**2.187.943.885,00**	**1.066.654.400,00**
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	6.359.952.269,00	2.187.943.885,00	1.066.654.400,00
JUMLAH BELANJA		**3.279.151.372.537,00**	**3.176.805.984.133,00**	**3.027.354.930.109,00**
BELANJA TRANSFER	**5.1.3**			
BELANJA BANTUAN KEUANGAN	**5.1.3**	**1.660.750.000,00**	**1.660.750.000,00**	**1.660.750.000,00**
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	5.1.3	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER		**1.660.750.000,00**	**1.660.750.000,00**	**1.660.750.000,00**
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		**3.280.812.122.537,00**	**3.178.466.734.133,00**	**3.029.015.680.109,00**
SURPLUS/ (DEFISIT)		**(88.102.074.463,00)**	**(7.969.105.577,76)**	**(61.540.109.569,20)**
PEMBIAYAAN	**5.1.4**			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**5.1.4.1**	**98.396.220.459,00**	**225.089.463.440,14**	**192.611.572.644,34**
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	5.1.4.1	54.250.445.599,00	54.255.954.664,14	161.360.978.068,34
Pencairan Dana Cadangan	5.1.4.1	38.648.742.600,00	38.648.742.600,00	25.765.828.400,00
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	5.1.4.1	0,00	126.700.000.000,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.1	5.497.032.260,00	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00

Uraian	REF	Anggaran 2024	Realisasi 2024 (Audited)	Realisasi 2023 (Audited)
PENGELUARAN DAERAH	**5.1.4.2**	**10.294.145.996,00**	**132.184.766.176,00**	**76.821.017.476,00**
Pembentukan Dana Cadangan	5.1.4.2	0,00	0,00	71.336.251.300,00
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	5.1.4.2	5.497.032.260,00	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	5.1.4.2	0,00	126.700.000.000,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.1.4.2	4.797.113.736,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		**88.102.074.463,00**	**92.904.697.264,14**	**115.790.555.168,34**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**5.1.5**	**0,00**	**84.935.591.686,38**	**54.250.445.599,14**

Bogor, Mei 2025
WALI KOTA BOGOR

DEDIE A. RACHIM

PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	REF	31 DESEMBER 2024 AUDITED	31 DESEMBER 2023 AUDITED
1	SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	5.2.1	54.250.445.599,14	161.358.478.068,34
2	PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	5.2.2	(54.255.954.664,14)	(161.360.978.068,34)
	JUMLAH SUB TOTAL (1+2)		**(5.509.065,00)**	**(2.500.000,00)**
3	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	5.2.3	84.935.591.686,38	54.250.445.599,14
	JUMLAH SUB TOTAL (1+2+3)		**84.935.591.686,38**	**54.247.945.599,14**
4	KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	5.2.4	**5.509.065,00**	**2.500.000,00**
5	LAIN-LAIN		0,00	0,00
	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (1+2+3+4+5)	5.2.5	**84.935.591.686,38**	**54.250.445.599,14**

Bogor, Mei 2025
WALI KOTA BOGOR

DEDIE A. RACHIM

PEMERINTAH KOTA BOGOR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	REF	2024 (Audited)	2023 (Audited)
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.1		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	79.503.327.898,00	33.520.359.707,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	-	922.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	-	1.810.000,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	2.153.130.596,38	17.674.780.233,14
Kas Dana BOS	5.3.1.1.1.5	947.597.794,00	1.649.723.756,00
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.6	1.012.808.839,00	1.108.045.406,00
Setara Kas		-	-
Piutang Pajak	5.3.1.1.2.1	617.775.532.829,00	520.712.992.274,00
Piutang Retribusi	5.3.1.1.2.2	84.392.660.913,70	5.848.053.235,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.2.3	4.510.852.544,00	4.961.512.690,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.4	177.064.672.727,00	207.821.455.185,70
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.2.5	-	-
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.2.6	12.733.735.118,00	10.982.003.087,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.3	59.596.923.188,00	65.081.689.452,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.4	(389.964.184.114,24)	(327.357.002.657,22)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.5	505.228.167,24	515.022.118,72
Persediaan	5.3.1.1.6	49.525.803.484,97	59.870.448.656,74
JUMLAH ASET LANCAR		**699.758.089.985,05**	**602.391.815.144,08**
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.3		
Investasi Non Permanen	5.3.1.3.1	**-**	**-**
Investasi kepada BUMN		-	-
Investasi kepada BUMD		-	-
Investasi dalam Obligasi		-	-
Investasi dalam Proyek Pembangunan		-	-
Dana Bergulir	5.3.1.3.1.1	51.753.390,00	-
Penyisihan Dana Bergulir	5.3.1.3.1.2	(51.753.390,00)	-
Investasi Permanen	5.3.1.3.2	**1.002.293.416.444,24**	**835.123.845.482,75**
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.3.2	1.002.293.416.444,24	835.123.845.482,75
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah		-	
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		**1.002.293.416.444,24**	**835.123.845.482,75**
ASET TETAP	5.3.1.4		
Tanah	5.3.1.4.1	5.796.161.596.908,69	5.938.980.428.024,63
Peralatan dan Mesin	5.3.1.4.2	1.256.136.708.584,89	1.136.877.015.590,06
Gedung dan Bangunan	5.3.1.4.3	1.888.200.567.932,12	1.582.373.719.962,85
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.4.4	3.588.464.657.486,93	3.483.468.228.932,92
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.4.5	15.088.820.384,99	11.314.989.293,84
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.4.6	15.583.780.825,00	224.422.793.771,34
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.4.7	(3.521.544.006.794,74)	(3.162.527.131.333,85)
JUMLAH ASET TETAP		9.038.092.125.327,88	9.214.910.044.241,79
DANA CADANGAN		-	-
Dana Cadangan	5.3.1.5	8.398.684.760,00	46.125.787.358,00
JUMLAH DANA CADANGAN		8.398.684.760,00	46.125.787.358,00

Uraian	REF	2024 (Audited)	2023 (Audited)
ASET LAINNYA	5.3.1.6		
Tagihan Jangka Panjang		-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.6.1	770.678.122,00	873.259.125,00
Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.6.2	351.103.844,90	334.362.178,57
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.6.3	11.014.184.310,00	11.014.184.310,00
Aset Tak Berwujud	5.3.1.6.4	16.970.742.403,80	16.945.217.083,80
Aset Lain - lain	5.3.1.6.5	187.940.474.139,24	199.888.450.262,74
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.6.6	(16.493.115.025,80)	(16.066.792.926,55)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.6.7	(131.320.042.007,03)	(142.870.965.109,14)
Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.6.8	7.169.764.000,00	23.768.880.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA		76.403.789.787,11	93.886.594.924,42
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi Tanah		213.767.403.459,00	-
Properti Investasi Gedung dan Bangunan		4.408.486.403,00	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi		-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		(977.705.908,52)	-
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		**217.198.183.953,48**	-
JUMLAH ASET		**11.042.144.290.257,76**	**10.792.438.087.151,04**
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	158.277.901,00	260.050.896,00
Utang Bunga		543.668.056,00	-
Utang Pinjaman Jangka Pendek		-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.2	10.281.879.912,00	10.281.879.912,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.3	2.569.064.213,13	413.113.467,07
Utang Belanja	5.3.2.1.4	96.531.896.093,66	95.418.767.474,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		6.666.000,00	900.000,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		110.091.452.175,79	106.374.711.749,07
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
Utang kepada Pemerintah Pusat	5.3.2.2.1	43.878.129.419,00	49.362.895.595,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank		-	-
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.3.2.2.2	18.788.693.136,00	23.585.806.872,00
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)		-	-
Premium (Diskonto) Obligasi		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		62.666.822.555,00	72.948.702.467,00
JUMLAH KEWAJIBAN		172.758.274.730,79	179.323.414.216,07
EKUITAS			
Ekuitas	5.3.3	10.869.386.015.526,97	10.613.114.672.934,97
JUMLAH EKUITAS		10.869.386.015.526,97	10.613.114.672.934,97
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**11.042.144.290.257,76**	10.792.438.087.151,04

Bogor, Mei 2025
WALI KOTA BOGOR

WALI KOTA
DEDIE A. RACHIM
KOTA BOGOR

PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2024 (Audited)	2023 (Audited)
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	5.4.1		
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.1.1	**1.613.207.035.756,08**	**1.433.294.780.168,91**
Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1	1.072.592.914.165,00	972.314.483.639,00
Pendapatan Retiribusi Daerah	5.4.1.1.2	429.458.652.647,18	31.421.925.232,38
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	75.711.032.790,57	36.551.189.768,95
Lain-lain PAD yang Sah	5.4.1.1.4	35.444.436.153,33	393.007.181.528,58
PENDAPATAN TRANSFER	**5.4.1.2**	**1.701.821.239.565,00**	**1.636.490.268.772,00**
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.4.1.2.1.	**1.329.578.089.178,00**	**1.255.511.526.314,00**
Dana Bagi Hasil	5.4.1.2.1.1	97.824.228.000,00	113.574.543.000,00
Dana Alokasi Umum	5.4.1.2.1.1.3	858.600.617.000,00	792.904.391.521,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.4.1.2.1.1.4	44.829.645.150,00	55.796.999.805,00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.4.1.2.1.1.4	328.323.599.028,00	293.235.591.988,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**5.4.1.2.1.**	**28.047.664.000,00**	**5.912.254.000,00**
Insentif fiskal	5.4.1.2.1.2	28.047.664.000,00	5.912.254.000,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**5.4.1.2.2.**	344.195.486.387,00	375.066.488.458,00
Pendapatan Bagi Hasil	5.4.1.2.2.1	304.828.525.662,00	297.334.928.892,00
Bantuan Keuangan	5.4.1.2.2.2	39.366.960.725,00	77.731.559.566,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**5.4.1.3**	**42.961.879.333,77**	**66.574.926.398,81**
Pendapatan Hibah	5.4.1.3.1	42.961.879.333,77	66.574.926.398,81
Pendapatan Lainnya	5.4.1.3.2	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		**3.357.990.154.654,85**	**3.136.359.975.339,72**
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL	**5.4.2.1**	**3.295.465.961.046,54**	**2.977.397.181.746,12**
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	1.242.262.790.024,00	1.063.356.108.648,00
Beban Persediaan	5.4.2.1.2	361.655.139.056,65	271.413.541.867,89
Beban Jasa	5.4.2.1.3	763.459.300.802,48	759.836.121.957,66
Beban Pemeliharaan	5.4.2.1.4	146.011.452.259,00	161.408.670.532,86
Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.1.5	94.617.582.922,00	86.703.519.468,00
Beban Bunga	5.4.2.1.6	7.571.414.651,00	6.191.682.700,00
Beban Hibah	5.4.2.1.7	176.519.335.387,00	147.381.004.434,00
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.8	43.580.019.500,00	54.438.915.000,00
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.9	373.846.048.605,39	47.569.042.893,21
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.10	62.607.181.457,02	373.280.306.704,50
Beban Lain-lain	5.4.2.1.11	23.335.696.382,00	5.818.267.540,00
BEBAN TRANSFER	**5.4.2.1.12**	**1.660.750.000,00**	**1.660.750.000,00**
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.4.2.1.12	0,00	0,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.4.2.1.12	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.4.2.1.12	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.4.2.1.12	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.4.2.1.12	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		**3.297.126.711.046,54**	**2.979.057.931.746,12**
SURPLUS/ (DEFISIT) KEGIATAN OPERASIONAL		**60.863.443.608,31**	**157.302.043.593,60**

URAIAN	REF	2024 (Audited)	2023 (Audited)
SURPLUS/ (DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3.1	**14.388.624.170,56**	**0,00**
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	5.4.3.1.1	14.388.624.170,56	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	5.4.3.1	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.3.1	0,00	0,00
DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3.2	**0,00**	**0,00**
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	5.4.3.2	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	5.4.3.2	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.3.2	0,00	0,00
SURPLUS/ (DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL		**14.388.624.170,56**	**0,00**
SURPLUS/ (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		**75.252.067.778,87**	**157.302.043.593,60**
POS LUAR BIASA			
PENDAPATAN LUAR BIASA	5.4.4.1	**0,00**	**0,00**
Pendapatan Luar Biasa	5.4.4.1.1	0,00	0,00
BEBAN LUAR BIASA	5.4.4.2	**2.187.043.885,00**	**1.066.654.400,00**
Beban Luar Biasa	5.4.4.2.1	2.187.043.885,00	1.066.654.400,00
SURPLUS/ (DEFISIT) KEGIATAN POS LUAR BIASA		**(2.187.043.885,00)**	**(1.066.654.400,00)**
SURPLUS/ (DEFISIT) LO		**73.065.023.893,87**	**156.235.389.193,60**

Bogor, Mei 2025
WALI KOTA BOGOR

DEDIE A. RACHIM

PEMERINTAH KOTA BOGOR

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2024 (Audited)	2023 (Audited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.5		
Arus Masuk Kas	5.5.5.1		
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.5.1	973.768.860.850,00	897.753.380.910,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.5.1	417.445.452.990,24	31.081.390.548,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.5.5.1	34.287.163.763,00	33.960.776.435,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.5.1	31.728.557.279,00	373.734.859.341,80
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.5.1	85.946.116.000,00	82.465.899.156,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.5.5.1	28.477.228.000,00	19.739.952.531,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.5.1	853.803.503.264,00	792.504.632.043,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.5.1	373.153.244.178,00	349.032.591.793,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	5.5.5.1	0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	5.5.5.1	28.047.664.000,00	5.912.254.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.5.5.1	303.076.793.631,00	301.185.316.222,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	5.5.5.1	0,00	0,00
Penerimaan Hibah	5.5.5.1	0,00	0,00
Penerimaan Dana Darurat	5.5.5.1	0,00	0,00
Penerimaan Lainnya	5.5.5.1	39.373.626.725,00	78.016.656.626,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	5.5.5.1	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		3.169.108.210.680,24	2.965.387.709.605,80
Arus Keluar Kas	5.5.5.2		
Pembayaran Pegawai	5.5.5.2	1.242.957.964.907,00	1.063.654.426.888,00
Pembayaran Barang	5.5.5.2	1.304.164.987.240,00	1.236.457.277.949,00
Pembayaran Bunga	5.5.5.2	7.027.746.595,00	6.191.682.700,00
Pembayaran Subsidi	5.5.5.2	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	5.5.5.2	176.519.335.387,00	147.381.004.434,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.5.2	43.580.019.500,00	54.438.915.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.5.2	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00
Pembayaran Tidak Terduga	5.5.5.2	2.187.943.885,00	1.066.654.400,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.5.5.2	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	5.5.5.2	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.5.5.2	0,00	0,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	5.5.5.2	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		2.778.098.747.514,00	2.510.850.711.371,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		391.009.463.166,24	454.536.998.234,80

Uraian	Ref	2024 (Audited)	2023 (Audited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.6		
Arus Masuk Kas	5.5.6.1		
Penjualan atas Tanah	5.5.6.1	24.168.075,00	24.728.650,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.6.1	40.529.200,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.6.1	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.6.1	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.6.1	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan Aset Lainnya	5.5.6.1	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan Aset Lain-Lain	5.5.6.1	1.324.720.600,00	2.063.132.284,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.389.417.875,00	2.087.860.934,00
Arus Keluar Kas	5.5.6.2		
Belanja Tanah	5.5.6.2	2.477.717.100,00	1.287.152.960,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.5.6.2	133.226.642.367,00	97.928.993.032,00
Belanja Gedung dan Bangunan	5.5.6.2	141.166.601.172,00	178.951.840.395,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.6.2	112.729.496.656,00	238.985.747.391,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.5.6.2	10.693.173.754,00	911.157.960,00
Belanja Aset Lainnya	5.5.6.2	74.355.570,00	100.077.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	5.5.6.2	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		400.367.986.619,00	518.164.968.738,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(398.978.568.744,00)	(516.077.107.804,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	5.5.7		
Arus Masuk Kas	5.5.7.1		
Pencairan Dana Cadangan	5.5.7.1	38.648.742.600,00	25.765.828.400,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan	5.5.7.1	126.700.000.000,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	5.5.7.1	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	5.5.7.1	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	5.5.7.1	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.5.7.1	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00
Penerimaan Kembali Piutang Daerah	5.5.7.1	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	5.5.7.1	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.7.1	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		170.833.508.776,00	31.250.594.576,00

Uraian	Ref	2024 (Audited)	2023 (Audited)
Arus Keluar Kas	5.5.7.2		
Pembentukan Dana Cadangan	5.5.7.2	0,00	71.336.251.300,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.7.2	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.7.2	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah	5.5.7.2	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan	5.5.7.2	126.700.000.000,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan	5.5.7.2	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	5.5.7.2	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	5.5.7.2	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	5.5.7.2	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.5.7.2	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.7.2	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	5.5.7.2	132.184.766.176,00	76.821.017.476,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		38.648.742.600,00	(45.570.422.900,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.8		
Arus Masuk Kas	5.5.8.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	5.5.8.1	240.844.476.337,48	227.040.381.499,50
Koreksi Silpa	5.5.8.1	5.550.000,00	2.500.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		240.850.026.337,48	227.042.881.499,50
Arus Keluar Kas	5.5.8.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	5.5.8.2	240.946.249.332,48	227.029.633.386,50
Koreksi Silpa	5.5.8.2	40.935,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		240.946.290.267,48	227.029.633.386,50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(96.263.930,00)	13.248.113,00
Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode		30.583.373.092,24	(107.097.284.356,20)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendaharan Penerimaan dan Kas Lainnya		54.510.496.495,14	161.607.780.851,34
Saldo Akhir Kas		85.093.869.587,38	54.510.496.495,14

Uraian	Ref	2024 (Audited)	2023 (Audited)
Terdiri dari :			
Saldo Akhir Kas di BUD		79.503.327.898,00	33.520.359.707,00
Saldo Kas Di BLUD		2.153.130.596,38	17.674.821.168,14
Saldo Kas di FKTP (Puskesmas)		0,00	0,00
Saldo Kas di Bendahara BOS		947.597.794,00	1.649.723.756,00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	922.000,00
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	1.260.000,00
Saldo Kas Lainnya		1.012.808.839,00	1.108.045.406,00

Bogor, Mei 2025
WALI KOTA BOGOR

DEDIE A. RACHIM

PEMERINTAH KOTA BOGOR

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024 AUDITED	2023 AUDITED
EKUITAS AWAL	**10.613.114.672.934,97**	**10.174.464.362.679,95**
SURPLUS/DEFISIT-LO	**73.065.023.893,87**	**156.235.389.193,60**
Kewajiban untuk Dikonsolidasikan	**0,00**	**0,00**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	**183.206.318.698,13**	**282.414.921.061,42**
Koreksi Nilai Persediaan	25.303.013,44	104.721.309,87
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Mutasi Saldo Awal - Aset Lancar	0,00	0,00
Mutasi Saldo Awal - Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
Mutasi Saldo Awal - Aset Tetap	0,00	0,00
Mutasi Saldo Awal - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
Mutasi Saldo Awal - Dana Cadangan	0,00	0,00
Mutasi Saldo Awal - Aset Lainnya	0,00	0,00
Mutasi Saldo Awal - Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
Mutasi Saldo Awal - Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Tanah)	73.815.713.760,00	247.125.783.197,00
Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Peralatan dan Mesin)	(6.852.682.613,17)	(9.808.532.275,77)
Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Gedung dan Bangunan)	(509.028.026,00)	(2.304.200.000,00)
Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Jalan Irigasi dan Jaringan)	2.734.814.178,00	34.703.110.048,00
Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Aset Tetap Lainnya)	677.492.474,15	(3.900.000,00)
Hasil Inventarisasi - Aset Lainnya	(12.075.219.301,50)	11.121.085.120,79
Hasil Inventarisasi - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	9.643.553.427,56	(2.100.845.643,27)
Hasil Inventarisasi - Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	11.679.490.047,73	(8.344.381.920,47)
Koreksi ekuitas lainnya	104.066.881.737,92	11.922.081.225,27
EKUITAS AKHIR	**10.869.386.015.526,97**	**10.613.114.672.934,97**

Bogor, Mei 2025

WALI KOTA BOGOR

DEDIE A. RACHIM

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Kota Bogor menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2024.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan keuangan yang disusun ini meliputi :

a. Laporan Realisasi Anggaran
   Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
c. Neraca
   Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
d. Laporan Operasional
   Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
e. Laporan Arus Kas
   Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.
f. Laporan Perubahan Ekuitas
   Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
   CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang merupakan pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

LKPD Kota Bogor Tahun Anggaran 2024 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* (antara lain: masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor selama Tahun Anggaran 2024 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan LRA, Pendapatan LO, belanja, beban, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Bogor serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Bogor berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak, retribusi dan pembiayaan; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Bogor sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bogor disusun berdasarkan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Wali Kota Bogor 12 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3. ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah Kota Bogor, sedangkan Entitas Akuntansi meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
Entitas Akuntansi tidak termasuk perusahaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor.

SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor meliputi:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umum Daerah
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan dan Permukiman
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Satuan Polisi Pamong Praja
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9. Dinas Sosial
10. Dinas Tenaga Kerja
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
13. Dinas Lingkungan Hidup
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16. Dinas Perhubungan

17. Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Dinas Pemuda dan Olah Raga
21. Dinas Arsip dan Perpustakaan
22. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
23. Sekretariat Daerah
24. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah
27. Badan Pendapatan Daerah
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29. Inspektorat
30. Kecamatan Bogor Utara
31. Kecamatan Bogor Selatan
32. Kecamatan Bogor Timur
33. Kecamatan Bogor Barat
34. Kecamatan Bogor Tengah
35. Kecamatan Tanah Sareal
36. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BLUD meliputi:

1. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor
2. BLUD Puskesmas dan BLUD Labkesda yang merupakan unit kerja dibawah Dinas Kesehatan Kota Bogor

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan, Sistematika Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor disusun sebagai berikut:

Bab I INFORMASI UMUM
- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bab II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan Daerah

Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Pendahuluan

4.2 Asumsi Dasar Akuntansi

4.3 Komponen Laporan Keuangan

4.4 Keterbatasan Laporan Keuangan

4.5 Kebijakan Akuntansi

1. Entitas Pelaporan
2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Basis Pengukuran yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Bab V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5.1 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI INFORMASI TAMBAHAN

Bab VII PENUTUP

BAB II
EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

2.1 Ekonomi Makro

Pembangunan Ekonomi Kota Bogor sangat ditentukan dari aspek daya saing ekonomi masyarakat yang selanjutnya dapat diukur melalui aspek-aspek indikator makro ekonomi yakni:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bogor;
2. Produk domestik regional bruto (PDRB);
3. Pengeluaran Per Kapita (Konsumsi Per Kapita);
4. Tingkat Inflasi daerah;
5. Pemerataan kesejahteraan masyarakat;
6. Angka Kemiskinan; dan
7. Kondisi Ketenagakerjaan.

2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bogor

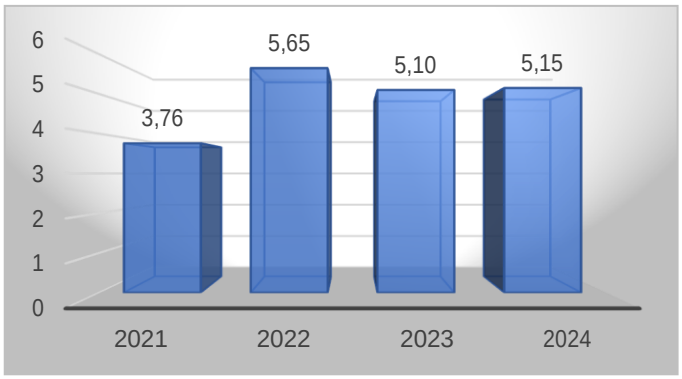
Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kota Bogor pada tahun 2024 adalah sebesar 5,15%. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah adalah sektor pengadaan listrik dan gas yang mengalami kontraksi sebesar -2,86%.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2024 memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kota Bogor yaitu sebesar 19,09%, dengan laju pertumbuhan sebesar 3,13%. Sektor Industri Pengolahan penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian Kota Bogor yaitu sebesar 18,39% dengan laju pertumbuhan sebesar 2,45%. Pada PDRB menurut komponen pengeluaran, sumbangan yang terbesar adalah Konsumsi Rumah Tangga. Menurut harga konstan, tahun 2024 konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi 90,53% dari total PDRB Kota Bogor atau senilai 34.788,98 miliar rupiah. Penggunaan lain yang cukup besar dari Produk Domestik Regional Bruto adalah untuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Menurut harga konstan, tahun 2024 mencapai 12.852,69 miliar rupiah.

Grafik 2.1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2021 - 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2025

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik sebagai akibat berbagai aktivitas ekonomi pada suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dilakukan melalui 3 pendekatan yaitu: pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau PDRB nominal berdasarkan harga berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

PDRB pengeluaran yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa. PDRB Kota Bogor Sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT).

PDRB pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar 4.047,91 miliar rupiah dari nilai 61.05,67 miliar rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 57.003,76 miliar rupiah. Dilihat dari PDRB Pengeluaran atas dasar harga berlaku komponen terbesar adalah dari Konsumsi Rumah Tangga sebesar 61.788,67 miliar rupiah. Komponen PMTB mempunyai kontribusi yang relatif besar, yaitu 34,5%. Komponen net ekspor menunjukkan angka negatif, artinya selama 2020 – 2024 untuk memenuhi pengeluaran Kota Bogor masih dipenuhi oleh banyak impor. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor). Peningkatan PDRB ini dipengaruhi oleh peningkatan harga yang harus dibayarkan pada setiap komponen PDRB. Di tahun 2024 PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.1.2
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar)
Kota Bogor Tahun 2020-2024

Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	45.013,83	47.301,11	52.172,90	56.362,06	61.788,67
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	765,21	788,75	860,78	958,04	1.090,26
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4.952,12	4.943,91	4.996,68	5.521,01	5.607,49
Pembentukan Modal Tetap Bruto	14.605,10	16.435,04	17.441,68	19.739,33	21.076,37
Perubahan Inventori	855,79	-529,4	-18,4	7,44	23,68
Net Ekspor Barang dan Jasa	-20.280,18	-20.613,76	-22.539,04	-25.584,13	-28.534,78
Produk Domestik Regional Bruto	**45.911,86**	**48.325,64**	**52.914,60**	**57.003,76**	**61.051,67**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2025

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai Atas Dasar Harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dievaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga).

PDRB pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir.

PDRB menurut pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Kota umumnya mengalami kenaikan, tahun 2024 PDRB pengeluaran mencapai 38.964,67 Miliar, mengalami peningkatan sebesar 1.909,31 miliar Rupiah dari nilai 37.055,36 miliar rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2023. Peningkatan yang terjadi pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan ini mencerminkan terjadinya peningkatan volume pengeluaran yang terjadi selama tahun 2024 tanpa adanya pengaruh perubahan harga.

Tabel 2.1.3
PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran (miliar rupiah)
Kota Bogor 2020-2024

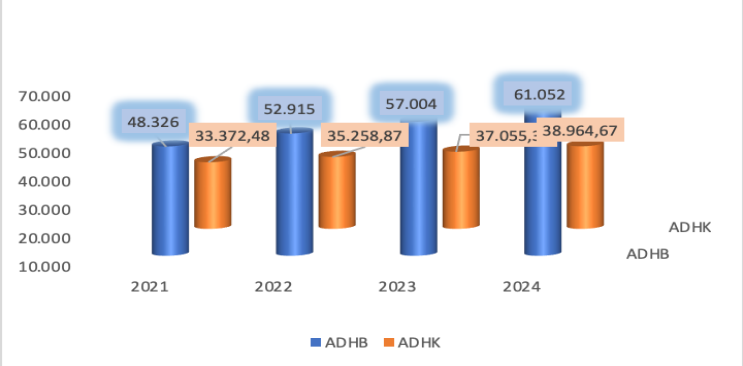
Pengeluaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	29.734	30.660	32.421	33.546	34.789
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	553	563	590	627	702
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.095	3.011	2.983	3.274	3.192
Pembentukan Modal Tetap Bruto	10.483	11.113	11.316	12.381	12.853
Perubahan Inventori	520	(301)	(10)	4	13
Net Ekspor Barang dan Jasa	(12.221)	(11.674)	(12.040)	(12.776)	(12.583)
Produk Domestik Regional Bruto	**32.162,74**	**33.372,48**	**35.258,87**	**37.055,36**	**38.964,67**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2025

Apabila dibandingkan antara nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku dengan nilai PDRB atas Dasar Harga Konstan, nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas Dasar Harga Konstan. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat, sedangkan pada PDRB atas Dasar Harga Konstan pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan.

Sama halnya PDRB atas Dasar Harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas Dasar Harga Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 ke 2024, dikarenakan telah terjadi perubahan peningkatan volume yang menyebabkan pertumbuhan nilai PDRB di tahun 2024.

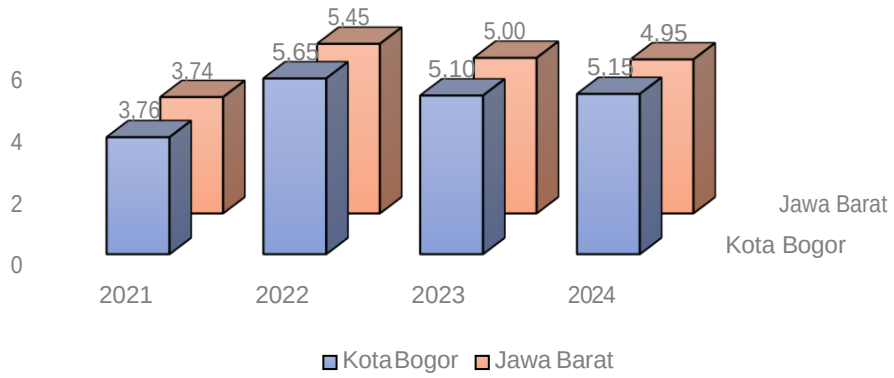
Grafik 2.1.4
Perbandingan PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut pengeluaran Tahun 2021 - 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2025

Untuk melihat pertumbuhan perekonomian kota dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB pengeluaran dan lapangan usaha.

Grafik 2.1.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2021-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2025

Bila dilihat pada grafik di atas, pertumbuhan ekonomi Kota Bogor lebih baik dari Provinsi Jawa Barat, dimana pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor sebesar 5,15% sedangkan Provinsi Jawa Barat sebesar 4,95%. Begitupan pada tahun 2021 - 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Bogor lebih baik dari Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.1.6
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di (miliar rupiah)
Kota Bogor 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	245,16	258,71	267,41	275,95	279,23
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan/	6.015,39	6.283,63	6.603,00	6.864,58	7.032,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas/	725,41	813,13	893,01	869,6	844,77
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	36,05	39,77	42,44	47,06	51,13
F	Konstruksi	3.604,70	3.659,26	3.672,50	4.094,47	4.142,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.210,45	6.379,30	6.722,52	6.973,02	7.191,20
H	Transportasi dan Pergudangan/	3.850,16	3.961,65	4.352,35	4.744,10	5.322,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	1.530,33	1.550,68	1.734,17	1.825,38	1.960,93
J	Informasi dan Komunikas	3.047,81	3.182,27	3.344,93	3.563,35	3.951,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.214,26	2.245,47	2.223,68	2.246,72	2.327,49
L	Real Estat	719,17	821,06	877,63	896,55	957,85
M,N	Jasa Perusahaan	617,58	598,73	666,39	673,1	693,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	721,13	746,4	730,75	745,61	807,29
P	Jasa Pendidikan	1.041,70	1.096,42	1.195,60	1.241,04	1.265,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	485,7	540,88	595,55	606,7	621,83
R,S,T, U	Jasa Lainnya/*Other Services Activities*	1.097,74	1.195,11	1.336,93	1.388,12	1.514,21
	Produk Domestik Regional Bruto	**32.162,74**	**33.372,48**	**35.258,87**	**37.055,36**	**38.964,67**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2025

Sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah pada tahun 2024 adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas mengalami kontraksi yaitu sebesar -2,86%. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2024 memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kota Bogor sebesar 19,09%,dengan laju pertumbuhan sebesar 3,13 persen. Sektor Industri Pengolahan penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian Kota Bogor yaitu sebesar 18,39 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 2,45 persen.

2.1.3 Pengeluaran Per Kapita (Konsumsi Per Kapita)

PDRB per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2021, PDRB perkapita atas dasar harga konstan mengalami peningkatan sebesar 2,74%, diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk sebesar 1% menunjukkan pemulihan ekonomi yang sedang menggeliat di Kota Bogor. Tahun 2022 dan 2023 PDRB per kapita tumbuh sebesar 4,66% dan 4,13% menunjukkan semakin stabil dan membaiknya kondisi perekonomian Kota Bogor. Perubahan angka PDRB per kapita yang meningkat ini lebih disebabkan oleh inflasi dan tidak menggambarkan peningkatan kemakmuran secara riil.

Tabel 2.1.7
PDRB dan PDRB per Kapita
Kota Bogor 2021-2023

Uraian	2021	2022*	2023**
Nilai PDRB (Miliar Rp)			
- ADHB	48.326	52.915	57.004
- ADHK 2010	33.372	35.259	37.055
PDRB perkapita			
- ADHB	45.984	49.875	53.239
- ADHK 2010	31.755	33.234	34.608
Pertumbuhan PDRB			
perkapita ADHK 2010 (%)	2,74	4,66	4,13
Jumlah penduduk (000 org)	1.050	1.061	1.071
Pertumbuhan (%)	1,00	0,95	0,92

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Menurut Pengeluaran 2019-2023

PDRB per kapita Kota Bogor menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun, diiringi dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai PDRB per kapita di masing-masing tahun tersebut. Sementara itu pertumbuhan per kapita secara "riil" juga selalu meningkat. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk pada tiap tahunnya.

2.1.4 Tingkat Inflasi Daerah

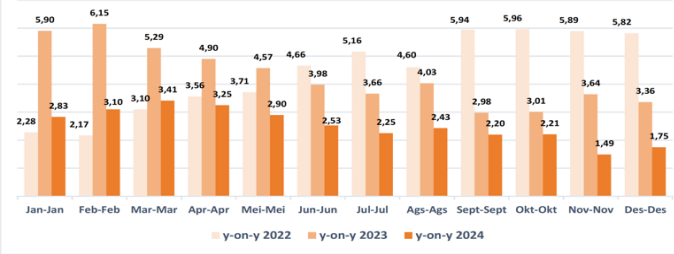
Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang-barang secara umum dan terjadi secara terus menerus. Kenaikan harga satu atau beberapa barang tidak dapat dikatakan bahwa terjadi inflasi. Selain itu, apabila kenaikan harga barang terjadi secara temporer, seperti menjelang hari raya misalnya, maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Dengan naiknya harga barang di satu sisi, hal itu mengandung arti terjadinya penurunan nilai uang di sisi lain.

Indeks Harga konsumen (IHK) Indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Secara nasional pengelompokan komoditas terdiri dari 11 kelompok dan 43 sub kelompok. Konkordansi pengelompokan IHK (2012=100) yang sebanyak 7 kelompok, berubah menjadi 11 kelompok pada IHK (2018=100), yaitu: Makanan, minuman dan tembakau; Pakaian dan alas kaki; Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; Perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; Kesehatan; Transportasi; Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; Rekreasi, olahraga dan budaya; Pendidikan; Penyediaan makanan dan minuman/restoran; dan Perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Pada Desember 2024 Kota Bogor terjadi inflasi *year on year* (yoy) sebesar 1,75% dengan IHK sebesar 107,49. Inflasi yoy tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,37% dengan IHK sebesar 116,49 dan terendah pada kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,22 persen dengan IHK sebesar 103,45. Tingkat inflasi *month to month* (mtm) Desember 2024 sebesar 0,49% dan tingkat inflasi *year to date* (ytd) Desember 2024 sebesar 1,75%.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks diseluruh kelompok pengeluaran, yaitu Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 2,35%; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 1,5%; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,36%; Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,22%; Kelompok Kesehatan sebesar 2,74%; Kelompok Transportasi sebesar 0,63%; Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,38%; Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya sebesar 1,35%; Kelompok Pendidikan sebesar 4,59%; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 1,19%; dan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya sebesar 8,37%. Pada Desember 2024, Kota Bogor mengalami tingkat inflasi yoy sebesar 1,75%; tingkat inflasi ytd sebesar 1,75% dan tingkat inflasi mtm sebesar 0,49%. Tingkat inflasi yoy untuk Desember 2023 dan Desember 2022 masing-masing sebesar 3,36% dan 5,82% %. Sedangkan tingkat inflasi ytd Desember 2023 dan Desember 2022 masing-masing sebesar 3,36% dan 5,82%.Perkembangan inflasi tahunan Kota Bogor selengkapnya dapat dilihat di Tabel 2.1.8.

Tabel 2.1.8
Perbandingan Tingkat Inflasi Year on Year 2021-2024 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor Perkembangan Indeks Harga Konsumen,Desember 202

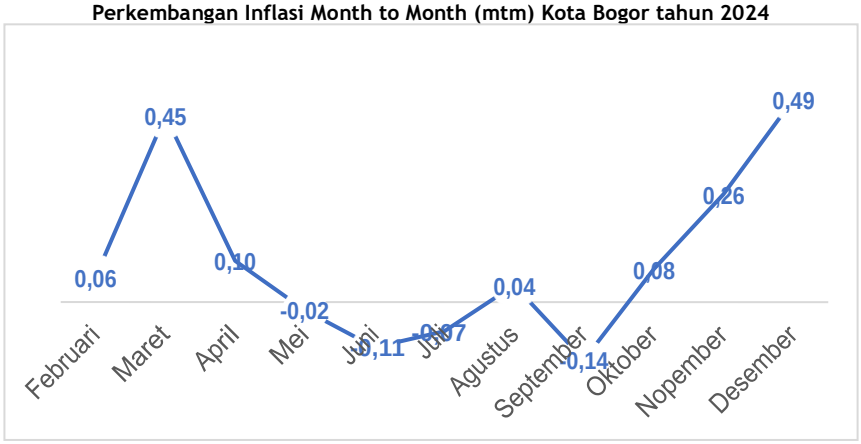
Tabel 2.1.9
Tingkat Inflasi Month to Month (mtm), Year to Date (ytd), dan Year on Year (yoy) 2021-2024 (Persen)

Tingkat Inflasi	2021	2022	2023	2024
Month to Month (mtm) Desember	0,56	0,49	0,22	0,49
Year to Date (ytd) Desember	1,93	5,82	3,36	1,75
Year on Year (yoy) Desember	1,93	5,82	3,36	1,75

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor Perkembangan Indeks Harga Konsumen,Desember 2024

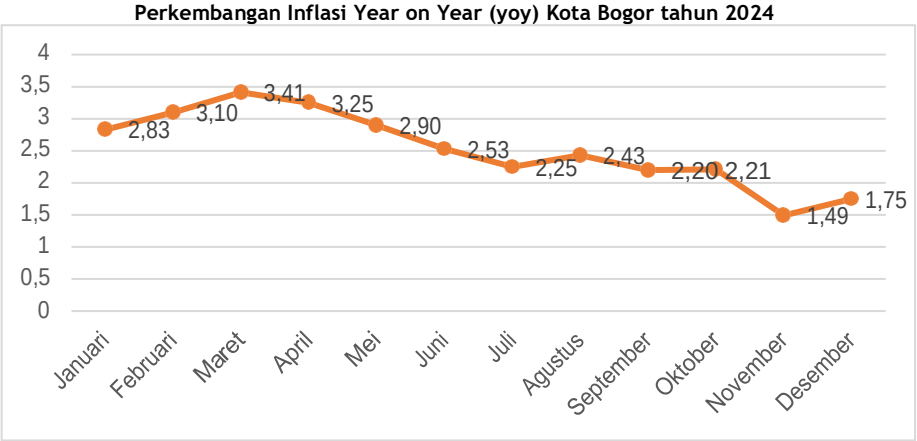
Pergerakan inflasi *month to month* (mtm) Kota Bogor 2024 terlihat pada Gambar 2 Inflasi mtm tertinggi terjadi pada bulan Desember 2024 sebesar 0,49% dan pada bulan September 2024 terjadi deflasi mtm sebesar 0,14%. Sementara pada Gambar 3 dapat dilihat perkembangan inflasi *year on year* (yoy) dari bulan Desember 2023 - Desember 2024.

Grafik 2.1.10
Perkembangan Inflasi Month to Month (mtm) Kota Bogor tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor Perkembangan Indeks Harga Konsumen,Desember 2024

Grafik 2.1.11
Perkembangan Inflasi Year on Year (yoy) Kota Bogor tahun 2024



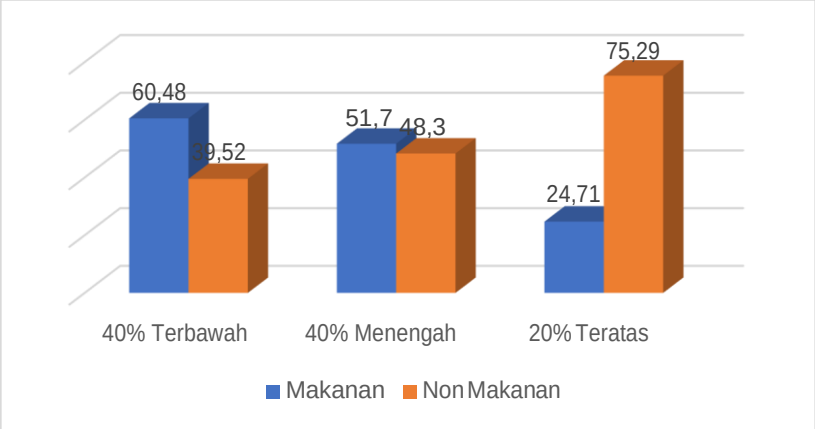
Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor Perkembangan Indeks Harga Konsumen,Desember 2024

2.1.5 Pemerataan kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan suatu kelompok masyarakat dapat diketahui dari tingkat pendapatan masyarakatnya. Namun, karena data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), tingkat kesejahteraan masyarakat diperoleh dengan pendekatan Pengeluaran Rumah Tangga. Rata - rata pengeluaran penduduk per kapita di Kota Bogor pada tahun 2024 adalah sebesar 2.470.557 rupiah per bulan, hal ini menurun dari tahun 2023 sebesar 2.733.270 rupiah per bulan, dengan pengeluaran untuk kelompok makanan sebesar 909.165 rupiah per kapita per bulan atau sebesar 36,80% dari jumlah pengeluaran, sedangkan untuk non makanan rata-rata pengeluaran sebesar 1.561.392 rupiah atau sebesar 63,20%. Baik tahun 2023 maupun 2024, secara rata-rata pengeluaran masyarakat Kota Bogor lebih banyak digunakan untuk pengeluaran non makanan. Hal ini mencirikan sebagian besar masyarakat Kota Bogor sudah beralih ke ciri masyarakat kelas menengah.

Tingkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari peningkatan PDRB per Kapita. Tetapi harus dievaluasi juga apakah tingkat kesejahteraan tersebut dinikmati secara merata oleh masyarakat. Dari hasil evaluasi terhadap indikator makro ekonomi Kota Bogor, ternyata Kesenjangan sosial diakibatkan oleh ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Bogor yang masih cukup tinggi. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi keluarga miskin belum maksimal, sehingga ketimpangan sosial semakin terlihat jelas. Kesempatan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya terlihat masih sangat timpang dibandingkan dengan keluarga pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih baik.

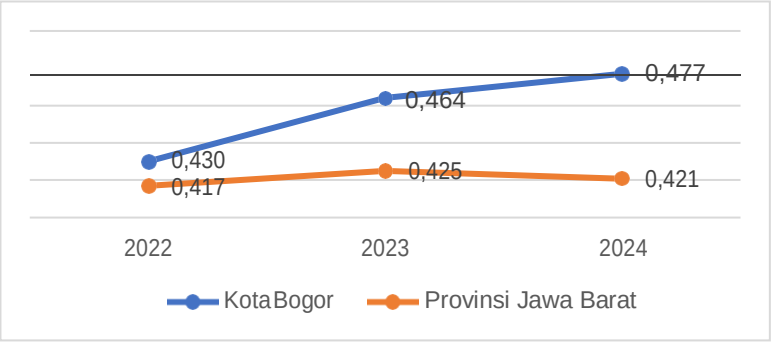
Tabel 2.1.12
Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan
Menurut Kelompok Komoditas dan Golongan Pengeluaran 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bogor dalam angka 2025

Apabila dilihat dari tabel diatas, kesenjangan antara pengeluaran per kapita penduduk dengan pengeluaran 20% atas dan penduduk dengan pengeluaran 40% bawah masih sangat tinggi dimana ada kesenjangan hampir berkisar 35,77% untuk masing-masing kelompok komoditas. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah yang cukup serius di Kota Bogor. Hal ini juga dapat dibuktikan dari indikator Gini Rasio Kota Bogor yang terus meningkat dalam 3 tahun terakhir, pada tahun 2024 berada di level 0,477. Berikut ini adalah gambaran perbandingan kondisi tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan indeks ketimpangan (gini rasio) sebagai berikut:

Grafik 2.1.13
Perbandingan Gini Rasio Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022 - 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2025

Kondisi ketimpangan kesejahteraan masyarakat yang terjadi di Kota Bogor sebagaimana dijelaskan pada grafik diatas terus mengalami peningkatan, pada tahun 2022 berada di level 0,430 tahun 2023 di level 0,464 serta pada tahun 2024 di level 0,477 dalam hal ini indeks gini rasio di Kota Bogor jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yang dimana pada tahun 2022 angka gini rasio Provinsi Jawa Barat berada dilevel 0,417 dan di tahun 2023 berada dilevel 0,425 serta tahun 2024 berada di level 0,421.

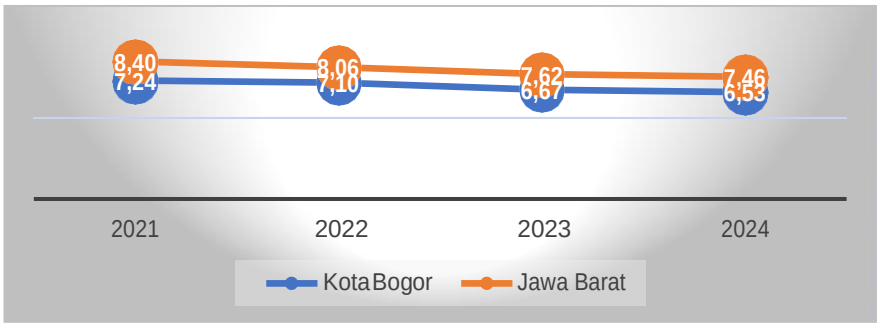
2.1.6 Angka Kemiskinan

Kemiskinan selalu menjadi isu strategis baik di tingkat Kota, di tingkat Provinsi maupun di tingkat nasional. Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak- hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Berdasarkan dari hasil evaluasi ada beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk penanggulangan kemiskinan antara lain adalah:

1. Angka Kemiskinan

   Angka Kemiskinan di Kota Bogor mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Di tahun 2024 dengan adanya berbagai upaya pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan maka persentase penduduk miskin menjadi 6,53%, atau mengalami penurunan sebesar 0,14% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 6,67%. Berikut adalah gambaran perkembangan penduduk miskin dari tahun 2020-2024.

Grafik 2.1.14
Persentase Perkembangan Penduduk Miskin Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2021 - 2024



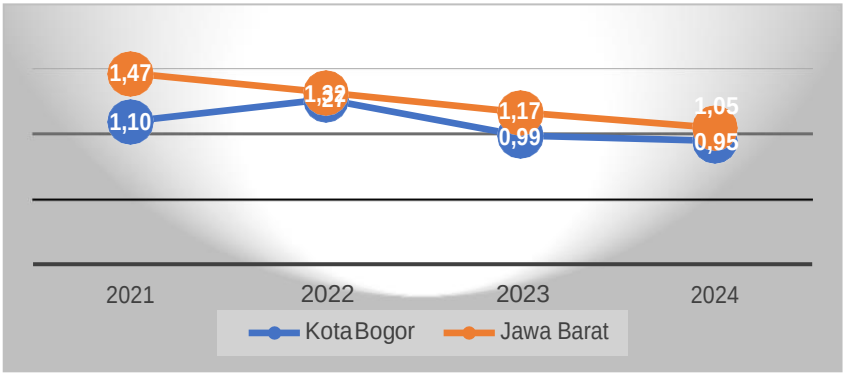
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2025

Bila dilihat pada grafik di atas, persentase penduduk miskin Kota Bogor mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 selalu berada dibawah Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini, dapat dibuktikan persentase penduduk miskin Kota Bogor pada tahun 2024 sebesar 6,53% sedangkan persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat sebesar 7,46%.

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1)*

Merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, Semakin tinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit, Kegunaan dari Nilai agregat dari *poverty gap index* adalah untuk mengetahui seberapa besar biaya untuk mengentaskan kemiskinan, Semakin kecil nilai *poverty gap index*, maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan untuk target sasaran bantuan dan program. Berikut gambaran indeks kedalaman kemiskinan dari tahun 2021-2024:

Grafik 2.1.15
Persentase Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2021 - 2024



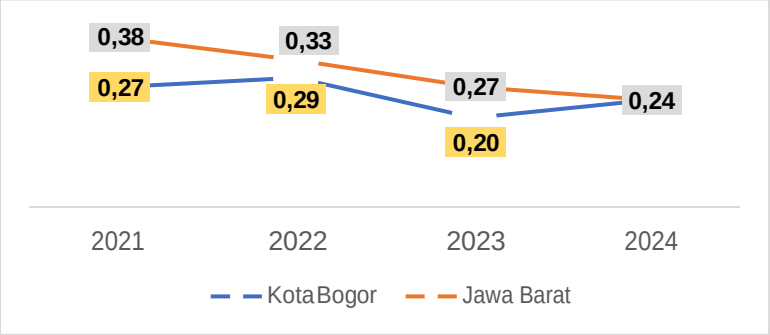
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2025

Grafik diatas menggambarkan bahwa untuk tahun 2021 sampai tahun 2024 Indeks kedalaman Kemiskinan Kota Bogor selalu dibawah Jawa Barat. Dalam hal ini indeks kedalam kemiskinan di Kota Bogor pada tahun 2024 sebesar 0,95% sedangkan indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Jawa Barat di tahun 2023 sebesar 1,05%.

3. Indeks Keparahan Kemiskinan *(Poverty Severity Index-P2)*

Merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator Keparahan Kemiskinan berfungsi untuk memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan, sebagai contoh mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin. Berdasarkan publikasi dari BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, berikut gambaran Indeks Keparahan kemiskinan dari tahun 2020-2024:

Grafik 2.1.16
Persentase Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2021 - 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2025

Grafik diatas menggambarkan bahwa pada tahun 2024 Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Bogor sama dengan Jawa Barat, dan mengalami peningkatan dari tahun 2023. Hal ini mengindikasikan semakin lebarnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, yang berarti kesenjangan ekonomi di kalangan masyarakat miskin semakin besar. Hal ini akan berimplikasi pada besaran pembiayaan program penanggulangan kemiskinan.

2.1.7 Kondisi Ketenagakerjaan

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir.Untuk melihat struktur penduduk bekerja, maka perlu diperhatikan karakteristiknya. Karakteristik penduduk bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 834.478 orang. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 561.986 orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 272.492 orang. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 516.284 orang penduduk yang bekerja dan 45.702 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2023, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 27.454 orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 31.950, sementara pengangguran turun sebanyak 4.496 orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dibandingkan Agustus 2023. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 67,35 persen, naik 2,54 persen poin dibandingkan Agustus 2023. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2024, TPAK laki-laki sebesar 83,71%, lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan yang sebesar 50,69%. Jika dibandingkan Agustus 2022, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,76% poin (dari 82,95% menjadi 83,71%) sedangkan yang perempuan mengalami kenaikan sebesar 1,34% poin (dari 46,32% menjadi 50,69%).

Tabel 2.1.17
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2022 — Agustus 2024

Bulan/ Tahun	Jenis Kelamin	Penduduk Usia Kerja (ribu)	Angkatan Kerja (ribu)	Bekerja (ribu)	Pengangguran Terbuka (ribu)	TPAK (%)	TPT (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Agustus 2022	Laki-laki	438,1	352,2	315,0	37,2	80,40	10,56
	Perempuan	428,7	204,3	181,6	22,8	47,66	11,15
	Total	866,8	556,5	496,6	60,0	64,21	10,78
Agustus 2023	Laki-laki	416,3	345,3	312,2	33,1	82,95	9,59
	Perempuan	408,5	189,2	172,1	17,1	46,32	9,04
	Total	824,8	534,5	484,3	50,2	64,81	9,39
Agustus 2024	Laki-laki	420,9	352,4	325,0	27,4	83,71	7,77
	Perempuan	413,5	209,6	191,3	18,3	50,69	8,74
	Total	834,5	562,0	516,3	45,7	67,35	8,13

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survey Angatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024

Pada Agustus 2024, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 56,58%, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar yaitu sebesar 2,69%. Dibandingkan Agustus 2023, status pekerjaan yang mengalami kenaikan persentase terbesar adalah status Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar dan Pekerja tak dibayar yaitu sebesar 2,04% poin. Sedangkan status pekerjaan yang mengalami penurunan persentase terbesar adalah status Buruh/ karyawan yaitu sebesar 4,48% poin Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Pada Agustus 2024, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 210.250 orang (40,72 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 306,040 orang (59,28 persen). Selama periode Agustus 2023 ke Agustus 2024 terjadi pergeseran kegiatan penduduk bekerja dari formal menjadi informal sebesar 3,91 persen poin. Tingginya persentase pekerja informal didorong leh tingginya peningkatan dan persentase pekerja dengan status pekerja dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar dan pekerja keluarga. Dibandingkan dengan keadaan Agustus 2022, pekerja formal berkurang sebanyak 3,4 persen poin.

Tabel 2.1.18
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2022 — Agustus 2024

Status Pekerjaan Utama	Agustus 2022		Agustus 2023		Agustus 2024	
	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Berusaha sendiri	103,6	20,87	107,5	22,20	116,4	22,55
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	27,3	5,50	20,9	4,31	32,8	6,35
Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	16,2	3,27	10,3	2,12	13,9	2,69
Buruh/ karyawan	294,8	59,37	295,8	61,06	292,1	56,58
Pekerja bebas	26,9	5,41	33,7	6,95	33,2	6,43
Pekerja tak dibayar	27,7	5,58	16,2	3,35	27,8	5,39
Jumlah	496,6	100,0	484,3	100,0	516,3	100,0

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survey Angatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024, adalah rencana kerja di tahun kelima pada masa pelaksanaan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, serta dalam konteks sebagai bagian dari perwujudan rencana pembangunan jangka menengah Kota Bogor dan dalam konteks perwujudan tahapan terakhir perencanaan lima tahunan dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025. Arah Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kota Bogor tentunya harus dilakukan penyelarasan dengan Arah Kebijakan Nasional dan Arah Kebijakan Provinsi Jawa Barat agar sinergis dalam pencapaian pembangunan.

Selain menyelaraskan terhadap arah kebijakan tersebut, seluruhnya mengarah pada pencapaian Visi RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 yaitu untuk mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga dan Visi RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025 yaitu mewujudkan Kota jasa yang nyaman dengan masyarakat madani dan pemerintahan yang amanah.

Pada tahapan tahun kelima dalam rencana pembangunan jangka menengah kota Bogor tahun 2019-2024 ini, fokus pembangunan Kota Bogor diarahkan kepada "Membangun Kemandirian Daerah" yang mengandung makna menumbuhkan inovasi secara pentahelix untuk meningkatkan daya saing daerah dan berkeadilan sosial, menciptakan kemampuan daya saing dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan kemandirian sumber daya daerah dan menciptakan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar. Kebijakan makro ekonomi yang dilakukan kota Bogor pada Tahun 2024 dalam membangun kemandirian daerah adalah sebagai berikut :

a. Memberikan stimulus untuk peningkatan daya saing ekonomi masyarakat terutama di bidang jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

b. Mendorong pemerataan pembangunan daerah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi disetiap wilayah yang mendorong pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
c. Meningkatkan daya tarik investasi dengan melakukan deregulasi dan integrasi perizinan investasi dalam rangka membuka kesempatan kerja seluas luasnya bagi masyarakat kota Bogor.
d. Mendorong untuk mempekerjakan tenaga kerja lokal kepada investor yang menanamkan modalnya di Kota Bogor.
e. Penguatan di sektor UMKM dengan mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), serta meningkatkan upaya strategis yang mampu menaikkan kelas UMKM ke dalam supply chain regional, nasional, dan internasional.
f. Penguatan SDM berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pelatihan vokasional.
g. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi kreatif.

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024 sebagai pelaksanaan agenda RPJPD Tahun 2005-2025 di tahun ke sembilan belas dan RPJMD Tahun 2019-2024 tahun ke-lima, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber – sumber pendanaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti APBN, APBD Provinsi, Alternatif pembiayaan, maupun kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Resposibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

2.2.1 KEBIJAKAN PENDAPATAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022 mempunyai semangat untuk mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: (1) mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, (2) mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, (3) mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta (4) harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Reklasifikasi pajak 5 jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak yaitu PBJT, pemberian kewenangan pemungutan opsen antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, rasionalisasi jumlah retribusi dari 32 jenis menjadi 18 jenis pelayanan serta penetapan tarif pajak dan retribusi yang berlaku secara nasional akan berdampak besar kepada Pendapatan Asli Daerah. Pengaturan kembali tentang pajak dan retribusi yang akan dipungut, tarif serta tata cara pemungutan dibuat dalam satu peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang sudah harus terbit paling lama 2 tahun sejak UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah ditetapkan.

Untuk itu, arah kebijakan PAD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor pada tahun 2024 adalah:

1. Melakukan penyesuaian tarif untuk jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak penerangan jalan menjadi 10% kecuali pajak hiburan atas spa, karaoke dan diskotek;
2. Melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak BPHTB dari Rp.60 juta menjadi Rp.80 juta;
3. Melakukan penyesuaian jenis layanan yang dapat dijadikan objek retribusi dengan menghapuskan 8 jenis retribusi yang dipungut pada tahun 2023 ke belakang;
4. Penambahan kesiapan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan implementasi Undang-Undang tersebut.

Selain kebijakan-kebijakan tersebut, upaya yang selama ini telah dilakukan dalam hal mengoptimalkan pendapatan asli daerah akan tetap dilakukan seperti:

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah untuk mendorong pemerintah provinsi dan atau pusat dalam hal kebijakan atau aturan yang mendukung pemerintah daerah;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah serta penatausahaan pendapatan;
4. Mengoptimalkan penagihan piutang pajak dan retibusi daerah;
5. Mengoptimalkan pengelolaan badan usaha milik daerah untuk dapat meningkatkan bagian laba untuk pemerintah daerah melalui pelaksanaan audit kinerja; dan
6. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah terkait pemanfaatan kekayaan daerah.

Kebijakan pendapatan transfer tahun anggaran 2024 adalah:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Kementerian Keuangan khususnya dalam pengelolaan pajak penghasilan sebagai salah satu sumber pendapatan dana transfer; dan
2. Mengoptimalkan pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber pendapatan dari dana transfer.

2.2.2 KEBIJAKAN BELANJA

Kebijakan perencanaan belanja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan perencanaan belanja operasi sebagai berikut:
   A. Belanja Pegawai
      1) Penganggaran Belanja Pegawai dengan proporsi sesuai ketentuan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
      2) Belanja gaji dan tunjangan disesuaikan dengan kebutuhan tahun 2024 dengan alokasi 14 bulan;
      3) Belanja TPP dialokasikan sampai dengan Desember dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024;

4) Belanja Non ASN dianggarkan maksimal sama dengan jumlah Non ASN Tahun 2023 (Keamanan, Pengemudi, Kebersihan);
5) Belanja Non ASN yang masuk pagu masing-masing perangkat daerah terdiri dari jasa kebersihan, keamanan dan pengemudi yang dihitung 13 bulan serta BPJS yang dihitung selama 12 bulan sesuai dengan standar harga satuan jasa tahun 2024;
6) Non ASN tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai/Insentif Pemungutan Pajak Retribusi;
7) Penganggaran belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan (BUD/Kuasa BUD, PA/KPA, PPK-SKPD, PPTK, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu) dan honorarium pengadaan barang dan jasa maksimal sebesar 10% dari Pagu SKPD diluar Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan;
8) Spesifikasi yang dapat diambil untuk honor BUD/Kuasa BUD, PA/KPA, PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu adalah Pagu SKPD diluar Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan.

B. Belanja Barang dan Jasa
1) Untuk data masyarakat miskin dan peneriman hibah/bantuan sosial
2) Belanja air, listrik, telepon dianggarkan untuk kebutuhan 12 bulan
3) Penganggaran BLUD alokasi sesuai dengan target pendapatan 2024
4) Alokasi PBI disesuaikan dengan proporsi penyediaan anggaran oleh Kota Bogor sebagaimana surat usulan penganggaran yang diajukan ke Provinsi Jawa Barat tahun 2024
5) Alokasi BOS sesuai dengan jumlah siswa yang ada pada dapodik tahun 2023;
6) Belanja persediaan untuk operasional kantor dialokasikan pada sub kegiatan:
   a. Penyediaan komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
   c. Penyediaan Peralatan Rumah tangga
   d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7) Belanja persediaan untuk operasional kantor dialokasikan pada sub kegiatan Pemeliharaan BMD
8) Pemeliharaan BMD dan Pengadaan BMD harus mengacu pada Dokumen RKBMD
9) Pemeliharaan kendaraan hanya untuk kendaraan dinas yang tercatat pada Daftar Barang Milik Daerah Kota Bogor dan masih digunakan menunjang tugas dan fungsi
10) Kendaraan yang rusak berat dan kendaraan yang bersifat rekondisi atau overhaul, tidak dianggarkan lagi untuk pemeliharaan, diusulkan untuk dihapuskan dari daftar inventaris;
11) Harga satuan pemeliharaan kendaraan mengacu pada Standar Harga Satuan Jasa 2024;
12) Harga satuan pemeliharaan kendaraan dinas pejabat atau kendaraan dinas operasional sudah termasuk BBM;
13) Menganggarkan Pajak untuk semua kendaraan yang tercatat pada Daftar Barang Milik Daerah Kota Bogor, kecuali yang rusak berat;
14) Pemberian Honorarium Posyandu, Kader Posbindu, Kader RW Siaga, Kader Kelurahan Siaga Aktif, mengacu pada jumlah kader sesuai dengan tahun anggaran 2023 dan

Standar Harga Satuan Jasa 2024. Tidak ada penambahan jumlah kader (sesuai kemampuan keuangan daerah

15) Pemberian Honorarium RT, RW dan LPM disesuaikan dengan Standar Harga Satuan Jasa 2024;
16) Pemberian Honorarium ASN Kota Bogor hanya diperkenankan untuk:
    a. Honorarium penanggungjawab pengelolaan keuangan;
    b. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
    c. Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa di luar pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa pada Bagian PBJ.
17) Tidak ada honorarium lembur untuk ASN;
18) Honorarium Lembur dapat diberikan kepada non ASN yang menangani kejadian bencana pada saat kejadian bencana, hari Kemerdekaan RI, Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru;
19) Perjalanan Dinas dalam kota untuk ASN dan Non ASN Pemerintah Kota Bogor diperkenankan hanya untuk anggaran yang bersumber dari dana transfer sesuai juklak dan juknis yang berlaku;

20) Belanja perjalanan dinas untuk mobilitas dari tempat tujuan,melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula, dengan pengaturan sebagai berikut:
    a. untuk pegawai Pemerintah Kota Bogor dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, dengan ketentuan:
        i. dalam rangka koordinasi/konsultasi atas inisiatif perangkat daerah dengan jumlah peserta paling banyak 3 (tiga) orang termasuk pengemudi;
        ii. dalam rangka memenuhi undangan dengan jumlah peserta paling banyak 4 (empat) orang termasuk pengemudi, sepanjang tidak ditentukan lain dalam surat undangan;
        iii. dalam rangka studi banding, kunjungan kerja, dan atau sejenisnya atas inisiatif sendiri dengan maksimal jumlah peserta 10 (sepuluh) orang, dianggarkan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk 1 (satu) perangkat daerah;
    b. untuk narasumber pada kegiatan atau saksi yang dibutuhkan dan atau dihadirkan oleh Pemerintah Kota Bogor;
21) Pertemuan di luar kantor yang dilaksanakan oleh perangkatdaerah berupa rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan atau sejenisnya dengan ketentuan sebagai berikut:
22) Penyediaan makan dan minum, dengan ketentuan sebagai berikut:
23) Setiap aktivitas dalam rincian belanja agar mendukung prioritas penanganan Kemiskinan, Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan, Stunting, Kota Layak Anak (KLA),Pengendalian Inflasi,Peningkatan Potensi Investasi dan Gender.

C. Belanja bunga
    1) Pembayaran bunga atas pinjaman PDAM kepada World Bank;
    2) Pembayaran bunga atas pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional(PEN).
D. Belanja hibah dan belanja bantuan sosial:

Belanja hibah bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Belanja Hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang undangan. Daftar penerima hibah dan bantuan sosial sudah terdaftar pada aplikasi SAHABAT dan telah di lakukan verifikasi oleh OPD verifikator yang sudah masuk kedalam RKPD Kota Bogor.

2. Kebijakan perencanaan belanja modal sebagai berikut:
   1) Belanja modal harus memperhatikan batasan nilai kapitalisasi dan masa manfaat lebih dari 12 bulan, batasan nilai kapitalisasi mengacu pada Peraturan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bogor;
   2) Pemenuhan fasilitas kendaraan dinas jabatan secara selektif, efektif dan efisien;
   3) Belanja kegiatan fisik yang anggarannya bersumber bukan dari dana transfer dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan lebih dari 3 (tiga) bulan wajib didasarkan pada sudah tersedianya dokumen perencanaan pada tahun sebelumnya;
   4) Belanja pengadaan tanah didasarkan pada dokumen Rencana Pengadaan Tanah sesuai ketentuan yang berlaku;
   5) Rencana Belanja Modal harus didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
3. Kebijakan perencanaan belanja tidak terduga sebagai berikut:
   Perencanaan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan memperhitungkan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam Kegiatan dan Sub kegiatan pada tahun anggaran 2024.
4. Kebijakan perencanaan belanja transfer sebagai berikut:
   Terlaksananya bantuan kompensasi dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar TPAS Galuga sesuai pasal 9 Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor Nomor 119/37/PKS/KS/XII/2020 dan Nomor 658.1-DLH/2020 tentang Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Galuga di Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor tanggal 30 Desember 2020.

2.2.3 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

2.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan Pemerintah Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan sumber-sumber SiLPA dimaksud;
2. Penerimaan Cicilan Utang PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor; dan

3. Penerimaan pembiayaan dari pencairan dana cadangan dianggarkan pada pos-pos belanja sesuai dengan tujuan pembentukan dana cadangan tersebut;

2.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran cicilan pokok utang terkait
   a. Penerusan pinjaman dari World Bank kepada Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk PDAM Tirta Pakuan;
   b. Pinjaman PEN Daerah Kota Bogor
2. Pencairan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Laporan Realisasi APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2024, realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor mencapai Rp 3.170.497.628.555,24 atau mencapai 99,30% dari target semula yang ditetapkan sebesar Rp3.192.710.048.074,00. Pada sisi lain, Realisasi Belanja dan Transfer mencapai Rp3.178.466.734.133,00 atau 96,88% dari anggaran yang ditetapkan semula sebesar Rp3.280.812.122.537,00 sehingga berdasarkan selisih pendapatan dan belanja terdapat defisit sebesar Rp7.969.105.577,76.

Pada aspek pembiayaan terdapat Pembiayaan Neto sebesar Rp92.904.697.264,14 dari yang dianggarkan sebesar Rp88.102.074.463,00. Dengan demikian di dalam Tahun Anggaran 2024 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp84.935.591.686,38.

Sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, Negara Indonesia memiliki konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang menjamin setiap warganya untuk hidup sesuai dengan hak-haknya dan berupaya untuk mewujudkan tujuan-tujuannya, serta mengatur semua permasalahan yang menyangkut pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pelayanan terhadap rakyatnya tidak mungkin terpusat pada pemerintah pusat, tetapi harus didistribusikan pada pemerintah daerah yang menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Pemerintahan daerah dibentuk dengan tujuan mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya otonomi, daerah diharapkan akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah tanpa intervensi dari pihak lain, yang disertai dengan pertanggungjawaban publik, serta pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, sebagai konsekuensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan di daerah yang merupakan sasaran pembangunan daerah, pemerintah daerah menerima penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (asas desentralisasi). Kewenangan daerah ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang dikecualikan dalam undang-undang, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional dan agama. Selain pemberlakuan asas desentralisasi, penyelenggaraan pemerintahan di daerah pun berprinsip pada asas dekonsentrasi, yaitu urusan-urusan pemerintahan yang diserahkannya ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan tugas pembantuan, yaitu tugas-tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Urusan yang ditugaskan itu sepenuhnya masih menjadi wewenang pemerintah pusat atau provinsi.

Untuk membiayai belanja rumah tangga pemerintah daerah dalam mengemban penyerahan wewenang pemerintahan, pemerintah pusat memberi sumber-sumber keuangan, pengalokasian dana perimbangan, dan pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah. Umumnya, sebagian besar sumber keuangan daerah berupa bantuan pemerintah pusat.

Kebijakan keuangan daerah tercermin pada kebijakan fiskal atau anggaran daerah, dan kebijakan ini termasuk bagian dari kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan, sehingga kebijakan penganggaran daerah harus ditangani dengan sebaik-baiknya. Pengumpulan dan penggunaan dana harus

disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Pendapatan pemerintah daerah harus selalu meningkat, sedangkan pengeluaran harus dilakukan seefisien mungkin sehingga sumber-sumber dana daerah dapat dimanfaatkan dengan baik.

Pada Tahun Anggaran 2024 anggaran Belanja dan Transfer Daerah Kota Bogor ditetapkan sebesar Rp3.280.812.122.537,00 direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.461.100.063.862,00 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp1.731.609.984.212, sehingga akan menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp88.102.074.463,00 yang ditutup melalui pembiayaan netto.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor selama Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.1
Ikhtisar Target Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Daerah	1.461.100.063.862,00	1.458.619.452.757,24	(2.480.611.104,76)	99,83
Pendapatan Transfer	1.731.609.984.212,00	1.711.878.175.798,00	(19.731.808.414,00)	98,86
Jumlah Pendapatan Daerah	**3.192.710.048.074,00**	**3.170.497.628.555,24**	**(22.212.419.518,76)**	**99,30**
BELANJA				
Belanja Operasi	2.846.195.789.921,00	2.774.250.053.629,00	(71.945.736.292,00)	97,47
Belanja Modal	426.595.630.347,00	400.367.986.619,00	(26.227.643.728,00)	93,85
Belanja Tidak Terduga	6.359.952.269,00	2.187.943.885,00	(4.172.008.384,00)	34,40
Belanja Transfer	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00	-	100
Jumlah Belanja Daerah	**3.280.812.122.537,00**	**3.178.466.734.133,00**	**(102.345.388.404,00)**	**96,88**
Surflus/(Defisit)	**(88.102.074.463,00)**	**(7.969.105.577,76)**	**80.132.968.885,24**	**9,05**
PEMBIAYAAN DAERAH				
Penerimaan	98.396.220.459,00	225.089.463.440,14	126.693.242.981,14	228,76
Pengeluaran	10.294.145.996,00	132.184.766.176,00	121.890.620.180,00	1.284,08
Pembiayaan Netto	**88.102.074.463,00**	**92.904.697.264,14**	**4.802.622.801,14**	**105,45**
SILPA	**0,00**	**84.935.591.686,38**	**84.935.591.686,38**	**0,00**

Tabel diatas memperlihatkan bahwa pada Tahun 2024 realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bogor kurang dari target yang telah ditetapkan. Selisih (kurang) realisasi Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp22.007.792.966,76 atau 0,69% dari target tahun 2024 dengan rincian selisih (kurang) realisasi Pendapatan Asli Daerah dari target tahun 2024 sebesar Rp2.275.984.552,76 atau 0,16%, selisih (kurang) realisasi Pendapatan Transfer dari target tahun 2024 sebesar Rp19.731.808.414,00 atau 1,14% dari target tahun 2024.

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Pemerintah Kota Bogor pada Tahun 2024 tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Belanja daerah ini merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor untuk mendanai seluruh kegiatan/program yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap layanan publik di Kota Bogor.

Realisasi belanja dan transfer Pemerintah Kota Bogor pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp3.178.466.734.133,00 atau 96,88% dari target belanja dan transfer yang telah ditetapkan sebesar Rp3.280.812.122.537,00.

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran, dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp88.102.074.463,00 dapat direalisasikan sebesar Rp224.884.836.888,14 atau 228,55% yang berasal dari Silpa tahun anggaran sebelumnya, pencairan Dana Cadangan, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek, realisasi pembiayaan pada BLUD RSUD Kota Bogor

sebesar Rp126.700.000.000,00 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, struktur anggaran BLUD terdiri dari pendapatan BLUD, belanja BLUD dan pembiayaan BLUD, pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp132.184.766.176,00 dialokasikan untuk Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Jangka Panjang dan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek dan pembayaran pembiayaan BLUD RSUD Kota Bogor sebesar Rp126.700.000.000,00.

3.2 Alokasi Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2024

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain:

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan secara memadai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   a. dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang kurangnya 40% sampai dengan TA 2027;
   b. belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.
   c. belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa adalah belanja bagi hasil dan/atau transfer yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain bagi hasil Pajak provinsi kepada kabupaten/kota, bagi hasil Pajak dan Retribusi kabupaten/kota kepada desa, dan transfer kepada desa yang berasal dari DD dan ADD.

Adapun anggaran dan realisasi hal tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Bidang Pendidikan pada Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp895.865.215.557,00 atau 27,31% dari total Belanja Daerah, dengan realisasi sebesar Rp868.740.399.519,00 atau mencapai 27,33% dari total Belanja Daerah. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan Anggaran dan Realisasi Bidang Pendidikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.1
Anggaran dan Realisasi Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2024

No	Komponen Perhitungan				Pagu	Realisasi
1	a.	**Urusan Bidang Pendidikan**			**805.097.967.641**	**782.323.664.578**
		1)	Belanja Operasi		646.465.864.001	632.394.257.049
			a.	belanja pegawai	417.417.805.517	411.523.819.786
			b.	belanja barang dan jasa	144.574.032.484	137.910.962.933
			c.	belanja hibah	79.332.930.000	77.943.678.330
			d.	belanja bantuan sosial	5.141.096.000	5.015.796.000
		2)	Belanja Modal		158.632.103.640	149.929.407.529
	b.	**Urusan Bidang Kebudayaan**			**1.815.514.200**	**1.780.063.764**
		1)	Belanja Operasi			
			a.	belanja pegawai	28.100.000	24.200.000
			b.	belanja barang dan jasa	1.787.414.200	1.755.863.764
			c.	belanja hibah		
			d.	belanja bantuan sosial		
	c.	**Urusan Bidang Perpustakaan**			**364.924.400**	**326.820.950**
		1)	Belanja Operasi			
			a.	belanja pegawai	17.460.000	16.460.000
			b.	belanja barang dan jasa	220.744.400	212.650.150
			c.	belanja hibah		
			d.	belanja bantuan sosial		
		2)	Belanja Modal		126.720.000	97.710.800
	d.	**Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**			**17.880.012.600**	**17.837.081.225**
		1)	Belanja Operasi			
			a.	belanja pegawai	72.120.000	61.230.000
			b.	belanja barang dan jasa	5.332.392.600	5.300.351.225
			c.	belanja hibah	10.635.000.000	10.635.000.000
			d.	belanja bantuan sosial		
		2)	Belanja Modal		1.840.500.000	1.840.500.000
	e.	**Belanja diluar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Pe**			**71.071.721.116**	**66.799.589.952**
		1)	Belanja Transfer		-	-
			Belanja Bantuan Keuangan		-	-
		2)	Sub Kegiatan pada SKPD			
			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
			1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	30.240.000	30.240.000
			2	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	43.358.736.200	43.219.714.901
			SEKRETARIAT DAERAH			
			1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	46.800.000	46.800.000
			2	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10.328.070.400	10.178.694.651
			DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			
			1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	61.597.600	61.207.600
			2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	40.761.752	40.546.100
			3	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	62.306.800	62.306.800
			4	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	49.039.800	44.589.800
			5	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	9.479.800	8.468.400
			6	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	836.477.700	833.712.360
			DINAS KESEHATAN			
			1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.366.714.000	5.200.400.000
			2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	640.850.000	620.850.000
			3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.394.842.390	1.022.594.290
			4	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	56.968.000	56.968.000

No	Komponen Perhitungan	Pagu	Realisasi
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	250.853.500	230.539.500
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	269.999.700	214.533.650
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	41.600.000	41.580.000
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	185.652.000	184.455.000
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	7.851.500	7.171.500
2	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	507.325.000	498.275.500
3	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	248.500.000	244.269.800
4	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	193.500.000	190.087.720
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	-	
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	36.101.900	36.101.900
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.023.328.426	992.595.200
3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	69.145.429	68.501.429
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	362.783.600	357.125.000
5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.938.408.000	1.932.722.351
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan	96.828.400	96.790.000
2	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	40.000.000	39.999.900
3	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	51.120.000	51.105.000
	DINAS SOSIAL		
1	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan	84.871.000	81.304.000
2	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	43.400.000	37.990.000
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	67.349.600	67.349.600
	DINAS TENAGA KERJA		
1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	9.627.900	9.049.000
2	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	3.260.590.719	3.227.585.128
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)	895.865.215.557	868.740.399.519
3	Total Belanja Daerah	3.280.812.122.537	3.178.466.734.133
4	Rasio Anggaran Pendidikan (2:3) x 100%	27,31	27,33

2. Anggaran Bidang Kesehatan pada Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp740.182.691.033,00 atau 27,42% dari total Belanja Daerah diluar gaji, dengan realisasi sebesar Rp727.344.426.548,00 atau mencapai 27,92% dari total Belanja Daerah diluar gaji. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan Anggaran dan Realisasi Bidang Kesehatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.2
Anggaran dan Realisasi Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	a Belanja pada Dinas Kesehatan	357.555.195.118,00	333.752.412.788,00	93,34
	1) Belanja Operasi	342.709.092.361,00	322.320.205.714,00	94,05
	a. Belanja Pegawai	149.207.649.336,00	142.386.298.238,00	95,43
	b. Belanja Barang dan Jas	192.305.443.025,00	178.746.028.287,00	92,95
	c. Belanja Hibah	1.196.000.000,00	1.187.879.189,00	99,32
	2) Belanja Modal	14.846.102.757,00	11.432.207.074,00	77,00
	b Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang kesehatan, antara lain	382.627.495.915,00	393.592.013.760,00	102,87
	1) Belanja Transfer			
	Belanja Bantuan Keuangan			
	2) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah	18.707.180.401,00	18.258.203.336,00	97,60
	4) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah	39.381.010.841,00	39.266.988.308,00	99,71
	5) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah	324.539.304.673,00	336.066.822.116,00	103,55
2	Anggaran Kesehatan (a+b)	740.182.691.033,00	727.344.426.548,00	98,27
3	Total Belanja Daerah	3.280.812.122.537,00	3.178.466.734.133,00	96,88
4	Gaji ASN	581.730.632.816,00	572.966.490.524,00	98,49
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	2.699.081.489.721,00	2.603.880.822.295,00	
	Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	**27,42**	**27,92**	

3. Anggaran Belanja infrastruktur pada tahun 2024 mencapai Rp579.537.311.824,00 atau 17,67% dari total belanja daerah dikurangi belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa dengan realisasi sebesar Rp550.210.132.596,00 atau mencapai 17,32%.

Tabel 3.2.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2024

A	PERHITUNGAN BELANJA BAGI HASIL DAN/ATAU TRANSFER KEPADA DAERAH/DESA			
No	**Komponen Perhitungan**	**Anggaran**	**Realisasi**	**Persentase**
1	Total Belanja Daerah	3.280.812.122.537,00	3.178.466.734.133,00	96,88
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/ atau desa			
	a) belanja bagi hasil	0,00	0,00	
	b) bantuan keuangan	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00	100,00
	Jumlah (a+b)	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00	100,00
3	Selisih	3.279.151.372.537,00	3.176.805.984.133,00	
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	1.311.660.549.014,80	1.270.722.393.653,20	96,88
B	PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR			
No	**Komponen Perhitungan**	**Anggaran**	**Realisasi**	**Persentase**
1	a)Belanja Modal			
	1) Tanah	5.425.147.300,00	2.477.717.100,00	45,67
	2) peralatan dan mesin	144.788.452.254,00	133.226.642.367,00	92,01
	3) bangunan dan gedung	150.827.313.763,00	141.166.601.172,00	93,59
	4) jalan,jaringan dan irigasi	114.562.031.641,00	112.729.496.656,00	98,40
	5) aset tetap lainnya	10.917.685.389,00	10.693.173.754,00	97,94
	b) Belanja Pemeliharaan	119.191.646.477,00	116.798.066.547,00	97,99
2	a) Belanja Hibah			
	b) Belanja Batuan Sosial	33.825.035.000,00	33.118.435.000,00	97,91
	c) Bantuan Keuangan			
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	579.537.311.824,00	550.210.132.596,00	94,94
4	Persentase Belanja Infrastruktur	17,67	17,32	

3.3 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara umum faktor-faktor yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja keuangan tahun anggaran 2024, yaitu :

1. Adanya kebutuhan pendanaan untuk belanja daerah yang melebihi dari pendapatan daerah;
2. Pendapatan Daerah pada APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2024 masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah dan pemerintah provinsi yaitu sebesar 54,24%
3. Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran;
4. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi dalam rangka menjamin keselarasan antara dokumen perencanaan dan implementasi pelaksanaan program;
5. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam menyusun Analisa Beban Kerja dan target SKPD.

BAB IV
DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Pendahuluan

4.1.1 Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Bogor untuk tujuan umum dalam rangka membandingkan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Tujuan khusus kebijakan akuntansi adalah memberikan acuan bagi:

a. Penyusun laporan keuangan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan;
b. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
c. Pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.1.2 Ruang Lingkup

Dalam pemerintah daerah terdapat 2 (dua) jenis entitas yang menyusun laporan keuangan yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Adapun penjelasan kedua entitas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas Akuntansi yang ada pada Pemerintah Daerah adalah seluruh SKPD pemerintah daerah dan SKPKD selaku entitas yang mengelola keuangan pada level Pemerintah Daerah. Keduanya mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini selanjutnya digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.
b. Entitas pelaporan adalah satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan keuangan. Dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah. Adapun laporan keuangan yang harus disajikan oleh Pemerintah Daerah adalah LRA, LPSAL, Neraca, LO, LPE, LAK, dan CALK. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

4.1.3 Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Dalam basis akrual ini, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, basis kas masih digunakan dalam rangka penyusunan LRA sepanjang dokumen anggaran disusun berdasarkan basis kas.

4.1.4 Aplikasi Akuntansi

Aplikasi Akuntansi yang digunakan sejak tahun anggaran 2018 hingga sekarang adalah Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Daerah atau SIMRAL.

4.2 Asumsi Dasar Akuntansi

4.2.1 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Penyajian informasi untuk tujuan akuntabilitas ini antara lain dilakukan:

1. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. Menyediakan informasi yang dapat sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai cara entitas pelaporan mendanai mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan-LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;
9. Pendapatan-LO;
10. Beban; dan
11. Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

4.2.2 Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan

Pimpinan entitas baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

4.2.3 Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran *(budgetary report)* dan laporan finansial *(financial report)* sehingga laporan keuangan pemerintah daerah yang lengkap terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
6. Laporan Arus Kas (LAK); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas kecuali LAK dan Laporan Perubahan SAL yang hanya dibuat oleh BLUD dan entitas pelaporan.

4.2.4 Bahasa Laporan Keuangan

Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal dan posisi dan cakupan periode). Selanjutnya, laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan untuk periode atau waktu yang sama dengan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

4.2.5 Mata Uang Pelaporan

Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penyajian neraca, aset dan/atau kewajiban dalam mata uang lain selain dari rupiah harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan kurs menggunakan kurs tengah Bank Sentral. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka :

1. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
2. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal transaksi.

Keuntungan dan kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAP, IPSAP dan Buletin Teknis SAP serta peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang transaksi dalam mata uang asing.

4.2.6 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material sesuai dengan ketentuan dalam PSAP. Kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang:

1. Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan;
2. Dapat diandalkan, dengan pengertian:
   a. Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas;
   b. Menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
   c. Netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
   d. Mencerminkan kehati-hatian; dan
   e. Mencakup semua hal yang material.
3. Dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya;
4. Dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna.

Dalam melakukan pertimbangan untuk penetapan kebijakan akuntansi, pemerintah daerah memperhatikan :

1. Persyaratan dan pedoman PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
2. Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan dan PSAP; dan
3. Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.

4.2.7 Penyusunan Laporan Keuangan

1. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut ukuran likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
3. Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
4. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis dengan ukuran penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontijensi serta transaksi-transaksi lainnya.

5. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan ukuran kualitatif seperti "sebagian besar" untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.
6. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Perubahan estimasi akuntansi.

      Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya.

      Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan dalam LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Misalnya, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya diungkapkan dalam CaLK.
   b. Perubahan Kebijakan Akuntansi.

      Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila :
      (1) Penetapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau SAP yang berlaku;
      (2) Diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.
      (3) Kesalahan Mendasar.

          Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode penyajian.

4.2.8 Konsistensi

1. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari satu periode ke periode lain oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal), Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi lainnya. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam CaLK.
2. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali :
   a. Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas pemerintahan daerah; atau
   b. Perubahan tersebut diperkenankan oleh PSAP.
3. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya tidak perlu direklasifikasi tetapi harus diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

4.2.9 Materialitas dan Agregasi

1. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
2. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan, pos-pos yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi sejenis.
3. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam pencatatan informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.

4.2.10 Periode Pelaporan

Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim, misalnya pada saat terbentuknya entitas baru. Penyajian laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek dari tahun takwim dijelaskan dalam CaLK.

4.2.11 Informasi Komparatif

1. Laporan keuangan tahunan dan interim disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Khusus neraca interim, disajikan secara komparatif dengan neraca akhir tahun sebelumnya. LO dan LRA interim disajikan mencakup periode sejak awal tahun anggaran sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan.
2. Informasi komparatif yang bersifat negatif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

4.2.12 Laporan Keuangan Interim

1. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan diantara dua laporan keuangan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan laporan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, atau semesteran.
2. Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca, LRA, LO, LAK, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan SAL, dan CaLK.

4.2.13 Laporan Keuangan Konsolidasian

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian untuk mendapatkan laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan, PPKD menggabungkan laporan keuangan entitas satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pembiayaan, belanja, dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut :

a. Transaksi dan saldo resiprokal antara Bendahara Umum Daerah (BUD) dan entitas akuntansi dieliminasi.
b. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis.
c. Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

4.3 Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan untuk tujuan umum terdiri dari :

4.3.1 Laporan Realisasi Anggaran

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. LRA menyajikan informasi mengenai ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/SKPKD/Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran Pemerintah Daerah. LRA menggunakan basis kas dalam pencatatannya.

4.3.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

4.3.3 Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4.3.4 Laporan Operasional

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas. Berbeda dengan LRA, LO menggunakan basis akrual dalam pencatatannya.

4.3.5 Laporan Arus Kas

LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan, pengeluaran, dan perubahan kas dan setara kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

4.3.6 Laporan Perubahan Ekuitas

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

4.3.7 Catatan Atas Laporan Keuangan

CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CaLK sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

1) informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah APBD Kota Bogor, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
2) ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
3) informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
4) pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
5) informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
6) daftar dan tabel.

Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapanpengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

4.4 Keterbatasan Laporan Keuangan

Pengambilan keputusan ekonomi tidak semata-mata didasarkan pada informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan mempunyai keterbatasan, antara lain yaitu:

1. Bersifat historis, yaitu pencatatan atas transaksi atau peristiwa yang telah lampau akan terus dibawa dalam laporan keuangan. Hal ini berakibat pada revaluasi yang berakibat pada naiknya nilai aset dibandingkan pada periode sebelumnya;
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan;
3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran;
4. Hanya melaporkan informasi yang bersifat material;
5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, yang artinya apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan pendapatan bersih atau nilai aset yang paling kecil; dan
6. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas).

4.5 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

4.5.1 Definisi

Kas Pemerintah Daerah terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOS, dan Kas Dana Kapitasi. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Termasuk dalam kategori kas adalah setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Kas Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah. Kas pemerintah daerah tersebut terdiri dari:

1) Saldo rekening kas daerah, yaitu setiap saldo rekening pada bank yang digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
2) Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN) dan Deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
3) Uang tunai di bendahara umum daerah.

Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah terdiri dari:

1) Kas di Bendahara Pengeluaran
2) Kas di Bendahara Penerimaan.
3) Kas di BLUD
4) Kas Dana BOS
5) Kas Dana Kapitasi
6) Kas Lainnya

4.5.2 Pengakuan

Kas diakui pada saat memenuhi definisi kas dan/atau setara kas yaitu ketika kas diterima oleh Bendahara/Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh Bendahara/Rekening Kas Umum Daerah. Selain itu juga, ketika penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah. Kas dijurnal di posisi debit jika bertambah dan di posisi kredit jika berkurang

4.5.3 Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca

4.5.4 Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian kas dan setara kas di neraca dan laporan arus kas harus menunjukkan posisi kas pada tanggal laporan keuangan dan menunjukkan asal usul kas.

Selanjutkan informasi terkait pengungkapan kas dan setara kas dijelaskan, diperinci dan diberikan analisa dalam CaLK. Beberapa hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK antara lain:

a. penjelasan dan sifat serta penggunaan dari rekening yang dimiliki dan dikuasai pemerintah;
b. pengungkapan informasi penting lainnya terutama yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan.

4.6 Kebijakan Akuntansi Piutang

4.6.1 Definisi

Buletin Teknis SAP Nomor 02 tahun 2005 menyatakan piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Piutang juga dapat didefinisikan sebagai hak entitas dan/atau manfaat masa depan yang diakui pada saat ini yang dapat dinilai dengan uang, sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

1) Piutang Jangka Pendek
2) Piutang Jangka Panjang

4.6.2 Pengakuan

Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan daerah, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut.

Untuk dapat diakui sebagai piutang, harus dipenuhi kriteria:

1) Telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau
2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan
3) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

4.6.3 Pengukuran

Piutang pajak dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Dalam penyusunan neraca, surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima dicatat sebagai Piutang Pajak sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi. Informasi mengenai saldo piutang pajak dapat diperoleh dari SKPD yang menerbitkan surat ketetapan pajak.

Piutang retribusi diukur sesuai nilai yang tercantum dalam SKRD yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dicatat sebesar nilai yang dituangkan dalam risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang disahkan oleh notaris untuk

hasil investasi dari Perseroda atau SK Kuasa Pemilik Modal (KPM) untuk hasil investasi dari Perumda yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

Piutang lain-lain PAD yang Sah dicatat sebesar jumlah pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Daerah yang belum dibayar yang tertuang dalam dokumen tagihan/ketetapan/kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk di dalam Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah sanksi administrasi berupa denda pajak dan denda retribusi.

Piutang Transfer dicatat sebesar nilai kurang salur transfer dari pemberi (Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi).

Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih harus dirumuskan dengan sikap penuh kehati-hatian agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca.

Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada saat pelaporan keuangan. Metode ini lebih meyakinkan terhadap penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang tersaji di neraca.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) klasifikasi, yaitu:

a) Kualitas piutang lancar;
b) Kualitas piutang kurang lancar;
c) Kualitas piutang diragukan;
d) Kualitas piutang macet.

Penggolongan kualitas piutang dipilah berdasarkan cara pemungutan pajak, yaitu:

a) Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assessment*);
b) Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah (*Official Assessment*).

Penggolongan kualitas piutang Pajak Daerah dimana pemungutan pajaknya dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*), dilakukan dengan ketentuan:

a) kualitas lancar, dengan kriteria:
   (1) umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
   (2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
   (3) Wajib Pajak kooperatif;
   (4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
   (5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b) kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
   (1) umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
   (2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
   (3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan;
   (4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
c) kualitas diragukan, dengan kriteria:
   (1) umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
   (2) Wajib Pajak tidak kooperatif;

(3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
(4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
(1) umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
(2) Wajib Pajak tidak ditemukan;
(3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia;
(4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak Daerah dimana pemungutan pajaknya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*), dilakukan dengan ketentuan:

a) kualitas lancar, dengan kriteria:
(1) umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
(2) Wajib Pajak kooperatif;
(3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
(4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b) kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
(1) umur piutang 1(satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
(2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
(3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c) kualitas diragukan, dengan kriteria:
(1) umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun;
(2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
(3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d) kualitas macet, dengan kriteria:
(1) umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
(2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
(3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
(4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

a) kualitas lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 (satu) bulan;
b) kualitas kurang lancar, jika umur piutang di atas 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
c) kualitas diragukan, jika umur piutang di atas 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
d) kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak selain yang disebutkan retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

a) kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
b) kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan;
c) kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
d) kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:

Kualifikasi	Besaran Penyisihan
Piutang Lancar	nilai penyisihan sebesar 0.5%
Piutang Kurang Lancar	nilai penyisihan sebesar 10%
Piutang Diragukan	50% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
Piutang Macet	100% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)

2) Penghentian Pengakuan Piutang

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain karena pelunasan juga bisa dilakukan karena adanya penghapusan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah, penghapusan piutang dikenal dengan dua cara yaitu: penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak. Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih. Sementara itu penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya.

Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang. Apabila piutang dihapusbukukan, piutang dialihkan dari pencatatan intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. Diperlukan laporan *off balance sheet* tentang piutang yang dihapusbukukan namun secara yuridis-formil belum dihapus, dan atau belum diberitahukan kepada pihak berutang serta masih harus terus ditagih secara intensif.

4.6.4 Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian piutang yang timbul karena peraturan perundang-undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib bayar pada periode berjalan tahun dan disajikan di neraca sebagai Aset Lancar.

Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Jumlah penyisihan piutang disajikan sebagai pengurang dari akun piutang (*contra account*) dan disajikan di Neraca, sebagai unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.

Penyajian piutang dan tagihan yang berasal dari pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan kemitraan disajikan dalam neraca sebagai Aset Lancar atau Aset Lainnya sesuai dengan tanggal jatuh temponya.

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
2) Rincian jenis-jenis, dan saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;

3) Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih;
4) Penjelasan atas penyelesaian piutang;
5) Jaminan atau sita jaminan jika ada; dan
6) Informasi tentang Piutang Pajak yang masih dalam upaya hukum (sengketa) oleh Wajib Pajak, bila ada.

4.7 Kebijakan Akuntansi Beban dibayar dimuka

4.7.1 Definisi

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban atau keperluan yang kemanfaatannya dirasakan dalam tahun buku mendatang, seperti pembayaran sewa, premi asuransi, dan sebagainya. Pengeluaran tersebut belum merupakan biaya dalam tahun buku berjalan sehingga dicatat sebagai Aset Lancar.

4.7.2 Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

4.7.3 Pengukuran

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan sejumlah tagihan atau premi dan manfaatnya belum dinikmati pada periode tahun berjalan.

4.7.4 Penyajian dan Pengungkapan

Beban dibayar dimuka disajikan dalam Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar.

4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan

4.8.1 Definisi

Mengacu pada paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa:

1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah.

Adapun beberapa jenis persediaan, yaitu:

1) Persediaan berdasarkan sifat pemakaiannya terdiri dari:
   a) Barang pakai habis;
   b) Barang tak habis pakai; dan
   c) Barang bekas dipakai.

2) Berdasarkan bentuk dan jenisnya, persediaan dapat terdiri dari:
   a) Barang konsumsi;
   b) Amunisi;
   c) Bahan untuk pemeliharaan;

d) Suku cadang;
e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
f) Pita cukai dan leges;
g) Bahan baku;
h) Barang dalam proses/setengah jadi; dan
i) Semua pengadaan barang yang akan dijual/diserahkan pada masyarakat baik berupa Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

4.8.2 Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga dapat dapat diverifikasi dan bersifat netral.
2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

4.8.3 Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
2) Biaya perolehan persediaan hanya meliputi harga pembelian.
3) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
4) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampas.

4.8.4 Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Persediaan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan berupa:

1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang digunakan dalam pengukuran persediaan
2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
3) Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik; dan
4) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.9 Kebijakan Akuntansi Investasi

4.9.1 Definisi

Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

1) Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Karakteristik investasi jangka pendek adalah:

a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
c) Berisiko rendah.

Investasi jangka pendek, terdiri dari:

a) Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*); dan
b) Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) oleh pemerintah pusat.

2) Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasi dibagi menjadi 2 (dua):

a) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, artinya investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi permanen meliputi:

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/internasional dan badan lainnya; dan
(2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b) Investasi Non Permanen

Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi non permanen meliputi:

(1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Daerah;
(2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
(3) Dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
(4) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian.

4.9.2 Pengakuan

Investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

1) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

4.9.3 Pengukuran

Pengukuran untuk investasi jangka pendek adalah sebagai berikut:

1) Beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Untuk jenis investasi yang seperti ini, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah dengan komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
3) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
4) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
5) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang rupiah sebesar kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan.

Sedangkan pengukuran untuk investasi jangka panjang adalah sebagai berikut:

1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
2) Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
3) Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
4) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diperoleh. Jika nilai wajar aset yang diperoleh tidak tersedia, nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai buku aset yang diserahkan apabila tidak diketahui nilai wajarnya.
5) Nilai perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
6) Diskonto atau premium pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut. Diskonto atau premium merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat (*carrying value*) investasi tersebut. Amortisasi diskonto atau premium akan mengurangi diskonto atau premium. Amortisasi diskonto atau premium akan diakui sebagai pengurang atau penambah pendapatan bunga dalam laporan operasional. Pendapatan bunga LRA tidak dipengaruhi oleh amortisasi diskonto atau premium.

4.9.4 Penyajian dan Pengungkapan

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO. Transaksi

pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUD, dan tidak dilaporkan dalam LRA. Keuntungan atau kerugian saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam LO dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Sedangkan untuk investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang bersifat non permanen maupun yang bersifat permanen. Investasi non permanen yang diragukan tertagih/terealisasi disajikan sebagai pengurang investasi jangka panjang non permanen. Investasi nonpermanen yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi nonpermanen pada aset lancar.

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi jangka pendek, antara lain:

1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah untuk penentuan nilai investasi jangka pendek;
2) Jenis-jenis investasi;
3) Perubahan harga pasar;
4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
5) Perubahan pos investasi.

Sedangkan hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi jangka panjang, antara lain:

1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah untuk penentuan nilai investasi.
2) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen.
3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang.
4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya.
6) Perubahan pos investasi.
7) Penjelasan perhitungan penyisihan atas investasi non permanen.

4.10 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

4.10.1 Definisi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

Termasuk dalam kategori properti investasi antara lain:

1) Tanah yang dikuasai dan/atau dikuasai dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya dimasa depan untuk digunakan sendiri atau dijual dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka peningkatan nilai.

3) Bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
4) Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah daerah tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
5) Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang dimasa depan digunakan sebagai properti investasi.

Tidak termasuk dan bukan merupakan bagian dari definisi properti investasi aset-aset sebagai berikut:

1) Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan dan/atau pengembangan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2) Properti yang masih dalam proses pembangunan dan/atau pengembangan atas nama pihak ketiga.
3) Properti yang digunakan sendiri termasuk diantaranya properti yang dikuasai untuk digunakan dimasa depan sebagai properti yang digunakan sendiri.
4) Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan.
5) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa dibawah harga pasar, misalnya pemerintah daerah membangun apartemen atau rumah susun yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenaikan sewa dibawah harga pasar.
6) Properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

4.10.2 Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika:

1) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
2) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Dalam menentukan suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.

Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal/saat perolehan.

4.10.3 Pengukuran

Pengukuran Saat Awal Perolehan

1) Properti Investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan, termasuk didalamnya biaya transaksi. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
2) Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian, biaya transaksi, dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
3) Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
   a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);

b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

1) Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
2) Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur tentang Penyusutan Aset Tetap.
3) Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
4) Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
5) Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan.
6) Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
7) Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
8) Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.

Alih Guna Ke dan Dari Properti Investasi

1) Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
   a) dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
   b) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
   c) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
   d) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer/ direklasifikasi dari persediaan menjadi properti investasi.
2) Penggunaan properti oleh pemerintah daerah dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misal, pemerintah daerah dapat memutuskan untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti

investasi dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset tetap dialihgunakan menjadi properti investasi.

3) Entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas Properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan.
4) Demikian juga jika entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti investasi.
5) Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai Properti investasi. Jika pemerintah daerah memutuskan bangunan tersebut tetap dapat menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
6) Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

Pelepasan Properti Investasi

1) Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
2) Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
3) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan dari jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
4) Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
5) Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan properti investasi tersebut.
6) Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan, kerusakan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/deftisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

4.10.4 Penyajian dan Pengungkapan

1) Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar dan disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
2) Karena sifat pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat menjual apabila kenaikan nilai atas properti

investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang.

4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

4.11.1 Definisi

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat dan fungsinya dalam kegiatan pemerintah. Aset tetap tersebut dibagi menjadi 6 klasifikasi, yaitu:

1) Tanah;
2) Peralatan dan Mesin;
3) Gedung dan Bangunan;
4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
5) Aset Tetap Lainnya; dan
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

1) Tanah

   Tanah yang dimaksud sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Peralatan dan Mesin

   Peralatan dan Mesin yang termasuk aset tetap mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Gedung dan Bangunan

   Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

   Gedung dan bangunan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

   Jalan, Irigasi dan Jaringan yang termasuk aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi dan jaringan tersebut, selain digunakan dalam kegiatan pemerintah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jalan, irigasi dan jaringan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum diklasifikasikan sebagai aset yang menambah nilai aset tetap tempat melekatnya jalan, irigasi atau jaringan dimaksud.

   Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon. Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

5) Aset Tetap Lainnya

   Aset Tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan

Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap dalam Renovasi.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Entitas yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan dan/atau pelayanan masyarakat, dalam jangka waktu tertentu, baik yang dilaksanakan dengan membangun sendiri (swakelola) maupun oleh pihak ketiga wajib menerapkan standar akuntansi yang ada.

4.11.2 Pengakuan

Aset Tetap diakui pada saat:

1) Manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh;
2) Terjadi perpindahan kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum;
3) Nilainya dapat diukur secara handal.

Aset secara umum diakui sebagai aset tetap jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Berwujud;
2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;
4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
6) Memenuhi batas minimum nilai kapitalisasi

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap Pemerintah Daerah ditetapkan dalam tabel berikut:

JENIS ASET TETAP	Batas Nilai Kapitalisasi
Tanah	Rp1 per unit
Peralatan dan Mesin	> Rp1 juta per unit
Gedung dan Bangunan	
Rehabilitasi	> Rp100 juta per unit
Renovasi/Revitalisasi	Rp1 per unit
Jalan Lingkungan	
Rehabilitasi	> Rp100 juta per unit
Renovasi/Revitalisasi	Rp1 per unit
Jalan Kota	
Peningkatan/Perkerasan	Rp1 per unit
Pengairan (Bangunan Irigasi dan Drainase)	
Pemeliharaan Rutin	-
Perbaikan/Rehabilitasi	Rp1 per unit
Aset Tetap Lainnya	
Buku dan Perpustakaan	≥Rp50 ribu per unit

JENIS ASET TETAP	Batas Nilai Kapitalisasi
Barang Bercorak Kesenian & Kebudayaan	≥Rp500 ribu per unit
Alat-alat Olahraga	≥Rp300 ribu per unit
Hewan Ternak dan Tanaman	≥Rp3,4 juta per unit
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp1 per unit

Perolehan dan pengeluaran setelah perolehan yang memenuhi batas kapitalisasi diakui sebagai belanja modal dan masuk dalam perolehan atau kapitalisasi aset tetap. Sedangkan jika tidak memenuhi batas nilai kapitalisasi diakui sebagai belanja barang dan jasa.

Pemeliharaan atau perbaikan yang diklasifikasikan sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi dan peningkatan standar kinerja.

Dalam tabel di atas, yang dimaksud dengan:

a. Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
b. Renovasi/Revitalisasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
c. Pemeliharaan rutin bangunan irigasi dan drainase diakui sebagai belanja barang dan jasa.

Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain perolehan, pengembangan, pengurangan serta penghentian dan pelepasan.

a. Perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan.
b. Pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai aset tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian.
c. Pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai Aset Tetap dikarenakan berkurangnya volume/nilai Aset Tetap tersebut atau dikarenakan penyusutan.
d. Penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu aset tetap.

4.11.3 Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih harus dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih harus diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya.

1) Pengukuran Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tanah mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, pembayaran honor tim (panitia pengadaan), biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurugan, biaya perjalanan dinas, dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pengadaan aset tetap tersebut.

Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh. Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh. Aset tetap tanah tidak disusutkan.

2) Pengukuran Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba, biaya perjalanan, dan biaya lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Peralatan dan mesin yang perolehannya melalui pembuatan, pengukuran nilainya adalah sebagai berikut:

a) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan, biaya perjalanan dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembuatan aset tetap tersebut;
b) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan, biaya perjalanan dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembuatan aset tetap tersebut;

3) Pengukuran Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak antara lain meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama, biaya perjalanan dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pengadaan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama, biaya perjalanan, dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

4) Pengukuran Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan, biaya perjalanan, dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan

dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan, biaya perjalanan dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

5) Pengukuran Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya perjalanan dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara pembangunan/ pembuatan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan.

Sedangkan biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara pembangunan/pembuatan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

6) Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

a) Pengukuran Konstruksi Secara Swakelola

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Bahan dan upah langsung sehubungan dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

(1) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
(2) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
(3) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
(4) biaya penyewaan sarana dan peralatan;
(5) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi

Bahan tidak langsung dan upah tidak langsung dan biaya overhead lainnya yang dapat diatribusikan kepada kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

(1) asuransi, misalnya asuransi kebakaran;
(2) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
(3) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

b) Pengukuran Konstruksi Secara Kontrak Konstruksi Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi:
   (1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
   (2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
   (3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi

   Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor, namun demikian penanggung jawab utama tetap kontraktor utama dan pemerintah selaku pemberi kerja hanya berhubungan dengan kontraktor utama. Pembayaran yang dilakukan oleh kontraktor utama kepada subkontraktor tidak berpengaruh pada pemerintah.

   Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai KDP.

   Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak. Klaim tersebut tentu akan mempengaruhi nilai yang akan diakui sebagai KDP.

c) Konstruksi Dibiayai dari Pinjaman

   Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

   Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

   Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara yang tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeur* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeur*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan. Dengan demikian, biaya bunga tersebut tidak ditambahkan sebagai nilai aset. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Dalam hal ini termasuk juga konstruksi aset tambahan atas permintaan pemerintah, yang mana aset tersebut

berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula dan harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Untuk bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman. Biaya pinjaman setelah konstruksi selesai disajikan sebagai beban pada Laporan Operasional.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pengukuran aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Komponen Biaya Perolehan

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Apabila terdapat potongan harga (diskon) dan rabat, maka harus dikurangkan dari harga pembelian.

Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan secara langsung dengan aset adalah sebagai berikut:

a) biaya persiapan tempat;
b) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
c) biaya pemasangan (*installation cost*);
d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
e) biaya konstruksi;
f) biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*);
g) biaya kepanitiaan;
h) biaya *Feasibility Study* (FS) dan *Detail Engineering Design* (DED);

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Istilah untuk menyebutkan penambahan tersebut adalah kapitalisasi.

Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Akuntansi ini menetapkan batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) dan bersifat seragam untuk seluruh entitas akuntansi/entitas pelaporan di lingkungan Pemerintah Daerah. Batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) tersebut diterapkan secara konsisten dan akan diungkapkan dalam CaLK. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanya dapat dikapitalisasikan pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) Pengeluaran tersebut menambah efisiensi;
b) Pengeluaran tersebut memperpanjang umur aset;
c) Pengeluaran tersebut menignkatkan kapasitas, kualitas dan volume aset;

d) Pengeluaran tersebut meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
e) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset Tetap/aset lainnya.

Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (expenses) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.

Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan economic benefit atau potensi service atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/terjadi.

4.11.4 Pertukaran

Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran suatu aset atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama. Biaya perolehan aset tersebut diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa, memiliki masa manfaat dan nilai wajar yang serupa dicatat sebesar nilai tercatat aset tersebut dan tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui atas transaksi tersebut. Hal ini juga berlaku untuk keadaan dimana suatu aset dilepas dan ditukar dengan kepemilikan aset yang serupa.

Dalam hal aset yang diperoleh memiliki nilai wajar yang sama dengan aset yang dilepas namun demikian terdapat indikasi dari nilai wajar aset yang diterima bahwa aset tersebut masih harus dilakukan perbaikan untuk membawa aset dalam kondisi bekerja seperti yang diharapkan, maka biaya perolehan yang diakui adalah sebesar nilai aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas yang harus dikeluarkan untuk perbaikan aset tersebut.

Aset tetap hasil pertukaran bisa diakui apabila kepenguasaan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal.

4.11.5 Penyusutan

Aset tetap merupakan komponen aset operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintahan. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan atau pemanfaatannya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus menyajikan informasi tentang nilai aset tetap secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset.

Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah informasi mengenai nilai wajar aset. Dalam rangka penyajian wajar atas nilai aset tetap tersebut, pemerintah daerah melakukannya melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan aset tetap dilakukan untuk:

a. menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah;
b. mengetahui potensi Barang Milik Daerah dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu Barang Milik Daerah yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
c. memberikan bentuk pendekatan yang sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau menambahkan nilai aset tetap yang sudah dimiliki.

a) Prasyarat Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin

lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran utang atau penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk mengalokasikan beban penyusutan yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

Untuk menerapkan penyusutan, prasyarat yang perlu dipenuhi adalah:

(1) Identitas Aset yang kapasitasnya menurun

Aset tetap harus dapat diidentifikasi sehingga dapat dibedakan antara aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya dengan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya. Aset yang kapasitas dan manfaatnya menurun adalah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Sedangkan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya adalah tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya akan memerlukan penyesuaian nilai, sehingga perlu disusutkan. Sebaliknya, aset tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya tidak perlu disusutkan.

(2) Nilai yang Dapat Disusutkan

Nilai aset tetap menjadi prasyarat dalam penyusutan. Standar akuntansi menganut nilai historis, sehingga kecuali karena kondisi yang tidak memungkinkan perolehan nilai historis, nilai aset tetap yang diakui secara umum adalah nilai perolehannya. Tanpa mengetahui nilai perolehan aset tetap, maka nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak dapat dihitung.

(3) Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Ukuran manfaat itu sendiri berbeda-beda. Ada yang dapat diukur dengan indikator yang terkuantifikasi dan ada yang tidak. Untuk aset yang tidak mempunyai unit manfaat yang dapat dihitung dengan spesifik, dipakailah indikator pengganti seperti prakiraan potensi masa manfaat.

Hanya dengan terpenuhinya ketiga prasyarat di atas, penyusutan dapat dihitung. Tanpa prasyarat pertama, maka kedua prasyarat terakhir menjadi tidak relevan. Sedangkan perhitungan tiap metode penyusutan memang membutuhkan kuantifikasi prasyarat kedua dan ketiga. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Seluruh Aset Tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

b) Pengelompokkan Aset

Identifikasi aset-aset yang dapat dianggap sebagai aset yang harus disusutkan secara berkelompok dengan kriteria sebagai berikut:

(1) Aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai masa manfaat yang sama;

(2) Manfaat secara teknis suatu aset sangat bergantung pada aset lain (peralatan kesehatan seperti kamera sinar X dan alat pencetakan film sinar X, dan lain-lain);

(3) Pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan (misalnya mesin cetak digital, komputer, dan perangkat lunaknya);

(4) Walaupun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung dengan aset lain, tetapi demi kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, berbagai aset dapat dikelompokkan karena kedekatan teknik dan konteks pemanfaatannya (misalnya peralatan bedah).

Terhadap aset yang tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan di atas, misalnya gedung dan bangunan, disusutkan secara individual.

c) Nilai yang Dapat Disusutkan

Oleh karena aset tetap milik pemerintah diperoleh bukan untuk tujuan dijual, melainkan untuk sepenuhnya digunakan sesuai tugas dan fungsi instansi pemerintah, maka nilai sisa/residu tidak diakui. Dengan demikian, setiap nilai aset tetap, baik yang bersifat individual maupun kelompok, langsung diakui sebagai nilai yang dapat disusutkan.

Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan.

d) Metode Penyusutan

Metode penyusutan yang diterapkan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan nilai/besaran aset yang dapat didepresiasikan (*depreciable amount*) secara sistematis sepanjang umur aset adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Rumusan tersebut adalah:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keunggulan metode garis lurus adalah bahwa perhitungannya mudah. Metode ini cocok dipergunakan untuk Aset Tetap yang penggunaannya dari periode ke periode relatif sama.

Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan beban penyusutan secara merata selama masa manfaatnya. Persentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disusutkan untuk mendapat nilai penyusutan per tahun.

Penyusutan juga tidak dilakukan terhadap aset yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya berupa:

(1) Aset tetap dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya

(2) Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan

Dalam hal terjadinya perubahan aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan kesalahan dan pencatuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan aset tetap tersebut perlu disesuaikan.

Aset tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi Penyusutan Aset Tetap, Koreksi Penyusutan Aset Tetap dicatat sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai ekuitas pada neraca serta sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan.

e) Hal-hal khusus yang terkait dengan penyusutan

(1) Pemanfaatan Aset Tetap yang Seluruh Nilainya Sudah Disusutkan Walaupun suatu aset sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp0, mungkin secara teknis aset itu masih dapat dimanfaatkan. Jika hal seperti ini terjadi, aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Aset tersebut tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang

telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penjualan Aset Tetap yang Telah Disusutkan Seluruhnya Dalam hal terjadi aset tetap yang telah disusutkan seluruhnya dilakukan penjualan, maka hasil penjualan tersebut dicatat sebagai surplus/defisit penjualan aset tetap pada Laporan Operasional.

(3) Tukar-Menukar Aset Tetap

Tukar menukar aset tetap dapat dilakukan antar pemerintah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pertukaran dapat dilakukan atas aset tetap dengan jenis seperti:

(a) Pertukaran aset yang tidak sejenis

Nilai aset yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan setelah disesuaikan dengan jumlah kas yang diserahkan. Artinya nilai perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap yang diserahkan harus diketahui.

(b) Pertukaran aset tetap yang sejenis

Dalam pertukaran aset tetap yang sejenis tidak diakui adanya laba rugi. Dalam keadaan demikian, nilai aset tetap yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat asetyang diserahkan. Akan tetapi tetap masih ada penentuan masa manfaat agar dapat ditentukan penyusutan aset yang diperoleh.

(4) Perbaikan Aset Tetap yang Menambah Masa Manfaat atau Kapasitas Manfaat

Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran yang dilakukan untuk perbaikan semacam ini disebut pengeluaran modal (*capital expenditure*). Pengeluaran seperti ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran seperti ini ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan. Artinya, pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

(5) Penyusutan atas Aset Tetap Secara Berkelompok Aset tetap bervariasi dalam bentuk dan nilai. Ada aset tetap yang nilai per jenis sangat besar. Misalnya, gedung berupa rumah atau kantor dengan nilai yang relatif besar. Jalan berupa jalan negara atau jalan provinsi misalnya juga memiliki nilai yang signifikan. Akan tetapi ada juga aset tetap yang jenisnya banyak tetapi nilainya relatif kecil. Misalnya, mesin-mesin kecil seperti kalkulator dan peralatan kantor lainnya.

Menghitung besarnya penyusutan untuk aset tetap yang nilai per unitnya besar dapat dilakukan dengan menghitung penyusutan setiap jenis aset tetap yang bersangkutan. Menghitung besarnya penyusutan setiap aset tetap yang jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil sangat merepotkan. Bahkan mungkin biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Untuk itu diperlukan cara yang lebih praktis untuk menghitung besarnya penyusutan jenis aset yang nilainya relatif kecil.

Penghitungan penyusutan untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut. Kelompok aset tersebut harus memiliki persamaan atribut misalnya masa manfaat yang sama. Dengan adanya persamaan atribut dan maka penyusutan dihitung dengan menerapkan persentase penyusutan dengan metode garis lurus terhadap rata-rata aset tetap yang bersangkutan.

(6) Perhitungan Penyusutan Aset Tetap yang Diperoleh Tengah Tahun

Aset tetap diperoleh pada waktu tertentu di sepanjang tahun. Ada kalanya aset tetap diperoleh awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun. Permasalahan tersebut di atas dialami khusus untuk aset tetap yang akan disusutkan berdasarkan waktu (masa manfaat). Penentuan besarnya penyusutan dilakukan berdasarkan *cut-off* output.

Untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset yang diperoleh di tengah tahun, Pemerintah Daerah menggunakan pendekatan bulan penggunaan dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh atau digunakan.

(7) Perubahan Estimasi dan Konsekuensinya

(a) Umur aset sesungguhnya lebih dari estimasi

Ada kalanya masa manfaat aset tetap lebih lama dari perkiraan dalam menentukan penyusutan. Setelah perkiraan masa manfaat dilalui dan akumulasi penyusutan telah sama dengan nilai perolehannya kadang-kadang aset tetap masih dapat digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa aset tetap yang bersangkutan masih memiliki nilai wajar. Oleh karena nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*) tidak ada lagi maka atas aset ini tidak dapat dilakukan penyusutan. Mengingat bahwa nilai sisa aset tetap tidak diakui maka nilai perolehan aset tetap dan akumulasi penyusutannya tetap dicantumkan dalam neraca.

(b) Penghentian Penggunaan

Aset tetap disusutkan selama aset tersebut memberikan manfaat atau berproduksi. Ada kalanya suatu aset tidak dapat berproduksi atau tidak digunakan karena berbagai alasan. Oleh karena tidak digunakan maka seharusnya aset yang bersangkutan tidak disusutkan bahkan harus dipindahkan ke kelompok aset lain-lain. Pemindahan ke aset lain-lain dapat dilakukan apabila aset tetap tersebut tidak berproduksi atau tidak digunakan secara permanen. Akan tetapi jika hanya tidak berproduksi sementara aset tetap tersebut tidak dipindahkan ke aset lainlain. Karena Pemerintah Daerah menggunakan metode garis lurus, penyusutan atas aset tetap tersebut tetap dihitung. Hal ini dilakukan dengan alasan aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan.

(8) Perhitungan Penyusutan Aset Tetap yang Dilepaskan di Tengah Periode Akuntansi

Adakalanya suatu aset tetap dihapuskan dari neraca dikarenakan dijual/dipertukarkan/diserahkan kepada entitas pelaporan lainnya. Permasalahan yang muncul adalah perhitungan beban penyusutannya.

4.11.6 Penghentian dan Pelepasan

PSAP Nomor 7 menyatakan jika Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK. Sedangkan Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Penghentian suatu aset tetap secara permanen umumnya dilakukan karena:

a) Rusak berat, terkena bencana alam/*force majeure*
b) Tidak dapat digunakan secara optimal (*idle*)
c) Terkena planologi kota
d) Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas
e) Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi

f) Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam
g) Pertimbangan teknis
h) Pertimbangan ekonomis

Salah satu cara untuk melakukan penghentian aset tetap adalah dengan menjual atau menukar aset tetap tersebut. Jika penjualan atau penukaran aset tetap terjadi ketika belum seluruh nilai buku Aset Tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tetap terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada LO dan LRA Pemerintah Daerah.

Aset Tetap harus dihapuskan dari laporan keuangan entitas pada saat dilakukan penghapusan atau ketika aset tersebut secara permanen tidak lagi digunakan oleh entitas dan tidak ada lagi manfaat ekonomi atau potensi servis/pelayanan yang dapat diharapkan dan telah diterbitkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Barang Milik Daerah.

4.11.7 Penilaian Kembali

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

4.11.8 Aset Tetap yang Berasal dari Hibah/Donasi

Aset tetap yang berasal dari hibah/donasi diakui pada saat diterima oleh pemerintah daerah dan diukur sebesar nilai wajar pada saat perolehannya. Pada saat diterima, aset tetap akan bertambah dan di sisi lain mengakui hibah/donasi tersebut sebagai pendapatan hibah-LO.

4.11.9 Aset Tetap yang berasal dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)

(a) Saat penyerahan TJSLP berupa barang dibuat berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh perusahaan penyelenggara TJSLP dengan Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
(b) TJSLP berupa barang disertai dengan Naskah Perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat jenis, jumlah, dan nilai barang, yang ditandatangani oleh perusahaan penyelenggara TJSLP dengan Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
(c) Aset tetap yang berasal dari TJSLP diakui pada saat diterima oleh pemerintah daerah dan diukur sebesar nilai wajar pada saat perolehannya. Pada saat diterima, aset tetap akan bertambah dan di sisi lain mengakui hibah/donasi tersebut sebagai pendapatan hibah-LO.

4.11.10 Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian Aset Tetap berdasarkan kepada biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Aset Tetap disajikan pada bagian Aset dalam laporan neraca Pemerintah Daerah.

Besarnya penyusutan setiap tahun disajikan dalam Neraca dan LO. Penyusutan disajikan dalam neraca dengan akun akumulasi penyusutan yang mengurangi nilai perolehan aset tetap. Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui. Sedangkan beban penyusutan disajikan dalam LO.

Selain disajikan dalam neraca, penjelasan tentang aset tetap juga harus dituangkan dalam CaLK. Dalam CaLK harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Tetap secara umum sebagai berikut:

1) Dasar penilaian Aset Tetap yang digunakan;
2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan
   a) Penambahan;

b) Pelepasan;
c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
d) Mutasi Aset Tetap lainnya.

3) Informasi penyusutan, meliputi:
a) Nilai penyusutan;
b) Metode penyusutan yang digunakan;
c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

4) Dalam hal terjadi pertukaran Aset Tetap, meliputi:
a) Pihak yang melakukan pertukaran Aset Tetap;
b) Jenis Aset Tetap yang diserahkan dan nilainya;
c) Jenis Aset Tetap yang diterima beserta nilainya; dan
d) Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran Aset Tetap.

5) Informasi lainnya, seperti:
a) Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap;
b) Kebijakan akuntansi Pemda untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap;
c) Jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi; dan
d) Jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap.

4.12 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

4.12.1 Definisi

PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 65 mendefinisikan dana cadangan sebagai dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang di dalamnya mencakup:

1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
4) sumber dana cadangan; dan
5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

4.12.2 Pengakuan

Pembentukan dana cadangan akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

4.12.3 Pengukuran

Dana cadangan dicatat sebesar nilai nominal atas besarnya dana yang disisihkan.

4.12.4 Penyajian dan Pengungkapan

Dana cadangan disajikan dalam neraca dan informasi terkait dana cadangkan diungkapkan dalam CaLK.

Adapun informasi yang harus diungkapkan dalam CaLK adalah sumber dana cadangan dan peraturan daerah yang mengatur tentang dana cadangan tersebut.

4.13 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Beberapa aset lainnya antara lain:

a. Tagihan penjualan angsuran;
b. Tuntutan ganti rugi;
c. Kemitraan dengan pihak ketiga;
d. Aset tak berwujud; dan
e. Aset lain-lain.

4.13.1 Tagihan Penjualan Angsuran

4.13.1.1 Definisi

Tagihan penjualan angsuran adalah penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan. Dalam lingkungan pemerintah daerah, tagihan penjualan angsuran dapat dilakukan berupa Penjualan Barang Milik Daerah seperti Kendaraan Perorangan Dinas yang dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Wali Kota. Pembayaran penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang kepada:

1) Pejabat Daerah/mantan Pejabat Daerah, harus dibayar sekaligus;
2) pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri, dapat dibayar secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun. Pembayaran dilakukan melalui penyetoran ke RKUD:
   a) paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan, untuk pembayaran sekaligus;
   b) sesuai mekanisme yang diatur dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri, yang membeli, untuk pembayaran secara angsuran.

4.13.1.2 Pengakuan

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

4.13.1.3 Pengukuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

4.13.1.4 Penyajian dan Pengungkapan

"Tagihan Penjualan Angsuran" disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya".

Pengungkapan "Tagihan Penjualan Angsuran" dalam CaLK sekurang-kurangnya harus mengungkapkan:

a) Besaran dan rincian Tagihan Penjualan Angsuran
b) Informasi lainnya yang penting

4.13.2 Tuntutan Ganti Rugi

4.13.2.1 Definisi

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Terdapat 3 (tiga) sebab kerugian yang dapat terjadi, yaitu:

a) Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Bendahara Undang-Undang Perbendaharaan Negara secara tegas mengatakan bahwa setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan adanya penyelesaian kerugian tersebut, Negara dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi. Sehubungan dengan itu, setiap pimpinan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian.

   Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Wali Kota. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran administratif dan/atau pidana.

b) Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara

   Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh pegawai tersebut dalam melakukan kewajibannya.

c) Kerugian Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah sebagaimana ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terdakwa tindak pidana korupsi dapat dipidana, denda, dapat dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, secara langsung merugikan keuangan daerah wajib mengganti kerugian tersebut dan setiap pimpinan kepala satuan kerja dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam satuan kerja terjadi kerugian akibat perbuatan manapun.

   Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan terhadap pegawai negeri bendahara/bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah yang penyelesaian tagihannya di atas 12 bulan.

4.13.2.2 Pengakuan

1. Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Bendahara Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah yang disebabkan oleh Bendahara diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada saat terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.
2. Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara

3. Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara diakui pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) dan/atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
4. Kerugian Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan

   Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah berdasarkan putusan pengadilan diakui pada saat terbit keputusan pengadilan yang perkara yang berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*).

4.13.2.3 Pengukuran

1. Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Bendahara

   Pengukuran nilai kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara diukur sebesar Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.
2. Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara

   Pengukuran nilai kerugian Daerah yang berasal dari kerugian Daerah karena pegawai bukan bendahara diukur sebesar SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) dan/atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)
3. Kerugian Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan Pengukuran nilai kerugian Daerah yang berasal dari kerugian Daerah karena putusan pengadilan sebesar nilai yang tertera dalam putusan pengadilan yang perkara yang berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*).

4.13.2.4 Penyajian dan Pengungkapan

Tuntutan ganti rugi disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya.

Pengungkapan kerugian Daerah pada CaLK antara lain:

1. Kebijakan akuntansi kerugian Daerah.
2. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:
   (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran tagihan TGR;
   (2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
   (3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di daerah atau telah diserahkan penagihannya ke PUPN;
   (4) Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
3. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh Daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan.

4.12.4 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

4.12.4.1 Definisi

Berikut adalah beberapa definisi tentang kemitraan dengan pihak ketiga:

1. Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
2. Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain

tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.

3. Bangun, Serah, Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
4. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
5. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

4.12.4.2 Pengakuan

Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan pengakuan kemitraan dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

1. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
2. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama Bangun Guna Serah (BGS), diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
3. Dalam rangka kerja sama pola Bangun Serah Guna (BSG)/*Build Transfer Operate* (BTO), harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah pada saat proses pembangunan selesai.
4. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
5. Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
6. Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
7. Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

4.12.4.3 Pengukuran

Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/ kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Dana yang ditanamkan Pemerintah Daerah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.

Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

4.12.4.4 Penyajian dan Pengungkapan

Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya.

Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional SKPD, maka harus diungkapkan dalam CaLK.

Aset kerjasama/kemitraan selain tanah harus harus dilakukan penyusutan selama masa kerja sama. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BGS melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BSG adalah selama masa kerjasama.

Atas kemitraan dengan pihak ketiga, CaLK setidaknya memuat informasi sebagai berikut:

1. Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama.
2. Penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan.
3. Penentuan depresiasi/penyusutan asset kerjasama/kemitraan.

Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.

4.12.5 Aset Tak Berwujud

4.12.5.1 Definisi

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

4.12.5.1.1 Kriteria Aset Tak Berwujud

Definisi ATB mensyaratkan bahwa ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan. Masing-masing unsur tersebut diuraikan di bawah ini.

1. Aset non-moneter yang dapat diidentifikasi

   Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah:

   a. Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka ATB dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama.
   b. Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

2. Dikendalikan oleh entitas Pemerintah Daerah

   Pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut ”mengendalikan aset” jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.

3. Mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah. Jasa yang melekat pada aset dapat saja memberikan manfaat kepada pemerintah dalam bentuk selain kas atau barang, misalnya dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai salah satu tujuan utama pemerintah atau peningkatan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah.

4.12.5.1.2 Jenis-jenis Aset Tak Berwujud

ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat.

Berdasarkan jenis sumber daya, ATB pemerintah dapat berupa:

1. Software komputer

   yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *flash disk*, *compact disk*, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya. Software komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini dapat digunakan di komputer lain. Oleh karena itu software komputer sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.

2. Lisensi dan *franchise*

   Lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. *Franchise* merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

3. Hak Paten dan Hak Cipta

   Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama

waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU No 14 Tahun 2001, Pasal 1, ayat 1).

Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan.

Hak-hak tersebut pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual, pengetahuan teknis, suatu cipta karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu Hak Paten dan Hak Cipta sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.

4. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang

   Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

5. ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya

   Film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah maupun masyarakat. Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi pemerintah. Film/Karya Seni/Budaya dapat dikategorikan dalam heritage ATB.

6. ATB dalam Pengerjaan

   Suatu kegiatan perolehan ATB dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah. Namun dalam hal ini seperti juga aset tetap, aset ini nantinya juga diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, sehingga dapat diakui sebagai bagian dari ATB.

Berdasarkan cara perolehan, ATB dapat berasal dari:

1. Pembelian

   Pembelian ATB dapat dilakukan secara terpisah (individual) maupun secara gabungan. Hal ini akan berpengaruh pada identifikasi ATB serta pengukuran biaya perolehan.

2. Pengembangan secara internal
   ATB dapat diperoleh melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas. Perolehan dengan cara demikian akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tentang identifikasi kegiatan yang masuk lingkup riset serta kegiatankegiatan yang masuk lingkup pengembangan yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB sehingga dapat dikapitalisasi menjadi harga perolehan ATB.
3. Pertukaran
   ATB dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset yang dimiliki oleh suatu entitas lain.
4. Kerjasama
   Pengembangan suatu ATB yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan dapat dilakukan melalui kerjasama oleh dua entitas atau lebih. Hak dan kewajiban masing-masing entitas harus dituangkan dalam suatu perjanjian, termasuk hak kepemilikan atas ATB yang dihasilkan. Entitas yang berhak sesuai ketentuan yang akan mengakui kepemilikan ATB yang dihasilkan, sementara entitas yang lain cukup mengungkapkan hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya atas ATB tersebut.
5. Donasi/hibah
   ATB, dapat berasal dari donasi atau hibah, misalnya suatu perusahaan software memberikan software kepada suatu instansi pemerintah untuk digunakan tanpa adanya imbalan yang harus diberikan.
6. Warisan Budaya/Sejarah (*intangible heritage assets*). Pemerintah dapat memiliki ATB yang berasal dari warisan sejarah, budaya, atau lingkungan masa lalu. Aset ini pada umumnya dipegang oleh instansi pemerintah dengan maksud tidak semata-mata untuk menghasilkan pendapatan, namun ada alasan-alasan lain kenapa aset ini dipegang oleh pemerintah, misalnya karena mempunyai nilai sejarah dan untuk mencegah penyalahgunaan hak atas aset ini oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Suatu entitas harus mengidentifikasi dan mengakui aset warisan ini sebagai ATB jika definisi dan kriteria pengakuan atas ATB telah terpenuhi.

Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. TB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*)
   Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.
2. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)
   Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan reviu secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.

4.12.5.2 Pengakuan

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Definisi ATB;
2. Kriteria pengakuan.

Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. Pada pengakuan awal ATB akan diakui sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. Nilai wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan awal diakui sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.

4.12.5.2.1 Pengakuan Aset Tak Berwujud Yang Diperoleh Secara Internal Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:

1. Tahap penelitian atau riset

   Pengeluaran untuk kegiatan penelitian/riset (atau tahap penelitian/ riset dari aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi. Dalam tahap ini, pemerintah tidak/belum dapat membuktikan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai beban biaya pada saat terjadi.

   Contoh-contoh dari kegiatan penelitian/riset adalah:

   a. Kegiatan/aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru (*new knowledge*);
   b. Pencarian, evaluasi dan seleksi akhir untuk penerapan atas penemuan penelitian;
   c. pengetahuan lainnya;
   d. Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan;
   e. Formula/rumus, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan yang baru atau yang diperbaiki.

2. Tahap pengembangan

   ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika, dan hanya jika, pemerintah dapat memperlihatkan seluruh kondisi dibawah ini, yaitu adanya:

   a. Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
   b. Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
   c. Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;

d. Manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang;
e. Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan ATB tersebut;
f. Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan adalah:

(a) Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;
(b) Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial;
(c) Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.

4.12.5.2.2 Penelitian dibiayai instansi lain

Sesuai dengan konsep belanja dalam pemerintahan dan konsep entitas maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari belanja yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan ATB walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain.

Namun demikian instansi pemerintah yang memberikan dana tidak dapat serta merta mengakui ATB tersebut, kecuali jika memenuhi karakteristik ATB dan memenuhi kriteria pengakuan. ATB yang berasal dari Penelitian dan Pengembangan harus sesuai dengan kriteria pengakuan ATB dan memenuhi kondisi pengakuan untuk biaya pada tahap pengembangan, bukan biaya dalam tahap penelitian.

Jika pemerintah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, pemerintah harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas/ kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.

4.12.5.2.3 Perlakuan Untuk Hak Paten

Hak Paten adalah salah satu jenis ATB yang kemungkinan dapat dimiliki oleh Pemerintah yang perolehannya dapat berasal dari hasil kajian dan pengembangan atas penelitian yang dilakukan pemerintah atau pendaftaran atas suatu kekayaan/warisan budaya/sejarah yang dimiliki.

Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka atas aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK.

Dalam praktik selama ini di terdapat beberapa perlakuan pencatatan terhadap Hak Paten dari hasil kajian/pengembangan yang memerlukan perlakuan khusus. Untuk Hak Paten yang masih dalam proses pendaftaran

dan dokumen sumber belum terbit, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftaran ditambah nilai Hasil Kajian/ Pengembangan yang telah dikapitalisasi sebagai ATB, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK.

4.12.5.2.4 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu ATB yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai ATB dalam pengerjaan (*Intangible Asset-Work In Progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

4.12.5.3 Pengukuran

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

4.12.5.3.1 Pengukuran pada saat perolehan

Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

1. Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara eksternal

a. Pembelian

Harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu ATB akan mencerminkan kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut. Dengan kata lain, entitas pemerintah mengharapkan adanya manfaat ekonomi ataupun jasa potensial yang mengalir masuk ke dalam entitas.

ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian biasanya dapat diukur secara andal, khususnya bila berkenaan dengan pembelian melalui pertukaran kas atau aset keuangan lainnya.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

(1) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

(2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

(3) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
(4) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
(5) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Contoh dari biaya yang bukan merupakan unsur ATB adalah:

(1) Biaya untuk memperkenalkan produk atau jasa baru (termasuk biaya advertising dan promosi);
(2) Biaya untuk melaksanakan operasi pada lokasi baru atau sehubungan dengan pemakai (user) baru atas suatu jasa (misalnya biaya pelatihan pegawai);
(3) Biaya administrasi dan *overhead* umum lainnya.

Biaya-biaya perolehan ATB meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan aset tersebut dalam kondisi siap untuk beroperasi seperti yang diinginkan oleh manajemen. Oleh karenanya, biayabiaya yang dikeluarkan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB bukan merupakan bagian dari perolehan ATB.

4.12.5.3.2 Pertukaran

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

4.12.5.3.3 Kerjasama

ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.

4.12.5.3.3 Donasi/hibah

ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

4.12.5.3.4 Pengembangan secara internal

ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB periode berikutnya.

ATB yang dihasilkan dari pengembangan software komputer yang memerlukan tiga tahap sebagaimana dimaksud dalam Bab III Aspek

Pengakuan mengenai perlakuan khusus untuk *software* komputer, maka tahap yang dapat dilakukan kapitalisasi adalah tahap pengembangan aplikasi, bila telah memenuhi kriteria dimaksud dikapitalisasi dan dinilai sebesar pengeluarannya.

4.12.5.3.5 Aset budaya/bersejarah tak berwujud (*intangible heritage assets*)

ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

4.12.5.3.5 Pengukuran Setelah Perolehan

Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Biaya yang telah dibebankan tidak dapat diakui sebagai ATB.

4.12.5.3.6 Amortisasi

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap tidak berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap tidak berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional.

Metode Amortisasi yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya. Amortisasi yang dibebankan setiap periode disajikan dengan menyesuaikan akun aset tidak berwujud dan akun diinvestasikan pada aset lainnya. Metode penyusutan yang digunakan yaitu dengan metode garis lurus.

Metode garis lurus merupakan metode yang paling umum digunakan dalam amortisasi. Berdasarkan metode garis lurus, amortisasi nilai aset tidak berwujud dilakukan dengan mengalokasikan beban amortisasi secara merata selama masa manfaatnya.

Masa manfaat aset tidak berwujud yang dapat diamortisasi harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi

sebelumnya, amortisasi periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Masa manfaat untuk menghitung tarif amortisasi untuk masing-masing kelompok aset tidak berwujud adalah sebagai berikut:

MASA MANFAAT BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TIDAK BERWUJUD

URAIAN	TAHUN
Lisensi	10
Franchise	5
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I	70
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II	50
Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
Hak Paten Sederhana	10
Paten Biasa	20
Software Komputer	4
Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
Merek	10
Desain Industri	10
Rahasia Dagang	10
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

4.12.5.3.7 Penghentian dan Pelepasan

ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Pelepasan aset tak berwujud mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena

berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat neto.

Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran. Penghentian ATB harus diungkapkan dalam CaLK.

4.12.5.4 Penyajian dan Pengungkapan

Aset Tidak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya".

Amortisasi aset tidak berwujud dibebankan sebagai penambah beban kegiatan operasional. Penyajian beban amortisasi digabung pada pos beban penyusutan dalam Laporan Operasional.

Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal untuk setiap golongan aset tak berwujud, dengan membedakan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lainnya

4.12.6 Aset lain-lain

4.12.6.1 Definisi

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Dalam kebijakan ini yang dimaksud aset lain-lain adalah aset tetap yang diberhentikan penggunaan oleh pemerintah sehingga direklasifikasi menjadi aset lain-lain. Pemberhentian aset tetap dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, atau penyertaan modal).

4.12.6.2 Pengakuan

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

4.12.6.3 Pengukuran

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lainlain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundangundangan.

4.12.6.4 Penyajian dan Pengungkapan

Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dalam neraca dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

4.13 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

4.13.1 Definisi

Mengacu pada PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan waktu jatuh temponya, kewajiban dibagi menjadi dua yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek.

1) Kewajiban Jangka Pendek

   Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang jatuh temponya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Kewajiban jangka pendek di SKPKD terdiri dari utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, utang beban, dan utang jangka pendek lainnya. Sedangkan kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga (PFK), pendapatan diterima dimuka, utang beban dan utang jangka pendek lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

   Kewajiban Jangka Panjang adalah utang atau kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Disamping itu kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban panjang jika:

   a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
   b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang
   c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

   Kewajiban jangka panjang di Pemerintah Daerah hanya terdapat pada SKPKD. Adapun kewajiban jangka panjang di SKPKD yaitu utang dalam negeri, utang luar negeri dan utang jangka panjang lainnya.

4.13.2 Pengakuan

Secara umum kewajiban Pemerintah Daerah diakui pada saat:

1) Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
2) Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau
3) Pada saat kewajiban timbul

Pengakuan Kewajiban Pemerintah Daerah:

1) Utang Jangka Pendek
   a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

      Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atau bendahara pengeluaran SKPD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu.

b) Utang Belanja/Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (*invoice*) kepada pemerintah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah. Utang kepada pihak ketiga juga diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang berasal dari SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum diserahkan kepada Pihak yang berhak.

Dalam transaksi pembelian jasa, utang diakui pada saat jasa/bagian jasa diserahkan sesuai perjanjian tetapi pada tanggal pelaporan belum dibayar. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, utang diakui pada saat sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Utang Belanja Bagi Hasil dan Utang Belanja Bantuan Keuangan diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c) Utang Bunga

Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

e) Uang Muka dari Kas Umum Daerah

Uang muka dari kas daerah diakui pada saat bendahara pengeluaran menerima UP dari Kas Umum Daerah.

f) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka dapat diakui dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kewajiban atau pendekatan pendapatan. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

2) Utang Jangka Panjang

a) Utang Dalam Negeri - Non Perbankan

(1) Obligasi

Utang Obligasi Daerah diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan.

Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi. Obligasi yang telah jatuh tempo tetapi belum dilunasi diakui sebagai kewajiban jangka pendek.

Penerbitan obligasi memerlukan biaya yang terkait dengan pencetakan dokumen, jasa konsultan, jasa hukum, dan jenis biaya lainnya. Jika dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi digunakan untuk membangun aset tetap tertentu, maka biaya – biaya penerbitan obligasi dikapitalisasi dalam nilai aset tetap tersebut. Akan tetapi, jika tidak dapat diatribusikan pada aset tetap tertentu, maka biaya penerbitan tersebut diakui sebagai biaya ditangguhkan yang akan diamortisasi selama umur obligasi yang bersangkutan.

(2) Utang Pembelian Cicilan

Sehubungan dengan utang pembelian cicilan, baik yang mengandung bunga secara eksplisit maupun bunga secara tersamar, utang diakui ketika barang yang dibeli telah diserahkan kepada pembeli dan perjanjian utang selanjutnya secara legal telah mengikat para pihak, yaitu ketika perjanjian utang ditandatangani oleh pihak penjual yang sekaligus bertindak selaku kreditur dan pembeli yang juga menjadi debitur.

(3) Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.

b) Utang Dalam Negeri – Perbankan

Utang dalam negeri-perbankan diakui pada saat pinjaman dari lembaga perbankan diterima pada rekening kas daerah. Biaya-biaya terkait dengan pengurusan pinjaman diakui pada saat terutang yaitu pada saat timbulnya kewajiban berdasarkan kontrak atau kesepakatan.

4.13.3 Pengukuran

Secara umum, kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

1) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Ketika Pemerintah Daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

2) Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

3) Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode harus dicatat sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

4) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

5) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

1) Utang yang tidak diperjualbelikan

   Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.

2) Utang yang diperjualbelikan

   Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

Pengukuran Kewajiban Pemerintah Daerah:

1) Utang Jangka Pendek

   a) Utang kepada Pihak Ketiga

      Utang kepada Pihak Ketiga dinilai sebesar kewajiban entitas pemerintah atas barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan/perjanjian atau sebesar dana yang belum diserahkan kepada yang berhak. Dalam hal kesepakatan atau perjanjian menyebutkan syarat pembayaran (terms of payment) dengan diskon tertentu untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu (misalkan 2/10, n/30) maka nilai utang kepada pihak ketiga ditentukan sebesar jumlah utang dengan atau tanpa memperhitungkan diskon tergantung pada kebijakan akuntansi pembayaran utang yang ditetapkan.

      Dalam hal pihak ketiga/kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, dan 4 sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diserahterimakan tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan, maka transaksi tersebut akan diakui sebagai utang kepada pihak ketiga sebesar jumlah yang belum dibayar.

   b) Utang Bunga

      Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

   c) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

      Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUN/BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

   d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

      Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

   e) Uang Muka dari Kas Umum Daerah

      Nilai yang dicantumkan di neraca sebesar saldo uang muka yang belum disetorkan/dipertanggungjawabkan ke kas daerah sampai dengan tanggal neraca.

f) Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

2) Utang Jangka Panjang

a) Utang Dalam Negeri - Non Perbankan

(1) Obligasi

Utang Obligasi Daerah dicatat sebesar nilai nominal/ par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi Daerah tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo. Dalam hal utang obligasi yang pelunasannya diangsur, aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut. Apabila surat utang obligasi dijual di bawah nilai par (dengan diskon), maupun di atas nilai par (dengan premium), maka nilai pokok utang tersebut adalah sebesar nilai nominalnya atau nilai jatuh temponya, sedangkan diskon atau premium dikapitalisasi untuk diamortisasi sepanjang masa berlakunya surat utang obligasi. Amortisasi premi atau diskonto dapat menggunakan metode garis lurus atau metode bunga efektif. Apabila surat utang obligasi diterbitkan dengan denominasi valuta asing, maka kewajiban tersebut perlu dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

(2) Utang Pembelian Cicilan

Utang pembelian cicilan, baik yang bunganya dinyatakan secara eksplisit maupun yang bunganya disamarkan dalam bentuk cicilan anuitas, dicatat sebesar nilai nominal.

Khusus mengenai utang cicilan anuitas, setiap pelunasan harus dipecah menjadi unsur pelunasan pokok utang dan pelunasan bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

(3) Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar.

b) Utang Dalam Negeri – Perbankan

Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri-perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman dan disetorkan ke kas daerah. Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

4.13.4 Penyajian dan Pengungkapan

Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang disajikan di bagian kewajiban dalam neraca. Selain itu, informasi mengenai kewajiban juga harus diungkapkan dalam CaLK Pemerintah Daerah.

Adapun hal-hal yang harus diungkapkan adalah sebagai berikut:

1) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan (dirinci) berdasarkan pemberi pinjaman;
2) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
5) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
    a) Pengurangan pinjaman;
    b) Modifikasi persyaratan utang;
    c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
    d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
    e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
    f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
6) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
7) Biaya pinjaman:
    a) Perlakuan biaya pinjaman;
    b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
    c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.14 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

4.14.1 Definisi

Mengacu pada PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam akuntansi berbasis akrual, pemerintah daerah hanya menyajikan dua jenis pos Ekuitas, yaitu Ekuitas dan Ekuitas untuk Dikonsolidasikan.

Ekuitas diklasifikasikan ke dalam:

1) Ekuitas Awal;
2) Surplus/Defisit LO;
3) Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas; dan
4) Ekuitas Akhir

Saldo akhir Ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Sedangkan saldo pos Ekuitas untuk Dikonsolidasikan didapat dari transaksi timbal balik antara Entitas Pelaporan (PPKD) dengan Entitas Akuntansi (SKPD dan SKPKD) yang berupa akun Rekening Koran (R/K) pada masing-masing entitas.

Pada penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pos Ekuitas untuk Dikonsolidasikan tidak muncul karena telah dilakukan eliminasi antara akun R/K PPKD dan akun R/K masing-masing SKPD pada saat proses konsolidasi antara entitas pelaporan dengan entitas akuntansi.

Ekuitas disajikan pada Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.14.2 Pengakuan

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

4.14.3 Pengukuran

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

4.14.4 Penyajian dan Pengungkapan

Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK.

4.15 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

4.15.1 Definisi

1) Pendapatan LO

Mengacu pada PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

2) Pendapatan-LRA

Mengacu pada PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA terdiri dari pendapatan-LRA untuk SKPKD dan pendapatan- LRA untuk SKPD. Pendapatan-LRA di SKPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, LainLain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Pendapatan-LRA di SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.

4.15.2 Pengakuan

1) Pendapatan LO

Pendapatan-LO diakui pada saat hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Secara rinci, Pendapatan- LO diakui pada saat:

a) Timbulnya hak atas pendapatan;

b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pengakuan pendapatan LO dapat terjadi di SKPKD dan SKPD

2) Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat penerimaan Rekening Kas Umum Daerah atau entitas lainnya di bawah pemerintah daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

a) Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.

b) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.

c) Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

d) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

e) Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

4.15.3 Pengukuran

1) Pendapatan LO

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

2) Pendapatan LRA

Akuntansi pendapatan-LRA Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang (*recurring*) dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan (Pendapatan) yang bersangkutan.

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan (pendapatan) yang bersangkutan. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

4.15.4 Penyajian dan Pengungkapan

1) Pendapatan-LO

Pendapatan LO disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan operasional dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam CaLK. Berikut adalah contoh penyajian pendapatan LO dalam laporan operasional:

Hal-hal yang perlu diungkapkan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai Pendapatan-LO antara lain adalah sebagai berikut:

a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, pengukuran Pendapatan-LO;

b) Rincian Pendapatan-LO.

2) Pendapatan LRA

Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam CaLK. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, sangat dianjurkan untuk diungkapkan dalam CaLK.

4.16 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

4.16.1 Beban

4.16.1 Beban

4.16.1.1 Definisi

PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8 mendefinisikan beban sebagai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (menurut kelompok dan jenis beban) yang meliputi:

a) Beban Operasi, terdiri atas:
   (1) Beban Pegawai
   (2) Beban Barang dan Jasa
   (3) Beban Bunga
   (4) Beban Subsidi
   (5) Beban Hibah
   (6) Beban Bantuan Sosial
b) Beban Penyisihan Piutang
c) Beban Penyusutan dan Amortisasi
d) Beban Transfer
e) Beban Tak Terduga

4.16.1.2 Pengakuan

Beban diakui pada saat:

a) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
b) Terjadinya konsumsi aset.

   Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset dalam Pemerintah Daerah adalah saat terjadinya:
   (1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/atau
   (2) konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

   Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.
c) Timbulnya kewajiban

   Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah.

4.16.1.3 Pengukuran

a) Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran Daerah kepada pegawai dimaksud.

b) Beban Barang dan Jasa

(1) Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga.

(2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari PA/KPA.

c) Beban Bunga

Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah dispute/perselisihan di kemudian hari.

d) Beban Subsidi

Pengukuran beban subsidi didasarkan pada nilai nominal sesuai dengan dokumen tagihan yang diajukan pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat perbendaharaan.

e) Beban Hibah

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

f) Beban Bantuan Sosial

Beban bansos diukur sebesar nilai bantuan sosial berupa uang/barang/ jasa yang telah diserahkan kepada masyarakat penerima bansos.

Pemerintah Daerah dalam pengukuran Beban Bantuan Sosial perlu memperhatikan peraturan perundangundangan terkait dengan penyaluran Bantuan Sosial. Penyaluran Bantuan Sosial pada praktiknya sesuai peraturan teknis yang ditetapkan pemerintah dapat disalurkan langsung oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada penerima bantuan sosial atau melalui lembaga penyalur yang ditetapkan pemerintah.

Apabila Bantuan Sosial disalurkan melalui lembaga penyalur kepada masyarakat, untuk mengukur nilai Beban Bantuan Sosial, maka Pemerintah Daerah harus mendapatkan informasi mengenai nilai yang telah disalurkan oleh Lembaga Penyalur kepada masyarakat. Nilai Beban Bantuan Sosial tersebut diukur hanya sebesar yang telah disalurkan oleh

lembaga penyalur. Untuk Bantuan Sosial berupa uang yang belum disalurkan tersebut jika Pemerintah Daerah Pemerintah masih menguasai uang yang masih berada di lembaga penyalur, maka Pemerintah Daerah juga harus melaporkan kas tersebut dalam Neraca. Untuk Bansos dalam bentuk barang yang telah dikeluarkan namun belum diserahkan ke masyarakat akan diakui sebagai persediaan.

Persediaan yang berasal dari belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dinilai dan disajikan sebesar:

(1) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
(2) biaya standar apabila diproduksi sendiri;
(3) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Penyaluran Bantuan Sosial dapat menimbulkan kewajiban apabila Pemerintah Daerah pemerintah belum menyalurkan Bantuan Sosial yang sudah menjadi hak penerima bantuan sosial, dan penerima masih memiliki hak untuk memperoleh bantuan sosial tersebut pada periode berikutnya/masa mendatang.

g) Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang diakui berdasarkan hasil perhitungan melalui aging schedule piutang pada tanggal pelaporan.

Beban penyisihan piutang tak tertagih diukur berdasarkan nilai yang ada di *aging schedule* dibandingkan dengan saldo awal penyisihan piutang tak tertagih.

h) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Pengukuran dan pencatatan beban penyusutan dan amortisasi dijelaskan dalam bagian Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud.

i) Beban Transfer

Beban transfer diakui dan dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dan jumlah kewajiban yang belum disalurkan. Nilai pengeluaran kas didasarkan pada penyaluran transfer yang dikeluarkan dari rekening kas umum daerah kepada rekening penerima. Selain itu, kurang bayar/salur merupakan bagian dari beban transfer yang diukur sebesar nilai yang seharusnya disalurkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

j) Beban Tak Terduga

Beban tak terduga dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

Koreksi dan Penerimaan Kembali

Penerimaan kembali atas kelebihan beban/belanja yang sifatnya berulang (*recurring*) dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan mengurangkan pada rekening beban dan/atau belanja yang bersangkutan. Penerimaan kembali atas kelebihan beban/belanja yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan mengurangkan pada rekening beban dan/atau belanja yang bersangkutan.

4.16.1.3 Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional. Berikut adalah contoh penyajian beban dalam LO:

Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam CaLK sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

4.16.2 Belanja

4.16.2.1 Definisi

Menurut PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (menurut kelompok dan jenis beban) yang meliputi:

a) Belanja Operasi, terdiri atas:
   (1) Belanja Pegawai
   (2) Belanja Barang dan Jasa
   (3) Belanja Bunga
   (4) Belanja Subsidi
   (5) Belanja Hibah
   (6) Belanja Bantuan Sosial
b) Belanja Modal
c) Belanja Tak Terduga
d) Belanja Transfer

4.16.2.2 Pengakuan

Sesuai dengan paragraf 31 sampai 33 PSAP No. 02, pengakuan belanja dilakukan saat:

a. terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.
d. Belanja yang tidak melalui RKUD diakui saat belanja telah di sahkan BUD dalam SP2B.

4.16.2.3 Pengukuran

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SP2D) dan diukur berdasarkan azas bruto.

4.16.2.4 Penyajian dan Pengungkapan

Belanja Pemerintah Daerah disajikan dan diungkapkan dalam:

a) Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran daerah;
b) Laporan Arus Kas masuk kategori Aktivitas Operasi;
c) Laporan Arus Kas masuk kategori Aktivitas Investasi;
d) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

4.17 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

4.17.1 Definisi

Menurut PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahuntahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Jenis-jenis pembiayaan Pemerintah Daerah terdiri dari:

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) daerah tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pembayaran utang, pembentukan dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

4.17.2 Pengakuan

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa bendahara Umum Daerah.

4.17.3 Pengukuran

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.17.4 Penyajian dan Pengungkapan

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan dalam LRA, Laporan Arus Kas (Aktivitas Investasi atau Aktivitas Pendanaan), serta diungkapkan dalam CaLK.

4.18 Kebijakan Akuntansi SILPA/SIKPA/SAL

4.18.1 Definisi

Mengacu pada PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA/SiKPA disajikan pada LRA dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Sedangkan SAL disajikan pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. SAL dipengaruhi oleh SiLPA/SiKPA dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya dilaporkan pada Laporan Konsolidasian.

4.18.2 Penyajian

SiLPA/SiKPA disajikan pada LRA dan LPSAL. Sedangkan SAL disajikan pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

4.19 Kebijakan Akuntansi Transaksi Transitoris (Transaksi Yang Tidak Mengubah Posisi Kas)

4.19.1 Definisi

Transaksi Transitoris (non anggaran) adalah transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Adapun jenis-jenis transaksi transitoris Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1) Transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

   Transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah transaksi kas yang berasal dari potongan langsung gaji pokok dan tunjangan keluarga pegawai negeri/pejabat daerah, dan tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil Daerah, serta jenis kas transitoris lainnya untuk disalurkan kepada Pihak Ketiga. Yang termasuk dalam kas transitoris antara lain Taspen, Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Iuran Jaminan Kematian, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, PPN Pusat, Taperum, dan Iuran Wajib Pegawai.
2) Transaksi pemindahbukuan/kiriman uang
3) Transaksi pemindahbukuan/kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening Bendahara Umum Daerah. Dalam hal terjadi pemindahbukuan antar rekening dari rekening valas ke rekening rupiah atau rekening valas lainnya maka perlu diakui adanya selisih kurs terealisasi. Selisih kurs terealisasi tersebut dilaporkan dalam LRA dan Laporan Operasional.
4) Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUD
5) Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUD merupakan transaksi antara rekening BUD dengan rekening pihak ketiga yang disebabkan karena kesalahan pemindahbukuan.
6) Uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam melakukan suatu pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya atau jaminan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Sebagai contoh uang jaminan dimaksud antara lain uang jaminan pekerjaan, uang jaminan pemeliharaan, uang jaminan bongkar reklame, dan jaminan lainnya; sehingga apabila ada kegagalan dalam pekerjaan atau penyebab lain yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan maka uang jaminan ini menjadi milik pihak pemberi pekerjaan, dalam hal ini pemerintah daerah.
7) Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.19.2 Penyajian dan Pengungkapan

Transaksi transitoris disajikan dalam Laporan Arus Kas sebagai Aktivitas Transitoris dan diungkapkan dalam CaLK. Hal-hal yang diungkapkan pada CaLK antara lain:

1) Rincian jenis transaksi transitoris;
2) Pengaruh transaksi transitoris terhadap aset atau kewajiban; dan
3) Informasi Mutasi Saldo.

4.20 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Dan Peristiwa Luar Biasa

4.20.1 Definisi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kesalahan adalah Penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya, yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah Tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Peristiwa luar biasa adalah Kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal Pemerintah Daerah dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Daerah sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau aset/kewajiban.

4.20.2 Koreksi Kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan, kesalahan mungkin timbul adanya: keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran; kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi; kesalahan interpretasi fakta; dan kecurangan atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan yang tidak berulang;

   Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

   1) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

      Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

   2) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

      Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.

      Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan. Kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas adalah belanja untuk membeli perabotan kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas.

2. Kesalahan yang berulang dan sistemik

   Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah Kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi, contoh: penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi. Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dapat dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan.

4.20.3 Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah perlu membandingkan laporan keuangan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas, maka kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, arus kas yang lebih relevan dan lebih handal dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
c. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.20.4 Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian yang dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat, sehingga memerlukan perubahan/ pergeseran anggaran secara mendasar.

Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran Belanja Tidak Terduga, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal harus menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak dikategorikan peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat dari penyerapan dana sebesar itu, Pemerintah Daerah memerlukan perubahan anggaran atau pergeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa, yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tidak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban Pemerintah Daerah. Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut ini:

1. Tidak merupakan kegiatan normal dari Pemerintah Daerah;
2. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang-ulang;
3. Berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Daerah; dan
4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Belanja Tak Terduga diakui pada saat keluar dari rekening kas umum daerah, sebesar nilai yang tercantum dalam dokumen SP2D sedangkan pada laporan operasional belanja tak terduga diakui pada pos luar biasa.

Pencatatan pada pos luar biasa dikecualikan apabila belanja tak terduga digunakan untuk pengadaan Aset Tetap, maka akan diakui sebagai Aset Tetap pada SKPD yang menggunakan Aset Tetap tersebut.

4.20 Kebijakan Akuntansi BLUD

4.20.1 Pendahuluan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, satuan kerja dapat ditetapkan menjadi satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLUD). Satuan kerja tersebut diberikan fleksibitas pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan tanpa mengutamakan keuntungan, melakukan kegiatannya dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. Satuan kerja pemerintah dimaksud memberikan layanan publik, seperti pemberian layanan barang/jasa, pengelolaan dana khusus, dan pengelolaan kawasan.

Sesuai dengan ketentuan, satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara lain pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan utang-piutang, pengelolaan investasi dan pengadaan barang/jasa, kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya.

4.20.2 Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan

BLUD merupakan instansi di lingkungan pemerintah daerah yang mengelola kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai instansi pemerintah daerah BLUD menerapkan kebijakan akuntansi berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan.

BLUD adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBD;
2. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundangundangan;
3. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
4. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
5. mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
6. memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
7. mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/ entitas pelaporan yang membawahinya;
8. mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; dan
9. laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya.

4.20.3 Definisi

BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

4.20.4 Laporan Keuangan BLUD

Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD. Laporan keuangan setidak-tidaknya terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. CaLK

4.20.5 Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan BLUD

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk.

4.20.6 Periode Pelaporan

Laporan keuangan BLUD disajikan paling kurang sekali dalam setahun.

4.20.7 Kebijakan Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akun di BLUD

Kebijakan Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akun di BLUD diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi BLUD.

4.20.8 Penggabungan Laporan Keuangan BLUD Ke Dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya. Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya.

Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yang membawahinya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (reciprocal accounts) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu Pemerintah Daerah kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.

4.21 Kebijakan Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah

4.21.1 Definisi

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan

pertanggungjawaban keuangan daerah berupa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Standar akuntansi pemerintahan tersebut telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akural pada Pemerintah Daerah.

Salah satu asas umum pengelolaan keuangan daerah bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui RKUD yang dikelola oleh BUD. Jika terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD, pemerintah mengakui pendapatan dan belanja daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan dan pengeluaran Daerah yang tidak melalui RKUD, dapat berupa:

1. pendapatan dan belanja Dana BOS;
2. pendapatan dan belanja dana kapitasi bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
3. pendapatan dan belanja BLUD;
4. pendapatan dan belanja Dana Desa; dan
5. pendapatan dan belanja Hibah langsung.

4.21.1.1 Pendapatan dan belanja Dana BOS

Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan menengah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.

Pendapatan Dana BOS dikelola oleh Satuan Pendidikan dan digunakan untuk membiayai belanja atau operasional penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.21.1.2 Pendapatan dan belanja Dana Kapitasi bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, disebutkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
2. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan;
3. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
4. Pembayaran Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan dan digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP;

4.21.1.3 Pendapatan pendapatan dan belanja BLUD Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, dan pembiayaan.

4.21.1.4 Pendapatan dan belanja Dana Desa Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

4.21.1.5 Pendapatan dan belanja Hibah Langsung Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menerima hibah yang bersumber sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis, berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pendapatan atas penerimaan dana yang bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk uang/barang tersebut dapat digunakan langsung oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang secara fungsional melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Penggunaan hibah langsung dalam bentuk uang dilakukan tanpa terlebih dahulu disetor ke RKUD dan secara analogis diterapkan pada belanja daerah. Penggunaan hibah langsung dalam bentuk barang digunakan langsung oleh perangkat daerah yang secara fungsional menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

4.21.2 Pihak-pihak terkait dalam sistem akuntansi dan pelaporan terhadap belanja oleh SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD adalah:

4.21.2.1 Penanggungjawab penggunaan dana

Penanggungjawab penggunaan dana atas pendapatan yang diterima dan digunakan langsung oleh SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD adalah Kepala SKPD/Unit SKPD yang diberi tanggungjawab terhadap penggunaan dana yang diterima dan digunakan langsung yang tidak melalui RKUD. Penanggungjawab penggunaan dana mempunyai tugas:

1. Bertanggungjawab terhadap pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD;
2. Menyampaikan laporan pendapatan dan belanja kepada kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

4.21.2.2 Bendahara SKPD/Unit SKPD

Bendahara SKPD/Unit SKPD atau nama lain yang disetarakan, mempunyai tugas:

1. Mencatat dan membukukan semua pendapatan dan belanja ke dalam Buku Kas Umum (BKU);
2. Menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pendapatan dan belanja.

4.21.2.3 PPK-SKPD

PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) yang disampaikan oleh Kepala SKPD kepada PPKD;
2. Mencatat transaksi/kejadian akuntansi atas pendapatan dan belanja berdasarkan bukti yang telah disahkan oleh SKPKD;
3. Melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan dan belanja ke dalam buku besar masing-masing;

4. Menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK.

4.21.2.4 Kepala SKPD

Kepala SKPD selaku pengguna anggaran mempunyai tugas menandatangani dan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) atas pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD kepada SKPKD selaku BUD.

4.21.2.5 BUD

PPKD selaku BUD melakukan pengesahan terhadap pendapatan dan belanja yang diterima langsung oleh SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD berdasarkan SP3B yang diusulkan oleh Kepala SKPD.

4.21.3 Pengakuan

Pendapatan diakui ketika timbul realisasi pendapatan SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran Pemerintah Daerah dengan syarat Pemerintah Daerah wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

Beban diakui ketika sudah timbul kewajiban atas belanja SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD. Belanja diakui berdasarkan realisasi jenis belanja yang tercantum dalam SP2B yang telah disahkan oleh BUD. Realisasi belanja modal diakui berdasarkan penambahan nilai aset sebesar realisasi belanja modal yang tertera dalam SP2B.

4.21.4 Pengukuran

Pendapatan, beban dan belanja daerah yang tidak melalui RKUD diukur sesuai nilai yang tertera dalam pencatatan dan pengesahan BUD atas pendapatan dan belanja di SP2B. Penerbitan SP2B dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan pemerintah daerah sebagai dasar untuk melakukan akuntansi dan pelaporan terhadap pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD.

4.21.5 Penyajian Dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan atas pendapatan dan belanja SKPD/Unit SKPD tidak melalui RKPD, disajikan dalam:

1. LRA, untuk menyajikan laporan pendapatan-LRA dan belanja;
2. Neraca, untuk menyajikan laporan yang berupa aset lancer, aset tetap, dan aset lainnya;
3. LO, untuk menyajikan laporan pendapatan-LO dan beban;
4. LPE, untuk menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir;
5. CaLK, untuk menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera salam, LRA, Neraca, LO dan LPE

Jika pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD belum ditetapkan dalam perda tentang APBD pada tahun anggaran berkenaan, maka dalam rangka penyusunan laporan keuangan SKPD, paling sedikit disajikan dalam Neraca, LO, dan CaLK.

Penyajian pada laporan keuangan atas pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang tidak melalui RKUD, disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK. Jika pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun anggaran berkenaan, maka dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, paling sedikit disajikan dalam Neraca, LO, LAK, dan CaLK.

4.22 Masa Manfaat Aset Tetap

Berikut ini adalah tabel masa manfaat terkait aset tetap:

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	01		ALAT BESAR	
1	3	2	01	01	ALAT BESAR DARAT	10
1	3	2	01	02	ALAT BESAR APUNG	8
1	3	2	01	03	ALAT BANTU	7
1	3	2	02		ALAT ANGKUTAN	
1	3	2	02	01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7
1	3	2	02	02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
1	3	2	02	03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
1	3	2	02	04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3
1	3	2	02	05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
1	3	2	03		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
1	3	2	03	01	ALAT BENGKEL BERMESIN	10
1	3	2	03	02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
1	3	2	03	03	ALAT UKUR	5
1	3	2	04		ALAT PERTANIAN	
1	3	2	04	01	ALAT PENGOLAHAN	4
1	3	2	05		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
1	3	2	05	01	ALAT KANTOR	5
1	3	2	05	02	ALAT RUMAH TANGGA	5
1	3	2	05	03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5
1	3	2	06		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
1	3	2	06	01	ALAT STUDIO	5
1	3	2	06	02	ALAT KOMUNIKASI	5
1	3	2	06	03	PERALATAN PEMANCAR	10
1	3	2	06	04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	5
1	3	2	07		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
1	3	2	07	01	ALAT KEDOKTERAN	5
1	3	2	07	02	ALAT KESEHATAN UMUM	5
1	3	2	08		ALAT LABORATORIUM	
1	3	2	08	01	UNIT ALAT LABORATORIUM	8
1	3	2	08	02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	8
1	3	2	08	03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	10
1	3	2	08	04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	08	05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10
1	3	2	08	06	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	10
1	3	2	08	07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
1	3	2	08	08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15
1	3	2	08	09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	7
1	3	2	09		ALAT PERSENJATAAN	
1	3	2	09	01	SENJATA API	10
1	3	2	09	02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	5
1	3	2	09	03	SENJATA SINAR	3
1	3	2	09	04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	5
1	3	2	10		KOMPUTER	
1	3	2	10	01	KOMPUTER UNIT	4
1	3	2	10	02	PERALATAN KOMPUTER	4
1	3	2	11		ALAT EKSPLORASI	
1	3	2	11	01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	7
1	3	2	11	02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	7
1	3	2	12		ALAT PENGEBORAN	
1	3	2	12	01	ALAT PENGEBORAN MESIN	7
1	3	2	12	02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	7
1	3	2	13		ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
1	3	2	13	01	SUMUR	7
1	3	2	13	02	PRODUKSI	7
1	3	2	13	03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	7
1	3	2	14		ALAT BANTU EKSPLORASI	
1	3	2	14	01	ALAT BANTU EKSPLORASI	7
1	3	2	14	02	ALAT BANTU PRODUKSI	7
1	3	2	15		ALAT KESELAMATAN KERJA	
1	3	2	15	01	ALAT DETEKSI	5

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	15	02	ALAT PELINDUNG	5
1	3	2	15	03	ALAT SAR	5
1	3	2	15	04	ALAT KERJA PENERBANGAN	5
1	3	2	16		ALAT PERAGA	
1	3	2	16	01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	4
1	3	2	17		PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
1	3	2	17	01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	5
1	3	2	18		RAMBU - RAMBU	
1	3	2	18	01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	5
1	3	2	18	02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5
1	3	2	18	03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	5
1	3	2	19		PERALATAN OLAH RAGA	
1	3	2	19	01	PERALATAN OLAH RAGA	5
1	3	3	01		BANGUNAN GEDUNG	
1	3	3	01	01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
1	3	3	01	02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
1	3	3	02		MONUMEN	
1	3	3	02	01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	50
1	3	3	03		BANGUNAN MENARA	
1	3	3	03	01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40
1	3	3	04		TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
1	3	3	04	01	TUGU/TANDA BATAS	50
1	3	4	01		JALAN DAN JEMBATAN	
1	3	4	01	01	JALAN	10
1	3	4	01	02	JEMBATAN	50
1	3	4	02		BANGUNAN AIR	
1	3	4	02	01	BANGUNAN AIR IRIGASI	50
1	3	4	02	02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50
1	3	4	02	03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25
1	3	4	02	04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
1	3	4	02	05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30
1	3	4	02	06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
1	3	4	02	07	BANGUNAN AIR KOTOR	40

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	4	03		INSTALASI	
1	3	4	03	01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	30
1	3	4	03	02	INSTALASI AIR KOTOR	30
1	3	4	03	03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10
1	3	4	03	04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
1	3	4	03	05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
1	3	4	03	06	INSTALASI GARDU LISTRIK	40
1	3	4	03	07	INSTALASI PERTAHANAN	30
1	3	4	03	08	INSTALASI GAS	30
1	3	4	03	09	INSTALASI PENGAMAN	20
1	3	4	03	10	INSTALASI LAIN	
1	3	4	04		JARINGAN	
1	3	4	04	01	JARINGAN AIR MINUM	30
1	3	4	04	02	JARINGAN LISTRIK	40
1	3	4	04	03	JARINGAN TELEPON	20
1	3	4	04	04	JARINGAN GAS	30
1	3	5	01		BAHAN PERPUSTAKAAN	
1	3	5	01	01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	4
1	3	5	01	02	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	4
1	3	5	01	03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	4
1	3	5	01	04	MUSIK	4
1	3	5	01	05	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)	4
1	3	5	01	06	THREE DIMENSIONAL ARTEFACS AND REALITA	4

Berikut ini adalah tabel penambahan masa manfaat terkait aset tetap:

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak bermesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga		>0% s.d. 25%	0
Alat Kantor	Overhaul	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
Alat Studio		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol/Prasasti			
Tugu/Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Aset Tetap Dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	>0% s.d. 100%	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d. 100%	5

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan, sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan laporan keuangan Perangkat Daerah selaku entitas yang secara struktural berada dibawahnya.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

5.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Anggaran yang dimuat dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan anggaran yang diuraikan pada Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 11);
2. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
3. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 17 Januari 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2023 tentang Perubahan Keempat Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang Perubahan Kelima Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang Perubahan Keenam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 30 September 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 10);
10. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 27 Tahun 2024 tanggal 30 September 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 29 Tahun 2024 tanggal 30 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

12. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 34 Tahun 2024 tanggal 22 November 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 38 Tahun 2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
15. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.
Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan;
2. Belanja;
3. Transfer;
4. Surplus atau defisit;
5. Penerimaan pembiayaan;
6. Pengeluaran pembiayaan;
7. Pembiayaan neto; dan
8. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.

Pendapatan Kota Bogor Tahun Anggaran 2024 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2024 serta realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pendapatan Asli Daerah	1.461.100.063.862,00	1.458.619.452.757,24	99,83	(2.480.611.104,76)	1.338.618.268.168,80	120.001.184.588,44	8,96
2	Pendapatan Transfer	1.731.609.984.212,00	1.711.878.175.798,00	98,86	(19.731.808.414,00)	1.628.857.302.371,00	83.020.873.427,00	5,10
Jumlah		**3.192.710.048.074,00**	**3.170.497.628.555,24**	**99,30**	**(22.212.419.518,76)**	**2.967.475.570.539,80**	**203.022.058.015,44**	**6,84**

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Anggaran Pendapatan Daerah TA 2024 sebesar Rp3.192.710.048.074,00 terealisasi sebesar Rp3.170.497.628.555,24 atau 99,30% dari Anggaran, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp2.967.475.570.539,80 mengalami kenaikan sebesar Rp203.022.058.015,44 atau 6,84%. Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2
Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4		(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pajak Daerah	984.800.000.000,00	973.768.860.850,00	98,88	(11.031.139.150,00)	897.753.380.910,00	76.015.479.940,00	8,47
2	Retribusi Daerah	417.231.785.419,00	417.445.452.990,24	100,05	213.667.571,24	31.081.390.548,00	386.364.062.442,24	1.243,07
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	34.537.163.762,00	34.287.163.763,00	99,28	(249.999.999,00)	33.960.776.435,00	326.387.328,00	0,96
4	Lain-lain PAD yang Sah	24.531.114.681,00	33.117.975.154,00	135,00	8.586.860.473,00	375.822.720.275,80	(342.704.745.121,80)	(91,19)
Jumlah		**1.461.100.063.862,00**	**1.458.619.452.757,24**	**99,83**	**(2.480.611.104,76)**	**1.338.618.268.168,80**	**120.001.184.588,44**	**8,96**

Berdasarkan tabel diatas anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.461.100.063.862,00 terealisasi sebesar Rp1.458.824.079.309,24 atau 99,83%, dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.338.618.268.168,80 realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp120.001.184.588,44 atau 8.96%. Pelampauan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 terdapat pada sektor Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah, sedangkan Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

5.1.1.1.1 PAJAK DAERAH

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis pajak yang dipungut pada tahun 2024 terdiri dari:

1. PBJT Jasa Perhotelan
2. PBJT Makanan dan/atau Minuman
3. PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan
4. Pajak Reklame
5. PBJT Tenaga Listrik
6. PBJT Jasa Parkir
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penganggaran dan realisasi Pajak Daerah masih disajikan sesuai dengan peraturan daerah tentang penetapan APBD 2024. Anggaran dan realisasi pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 serta realisasi Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.3
Pajak Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pajak Hotel	113.000.000.000,00	123.207.802.097,00	109,03	10.207.802.097,00	111.465.747.482,00	11.742.054.615,00	10,53
2	Pajak Restoran	202.500.000.000,00	208.515.593.649,00	102,97	6.015.593.649,00	194.752.128.901,00	13.763.464.748,00	7,07
3	Pajak Hiburan	22.900.000.000,00	29.358.580.222,00	128,20	6.458.580.222,00	22.605.708.227,00	6.752.871.995,00	29,87
4	Pajak Reklame	9.220.000.000,00	9.736.486.534,00	105,60	516.486.534,00	10.809.834.939,00	(1.073.348.405,00)	(9,93)
5	Pajak Penerangan Jalan	81.080.000.000,00	95.818.548.299,00	118,18	14.738.548.299,00	61.678.951.202,00	34.139.597.097,00	55,35
6	Pajak Parkir	6.400.000.000,00	7.859.694.368,00	122,81	1.459.694.368,00	14.652.462.793,00	(6.792.768.425,00)	(46,36)
7	Pajak Air Tanah	1.700.000.000,00	1.924.708.540,00	113,22	224.708.540,00	2.545.938.043,00	(621.229.503,00)	(24,40)
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	200.000.000.000,00	210.911.617.241,00	105,46	10.911.617.241,00	219.099.681.865,00	(8.188.064.624,00)	(3,74)

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	348.000.000.000,00	286.435.829.900,00	82,31	(61.564.170.100,00)	260.142.927.458,00	26.292.902.442,00	10,11
Jumlah		**984.800.000.000,00**	**973.768.860.850,00**	**98,88**	**(11.031.139.150,00)**	**897.753.380.910,00**	**76.015.479.940,00**	**8,47**

Target Pajak Daerah tahun 2024 adalah sebesar Rp984.800.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp973.768.860.850,00 atau 98,88%, realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp76.015.479.940,00 atau 8,47%.

Ketercapaian target pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah dan pajak PBB P2 adalah hasil ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Daerah yang diantaranya adalah:

a. Penjaringan Wajib Pajak Baru sehingga selama tahun 2024 terdapat penambahan Wajib Pajak baru sebanyak 150 Wajib Pajak, Wajib Pajak Hotel sebanyak 8, pajak parkir sebanyak 15 Wajib Pajak, 22 Wajib Pajak Kesenian, 129 Wajib Pajak Reklame. Sehingga total keseluruhan terdapat 324 Wajib Pajak baru.
b. Sosialisasi dan penyuluhan kewajiban Pajak Daerah terhadap Wajib Pajak;
c. Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
d. Kerjasama dengan Kejaksaan dalam upaya penagihan pajak;
e. Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam rangka pertukaran data perpajakan dan pengawasan Wajib Pajak;
f. Penilaian individual dalam rangka penyesuaian NJOP PBB P2;
g. Perluasan menjadi 22 kanal pembayaran pajak dan pelaksanaan Kegiatan Mobil keliling pembayaran pajak; dan
h. Kegiatan Mobil Keliling dan Operasi Sisir pembayaran PBB P2 yang melibatkan instansi kecamatan dan kelurahan.

BPHTB terealisasi sebesar Rp286.435.829.900,00 atau 82,31% dari target sebesar Rp348.000.000.000,00. Ketidaktercapaian BPHTB diakibatkan karena dalam perencanaan target BPHTB masih memperhitungkan rencana pembayaran BPHTB dari PT. Perkebunan Nasional II. Selain itu perubahan peraturan perundang undangan terkait besaran NPOPTKP BPHTB selain waris mengalami peningkatan yang semula Rp60.000.000,00 menjadi Rp80.000.000,00 yang berpengaruh terhadap realisasi pendapatan dari sektor BPHTB. Terdapat 3.455 bidang tanah dengan luas bidang sebesar 595.729 m^2 yang sudah bersertifikat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap namun masih terhutang BPHTB dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4
BPHTB Terhutang

No	Tahun	Sertifikat atas Program PTSL	
		Jumlah Bidang	Luas Bidang (m2)
1	2018	25	6.607
2	2019	2.373	483.458
3	2021	1.023	99.857
4	2022	34	5.807
Jumlah		**3.455**	**595.729**

5.1.1.1.2 RETRIBUSI DAERAH

Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023. Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Realisasi Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.5
Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Retribusi Jasa Umum	401.315.811.304,00	400.997.137.220,24	99,92	(318.674.083,76)	16.742.835.953,00	384.254.301.267,24	2.295,04
2	Retribusi Jasa Usaha	6.511.761.306,00	7.953.316.342,00	122,14	1.441.555.036,00	6.380.013.963,00	1.573.302.379,00	24,66
3	Retribusi Perizinan Tertentu	9.404.212.809,00	8.494.999.428,00	90,33	(909.213.381,00)	7.958.540.632,00	536.458.796,00	6,74
Jumlah		**417.231.785.419,00**	**417.445.452.990,24**	**100,05**	**213.667.571,24**	**31.081.390.548,00**	**386.364.062.442,24**	**1.243,07**

Berdasarkan tabel diatas realisasi retribusi daerah tahun 2024 sebesar Rp417.445.452.990,24 atau 100,05% dari anggaran tahun 2024 sebesar Rp417.231.785.419,00 realisasi Tahun Anggaran 2024 tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp386.364.062.442,24. Kenaikan disebabkan oleh adanya perubahan rekening Retribusi Kesehatan yang pada tahun 2023 dicatat sebagai bagian dari Lain-Lain PAD yang sah sedangkan pada tahun 2024 dicatat pada Retribusi Daerah sebagai amanat dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.1.1.1.2.1 RETRIBUSI JASA UMUM

Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Realisasi retribusi jasa umum pada tahun anggaran 2024 dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.6
Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	381.659.622.704,00	383.213.924.158,24	100,41	1.554.301.454,24	63.630.000,00	383.150.294.158,24	602.153,53
2	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	240.000.000,00	246.100.000,00	102,54	6.100.000,00	227.050.000,00	19.050.000,00	8,39
3	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	55.000.000,00	55.027.345,00	100,05	27.345,00	45.368.621,00	9.658.724,00	21,29
4	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	35.891.500,00	39.171.500,00	109,14	3.280.000,00	636.841.750,00	(597.670.250,00)	(93,85)
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	201.657.050,00	(201.657.050,00)	(100,00)
6	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	14.813.571.600,00	14.682.315.717,00	99,11	(131.255.883,00)	11.903.096.282,00	2.779.219.435,00	23,35
7	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.504.800.000,00	2.753.673.000,00	61,13	(1.751.127.000,00)	2.133.247.000,00	620.426.000,00	29,08
8	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.020.000,00	(1.184.020.000,00)	(100,00)
9	Retribusi Pelayanan Tera/Tera	0,00	0,00	0,00	0,00	200.302.750,00	(200.302.750,00)	(100,00)
10	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara	6.925.500,00	6.925.500,00	100,00	0,00	147.622.500,00	(140.697.000,00)	(95,31)
Jumlah		**401.315.811.304,00**	**400.997.137.220,24**	**99,92**	**(318.674.083,76)**	**16.742.835.953,00**	**384.254.301.267,24**	**2.295,04**

Tabel diatas menunjukkan realisasi retribusi jasa umum tahun anggaran 2024 sebesar Rp400.997.137.220,24 atau mencapai 99,92% dari anggaran sebesar Rp401.315.811.304,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 2.295,04% atau sebesar Rp384.254.301.267,24 dibandingkan dengan tahun anggaran 2023.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mencapai 99,11% dari target, yang salah satunya disebabkan oleh masih dilaksanakannya pemutakhiran data dan potensi wajib retribusi untuk kode sanitasi 1 di PDAM yang biaya sanitasinya Rp0,00 dengan rata-rata berjumlah 1000 Wajib Retribusi setiap bulannya.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum hanya mencapai 61,13% dari target, hambatan dan kendala yang dihadapi adalah adanya 16 titik lokasi parkir yang sudah tidak dipungut retribusi dikarenakan alih fungsi menjadi pedestrian, pembangunan pasar, untuk kelancaran lalu lintas dan Toko/ruko sudah tidak

beroperasional lagi, yang pada awalnya berjumlah 113 titik lokasi parkir di tepi jalan umum dan 2 titik lokasi tempat parkir khusus sesuai dengan Keputusan Wali Kota Bogor No. 551.45 – 510 Tahun 2020 tentang Tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus parkir Di Kota Bogor, berikut 16 titik lokasi yang sudah tidak dipungut retribusi:

Tabel 5.1.7
Titik Lokasi yang Tidak Dipungut Retribusi TA 2024

No	Nama Jalan	Titik Lokasi
1	Jalan Dadali	Bahu Jl. Akses Jalan Samping SPBU
2	Jalan Dewi Sartika	Bahu Jl. Depan Gang Batu/Samping Bank UOB
3	Jalan Dewi Sartika	Bahu Jl. Depan Berlian Elektronik
4	Jl. Ir. H Djuanda	Bahu Jl. Sebelah Kiri Bank BCA
5	Jl. Kantor Batu	Bahu Jl. Depan Toko Karpet s/d Samping Perpustakaan LIPI
6	Jl. Batutulis	Bahu Jl. Depan Toko Bangunan Makmur
7	Jl. Otto Iskandardinata	Bahu Jl. Depan Foto Copy Aputis s/d Sebelum Jembatan Sungai Ciliwung
8	Jl. Pandu Raya	Bahu Jl. Dari Jembatan s/d Depan Bank Sinar Mas
9	Jl. RA. Wiranata	Bahu Jl. Samping Alun - Alun Empang
10	Jalan H. Achmad Sobana, SH	Bahu Jl. Depan Sop Ma Emun s/d Simpang Bantarjati
11	Jalan Heulang	Bahu Jl. Samping Kantor Imigrasi (Lajur Kanan)
12	Jalan Merak	Bahu Jl. Depan Rumah Bersalin Pasutri
13	Jalan Pemuda	Bahu Bundaran Air Mancur
14	Jalan R. Saleh Syarif Bustaman	Bahu Jl. Depan Toko Makanan Burung
15	Jl. Salak	Bahu Jl. Seputar Taman Kencana
16	Jl. Mayjen Ishak Juarsa	Bahu Jl. Depan Bubur Kabita

Rincian realisasi Retribusi Jasa Umum pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.8
Realisasi Retribusi Jasa Umum per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS KESEHATAN							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	73.870.500.000,00	0,00	0,00	(73.870.500.000,00)	0,00	0,00	0,00
2	PUSKESMAS BOGOR SELATAN							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	3.161.947.874,00	0,00	3.161.947.874,00	0,00	3.161.947.874,00	0,00
3	PUSKESMAS CIPAKU							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	3.702.704.768,00	0,00	3.702.704.768,00	0,00	3.702.704.768,00	0,00
4	PUSKESMAS BONDONGAN							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	2.442.173.445,00	0,00	2.442.173.445,00	0,00	2.442.173.445,00	0,00
5	PUSKESMAS LAWANG GINTUNG							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	1.772.437.527,00	0,00	1.772.437.527,00	0,00	1.772.437.527,00	0,00
6	PUSKESMAS BOGOR TIMUR							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	4.008.086.693,00	0,00	4.008.086.693,00	0,00	4.008.086.693,00	0,00
7	PUSKESMAS PULO ARMYN							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	2.441.152.903,00	0,00	2.441.152.903,00	0,00	2.441.152.903,00	0,00
8	PUSKESMAS BOGOR TENGAH							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	1.923.955.308,00	0,00	1.923.955.308,00	0,00	1.923.955.308,00	0,00

No	SKPD	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
9	PUSKESMAS SEMPUR							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	1.606.234.873,00	0,00	1.606.234.873,00	0,00	1.606.234.873,00	0,00
10	PUSKESMAS GANG AUT							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	1.078.677.618,00	0,00	1.078.677.618,00	0,00	1.078.677.618,00	0,00
11	PUSKESMAS BELONG							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	684.435.857,00	0,00	684.435.857,00	0,00	684.435.857,00	0,00
12	PUSKESMAS MERDEKA							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	2.120.165.754,00	0,00	2.120.165.754,00	0,00	2.120.165.754,00	0,00
13	PUSKESMAS SEMPLAK							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	2.718.489.760,00	0,00	2.718.489.760,00	0,00	2.718.489.760,00	0,00
14	PUSKESMAS PANCASAN							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	2.463.110.019,00	0,00	2.463.110.019,00	0,00	2.463.110.019,00	0,00
15	PUSKESMAS PASIR MULYA							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	3.035.831.908,00	0,00	3.035.831.908,00	0,00	3.035.831.908,00	0,00
16	PUSKESMAS GANG KELOR							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	2.686.283.153,00	0,00	2.686.283.153,00	0,00	2.686.283.153,00	0,00
17	PUSKESMAS SINDANG BARANG							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	3.392.514.829,00	0,00	3.392.514.829,00	0,00	3.392.514.829,00	0,00
18	PUSKESMAS BOGOR UTARA							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	3.672.242.535,00	0,00	3.672.242.535,00	0,00	3.672.242.535,00	0,00
19	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	2.120.285.605,00	0,00	2.120.285.605,00	0,00	2.120.285.605,00	0,00
20	PUSKESMAS WARUNG JAMBU							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	2.669.544.637,00	0,00	2.669.544.637,00	0,00	2.669.544.637,00	0,00
21	PUSKESMAS TANAH SAREAL							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	2.623.495.696,00	0,00	2.623.495.696,00	0,00	2.623.495.696,00	0,00
22	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	1.051.734.895,00	0,00	1.051.734.895,00	0,00	1.051.734.895,00	0,00
23	PUSKESMAS KEDUNG BADAK							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	2.925.399.066,00	0,00	2.925.399.066,00	0,00	2.925.399.066,00	0,00
24	PUSKESMAS KAYU MANIS							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	2.564.318.930,00	0,00	2.564.318.930,00	0,00	2.564.318.930,00	0,00
25	PUSKESMAS MEKARWANGI							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	3.412.892.836,00	0,00	3.412.892.836,00	0,00	3.412.892.836,00	0,00
26	PUSKESMAS MULYAHARJA							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	1.962.519.728,00	0,00	1.962.519.728,00	0,00	1.962.519.728,00	0,00
27	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	1.095.071.700,00	0,00	1.095.071.700,00	0,00	1.095.071.700,00	0,00

No	SKPD	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
28	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH							
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	307.789.122.704,00	319.878.216.241,24	103,93	12.089.093.537,24	0,00	319.878.216.241,24	0,00
29	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan	240.000.000,00	246.100.000,00	102,54	6.100.000,00	227.050.000,00	19.050.000,00	8,39
	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	55.000.000,00	55.027.345,00	100,05	27.345,00	45.368.621,00	9.658.724,00	21,29
30	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN							
	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan	35.891.500,00	39.171.500,00	109,14	3.280.000,00	636.841.750,00	(597.670.250,00)	(93,85)
31	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN							
	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	201.657.050,00	(201.657.050,00)	(100,00)
32	DINAS LINGKUNGAN HIDUP							
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	14.813.571.600,00	14.682.315.717,00	99,11	(131.255.883,00)	11.903.096.282,00	2.779.219.435,00	23,35
33	DINAS PERHUBUNGAN							
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan	4.504.800.000,00	2.753.673.000,00	61,13	(1.751.127.000,00)	2.133.247.000,00	620.426.000,00	29,08
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.020.000,00	(1.184.020.000,00)	(100,00)
34	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,							
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	200.302.750,00	(200.302.750,00)	(100,00)
35	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	6.925.500,00	6.925.500,00	100,00	0,00	147.622.500,00	(140.697.000,00)	(95,31)
Jumlah		401.315.811.304,00	400.997.137.220,24	99,92	(318.674.083,76)	16.679.205.953,00	384.317.931.267,24	2.304,17

5.1.1.1.2.2 RETRIBUSI JASA USAHA

Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha.

Realisasi Retribusi Jasa Usaha per 31 Desember 2024 dan 2023 dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.9

Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.433.953.306,00	5.420.786.342,00	122,26	986.833.036,00	4.224.552.643,00	1.196.233.699,00	28,32
2	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	0,00	118.145.320,00	(118.145.320,00)	(100,00)
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	46.008.000,00	54.970.000,00	119,48	8.962.000,00	52.120.000,00	2.850.000,00	5,47
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	700.000.000,00	813.828.000,00	116,26	113.828.000,00	632.902.000,00	180.926.000,00	28,59
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.331.800.000,00	1.663.732.000,00	124,92	331.932.000,00	1.352.294.000,00	311.438.000,00	23,03
Jumlah		6.511.761.306,00	7.953.316.342,00	122,14	1.441.555.036,00	6.380.013.963,00	1.573.302.379,00	24,66

Tabel diatas menunjukkan realisasi retribusi jasa usaha tahun anggaran 2024 sebesar Rp7.953.316.342,00 atau mencapai 122,14% dari anggaran sebesar Rp6.511.761.306,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 24,66% atau sebesar Rp1.573.302.379,00 dibandingkan dengan tahun anggaran 2023. Rincian realisasi Retribusi Jasa Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.10
Realisasi Retribusi Jasa Usaha per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	150.000.000,00	151.750.000,00	101,17	1.750.000,00	146.350.000,00	5.400.000,00	3,69
2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN							
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.854.480.000,00	1.932.775.000,00	104,22	78.295.000,00	1.943.345.000,00	(10.570.000,00)	(0,54)
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	81.800.000,00	110.430.000,00	135,00	28.630.000,00	0,00	0,00	0,00
3	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							
	Retribusi Rumah Potong Hewan	700.000.000,00	813.828.000,00	116,26	113.828.000,00	632.902.000,00	180.926.000,00	28,59
4	DINAS PERHUBUNGAN							
	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	0,00	118.145.320	(118.145.320,00)	(100,00)
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	46.008.000	54.970.000	119,48	8.962.000,00	52.120.000	2.850.000,00	5,47
5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	350.000.000,00	559.620.848,00	159,89	209.620.848,00	216.782.911,00	342.837.937,00	158,15
6	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA							
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.250.000.000,00	1.553.302.000,00	124,26	303.302.000,00	1.352.294.000,00	201.008.000,00	14,86
7	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN							
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	45.000.000,00	54.000.000,00	120,00	9.000.000,00	41.750.000,00	12.250.000,00	29,34
8	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.034.473.306,00	2.722.640.494,00	133,83	688.167.188,00	1.876.324.732,00	846.315.762,00	45,10
Jumlah		**6.511.761.306,00**	**7.953.316.342,00**	**122,14**	**1.441.555.036,00**	**6.380.013.963,00**	**1.573.302.379,00**	**24,66**

5.1.1.1.2.3 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Rincian realisasi Retribusi Perizinan Tertentu per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.11

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	1.755.337,00	0,00	1.755.337,00	391.230.685,00	(389.475.348,00)	(99,55)
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	9.004.212.809,00	8.048.021.591,00	89,38	(956.191.218,00)	7.065.976.947,00	982.044.644,00	13,90
3	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	400.000.000,00	445.222.500,00	111,31	45.222.500,00	420.708.000,00	24.514.500,00	5,83
4	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	80.625.000,00	(80.625.000,00)	(100,00)
Jumlah		**9.404.212.809,00**	**8.494.999.428,00**	90,33	**(909.213.381,00)**	**7.958.540.632,00**	**536.458.796,00**	**6,74**

Tabel diatas menunjukkan realisasi retribusi Perizinan Tertentu tahun anggaran 2024 sebesar Rp8.494.999.428,00 atau mencapai 90,33% dari anggaran sebesar Rp9.404.212.809,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 6,74% atau sebesar Rp536.458.796,00 dibandingkan dengan tahun anggaran 2023.

Adapun kendala dalam pencapaian target Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah adanya persyaratan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 tahun Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang masih belum dapat diakomodir sepenuhnya sehingga menghambat kelancaran realisasi pendapatan. Rincian realisasi Retribusi Perizinan Tertentu pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.12

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PERHUBUNGAN							
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	80.625.000	(80.625.000,00)	(100,00)
2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	1.755.337	0,00	1.755.337,00	391.230.685,00	(389.475.348,00)	0,00
	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	400.000.000	445.222.500,00	111,31	45.222.500,00	420.708.000,00	24.514.500,00	0,00
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	9.004.212.809	8.048.021.591	89,38	(956.191.218,00)	7.065.976.947,00	982.044.644,00	0,00
Jumlah		**9.404.212.809,00**	**8.494.999.428,00**	**90,33**	**(909.213.381,00)**	**7.958.540.632,00**	**536458796,00**	**6,74**

5.1.1.1.3 PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Keuangan daerah meliputi kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala Daerah selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah dari bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Bogor pada pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, Perumda Bank Kota Bogor, Perumda Tirta Pakuan dan Perumda Pasar Pakuan

Jaya.

Pendapatan ini seluruhnya dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan realisasi TA 2024 dan 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.13

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7
1	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	4.750.663.159,00	4.750.663.159,00	100,00	0,00	5.225.479.571,00	(474.816.412,00)	(9,09)
2	Perumda Bank Kota Bogor	2.774.558.399,00	2.774.558.399,00	100,00	0,00	2.383.402.426,00	391.155.973,00	16,41
3	Perumda Tirta Pakuan	25.588.368.239,00	25.588.368.239,00	100,00	0,00	24.957.647.000,00	630.721.239,00	2,53
4	Perumda Pasar Pakuan Jaya	1.423.573.965,00	1.173.573.966,00	82,44	(249.999.999,00)	1.394.247.438,00	(220.673.472,00)	(15,83)
Jumlah		**34.537.163.762,00**	**34.287.163.763,00**	**99,28**	**(249.999.999,00)**	**33.960.776.435,00**	**326.387.328,00**	**0,96**

Tabel diatas menunjukkan realisasi Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2024 sebesar Rp34.287.163.763,00 atau mencapai 99,28% dari anggaran sebesar Rp34.537.163.762,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 0,96% atau sebesar Rp326.387.328,00 dibandingkan dengan tahun anggaran 2023.

Realisasi Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 sebagian mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2023, kecuali untuk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk yang mengalami penurunan sebesar 9,09% yang disebabkan oleh penurunan laba bersih konsolidasi tahun buku 2023 yang berpengaruh terhadap pembagian deviden dan Perumda Pasar Pakuan Jaya mengalami penurunan sebesar 15,83% yang disebabkan oleh masih adanya deviden hak Pemerintah Kota Bogor yang belum disetorkan atas laba usaha tahun 2023.

5.1.1.1.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun anggaran 2024 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.14

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.000.000.000,00	1.389.417.875,00	138,94	389.417.875,00	2.087.860.934,00	(698.443.059,00)	(33,45)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	12.629.016,00	0,00	12.629.016,00	167.802.000,00	(155.172.984,00)	(92,47)
3	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.135.000,00	(1.361.135.000,00)	(100,00)
4	Jasa Giro	3.315.080.955,00	4.035.307.746,00	121,73	720.226.791,00	5.177.638.309,00	(1.142.330.563,00)	(22,06)
5	Pendapatan Bunga	7.000.000.000,00	7.224.677.557,00	103,21	224.677.557,00	6.997.819.184,00	226.858.373,00	3,24
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	13.441.667,00	0,00	13.441.667,00	24.235.714,00	(10.794.047,00)	(44,54)
7	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	397.410.914,00	0,00	397.410.914,00	454.743.324,00	(57.332.410,00)	(12,61)
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	627.473.886,00	0,00	627.473.886,00	474.650.538,00	152.823.348,00	32,20
9	Pendapatan Denda Pajak Daerah	7.888.105.138,00	14.649.420.176,00	185,72	6.761.315.038,00	4.067.750.115,00	10.581.670.061,00	260,14
10	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	75.445.912,00	111.287.554,00	0,00	35.841.642,00	223.447.933,00	(112.160.379,00)	(50,20)
11	Pendapatan dari Pengembalian	5.251.636.097,00	3.836.302.493,00	73,05	(1.415.333.604,00)	3.926.504.331,00	(90.201.838,00)	(2,30)
12	Pendapatan BLUD	0,00	813.022.806,00	0,00	813.022.806,00	350.851.552.368,80	(350.038.529.562,80)	(99,77)
13	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	546.579,00	4.481.604,00	0,00	3935025,00	4.080.525,00	401.079,00	9,83
14	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	300.000,00	3.101.860,00	0,00	2.801.860,00	3.500.000,00	(398.140,00)	(11,38)
Jumlah		**24.531.114.681,00**	**33.117.975.154,00**	**135,00**	**8.586.860.473,00**	**375.822.720.275,80**	**(342.704.745.121,80)**	**(91,19)**

Tabel diatas menunjukkan realisasi Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun anggaran 2024 sebesar Rp33.117.975.154,00 atau mencapai 135,00% dari anggaran sebesar Rp24.531.114.681,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan 91,19% atau sebesar Rp342.704.745.121,00 dibandingkan dengan tahun anggaran 2023. Penurunan disebabkan oleh adanya perubahan rekening Retribusi Kesehatan yang pada tahun 2023 dicatat sebagai bagian dari Lain-Lain PAD yang sah sedangkan pada tahun 2024 dicatat pada Retribusi Daerah sebagai amanat dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penjelasan lebih lanjut atas Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain sebagai berikut:

a. Realisasi Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.389.471.875,00 dan Rp2.087.860.934,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.15
Realisasi Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan Tanah	24.168.075,00	24.728.650,00
2	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	40.529.200,00	0,00
3	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
4	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	1.324.720.600,00	2.063.132.284,00
Jumlah		**1.389.417.875,00**	**2.087.860.934,00**

b. Realisasi Pendapatan Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang Tidak dipisahkan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.629.016,00 dan Rp167.802.000,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.16
Realisasi Pendapatan Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang Tidak dipisahkan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hasil dari Bangun Guna Serah	0,00	167.802.000,00
2	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	12.629.016,00	0,00
Jumlah		**12.629.016,00**	**167.802.000,00**

c. Realisasi Jasa Giro Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebesar Rp4.035.307.746,00 dan Rp5.177.638.309,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.17
Realisasi Jasa Giro TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.815.384.199,00	4.941.090.813,00
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	202.022.634,00	236.543.185,00
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	4.311,00
4	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	17.900.913,00	0,00
Jumlah		**4.035.307.746,00**	**5.177.638.309,00**

d. Realisasi Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.224.677.557,00 dan Rp6.997.819.184,00. Pada Tahun Anggaran 2024 pendapatan bunga juga terdiri dari pendapatan bunga dana cadangan atas penempatan dana

Pemerintah Kota Bogor pada Bank DKI sebesar Rp921.640.002,00.

e. Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.441.667,00 dan Rp24.235.714,00.

f. Realisasi Pendapatan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp397.410.914,00 dan Rp454.743.324,00.

Tabel 5.1.18

Realiasi Pendapatan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Temuan Hasil Pemeriksaan	99.700.517,00	77.385.111,00
2	Pengembalian Sisa Belanja Tahun Sebelumnya	0,00	951.400,00
5	Kelebihan Pembayaran Pajak	39.057.344,00	53.929.779,00
6	Kelebihan Pembayaran retribusi	5.000,00	1.774.209,00
7	Penerimaan Jaminan Bongkar	128.000.000,00	313.150.000,00
8	Penerimaan Tidak Teridentifikasi	130.647.292,00	7.552.825,00
9	Kelebihan Pembayaran Bagian Laba Sisetor PDAM TA 2024	761,00	0,00
Jumlah		**397.410.914,00**	**454.743.324,00**

g. Realisasi atas Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2024 sebesar Rp627.473.886,00 dan pada tahun 2023 sebesar Rp474.650.538,00.

h. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14.649.420.176,00 dan Rp4.067.750.115,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.19

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.848.226.782,00	133.825.252,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	1.846.288.975,00	1.096.259.623,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.096.074.734,00	17.884.060,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	154.044.002,00	221.275.208,00
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	78.388.335,00	363.707.777,00
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	3.370.009,00	2.694.781,00
7	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.610.277.339,00	2.224.603.414,00
8	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	12.750.000,00	7.500.000,00
Jumlah		**14.649.420.176,00**	**4.067.750.115,00**

i. Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp111.287.554,00 dan Rp223.447.933,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.20

Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	2.414.967,00	22.994.929,00
2	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	70.936.740,00	80.652.763,00
3	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	37.935.847,00	119.800.241,00
Jumlah		**111.287.554,00**	**223.447.933,00**

j. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.836.302.493,00 dan Rp3.926.504.331,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.21

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	38.096.568,00	0,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	20.508.895,00	65.745.380,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Perjalanan Dinas Biasa	1.051.981.009,00	246.789.583,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK	20.767,00	37.490,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM	62.301,00	112.474,00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.355.880,00	0,00
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	575.358.160,00	0,00
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.379.500,00	0,00
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	137.823.000,00	0,00
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	9.500.000,00	0,00
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	38.340.994,00	0,00
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	878.426.277,00	0,00
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	1.050.601.362,00	0,00
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	15.318.823,00	0,00
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	12.228.957,00	0,00
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang danJasa BOK Puskesmas	3.300.000,00	0,00
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	0,00	1.279.500,00
18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	68.324.678,00
19	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	196.095.933,00
20	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0,00	22.025.000,00
21	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan / Perusahaan	0,00	473.174.610,00
22	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00	804.813.158,00
23	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	318.659.034,00
24	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	128.310.319,00
25	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	19.184.758,00
26	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kota	0,00	1.430.363.961,00
27	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai / Pantai	0,00	74.351.255,00
28	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS	0,00	44.700.000,00
29	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	30.572.198,00
30	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	1.965.000,00

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	BOS		
Jumlah		**3.836.302.493,00**	**3.926.504.331,00**

k. Realisasi Pendapatan BLUD Pada tahun Anggaran 2024 sebesar Rp813.022.806,00 dan Rp350.851.552.368,80 pada tahun anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.22
Realisasi Pendapatan BLUD TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan BLUD	0,00	350.851.552.368,80
2	Pendapatan BLUD dari Hibah	668.815.000,00	0,00
3	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	122.290.221,00	0,00
4	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	21.917.585,00	0,00
Jumlah		**813.022.806,00**	**350.851.552.368,80**

l. Realisasi Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan Pada tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.481.604,00 dan Rp4.080.525,00 pada tahun anggaran 2023, merupakan denda dari hasil penjualan tanah.

m. Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.101.860,00dan Rp3.500.000,00 merupakan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Rincian pendapatan asli daerah yang sah pada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.23
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	PUSKESMAS BOGOR SELATAN							
	Pendapatan BLUD	0,00	48.589.971,00	0,00	48.589.971,00	2.964.539.040,00	(2.915.949.069,00)	(98,36)
2	PUSKESMAS CIPAKU							
	Pendapatan BLUD	0,00	58.195.376,00	0,00	58.195.376,00	3.294.700.539,00	(3.236.505.163,00)	(98,23)
3	PUSKESMAS BONDONGAN							
	Pendapatan BLUD	0,00	9.793.422,00	0,00	9.793.422,00	2.136.637.973,00	(2.126.844.551,00)	(99,54)
4	PUSKESMAS LAWANG GINTUNG							
	Pendapatan BLUD	0,00	9.953.933,00	0,00	9.953.933,00	1.433.053.666,00	(1.423.099.733,00)	(99,31)
5	PUSKESMAS BOGOR TIMUR							
	Pendapatan BLUD	0,00	88.693.962,00	0,00	88.693.962,00	4.149.426.579,00	(4.060.732.617,00)	(97,86)
6	PUSKESMAS PULO ARMYN							
	Pendapatan BLUD	0,00	20.987.955,00	0,00	20.987.955,00	2.163.102.123,00	(2.142.114.168,00)	(99,03)
7	PUSKESMAS BOGOR TENGAH							
	Pendapatan BLUD	0,00	76.729.658,00	0,00	76.729.658,00	2.059.249.882,00	(1.982.520.224,00)	(96,27)
8	PUSKESMAS SEMPUR							
	Pendapatan BLUD	0,00	13.823.288,00	0,00	13.823.288,00	1.471.779.676,00	(1.457.956.388,00)	(99,06)
9	PUSKESMAS GANG AUT							
	Pendapatan BLUD	0,00	6.706.101,00	0,00	6.706.101,00	1.022.287.643,00	(1.015.581.542,00)	(99,34)
10	PUSKESMAS BELONG							
	Pendapatan BLUD	0,00	9.475.017,00	0,00	9.475.017,00	616.285.661,00	(606.810.644,00)	(98,46)

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
11	PUSKESMAS MERDEKA							
	Pendapatan BLUD	0,00	23.602.469,00	0,00	23.602.469,00	2.002.742.450,00	(1.979.139.981,00)	(98,82)
12	PUSKESMAS SEMPLAK							
	Pendapatan BLUD	0,00	11.405.491,00	0,00	11.405.491,00	2.649.504.736,00	(2.638.099.245,00)	(99,57)
13	PUSKESMAS PANCASAN							
	Pendapatan BLUD	0,00	4.194.962,00	0,00	4.194.962,00	2.129.400.407,00	(2.125.205.445,00)	(99,80)
14	PUSKESMAS PASIR MULYA							
	Pendapatan BLUD	0,00	61.901.918,00	0,00	61.901.918,00	2.801.311.919,00	(2.739.410.001,00)	(97,79)
15	PUSKESMAS GANG KELOR							
	Pendapatan BLUD	0,00	19.308.238,00	0,00	19.308.238,00	2.069.051.985,00	(2.049.743.747,00)	(99,07)
16	PUSKESMAS SINDANG BARANG							
	Pendapatan BLUD	0,00	96.302.410,00	0,00	96.302.410,00	3.309.777.808,00	(3.213.475.398,00)	(97,09)
17	PUSKESMAS BOGOR UTARA							
	Pendapatan BLUD	0,00	56.613.358,00	0,00	56.613.358,00	3.879.107.811,00	(3.822.494.453,00)	(98,54)
18	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL							
	Pendapatan BLUD	0,00	10.727.810,00	0,00	10.727.810,00	2.004.165.765,00	(1.993.437.955,00)	(99,46)
19	PUSKESMAS WARUNG JAMBU							
	Pendapatan BLUD	0,00	3.849.016,00	0,00	3.849.016,00	2.505.731.822,00	(2.501.882.806,00)	(99,85)
20	PUSKESMAS TANAH SAREAL							
	Pendapatan BLUD	0,00	8.229.797,00	0,00	8.229.797,00	2.732.874.429,00	(2.724.644.632,00)	(99,70)
21	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT							
	Pendapatan BLUD	0,00	7.253.245,00	0,00	7.253.245,00	921.355.135,00	(914.101.890,00)	(99,21)
22	PUSKESMAS KEDUNG BADAK							
	Pendapatan BLUD	0,00	41.669.561,00	0,00	41.669.561,00	2.433.066.204,00	(2.391.396.643,00)	(98,29)
23	PUSKESMAS KAYU MANIS							
	Pendapatan BLUD	0,00	21.769.994,00	0,00	21.769.994,00	2.413.719.049,00	(2.391.949.055,00)	(99,10)
24	PUSKESMAS MEKARWANGI							
	Pendapatan BLUD	0,00	55.646.358,00	0,00	55.646.358,00	2.737.225.273,00	(2.681.578.915,00)	(97,97)
25	PUSKESMAS MULYAHARJA							
	Pendapatan BLUD	0,00	3.676.843,00	0,00	3.676.843,00	1.756.828.776,00	(1.753.151.933,00)	(99,79)
26	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH							
	Pendapatan BLUD	0,00	43.922.653,00	0,00	43.922.653,00	984.790.300,00	(940.867.647,00)	(95,54)
27	DINAS KESEHATAN							
	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	176.800,00	(176.800,00)	0,00
28	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH-BLUD							
	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	292.209.835.717,80	(292.209.835.717,80)	(100,00)
29	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	29.730,00	0,00	0,00
30	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN							
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.178,00	0,00	0,00
	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	22.626.501,00	45.463.975,00	0,00	22.837.474,00	35.971.300,00	9.492.675,00	0,00
31	DINAS LINGKUNGAN HIDUP							
	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.088.897,00	1.748.337,00	0,00	659.440,00	2.717.049,00	(968.712,00)	(35,65)
32	DINAS PERHUBUNGAN							
	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	20.663.100,00	(20.663.100,00)	(100,00)

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
33	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	41.423.598,00	46.285.836,00	0,00	4.862.238,00	119.636.217,00	(73.350.381,00)	(61,31)
34	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN							
	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
35	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.000.000.000,00	1.389.417.875,00	138,94	389.417.875,00	2.087.860.934,00	(698.443.059,00)	(33,45)
	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	12.629.016,00	0,00	12.629.016,00	167.802.000,00	(155.172.984,00)	(92,47)
	Jasa Giro	3.315.080.955,00	4.035.307.746,00	121,73	720.226.791,00	5.177.638.309,00	(1.142.330.563,00)	(22,06)
	Pendapatan Bunga	7.000.000.000,00	7.224.677.557,00	103,21	224.677.557,00	6.997.819.184,00	226.858.373,00	3,24
	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	13.441.667,00	0,00	13.441.667,00	24.235.714,00	(10.794.047,00)	(44,54)
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	230.348.570,00	0,00	230.348.570,00	87.653.367,00	142.695.203,00	162,79
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	627.473.886,00	0,00	627.473.886,00	474.650.538,00	152.823.348,00	32,20
	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	10.304.416,00	17.786.906,00	0,00	7.482.490,00	44.228.737,00	(26.441.831,00)	(59,78)
	Pendapatan dari Pengembalian	5.251.636.097,00	3.836.302.493,00	73,05	(1.415.333.604,00)	3.926.504.331,00	(90.201.838,00)	(2,30)
	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	546579,00	4.481.604,00	0,00	3935025,00	4.080.525,00	401.079,00	9,83
	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	300.000,00	3.101.860,00	0,00	2.801.860,00	3.500.000,00	(398.140,00)	(11,38)
36	BADAN PENDAPATAN DAERAH							
	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.135.000,00	(1.361.135.000,00)	(100,00)
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	167.057.344,00	0,00	167.057.344,00	367.079.779,00	(200.022.435,00)	(54,49)
	Pendapatan Denda Pajak Daerah	7.888.105.138,00	14.649.420.176,00	185,72	6.761.315.038,00	4.067.750.115,00	10.581.670.061,00	260,14
JUMLAH		**24.531.114.681,00**	**33.117.975.154,00**	**135,00**	**8.586.860.473,00**	**375.822.720.275,80**	**(342.704.745.121,80)**	**(91,19)**

5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pendapatan Transfer meliputi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Pendapatan Transfer Antar Daerah, Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan transfer dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor.

Alokasi Dana Transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Bogor diatur dalam:

a. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;

Realisasi pendapatan transfer pada tahun anggaran 2024 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.24
Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.380.642.513.566,00	1.369.427.755.442,00	99,19	(11.214.758.124,00)	1.249.655.329.523,00	119.772.425.919,00	9,58
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	350.967.470.646,00	342.450.420.356,00	97,57	(8.517.050.290,00)	379.201.972.848,00	(36.751.552.492,00)	(9,69)
Jumlah		**1.731.609.984.212,00**	**1.711.878.175.798,00**	**98,86**	**(19.731.808.414,00)**	**1.628.857.302.371,00**	**83.020.873.427,00**	**5,10**

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 mencapai 98,86% atau sebesar Rp1.711.878.175.798,00 dari target sebesar Rp1.731.609.984.212,00. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.628.857.302.371,00 mengalami kenaikan sebesar Rp83.020.873.427,00 atau 5,10%.

5.1.1.2.1 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Transfer Ke Daerah merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kebijakan TKD tahun 2024 berpedoman kepada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) beserta peraturan pelaksanaan turunannya. Secara umum sesuai tujuan pembentukannya, kebijakan TKD diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, mendukung sektor-sektor prioritas yang akan dilaksanakan oleh daerah, serta meningkatkan sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dalam rangka mendukung kinerja daerah, mengentaskan kemiskinan, dan memajukan perekonomian daerah.

Adapun pokok arah kebijakan TKD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.
2. Memperkuat kualitas pengelolaan TKD.
3. Memperkuat penggunaan earmarking TKD pada sektor prioritas.
4. Meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan TKD mendukung pencapaian
5. Program prioritas nasional.
6. Meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian TKD untuk mengatasi stunting, kemiskinan, inflasi, dan investasi.
7. Mendorong Pemerintah Daerah agar menggunakan TKD untuk kegiatan yang produktif dengan *multiplier effect* yang tinggi.

Anggaran dan realisasi Dana Transfer ke Daerah pada Pemerintah Kota Bogor untuk periode tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran 2023 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.1.25

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan & Lainnya TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DANA BAGI HASIL PAJAK	73.761.004.000,00	85.946.116.000,00	116,52	12.185.112.000,00	82.465.899.156,00	3.480.216.844,00	4,22
2	DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM	29.477.228.000,00	28.477.228.000,00	96,61	(1.000.000.000,00)	19.739.952.531,00	8.737.275.469,00	44,26
3	DANA ALOKASI UMUM	858.600.617.000,00	853.803.503.264,00	99,44	(4.797.113.736,00)	792.504.632.043,00	61.298.871.221,00	7,73
4	DANA ALOKASI KHUSUS	390.756.000.566,00	373.153.244.178,00	95,50	(17.602.756.388,00)	349.032.591.793,00	24.120.652.385,00	6,91
5	INSENTIF FISKAL	28.047.664.000,00	28.047.664.000,00	100,00	0,00	5.912.254.000,00	22.135.410.000,00	374,40
Jumlah		**1.380.642.513.566,00**	**1.341.380.091.442,00**	**97,16**	**(39.262.422.124,00)**	**1.243.743.075.523,00**	**97.637.015.919,00**	**7,85**

Untuk lebih rinci masing-masing penerimaan Transfer ke Daerah pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dijelaskan pada uraian dibawah ini.

5.1.1.2.1.1 DANA BAGI HASIL PAJAK

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat – Transfer ke Daerah kepada Kota Bogor untuk periode Tahun Anggaran 2024 dan 2023, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.1.26
Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.171.963.000,00	14.620.813.000,00	460,94	11.448.850.000,00	4.704.756.064,00	9.916.056.936,00	210,77
2	DBH PPh Pasal 21	54.897.720.000,00	54.897.720.000,00	100,00	0,00	59.405.855.566,00	(4.508.135.566,00)	(7,59)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	8.471.478.000,00	8.471.478.000,00	100,00	0,00	9.878.818.000,00	(1.407.340.000,00)	(14,25)
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.219.843.000,00	7.956.105.000,00	110,20	736.262.000,00	8.476.469.526,00	(520.364.526,00)	(6,14)
Jumlah		**73.761.004.000,00**	**85.946.116.000,00**	**116,52**	**12.185.112.000,00**	**82.465.899.156,00**	**3.480.216.844,00**	**4,22**

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realiasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp85.946.116.000,00 atau mencapai 116.52% dari target sebesar Rp73.761.004.000,00, apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.480.216.844,00 atau 4,22%.

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak melampaui target yang telah ditetapkan karena adanya penyaluran kurang bayar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 89 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.

5.1.1.2.1.2 DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat – Transfer ke Daerah kepada Kota Bogor untuk periode Tahun Anggaran 2024 dan 2023, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.1.27
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	14.970.852.000,00	14.970.852.000,00	100,00	0,00	5.937.485.977,00	9.033.366.023,00	152,14
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	1.451.833.000,00	1.451.833.000,00	100,00	0,00	1.422.922.063,00	28.910.937,00	2,03
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	8.852.128.000,00	8.852.128.000,00	100,00	0,00	8.556.970.811,00	295.157.189,00	3,45
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	(102.000,00)	0,00
5	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.073.803.000,00	1.073.803.000,00	100,00	0,00	1.177.352.919,00	(103.549.919,00)	(8,80)
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.031.457.000,00	1.031.457.000,00	50,77	(1.000.000.000,00)	1.067.547.550,00	(36.090.550,00)	(3,38)
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.097.155.000,00	1.097.155.000,00	100,00	0,00	1.577.571.211,00	(480.416.211,00)	(30,45)
Jumlah		**29.477.228.000,00**	**28.477.228.000,00**	**96,61**	**(1.000.000.000,00)**	**19.739.952.531,00**	**8.737.275.469,00**	**44,26**

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realiasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp28.477.228.000,00 atau mencapai 96,61% dari target sebesar Rp29.477.228.000,00 namun apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp8.737.275.469,00 atau 44,26%. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak melampaui target yang telah ditetapkan karena adanya penyaluran kurang bayar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 89 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil

pada Tahun 2024.

5.1.1.2.1.3 DANA ALOKASI UMUM

Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Rincian Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.28
Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	746.216.401.000,00	741.419.287.264,00	99,36	(4.797.113.736,00)	792.504.632.043,00	(51.085.344.779,00)	(6,45)
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	13.600.000.000,00	13.600.000.000,00	100,00	0,00	0,00	13.600.000.000,00	0,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	36.138.888.000,00	36.138.888.000,00	100,00	0,00	0,00	36.138.888.000,00	0,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	31.725.202.000,00	31.725.202.000,00	100,00	0,00	0,00	31.725.202.000,00	0,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	17.761.219.000,00	17.761.219.000,00	100,00	0,00	0,00	17.761.219.000,00	0,00
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	13.158.907.000,00	13.158.907.000,00	100,00	0,00	0,00	13.158.907.000,00	0,00
Jumlah		**858.600.617.000,00**	**853.803.503.264,00**	**99,44**	**(4.797.113.736,00)**	**792.504.632.043,00**	**61.298.871.221,00**	**(6,45)**

Berdasarkan tabel diatas realisasi DAU tahun 2024 sebesar Rp 853.803.503.264,00 atau 99,44% dari target anggaran sebesar Rp845.441.710.000,00, ketidaktercapaian realisasi DAU tersebut dikarenakan untuk pembayaran pokok pinjaman kepada Lembaga Keuangan Non Bank, pembayaran pokok dilakukan dengan cara pemotongan langsung terhadap penyaluran Dana Alokasi Umum yang mengacu kepada perjanjian pengelolaan pinjaman. Besaran DAU dapat diperhitungkan sesuai dengan hasil rekonsiliasi antara pihak pertama dengan DJPK. Besarnya angsuran pokok setiap bulan sebesar 1/12 dari nilai DTU yang dapat diperhitungkan di tahun berkenaan yang dibayarkan setiap akhir bulan setelah masa tenggang terakhir sebesar Rp4.797.113.736,00 atau sebesar Rp399.759.478 setiap bulan.

5.1.1.2.1.4 DANA ALOKASI KHUSUS

Dana Alokasi Khusus (DAK) bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.29
Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	46.140.365.566,00	44.829.645.150,00	97,16	(1.310.720.416,00)	55.796.999.805,00	(10.967.354.655,00)	(19,66)
2	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	344.615.635.000,00	328.323.599.028,00	95,27	(16.292.035.972,00)	293.235.591.988,00	35.088.007.040,00	11,97
Jumlah		**390.756.000.566,00**	**373.153.244.178,00**	**95,50**	**(17.602.756.388,00)**	**349.032.591.793,00**	**24.120.652.385,00**	**6,91**

Berdasarkan tabel di atas realisasi DAK Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp373.153.244.178,00, atau 95,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp390.756.000.566,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp24.120.652.385,00 atau mencapai 6,91%. Penurunan realisasi DAK Fisik 2024 dibandingkan dengan realisasi 2023 yang disebabkan adanya gagal lelang pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana DAK Fisik sehingga tidak disalurkan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan untuk DAK Non Fisik tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan karena pagu alokasi DAK non Fisik lebih besar dibandingkan tahun anggaran 2023, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 dan menjadi saldo kas earmark di RKUD. DAK Fisik realisasinya mencapai 97,16% dan DAK Non Fisik 95,27% dari pagu anggaran karena adanya efisiensi.

Rincian Dana Alokasi Khusus pada masing-masing bidang kegiatan dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.30
Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	240.703.000,00	204.102.129,00	84,79	(36.600.871,00)	0,00	204.102.129,00	0,00
2	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	3.024.494.000,00	1.977.458.787,00	65,38	(1.047.035.213,00)	1.012.349.920,00	0,00	0,00
3	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	94.998.000,00	77.707.500,00	81,80	(17.290.500,00)	0,00	77.707.500,00	0,00
4	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	9.535.000.000,00	9.534.780.000,00	100,00	(220.000,00)	0,00	9.534.780.000,00	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00	0,00	591.507.340,00	(591.507.340,00)	(100,00)
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570.202.300,00	0,00	0,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	33.245.170.566,00	33.035.596.734,00	99,37	(209.573.832,00)	0,00	0,00	0,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768.000.000,00	(1.768.000.000,00)	(100,00)
9	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - KB	0,00	0,00	0,00	0,00	74.265.000,00	(74.265.000,00)	(100,00)
10	DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Reguler	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439.380.000,00	(10.439.380.000,00)	(100,00)
11	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	36.341.295.245,00	(36.341.295.245,00)	(100,00)
12	DAK Non Fisik - BOS Reguler	155.166.040.000,00	152.805.914.824,00	98,48	(2.360.125.176,00)	143.271.043.020,00	9.534.871.804,00	6,66
13	DAK Non Fisik - BOS Kinerja	2.335.000.000,00	2.335.000.000,00	100,00	0,00	1.882.500.000,00	452.500.000,00	24,04
14	DAK Non Fisik - TPG PNSD	103.382.644.000,00	103.382.644.000,00	100,00	0,00	104.353.815.000,00	(971.171.000,00)	(0,93)
15	DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD	3.816.547.000,00	3.816.547.000,00	100,00	0,00	666.642.000,00	3.149.905.000,00	472,50
16	DAK Non Fisik - BOP PAUD	9.259.320.000,00	9.076.914.900,00	98,03	(182.405.100,00)	8.522.091.000,00	554.823.900,00	6,51
17	DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	-	12.689.369.200,00	(12.689.369.200,00)	(100,00)

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
18	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	8.312.420.000,00	8.036.889.807,00	96,69	(275.530.193,00)	5.042.916.209,00	2.993.973.598,00	59,37
19	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	DAK Non Fisik - PK2UKM	0,00	0,00	0,00	0,00	415.324.540,00	(415.324.540,00)	(100,00)
21	DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Kepariwisataan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	DAK Non Fisik - Fasilitasi Penanaman Modal	415.178.000,00	354.633.800,00	85,42	(60.544.200,00)	269.023.600,00	85.610.200,00	31,82
23	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	0,00	11.406.964.000,00	(11.406.964.000,00)	(100,00)
24	DAK Non Fisik - BOKB - KB	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715.903.419,00	(4.715.903.419,00)	(100,00)
25	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	406.000.000,00	100,00	0,0	0,0	406.000.000,00	0,0
26	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	520.000.000,00	520.000.000,00	100,00	0,0	0,0	520.000.000,00	0,0
27	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,0	0,0	90.000.000,00	0,0
28	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	15.869.440.000,00	15.616.122.000,00	98,40	(253.318.000,00)	0,0	15.616.122.000,00	0,0
29	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	0,0	0,0	180.000.000,00	0,0
30	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	26.860.435.000,00	15.174.498.103,00	56,49	(11.685.936.897,00)	0,0	15.174.498.103,00	0,0
31	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	615.131.000,00	0,0	0,0	(615.131.000,00)	0,0	0,0	0,0
32	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	17.387.480.000,00	16.528.434.594,00	95,06	(859.045.406,00)	0,0	0,0	0,0
Jumlah		390.756.000.566,00	373.153.244.178,00	95,50	(17.602.756.388,00)	349.032.591.793,00	(20.838.285.510,00)	(5,97)

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

5.1.1.2.2.1 Insentif Fiskal

Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah atas pencapaian Kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja pemerintahan daerah antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar, dukungan terhadap kebijakan strategis nasional, dan/ atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Berikut rincian realisasi Insentif Fiskal tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.31
Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Insentif Fiskal	28.047.664.000,00	28.047.664.000,00	100,00	0,00	5.912.254.000,00	22.135.410.000,00	374,40
Jumlah		28.047.664.000,00	28.047.664.000,00	100,00	0,00	5.912.254.000,00	22.135.410.000,00	374,40

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realisasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp28.047.664.000,00 atau mencapai 100,00% dari anggaran, sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp22.135.410.000,00 atau mencapai 374,40%. Kenaikan disebabkan karena pada tahun anggaran 2024 Pemerintah Kota Bogor mendapatkan 2 (dua)

kategori yaitu insentif fiskal kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan.

5.1.1.2.3 PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH

Transfer Antar Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
2. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
4. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
5. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Tabel 5.1.32
Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	311.531.583.096,00	303.076.793.631,00	97,29	(8.454.789.465,00)	301.185.316.222,00	1.891.477.409,00	0,63
2	Bantuan Keuangan	39.435.887.550,00	39.373.626.725,00	99,84	(62.260.825,00)	78.016.656.626,00	(38.643.029.901,00)	(49,53)
	Jumlah	350.967.470.646,00	342.450.420.356,00	97,57	(8.517.050.290,00)	379.201.972.848,00	(36.751.552.492,00)	(9,69)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah mencapai Rp342.450.420.356,00 atau 97,57% dari Anggaran sebesar Rp350.967.470.646,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 terdapat penurunan sebesar Rp36.751.552.492,00 atau mencapai 9,69%. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor 973/Kep.139-Bapenda/2025 tentang Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2024 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp12.733.735.118,00.yang akan disalurkan pada Tahun Anggaran 2025.

Ketidaktercapaian Bantuan Keuangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat disebabkan oleh disalurkannya Bantuan Keuangan sesuai dengan realisasi fisik di Kabupaten/Kota, sisa bantuan keuangan terdiri dari efisiensi belanja, adapun untuk Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta terdapat sisa hasil efisiensi yang masih harus dikembalikan ke RKUD Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp6.666.000,00.

5.1.1.2.3.1 PENDAPATAN BAGI HASIL

Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 5.1.33

Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	110.254.634.061,00	107.078.086.620,00	97,12	(3.176.547.441,00)	104.770.397.085,00	2.307.689.535,00	2,20
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	71.406.794.875,00	66.162.370.710,00	92,66	(5.244.424.165,00)	68.172.519.150,00	(2.010.148.440,00)	(2,95)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	70.084.028.487,00	70.084.028.487,00	100,00	0,00	64.638.380.437,00	5.445.648.050,00	8,42
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	253.424.659,00	219.606.800,00	86,66	(33.817.859,00)	208.652.187,00	10.954.613,00	5,25
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	59.532.701.014,00	59.532.701.014,00	100,00	0,00	63.395.367.363,00	(3.862.666.349,00)	(6,09)
Jumlah		311.531.583.096,00	303.076.793.631,00	97,29	(8.454.789.465,00)	301.185.316.222,00	1.891.477.409,00	0,63

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realisasi pendapatan bagi hasil pajak tahun anggaran 2024 mencapai Rp303.076.793.631,00 atau 97,29% dari anggaran sebesar Rp311.531.583.096,00, realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.891.477.409,00 atau mencapai 0,63% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023.

5.1.1.2.3.2 BANTUAN KEUANGAN

Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.34

Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah	39.435.887.550,00	39.373.626.725,00	99,84	(62.260.825,00)	78.016.656.626,00	(38.643.029.901,00)	(49,53)
Jumlah		39.435.887.550,00	39.373.626.725,00	99,84	(62.260.825,00)	78.016.656.626,00	(38.643.029.901,00)	(49,53)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realisasi bantuan keuangan tahun anggaran 2023 mencapai Rp39.373.626.725,00 atau 99,84% dari target sebesar Rp39.435.887.550,00. Realisasi tahun anggaran 2024 dibandingkan dengan tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp38.643.029.901,00 atau 49,53%. Realisasi bantuan keuangan tahun anggaran 2024 sesuai dengan realisasi belanja yang bersumber dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp39.373.626.725,00 sehingga terdapat sisa bantuan keuangan sebesar rincian realisasi:

1. Efisiensi lelang Revitalisasi RPH Terpadu sebesar Rp22.479.546,00
2. Revitalisasi Posyandu, terdapat perubahan jumlah Pos Yandu yang mendapatkan bantuan sehingga sisanya sebesar Rp36.760.826,00
3. Jaminan Kesehatan bagi PBPU dan PB yang didaftarkan oleh Pemda terdapat sisa koefisien penerima Bantuan Iuran BPJS Kelas sehingga sisanya sebesar Rp20.453,00.

5.1.2 BELANJA

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2024 disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada tahun anggaran 2023 Pemerintah Kota Bogor telah menerapkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2023 dan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun

2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2024 serta Realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.35

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	BELANJA OPERASI	2.846.195.789.921,00	2.774.250.053.629,00	97,47	(71.945.736.292,00)	2.508.123.306.971,00	266.126.746.658,00	10,61
2	BELANJA MODAL	426.595.630.347,00	400.367.986.619,00	93,85	(26.227.643.728,00)	518.164.968.738,00	(117.796.982.119,00)	(22,73)
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.359.952.269,00	2.187.943.885,00	34,40	(4.172.008.384,00)	1.066.654.400,00	1.121.289.485,00	105,12
4	BELANJA TRANSFER	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00	100,00	0,00	1.660.750.000,00	0,00	0,00
Jumlah		**3.280.812.122.537,00**	**3.178.466.734.133,00**	96,88	(102.345.388.404,00)	**3.029.015.680.109,00**	**149.451.054.024,00**	4,93

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja tahun anggaran 2024 mencapai Rp3.178.466.734.133,00 atau 96.88% dari anggaran sebesar Rp3.280.812.122.537,00. Realisasi tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi 2023 sebesar Rp149.451.054.024,00 atau mencapai 4,93% dengan rincian sebagai berikut:

5.1.2.1 BELANJA OPERASI

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 serta Realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.36

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2		4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Pegawai	1.270.881.665.338,00	1.242.957.964.907,00	97,80	(27.923.700.431,00)	1.063.654.426.888,00	179.303.538.019,00	16,86
2	Belanja Barang dan Jasa	1.342.955.429.587,00	1.304.164.987.240,00	97,11	(38.790.442.347,00)	1.236.457.277.949,00	67.707.709.291,00	5,48
3	Belanja Bunga	7.500.000.000,00	7.027.746.595,00	93,70	(472.253.405,00)	6.191.682.700,00	836.063.895,00	13,50
4	Belanja Hibah	180.077.750.496,00	176.519.335.387,00	98,02	(3.558.415.109,00)	147.381.004.434,00	29.138.330.953,00	19,77
5	Belanja Bantuan Sosial	44.780.944.500,00	43.580.019.500,00	97,32	(1.200.925.000,00)	54.438.915.000,00	(10.858.895.500,00)	(19,95)
Jumlah		**2.846.195.789.921,00**	**2.774.250.053.629,00**	**97,47**	**(71.945.736.292,00)**	**2.508.123.306.971,00**	**266.126.746.658,00**	**10,61**

Tabel diatas menunjukkan realisasi belanja operasi tahun anggaran 2024 mencapai Rp2.774.250.053.629,00 atau 97,47% dari anggaran sebesar Rp2.846.195.789.921,00 Realisasi tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi 2023 sebesar Rp266.126.746.658,00

atau mencapai 10,61% dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.1 BELANJA PEGAWAI

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-

undangan. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 serta Realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.37

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	581.730.632.816,00	572.966.490.524,00	98,49	(8.764.142.292,00)	483.142.741.393,00	89.823.749.131,00	18,59
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	398.613.926.442,00	393.170.766.177,00	98,63	(5.443.160.265,00)	314.944.193.159,00	78.226.573.018,00	24,84
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	150.855.513.635,00	148.571.534.471,00	98,49	(2.283.979.164,00)	145.108.326.637,00	3.463.207.834,00	2,39
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	48.135.349.320,00	47.141.457.844,00	97,94	(993.891.476,00)	47.497.252.680,00	(355.794.836,00)	(0,75)
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH / WKDH	181.755.551,00	64.134.616,00	35,29	(117.620.935,00)	179.275.989,00	(115.141.373,00)	(64,23)
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH / WKDH	2.361.776.258,00	2.329.008.000,00	98,61	(32.768.258,00)	2.018.520.000,00	310.488.000,00	15,38
7	Belanja Pegawai BLUD	89.002.711.316,00	78.714.573.275,00	88,44	(10.288.138.041,00)	70.764.117.030,00	7.950.456.245,00	11,24
	Jumlah	**1.270.881.665.338,00**	**1.242.957.964.907,00**	**97,80**	**(27.923.700.431,00)**	**1.063.654.426.888,00**	**179.303.538.019,00**	**16,86**

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2024 mencapai Rp1.242.957.964.907,00 atau 97,80% dari anggaran sebesar Rp1.270.881.665.338,00. Realisasi tahun anggaran 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi 2023 sebesar Rp179.303.538.019,00 atau mencapai 16,86%.

Penjelasan lebih lanjut atas Belanja Pegawai antara lain sebagai berikut:

a. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp572.966.490.524,00 dan Rp483.142.741.393,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.38

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Gaji Pokok PNS	313.497.999.701,00	308.167.517.896,00
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	84.067.202.433,00	30.805.677.772,00
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	28.269.036.359,00	27.536.181.853,00
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6.165.325.644,00	2.475.623.032,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.683.805.000,00	6.677.640.000,00
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	22.188.019.000,00	22.253.536.000,00
7	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	8.152.942.000,00	3.360.077.000,00
8	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.890.084.175,00	4.377.790.000,00
9	Belanja Tunjangan Beras PNS	15.902.200.860,00	16.889.104.410,00
10	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.520.963.340,00	1.922.751.000,00
11	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS	45.104.192.983,00	27.603.891.998,00
12	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PPPK	495.994.994,00	8.625.284,00
13	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.195.227,00	4.160.781,00
14	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	977.381,00	362.567,00
15	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	25.903.395.590,00	26.409.586.504,00
16	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.842.964.629,00	1.857.050.222,00
17	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	642.881.405,00	631.231.976,00
18	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	176.550.228,00	67.046.557,00
19	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.928.130.353,00	1.893.712.791,00
20	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	529.629.222,00	201.173.750,00
	Jumlah	**572.966.490.524,00**	**483.142.741.393,00**

b. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp393.170.766.177,00 dan Rp314.944.193.159,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.39

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	176.666.170.977,00	84.971.267.022,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	8.854.728.313,00	478.406.059,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	72.829.306.904,00	99.631.334.367,00
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	2.911.658.886,00	2.873.010.584,00
5	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	131.450.855.666,00	126.766.405.116,00

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
6	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	265.407.475,00	223.770.011,00
7	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	192.637.956,00	0,00
	Jumlah	**393.170.766.177,00**	**314.944.193.159,00**

c. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp148.571.534.471,00 dan Rp145.108.326.637,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.40
Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	4.377.192.195,00	4.380.753.191,00
2	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	8.412.494.494,00	8.013.275.505,00
3	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	821.355.539,00	984.304.793,00
4	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	402.067.032,00	440.441.143,00
5	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	3.473.652.848,00	2.337.764.302,00
6	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	251.717.413,00	561.601.967,00
7	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	78.470.726,00	72.988.131,00
8	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	8.811.631.712,00	7.636.659.093,00
9	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	3.301.917.593,00	5.601.502.327,00
10	Belanja TPG PNSD	96.477.790.420,00	102.134.248.685,00
11	Belanja Tamsil Guru PNSD	376.500.000,00	1.439.987.500,00
12	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.559.994.500,00	10.092.040.000,00
13	Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	1.327.401.999,00	1.304.010.000,00
14	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	110.250.000,00	108.750.000,00
15	Belanja TPG PPPK	9.668.698.000,00	0,00
16	Belanja Tamsil Guru PPPK	3.120.400.000,00	0,00
	Jumlah	**148.571.534.471,00**	**145.108.326.637,00**

d. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp47.141.457.844,00 dan Rp47.497.252.680,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.41
Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Uang Representasi DPRD	1.111.635.000,00	1.114.260.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.384.800,00	111.846.000,00
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	124.996.920,00	125.141.760,00
4	Belanja Uang Paket DPRD	95.245.500,00	95.508.000,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.611.870.750,00	1.615.677.000,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	123.002.775,00	134.649.900,00
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	16.854.075,00	18.087.300,00
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.805.300.000,00	8.820.000.000,00
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.440.600.000,00	2.205.000.000,00
10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	599.456,00	653.952,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	272.160.000,00	264.960.000,00
12	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.285.892,00	2.292.192,00
13	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.857.676,00	6.876.576,00
14	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	23.509.000.000,00	23.568.000.000,00
15	Belanja Tunjangan Transportasi	9.442.000.000,00	9.408.000.000,00

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	DPRD		
16	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	469.665.000,00	6.300.000,00
	Jumlah	**47.141.457.844,00**	**47.497.252.680,00**

e. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp64.134.616,00 dan Rp179.275.989,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.42
Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok KDH / WKDH	19.500.000,00	54.600.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH / WKDH	2.370.000,00	6.636.000,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH / WKDH	35.100.000,00	98.280.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras KDH / WKDH	2.172.600,00	6.083.280,00
5	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus KDH / WKDH	1.001.616,00	1.705.589,00
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH / WKDH	640,00	1.840,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH / WKDH	3.840.000,00	11.520.000,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH / WKDH	37.440,00	112.320,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH / WKDH	112.320,00	336.960,00
	Jumlah	**64.134.616,00**	**179.275.989,00**

f. Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.329.008.000,00 dan Rp2.018.520.000,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.43
Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.360.000,00	393.120.000,00
2	Belanja Dana Operasional KDH / WKDH	1.968.648.000,00	1.625.400.000,00
	Jumlah	**2.329.008.000,00**	**2.018.520.000,00**

g. Realisasi Belanja Pegawai BLUD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp78.714.573.275,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp70.764.117.030,00.

Rincian Belanja Pegawai pada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.44
Realisasi Belanja Pegawai per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PENDIDIKAN	417.417.805.517,00	411.523.819.786,00	98,59	(5.893.985.731,00)	347.744.732.035,00	63.779.087.751,00	18,34
2	DINAS KESEHATAN	149.207.649.336,00	142.386.298.238,00	95,43	(6.821.351.098,00)	118.768.482.491,00	23.617.815.747,00	19,89
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	63.892.333.737,00	58.260.354.926,00	91,19	(5.631.978.811,00)	50.282.142.702,00	7.978.212.224,00	15,87
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20.497.508.896,00	20.071.820.511,00	97,92	(425.688.385,00)	18.014.127.623,00	2.057.692.888,00	11,42
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	15.577.214.317,00	15.162.005.625,00	97,33	(415.208.692,00)	13.886.851.718,00	1.275.153.907,00	9,18
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.808.196.027,00	3.799.820.095,00	99,78	(8.375.932,00)	3.246.025.259,00	553.794.836,00	17,06
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	36.526.712.116,00	36.514.749.564,00	99,97	(11.962.552,00)	31.210.204.002,00	5.304.545.562,00	17,00
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	13.194.949.805,00	12.663.890.558,00	95,98	(531.059.247,00)	11.379.425.803,00	1.284.464.755,00	11,29
9	DINAS SOSIAL	9.566.030.617,00	9.498.958.668,00	99,30	(67.071.949,00)	7.814.140.617,00	1.684.818.051,00	21,56
10	DINAS TENAGA KERJA	8.951.946.399,00	8.818.719.257,00	98,51	(133.227.142,00)	7.153.276.589,00	1.665.442.668,00	23,28

No	SKPD	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.336.360.510,00	7.262.658.599,00	99,00	(73.701.911,00)	6.089.850.350,00	1.172.808.249,00	19,26
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	15.257.693.367,00	15.240.760.148,00	99,89	(16.933.219,00)	12.883.268.934,00	2.357.491.214,00	18,30
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	35.877.108.051,00	35.283.732.859,00	98,35	(593.375.192,00)	30.208.457.978,00	5.075.274.881,00	16,80
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11.041.161.326,00	10.991.326.702,00	99,55	(49.834.624,00)	9.106.518.171,00	1.884.808.531,00	20,70
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.547.018.873,00	6.528.028.309,00	99,71	(18.990.564,00)	5.529.581.072,00	998.447.237,00	18,06
16	DINAS PERHUBUNGAN	36.907.213.231,00	36.728.058.543,00	99,51	(179.154.688,00)	31.106.829.608,00	5.621.228.935,00	18,07
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.016.590.892,00	13.004.555.063,00	99,91	(12.035.829,00)	10.056.662.932,00	2.947.892.131,00	29,31
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN	14.335.020.339,00	14.097.216.289,00	98,34	(237.804.050,00)	12.763.659.754,00	1.333.556.535,00	10,45
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	11.109.125.951,00	11.092.593.087,00	99,85	(16.532.864,00)	9.415.533.298,00	1.677.059.789,00	17,81
20	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	9.703.890.520,00	9.598.351.556,00	98,91	(105.538.964,00)	8.486.133.802,00	1.112.217.754,00	13,11
21	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	8.155.145.218,00	8.058.196.837,00	98,81	(96.948.381,00)	6.869.256.346,00	1.188.940.491,00	17,31
22	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	8.618.757.920,00	8.484.271.827,00	98,44	(134.486.093,00)	7.085.649.254,00	1.398.622.573,00	19,74
23	SEKRETARIAT DAERAH	50.666.695.560,00	49.909.912.944,00	98,51	(756.782.616,00)	40.407.418.922,00	9.502.494.022,00	23,52
24	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	60.616.212.110,00	59.501.494.349,00	98,16	(1.114.717.761,00)	57.808.128.472,00	1.693.365.877,00	2,93
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	14.810.354.492,00	14.798.134.442,00	99,92	(12.220.050,00)	12.096.400.736,00	2.701.733.706,00	22,34
26	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	13.905.766.148,00	13.317.482.934,00	95,77	(588.283.214,00)	10.716.081.034,00	2.601.401.900,00	24,28
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	36.537.410.611,00	35.691.854.742,00	97,69	(845.555.869,00)	36.956.307.352,00	(1.264.452.610,00)	(3,42)
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	15.980.987.715,00	15.778.072.669,00	98,73	(202.915.046,00)	13.759.896.161,00	2.018.176.508,00	14,67
29	INSPEKTORAT	21.452.550.464,00	21.421.304.940,00	99,85	(31.245.524,00)	16.027.698.740,00	5.393.606.200,00	33,65
30	KECAMATAN BOGOR UTARA	17.138.305.299,00	17.070.023.940,00	99,60	(68.281.359,00)	14.492.182.073,00	2.577.841.867,00	17,79
31	KECAMATAN BOGOR SELATAN	30.145.097.946,00	29.285.615.285,00	97,15	(859.482.661,00)	24.695.566.644,00	4.590.048.641,00	18,59
32	KECAMATAN BOGOR TIMUR	13.884.663.696,00	13.345.999.144,00	96,12	(538.664.552,00)	10.718.821.079,00	2.627.178.065,00	24,51
33	KECAMATAN BOGOR BARAT	29.570.259.742,00	29.092.918.522,00	98,39	(477.341.220,00)	24.734.004.605,00	4.358.913.917,00	17,62
34	KECAMATAN BOGOR TENGAH	21.789.685.744,00	21.589.639.148,00	99,08	(200.046.596,00)	18.414.870.979,00	3.174.768.169,00	17,24
35	KECAMATAN TANAH SAREAL	21.976.686.229,00	21.610.686.097,00	98,33	(366.000.132,00)	18.592.389.436,00	3.018.296.661,00	16,23
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.861.556.617,00	5.474.638.704,00	93,40	(386.917.913,00)	5.133.850.317,00	340.788.387,00	6,64
Jumlah		1.270.881.665.338,00	1.242.957.964.907,00	97,80	(27.923.700.431,00)	1.063.654.426.888,00	179.303.538.019,00	16,86

5.1.2.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 serta Realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.45
Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Barang	254.886.025.281,00	237.760.321.885,00	93,28	(17.125.703.396,00)	175.422.007.590,00	62.338.314.295,00	35,54
2	Belanja Jasa	435.636.872.229,00	414.617.730.955,00	95,18	(21.019.141.274,00)	423.062.067.821,00	(8.444.336.866,00)	(2,00)
3	Belanja Pemeliharaan	119.191.646.477,00	116.798.066.547,00	97,99	(2.393.579.930,00)	129.645.432.722,00	(12.847.366.175,00)	(9,91)
4	Belanja Perjalanan Dinas	98.263.810.665,00	85.268.016.110,00	86,77	(12.995.794.555,00)	85.890.101.324,00	(622.085.214,00)	(0,72)
5	Belanja Uang dan / atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	47.637.620.800,00	46.269.973.715,00	97,13	(1.367.647.085,00)	56.273.712.418,00	(10.003.738.703,00)	(17,78)
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	75.754.584.093,00	75.033.649.408,00	99,05	(720.934.685,00)	81.091.691.202,00	(6.058.041.794,00)	(7,47)
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	294.197.390.042,00	311.886.037.328,00	106,01	17.688.647.286,00	285.072.264.872,00	26.813.772.456,00	9,41
8	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	17.387.480.000,00	16.531.191.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.342.955.429.587,00	1.304.164.987.240,00	97,11	(38.790.442.347,00)	1.236.457.277.949,00	67.707.709.291,00	5,48

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2024 mencapai Rp1.304.164.987.240,00 atau 97,11% dari anggaran sebesar Rp1.342.955.429.587,00. Realisasi tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi 2023 sebesar Rp67.707.709.291,00 atau mencapai 5,48%.

Penjelasan lebih lanjut atas Belanja Barang dan Jasa antara lain sebagai berikut:

a. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp237.760.321.885,00 dan Rp175.422.007.590,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.46
Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	25.026.384.824,00	18.545.828.023,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	857.616.794,00	2.491.984.600,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	23.211.237.995,00	26.400.355.446,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	17.238.400,00	31.140,00
5	Belanja Bahan-Bahan / Bibit Tanaman	1.485.632.693,00	1.028.203.088,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	78.261.580,00	10.438.800,00
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	91.385.800,00	87.038.200,00
8	Belanja Bahan-Bahan / Bibit Ternak / Bibit Ikan	84.456.100,00	62.469.200,00
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	23.790.997,00	5.063.080.701,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	6.934.596.162,00	6.377.413.395,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	1.007.446.900,00	397.781.820,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	63.901.500,00	39.859.800,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	157.444.500,00	14.417.000,00
14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	492.945.500,00	258.258.900,00
15	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	4.935.500,00	4.559.880,00
16	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	85.962.285,00	6.980.000,00
17	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.743.323.305,00	12.707.930.083,00
18	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.483.294.736,00	1.975.897.694,00
19	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	301.562.500,00	243.578.260,00
20	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	130.859.500,00	69.680.000,00
21	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen / Administrasi Tender	0,00	600.000,00
22	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.047.890.088,00	5.035.677.829,00
23	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.648.005.970,00	1.137.383.851,00
24	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.507.618.756,00	7.542.410.588,00
25	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.770.180.910,00	1.280.719.356,00
26	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	666.319.525,00	173.294.600,00
27	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir / Cendera Mata	1.483.594.450,00	1.839.231.762,00
28	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.168.920.605,00	2.916.500.395,00
29	Belanja Obat-Obatan-Obat	9.296.454.388,00	3.069.950.488,00
30	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	6.511.845.076,00	75.083.000,00
31	Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	64.223.539.412,00	36.776.436.508,00
32	Belanja Natura dan Pakan-Natura	9.053.422.401,00	2.284.155.120,00
33	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	180.019.250,00	80.065.780,00
34	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	25.868.700,00
35	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	11.878.624,00	4.119.000,00
36	Belanja Makanan dan Minuman		20.042.576.577,00

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	Rapat	19.608.205.236,00	
37	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.926.024.167,00	4.525.205.570,00
38	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	114.172.000,00	69.975.000,00
39	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	2.179.554.084,00
40	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	206.120.000,00	55.700.000,00
41	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.414.855.510,00	5.972.917.920,00
42	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	1.027.500.000,00	912.500.000,00
43	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	645.188.598,00	933.870.355,00
44	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	627.649.530,00	790.158.752,00
45	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	99.000.000,00	705.618.560,00
46	Belanja Pakaian Penyelamatan	34.000.000,00	0,00
47	Belanja Pakaian Siaga	23.550.000,00	65.614.660
48	Belanja Pakaian Teknik	38.074.665,00	36.973.700
49	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	84.609.000,00	68.369.920
50	Belanja Pakaian Adat Daerah	87.127.000,00	56.440.000
51	Belanja Pakaian Batik Tradisional	112.500.000,00	0,00
52	Belanja Pakaian Olahraga	43.050.000,00	455.995.700
53	Belanja Pakaian Paskibraka	176.383.200,00	0,00
54	Belanja Pakaian Jas / Safari	5.100.000,00	58.354.065,0
55	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	367.599.650,00	135.258.800,0
56	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	13.085.459.723,00	104.839.500,0
57	Belanja Pipa-Pipa Beton Pratekan	0,00	199.047.420,00
58	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	25.754.000,00
59	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	30.360.000,00	0,00
60	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	6.530.000,00	0,00
61	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel TakBermesin-Perkakas Bengkel Kerja	1.225.600,00	0,00
62	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	450.300,00	0,00
63	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	788.540,00	0,00
64	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-AlatLaboratorium Farmasi	51.846.220,00	0,00
65	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	58.238.000,00	0,00
66	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-PeralatanJaringan	8.737.920,00	0,00
67	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-SepatuLapangan	24.010.000,00	0,00
	Jumlah	**237.760.321.885,00**	**175.422.007.590,00**

b. Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp414.617.730.955,00 dan Rp423.062.067.821,00 yang terinci sebagai berikut :

Tabel 5.1.47

Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.047.189.800,00	6.104.465.000,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.467.430.000,00	6.886.345.000,00
3	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	529.200.000,00	302.400.000,00
4	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	5.600.000,00	2.739.720.000,00
5	Honorarium Rohaniwan		11.800.000,00

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
		8.900.000,00	
6	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	6.000.000,00	4.250.000,00
7	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	21.600.000,00	48.000.000,00
8	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.663.600.000,00	21.300.000,00
9	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	567.100.000,00	601.700.000,00
10	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	23.383.003.720,00	40.836.910.000,00
11	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	7.785.762.920,00	18.713.652.956,00
12	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	1.704.049.448,00	1.183.474.150,00
13	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	17.122.554.712,00	14.268.305.301,00
14	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4.989.566.749,00	4.306.400.000,00
15	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	975.000.000,00	975.000.000,00
16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.817.500.000,00	1.101.196.394,00
17	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	770.800.000,00	714.400.000,00
18	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	0,00	1.959.450.000,00
19	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	0,00	7.768.116.000,00
20	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	520.000.000,00	343.400.000,00
21	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	0,00	1.433.280.000,00
22	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	826.650.000,00	995.450.000,00
23	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	34.831.042.061,00	21.744.339.181,00
24	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	333.308.000,00	628.950.000,00
25	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.919.781.844,00	7.550.394.232,00
26	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.351.140.467,00	3.334.121.448,00
27	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	62.609.537.408,00	61.048.203.715,00
28	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	16.704.253.644,00	10.060.213.353,00
29	Belanja Jasa Tenaga Caraka	120.000.000,00	137.030.000,00
30	Belanja Jasa Tenaga Supir	3.588.901.511,00	2.798.240.270,00
31	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	192.240.150,00	143.500.000,00
32	Belanja Jasa Audit / Surveillance ISO	407.468.340,00	865.507.890,00
33	Belanja Jasa Juri Perlombaan / Pertandingan	362.850.000,00	457.750.000,00
34	Belanja Jasa Tata Rias	11.000.000,00	12.000.000,00
35	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.497.869.146,00	4.127.753.912,00
36	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	43.666.643,00	51.768.848,00
37	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	0,00	336.000.000,00
38	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	199.973.738,00	69.730.200,00
39	Belanja Jasa Konversi Aplikasi / Sistem Informasi	1.996.282.510,00	3.773.034.510,00
40	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.782.025.484,00	4.625.175.788,00
41	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	490.267.685,00	214.966.060,00
42	Belanja Jasa Kalibrasi	435.990.500,00	77.197.500,00
43	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	74.639.000,00	0,00
44	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	265.600.700,00	0,00
45	Belanja Jasa Jalan / Tol	2.107.500,00	0,00
46	Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan	6.595.345.400,00	8.205.372.225,00
47	Belanja Tagihan Telepon	276.216.162,00	299.173.815,00
48	Belanja Tagihan Air	3.156.202.695,00	2.921.397.116,00
49	Belanja Tagihan Listrik	46.720.799.405,00	48.787.292.736,00
50	Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	592.667.800,00	662.983.899,00
51	Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	6.324.280.737,00	6.199.338.493,00
52	Belanja Paket / Pengiriman	4.428.000,00	1.790.500,00

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
53	Belanja Registrasi / Keanggotaan	2.624.337.000,00	996.127.500,00
54	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.244.009.054,00	2.350.498.722,00
55	Belanja Pengolahan Air Limbah	28.754.900,00	59.762.678,00
56	Belanja Lembur	0,00	150.000.000,00
57	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	200.000.000,00	
58	Belanja Medical Check Up	128.162.985,00	72.131.685,00
59	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	0,00	119.642.882,00
60	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	75.063.978.740,00	60.111.815.660,00
61	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	7.756.162.400,00	7.968.234.960,00
62	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.463.264.411,00	5.132.484.383,00
63	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	304.077.987,00	338.674.357,00
64	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	380.234.910,00	443.793.744,00
65	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	822.509.469,00	1.811.765.428,00
66	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	829.523.200,00	0,00
67	Belanja Sewa Tanah Kering	80.500.000,00	80.000.000,00
68	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	49.000.000,00	26.000.000,00
69	Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir	38.880.000,00	37.800.000,00
70	Belanja Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	77.167.800,00	72.000.000,00
71	Belanja Sewa Electric Generating Set	0,00	7.000.000,00
72	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.839.897.856,00	1.003.775.000,00
73	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	42.180.000,00	0,00
74	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	6.836.000,00	0,00
75	Belanja Sewa Mebel	321.359.100,00	238.327.960,00
76	Belanja Sewa Alat Pendingin	0,00	35.309.700,00
77	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.790.239.993,00	821.239.200,00
78	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	15.324.600,00	460.800.200,00
79	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	0,00	28.000.000,00
80	Belanja Sewa Sumber Tenaga	149.002.100,00	104.248.300,00
81	Belanja Sewa Peralatan Umum	7.434.000,00	588.856.200,00
82	Belanja Sewa Komputer Jaringan	702.798.120,00	575.476.299,00
83	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	722.000.000,00	0,00
84	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	912.047.400,00	1.946.951.944,00
85	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	27.000.000,00
86	Belanja Sewa Taman	22.826.200,00	0,00
87	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.339.821.944,00	26.000.000,00
88	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	152.500.000,00	225.000.000,00
89	Belanja Sewa Audio Visual	0,00	5.000.000,00
90	Belanja Sewa Tanaman	171.295.200,00	142.548.420,00
91	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	2.009.154.723,00	572.835.900,00
92	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	34.247.940,00	0,00
93	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.017.096.099,00	457.590.179,00
94	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	6.762.695.634,00	6.092.550.240,00
95	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil	5.727.037.915,00	1.234.082.460,00

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	Transportasi		
96	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0,00	331.695.750,00
97	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	78.510.300,00
98	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	279.750.525,00	0,00
99	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	755.748.935,00	2.719.782.746,00
100	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	648.019.110,00	219.780.000,00
101	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	434.543.910,00	434.184.270,00
102	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2.051.546.298,00	1.998.742.839,00
103	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	2.504.719.212,00	1.300.468.281,00
104	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	3.424.900.597,00	938.975.195,00
105	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	59.995.500,00	0,00
106	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	99.589.000,00
107	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	0,00	163.922.050,00
108	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	476.478.600,00	2.317.719.780,00
109	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	1.345.648.325,00	1.614.464.676,00
110	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	0,00	639.169.084,00
111	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	1.268.828.390,00	1.088.624.000,00
112	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	269.643.420,00	490.586.700,00
113	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	91.697.100,00	98.750.484,00
114	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	282.239.700,00	335.228.214,00
115	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	4.846.563.624,00	6.853.243.129,00
116	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1.152.002.250,00	1.581.420.240,00
117	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	136.463.400,00	0,00
118	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	0,00	99.240.660,00
119	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata	0,00	0,00
120	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan	90.742.500,00	85.164.750,00
121	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan	0,00	172.993.500,00
122	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisataan	0,00	79.753.500,00
123	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	8.000.000,00	11.000.000,00
124	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	135.000.000,00	82.000.000,00
125	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	72.000.000,00	114.000.000,00
126	Belanja Kursus Singkat /		1.974.957.000,00

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	Pelatihan	843.877.000,00	
127	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	1.775.681.000,00
128	Belanja Diklat Kepemimpinan	501.571.000,00	546.856.180,00
	Jumlah	**414.617.730.955,00**	**423.062.067.821,00**

c. Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp116.798.066.547,00 dan Rp129.645.432.722,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.48

Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	107.920.000,00	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	158.000.000,00	1.345.192.350,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	87.409.000,00	429.101.165,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	268.457.300,00	277.805.050,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	299.546.700,00	298.809.120,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.447.838.048,00	1.107.730.616,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	9.065.546.712,00	9.285.954.052,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	130.495.843,00	308.142.471,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	287.128.080,00	179.343.400,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.591.256.283,00	1.520.574.206,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	31.999.500,00	25.957.400,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	12.350.000,00	0,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	158.500.000,00	0,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman / Ikan / Ternak	2.580.000,00	294.152.250,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	98.927.000,00	288.643.000,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	768.661.218,00	433.043.420,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	357.451.750,00	297.408.028,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.113.826.302,00	1.453.302.384,00
19	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	148.019.850,00	33.856.943,00
20	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	116.077.400,00
21	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	165.101.710,00	239.583.100,00
22	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	259.442.500,00	286.512.010,00
23	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	17.275.000,00	0,00
24	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat	0,00	199.600.200,00

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	Studio-Alat Studio Lainnya		
25	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	49.190.760,00	0,00
26	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	0,00	15.307.500,00
27	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	567.977.642,00	595.680.886,00
28	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.331.028.487,00	1.528.259.311,00
29	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	661.340.800,00	280.018.550,00
30	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	410.883.690,00	53.170.040,00
31	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	215.628.485,00	688.753.211,00
32	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya	0,00	37.020.000,00
33	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	159.688.152,00	523.911.621,00
34	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	21.817.211.008,00	17.666.001.336,00
35	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	199.540.060,00
36	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	25.641.000,00	88.846.620,00
37	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	2.876.584.354,00	8.255.975.168,00
38	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel / Hanggar	243.667.909,00	0,00
39	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.969.487.091,00	0,00
40	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.475.857.562,00	0,00
41	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya	0,00	10.547.876.571,00
42	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	74.784.918,00	0,00
43	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	370.406.232,00	0,00
44	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	281.124.742,00	0,00
45	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	39.035.881.342,00	43.326.112.583,00
46	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	181.285.200,00	49.239.600,00
47	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur	0,00	575.142.234,00
48	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	0,00	1.873.489.271,00
49	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	302.463.969,00	0,00
50	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	24.165.153.348,00	23.110.926.784,00
51	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	153.542.818,00	0,00
52	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	1.718.099.705,00	0,00
53	Belanja Pemeliharaan Bangunan	0,00	882.131.103,00

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya		
54	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	49.764.618,00	49.772.010,00
55	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	703.409.419,00	877.469.698,00
56	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	380.230.500,00	0,00
	Jumlah	**116.798.066.547,00**	**129.645.432.722,00**

d. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp85.268.016.110,00 dan Rp85.890.101.324,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.49
Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57.514.851.625,00	41.283.907.263,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.967.853.850,00	11.617.414.032,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.802.146.287,00	14.771.875.061,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.692.573.810,00	4.192.970.600,00
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	2.290.590.538,00	14.023.934.368,00
	Jumlah	**85.268.016.110,00**	**85.890.101.324,00**

e. Realisasi Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp46.269.973.715,00 dan Rp56.273.712.418,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.50
Realisasi Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.983.670.000,00	23.568.440.008,00
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	105.000.000,00	105.000.000,00
3	Belanja Beasiswa	1.050.110.000,00	880.050.000,00
4	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	14.985.216.401,00	0,00
5	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	4.237.200.000,00	0,00
6	Belanja Uang yang Diberikan kepada Karang Taruna	175.200.000,00	0,00
7	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	481.250.000,00	0,00
8	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	8.598.200.000,00	0,00
9	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0,00	43.200.000,00
10	Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian	0,00	2.917.440,00
11	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	719.200.000,00	1.783.371.860,00
12	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	10.934.927.314,00	29.890.733.110,00
	Jumlah	**46.269.973.715,00**	**56.273.712.418,00**

Rincian Belanja Barang dan Jasapada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.51

Realisasi Belanja Barang dan Jasa per Perangkat Daerah

No	SKPD	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PENDIDIKAN	144.574.032.484,00	137.910.962.933,00	95,39	(6.663.069.551,00)	155.793.070.676,00	(17.882.107.743,00)	(11,48)
2	DINAS KESEHATAN	192.305.443.025,00	178.746.028.287,00	92,95	(13.559.414.738,00)	155.790.553.677,00	22.955.474.610,00	14,73
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	266.489.493.488,00	288.917.179.193,00	108,42	22.427.685.705,00	262.281.771.629,00	26.635.407.564,00	10,16
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	80.679.466.050,00	77.581.900.838,00	96,16	(3.097.565.212,00)	63.614.619.124,00	13.967.281.714,00	21,96
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	139.848.109.292,00	137.211.228.552,00	98,11	(2.636.880.740,00)	135.415.461.410,00	1.795.767.142,00	1,33
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.746.032.660,00	4.158.871.360,00	87,63	(587.161.300,00)	4.347.754.587,00	(188.883.227,00)	(4,34)
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11.961.793.399,00	11.708.363.126,00	97,88	(253.430.273,00)	10.538.394.418,00	1.169.968.708,00	11,10
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.010.761.078,00	3.676.419.440,00	91,66	(334.341.638,00)	3.332.950.056,00	343.469.384,00	10,31
9	DINAS SOSIAL	7.683.787.183,00	7.084.062.863,00	92,19	(599.724.320,00)	3.816.337.168,00	3.267.725.695,00	85,62
10	DINAS TENAGA KERJA	9.854.638.727,00	9.536.967.770,00	96,78	(317.670.957,00)	4.044.523.326,00	5.492.444.444,00	135,80
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.262.944.295,00	6.973.091.842,00	96,01	(289.852.453,00)	4.292.242.404,00	2.680.849.438,00	62,46
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	13.543.362.409,00	13.391.855.444,00	98,88	(151.506.965,00)	3.951.329.023,00	9.440.526.421,00	238,92
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	85.045.445.188,00	78.059.050.076,00	91,79	(6.986.395.112,00)	76.821.968.307,00	1.237.081.769,00	1,61
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.979.541.604,00	5.616.977.279,00	93,94	(362.564.325,00)	6.057.656.759,00	(440.679.480,00)	(7,27)
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12.766.356.315,00	12.255.810.842,00	96,00	(510.545.473,00)	10.890.347.730,00	1.365.463.112,00	12,54
16	DINAS PERHUBUNGAN	77.714.358.651,00	72.800.723.402,00	93,68	(4.913.635.249,00)	73.726.168.252,00	(925.444.850,00)	(1,26)
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11.113.360.186,00	10.986.430.788,00	98,86	(126.929.398,00)	11.833.802.935,00	(847.372.147,00)	(7,16)
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	4.543.715.482,00	4.248.465.973,00	93,50	(295.249.509,00)	6.334.385.838,00	(2.085.919.865,00)	(32,93)
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.140.684.004,00	4.091.752.708,00	98,82	(48.931.296,00)	4.547.700.193,00	(455.947.485,00)	(10,03)
20	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	8.749.988.425,00	8.289.693.271,00	94,74	(460.295.154,00)	29.028.071.092,00	(20.738.377.821,00)	(71,44)
21	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	3.137.270.411,00	3.050.521.631,00	97,23	(86.748.780,00)	2.924.583.493,00	125.938.138,00	4,31
22	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	4.295.441.511,00	4.107.428.532,00	95,62	(188.012.979,00)	6.237.962.005,00	(2.130.533.473,00)	(34,15)
23	SEKRETARIAT DAERAH	42.376.053.074,00	40.529.812.196,00	95,64	(1.846.240.878,00)	40.046.372.750,00	483.439.446,00	1,21
24	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	89.340.007.528,00	77.726.744.290,00	87,00	(11.613.263.238,00)	75.912.754.285,00	1.813.990.005,00	2,39
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8.024.743.113,00	7.739.456.296,00	96,44	(285.286.817,00)	8.794.667.049,00	(1.055.210.753,00)	(12,00)
26	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	9.392.974.881,00	8.562.122.246,00	91,15	(830.852.635,00)	9.457.511.859,00	(895.389.613,00)	(9,47)
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	10.419.515.225,00	10.195.094.770,00	97,85	(224.420.455,00)	10.742.707.177,00	(547.612.407,00)	(5,10)
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.329.553.536,00	5.874.987.890,00	80,15	(1.454.565.646,00)	6.760.307.901,00	(885.320.011,00)	(13,10)
29	INSPEKTORAT	4.268.052.389,00	3.451.023.120,00	80,86	(817.029.269,00)	3.348.419.063,00	102.604.057,00	3,06
30	KECAMATAN BOGOR UTARA	9.281.853.016,00	9.172.216.082,00	98,82	(109.636.934,00)	6.077.518.087,00	3.094.697.995,00	50,92
31	KECAMATAN BOGOR SELATAN	14.628.153.398,00	14.236.256.394,00	97,32	(391.897.004,00)	9.740.103.292,00	4.496.153.102,00	46,16
32	KECAMATAN BOGOR TIMUR	8.380.109.944,00	8.122.560.047,00	96,93	(257.549.897,00)	4.708.873.895,00	3.413.686.152,00	72,49
33	KECAMATAN BOGOR BARAT	12.343.524.132,00	12.063.634.362,00	97,73	(279.889.770,00)	8.846.868.979,00	3.216.765.383,00	36,36
34	KECAMATAN BOGOR TENGAH	9.908.095.153,00	9.841.827.961,00	99,33	(66.267.192,00)	6.643.569.996,00	3.198.257.965,00	48,14
35	KECAMATAN TANAH SAREAL	10.848.977.416,00	10.514.552.471,00	96,92	(334.424.945,00)	6.830.285.970,00	3.684.266.501,00	53,94
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.967.790.915,00	5.730.912.965,00	96,03	(236.877.950,00)	2.925.663.544,00	2.805.249.421,00	95,88
Jumlah		1.342.955.429.587,00	1.304.164.987.240,00	97,11	(38.790.442.347,00)	1.236.457.277.949,00	67.707.709.291,00	5,48

5.1.2.1.3 BELANJA BUNGA

Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Kota seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda. Realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2024 serta Realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.52
Belanja Bunga Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri - Jangka Panjang	7.000.000.000,00	6.035.551.928,00	86,22	(964.448.072,00)	6.144.188.950,00	(108.637.022,00)	(1,77)
2	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN- Jangka Pendek	500.000.000,00	992.194.667,00	198,44	492.194.667,00	47.493.750,00	944.700.917,00	0,00
	Jumlah	**7.500.000.000,00**	**7.027.746.595,00**	93,70	(472.253.405,00)	**6.144.188.950,00**	**883.557.645,00**	14,38

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja bunga tahun anggaran 2024 sebesar Rp7.027.746.595,00 atau mencapai 93,70% dari anggaran sebesar Rp7.500.000.000,00. Realisasi tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp883.557.645,00 atau 14,38% dari realisasi tahun anggaran 2023.

Realisasi belanja bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Daalam Negeri – Jangka Panjang Tahun 2024 sebesar Rp6.035.551.928,00 merupakan bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang atas dana pinjaman dari *International Bank For Reconstruction and Development, Loan Agreement* Nomor 7730-ID tanggal 1 September 2009 dalam rangka pembiayaan *Urban Water Supply And Sanitation Project* sesuai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 02 November 2009.

Metode perhitungan tingkat bunga sesuai amandemen terhadapat SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 02 November 2009 sesuai dengan surat Nomor S-88/MK.5/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Penandatanganan Perubahan (Amandemen) Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 02 November 2009 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Bogor, semula Pemkot Bogor wajib membayar bunga dalam mata uang Rupiah kepada Pemerintah atas jumlah pinjaman penerusan yang telah ditarik dan masih terutang dari waktu ke waktu, sebesar tingkat bunga NPPLN LIBOR + *Variable Spread* +5,02 % (lima koma nol dua perseratus) per tahun terhitung sejak penarikan pinjaman didasarkan pada ketetapan yang disampaikan oleh IBRD kepada pemerintah, menjadi Pemkot Bogor membayar bunga dalam mata uang Rupiah kepada Pemerintah atas jumlah pinjaman penerusan yang telah ditarik dan masih terutang dari waktu ke waktu sebesar tingkat bunga Pinjaman Luar Negeri ditambah 5,02% (lima koma nol dua perseratus) berdasarkan tagihan yang disampaikan oleh *The World Bank* kepada pemerintah.

Rincian Belanja Bunga pada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.53

Realisasi Belanja Bunga per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	300.000.000,00	992.194.667,00	330,73	692.194.667,00	0,00	992.194.667,00	0,00
2	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6.144.188.950,00	6.035.551.928,00	98,23	(108.637.022,00)	4.282.366.790,00	1.753.185.138,00	40,94
Jumlah		**6.444.188.950,00**	**7.027.746.595,00**	**109,06**	**583.557.645,00**	**4.282.366.790,00**	**2.745.379.805,00**	**64,11**

5.1.2.1.4 BELANJA HIBAH

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan.

pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial di Pemerintah Kota Bogor diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2022. Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 serta Realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.54

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	66.269.636.386,00	64.853.633.758,00	97,86	(1.416.002.628,00)	41.728.854.095,00	23.124.779.663,00	55,42
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	39.691.102.110,00	38.968.786.299,00	98,18	(722.315.811,00)	60.856.007.008,00	(21.887.220.709,00)	(35,97)
3	Belanja Hibah Dana BOS	45.894.640.000,00	44.978.226.430,00	98,00	(916.413.570,00)	41.508.389.331,00	3.469.837.099,00	0,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.465.242.000,00	3.397.282.000,00	98,04	0,00	3.287.754.000,00	0,00	0,00
5	Belanja Hibah Dana BOSP	24.757.130.000,00	24.321.406.900,00	98,24	(435.723.100,00)	0,00	24.321.406.900,00	0,00
Jumlah		**180.077.750.496,00**	**176.519.335.387,00**	**98,02**	**(3.558.415.109,00)**	**147.381.004.434,00**	**29.138.330.953,00**	**19,77**

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja hibah tahun anggaran 2024 sebesar Rp176.519.335.387,00 atau mencapai 98,02% dari anggaran 2024 sebesar Rp180.077.750.496,00 realisasi hibah tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp29.138.330.953,00 atau sebesar 19,77% dibandingkan realisasi tahun 2023.

Penjelasan lebih lanjut atas Belanja Hibah antara lain sebagai berikut:

a. Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp64.853.633.758,00 dan Rp41.728.854.095,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.55

Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	53.933.637.450,00	40.929.414.447,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	10.919.996.308,00	799.439.648,00
	Jumlah	**64.853.633.758,00**	**41.728.854.095,00**

Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Kota Bogor sebesar Rp53.933.637.450,00, rincian Hibah berupa uang diberikan Kepada :

Tabel 5.1.56

Realisasi Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Satuan Tugas Saber Pungli Kota Bogor	875.000.000,00	500.000.000,00
2	Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor	28.858.713.600,00	22.813.717.579,00
3	Badan Pengawasan Pemilu Kota Bogor	9.790.029.000,00	7.673.791.088,00
4	Polresta Bogor Kota Bogor	8.576.071.000,00	4.994.406.480,00
5	Denpom III/I Kota Bogor	350.000.000,00	1.347.499.300,00
6	Komando Resor Militer 061 Kota Bogor	100.000.000,00	400.000.000,00
7	Komando Distrik Militer 0606 Kota Bogor	2.926.375.000,00	1.500.000.000,00
8	TNI AU Atang Sendjaja	0,00	500.000.000,00
9	Garnisun Kota Bogor	250.000.000,00	200.000.000,00
10	Kementerian Agama Kota Bogor	150.000.000,00	500.000.000,00
11	Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat	0,00	500.000.000,00
12	Kejaksaan Negeri Kota Bogor	1.732.448.850,00	0,00
13	Lanud Atang Sanjaya	150.000.000,00	0,00
14	LP KELAS IIA	75.000.000,00	0,00
15	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	100.000.000,00	0,00
	Jumlah	**53.933.637.450,00**	**40.929.414.447,00**

Sedangkan Hibah barang sebesar Rp10.919.966.308,00 diberikan berupa sarana dan prasarana kantor kepada :

Tabel 5.1.57

Realisasi Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pengadilan Negeri Kota Bogor kelas IA	0,00	199.057.028,00
2	Satinduk BAIS TNI Kota Bogor	0,00	47.341.500,00
3	Kejaksaan Negeri Kota Bogor	6.950.943.077,00	503.100.000,00
4	Polresta Bogor Kota sebesar	0,00	49.941.120,00
5	Sapras Bawaslu Kota Bogor	0,00	0,00
6	BPN Kota Bogor	1.805.083.556,00	0,00
7	Komando Distik Militer 0606	1.348.500.000,00	0,00
8	Kantor Pengadilan Bogor Kelas IA	781.068.000,00	0,00
9	Hibah Barang	34.401.675,00	0,00
	Jumlah	**10.919.996.308,00**	**799.439.648,00**

b. Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp38.968.786.299,00 dan Rp60.856.007.008,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.58

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan	18.128.279.189,00	18.770.796.708,00
2	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	486.350.000,00	21.345.035.200,00
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,	20.314.157.110,00	20.601.575.100,00

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		
4	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	40.000.000,00	138.600.000,00
	Jumlah	**38.968.786.299,00**	**60.856.007.008,00**

c. Realisasi Belanja Hibah Dana BOS Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp44.978.226.430,00 dan Rp41.508.389.331,00 merupakan realisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolah Dasar (SD) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta yang penyalurannya langsung diberikan oleh Pemerintah Pusat ke sekolah penerima.

d. Realisasi Belanja Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.397.282.000,00 dan Rp3.287.754.000,00. Dengan rincian realisasi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.59

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	478.508.000,00	508.644.000,00
2	Partai Persatuan Pembanguan (PPP)	224.092.000,00	220.698.000,00
3	Partai Bulan Bintang (PBB)	49.256.000,00	73.884.000,00
4	Partai Amanat Nasional (PAN)	250.658.000,00	224.028.000,00
5	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	136.904.000,00	115.224.000,00
6	Partai Hati Nurani Rakyat	95.380.000,00	143.070.000,00
7	Partai Demokrat	246.650.000,00	238.950.000,00
8	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	554.124.000,00	594.540.000,00
9	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	410.016.000,00	344.976.000,00
10	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	680.850.000,00	623.340.000,00
11	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	228.500.000,00	200.400.000,00
12	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	42.344.000,00	0,00
	Jumlah	**3.397.282.000,00**	**3.287.754.000,00**

Rincian Belanja Hibah pada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.60

Realisasi Belanja Hibah per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PENDIDIKAN	79.332.930.000,00	77.943.678.330,00	98,25	(1.389.251.670,00)	69.784.076.331,00	8.159.601.999,00	11,69
2	DINAS KESEHATAN	1.196.000.000,00	1.187.879.189,00	99,32	(8.120.811,00)	1.180.430.908,00	7.448.281,00	0,63
3	DINAS SOSIAL	229.500.000,00	229.500.000,00	100,00	0,00	258.520.000,00	(29.020.000,00)	(11,23)
4	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	380.900.000,00	380.900.000,00	100,00	0,00	305.000.000,00	75.900.000,00	24,89
5	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00
6	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00	138.600.000,00	(98.600.000,00)	(71,14)
7	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	10.635.000.000,00	10.635.000.000,00	100,00	0,00	10.723.800.000,00	(88.800.000,00)	(0,83)
8	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	266.914.100,00	(266.914.100,00)	(100,00)
9	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000.000,00	(92.000.000,00)	(100,00)
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	0,00	64.400.000,00	(64.400.000,00)	(100,00)
11	SEKRETARIAT DAERAH	17.638.542.110,00	17.001.462.110,00	96,39	(637.080.000,00)	18.150.655.000,00	(1.149.192.890,00)	(6,33)
12	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	70.474.878.386,00	68.950.915.758,00	97,84	(1.523.962.628,00)	46.416.608.095,00	22.534.307.663,00	48,55
	Jumlah	**180.077.750.496,00**	**176.519.335.387,00**	**98,02**	**(3.558.415.109,00)**	**147.381.004.434,00**	29.138.330.953,00	**19,77**

5.1.2.1.5 BANTUAN SOSIAL

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya

tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial di Pemerintah Kota Bogor diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2022.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 serta Realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.61

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	33.825.035.000,00	33.118.435.000,00	97,91	(706.600.000,00)	46.032.665.000,00	(12.914.230.000,00)	(28,05)
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	10.955.909.500,00	10.461.584.500,00	95,49	(494.325.000,00)	8.406.250.000,00	2.055.334.500,00	24,45
Jumlah		**44.780.944.500,00**	**43.580.019.500,00**	**97,32**	**(1.200.925.000,00)**	**54.438.915.000,00**	**(10.858.895.500,00)**	**(19,95)**

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja bantuan sosial Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp43.580.019.500,00 atau mencapai 97,32% dari anggaran sebesar Rp44.780.944.500,00 Realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp10.858.895.500,00 atau mencapai 19,65% dibandingkan dengan tahun 2023. Penjelasan lebih lanjut atas Belanja Bantuan Sosial antara lain sebagai berikut:

a. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp33.118.435.000,00 dan Rp46.032.665.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.62

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	33.118.435.000,00	46.032.665.000,00
	Jumlah	**33.118.435.000,00**	**46.032.665.000,00**

Adapun Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu diberikan dalam rangka perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

b. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.461.584.500,00 dan Rp8.406.250.000,00 diberikan kepada Lembaga Pendidikan Swasta.

Rincian Belanja Bantuan Sosial pada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.63

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PENDIDIKAN	5.141.096.000,00	5.015.796.000,00	97,56	(125.300.000,00)	3.071.250.000,00	1.944.546.000,00	63,31
2	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	33.825.035.000,00	33.118.435.000,00	97,91	(706.600.000,00)	46.032.665.000,00	(12.914.230.000,00)	(28,05)
3	SEKRETARIAT DAERAH	5.814.813.500,00	5.445.788.500,00	93,65	(369.025.000,00)	5.335.000.000,00	110.788.500,00	2,08
Jumlah		**44.780.944.500,00**	**43.580.019.500,00**	**97,32**	**(1.200.925.000,00)**	**54.438.915.000,00**	**(10.858.895.500,00)**	**(19,95)**

5.1.2.2 BELANJA MODAL

Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:

a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
   1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
   2) Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
   3) Batas minimal kapitalisasi aset.

   Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
   1) Berwujud;
   2) Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
   3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
   4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah

c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 serta Realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.64

Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Tanah	5.425.147.300,00	2.477.717.100,00	45,67	(2.947.430.200,00)	1.287.152.960,00	1.190.564.140,00	92,50
2	Belanja Peralatan dan Mesin	144.788.452.254,00	133.226.642.367,00	92,01	(11.561.809.887,00)	97.928.993.032,00	35.297.649.335,00	36,04
3	Belanja Gedung dan Bangunan	150.827.313.763,00	141.166.601.172,00	93,59	(9.660.712.591,00)	178.951.840.395,00	(37.785.239.223,00)	(21,11)
4	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	114.562.031.641,00	112.729.496.656,00	98,40	(1.832.534.985,00)	238.985.747.391,00	(126.256.250.735,00)	(52,83)
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	10.917.685.389,00	10.693.173.754,00	97,94	(224.511.635,00)	911.157.960,00	9.782.015.794,00	1.073,58
6	Belanja Aset Lainnya	75.000.000,00	74.355.570,00	99,14	(644.430,00)	100.077.000,00	(25.721.430,00)	(25,70)
Jumlah		**426.595.630.347,00**	**400.367.986.619,00**	**93,85**	**(26.227.643.728,00)**	**518.164.968.738,00**	**(117.796.982.119,00)**	**(22,73)**

5.1.2.2.1 BELANJA MODAL TANAH

Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024 serta Realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.65
Belanja Tanah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Modal Tanah	5.425.147.300,00	2.477.717.100,00	45,67	(2.947.430.200,00)	1.287.152.960,00	1.190.564.140,00	92,50
Jumlah		**5.425.147.300,00**	**2.477.717.100,00**	45,67	(2.947.430.200,00)	**1.287.152.960,00**	**1.190.564.140,00**	92,50

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja tanah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.477.717.100,00 atau mencapai 45,67% dari anggaran sebesar Rp5.425.147.300,00 realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.190.564.140,00 atau 92,50%. Dari anggaran sebesar Rp5.425.147.300,00 terealisasi sebesar Rp2.477.717.100,00 atau 45,67% yang disebabkan oleh adanya kendala dalam Pengadaan tanah untuk Jalan R3 Lanjutan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dikarenakan perlu dilakukan appraisal ulang untuk mendapatkan nilai propertinya, dan adanya efisiensi hasil negosiasi untuk pengadaan bidang tanah SD Negeri Cibuluh 3 pada Dinas Pendidikan.

Penjelasan lebih lanjut atas Belanja Tanah antara lain sebagai berikut:

Tabel 5.1.66
Rincian Realisasi Belanja Tanah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	813.680.000,00	139.105.200,00
2	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	560.621.000,00	0,00
3	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Bersejarah	0,00	0,00
4	Belanja Modal Tanah untuk Taman	1.103.416.100,00	1.148.047.760,00
	Jumlah	**2.477.717.100,00**	**1.287.152.960,00**

Rincian Belanja Modal Tanah pada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.67
Realisasi Belanja Modal Tanah per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PENDIDIKAN	1.470.681.300,00	813.680.000,00	0,00	0,00	0,00	813.680.000,00	0,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.834.412.000,00	560.621.000,00	0,00	0,00	0,00	560.621.000,00	0,00
3	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1.120.054.000,00	1.103.416.100,00	98,51	(16.637.900,00)	1.148.047.760,00	(44.631.660,00)	(3,89)
4	KECAMATAN BOGOR SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	89.266.200,00	(89.266.200,00)	(100,00)
5	KECAMATAN BOGOR BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	49.839.000,00	(49.839.000,00)	(100,00)
Jumlah		**5.425.147.300,00**	**2.477.717.100,00**	**45,67**	**(16.637.900,00)**	**1.287.152.960,00**	**1.190.564.140,00**	**92,50**

5.1.2.2.2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 serta Realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.68

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Modal Alat Besar	26.626.684.200,00	25.553.015.350,00	95,97	(1.073.668.850,00)	754.294.100,00	24.798.721.250,00	3.287,67
2	Belanja Modal Alat Angkutan	7.347.210.524,00	6.625.361.000,00	90,18	(721.849.524,00)	9.542.783.000,00	(2.917.422.000,00)	(30,57)
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	181.486.900,00	173.421.950,00	95,56	(8.064.950,00)	245.811.160,00	(72.389.210,00)	(29,45)
4	Belanja Modal Alat Pertanian	10.490.000,00	10.050.000,00	95,81	(440.000,00)	126.183.138,00	(116.133.138,00)	(92,04)
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	15.157.964.940,00	14.090.525.351,00	92,96	(1.067.439.589,00)	10.416.257.313,00	3.674.268.038,00	35,27
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.151.223.802,00	3.097.244.816,00	98,29	(53.978.986,00)	3.031.383.934,00	65.860.882,00	2,17
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	40.054.736.546,00	39.547.226.381,00	98,73	(507.510.165,00)	34.471.251.245,00	5.075.975.136,00	14,73
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.570.522.568,00	1.570.522.568,00	100,00	-	2.522.332.000,00	(951.809.432,00)	(37,74)
9	Belanja Modal Komputer	8.570.621.860,00	8.221.395.190,00	95,93	(349.226.670,00)	6.278.880.656,00	1.942.514.534,00	30,94
10	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00	107.800.000,00	(107.800.000,00)	0,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	166.887.800,00	154.000.000,00	92,28	(12.887.800,00)	462.364.098,00	(308.364.098,00)	(66,69)
12	Belanja Modal Rambu - Rambu	249.800.978,00	213.405.714,00	85,43	(36.395.264,00)	934.304.649,00	(720.898.935,00)	(77,16)
13	Belanja Modal Peralatan Olahraga	345.590.000,00	316.990.400,00	91,72	(28.599.600,00)	43.550.000,00	273.440.400,00	627,88
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	25.731.940.518,00	25.699.965.311,00	99,88	(31.975.207,00)	22.723.850.707,00	2.976.114.604,00	13,10
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	15.623.291.618,00	7.953.518.336,00	50,91	(7.669.773.282,00)	6.267.947.032,00	1.685.571.304,00	26,89
	Jumlah	**144.788.452.254,00**	**133.226.642.367,00**	**92,01**	**(11.561.809.887,00)**	**97.928.993.032,00**	**35.297.649.335,00**	**36,04**

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp133.230.562.367,00 atau 92,01% dari anggaran sebesar Rp144.788.452.254,00. Realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp35.297.649.335,00 atau mencapai 36.04% dibandingkan Tahun Anggaran 2023.

Penjelasan lebih lanjut atas Belanja Peralatan dan Mesin antara lain sebagai berikut:

a. Realisasi Belanja Modal Alat Berat Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp25.553.015.350,00 dan Rp754.294.100,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.1.69

Realisasi Belanja Modal Alat Berat Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Tractor	3.853.920.000,00	0,00
2	Belanja Modal Excavator	1.789.320.000,00	0,00
3	Belanja Modal Hauler	6.257.177.000,00	0,00
4	Belanja Modal Asphalt Equipment	9.271.200.000,00	0,00
5	Belanja Modal Loader	2.094.570.000,00	0,00
6	Belanja Modal Alat Pengangkat	0,00	0,00
7	Belanja Modal Mesin Proses	194.400.000,00	3.400.000,00
	Belanja Modal Compressor	5.850.000,00	0,00
8	Belanja Modal Electric Generating Set	1.098.250.000,00	564.000.000
9	Belanja Modal Pompa	33.200.000,00	46.895.000,00
10	Belanja Modal Mesin Bor	0,00	6.220.000,00
11	Belanja Modal Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	0,00	0,00
12	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	9.973.350,00	0,00
13	Belanja Modal Peralatan Selam	21.900.000,00	0,00
14	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	53.255.000,00	128.779.100,00
15	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	870.000.000,00	5.000.000,00
	Jumlah	**25.553.015.350,00**	**754.294.100,00**

b. Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.625.619.200,00 dan Rp9.542.783.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.70

Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.886.083.000,00	0,00
2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.044.179.000,00	0,00
3	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	936.000.000,00	253.000.000,00
4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	128.500.000,00	381.723.000,00

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	38.000.000,00	0,00
6	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.527.050.000,00	8.863.310.000,00
7	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	44.750.000,00
8	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	64.400.000,00	0,00
9	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.407.200,00	0,00
	Jumlah	**6.625.619.200,00**	**9.542.783.000,00**

c. Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp173.421.950,00 dan Rp245.811.160,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.71

Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	0,00	0,00
2	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	0,00	172.750.410,00
3	Belanja Modal Peralatan Las	0,00	15.562.000,00
4	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00	4.964.000,00
5	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	0,00	4.652.000,00
6	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	4.750.000,00	27.222.750,00
7	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	149.596.990,00	0,00
8	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	10.900.000,00	0,00
	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	2.500.000,00	0,00
9	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	0,00	0,00
10	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	0,00	20.660.000,00
11	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	1.283.800,00	0,00
12	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	4.391.160,00	0,00
	Jumlah	**173.421.950,00**	**245.811.160,00**

d. Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.050.000,00 dan Rp126.183.138,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.72

Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	126.183.138,00
2	Belanja Modal Alat Processing	10.050.000,00	0,00
	Jumlah	**10.050.000,00**	**126.183.138,00**

e. Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14.090.525.351,00 dan Rp10.416.257.313,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.73

Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Mesin Ketik	17.250.000,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00
3	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	129.100.000,00	24.697.500,00
4	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.131.482.414,00	1.297.862.043,00
5	Belanja Modal Mebel	8.248.087.559,00	5.132.180.165,00
6	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	0,00	3.800.000,00
7	Belanja Modal Alat Pembersih	100.780.000,00	810.476.600,00
8	Belanja Modal Alat Pendingin	1.076.684.480,00	752.256.100,00
9	Belanja Modal Alat Dapur	142.697.540,00	81.816.555,00
10	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.141.127.000,00	937.995.290,00
11	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	80.837.500,00	23.999.998,00

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
12	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	99.711.409,00	10.335.000,00
13	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	215.826.900,00	6.660.000,00
14	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	595.247.300,00	813.115.236,00
15	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0,00	16.095.000,00
16	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	798.075.000,00	177.193.300,00
17	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	313.618.249,00	327.774.526,00
	Jumlah	**14.090.525.351,00**	**10.416.257.313,00**

f. Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.097.244.816,00 dan Rp3.031.383.934,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.74

Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	642.728.316,00	1.783.020.300,00
2	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.667.512.400,00	279.884.600,00
3	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	6.800.000,00	157.913.700,00
4	Belanja Modal Peralatan Cetak	210.660.000,00	497.751.814,00
5	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	48.327.100,00	41.593.220,00
6	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	133.627.000,00	5.000.550,00
7	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	52.900.000,00	30.219.750,00
8	Belanja Modal Humidity Control	29.750.000,00	0,00
9	Belanja Modal Sumber Tenaga	304.940.000,00	236.000.000,00
	Jumlah	**3.097.244.816,00**	**3.031.383.934,00**

g. Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp34.547.226.381,00 dan Rp34.471.251.245,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.75

Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.068.827.600,00	341.287.200,00
2	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	420.000.000,00	0,00
3	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	0,00	69.716.000,00
4	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	11.166.563.475,00	24.700.000.000,00
5	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	258.277.506,00	0,00
6	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	12.844.150.759,00	0,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	9.029.800.000,00	0,00
8	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	275.820.000,00	0,00
9	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	1.675.000.000,00	0,00
10	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.474.000.000,00	0,00
11	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.334.787.041,00	9.360.248.045,00
	Jumlah	**39.547.226.381,00**	**34.471.251.245,00**

h. Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.570.522.568,00 dan Rp2.522.332.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.76

Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	0,00	414.920.000,00
2	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	0,00	158.000.000,00
3	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	0,00	1.610.000.000,00
4	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	15.250.000,00	11.700.000,00
5	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	186.000.000,00

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	Lingkungan Perairan		
6	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	1.555.272.568,00	0,00
7	Belanja Modal System/Power Supply	0,00	141.712.000,00
	Jumlah	**1.570.522.568,00**	**2.522.332.000,00**

i. Realisasi Belanja Modal Komputer Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.221.395.190,00 dan Rp6.278.880.656,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.77
Realisasi Belanja Modal Komputer Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Komputer Jaringan	475.250.000,00	363.495.000,00
2	Belanja Modal Personal Computer	6.163.697.800,00	4.514.529.880,00
3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	88.800.000,00
4	Belanja Modal Peralatan Mainframe	0,00	0,00
5	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0,00	0,00
6	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.416.277.260,00	951.167.979,00
7	Belanja Modal Peralatan Jaringan	134.978.230,00	188.515.722,00
8	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	31.191.900,00	172.372.075,00
	Jumlah	**8.221.395.190,00**	**6.278.880.656,00**

j. Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp154.000.000,00 dan Rp462.364.098,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.78
Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Sepatu Lapangan	0,00	0,00
2	Belanja Modal Baju Pengaman	154.000.000,00	91.800.000,00
3	Belanja Modal Alat Penolong	0,00	134.841.048,00
4	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	0,00	8.252.850,00
5	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	0,00	227.470.200,00
	Jumlah	**154.000.000,00**	**462.364.098,00**

k. Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp213.405.714,00 dan Rp934.304.649,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.79
Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	213.405.714,00	934.304.649,00
	Jumlah	**213.405.714,00**	**934.304.649,00**

l. Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp316.990.400,00 dan Rp43.550.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.80
Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan Permainan	211.800.000,00	6.000.000,00
2	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	105.190.400,00	37.550.000,00
	Jumlah	**316.990.400,00**	**43.550.000,00**

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.81

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PENDIDIKAN	33.548.548.628,00	32.832.656.811,00	97,87	(715.891.817,00)	28.859.620.507,00	3.973.036.304,00	13,77
2	DINAS KESEHATAN	10.120.904.757,00	7.475.671.330,00	73,86	(2.645.233.427,00)	15.252.539.983,00	(7.776.868.653,00)	(50,99)
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	51.745.668.690,00	45.422.284.974,00	87,78	(6.323.383.716,00)	29.480.322.560,00	15.941.962.414,00	54,08
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16.517.720.900,00	15.652.357.325,00	94,76	(865.363.575,00)	4.481.998.550,00	11.170.358.775,00	249,23
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1.897.990.424,00	1.759.559.040,00	92,71	(138.431.384,00)	6.193.668.626,00	(4.434.109.586,00)	(71,59)
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	579.018.700,00	560.286.260,00	96,76	(18.732.440,00)	597.161.498,00	(36.875.238,00)	(6,18)
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	168.608.100,00	126.941.000,00	75,29	(41.667.100,00)	138.928.000,00	(11.987.000,00)	(8,63)
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	271.271.400,00	257.200.000,00	94,81	(14.071.400,00)	3.657.006.500,00	(3.399.806.500,00)	(92,97)
9	DINAS SOSIAL	186.859.200,00	182.756.400,00	97,80	(4.102.800,00)	100.680.000,00	82.076.400,00	81,52
10	DINAS TENAGA KERJA	52.311.998,00	52.010.160,00	99,42	(301.838,00)	118.093.344,00	(66.083.184,00)	(55,96)
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	122.139.100,00	122.099.500,00	99,97	(39.600,00)	62.344.000,00	59.755.500,00	95,85
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	20.143.000,00	19.742.999,00	98,01	(400.001,00)	93.905.000,00	(74.162.001,00)	(78,98)
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12.496.620.400,00	12.198.505.000,00	97,61	(298.115.400,00)	1.233.251.600,00	10.965.253.400,00	889,13
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	749.256.600,00	737.063.200,00	98,37	(12.193.400,00)	237.049.500,00	500.013.700,00	210,93
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	60.784.000,00	60.620.000,00	99,73	(164.000,00)	107.956.800,00	(47.336.800,00)	(43,85)
16	DINAS PERHUBUNGAN	249.800.978,00	213.405.714,00	85,43	(36.395.264,00)	1.108.374.649,00	(894.968.935,00)	(80,75)
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.613.700,00	15.598.270,00	0,00	0,00	0,00	15.598.270,00	0,00
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	16.657.200,00	16.399.000,00	98,45	(258.200,00)	173.112.315,00	(156.713.315,00)	(90,53)
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	131.705.500,00	127.500.000,00	96,81	(4.205.500,00)	178.600.000,00	(51.100.000,00)	(28,61)
20	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	70.298.900,00	69.591.300,00	98,99	-707600,00	60.000.000,00	9.591.300,00	15,99
21	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	61.809.200,00	61.035.000,00	98,75	(774.200,00)	36.196.000,00	24.839.000,00	68,62
22	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	114.427.200,00	107.389.000,00	93,85	(7.038.200,00)	166.334.500,00	(58.945.500,00)	(35,44)
23	SEKRETARIAT DAERAH	3.353.750.500,00	3.253.902.356,00	97,02	(99.848.144,00)	1.530.379.082,00	1.723.523.274,00	112,62
24	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1.488.844.200,00	1.476.334.400,00	99,16	(12.509.800,00)	1.561.986.738,00	(85.652.338,00)	(5,48)
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	74.241.200,00	73.808.340,00	99,42	(432.860,00)	163.195.350,00	(89.387.010,00)	(54,77)
26	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.733.058.000,00	1.730.501.169,00	99,85	(2.556.831,00)	480.879.890,00	1.249.621.279,00	259,86
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	819.304.000,00	811.325.000,00	99,03	(7.979.000,00)	860.177.740,00	(48.852.740,00)	(5,68)
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	379.162.900,00	375.500.000,00	99,03	(3.662.900,00)	298.000.000,00	77.500.000,00	26,01
29	INSPEKTORAT	964.328.500,00	916.932.000,00	95,09	(47.396.500,00)	531.467.300,00	385.464.700,00	72,53
30	KECAMATAN BOGOR UTARA	791.441.500,00	618.875.000,00	78,20	(172.566.500,00)	7.755.000,00	611.120.000,00	7.880,34
31	KECAMATAN BOGOR SELATAN	1.269.043.800,00	1.263.670.000,00	99,58	(5.373.800,00)	158.008.000,00	1.105.662.000,00	699,75
32	KECAMATAN BOGOR TIMUR	846.235.700,00	840.650.000,00	0,00	(5.585.700,00)	0,00	840.650.000,00	0,00
33	KECAMATAN BOGOR BARAT	829.517.100,00	778.922.960,00	0,00	(50.594.140,00)	0,00	778.922.960,00	0,00
34	KECAMATAN BOGOR TENGAH	812.917.700,00	803.557.900,00	0,00	(9.359.800,00)	0,00	803.557.900,00	0,00
35	KECAMATAN TANAH SAREAL	1.307.922.979,00	1.300.500.000,00	0,00	(7.422.979,00)	0,00	1.300.500.000,00	0,00
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	920.525.600,00	911.490.959,00	0,00	(9.034.641,00)	0,00	911.490.959,00	0,00
Jumlah		144.788.452.254,00	133.226.642.367,00	92,01	(11.561.809.887,00)	97.928.993.032,00	35.297.649.335,00	36,04

5.1.2.2.3 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 serta Realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.82

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	147.461.759.693,00	137.821.755.710,00	93,46	(9.640.003.983,00)	166.292.422.095,00	(28.470.666.385,00)	(17,12)
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	87.193.090,00	86.900.104,00	99,66	(292.986,00)	10.040.561.126,00	(9.953.661.022,00)	0,00
3	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	543.593.160,00	534.121.026,00	0,00	(9.472.134,00)	0,00	534.121.026,00	0,00
4	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.734.767.820,00	2.723.824.332,00	99,60	(10.943.488,00)	2.618.857.174,00	104.967.158,00	0,00
	Jumlah	**150.827.313.763,00**	**141.166.601.172,00**	**93,59**	**(9.660.712.591,00)**	**178.951.840.395,00**	**(37.785.239.223,00)**	**(21,11)**

Berdasarkan tabel diatas realisasi belanja gedung dan bangunan tahun anggaran 2024 sebesar Rp141.166.601.172,00 atau mencapai 93,59% dari anggaran sebesar Rp150.827.313.763,00. Realisasi tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp37.785.239.223,00 atau mencapai 21,11% dari realisasi tahun 2023.

a. Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp137.821.755.710,00 dan Rp166.292.422.095,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.83

Rincian Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	14.574.142.168,00	13.235.689.189,00
2	Belanja Modal Bangunan Gudang	0,00	85.692.000,00
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	7.691.794.316,00
4	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	287.787.221,00	39.303.987.672,00
5	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	4.941.441.161,00	31.159.415.152,00
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	6.923.144.191,00	0,00
7	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	104.333.432.219,00	49.968.303.832,00
8	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.840.500.000,00	7.696.948.510,00
9	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi / Pool	0,00	175.285.512,00
10	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	0,00	15.232.850.867,00
11	Belanja Modal Taman	4.921.308.750,00	1.742.455.045,00
	Jumlah	**137.821.755.710,00**	**166.292.422.095,00**

b. Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp86.900.104,00 dan Rp10.040.561.126,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.84

Rincian Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	86.900.104,00	10.040.561.126,00
	Jumlah	**86.900.104,00**	**10.040.561.126,00**

c. Realisasi Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp534.121.026,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.85

Rincian Realisasi Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya	534.121.026,00	0,00
	Jumlah	**534.121.026,00**	**0,00**

d. Realisasi Belanja Modal Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.723.824.332,00 dan Rp2.618.857.174,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.86

Rincian Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Pagar	2.723.824.332,00	1.916.167.313,00
	Jumlah	**2.723.824.332,00**	**1.916.167.313,00**

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.87

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PENDIDIKAN	112.403.386.965,00	105.326.273.527,00	93,70	(7.077.113.438,00)	50.486.733.253,00	54.839.540.274,00	108,62
2	DINAS KESEHATAN	4.725.198.000,00	3.956.535.744,00	83,73	(768.662.256,00)	12.564.735.554,00	(8.608.199.810,00)	(68,51)
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	46.928.271.883,00	(46.928.271.883,00)	(100,00)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.673.307.448,00	8.550.030.791,00	98,58	(123.276.657,00)	39.290.249.860,00	(30.740.219.069,00)	(78,24)
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	4.955.158.813,00	4.788.815.359,00	96,64	(166.343.454,00)	1.742.455.045,00	3.046.360.314,00	174,83
6	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	7.367.315.797,00	7.222.717.570,00	98,04	(144.598.227,00)	0,00	7.222.717.570,00	0,00
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	917.159.200,00	586.396.251,00	63,94	(330.762.949,00)	81.111.030,00	505.285.221,00	622,96
8	DINAS PERHUBUNGAN	543.593.160,00	534.121.026,00	98,26	(9.472.134,00)	154.595.250,00	379.525.776,00	245,50
9	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.840.500.000,00	1.840.500.000,00	100,00	0,00	7.696.948.510,00	(5.856.448.510,00)	(76,09)
10	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	15.549.367.867,00	(15.549.367.867,00)	(100,00)
11	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.460.742.000,00	1.453.664.125,00	99,52	(7.077.875,00)	1.483.429.892,00	(29.765.767,00)	(2,01)
12	KECAMATAN BOGOR UTARA	977.432.000,00	925.996.841,00	94,74	(51.435.159,00)	0,00	925.996.841,00	0,00
13	KECAMATAN BOGOR SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	67.510.105,00	(67.510.105,00)	(100,00)
14	KECAMATAN BOGOR BARAT	583.957.340,00	582.226.098,00	99,70	(1.731.242,00)	0,00	582.226.098,00	0,00
15	KECAMATAN BOGOR TIMUR	93.716.870,00	91.982.415,00	98,15	0,00	1.464.268.444,00	(1.372.286.029,00)	(93,72)
16	KECAMATAN BOGOR TENGAH	2.579.027.000,00	2.043.086.591,00	79,22	(535.940.409,00)	0,00	2.043.086.591,00	0,00
17	KECAMATAN TANAH SAREAL	3.397.919.070,00	2.956.087.795,00	87,00	2.647.187.695,00	1.442.163.702,00	1.513.924.093,00	104,98
18	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	308.900.100,00	308.167.039,00	99,76	(150.519.146.724,00)	0,00	308.167.039,00	0,00
	Jumlah	**150.827.313.763,00**	**141.166.601.172,00**	**93,59**	**(9.660.712.591,00)**	**178.951.840.395,00**	**(37.785.239.223,00)**	**(21,11)**

5.1.2.2.4 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 serta Realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.88

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	54.430.632.890,00	53.400.131.735,00	98,11	(1.030.501.155,00)	154.469.165.522,00	(101.069.033.787,00)	(65,43)
2	Belanja Modal Bangunan Air	56.926.014.122,00	56.419.934.712,00	99,11	(506.079.410,00)	78.283.480.362,00	(21.863.545.650,00)	(27,93)
3	Belanja Modal Instalasi	3.205.384.629,00	2.909.430.209,00	90,77	(295.954.420,00)	6.233.101.507,00	(3.323.671.298,00)	(53,32)
	Jumlah	**114.562.031.641,00**	**112.729.496.656,00**	**98,40**	**(1.832.534.985,00)**	**238.985.747.391,00**	**(126.256.250.735,00)**	**(52,83)**

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp112.729.496.656,00 atau mencapai 98,40% dari anggaran sebesar Rp114.562.031.641,00. Realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp126.256.250.735,00 atau mencapai 52,83% dari anggaran 2023.

Penjelasan lebih lanjut atas Jalan, Irigasi dan Jaringan antara lain sebagai berikut:

a. Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp53.400.131.735,00 dan Rp154.469.165.522,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.89
Belanja Modal Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan Kota	45.323.254.124,00	94.589.717.028,00
2	Belanja Modal Jalan Desa	584.747.171,00	0,00
3	Belanja Modal Jalan Lainnya	2.728.976.267,00	1.827.588.317,00
4	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	4.763.154.173,00	57.854.247.433,00
5	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan	0,00	197.612.744,00
	Jumlah	**53.400.131.735,00**	**154.469.165.522,00**

b. Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp56.419.934.712,00 dan Rp79.283.480.362,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.90
Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	550.409.443,00	1.752.680.207,00
2	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	792.040.095,00	619.874.400,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	922.150.556,00	1.246.495.474,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	33.004.511.126,00	55.307.958.567,00
5	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	19.314.153.989,00	16.297.894.098,00
6	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	0,00	225.330.348,00
7	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	1.836.669.503,00	2.833.247.268,00
	Jumlah	**56.419.934.712,00**	**78.283.480.362,00**

c. Realisasi Belanja Modal Instalasi Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.909.430.209,00 dan Rp6.233.101.507,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.91
Realisasi Belanja Modal Instalasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	759.079.075,00
2	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	989.734.442,00	159.913.921,00
3	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	1.701.782.491,00	5.314.108.511,00
4	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	217.913.276,00	0,00
	Jumlah	**2.909.430.209,00**	**6.233.101.507,00**

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.92
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PENDIDIKAN	447.981.358,00	390.614.237,00	87,19	(57.367.121,00)	0,00	390.614.237,00	0,00
2	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000.000,00	(785.000.000,00)	(100,00)
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	104.300.054.977,00	102.962.295.119,00	98,72	(1.337.759.858,00)	231.316.159.382,00	(128.353.864.263,00)	(55,49)
4	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	3.914.921.287,00	3.737.578.307,00	95,47	(177.342.980,00)	3.891.570.935,00	(153.992.628,00)	(3,96)
5	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	200.000.000,00	197.935.738,00	98,97	(2.064.262,00)	0,00	197.935.738,00	0,00
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.170.284.629,00	970.346.631,00	82,92	(199.937.998,00)	129.804.344,00	840.542.287,00	647,55
7	KECAMATAN BOGOR UTARA	958.877.900,00	949.676.375,00	99,04	(9.201.525,00)	501.612.299,00	448.064.076,00	89,32

No	SKPD	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
8	KECAMATAN BOGOR SELATAN	712.875.900,00	685.563.196,00	96,17	(27.312.704,00)	0,00	685.563.196,00	0,00
9	KECAMATAN BOGOR TIMUR	125.000.000,00	124.320.511,00	99,46	(679.489,00)	431.094.600,00	(306.774.089,00)	(71,16)
10	KECAMATAN BOGOR BARAT	1.343.630.200,00	1.336.970.942,00	99,50	(6.659.258,00)	1.148.395.981,00	188.574.961,00	16,42
11	KECAMATAN TANAH SAREAL	1.388.405.390,00	1.374.195.600,00	98,98	(14.209.790,00)	782.109.850,00	592.085.750,00	75,70
	Jumlah	**114.562.031.641,00**	**112.729.496.656,00**	**98,40**	**(1.832.534.985,00)**	**238.985.747.391,00**	**(126.256.250.735,00)**	**(52,83)**

5.1.2.2.5 BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA

Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Tabel 5.1.93
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	156.180.000,00	126.990.800,00	81,31	(29.189.200,00)	220.412.700,00	(93.421.900,00)	(42,38)
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	10.761.505.389,00	10.566.182.954,00	98,18	(195.322.435,00)	690.745.260,00	9.875.437.694,00	1.429,68
	Jumlah	**10.917.685.389,00**	**10.693.173.754,00**	**97,94**	**(224.511.635,00)**	**911.157.960,00**	**9.782.015.794,00**	**1.073,58**

Berdasarkan tabel diatas realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2024 mencapai Rp10.693.173.754,00 atau 97,94% dari anggaran sebesar Rp10.917.685.389,00. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.782.015.794,00 atau mencapai 1.073,58%.

a. Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp126.990.800,00 dan 2023 sebesar Rp220.412.700,00 dan Rp178.664.372,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.94
Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Buku Umum	97.710.800,00	114.063.600,00
2	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	29.280.000,00	0,00
3	Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya	0,00	106.349.100,00
	Jumlah	**126.990.800,00**	**220.412.700,00**

b. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.566.182.954,00 dan 2023 sebesar Rp690.7452.260.

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.95
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS PENDIDIKAN	10.761.505.389,00	10.566.182.954,00	98,18	(195.322.435,00)	690.745.260,00	9.875.437.694,00	1.429,68
2	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	126.720.000,00	97.710.800,00	77,11	(29.009.200,00)	220.412.700,00	(122.701.900,00)	0,00
3	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	29.460.000,00	29.280.000,00	99,39	(180.000,00)	0,00	29.280.000,00	0,00
	Jumlah	**10.917.685.389,00**	**10.693.173.754,00**	**97,94**	**(224.511.635,00)**	**911.157.960,00**	**9.782.015.794,00**	**1.073,58**

5.1.2.2.6 BELANJA MODAL ASET LAINNYA

Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

1) Dapat diidentifikasi;
2) Tidak mempunyai wujud fisik;
3) Dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
4) Dapat dikendalikan oleh entitas; dan
5) Memiliki manfaat ekonomi masa depan.

Tabel 5.1.96
Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	75.000.000,00	74.355.570,00	99,14	(644.430,00)	100.077.000,00	(25.721.430,00)	(25,70)
Jumlah		**75.000.000,00**	**74.355.570,00**	**99,14**	**(644.430,00)**	**100.077.000,00**	**(25.721.430,00)**	**(25,70)**

Berdasarkan tabel diatas realisasi Belanja Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp74.355.570,00 atau mencapai 99,14% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp25.721.430,00 atau mencapai 25,70% dibandingkan Tahun Anggaran 2023.

a. Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp74.355.570,00 dan Rp100.077.000,00 dengan rincian sebagai beriku:

Tabel 5.1.97
Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Lisensi dan *Franchise*	0,00	100.077.000,00
2	Belanja Modal Software	74.355.570,00	0,00
	Jumlah	**74.355.570,00**	**100.077.000,00**

Rincian Belanja Modal Aset Tidak Berwujud pada masing-masing Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.98
Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	75.000.000,00	74.355.570,00	99,14	(644.430,00)	0,00	74.355.570,00	0,00
2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	100.077.000,00	(100.077.000,00)	(100,00)
Jumlah		**75.000.000,00**	**74.355.570,00**	**99,14**	**(644.430,00)**	**100.077.000,00**	**(25.721.430,00)**	**(25,70)**

5.1.2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2024 direalisasikan untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya, serta untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Keadaan darurat meliputi:
   1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
   2) kejadian luar biasa;
   3) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   4) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
   5) kegiatan pelayanan publik.

   Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Pengunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.

   Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

d. Keperluan mendesak meliputi:
   1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
      a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
         (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
         (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
      b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

g. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:
1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

h. Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.

i. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:
1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2) memanfaatkan kas yang tersedia.

j. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:
1) Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD;
3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

k. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:
1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

L. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:

1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

M. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Realisasi belanja tak terduga seluruhnya terdapat di Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Realisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.99
Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Tidak Terduga	6.359.952.269,00	2.187.943.885,00	34,40	(4.172.008.384,00)	1.066.654.400,00	1.121.289.485,00	105,12
Jumlah		**6.359.952.269,00**	**2.187.943.885,00**	34,40	(4.172.008.384,00)	**1.066.654.400,00**	**1.121.289.485,00**	105,12

Berdasarkan tabel diatas realisasi belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp2.187.943.885,00 dari anggaran sebesar Rp6.359.952.269,00 atau mencapai 34,40%. Realisasi tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.121.289.485,00 atau 80,12% dibandingkan dengan tahun anggaran 2023.

5.1.3 BELANJA TRANSFER

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 direalisasikan untuk kompensasi dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar TPAS Galuga yaitu Desa Galuga, Desa Cijujung dan Desa Dukuh sesuai dengan SK Walikota Bogor Nomor 900.1.3/Kep.236-DLH/2024 tanggal 10 Juli 2024.

Realisasi belanja transfer seluruhnya terdapat di Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Realisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.100
Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa							
	Dana Kompensasi Dampak Lingkungan Terhadap Masyarakat Sekitar Tempat Pembuangan Sampah Akhir Galuga	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00	100,00	0,00	1.660.750.000,00	0,00	0,00
Jumlah		**1.660.750.000,00**	**1.660.750.000,00**	**100,00**	**0,00**	**1.660.750.000,00**	**0,00**	**0,00**

Berdasarkan tabel diatas realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp1.660.750.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp1.660.750.000,00.

5.1.4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.101

Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	98.396.220.459,00	225.089.463.440,14	228,76	126.693.242.981,14	192.611.572.644,34	32.477.890.795,80	16,86
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.294.145.996,00	132.184.766.176,00	1.284,08	121.890.620.180,00	76.821.017.476,00	55.363.748.700,00	72,07
Pembiayaan Netto		**88.102.074.463,00**	**92.904.697.264,14**	105,45	4.802.622.801,14	**115.790.555.168,34**	**(22.885.857.904,20)**	(19,76)

Realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.4.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari penggunaan Sisa lebih Perhitungan APBD (SiLPA) tahun lalu, Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD.

Anggaran dan realisasi Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2024 serta realisasi tahun 2023 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.1.102

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	54.250.445.599,00	54.255.954.664,14	100,01	5.509.065,14	161.360.978.068,34	(107.105.023.404,20)	(66,38)
2	Pencairan Dana Cadangan	38.648.742.600,00	38.648.742.600,00	100,00	0,00	25.765.828.400,00	12.882.914.200,00	50,00
3	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	126.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	5.497.032.260,00	5.484.766.176,00	99,78	(12.266.084,00)	5.484.766.176,00	0,00	0,00
Jumlah		**98.396.220.459,00**	**225.089.463.440,14**	**228,76**	**126.693.242.981,14**	**192.611.572.644,34**	**32.477.890.795,80**	**16,86**

Berdasarkan tabel diatas realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp225.089.463.440,14 atau mencapai 228,76% dari anggaran sebesar Rp98.396.220.459,00. Realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp32.477.890.795,80 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp54.051.328.112,14 Tahun 2024 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.103

SiLPA Anggaran tahun sebelumnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Rincian SiLPA	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
1	Kas di Kas Daerah	33.724.986.259,00	130.401.482.495,00	(96.676.496.236,00)	0,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	922.000,00	0,00	922.000,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00
4	Kas di BLUD	17.663.729.337,14	28.762.040.587,34	(11.098.311.250,20)	(38,59)
5	Kas Lainnya	859.045.406	204.120.800,00	654.924.606,00	320,85
6	Kas Dana BOS Pusat	1.450.647.204	1.993.334.186,00	(542.686.982,00)	(27,23)
7	Bunga atas Dana Cadangan	555.364.458	0,00	555.364.458,00	0,00
Jumlah		**54.255.954.664,14**	**161.360.978.068,34**	**(107.105.023.404,20)**	**(66,38)**

Realisasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD sebesar Rp5.484.766.176,00 merupakan realisasi Penerimaan Pinjaman BUMD untuk dana pinjaman dari *International Bank For Reconstruction and Development, Loan Agreement* Nomor 770-ID tanggal 1 September 2009 dalam rangka pembiayaan *Urban Water Supply And Sanitation Project* sesuai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 02 November 2009 sebagaimana telah diamandemen sesuai dengan surat nomor S-88/MK.5/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Penandatanganan Perubahan (Amandemen) Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 02 November 2009 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Bogor.

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek, realisasi pembiayaan pada BLUD RSUD Kota Bogor sebesar Rp126.700.000.000,00 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan

Layanan Umum Daerah, struktur anggaran BLUD terdiri dari pendapatan BLUD, belanja BLUD dan pembiayaan BLUD, pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya dan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 67 tentang 2018 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor.

5.1.4.2 PENGELUARAN DAERAH

Anggaran dan realisasi Pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 serta realisasi tahun 2023 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.1.104
Pengeluaran Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	71.336.251.300,00	(71.336.251.300,00)	0,00
3	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	5.497.032.260,00	5.484.766.176,00	99,78	(12.266.084,00)	5.484.766.176,00	0,00	0,00
4	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	0,00	126.700.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		5.497.032.260,00	132.184.766.176,00	2.404,66	(12.266.084,00)	76.821.017.476,00	(71.336.251.300,00)	(92,86)

Berdasarkan tabel diatas realisasi pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp132.184.766.176,00 atau mencapai 2.404,66%% dari Anggaran sebesar Rp5.497.032.260,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp71.336.251.300,00 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Pengeluaran Daerah yang berasal dari Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp5.484.766.176,00 adalah Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat untuk dana pinjaman dari *International Bank For Reconstruction and Development, Loan Agreement* Nomor 770-ID tanggal 1 September 2009 dalam rangka pembiayaan *Urban Water Supply And Sanitation Project* sesuai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tangggal 02 November 2009 sebagaimana telah diamandemen sesuai dengan Surat Nomor S-88/MK.5/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Penandatanganan Perubahan (Amandemen) Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 02 November 2009 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Bogor.

Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Jangka Panjang dan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek dan pembayaran pembiayaan BLUD RSUD Kota Bogor sebesar Rp126.700.000.000,00.

5.1.5 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih antara surplus/ (defisit) anggaran dengan pembiayaan netto, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp84.935.591.686,38 dengan rincian tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.105

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024				Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)			
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	(5=4/3)	(6=4-3)	7	(8=4-7)	(9=8/7)
1	Pendapatan	3.192.710.048.074,00	3.170.497.628.555,24	99,30	(22.212.419.518,76)	2.967.475.570.539,80	203.022.058.015,44	6,84
2	Belanja dan Transfer	3.280.812.122.537,00	3.178.466.734.133,00	96,88	(102.345.388.404,00)	3.029.015.680.109,00	149.451.054.024,00	4,93
3	Surplus/ (Defisit) (1-2)	(88.102.074.463,00)	(7.969.105.577,76)	9,05	80.132.968.885,24	(61.540.109.569,20)	53.571.003.991,44	(87,05)
4	Penerimaan Pembiayaan	98.396.220.459,00	225.089.463.440,14	228,76	126.693.242.981,14	192.611.572.644,34	32.477.890.795,80	16,86
5	Pengeluaran Pembiayaan	10.294.145.996,00	132.184.766.176,00	1.284,08	121.890.620.180,00	76.821.017.476,00	55.363.748.700,00	72,07
6	Pembiayaan Netto (4-5)	88.102.074.463,00	92.904.697.264,14	105,45	4.802.622.801,14	115.790.555.168,34	(22.885.857.904,20)	(19,76)
Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran (SILPA) = (3 + 6)		**0,00**	**84.935.591.686,38**		**84.935.591.686,38**	**54.250.445.599,14**	**30.685.146.087,24**	**56,56**

Tabel diatas menunjukkan SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp84.935.591.686,38 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp54.250.445.599,14 mengalami kenaikan sebesar Rp30.685.146.087,24 atau mencapai 56,56%, SILPA Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.106

Rincian SILPA Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Rincian SiLPA	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
1	Kas di Kas Daerah	79.503.327.898,00	33.520.359.707,00	45.982.968.191,00	0,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	922.000,00	(922.000,00)	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.260.000,00	(1.260.000,00)	0,00
4	Kas di BLUD	2.144.352.695,38	17.663.770.272,14	(15.519.417.576,76)	(87,86)
5	Kas Lainnya	863.308.839	859.045.406	4.263.433,00	0,50
6	Kas Dana BOS Pusat	951.554.744	1.649.723.756	(698.169.012,00)	(42,32)
7	Bunga atas Dana Cadangan	1.473.047.510	555.364.458	917.683.052,00	0,00
	Jumlah	**84.935.591.686,38**	**54.250.445.599,14**	**30.685.146.087,24**	**56,56**

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP - SAL)

Penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.

Nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp84.935.591.686,38 dengan rincian sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2024 sebesar Rp54.250.445.599,14 merupakan SiLPA per 31 Desember 2023, sedangkan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 sebesar Rp161.358.478.068,34 merupakan SiLPA per 31 Desember 2022. Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2024 mengalami penurunan 66,38% atau (Rp107.108.032.469,20) dibandingkan Saldo Anggaran Lebih awal tahun 2023. Saldo Anggaran Lebih Awal tersebut terdiri dari:

Tabel 5.2.1
Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 dan 2023

No	Rincian SiLPA	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
1	Kas di Kas Daerah	33.520.359.707,00	130.401.482.495,00	(96.881.122.788,00)	0,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	922.000,00	0,00	922.000,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00
4	Kas di BLUD	17.663.770.272,14	28.762.040.587,34	(11.098.270.315,20)	(38,59)
5	Kas Lainnya	859.045.406	204.120.800,00	654.924.606,00	320,85
6	Kas Dana BOS Pusat	1.649.723.756	1.990.834.186,00	(341.110.430,00)	(17,13)
7	Bunga atas Dana Cadangan	555.364.458	0,00	555.364.458,00	0,00
	Jumlah	54.250.445.599,14	161.358.478.068,34	(107.108.032.469,20)	(66,38)

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan, Tahun 2024 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp54.255.954.664,14 atau mengalami penurunan 66,38% yaitu sebesar (Rp107.105.023.404,20) dari Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan tahun 2023 sebesar Rp161.360.978.068,34. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan tersebut terdiri dari:

Tabel 5.2.2
Rincian Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2024 dan 2023

No	Rincian SiLPA	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
1	Kas di Kas Daerah	33.724.986.259,00	130.401.482.495,00	(96.676.496.236,00)	0,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	922.000,00	0,00	922.000,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00
4	Kas di BLUD	17.663.729.337,14	28.762.040.587,34	(11.098.311.250,20)	(38,59)
5	Kas Lainnya	859.045.406	204.120.800,00	654.924.606,00	320,85
6	Kas Dana BOS Pusat	1.450.647.204	1.993.334.186,00	(542.686.982,00)	(27,23)

No	Rincian SiLPA	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
7	Bunga atas Dana Cadangan	555.364.458	0,00	555.364.458,00	0,00
	Jumlah	54.255.954.664,14	161.360.978.068,34	(107.105.023.404,20)	(66,38)

5.2.3 Sisa Lebih/ (Kurang) Pembiayaan Anggaran SiLPA/ SiKPA.

Merupakan selisih lebih/(kurang) antara realisasi pendapatan LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA tahun 2024 sebesar Rp84.935.591.686,38 sedangkan SiLPA tahun 2023 sebesar Rp54.250.445.599,14. Mengalami kenaikan 56,56% atau sebesar Rp30.685.146.087,24. Sisa Lebih/ (Kurang) Pembiayaan Anggaran SiLPA/ SiKPA tersebut terdiri dari:

Tabel 5.2.3
Rincian Sisa Lebih/ (Kurang) Pembiayaan Anggaran SiLPA/ SiKPA Tahun 2024 dan 2023

No	Rincian SiLPA	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
1	Kas di Kas Daerah	79.503.327.898,00	33.520.359.707,00	45.982.968.191,00	0,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	922.000,00	(922.000,00)	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.260.000,00	(1.260.000,00)	0,00
4	Kas di BLUD	2.144.352.695,38	17.663.770.272,14	(15.519.417.576,76)	(87,86)
5	Kas Lainnya	863.308.839	859.045.406	4.263.433,00	0,50
6	Kas Dana BOS Pusat	951.554.744	1.649.723.756	(698.169.012,00)	(42,32)
7	Bunga atas Dana Cadangan	1.473.047.510	555.364.458	917.683.052,00	0,00
	Jumlah	84.935.591.686,38	54.250.445.599,14	30.685.146.087,24	56,56

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Terdapat koreki atas saldo kas pada SDN Neglasari Bogor Bogor Barat sebesar Rp5.000.000,00 merupakan temuan hasil pemeriksaan BPK tahun 2021 atas LKPD TA 2020 yang dikembalikan ke rekening sekolah, koreksi Rp550.000,00 merupakan koreksi atas pengembalian belanja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2023 dan Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer sebesar Rp40.935,00 yang pajaknya telah dibayarkan pada tahun 2023.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2024 sebesar Rp84.935.591.686,38 Penjelasan lebih lanjut atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dijabarkan pada tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.4
Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2024 dan 2023

No	Rincian SiLPA	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
1	Kas di Kas Daerah	79.503.327.898,00	33.520.359.707,00	45.982.968.191,00	0,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	922.000,00	(922.000,00)	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.260.000,00	(1.260.000,00)	0,00
4	Kas di BLUD	2.144.352.695,38	17.663.770.272,14	(15.519.417.576,76)	(87,86)
5	Kas Lainnya	863.308.839	859.045.406	4.263.433,00	0,50

No	Rincian SiLPA	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
6	Kas Dana BOS Pusat	951.554.744	1.649.723.756	(698.169.012,00)	(42,32)
7	Bunga atas Dana Cadangan	1.473.047.510	555.364.458	917.683.052,00	0,00
	Jumlah	84.935.591.686,38	54.250.445.599,14	30.685.146.087,24	56,56

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2024 sebesar Rp84.935.591.686,38 , dengan rincian Tahun 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.2.5
Rincian Saldo Anggaran Lebih TA 2024 dan 2023

No	Rincian SiLPA	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	54.250.445.599,14	161.358.478.068,34	(107.108.032.469,20)	(66,38)
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	54.255.954.664,14	161.360.978.068,34	(107.105.023.404,20)	(66,38)
3	**Sub Total (1-2)**	**(5.509.065,00)**	**(2.500.000,00)**	**(3.009.065,00)**	120,36
4	**SiLPA/ (SiKPA)**				
5	Pendapatan Asli Daerah	1.458.619.452.757,24	1.338.618.268.168,80	120.001.184.588,44	8,96
6	Pendapatan Transfer	1.711.878.175.798,00	1.628.857.302.371,00	83.020.873.427,00	5,10
7	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**Jumlah (5 s.d.7)**	**3.170.497.628.555,24**	**2.967.475.570.539,80**	**203.022.058.015,44**	**6,84**
9	Belanja Operasi	2.774.250.053.629,00	2.508.123.306.971,00	266.126.746.658,00	10,61
10	Belanja Modal	400.367.986.619,00	518.164.968.738,00	(117.796.982.119,00)	(22,73)
11	Belanja Tak Terduga	2.187.943.885,00	1.066.654.400,00	1.121.289.485,00	105,12
12	Transfer	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00	0,00	0,00
13	**Jumlah (9 s.d.12)**	**3.178.466.734.133,00**	**3.029.015.680.109,00**	**149.451.054.024,00**	**4,93**
14	Penerimaan Pembiayaan	225.089.463.440,14	192.611.572.644,34	32.477.890.795,80	16,86
15	Pengeluaran Pembiayaan	132.184.766.176,00	76.821.017.476,00	55.363.748.700,00	72,07
16	**Jumlah (14 - 15)**	**92.904.697.264,14**	**115.790.555.168,34**	**(22.885.857.904,20)**	**(19,76)**
17	Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya : Lain - lain	5.509.065,00	2.500.000,00	3.009.065,00	0,00
18	**Koreksi Tahun Sebelumnya (17)**	**5.509.065,00**	**2.500.000,00**	**3.009.065,00**	**0,00**
SiLPA Tahun Berkenaan (8-13+16-18)		**84.935.591.686,38**	**54.250.445.599,14**	**30.685.146.087,24**	**56,56**

Tabel 5.2.6
Rincian Saldo Anggaran Lebih TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Sisa s/d Tahun 2024	Ket
	SILPA		84.935.591.686,38
1	KAS DI RKUD		79.503.327.898,00
1,1	KAS EARMARK		17.970.506.105,00
1.1.1	DAK NON FISIK	3.481.503.081,00	
1.1.1.1	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	2.248.432.064,00	
1.1.1.2	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana	343.142.341,00	
1.1.1.3	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	128.060.020,00	
1.1.1.4	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	447.983.700,00	
1.1.1.5	DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	183.800.000,00	
1.1.1.6	DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal	72.113.556,00	
1.1.1.7	DAK Non Fisik Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.000,00	
1.1.1.8	DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	57.970.400,00	
1.1.2	DAK FISIK	3.167.245.504,00	
1.1.2.1	DAK Reguler Bidang Kesehatan	1.125.635.135,00	
1.1.2.2	DAK Reguler Bidang Sanitasi	2.829.732,00	
1.1.2.3	DAK Reguler Cadangan Bidang Jalan	8.200.000,00	
1.1.2.4	DAK Penugasan Bidang Kesehatan	5.320.251,00	

No	Uraian	Sisa s/d Tahun 2024	Ket
1.1.2.5	DAK Penugasan Bidang Air Minum	788.403.001,00	
1.1.2.6	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	523.076.450,00	
1.1.2.7	DAK Tambahan Bidang Jalan	112.590.935,00	
1.1.2.8	DAK Tambahan Bidang Irigasi	601.190.000,00	
1.1.3	DAU	10.024.321.755,00	
1.1.3.1	DAU SG Pendidikan	8.432.231.280,00	
1.1.3.2	DAU SG Kesehatan	809.984.456,00	
1.1.3.3	DAU SG PU	40.346.359,00	
1.1.3.4	DAU SG Kelurahan	741.759.660,00	
1.1.4	IF	329.891.382,00	
1.1.5	DBHCHT	828.944.463,00	
1.1.6	DBH SAWIT	138.599.920,00	
1.2	KAS NON-EARMARKED		61.532.821.793,00
2	NON RKUD		5.432.263.788,00
2.1	KAS DI BENDAHARA BOS	947.597.794,00	
2.2	KAS DI BLUD PUSKESMAS DAN LABKESDA	1.582.776.601,00	
2.3	KAS DI BLUD RSUD	561.576.094,38	
2.4	KAS LAINNYA DI BENDAHARA BOP PAUD	7.020.131,00	
2.5	KAS LAINNYA DI BENDAHARA BOK KESEHATAN	856.288.708,00	
2.6	BUNGA DANA CADANGAN	1.477.004.460,00	

5.3 PENJELASAN POS – POS NERACA

Untuk memberikan gambaran yang lebih ringkas mengenai Posisi Keuangan Pemerintah Kota Bogor, berikut ini kami sajikan Penjelasan Pos-pos Neraca Pemerintah Kota Bogor yang menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas secara komparatif pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.3.1
Neraca

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	**Aset**				
2	Aset Lancar	699.758.089.985,05	602.391.815.144,08	97.366.274.840,97	16,16
3	Investasi Jangka Panjang	1.002.293.416.444,24	835.123.845.482,75	167.169.570.961,49	20,02
4	Aset tetap	9.038.092.125.327,88	9.214.910.044.241,79	(176.817.918.913,91)	(1,92)
5	Dana Cadangan	8.398.684.760,00	46.125.787.358,00	(37.727.102.598,00)	(81,79)
6	Aset Lainnya	76.403.789.787,11	93.886.594.924,42	(17.482.805.137,31)	(18,62)
7	Properti Investasi	217.198.183.953,48	**0,00**	217.198.183.953,48	0,00
8	**Jumlah Aset**	**11.042.144.290.257,76**	**10.792.438.087.151,04**	**249.706.203.106,72**	**2,31**
9	**Kewajiban**				
10	Kewajiban Jangka Pendek	110.091.452.175,79	106.374.711.749,07	3.716.740.426,72	3,49
11	Kewajiban Jangka Panjang	62.666.822.555,00	72.948.702.467,00	(10.281.879.912,00)	(14,09)
12	**Jumlah Kewajiban**	**172.758.274.730,79**	**179.323.414.216,07**	**(6.565.139.485,28)**	**(3,66)**
13	**Ekuitas**				
14	Ekuitas	10.869.386.015.526,97	10.613.114.672.934,97	256.271.342.591,99	2,41
15	**Jumlah Ekuitas**	10.869.386.015.526,97	10.613.114.672.934,97	256.271.342.591,99	**2,41**
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**11.042.144.290.257,76**	**10.792.438.087.151,04**	**249.706.203.106,72**	**2,31**

5.3.1 ASET

Aset merupakan salah satu pos yang terdapat dalam Neraca Pemerintah Kota Bogor. Total aset Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.042.144.290.257,76 naik sebesar Rp249.706.203.106,72 atau 2,31% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.792.438.087.151,04 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.2
Aset TA 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	**Aset**				
2	Aset Lancar	699.758.089.985,05	602.391.815.144,08	97.366.274.840,97	16,16
3	Investasi Jangka Panjang	1.002.293.416.444,24	835.123.845.482,75	167.169.570.961,49	20,02
4	Aset tetap	9.038.092.125.327,88	9.214.910.044.241,79	(176.817.918.913,91)	(1,92)
5	Dana Cadangan	8.398.684.760,00	46.125.787.358,00	(37.727.102.598,00)	(81,79)
6	Aset Lainnya	76.403.789.787,11	93.886.594.924,42	(17.482.805.137,31)	(18,62)
7	Properti Investasi	217.198.183.953,48	**0,00**	217.198.183.953,48	0,00
8	**Jumlah Aset**	**11.042.144.290.257,76**	**10.792.438.087.151,04**	**249.706.203.106,72**	**2,31**
9	**Kewajiban**				
10	Kewajiban Jangka Pendek	110.091.452.175,79	106.374.711.749,07	3.716.740.426,72	3,49
11	Kewajiban Jangka Panjang	62.666.822.555,00	72.948.702.467,00	(10.281.879.912,00)	(14,09)
12	**Jumlah Kewajiban**	**172.758.274.730,79**	**179.323.414.216,07**	**(6.565.139.485,28)**	**(3,66)**
13	**Ekuitas**				
14	Ekuitas	10.869.386.015.526,97	10.613.114.672.934,97	256.271.342.591,99	2,41
15	**Jumlah Ekuitas**	10.869.386.015.526,97	10.613.114.672.934,97	256.271.342.591,99	**2,41**
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**11.042.144.290.257,76**	**10.792.438.087.151,04**	**249.706.203.106,72**	**2,31**

Kenaikan sebagian besar disebabkan oleh penambahan aset tetap dari Belanja Modal serta adanya penambahan investasi jangka panjang sesuai dengan nilai ekuitas pada Badan Usaha Milik Daerah. Berikut komposisi aset Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2024.

5.3.1.1 ASET LANCAR

Aset lancar terdiri atas kas dan setara kas serta aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bogor pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 pada tabel berikut.

Tabel 5.3.3
Aset Lancar TA 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	**Aset Lancar**				
2	Kas dan Setara Kas	83.616.865.127,38	53.955.641.102,14	29.661.224.025,24	54,97
3	Piutang Pajak	617.775.532.829,00	520.712.992.274,00	97.062.540.555,00	18,64
4	Piutang Retribusi	84.392.660.913,70	5.848.053.235,00	78.544.607.678,70	1.343,09
5	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.510.852.544,00	4.961.512.690,00	(450.660.146,00)	(9,08)
6	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	177.064.672.727,00	207.821.455.185,70	(30.756.782.458,70)	(14,80)
7	Piutang Transfer Antar Daerah	12.733.735.118,00	10.982.003.087,00	1.751.732.031,00	15,95
8	Piutang Lainnya	59.596.923.188,00	65.081.689.452,00	(5.484.766.264,00)	(8,43)
9	Penyisihan Piutang	(389.964.184.114,24)	(327.357.002.657,22)	(62.607.181.457,02)	19,13
10	Beban Dibayar Dimuka	505.228.167,24	515.022.118,72	(9.793.951,48)	(1,90)
11	Persediaan	49.525.803.484,97	59.870.448.656,74	(10.344.645.171,77)	(17,28)
	Jumlah Aset Lancar	**699.758.089.985,05**	**602.391.815.144,08**	**97.366.274.840,97**	**16,16**

Berdasarkan tabel rincian Aset Lancar di atas, Aset lancar Pemerintah Kota Bogor 31 Desember 2024 sebesar Rp699.758.089.985,05 secara umum terjadi kenaikan nilai Aset Lancar sebesar Rp97.366.274.840,97 atau 16,16% jika dibandingkan dengan nilai Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp602.391.815.144,08.

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Rekening ini menggambarkan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), BLUD RSUD, BLUD Puskesmas, Bendahara BOS pada Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.4
Kas dan Setara Kas TA 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	**Kas dan Setara Kas**				
2	Kas di Kas Daerah	79.503.327.898,00	33.520.359.707,00	45.982.968.191,00	137,18
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	922.000,00	(922.000,00)	
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.810.000,00	(1.810.000,00)	
5	Kas di BLUD	2.153.130.596,38	17.674.780.233,14	(15.521.649.636,76)	(87,82)
6	Kas Lainnya	1.012.808.839,00	1.108.045.406,00	(95.236.567,00)	(8,60)
7	Kas di Bendahara BOS Pusat	947.597.794,00	1.649.723.756,00	(702.125.962,00)	(42,56)
	Jumlah Kas dan Setara Kas	**83.616.865.127,38**	**53.955.641.102,14**	**29.661.224.025,24**	**54,97**

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp83.616.865.127,38 naik sebesar Rp29.661.224.025,24 atau 54,97% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023

sebesar Rp53.955.641.102,14 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.5
Kas dan Setara Kas Per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	**Kas dan Setara Kas**				
2	**Kas di Kas Daerah**	**79.503.327.898,00**	**33.520.359.707,00**	**45.982.968.191,00**	**137,18**
	- Pejabat Pengelelola Keuangan Daerah	79.503.327.898,00	33.520.359.707,00	45.982.968.191,00	137,18
3	**Kas di Bendahara Penerimaan**	**0,00**	**922.000,00**	**(922.000,00)**	-
	- Dinas Perhubungan	0,00	922.000,00	(922.000,00)	-
4	**Kas di Bendahara Pengeluaran**	**0,00**	**1.810.000,00**	**(1.810.000,00)**	-
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	1.260.000,00	(1.260.000,00)	-
	- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	550.000,00	(550.000,00)	-
5	**Kas di BLUD**	**2.153.130.596,38**	**17.674.780.233,14**	**(15.521.649.636,76)**	**(87,82)**
	Rumah Sakit Umum Daerah	570.353.995,38	16.750.181.969,14	(16.179.827.973,76)	(96,59)
	Puskesmas Bogor Selatan	65.981.575	39.645.070,00	26.336.505,00	66,43
	Puskesmas Cipaku	130.635.416	1.722.803,00	128.912.613,00	7.482,73
	Puskesmas Bondongan	46.288.543	60.583.946,00	(14.295.403,00)	(23,60)
	Puskesmas Lawanggintung	110.734.890	75.719.801,00	35.015.089,00	46,24
	Puskesmas Bogor Timur	19.666.167	70.128.820,00	(50.462.653,00)	(71,96)
	Puskesmas Pulo Armyn	94.073.214	5.688.667,00	88.384.547,00	1.553,70
	Puskesmas Bogor Tengah	51.744.594	76.731.229,00	(24.986.635,00)	(32,56)
	Puskesmas Sempur	37.364.555	3.847.737,00	33.516.818,00	871,08
	Puskesmas Gang Aut	13.157.615	82.178.272,00	(69.020.657,00)	(83,99)
	Puskesmas Belong	2.269.180	9.449.710,00	(7.180.530,00)	(75,99)
	Puskesmas Merdeka	68.770.529	55.419.495,00	13.351.034,00	24,09
	Puskesmas Semplak	30.356.626	30.114.427,00	242.199,00	0,80
	Puskesmas Pancasan	50.175.253	12.747.359,00	37.427.894,00	293,61
	Puskesmas Pasir Mulya	79.625.567	199.543.404,00	(119.917.837,00)	(60,10)
	Puskesmas Gang Kelor	3.863.561	1.714.164,00	2.149.397,00	125,39
	Puskesmas Sindang Barang	5.777.814	1.733.987,00	4.043.827,00	233,21
	Puskesmas Bogor Utara	12.516.734	10.505.806,00	2.010.928,00	19,14
	Puskesmas Tegal Gundil	35.057.009	10.823.743,00	24.233.266,00	223,89
	Puskesmas Warung Jambu	23.621.526	11.601.793,00	12.019.733,00	103,60
	Puskesmas Tanah Sareal	984.597	770.234,00	214.363,00	27,83
	Puskesmas Pondok Rumput	73.398.940	39.171.085,00	34.227.855,00	87,38
	Puskesmas Kedung Badak	181.830.764	9.146.006,00	172.684.758,00	1.888,09
	Puskesmas Kayu Manis	10.963.139	11.497.682,00	(534.543,00)	(4,65)
	Puskesmas Mekarwangi	329.988.366	78.100.731,00	251.887.635,00	322,52
	Puskesmas Mulyaharja	7.287.732	2.608.877,00	4.678.855,00	179,34
	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	96.642.695	23.403.416,00	73.239.279,00	312,94
6	**Kas Lainnya**	**1.012.808.839,00**	**1.108.045.406,00**	**(95.236.567)**	**(8,60)**
	Dinas Pendiidkan	7.020.131,00	-	7.020.131,00	
	Puskesmas Bogor Selatan	1.400.000,00	29.423.074,00	(28.023.074,00)	(95,24)
	Puskesmas Cipaku	69.941.520,00	50.981.683,00	18.959.837,00	37,19
	Puskesmas Bondongan	20.586.020,00	32.073.331,00	(11.487.311,00)	(35,82)
	Puskesmas Lawanggintung	38.537.212,00	79.505.992,00	(40.968.780,00)	(51,53)
	Puskesmas Bogor Timur	7.650.020,00	14.367.600,00	(6.717.580,00)	(46,76)
	Puskesmas Pulo Armyn	94.610.639,00	38.923.883,00	55.686.756,00	143,07
	Puskesmas Bogor Tengah	16.883.986,00	37.819.277,00	(20.935.291,00)	(55,36)
	Puskesmas Sempur	0,00	42.462.736,00	(42.462.736,00)	(100,00)
	Puskesmas Gang Aut	4.350.000,00	30.381.242,00	(26.031.242,00)	(85,68)
	Puskesmas Belong	32.839,00	20.916.478,00	(20.883.639,00)	(99,84)
	Puskesmas Merdeka	92.328.419,00	83.670.784,00	8.657.635,00	10,35
	Puskesmas Semplak	13.755.020,00	27.135.863,00	(13.380.843,00)	(49,31)
	Puskesmas Pancasan	27.406.520,00	27.204.385,00	202.135,00	0,74
	Puskesmas Pasir Mulya	56.668.500,00	54.153.738,00	2.514.762,00	4,64
	Puskesmas Gang Kelor	3.725.826,00	22.728.634,00	(19.002.808,00)	(83,61)
	Puskesmas Sindang Barang	167.632.520,00	89.037.559,00	78.594.961,00	88,27
	Puskesmas Bogor Utara	35.217.120,00	19.267.702,00	15.949.418,00	82,78
	Puskesmas Tegal Gundil	10.903.520,00	27.732.610,00	(16.829.090,00)	(60,68)
	Puskesmas Warung Jambu	61.300.402,00	28.141.971,00	33.158.431,00	117,83
	Puskesmas Tanah Sareal	5.483.520,00	14.717.000,00	(9.233.480,00)	(62,74)
	Puskesmas Pondok Rumput	6.368.520,00	14.517.800,00	(8.149.280,00)	(56,13)
	Puskesmas Kedung Badak	18.150.000,00	23.761.003,00	(5.611.003,00)	(23,61)
	Puskesmas Kayu Manis	15.006.720,00	16.604.964,00	(1.598.244,00)	(9,63)
	Puskesmas Mekarwangi	78.089.020,00	17.221.648,00	60.867.372,00	353,44
	Puskesmas Mulyaharja	10.260.845,00	16.294.449,00	(6.033.604,00)	(37,03)
	PPKD	149.500.000,00	249.000.000,00	(99.500.000,00)	(39,96)
7	**Kas di Bendahara BOS Pusat**	**947.597.794,00**	**1.649.723.756,00**	**(702.125.962,00)**	**(42,56)**
	- Dinas Pendidikan	947.597.794,00	1.649.723.756,00	(702.125.962,00)	(42,56)
	Jumlah Kas dan Setara Kas	**83.616.865.127,38**	**53.955.641.102,14**	**29.661.224.025,24**	**54,97**

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sesuai dengan Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp79.652.827.898,00 sedangkan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 pada Neraca sebesar Rp79.503.327.898,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp149.500.000,00 yaitu utang jaminan bongkar reklame yang merupakan kas transitoris yang dicatat pada akun kas lainnya.

Adapun pada tahun 2024 utang jaminan bongkar reklame sebesar Rp28.500.000,00 direklasifikasi dari kas di kas daerah ke kas lainnya. Berikut mutasi kas di kas daerah sesuai dengan neraca tahun 2024 dan 2023:

Tabel 5.3.6
Mutasi Kas di Kas Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo awal Kas di Kas Daerah	33.520.359.707,00	130.401.382.495,00
2	Penerimaan Kas	2.852.026.719.815,00	2.684.927.240.206,00
3	Pengeluaran Kas	2.806.015.251.624,00	2.781.559.262.994,00
4	Utang Jaminan Bongkar yang direklas ke kas lainnya	(28.500.000,00)	(249.000.000,00)
5	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	79.503.327.898,00	33.520.359.707,00

(Rincian kas di kas daerah disajikan pada lampiran 1.1 dan 1.2)

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp922.000,00. Saldo kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp922.000,00 tahun 2023 adalah saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan yang berasal dari Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan usaha sebesar Rp180.000,00 dan Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas lainnya di Lingkungan Terminal sebesar Rp742.000,00. Mutasi Kas di Bendahara Penerimaan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.7
Mutasi Kas di Bendahara Penerimaan

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo awal Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
2	Penerimaan Kas	18.634.541.399,00	15.468.198.372,00
3	Pengeluaran Kas	18.634.541.399,00	15.467.276.372,00
4	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	922.000,00

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.810.000,00. Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran selama tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.8
Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo awal Kas di Bendahara Pengeluaran	1.810.000,00	0,00
2	Penerimaan Kas	531.060.924.715,48	584.107.179.265,50
3	Pengeluaran Kas	531.062.734.715,48	584.105.369.265,50
4	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.810.000,00

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.810.000,00 terdiri dari saldo kas di bendahara pengeluaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.260.000,00 dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp550.000,00.

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.153.130.596,38 turun sebesar Rp15.521.649.636,76 atau 87,82% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.674.780.233,14 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.9
Kas di BLUD per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	**Kas di BLUD**	**2.153.130.596,38**	**17.674.780.233,14**	**(15.521.649.636,76)**	**(87,82)**
	Puskesmas Bogor Selatan	65.981.575,00	39.645.070,00	(16.684.200.394,14)	(99,61)
	Puskesmas Cipaku	130.635.416,00	1.722.803,00	90.990.346,00	229,51
	Puskesmas Bondongan	46.288.543,00	60.583.946,00	44.565.740,00	2.586,82
	Puskesmas Lawanggintung	110.734.890,00	75.719.801,00	50.150.944,00	82,78
	Puskesmas Bogor Timur	19.666.167,00	70.128.820,00	(56.053.634,00)	(74,03)
	Puskesmas Pulo Armyn	94.073.214,00	5.688.667,00	23.944.394,00	34,14
	Puskesmas Bogor Tengah	51.744.594,00	76.731.229,00	46.055.927,00	809,61
	Puskesmas Sempur	37.364.555,00	3.847.737,00	(39.366.674,00)	(51,30)
	Puskesmas Gang Aut	13.157.615,00	82.178.272,00	9.309.878,00	241,96
	Puskesmas Belong	2.269.180,00	9.449.710,00	(79.909.092,00)	(97,24)
	Puskesmas Merdeka	68.770.529,00	55.419.495,00	59.320.819,00	627,75
	Puskesmas Semplak	30.356.626,00	30.114.427,00	(25.062.869,00)	(45,22)
	Puskesmas Pancasan	50.175.253,00	12.747.359,00	20.060.826,00	66,62
	Puskesmas Pasir Mulya	79.625.567,00	199.543.404,00	66.878.208,00	524,64
	Puskesmas Gang Kelor	3.863.561,00	1.714.164,00	(195.679.843,00)	(98,06)
	Puskesmas Sindang Barang	5.777.814,00	1.733.987,00	4.063.650,00	237,06
	Puskesmas Bogor Utara	12.516.734,00	10.505.806,00	10.782.747,00	621,85
	Puskesmas Tegal Gundil	35.057.009,00	10.823.743,00	24.551.203,00	233,69
	Puskesmas Warung Jambu	23.621.526,00	11.601.793,00	12.797.783,00	118,24
	Puskesmas Tanah Sareal	984.597,00	770.234,00	(10.617.196,00)	(91,51)
	Puskesmas Pondok Rumput	73.398.940,00	39.171.085,00	72.628.706,00	9.429,43
	Puskesmas Kedung Badak	181.830.764,00	9.146.006,00	142.659.679,00	364,20
	Puskesmas Kayu Manis	10.963.139,00	11.497.682,00	1.817.133,00	19,87
	Puskesmas Mekarwangi	329.988.366,00	78.100.731,00	318.490.684,00	2.770,04
	Puskesmas Mulyaharja	7.287.732,00	2.608.877,00	(70.812.999,00)	(90,67)
	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	96.642.695,00	23.403.416,00	94.033.818,00	3.604,38
	Rumah Sakit Umum Daerah	570.353.995,38	16.750.181.969,14	546.950.579,38	2.337,05
	Jumlah Kas di BLUD	**2.153.130.596,38**	**17.674.780.233,14**	**(15.521.649.636,76)**	**(87,82)**

Saldo Kas di BLUD tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp2.153.130.596,38 dan Rp17.674.780.233,14 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.3.10
Mutasi Kas di BLUD

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo awal Kas di BLUD	17.674.780.233,14	29.011.343.370,34
2	Penerimaan Kas	535.756.334.350,24	382.106.696.457,80
3	Pengeluaran Kas	551.277.983.987,00	393.443.259.595,00
4	Saldo Akhir Kas di BLUD	2.153.130.596,38	17.674.780.233,14

Saldo Kas di BLUD Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebesar Rp2.153.130.596,38 dan Rp17.674.780.233,14 terdapat pada unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yaitu Puskesmas dan Labkesda serta Rumah Sakit Umum Daerah.

Saldo Kas di BLUD Puskesmas dan Labkesda Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.582.776.601,00 adalah pembentuk SILPA.

Saldo Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp570.353.955,38 terdiri dari kas pembentuk SILPA sebesar Rp561.576.094,38 dan utang PFK yang akan disetor pada tahun 2024 sebesar Rp8.777.901,00. Rincian saldo kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.3.11
Rincian Kas di BLUD pada RSUD

No	Uraian	No Rekening	Peruntukan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Kas Tunai	-		30.609.500,00	69.945.000,00
2	Bank BJB	00601878287001	Operasional	454.708.118,00	293.877.991,14
3	Bank Mandiri	1330070807066	Tampungan Asuransi	23.232.324,38	659.515.510,00
4	Bank BNI	352582588	Tampungan Asuransi	61.804.053,00	15.726.843.468,00
Total				**570.353.995,38**	**16.750.181.969,14**

5.3.1.1.1.5 Kas di Bendahara BOS Pusat

Saldo Kas di Bendahara BOS Pusat per 31 Desember 2024 adalah Rp947.597.794,00 turun sebesar Rp702.125.962,00 atau mencapai 42,56% dibandingkan saldo 31 Desember 2023 sebesar Rp1.649.723.756,00 dengan mutasi pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.3.12
Mutasi Kas di Bendahara BOS Pusat

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
							(Rp)	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7=6-3)	(8=7/6)
1	Sekolah Dasar	902.450.325,00	(199.626.552,00)	84.423.161.825,00	84.542.802.745,00	583.182.853,00	(319.267.472,00)	(35,38)
2	Sekolah Menengah Pertama	747.273.431,00		25.739.526.569,00	26.122.385.059,00	364.414.941,00	(382.858.490,00)	(51,23)
Jumlah Saldo Kas di Bendahara BOS Pusat		1.649.723.756,00	(199.626.552,00)	110.162.688.394,00	110.665.187.804,00	947.597.794,00	(702.125.962,00)	(42,56)

(Rincian kas di bendahara BOS pusat disajikan pada Lampiran 2.)

5.3.1.1.1.6 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.012.808.839,00 dan Rp1.108.045.406,00 dengan mutasi pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.3.13
Mutasi Kas Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo awal Kas Lainnya	1.108.045.406,00	204.120.800,00
2	Penerimaan Kas	41.519.971.494,00	32.978.574.200,00
3	Pengeluaran Kas	41.615.208.061,00	32.074.649.594,00
4	Saldo Akhir Kas Lainnya	1.012.808.839,00	1.108.045.406,00

Kas lainnya pada tahun 2024 sebesar Rp1.012.808.839,00 terdiri dari saldo kas Bantuan Opersional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas sebesar Rp856.288.708,00, Saldo BOP PAUD pada Dinas Pendidikan sebesar Rp7.020.131,00 dan uang jaminan bongkar sebesar Rp149.500.000,00.

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.012.808.839,00 naik sebesar Rp95.236.567,00 atau 8,60% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.108.045.406,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.14
Kas Lainnya per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	**Kas Lainnya**	**1.012.808.839,00**	**1.108.045.406,00**	**(95.236.567,00)**	**(8,60)**
	Dinas Pendiidkan	7.020.131,00	0,00	7.020.131,00	
	Puskesmas Bogor Selatan	1.400.000,00	29.423.074,00	(28.023.074,00)	(95,24)
	Puskesmas Cipaku	69.941.520,00	50.981.683,00	18.959.837,00	37,19
	Puskesmas Bondongan	20.586.020,00	32.073.331,00	(11.487.311,00)	(35,82)
	Puskesmas Lawanggintung	38.537.212,00	79.505.992,00	(40.968.780,00)	(51,53)
	Puskesmas Bogor Timur	7.650.020,00	14.367.600,00	(6.717.580,00)	(46,76)
	Puskesmas Pulo Armyn	94.610.639,00	38.923.883,00	55.686.756,00	143,07
	Puskesmas Bogor Tengah	16.883.986,00	37.819.277,00	(20.935.291,00)	(55,36)
	Puskesmas Sempur	0	42.462.736,00	(42.462.736,00)	(100,00)
	Puskesmas Gang Aut	4.350.000,00	30.381.242,00	(26.031.242,00)	(85,68)
	Puskesmas Belong	32.839,00	20.916.478,00	(20.883.639,00)	(99,84)
	Puskesmas Merdeka	92.328.419,00	83.670.784,00	8.657.635,00	10,35
	Puskesmas Semplak	13.755.020,00	27.135.863,00	(13.380.843,00)	(49,31)
	Puskesmas Pancasan	27.406.520,00	27.204.385,00	202.135,00	0,74
	Puskesmas Pasir Mulya	56.668.500,00	54.153.738,00	2.514.762,00	4,64
	Puskesmas Gang Kelor	3.725.826,00	22.728.634,00	(19.002.808,00)	(83,61)
	Puskesmas Sindang Barang	167.632.520,00	89.037.559,00	78.594.961,00	88,27
	Puskesmas Bogor Utara	35.217.120,00	19.267.702,00	15.949.418,00	82,78
	Puskesmas Tegal Gundil	10.903.520,00	27.732.610,00	(16.829.090,00)	(60,68)
	Puskesmas Warung Jambu	61.300.402,00	28.141.971,00	33.158.431,00	117,83
	Puskesmas Tanah Sareal	5.483.520,00	14.717.000,00	(9.233.480,00)	(62,74)
	Puskesmas Pondok Rumput	6.368.520,00	14.517.800,00	(8.149.280,00)	(56,13)
	Puskesmas Kedung Badak	18.150.000,00	23.761.003,00	(5.611.003,00)	(23,61)
	Puskesmas Kayu Manis	15.006.720,00	16.604.964,00	(1.598.244,00)	(9,63)
	Puskesmas Mekarwangi	78.089.020,00	17.221.648,00	60.867.372,00	353,44
	Puskesmas Mulyaharja	10.260.845,00	16.294.449,00	(6.033.604,00)	(37,03)
	PPKD	149.500.000,00	249.000.000,00	(99.500.000,00)	(39,96)
	Jumlah Kas Lainnya	**1.012.808.839,00**	**1.108.045.406,00**	**(95.236.567,00)**	**(8,60)**

Tabel 5.3.15
Mutasi Kas Lainnya pada Dinas Pendidikan

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penerimaan	Pengeluaran	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6-3)	(8=7/6)
1	TK NEGERI MEXINDO	0,00	169.360.000,00	165.305.776,00	4.054.224,00	4.054.224,00	-
2	TK NEGERI MOTEKAR	0,00	65.700.000,00	62.734.093,00	2.965.907,00	2.965.907,00	-
3	SKB PAUD	0,00	118.990.000,00	118.990.000,00	-	0,00	-
4	SKB KESETARAAN	0,00	287.580.000,00	287.580.000,00	-	0,00	-
Jumlah Saldo Kas di Bendahara BOS Pusat		0,00	**641.630.000,00**	**634.609.869,00**	7.020.131,00	**7.020.131,00**	-

5.3.1.1.2 Piutang

Piutang menggambarkan hak Pemerintah Kota Bogor terhadap penerimaan kas, baik pendapatan yang belum diterima secara kas maupun tagihan-tagihan lainnya, saldo rekening tersebut per 31 Desember 2024 sebesar Rp956.074.377.319,70 mengalami penurunan sebesar Rp140.666.671.396,00 atau 17,25% dibandingkan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp815.407.705.923,70. Adapun rincian Piutang dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.16
Piutang

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	**Piutang**				
2	Piutang Pajak Daerah	617.775.532.829,00	520.712.992.274,00	97.062.540.555,00	18,64
3	Piutang Retribusi Daerah	84.392.660.913,70	5.848.053.235,00	78.544.607.678,70	1.343,09
4	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.510.852.544,00	4.961.512.690,00	(450.660.146,00)	(9,08)
5	Piutang Lain - lain PAD yang Sah	177.064.672.727,00	207.821.455.185,70	(30.756.782.458,70)	(14,80)
6	Piutang Transfer Antar Daerah	12.733.735.118,00	10.982.003.087,00	1.751.732.031,00	15,95
7	Piutang Lainnya	49.425.995.593,00	65.081.689.452,00	(15.655.693.859,00)	(24,06)
	Jumlah Piutang	**945.903.449.724,70**	**815.407.705.923,70**	**130.495.743.801,00**	**16,00**

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak merupakan pos untuk menampung saldo tagihan pajak daerah kepada Wajib Pajak yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan. Piutang Pajak terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), sampai dengan batas waktu tertentu pada tanggal Neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah (WP).

Tabel 5.3.17
Piutang Pajak Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	**Piutang**				
2	Piutang Pajak Hotel	14.623.197.503,00	8.840.201.413,00	5.782.996.090,00	65,42
3	Piutang Pajak Restoran	12.515.948.758,00	6.929.794.814,00	5.586.153.944,00	80,61
4	Piutang Pajak Hiburan	1.000.174.810,00	73.666.436,00	926.508.374,00	1.257,71
5	Piutang Pajak Reklame	1.960.325.995,00	1.568.514.060,00	391.811.935,00	24,98
6	Piutang Pajak Parkir	273.039.183,00	167.315.385,00	105.723.798,00	63,19
7	Piutang Pajak Air Tanah	351.031.902,00	261.270.048,00	89.761.854,00	34,36
8	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	586.951.846.128,00	502.792.700.118,00	84.159.146.010,00	16,74
9	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	99.968.550,00	79.530.000,00	20.438.550,00	25,70
	Jumlah Piutang Pajak	**617.775.532.829,00**	**520.712.992.274,00**	**97.062.540.555,00**	**18,64**

Saldo Piutang Pajak Per 31 Desember 2024 sebesar Rp617.775.532.829,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp97.062.540.555,00 atau 18,64% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp520.712.992.274,00 lebih lengkap rincian mutasi piutang pajak daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.18
Mutasi Piutang Pajak Daerah

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan / Pengurangan Masa Pajak s/d th 2023	Penerbitan Ketetapan Baru	Penambahan / Ketetapan th 2024	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3+4+5+6-7)
1	**Piutang Pajak**						
2	Piutang Pajak Hotel	8.840.201.413,00			128.990.798.187,00	123.207.802.097,00	14.623.197.503,00
3	Piutang Pajak Restoran	6.929.794.814,00		4.557.934,00	214.097.189.659,00	208.515.593.649,00	12.515.948.758,00
4	Piutang Pajak Hiburan	73.666.436,00			30.285.088.596,00	29.358.580.222,00	1.000.174.810,00
5	Piutang Pajak Reklame	1.568.514.060,00		3.110.000,00	10.125.188.469,00	9.736.486.534,00	1.960.325.995,00
6	Piutang Pajak Parkir	167.315.385,00			7.965.418.166,00	7.859.694.368,00	273.039.183,00
7	Piutang Pajak Air Tanah	261.270.048,00			2.014.470.394,00	1.924.708.540,00	351.031.902,00
8	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	79.530.000,00			286.824.983.161,00	286.804.544.611,00	99.968.550,00
9	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	502.792.700.118,00	(1.761.512.760,00)		296.832.276.011,00	210.911.617.241,00	586.951.846.128,00
	Jumlah Piutang Pajak	**520.712.992.274,00**	**(1.761.512.760,00)**	**7.667.934,00**	**977.135.412.643,00**	**878.319.027.262,00**	**617.775.532.829,00**

(Rincian piutang pajak disajikan pada Lampiran 3)

Pada tahun 2024 terdapat koreksi piutang pajak PBB P2 masa pajak sampai dengan tahun 2023 yang mempengaruhi nilai piutang dengan total sebesar Rp(1.761.512.760,00) yang terdiri dari faktor penambah dan pengurang sebagai berikut:

1. Faktor penambah sebesar Rp182.843.713,00 terdiri dari adanya penerbitan kembali SPPT PBB P2 melalui SK kepala badan atas permohonan dari WP sebesar Rp1.182.612.053,00 (174 SPPT), pemindahbukuan pembayaran PBB P2 yang salah NOP sebesar Rp231.660,00 (1 SPPT).
2. Faktor pengurang sebesar Rp1.944.356.473,00 terdiri dari adanya pembatalan NOP dan SPPT PBB P2 berdasarkan SK Kepala Badan karena alasan tertentu sebesar Rp401.960.027,00 (2.842 SPPT), pembatalan NOP PBBP2 karena double anslah sehingga mengurangi piutang yang diakui sebesar Rp4.459.085 (18 SPPT), koreksi piutang karena adanya data pembayaran tahun 2023 yang baru masuk di tahun 2024 sebesar Rp26.454.457 (17 SPPT) , adanya penetapan ulang ketetapan PBB pada tahun 2024 untuk Wajib Pajak yang sudah diakui piutang nya pada tahun 2023 sebesar Rp1.493.575.676,00 (36 SPPT), penyesuaian status bayar atas 1 NOP yang sebelumnya masuk data piutang sebesar Rp242.344,00 (10 SPPT), penyesuaian status bayar atas 1 NOP yang sebelumnya masuk data piutang sebesar Rp318.168 (8 SPPT), pembatalan NOP dan SPPT PBB P2 berdasarkan SK Kepala Badan atas Objek Pajak yang terdampak pelebaran jalur kereta api sebesar Rp17.346.716,00 (90 SPPT).

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp84.392.660.913,70 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp5.848.053.235,00 adalah nilai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan tetapi belum diterima pembayarannya. Mutasi piutang retribusi daerah tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.3.19
Mutasi Piutang Retribusi Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo awal Piutang Retribusi	5.848.053.235,00	5.253.999.412,00
2	Penerimaan	419.447.484.596,70	31.812.588.038,00
3	Pengeluaran	340.902.876.918,00	31.218.534.215,00
4	Saldo Akhir Piutang Retribusi	84.392.660.913,70	5.848.053.235,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp84.392.660.913,70 atau naik sebesar Rp78.544.607.678,704 atau 1.343,09% dibandingkan saldo 2023 sebesar Rp5.848.053.235,00. Saldo Piutang Retribusi Pemerintah Kota Bogor terdapat pada perangkat daerah berikut:

Tabel 5.3.20
Piutang Retribusi Daerah Per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Piutang Retribusi				
1	**Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD**	**78.180.963.263,70**	**0,00**	**78.180.963.263,70**	
	- Rumah Sakit Umum Daerah	78.180.963.263,70	0,00	78.180.963.263,70	
2	**Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian an dan Pengendalian Menara Telekomunikasi**	**265.720.500,00**	**272.646.000,00**	**(6.925.500,00)**	**(2,54)**
	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	265.720.500,00	272.646.000,00	(6.925.500,00)	(2,54)
3	**Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan**	**3.318.645.023,00**	**2.543.504.543,00**	**775.140.480,00**	**30,48**
	- Dinas Perumahan dan Permukiman	1.113.355.000,00	977.860.000,00	135.495.000,00	13,86
	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	270.579.776,00	199.442.186,00	71.137.590,00	35,67
	- BKAD	1.934.710.247,00	1.366.202.357,00	568.507.890,00	41,61
4	**Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**	**2.150.570.160,00**	**2.191.425.414,00**	**(40.855.254,00)**	**(1,86)**
	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.150.570.160,00	2.191.425.414,00	(40.855.254,00)	(1,86)
5	**Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**	**117.195.125,00**	**117.195.125,00**	**0,00**	**0,00**
	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	117.195.125,00	117.195.125,00	0,00	0,00
6	**Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**	**359.566.842,00**	723.282.153,00	**(363.715.311,00)**	-
	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	359.566.842,00	723.282.153,00	(363.715.311,00)	-
	Jumlah Piutang Retribusi	**84.392.660.913,70**	**5.848.053.235,00**	**78.544.607.678,70**	**1.343,09**

(Rincian piutang retribusi per perangkat daerah disajikan pada Lampiran 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4)

5.3.1.1.2.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.510.852.544,00 dan tahun 2023 sebesar Rp4.961.512.690,00 adalah piutang Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD. Mutasi pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.3.21
Mutasi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo awal	4.961.512.690,00	5.225.479.571,00
2	koreksi saldo awal	250.000.000,00	632.548.599,00
3	Penerimaan	4.260.852.544,00	4.750.663.159,00
4	Pengeluaran	4.961.512.690,00	5.647.178.639,00
5	Saldo Akhir	4.510.852.544,00	4.961.512.690,00

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.510.852.544,00 mengalami penurunan sebesar Rp450.660.146,00 atau mencapai 9,08% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp4.961.512.690,00. Adapun rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.3.22
Piutang Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
1	Piutang Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.260.852.544,00	4.750.663.159,00	(489.810.615,00)	(10,31)
2	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	250.000.000,00	210.849.531,00	39.150.469,00	18,57
	Jumlah	**4.510.852.544,00**	**4.961.512.690,00**	**(450.660.146,00)**	(9,08)

5.3.1.1.2.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 Rp177.064.672.727,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp207.821.455.185,70 adalah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang belum diterima pembayarannya, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.3.23
Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo awal	207.821.455.185,70	176.171.954.035,86
2	Penerimaan	44.098.484.942,00	319.415.144.873,70
3	Pengeluaran	74.855.267.400,70	287.765.643.723,86
4	Saldo Akhir	177.064.672.727,00	207.821.455.185,70

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp177.064.672.727,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp310.756.782.458 atau 14,80% dibandingkan saldo 2023 sebesar Rp207.821.455.185,70. Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Pemerintah Kota Bogor terdapat pada perangkat daerah berikut:

Tabel 5.3.24
Piutang Lain-lain PAD yang Sah per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah				
1	**Piutang Pendapatan Bunga**	**543.668.056,00**	**0,00**	**543.668.056,00**	-
	- Badan Keuangan dan Aset Daerah	543.668.056,00	0,00	543.668.056,00	
2	**Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah**	**175.510.440.021,00**	**142.433.320.647,00**	**33.077.119.374,00**	**0,23**
	- Badan Pendapatan Daerah	175.510.440.021,00	142.433.320.647,00	33.077.119.374,00	0,23
3	**Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah**	**1.010.564.650,00**	**1.006.450.763,00**	**4.113.887,00**	**0,00**
	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.010.564.650,00	1.006.450.763,00	4.113.887,00	0,00
4	**Piutang Pendapatan BLUD**	**0,00**	**64.381.683.775,70**	**(64.381.683.775,70)**	**(1,00)**
	- Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	64.381.683.775,70	(64.381.683.775,70)	(1,00)
	Jumlah Piutang	**177.064.672.727,00**	**207.821.455.185,70**	**(30.756.782.458,70)**	**(14,80)**

(Rincian piutang lain-lain PAD yang sah per perangkat daerah disajikan pada lampiran 5.1 dan 5.2)

Tabel 5.3.25
Mutasi Piutang Denda Pajak

No	Jenis Pajak	Piutang Denda 31 Desember 2023	Penambahan/ Pengurangan Denda Masa Pajak s/d 2023	Penambahan Denda Masa Pajak Tahun 2023	Realisasi Penerimaan Denda Pajak 2024	Saldo Piutang 2023	Piutang Denda Berjalan 2024	Saldo Piutang Denda Per 31 Desember 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = 3 + 4 + 5 - 6*	*8*	*9 = 7 + 8*
1	Pajak Hotel	76.752.258		337.432.122	394.914.877	19.269.503	1.453.311.905	1.472.581.408
2	Pajak Restoran	1.586.234.756		-	238.990.375	1.347.244.381	1.607.298.600	2.954.542.981
3	Pajak Reklame	253.542.649		-	46.395.529	207.147.120	1.093.925.267	1.301.072.387
4	Pajak Parkir	31.222.523			1.844.581	29.377.942	107.648.473	137.026.415
5	Pajak Hiburan	4.050.493		145.855	2.149.467	2.046.881	76.543.754	78.590.635
6	Pajak Air Tanah	40.617.155			778.085	39.839.070	2.591.924	42.430.994
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	140.440.900.813	31.288.477.656		8.963.290.173	162.766.088.296	6.758.106.905	169.524.195.201
	JUMLAH	**142.433.320.647**	**31.288.477.656**	**337.577.977**	**9.648.363.087**	**164.411.013.193**	**11.099.426.828**	**175.510.440.021**

Pada tahun 2024 terdapat koreksi piutang denda PBB P2 masa pajak sampai dengan tahun 2023 yang mempengaruhi saldo piutang dengan total sebesar Rp31.288.477.656,00 yang terdiri dari dari faktor penambah dan pengurang sebagai berikut:

1. Faktor penambah sebesar Rp32.074.120.935,00 merupakan penambahan denda dari keterlambatan pembayaran sebesar Rp31.988.737.413,00 , penerbitan kembali SPPT PBB P2 melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah atas permohonan dari WP sebesar Rp85.301.887,00 (174 SPPT), pemindahbukuan pembayaran PBB P2 yang salah NOP sebesar Rp69.498,00 (1 SPPT), pembulatan angka desimal denda ke bilangan bulat terdekat sebesar Rp12.137,00 (12.137 SPPT).
2. Faktor pengurang sebesar Rp785.643.279,00 pembatalan NOP PBB P2 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah karena alasan tertentu Rp117.884.277,00 (174 SPPT), pembatalan NOP PBBP2 karena double anslah sehingga mengurangi piutang yang diakui sebesar Rp2.052.058,00 (27 SPPT), adanya penetapan ulang ketetapan PBB pada tahun 2024 untuk Wajib Pajak yang sudah diakui piutang nya pada tahun 2023 sebesar Rp626.144.106,00 (36 SPPT), pembulatan angka desimal denda ke bilangan bulat terdekat sebesar Rp3.546,00 (12.137 SPPT), penyesuaian nilai denda karena salah perhitungan sebesar Rp34.303.127,00, koreksi piutang karena adanya data pembayaran tahun 2023 yang baru masuk di tahun 2024 sebesar Rp3.174.536,00 (17 SPPT), pembatalan NOP dan SPPT PBB P2 berdasarkan Keputusan Kepala Badan

Pendapatan Daerah atas Objek Pajak yang terdampak pelebaran jalur kereta api sebesar Rp2.081.629,00 (90 SPPT)

5.3.1.1.2.5 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Piutang Transfer Pemerintah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

Tabel 5.3.26
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo awal	0,00	0,00
2	Penerimaan	0,00	0,00
3	Pengeluaran	0,00	0,00
4	Saldo Akhir	0,00	0,00

5.3.1.1.2.6 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2024 Rp12.733.735.118,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.982.003.087,00. Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2024 sebesar Rp12.733.735.118,00 merupakan piutang kurang salur bagi hasil pajak tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor 973/Kep.139-Bapenda/2025 tentang Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2024 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.27
Rincian Piutang Transfer Antar Daerah

No	Jenis Piutang	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan/ pembayaran (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	Piutang Transfer Antar Daerah				
1	**Piutang Bagi Hasil**				
	- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.277.418.190,00	5.174.285.040,00	3.277.418.190,00	5.174.285.040,00
	- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.325.876.900,00	4.666.803.750,00	2.325.876.900,00	4.666.803.750,00
	- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	5.356.324.047,00	1.295.204.745,00	5.356.324.047,00	1.295.204.745,00
	- Air Permukaan (APER)	22.383.950,00	14.569.900,00	22.383.950,00	14.569.900,00
	- Pajak Rokok	0,00	1.582.871.683,00	0,00	1.582.871.683,00
	Jumlah	**10.982.003.087,00**	**12.733.735.118,00**	**10.982.003.087,00**	**12.733.735.118,00**
2	**Piutang Bantuan Keuangan**				
	- Bantuan keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**10.982.003.087,00**	**12.733.735.118,00**	**10.982.003.087,00**	**12.733.735.118,00**

5.3.1.1.3 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp59.596.923.188,00 dan pada tahun 2023 sebesar Rp65.081.689.452,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.28
Mutasi Piutang Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo awal	65.081.689.452,00	70.566.455.628,00
2	Penerimaan		
3	Pengeluaran	5.484.766.264,00	5.484.766.176,00
4	Saldo Akhir	59.596.923.188,00	65.081.689.452,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp59.596.923.188,00 atau turun 8,43% dibandingkan saldo 2023 sebesar Rp65.081.689.452,00 karena adanya

pembayaran pada tahun 2023 sebesar Rp5.484.766.264,00. Saldo piutang lainnya Pemerintah Kota Bogor terdapat pada perangkat daerah berikut:

Tabel 5.3.29
Piutang Lainnya per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	**Piutang Lainnya**				
	- Dinas Perhubungan	63.100.000,00	63.100.000,00	0,00	0,00
	(Pemutusan Kontrak Konsultan PT. Indocitra Intiperkasa)				
	- Badan Keuangan dan Aset Daerah	59.533.823.188,00	65.018.589.452,00	(5.484.766.264,00)	(8,44)
	Jumlah Piutang	59.596.923.188,00	65.081.689.452,00	(5.484.766.264,00)	(8,43)

Saldo Piutang Lainnya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp59.533.823.276,00 pada tahun 2024 terdiri dari:

Tabel 5.3.30
Rincian Piutang Lainnya pada BKAD

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Piutang ke PDAM TP terkait setoran bagian laba PDAM	0,00	88,00
2	Piutang Hasil Pemeriksaan (Temuan) BPK-RI yang timbul berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Tahun 2004 (Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2005 atas Laporan Keuangan Kota Bogor Tahun 2004)	10.140.927.595,00	10.140.927.595,00
3	Penggunaan langsung Kontribusi PT. Bina Citra atas Pengelolaan Plaza Bogor kegiatan operasional Kantor Pengelolaan Pasar	30.000.000,00	30.000.000,00
4	Piutang ke PDAM terkait dana penerusan pinjaman	49.362.895.593,00	54.847.661.769,00
	Jumlah	59.533.823.188,00	65.018.589.452,00

Piutang kepada PDAM Tirta Pakuan terkait penerusan dana pinjaman sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Bogor Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Dana Pinjaman dari *International Bank for Reconstruction and Development* No.7730-ID tanggal 1 September 2009 dalam rangka pembiayaan *Urban Water Supply and Sanitation Project*.

Pemerintah Kota Bogor sebagai pihak yang menandatangani NPPP wajib menganggarkan di dalam APBD pembayaran cicilan pinjaman yang terdiri atas pokok pinjaman dan bunga pinjaman, dengan mengakui adanya utang jangka panjang terlebih dahulu. Adapun sumber dana untuk pembayaran cicilan hutang jangka panjang tersebut berasal dari PDAM Tirta Pakuan. Atas dasar inilah maka Pemerintah Kota Bogor mencatat sebagai piutang kepada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Pada tahun 2015 pinjaman dari pemerintah pusat secara keseluruhan sudah diterima yaitu sebesar Rp85.013.875.740,00.

5.3.1.1.4 Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp(389.964.184.114,24) atau meningkat sebesar Rp62.607.181.457,02 atau 19,13% dibandingkan saldo 2023 sebesar Rp(327.357.002.657,22). Jumlah Penyisihan Piutang sebesar Rp(389.964.184.114,24) terdiri dari penyisihan:

Tabel 5.3.31
Rincian Penyisihan Piutang

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	**Penyisihan Piutang**				
2	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(290.953.447.046,00)	(250.916.176.908,00)	(40.037.270.138,00)	15,96
3	Penyisihan Piutang Retribusi	(13.373.378.274,50)	(4.658.447.799,44)	(8.714.930.475,06)	187,08
4	Penyisihan Piutang Lain - lain PAD yang Sah	(85.390.544.315,74)	(71.457.285.002,78)	(13.933.259.312,96)	19,50
5	Penyisihan Piutang Lainnya - Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat	(246.814.478,00)	(325.092.947,00)	78.278.469,00	(24,08)
	Jumlah Penyisihan Piutang	**(389.964.184.114,24)**	**(327.357.002.657,22)**	**(62.607.181.457,02)**	**19,13**

5.3.1.1.4.1 Penyisihan Piutang Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp(290.953.447.046,00) atau meningkat sebesar Rp(40.037.270.138,00) atau 15,96% dibandingkan saldo 2023 sebesar Rp(250.916.176.908,00). Jumlah Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp(290.953.447.046,00) terdiri dari penyisihan:

Tabel 5.3.32
Rincian Penyisihan Piutang Pajak

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	**Penyisihan Piutang Pajak**				
2	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(8.580.808.067,00)	(4.028.025.840,00)	(4.552.782.227,00)	113,03
3	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(2.737.469.106,00)	(2.692.857.188,00)	(44.611.918,00)	1,66
4	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(296.339.256,00)	(36.491.833,00)	(259.847.423,00)	712,07
5	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(1.076.393.391,00)	(1.066.372.003,00)	(10.021.388,00)	0,94
6	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(122.181.717,00)	(116.616.600,00)	(5.565.117,00)	4,77
7	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(136.352.201,00)	(68.819.108,00)	(67.533.093,00)	98,13
8	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	(278.003.403.465,00)	(242.906.596.686,00)	(35.096.806.779,00)	14,45
9	Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	(499.843,00)	(397.650,00)	(102.193,00)	25,70
	Jumlah Penyisihan Piutang	**(290.953.447.046,00)**	**(250.916.176.908,00)**	**(40.037.270.138,00)**	**15,96**

(Rincian penyisihan piutang pajak disajikan pada lampiran 3)

5.3.1.1.4.2 Penyisihan Piutang Retribusi

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp(13.373.378.274,50) atau menurun sebesar Rp8.714.930.475,06 atau 187,08% dibandingkan saldo 2023 sebesar Rp(4.658.447.799,44). Jumlah Penyisihan piutang retribusi sebesar Rp(13.373.378.274,50) terdiri dari:

Tabel 5.3.33
Penyisihan Piutang Retribusi

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	**Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD**				
	- Rumah Sakit Umum Daerah	(8.011.966.481,00)	0,00	(8.011.966.481,00)	-
2	**Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi**				
	- Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	(265.720.500,00)	(167.305.500,00)	(98.415.000,00)	58,82
3	**Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**				
	- Dinas Perumahan dan Permukiman	(982.508.725,00)	(809.057.925,00)	(173.450.800,00)	21,44
	- Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	(172.702.484,75)	(155.132.576,00)	(17.569.908,75)	11,33
	- Badan Keuangan dan Aset Daerah	(1.615.108.249,20)	(1.158.368.418,00)	(456.739.831,20)	39,43
4	**Penyisihan Piutang Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan**				
	- Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	(2.150.570.160,00)	(2.191.425.414,00)	40.855.254,00	(1,86)
5	**Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**				
	- Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	(117.195.125,00)	(117.195.125,00)	0,00	0,00
6	**Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu Persetujuan Bangunan Gedung**				
	- Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	(57.606.549,55)	(59.962.841,44)	2.356.291,89	
	Jumlah Penyisihan Piutang	(13.373.378.274,50)	(4.658.447.799,44)	(8.714.930.475,06)	187,08

(Rincian penyisihan piutang retribusi disajikan pada lampiran 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4)

5.3.1.1.4.3 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp(85.390.544.314,74) atau meningkat sebesar Rp13.933.259.311,96 atau 19,50% dibandingkan saldo 2023 sebesar Rp(71.457.285.002,78) Adapun Penyisihan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp Rp(85.390.544.314,74) terdiri dari:

Tabel 5.3.34
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	**Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah**				
	- Rumah Sakit umum daerah - BLUD	0,00	(6.015.342.733,00)	6.015.342.733,00	(100,00)
	- Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	(1.012.697.599,74)	(996.112.090,78)	(16.585.508,96)	1,67
	- Badan Pendapatan Daerah	(84.377.846.715,00)	(64.445.830.179,00)	(19.932.016.536,00)	30,93
	Jumlah Penyisihan Piutang	(85.390.544.314,74)	(71.457.285.002,78)	(13.933.259.311,96)	19,50

(Rincian penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah disajikan pada lampiran 5.1 dan 5.2)

5.3.1.1.4.4 Penyisihan Piutang Lainnya - Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat

Saldo Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp(246.814.478,00) atau naik sebesar Rp54.847.662,00 atau 18,18% dibandingkan saldo 2023 sebesar Rp(301.662.140,00). Adapun Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp(246.814.478,00) terdiri dari:

Tabel 5.3.35
Penyisihan Piutang Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	**Penyisihan Piutang Lainnya - Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat**				
	- Badan Keuangan dan Aset Daerah	(246.814.478,00)	(301.662.140,00)	54.847.662,00	(18,18)
	Jumlah Penyisihan Piutang	(246.814.478,00)	(301.662.140,00)	54.847.662,00	(18,18)

Tabel 5.3.36
Perhitungan Penyisihan Piutang Lainnya

No.	Nama Piutang	Piutang 2024	Kriteria Kualitas Piutang				Penyisihan Piutang				Jumlah Penyisihan Piutang
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	Piutang ke PDAM TP terkait dana penerusan pinjaman (pokok+bunga+biaya jasa bank)	49.362.895.505,00	49.362.895.505,00				246.814.477,53				246.814.477,53
Jumlah		49.362.895.505,00	49.362.895.505,00	-	-	-	246.814.477,53	-	-	-	246.814.477,53

5.3.1.1.5 Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp505.228.167,24 atau turun sebesar Rp9.793.951,48 atau 1,90% dibandingkan saldo 2023 sebesar Rp515.022.118,72. Adapun rincian Beban Dibayar Dimuka Rp505.228.167,24 terdiri dari:

Tabel 5.3.37
Beban Dibayar Dimuka per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	**Beban dibayar dimuka**				
	- Rumah Sakit Umum Daerah - BLUD	6.278.182,36	4.028.306,01	2.249.876,35	55,85
	- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	49.862.597,26	(49.862.597,26)	(100,00)
	- Dinas Perumahan dan Permukiman	87.671.232,88	65.573.770,49	22.097.462,39	33,70
	- Badan Keuangan dan Aset Daerah	317.733.547,00	310.483.674,47	7.249.872,53	2,34
	- Kecamatan Bogor Selatan	93.545.205,00	85.073.770,49	8.471.434,51	9,96
	Jumlah Beban Dibayar Dimuka	**505.228.167,24**	**515.022.118,72**	**(9.793.951,48)**	**(1,90)**

(Rincian disajikan pada Lampiran 6)

5.3.1.1.6 Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar berupa barang pakai habis dan barang tak habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan menggambarkan nilai persediaan yang dimiliki/dikuasai oleh Kota Bogor per 31 Desember 2024 dan 2023. Saldo Persediaan Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp49.525.803.484,97 dan Rp59.870.448.656,74. Saldo Persediaan 2024 mengalami penurunan sebesar Rp10.344.645.171,77 atau 17,28% dibandingkan tahun 2023. Pada

tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp305.417.863.071,43 dan pengurangan persediaan sebesar Rp315.762.508.243,20.

Tabel 5.3.38
Rincian Persediaan

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	**Bahan**						
	Bahan Bangunan Dan Konstruksi	1.079.895.169,71	25.036.091.971,00	25.255.989.935,60	859.997.205,11	(219.897.964,60)	(20,36)
	Bahan Kimia	597.343.681,32	3.892.103.310,01	4.240.793.964,11	248.653.027,22	(348.690.654,10)	(58,37)
	Bahan Bakar Dan Pelumas	579.834.009,00	780.236.900,00	711.870.869,00	648.200.040,00	68.366.031,00	11,79
	Bahan Baku	35.417.606,00	7.952.000,00	27.089.606,00	16.280.000,00	(19.137.606,00)	(54,03)
	Bahan/Bibit Tanaman	7.483.539,00	1.560.021.013,00	1.547.047.872,00	20.456.680,00	12.973.141,00	173,36
	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	47.371.879,01	47.371.879,01	-	-	0,00
	Isi Tabung Gas	-	49.444.000,00	47.734.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	100,00
	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-	84.456.100,00	84.456.100,00	-	-	0,00
	Bahan Lainnya	10.202.073.979,09	12.811.226.628,72	17.772.099.519,78	5.241.201.088,03	(4.960.872.891,06)	(48,63)
	Bahan	**12.502.047.984,12**	**44.268.903.801,74**	**49.734.453.745,50**	**7.036.498.040,36**	**(5.465.549.943,76)**	**(43,72)**
2	**Suku Cadang**						
	Suku Cadang Alat Angkutan	385.304.500,00	4.782.220.772,00	3.936.155.822,00	1.231.369.450,00	846.064.950,00	219,58
	Suku Cadang Alat Besar	-	1.007.446.900,00	1.005.456.300,00	1.990.600,00	1.990.600,00	100,00
	Suku Cadang Alat Kedokteran	11.819.526,00	95.745.452,00	72.170.964,00	35.394.014,00	23.574.488,00	199,45
	Suku Cadang Alat Laboratorium	-	201.538.220,00	201.538.220,00	-	-	0,00
	Suku Cadang Alat Pertanian	91.573.388,00	492.945.500,00	468.614.002,00	115.904.886,00	24.331.498,00	26,57
	Suku Cadang Alat Bengkel	-	6.096.600,00	6.096.600,00	-	-	0,00
	Suku Cadang Lainnya	5.550.000,00	103.451.821,00	104.123.207,00	4.878.614,00	(671.386,00)	(12,10)
	Suku Cadang	**494.247.414,00**	**6.689.445.265,00**	**5.794.155.115,00**	**1.389.537.564,00**	**895.290.150,00**	**181,14**
3	**Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor**						
	Alat Tulis Kantor	3.399.486.043,70	14.571.006.309,46	15.016.019.073,05	2.954.473.280,11	(445.012.763,59)	(13,09)
	Kertas Dan Cover	378.300.235,29	4.815.123.058,31	4.785.570.596,60	407.852.697,00	29.552.461,71	7,81
	Bahan Cetak	53.808.635,00	1.319.717.355,00	1.157.688.907,00	215.837.083,00	162.028.448,00	301,12
	Benda Pos	6.100.000,00	88.779.940,00	90.134.440,00	4.745.500,00	(1.354.500,00)	(22,20)
	Bahan Komputer	704.416.792,00	7.586.368.427,00	6.751.188.535,00	1.539.596.684,00	835.179.892,00	118,56
	Perabot Kantor	396.040.108,60	6.483.607.618,55	6.038.145.085,44	841.502.641,71	445.462.533,11	112,48
	Alat Listrik	1.769.953.579,46	13.717.513.588,01	12.000.252.318,97	3.487.214.848,50	1.717.261.269,04	97,02
	Perlengkapan Dinas	-	5.244.817.741,00	4.723.251.241,00	521.566.500,00	521.566.500,00	100,00
	Perlengkapan Pendukung Olah Raga	25.540.616,00	1.523.494.405,60	1.546.809.891,60	2.225.130,00	(23.315.486,00)	(91,29)
	Suvenir/Cendera Mata	26.327.285,00	1.119.672.150,00	1.077.740.535,00	68.258.900,00	41.931.615,00	159,27
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	484.740.847,96	3.565.060.058,54	3.420.674.853,13	629.126.053,37	144.385.205,41	29,79
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	**7.244.714.143,01**	**60.035.160.651,47**	**56.607.475.476,79**	**10.672.399.317,69**	**3.427.685.174,68**	**47,31**
4	**Obat-Obatan**						
	Obat	14.728.805.362,40	98.506.815.746,43	94.461.863.207,86	18.773.757.900,97	4.044.952.538,57	27,46
	Obat-Obatan Lainnya	4.780.887.638,31	64.000.364.750,05	60.936.387.381,73	7.844.865.006,63	3.063.977.368,32	64,09
	Obat-Obatan	**19.509.693.000,71**	**162.507.180.496,48**	**155.398.250.589,59**	**26.618.622.907,60**	**7.108.929.906,89**	**36,44**
5	**Persediaan untuk Dijual/Diserahkan**						0,00
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	19.996.823.518,90	16.538.197.207,00	35.292.823.523,84	1.242.197.202,06	(18.754.626.316,84)	(93,79)
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	**19.996.823.518,90**	**16.538.197.207,00**	**35.292.823.523,84**	**1.242.197.202,06**	**(18.754.626.316,84)**	**(93,79)**
6	**Natura dan Pakan**						
	Natura	10.759.076,00	14.825.037.979,74	12.395.032.762,48	2.440.764.293,26	2.430.005.217,26	22.585,63
	Pakan	-	180.019.250,00	180.019.250,00	-	-	0,00
	Natura dan Pakan	**10.759.076,00**	**15.005.057.229,74**	**12.575.052.012,48**	**2.440.764.293,26**	**2.430.005.217,26**	**22.585,63**
7	**Komponen**						
	Komponen Peralatan	112.163.520,00	367.053.650,00	357.941.170,00	121.276.000,00	9.112.480,00	8,12
	Komponen Lainnya	-	6.864.770,00	2.356.610,00	4.508.160,00	4.508.160,00	100,00
	Komponen	**112.163.520,00**	**373.918.420,00**	**360.297.780,00**	**125.784.160,00**	**13.620.640,00**	**12,14**
-	**JUMLAH PERSEDIAAN**	**59.870.448.656,74**	**305.417.863.071,43**	**315.762.508.243,20**	**49.525.803.484,97**	**(10.344.645.171,77)**	**(17,28)**

Penambahan dan Pengurangan Persediaan Kota Bogor selama tahun 2024, terdiri dari:

1. Penambahan yang merupakan perolehan persediaan melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dan perolehan lain yang sah seperti hibah
2. Penggunaan persediaan untuk kegiatan operasional dan diserahkan kepada masyarakat
3. Perpindahan persediaan antar Perangkat Daerah
4. Reklasifikasi persediaan antar jenis sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Koreksi atas pencatatan Persediaan sebelumnya

Rincian Persediaan pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.39
Persediaan per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	769.724.291,46	16.701.356.862,61	17.143.246.190,40	327.834.963,67	(441.889.327,79)	(57,41)
2	Dinas Kesehatan	18.715.749.962,39	98.090.465.545,48	91.718.161.816,86	25.088.053.691,01	6.372.303.728,62	34,05
3	Rumah Sakit Umum Daerah	611.920.340,49	3.543.635.119,20	3.152.862.518,83	1.002.692.940,86	390.772.600,37	63,86
4	Rumah Sakit Umum Daerah-BLUD	11.838.132.719,19	97.208.193.783,16	99.431.216.630,45	9.615.109.871,90	(2.223.022.847,29)	(18,78)
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	875.498.553,00	27.084.753.428,00	27.356.454.382,00	603.797.599,00	(271.700.954,00)	(31,03)
6	Dinas Perumahan Dan Permukiman	19.977.143.396,91	4.852.072.863,00	24.202.562.873,91	626.653.386,00	(19.350.490.010,91)	(96,86)
7	Satuan Polisi Pamong Praja	3.629.100,00	1.727.228.450,00	1.723.236.050,00	7.621.500,00	3.992.400,00	110,01
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.253.100,00	801.422.720,00	649.100.310,00	153.575.510,00	152.322.410,00	12.155,65
9	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	10.219.500,00	619.952.903,00	555.645.153,00	74.527.250,00	64.307.750,00	629,27
10	Dinas Sosial	205.522.507,00	2.509.243.477,00	1.846.431.117,00	868.334.867,00	662.812.360,00	322,50
11	Dinas Tenaga Kerja	15.782.313,00	2.403.412.515,00	2.373.666.478,00	45.528.350,00	29.746.037,00	188,48
12	Dinas Lingkungan Hidup	1.833.194.228,61	10.376.274.768,79	8.256.867.272,34	3.952.601.725,06	2.119.407.496,45	115,61
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	301.794.295,00	4.098.873.248,00	3.388.373.216,00	1.012.294.327,00	710.500.032,00	235,43
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	55.748.988,00	198.402.700,00	231.047.938,00	23.103.750,00	(32.645.238,00)	(58,56)
15	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	289.854.476,00	737.286.952,00	670.301.378,00	356.840.050,00	66.985.574,00	23,11
16	Dinas Perhubungan	2.354.736.975,50	8.792.875.169,00	7.711.897.898,50	3.435.714.246,00	1.080.977.270,50	45,91
17	Dinas Komunikasi Dan Informatika	2.412.200,00	434.363.630,00	434.971.545,00	1.804.285,00	(607.915,00)	(25,20)
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	255.500,00	554.850.060,00	547.011.960,00	8.093.600,00	7.838.100,00	3.067,75
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.671.500,00	106.487.300,00	109.135.500,00	1.023.300,00	(2.648.200,00)	(72,13)
20	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	1.848.900,00	1.399.322.795,00	1.400.625.195,00	546.500,00	(1.302.400,00)	(70,44)
21	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	2.185.100,00	72.635.600,00	72.310.200,00	2.510.500,00	325.400,00	14,89
22	Dinas Arsip Dan Perpustakaan	1.614.000,00	279.242.500,00	280.856.500,00	0,00	(1.614.000)	(100,00)
23	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	2.058.600,00	7.492.547.585,00	7.487.617.885,00	6.988.300,00	4.929.700,00	239,47
24	Sekretariat Daerah	58.265.400,00	5.733.671.211,00	5.735.455.038,00	56.481.573,00	(1.783.827,00)	(3,06)
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	24.588.166,61	1.367.027.679,00	1.308.909.605,61	82.706.240,00	58.118.073,39	236,37
26	Kecamatan Bogor Selatan	11.991.350,00	2.748.813.516,00	2.730.393.726,00	30.411.140,00	18.419.790,00	153,61
27	Kecamatan Bogor Timur	35.133.600,00	507.292.125,00	411.651.025,00	130.774.700,00	95.641.100,00	272,22
28	Kecamatan Bogor Tengah	33.977.500,00	461.227.200,00	416.411.700,00	78.793.000,00	44.815.500,00	131,90
29	Kecamatan Bogor Barat	1.300.800,00	561.046.185,00	561.041.485,00	1.305.500,00	4.700,00	0,36
30	Kecamatan Bogor Utara	46.622.300,00	263.539.400,00	209.585.900,00	100.575.800,00	53.953.500,00	115,72
31	Kecamatan Tanah Sareal	48.454.289,66	592.917.744,01	552.713.789,67	88.658.244,00	40.203.954,34	82,97
32	Inspektorat	67.753.447,00	138.654.300,00	170.844.522,00	35.563.225,00	(32.190.222,00)	(47,51)
33	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	5.784.610,00	116.634.953,00	122.212.468,00	207.095,00	(5.577.515,00)	(96,42)
34	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	191.273.372,50	749.121.163,18	602.887.491,51	337.507.044,17	146.233.671,67	76,45
35	Badan Pendapatan Daerah	1.405.542.389,42	1.316.005.921,00	1.424.342.049,12	1.297.206.261,30	(108.336.128,12)	(7,71)
36	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	64.932.885,00	310.558.700,00	307.352.435,00	68.139.150,00	3.206.265,00	4,94
37	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	878.000,00	466.453.000,00	465.107.000,00	2.224.000,00	1.346.000,00	153,30
	Jumlah	**59.870.448.656,74**	**305.417.863.071,43**	**315.762.508.243,20**	**49.525.803.484,97**	**(10.344.645.171,77)**	**(17,28)**

Persediaan Kota Bogor Periode Januari – Desember 2024 pada umumnya diperoleh melalui pembelian (belanja) dan dikeluarkan sebagai penggunaan perangkat daerah. Terdapat penerimaan dan pengeluaran persediaan yang berasal dari sumber lainnya sebagai berikut:

I. Penerimaan Persediaan dari Hibah:
   a. Dinas Kesehatan
      - Bahan Lainnya sebesar Rp3.964.919.375,08
      - Alat Tulis Kantor sebesar Rp138.888.000,00
      - Obat sebesar Rp27.019.391.962,10
   b. Rumah Sakit Umum Daerah
      - Bahan Lainnya sebesar Rp1.140.900,00
      - Obat sebesar Rp78.429.252,20
      - Obat-Obatan Lainnya sebesar Rp22.452.910,94
   c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
      - Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp32.940.000,00
   d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
      - Alat Tulis Kantor sebesar Rp1.298.728.523,00
   e. Terdapat Hibah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
      - Obat sebesar 434.994.894,00

II. Penerimaan Persediaan Mutasi Masuk:
   a. Rumah Sakit Umum Daerah
      - Bahan Lainnya sebesar Rp624.531.368,81
      - Obat pada sebesar Rp2.618.570.687,25
      - Obat-Obatan Lainnya sebesar Rp198.510.000,00

III. Penerimaan Persediaan melalui Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa Lainnya:
   a. Dinas Kesehatan
      - Bahan Lainnya sebesar Rp450.300,00
      - Suku Cadang Alat Kedokteran sebesar Rp788.540,00
      - Suku Cadang Alat Laboratorium sebesar Rp51.846.220,00
      - Bahan Komputer sebesar Rp1.043.400,00
   b. Dinas Tenaga Kerja
      - Perlengkapan Dinas sebesar Rp84.609.000,00
   c. Badan Keuangan dan Aset Daerah
      - Perlengkapan Dinas sebesar Rp59.615.880,00

IV. Penerimaan Persediaan melalui Reklasifikasi dari Aset Tetap:
   a. Dinas Pendidikan
      - Bahan Komputer sebesar Rp4.677.000,00
   b. Dinas Kesehatan
      - Suku Cadang Alat Kedokteran sebesar Rp18.000.000,00
   c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
      - Perlengkapan Dinas sebesar Rp31.500.000,00
   d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
      - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp5.894.100,00
   e. Sekretariat Daerah
      - Bahan Komputer sebesar Rp18.200.000,00
   f. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
      - Alat Listrik sebesar Rp48.000.000,00
   g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
      - Perlengkapan Dinas sebesar Rp63.005.000,00

V. Pengeluaran Persediaan Mutasi Keluar:
   a. Dinas Kesehatan
      - Bahan Lainnya sebesar Rp624.531.368,81
      - Obat pada sebesar Rp2.618.570.687,25
      - Obat-Obatan Lainnya sebesar Rp198.510.000,00

VI. Pengeluaran Persediaan Reklasifikasi ke Aset Tetap:
   a. Badan Pendapatan Daerah
      - Perabot Kantor sebesar Rp2.950.000,00
      - Alat Listrik sebesar Rp168.331.500,00
   b. Dinas Sosial
      - Alat Listrik sebesar Rp41.152.000,00

VII. Penyesuaian Reklasifikasi Kode Barang:
   a. Rumah Sakit Umum Daerah-BLUD
      - Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar -Rp77.940.130,00
      - Bahan Lainnya sebesar Rp58.058.819,00
      - Alat Tulis Kantor sebesar -Rp113.129.696,00
      - Bahan Cetak sebesar Rp113.129.696,00
      - Perabot Kantor sebesar -Rp58.058.819,00
      - Alat Listrik sebesar Rp60.084.746,50
      - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp17.855.383,50

VIII. Penyesuaian atau Koreksi Saldo Awal akibat Kesalahan Sistem:

a. Dinas Pendidikan
   - Alat Tulis Kantor sebesar Rp6.620.915,00
   - Kertas dan Cover sebesar Rp2.522.180,00
   - Bahan Komputer sebesar Rp1.835.000,00
   - Perabot Kantor sebesar Rp914.994,00
   - Alat Listrik sebesar Rp212.999,00
   - Perlengkapan Pendukung Olahraga sebesar Rp600.000,00
   - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp1.254.000,00

b. Dinas Kesehatan
   - Bahan Lainnya sebesar -Rp0,01
   - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar -Rp0,03
   - Obat sebesar -Rp0,01

c. Dinas Tenaga Kerja
   - Alat Tulis Kantor sebesar Rp1.086.187,00

d. Kecamatan Bogor Utara
   - Alat Tulis Kantor sebesar Rp121.000,00
   - Kertas dan Cover sebesar Rp51.000,00
   - Bahan Komputer sebesar Rp333.000,00
   - Perabot Kantor sebesar Rp45.500,00
   - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp174.500,00

e. Kecamatan Tanah Sareal
   - Alat Tulis Kantor sebesar -Rp0,01

f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
   - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp5.894.100,00

g. Sekretariat Daerah
   - Bahan Komputer sebesar Rp18.200.000,00

h. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
   - Alat Listrik sebesar Rp48.000.000,00

i. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
   - Perlengkapan Dinas sebesar Rp63.005.000,00

5.3.1.1.6.1 Bahan Bangunan dan Konstruksi

Saldo Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp859.997.205,11 dan Rp1.079.895.169,71. Saldo Persediaan 2024 mengalami penurunan nilai sebesar Rp219.897.964,60 atau 20,36% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp25.036.091.971,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp25.255.989.935,60. Rincian Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.40
Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	444.555,00	120.982.472,00	120.650.777,00	776.250,00	331.695,00	74,61
2	Rumah Sakit Umum Daerah-BLUD	229.179.476,00	470.712.498,00	579.982.917,89	119.909.056,11	(109.270.419,89)	(47,68)
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	744.675.581,00	23.895.301.901,00	24.063.295.333,00	576.682.149,00	(167.993.432,00)	(22,56)
4	Dinas Perumahan Dan Permukiman	0,00	360.039.500,00	311.329.900,00	48.709.600,00	48.709.600,00	100,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	3.663.000,00	3.663.000,00	0,00	-	0,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	30.402.767,71	143.247.600,00	111.875.167,71	61.775.200,00	31.372.432,29	103,19
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	787.800,00	787.800,00	0,00	-	0,00
8	Dinas Perhubungan	75.192.790,00	0,00	23.047.840,00	52.144.950,00	(23.047.840,00)	(30,65)
9	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	38.067.200,00	38.067.200,00	0,00	-	0,00
10	Badan Pendapatan Daerah	0,00	3.290.000,00	3.290.000,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	**1.079.895.169,71**	**25.036.091.971,00**	**25.255.989.935,60**	**859.997.205,11**	**(219.897.964,60)**	**(20,36)**

5.3.1.1.6.2 Bahan Kimia

Saldo Persediaan Bahan Kimia Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp248.653.027,22 dan Rp597.343.681,32. Saldo Persediaan 2024 mengalami penurunan nilai sebesar Rp348.690.654,10 atau 58,37% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp3.892.103.310,01 dan pengurangan persediaan sebesar Rp4.240.793.964,11. Rincian Persediaan Bahan Kimia pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.41
Persediaan Bahan Kimia per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	99.900,00	41.282.050,00	40.871.950,00	510.000,00	410.100,00	410,51
2	Dinas Kesehatan	597.243.781,32	2.452.327.192,01	2.837.148.352,11	212.422.621,22	(384.821.160,10)	(64,43)
3	Rumah Sakit Umum Daerah-BLUD	0,00	551.190.078,00	515.469.672,00	35.720.406,00	35.720.406,00	100,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	132.503.475,00	132.503.475,00	0,00	-	0,00
5	Dinas Perumahan Dan Permukiman	0,00	20.066.500,00	20.066.500,00	0,00	-	0,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	117.995.220,00	117.995.220,00	0,00	-	0,00
7	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	0,00	548.273.995,00	548.273.995,00	0,00	-	0,00
8	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	28.464.800,00	28.464.800,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	**597.343.681,32**	**3.892.103.310,01**	**4.240.793.964,11**	**248.653.027,22**	**(348.690.654,10)**	**(58,37)**

5.3.1.1.6.3 Bahan Bakar dan Pelumas

Saldo Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp648.200.040,00 dan Rp579.834.009,00. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp68.366.031,00 atau 11,79% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp780.236.900,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp711.870.869,00. Rincian Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.42
Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	164.280.000,00	164.280.000,00	0,00	-	0,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	579.834.009,00	606.875.000,00	538.508.969,00	648.200.040,00	68.366.031,00	11,79
3	Sekretariat Daerah	0,00	9.081.900,00	9.081.900,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	**579.834.009,00**	**780.236.900,00**	**711.870.869,00**	**648.200.040,00**	**68.366.031,00**	**11,79**

5.3.1.1.6.4 Bahan Baku

Saldo Persediaan Bahan Baku Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp16.280.000,00 dan Rp35.417.606,00. Saldo Persediaan 2024 mengalami penurunan nilai sebesar Rp19.137.606,00 atau 54,03% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp7.952.000,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp27.089.606,00. Rincian Persediaan Bahan Baku pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.43
Persediaan Bahan Baku per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Sosial	35.417.606,00	7.952.000,00	27.089.606,00	16.280.000,00	(19.137.606,00)	(54,03)
	Jumlah	**35.417.606,00**	**7.952.000,00**	**27.089.606,00**	**16.280.000,00**	**(19.137.606,00)**	**(54,03)**

5.3.1.1.6.5 Bahan/Bibit Tanaman

Saldo Persediaan Bahan/Bibit Tanaman Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp20.456.680,00 dan Rp7.483.539,00. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp12.973.141,00 atau 173,36% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp1.560.021.013,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp1.547.047.872,00. Rincian Persediaan Bahan/Bibit Tanaman pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.44
Persediaan Bahan/Bibit Tanaman per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	246.450,00	77.467.820,00	77.224.270,00	490.000,00	243.550,00	98,82
2	Dinas Perumahan Dan Permukiman	0,00	1.249.108.993,00	1.229.142.313,00	19.966.680,00	19.966.680,00	100,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	7.237.089,00	44.861.900,00	52.098.989,00	0,00	(7.237.089,00)	(100,00)
4	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	188.582.300,00	188.582.300,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	**7.483.539,00**	**1.560.021.013,00**	**1.547.047.872,00**	**20.456.680,00**	**12.973.141,00**	**173,36**

5.3.1.1.6.6 Isi Tabung Pemadam Kebakaran

Saldo Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Persediaan 2024 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp47.371.879,01 dan pengurangan persediaan sebesar Rp47.371.879,01. Rincian Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.45
Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Kesehatan	0,00	926.699,01	926.699,01	0,00	-	0,00
2	Dinas Perumahan Dan Permukiman	0,00	46.445.180,00	46.445.180,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	**0,00**	**47.371.879,01**	**47.371.879,01**	**0,00**	**-**	**0,00**

5.3.1.1.6.7 Isi Tabung Gas

Saldo Persediaan Isi Tabung Gas Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.710.000,00 dan Rp0,00. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp1.710.000,00 atau 100,00% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp49.444.000,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp47.734.000,00. Rincian Persediaan Isi Tabung Gas pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.46
Persediaan Isi Tabung Gas per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Kesehatan	0,00	1.435.000,00	835.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah-BLUD	0,00	40.404.000,00	39.294.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	100,00
3	Dinas Tenaga Kerja	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-	0,00
4	Sekretariat Daerah	0,00	3.255.000,00	3.255.000,00	0,00	-	0,00
5	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	**0,00**	**49.444.000,00**	**47.734.000,00**	**1.710.000,00**	**1.710.000,00**	**100,00**

5.3.1.1.6.8 Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan

Saldo Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Persediaan 2024 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp84.456.100,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp84.456.100,00. Rincian Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.47
Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	84.456.100,00	84.456.100,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	**0,00**	**84.456.100,00**	**84.456.100,00**	**0,00**	**-**	**0,00**

5.3.1.1.6.9 Bahan Lainnya

Saldo Persediaan Bahan Lainnya Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.241.201.088,03 dan Rp10.202.073.979,09. Saldo Persediaan 2024 mengalami penurunan nilai sebesar Rp4.960.872.891,06 atau 48,63% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp12.811.226.628,72 dan pengurangan persediaan sebesar Rp17.772.099.519,78. Rincian Persediaan Bahan Lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.48
Persediaan Bahan Lainnya per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	10.885.577,00	199.682.621,00	209.455.298,00	1.112.900,00	(9.772.677,00)	(89,78)
2	Dinas Kesehatan	9.742.427.587,09	10.782.211.619,91	15.678.986.683,94	4.845.652.523,06	(4.896.775.064,03)	(50,26)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	367.623.677,00	625.672.268,81	823.811.558,59	169.484.387,22	(198.139.289,78)	(53,90)
4	Rumah Sakit Umum Daerah-BLUD	0,00	1.200.185.819,00	998.381.995,25	201.803.823,75	201.803.823,75	100,00
5	Dinas Sosial	22.986.468,00	0,00	12.145.616,00	10.840.852,00	(12.145.616,00)	(52,84)
6	Dinas Lingkungan Hidup	30.641.000,00	0,00	30.641.000,00	0,00	(30.641.000,00)	(100,00)
7	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	27.509.670,00	0,00	15.203.068,00	12.306.602,00	(15.203.068,00)	(55,26)
8	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	3.474.300,00	3.474.300,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	**10.202.073.979,09**	**12.811.226.628,72**	**17.772.099.519,78**	**5.241.201.088,03**	**(4.960.872.891,06)**	**(48,63)**

5.3.1.1.6.10 Suku Cadang Alat Angkutan

Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.231.369.450,00 dan Rp385.304.500,00. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp846.064.950,00 atau 219,58% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp4.782.220.772,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp3.936.155.822,00. Rincian Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.49
Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	905.421.672,00	905.421.672,00	0,00	-	0,00
2	Dinas Perumahan Dan Permukiman	0,00	80.370.000,00	61.770.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	100,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	385.304.500,00	3.090.575.300,00	2.263.110.350,00	1.212.769.450,00	827.464.950,00	214,76
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	49.015.800,00	49.015.800,00	0,00	-	0,00
5	Sekretariat Daerah	0,00	656.838.000,00	656.838.000,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	**385.304.500,00**	**4.782.220.772,00**	**3.936.155.822,00**	**1.231.369.450,00**	**846.064.950,00**	**219,58**

5.3.1.1.6.11 Suku Cadang Alat Besar

Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Besar Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.990.600,00 dan Rp0,00. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp1.990.600,00 atau 100,00% dibandingkan

tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp1.007.446.900,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp1.005.456.300,00. Rincian Persediaan Suku Cadang Alat Besar pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.50
Persediaan Suku Cadang Alat Besar per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	1.007.446.900,00	1.005.456.300,00	1.990.600,00	1.990.600,00	100,00
	Jumlah	**0,00**	**1.007.446.900,00**	**1.005.456.300,00**	**1.990.600,00**	**1.990.600,00**	**100,00**

5.3.1.1.6.12 Suku Cadang Alat Kedokteran

Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp35.394.014,00 dan Rp11.819.526,00. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp23.574.488,00 atau 199,45% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp95.745.452,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp72.170.964,00. Rincian Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.51
Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Kesehatan	11.819.526,00	64.444.452,00	72.170.964,00	4.093.014,00	(7.726.512,00)	(65,37)
2	Kecamatan Bogor Timur	0,00	31.301.000,00	0,00	31.301.000,00	31.301.000,00	100,00
	Jumlah	**11.819.526,00**	**95.745.452,00**	**72.170.964,00**	**35.394.014,00**	**23.574.488,00**	**199,45**

5.3.1.1.6.13 Suku Cadang Alat Laboratorium

Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Persediaan 2024 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp201.538.220,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp201.538.220,00. Rincian Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.52
Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Kesehatan	0,00	56.196.220,00	56.196.220,00	0,00	-	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	132.830.000,00	132.830.000,00	0,00	-	0,00
3	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	12.512.000,00	12.512.000,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	**0,00**	**201.538.220,00**	**201.538.220,00**	**0,00**	**-**	**0,00**

5.3.1.1.6.14 Suku Cadang Alat Pertanian

Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Pertanian Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp115.904.886,00 dan Rp91.573.388,00. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp24.331.498,00 atau 26,57% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp492.945.500,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp468.614.002,00. Rincian Persediaan Suku Cadang Alat Pertanian pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.53
Persediaan Suku Cadang Alat Pertanian per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	368.736.450,00	368.736.450,00	0,00	-	0,00
2	Dinas Perumahan Dan Permukiman	38.912.738,00	0,00	27.175.052,00	11.737.686,00	(27.175.052,00)	(69,84)
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	6.358.050,00	6.358.050,00	0,00	-	0,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	52.660.650,00	115.652.000,00	64.145.450,00	104.167.200,00	51.506.550,00	97,81
5	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	2.199.000,00	2.199.000,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	**91.573.388,00**	**492.945.500,00**	**468.614.002,00**	**115.904.886,00**	**24.331.498,00**	**26,57**

5.3.1.1.6.15 Suku Cadang Alat Bengkel

Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Bengkel Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Persediaan 2024 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp6.096.600,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp6.096.600,00. Rincian Persediaan Suku Cadang Alat Bengkel pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.54
Persediaan Suku Cadang Alat Bengkel per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Badan Pendapatan Daerah	0,00	6.096.600,00	6.096.600,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	**0,00**	**6.096.600,00**	**6.096.600,00**	**0,00**	**-**	**0,00**

5.3.1.1.6.16 Suku Cadang Lainnya

Saldo Persediaan Suku Cadang Lainnya Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.878.614,00 dan Rp5.550.000,00. Saldo Persediaan 2024 mengalami penurunan nilai sebesar Rp671.386,00 atau 12,10% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp103.451.821,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp104.123.207,00. Rincian Persediaan Suku Cadang Lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.55
Persediaan Suku Cadang Lainnya per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Kesehatan	0,00	17.489.536,00	12.610.922,00	4.878.614,00	4.878.614,00	100,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00	0,00	(5.550.000,00)	(100,00)
3	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	85.962.285,00	85.962.285,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	**5.550.000,00**	**103.451.821,00**	**104.123.207,00**	**4.878.614,00**	**(671.386,00)**	**(12,10)**

5.3.1.1.6.17 Alat Tulis Kantor

Saldo Persediaan Alat Tulis Kantor Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.954.473.280,11 dan Rp3.399.486.043,70. Saldo Persediaan 2024 mengalami penurunan nilai sebesar Rp445.012.763,59 atau 13,09% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp14.571.006.309,46 dan pengurangan persediaan sebesar Rp15.016.019.073,05. Rincian Persediaan Alat Tulis Kantor pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.56
Persediaan Alat Tulis Kantor per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	348.870.110,34	5.652.701.723,10	5.881.987.454,44	119.584.379,00	(229.285.731,34)	(65,72)
2	Dinas Kesehatan	174.861.003,26	2.029.434.437,33	1.871.404.666,45	332.890.774,14	158.029.770,88	90,37
3	Rumah Sakit Umum Daerah-BLUD	345.233.418,00	979.958.233,00	1.107.872.681,00	217.318.970,00	(127.914.448,00)	(37,05)
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	48.993.590,00	182.051.850,00	223.014.040,00	8.031.400,00	(40.962.190,00)	(83,61)
5	Dinas Perumahan Dan Permukiman	10.008.454,91	248.230.200,00	240.792.154,91	17.446.500,00	7.438.045,09	74,32
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.921.800,00	170.425.800,00	168.002.100,00	4.345.500,00	2.423.700,00	126,12
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	118.400,00	33.947.100,00	31.183.200,00	2.882.300,00	2.763.900,00	2.334,38
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.748.000,00	212.611.628,00	190.380.778,00	29.978.850,00	22.230.850,00	286,92
9	Dinas Sosial	8.194.600,00	73.593.600,00	67.602.200,00	14.186.000,00	5.991.400,00	73,11
10	Dinas Tenaga Kerja	5.793.913,00	182.851.287,00	185.285.200,00	3.360.000,00	(2.433.913,00)	(42,01)
11	Dinas Lingkungan Hidup	114.264.232,00	130.430.400,00	119.421.930,00	125.272.702,00	11.008.470,00	9,63
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	295.894.295,00	1.622.290.498,00	1.676.687.266,00	241.497.527,00	(54.396.768,00)	(18,38)
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	13.419.200,00	37.476.000,00	49.441.550,00	1.453.650,00	(11.965.550,00)	(89,17)
14	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	8.413.200,00	72.917.900,00	67.041.700,00	14.289.400,00	5.876.200,00	69,85
15	Dinas Perhubungan	543.240.718,00	19.667.500,00	161.013.935,00	401.894.283,00	(141.346.435,00)	(26,02)
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	154.700,00	25.798.610,00	25.204.510,00	748.800,00	594.100,00	384,03
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	0,00	43.459.100,00	41.982.500,00	1.476.600,00	1.476.600,00	100,00
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	770.500,00	15.738.400,00	16.136.800,00	372.100,00	(398.400,00)	(51,71)
19	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	1.007.600,00	21.580.700,00	22.483.900,00	104.400,00	(903.200,00)	(89,64)
20	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	393.500,00	26.666.600,00	25.037.600,00	2.022.500,00	1.629.000,00	413,98
21	Dinas Arsip Dan Perpustakaan	0,00	91.474.700,00	91.474.700,00	0,00	-	0,00
22	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	987.300,00	21.578.400,00	22.467.900,00	97.800,00	(889.500,00)	(90,09)
23	Sekretariat Daerah	21.700.000,00	996.491.548,00	965.961.275,00	52.230.273,00	30.530.273,00	140,69
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	14.995.066,61	214.256.000,00	225.795.866,61	3.455.200,00	(11.539.866,61)	(76,96)
25	Kecamatan Bogor Selatan	3.409.100,00	201.746.424,00	193.917.724,00	11.237.800,00	7.828.700,00	229,64
26	Kecamatan Bogor Timur	12.701.500,00	104.573.200,00	91.812.200,00	25.462.500,00	12.761.000,00	100,47
27	Kecamatan Bogor Tengah	21.452.100,00	119.766.500,00	118.394.700,00	22.823.900,00	1.371.800,00	6,39
28	Kecamatan Bogor Barat	1.030.000,00	118.310.100,00	119.254.400,00	85.700,00	(944.300,00)	(91,68)
29	Kecamatan Bogor Utara	15.416.300,00	58.898.100,00	49.351.600,00	24.962.800,00	9.546.500,00	61,92
30	Kecamatan Tanah Sareal	14.306.739,66	147.887.219,01	136.581.914,67	25.612.044,00	11.305.304,34	79,02
31	Inspektorat	11.905.900,00	52.617.000,00	49.093.400,00	15.429.500,00	3.523.600,00	29,60
32	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	4.907.960,00	13.927.952,00	18.628.817,00	207.095,00	(4.700.865,00)	(95,78)
33	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	40.333.242,50	105.269.539,02	99.774.719,85	45.828.061,67	5.494.819,17	13,62
34	Badan Pendapatan Daerah	1.269.918.915,42	380.917.861,00	481.815.155,12	1.169.021.621,30	(100.897.294,12)	(7,95)
35	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	37.070.685,00	151.951.200,00	170.470.535,00	18.551.350,00	(18.519.335,00)	(49,96)
36	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	50.000,00	9.509.000,00	9.248.000,00	311.000,00	261.000,00	522,00
	Jumlah	**3.399.486.043,70**	**14.571.006.309,46**	**15.016.019.073,05**	**2.954.473.280,11**	**(445.012.763,59)**	**(13,09)**

5.3.1.1.6.18 Kertas dan Cover

Saldo Persediaan Kertas dan Cover Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp407.852.697,00 dan Rp378.300.235,29. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp29.552.461,71 atau 7,81% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp4.815.123.058,31 dan pengurangan persediaan sebesar Rp4.785.570.596,60. Rincian Persediaan Kertas dan Cover pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.57
Persediaan Kertas dan Cover per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	131.048.264,29	2.393.458.882,31	2.447.257.610,60	77.249.536,00	(53.798.728,29)	(41,05)
2	Dinas Kesehatan	28.571.584,00	200.337.146,00	161.443.174,00	67.465.556,00	38.893.972,00	136,13
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	20.811.769,00	172.735.000,00	185.794.419,00	7.752.350,00	(13.059.419,00)	(62,75)
4	Dinas Perumahan Dan Permukiman	8.162.618,00	113.179.900,00	98.017.018,00	23.325.500,00	15.162.882,00	185,76
5	Satuan Polisi Pamong Praja	360.000,00	108.907.550,00	108.229.550,00	1.038.000,00	678.000,00	188,33
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	255.500,00	11.396.800,00	11.222.300,00	430.000,00	174.500,00	68,30
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.471.500,00	162.751.675,00	127.608.975,00	37.614.200,00	35.142.700,00	1.421,92
8	Dinas Sosial	7.577.500,00	51.675.200,00	31.991.800,00	27.260.900,00	19.683.400,00	259,76
9	Dinas Tenaga Kerja	5.212.200,00	36.695.800,00	18.737.200,00	23.170.800,00	17.958.600,00	344,55
10	Dinas Lingkungan Hidup	21.741.850,00	89.506.000,00	105.590.520,00	5.657.330,00	(16.084.520,00)	(73,98)
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.900.000,00	20.585.000,00	26.335.000,00	150.000,00	(5.750.000,00)	(97,46)
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.585.000,00	33.361.400,00	36.946.400,00	0,00	(3.585.000,00)	(100,00)
13	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	717.000,00	717.000,00	0,00	-	0,00
14	Dinas Perhubungan	40.486.200,00	66.129.000,00	91.617.150,00	14.998.050,00	(25.488.150,00)	(62,96)
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	870.000,00	18.936.350,00	19.806.350,00	0,00	(870.000,00)	(100,00)
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	255.500,00	47.752.200,00	44.483.300,00	3.524.400,00	3.268.900,00	1.279,41
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	664.300,00	23.831.600,00	24.059.100,00	436.800,00	(227.500,00)	(34,25)
18	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	255.500,00	17.219.000,00	17.325.300,00	149.200,00	(106.300,00)	(41,60)
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	306.600,00	18.450.000,00	18.366.600,00	390.000,00	83.400,00	27,20
20	Dinas Arsip Dan Perpustakaan	1.614.000,00	25.980.000,00	27.594.000,00	0,00	(1.614.000)	(100,00)
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	20.094.200,00	19.536.200,00	558.000,00	558.000,00	100,00
22	Sekretariat Daerah	33.968.000,00	263.803.700,00	295.118.800,00	2.652.900,00	(31.315.100,00)	(92,19)
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.425.000,00	199.400.000,00	195.931.000,00	4.894.000,00	3.469.000,00	243,44
24	Kecamatan Bogor Selatan	3.645.700,00	142.151.110,00	137.239.010,00	8.557.800,00	4.912.100,00	134,74
25	Kecamatan Bogor Timur	7.103.000,00	79.107.600,00	79.381.500,00	6.829.100,00	(273.900,00)	(3,86)
26	Kecamatan Bogor Tengah	2.047.000,00	50.398.400,00	42.417.400,00	10.028.000,00	7.981.000,00	389,89
27	Kecamatan Bogor Barat	270.800,00	112.182.000,00	111.233.000,00	1.219.800,00	949.000,00	350,44
28	Kecamatan Bogor Utara	8.911.500,00	60.226.700,00	42.923.000,00	26.215.200,00	17.303.700,00	194,17
29	Kecamatan Tanah Sareal	8.985.150,00	94.625.700,00	88.191.650,00	15.419.200,00	6.434.050,00	71,61
30	Inspektorat	10.234.500,00	28.913.000,00	30.105.900,00	9.041.600,00	(1.192.900,00)	(11,66)
31	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	403.050,00	22.921.195,00	23.324.245,00	0,00	(403.050,00)	(100,00)
32	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	16.780.450,00	22.743.750,00	21.653.000,00	17.871.200,00	1.090.750,00	6,50
33	Badan Pendapatan Daerah	2.790.000,00	67.544.900,00	58.328.425,00	12.006.475,00	9.216.475,00	330,34
34	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.586.200,00	30.905.300,00	30.674.700,00	1.816.800,00	230.600,00	14,54
35	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	6.500.000,00	6.370.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
	Jumlah	**378.300.235,29**	**4.815.123.058,31**	**4.785.570.596,60**	**407.852.697,00**	**29.552.461,71**	**7,81**

5.3.1.1.6.19 Bahan Cetak

Saldo Persediaan Bahan Cetak Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp215.837.083,00 dan Rp53.808.635,00. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp162.028.448,00 atau 301,12% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp1.319.717.355,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp1.157.688.907,00. Rincian Persediaan Bahan Cetak pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.58
Persediaan Bahan Cetak per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	0,00	53.807.425,00	53.807.425,00	0,00	-	0,00
2	Dinas Kesehatan	52.483.635,00	207.352.439,00	246.327.674,00	13.508.400,00	(38.975.235,00)	(74,26)
3	Rumah Sakit Umum Daerah-BLUD	0,00	811.228.791,00	614.778.908,00	196.449.883,00	196.449.883,00	100,00
4	Dinas Perumahan Dan Permukiman	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	0,00	(1.325.000,00)	(100,00)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	-	0,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	43.830.000,00	37.951.200,00	5.878.800,00	5.878.800,00	100,00
7	Dinas Arsip Dan Perpustakaan	0,00	6.449.100,00	6.449.100,00	0,00	-	0,00
8	Sekretariat Daerah	0,00	170.349.600,00	170.349.600,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	**53.808.635,00**	**1.319.717.355,00**	**1.157.688.907,00**	**215.837.083,00**	**162.028.448,00**	**301,12**

5.3.1.1.6.20 Benda Pos

Saldo Persediaan Benda Pos Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.745.500,00 dan Rp6.100.000,00. Saldo Persediaan 2024 mengalami penurunan nilai sebesar Rp1.354.500,00 atau 22,20% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp88.779.940,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp90.134.440,00. Rincian Persediaan Benda Pos pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.59
Persediaan Benda Pos per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	0,00	8.663.600,00	8.663.600,00	0,00	-	0,00
2	Dinas Kesehatan	660.000,00	17.247.840,00	16.787.840,00	1.120.000,00	460.000,00	69,70
3	Rumah Sakit Umum Daerah-BLUD	0,00	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	-	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	14.190.000,00	13.867.500,00	322.500,00	322.500,00	100,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	50.000,00	6.450.000,00	6.150.000,00	350.000,00	300.000,00	600,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	2.900.000,00	2.400.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
7	Dinas Sosial	1.000.000,00	1.290.000,00	1.387.000,00	903.000,00	(97.000,00)	(9,70)
8	Dinas Lingkungan Hidup	3.220.000,00	0,00	2.870.000,00	350.000,00	(2.870.000,00)	(89,13)
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	1.612.500,00	1.612.500,00	0,00	-	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	830.000,00	645.000,00	1.475.000,00	0,00	(830.000,00)	(100,00)
11	Sekretariat Daerah	0,00	1.256.000,00	1.256.000,00	0,00	-	0,00
12	Kecamatan Bogor Selatan	0,00	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	-	0,00
13	Inspektorat	340.000,00	2.500.000,00	1.640.000,00	1.200.000,00	860.000,00	252,94
14	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	-	0,00
15	Badan Pendapatan Daerah	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	-	0,00
16	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	**6.100.000,00**	**88.779.940,00**	**90.134.440,00**	**4.745.500,00**	**(1.354.500,00)**	**(22,20)**

5.3.1.1.6.21 Bahan Komputer

Saldo Persediaan Bahan Komputer Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.539.596.684,00 dan Rp704.416.792,00. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp835.179.892,00 atau 118,56% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp7.586.368.427,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp6.751.188.535,00. Rincian Persediaan Bahan Komputer pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.60
Persediaan Bahan Komputer per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	125.062.086,00	2.634.647.759,00	2.702.697.745,00	57.012.100,00	(68.049.986,00)	(54,41)
2	Dinas Kesehatan	11.840.650,00	120.753.814,00	104.746.210,00	27.848.254,00	16.007.604,00	135,19
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	40.337.018,00	193.983.000,00	230.287.018,00	4.033.000,00	(36.304.018,00)	(90,00)
4	Dinas Perumahan Dan Permukiman	3.639.579,00	38.513.000,00	32.063.579,00	10.089.000,00	6.449.421,00	177,20
5	Satuan Polisi Pamong Praja	648.500,00	15.720.000,00	16.050.500,00	318.000,00	(330.500,00)	(50,96)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	879.200,00	12.154.200,00	12.143.400,00	890.000,00	10.800,00	1,23
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	51.796.900,00	46.256.900,00	5.540.000,00	5.540.000,00	100,00
8	Dinas Sosial	33.074.300,00	23.754.000,00	20.059.900,00	36.768.400,00	3.694.100,00	11,17
9	Dinas Tenaga Kerja	3.186.200,00	48.665.300,00	41.806.150,00	10.045.350,00	6.859.150,00	215,28
10	Dinas Lingkungan Hidup	9.494.000,00	55.951.700,00	64.328.100,00	1.117.600,00	(8.376.400,00)	(88,23)
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	2.245.667.000,00	1.499.359.200,00	746.307.800,00	746.307.800,00	100,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	34.955.988,00	26.088.700,00	40.577.488,00	20.467.200,00	(14.488.788,00)	(41,45)
13	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	42.842.000,00	42.842.000,00	0,00	-	0,00
14	Dinas Perhubungan	104.125.550,00	50.953.550,00	66.926.750,00	88.152.350,00	(15.973.200,00)	(15,34)
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.387.500,00	145.272.563,00	146.164.063,00	496.000,00	(891.500,00)	(64,25)
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	0,00	24.163.000,00	24.012.900,00	150.100,00	150.100,00	100,00
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.236.700,00	20.760.300,00	22.782.600,00	214.400,00	(2.022.300,00)	(90,41)
18	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	0,00	12.677.500,00	12.677.500,00	0,00	-	0,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1.380.000,00	20.040.000,00	21.420.000,00	0,00	(1.380.000,00)	(100,00)
20	Dinas Arsip Dan Perpustakaan	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	-	0,00
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	440.800,00	16.938.900,00	13.560.700,00	3.819.000,00	3.378.200,00	766,38
22	Sekretariat Daerah	2.597.400,00	169.807.150,00	172.404.550,00	0,00	(2.597.400,00)	(100,00)
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.052.000,00	359.910.000,00	360.027.000,00	1.935.000,00	(117.000,00)	(5,70)
24	Kecamatan Bogor Selatan	2.485.300,00	160.139.000,00	155.278.960,00	7.345.340,00	4.860.040,00	195,55
25	Kecamatan Bogor Timur	6.908.000,00	16.743.600,00	9.854.400,00	13.797.200,00	6.889.200,00	99,73
26	Kecamatan Bogor Tengah	0,00	55.785.500,00	36.922.000,00	18.863.500,00	18.863.500,00	100,00
27	Kecamatan Bogor Barat	0,00	95.249.900,00	95.249.900,00	0,00	-	0,00
28	Kecamatan Bogor Utara	6.338.500,00	81.869.600,00	59.084.900,00	29.123.200,00	22.784.700,00	359,47
29	Kecamatan Tanah Sareal	3.605.800,00	166.307.625,00	158.956.325,00	10.957.100,00	7.351.300,00	203,87
30	Inspektorat	15.171.147,00	21.952.800,00	31.088.322,00	6.035.625,00	(9.135.522,00)	(60,22)
31	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	0,00	38.559.606,00	38.559.606,00	0,00	-	0,00
32	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	132.676.700,00	374.596.000,00	234.181.700,00	273.091.000,00	140.414.300,00	105,83
33	Badan Pendapatan Daerah	132.789.874,00	124.455.260,00	141.066.969,00	116.178.165,00	(16.611.709,00)	(12,51)
34	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	26.276.000,00	103.462.200,00	81.967.200,00	47.771.000,00	21.495.000,00	81,80
35	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	828.000,00	15.787.000,00	15.384.000,00	1.231.000,00	403.000,00	48,67
	Jumlah	**704.416.792,00**	**7.586.368.427,00**	**6.751.188.535,00**	**1.539.596.684,00**	**835.179.892,00**	**118,56**

5.3.1.1.6.22 Perabot Kantor

Saldo Persediaan Perabot Kantor Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp841.502.641,71 dan Rp396.040.108,60. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp445.462.533,11 atau 112,48% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp6.483.607.618,55 dan pengurangan persediaan sebesar Rp6.038.145.085,44. Rincian Persediaan Perabot Kantor pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.61
Persediaan Perabot Kantor per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	63.354.409,67	2.541.200.734,60	2.568.410.526,60	36.144.617,67	(27.209.792,00)	(42,95)
2	Dinas Kesehatan	31.060.220,93	880.028.319,00	764.487.269,89	146.601.270,04	115.541.049,11	371,99
3	Rumah Sakit Umum Daerah-BLUD	58.058.819,00	0,00	58.058.819,00	0,00	(58.058.819,00)	(100,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	150.390.100,00	150.390.100,00	0,00	-	0,00
5	Dinas Perumahan Dan Permukiman	7.462.820,00	477.274.200,00	430.767.400,00	53.969.620,00	46.506.800,00	623,18
6	Satuan Polisi Pamong Praja	423.800,00	20.755.100,00	20.088.900,00	1.090.000,00	666.200,00	157,20
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	12.495.000,00	10.265.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	100,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	11.459.500,00	10.065.300,00	1.394.200,00	1.394.200,00	100,00
9	Dinas Sosial	1.525.269,00	17.835.200,00	6.385.500,00	12.974.969,00	11.449.700,00	750,67
10	Dinas Tenaga Kerja	0,00	40.373.800,00	38.362.100,00	2.011.700,00	2.011.700,00	100,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	165.244.970,00	507.320.098,79	206.718.588,79	465.846.480,00	300.601.510,00	181,91
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	10.880.000,00	10.880.000,00	0,00	-	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	18.009.500,00	16.826.600,00	1.182.900,00	1.182.900,00	100,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	19.934.100,00	13.231.200,00	6.702.900,00	6.702.900,00	100,00
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0,00	10.366.857,00	10.239.372,00	127.485,00	127.485,00	100,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	0,00	47.176.300,00	45.470.800,00	1.705.500,00	1.705.500,00	100,00
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	20.584.100,00	20.584.100,00	0,00	-	0,00
18	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	0,00	54.478.500,00	54.355.000,00	123.500,00	123.500,00	100,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0,00	2.499.000,00	2.499.000,00	0,00	-	0,00
20	Dinas Arsip Dan Perpustakaan	0,00	67.995.000,00	67.995.000,00	0,00	-	0,00
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	21.409.300,00	20.767.800,00	641.500,00	641.500,00	100,00
22	Sekretariat Daerah	0,00	479.766.970,00	479.766.970,00	0,00	-	0,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	146.780.679,00	141.805.679,00	4.975.000,00	4.975.000,00	100,00
24	Kecamatan Bogor Selatan	556.650,00	89.462.900,00	87.935.950,00	2.083.600,00	1.526.950,00	274,31
25	Kecamatan Bogor Timur	4.832.000,00	132.543.200,00	101.784.500,00	35.590.700,00	30.758.700,00	636,56
26	Kecamatan Bogor Tengah	10.478.400,00	115.111.400,00	105.833.500,00	19.756.300,00	9.277.900,00	88,54
27	Kecamatan Bogor Barat	0,00	121.955.400,00	121.955.400,00	0,00	-	0,00
28	Kecamatan Bogor Utara	5.997.400,00	39.889.500,00	35.297.900,00	10.589.000,00	4.591.600,00	76,56
29	Kecamatan Tanah Sareal	19.095.300,00	120.590.200,00	106.964.600,00	32.720.900,00	13.625.600,00	71,36
30	Inspektorat	27.766.900,00	28.583.500,00	53.309.900,00	3.040.500,00	(24.726.400,00)	(89,05)
31	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	0,00	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00	-	0,00
32	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	183.150,00	82.362.460,16	82.545.610,16	0,00	(183.150,00)	(100,00)
33	Badan Pendapatan Daerah	0,00	67.078.700,00	67.078.700,00	0,00	-	0,00
34	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	16.223.000,00	16.223.000,00	0,00	-	0,00
35	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	108.380.000,00	108.380.000,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	**396.040.108,60**	**6.483.607.618,55**	**6.038.145.085,44**	**841.502.641,71**	**445.462.533,11**	**112,48**

5.3.1.1.6.23 Alat Listrik

Saldo Persediaan Alat Listrik Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.487.214.848,50 dan Rp1.769.953.579,46. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp1.717.261.269,04 atau 97,02% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp13.717.513.588,01 dan pengurangan persediaan sebesar Rp12.000.252.318,97. Rincian Persediaan Alat Listrik pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.62
Persediaan Alat Listrik per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	33.127.691,00	1.090.270.786,00	1.102.858.667,00	20.539.810,00	(12.587.881,00)	(38,00)
2	Dinas Kesehatan	19.541.114,46	519.207.299,01	447.155.347,47	91.593.066,00	72.051.951,54	368,72
3	Rumah Sakit Umum Daerah-BLUD	17.855.383,50	590.995.153,00	449.967.609,50	158.882.927,00	141.027.543,50	789,83
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	4.400.595,00	147.607.000,00	145.539.395,00	6.468.200,00	2.067.605,00	46,98
5	Dinas Perumahan Dan Permukiman	64.316.948,00	1.182.797.940,00	971.060.688,00	276.054.200,00	211.737.252,00	329,21
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	8.383.600,00	8.383.600,00	0,00	-	0,00
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	-	0,00
8	Dinas Sosial	13.653.300,00	62.762.707,00	71.474.097,00	4.941.910,00	(8.711.390,00)	(63,80)
9	Dinas Tenaga Kerja	1.590.000,00	15.665.000,00	10.314.500,00	6.940.500,00	5.350.500,00	336,51
10	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	48.403.400,00	48.403.400,00	0,00	-	0,00
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	16.174.500,00	16.174.500,00	0,00	-	0,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	3.222.100,00	3.222.100,00	0,00	-	0,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	51.943.750,00	51.943.750,00	0,00	-	0,00
14	Dinas Perhubungan	1.591.691.717,50	8.656.125.119,00	7.369.292.223,50	2.878.524.613,00	1.286.832.895,50	80,85
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0,00	166.662.200,00	166.230.200,00	432.000,00	432.000,00	100,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	0,00	36.618.000,00	35.381.000,00	1.237.000,00	1.237.000,00	100,00
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	11.022.900,00	11.022.900,00	0,00	-	0,00
18	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	585.800,00	30.272.600,00	30.689.000,00	169.400,00	(416.400,00)	(71,08)
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	105.000,00	4.980.000,00	4.987.000,00	98.000,00	(7.000,00)	(6,67)
20	Dinas Arsip Dan Perpustakaan	0,00	22.825.000,00	22.825.000,00	0,00	-	0,00
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	630.500,00	22.744.700,00	21.503.200,00	1.872.000,00	1.241.500,00	196,91
22	Sekretariat Daerah	0,00	244.590.700,00	244.590.700,00	0,00	-	0,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6.116.100,00	276.516.000,00	277.150.060,00	5.482.040,00	(634.060,00)	(10,37)
24	Kecamatan Bogor Selatan	614.900,00	31.981.400,00	31.409.700,00	1.186.600,00	571.700,00	92,97
25	Kecamatan Bogor Timur	3.589.100,00	26.818.800,00	18.143.400,00	12.264.500,00	8.675.400,00	241,72
26	Kecamatan Bogor Tengah	0,00	48.765.400,00	41.444.100,00	7.321.300,00	7.321.300,00	100,00
27	Kecamatan Bogor Barat	0,00	65.487.400,00	65.487.400,00	0,00	-	0,00
28	Kecamatan Bogor Utara	5.522.100,00	22.481.000,00	20.830.100,00	7.173.000,00	1.650.900,00	29,90
29	Kecamatan Tanah Sareal	2.461.300,00	63.507.000,00	62.019.300,00	3.949.000,00	1.487.700,00	60,44
30	Inspektorat	2.335.000,00	4.088.000,00	5.607.000,00	816.000,00	(1.519.000,00)	(65,05)
31	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	473.600,00	6.540.800,00	7.014.400,00	0,00	(473.600,00)	(100,00)
32	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.299.830,00	14.851.334,00	15.434.381,50	716.782,50	(583.047,50)	(44,86)
33	Badan Pendapatan Daerah	43.600,00	206.705.000,00	206.748.600,00	0,00	(43.600,00)	(100,00)
34	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	1.477.000,00	1.477.000,00	0,00	-	0,00
35	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	10.070.000,00	9.518.000,00	552.000,00	552.000,00	100,00
	Jumlah	**1.769.953.579,46**	**13.717.513.588,01**	**12.000.252.318,97**	**3.487.214.848,50**	**1.717.261.269,04**	**97,02**

5.3.1.1.6.24 Perlengkapan Dinas

Saldo Persediaan Perlengkapan Dinas Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp521.566.500,00 dan Rp0,00. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp521.566.500,00 atau 100,00% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp5.244.817.741,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp4.723.251.241,00. Rincian Persediaan Perlengkapan Dinas pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.63
Persediaan Perlengkapan Dinas per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	531.665.515,00	531.665.515,00	0,00	-	0,00
2	Dinas Perumahan Dan Permukiman	0,00	636.256.000,00	549.939.500,00	86.316.500,00	86.316.500,00	100,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	1.305.300.000,00	1.305.300.000,00	0,00	-	0,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	262.725.210,00	262.725.210,00	0,00	-	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	176.383.200,00	176.383.200,00	0,00	-	0,00
6	Dinas Tenaga Kerja	0,00	93.541.000,00	93.541.000,00	0,00	-	0,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	529.925.000,00	110.725.000,00	419.200.000,00	419.200.000,00	100,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	16.263.400,00	16.263.400,00	0,00	-	0,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	16.050.000,00	0,00	16.050.000,00	16.050.000,00	100,00
10	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	-	0,00
11	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	0,00	7.845.000,00	7.845.000,00	0,00	-	0,00
12	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	2.031.000,00	2.031.000,00	0,00	-	0,00
13	Sekretariat Daerah	0,00	975.795.936,00	975.795.936,00	0,00	-	0,00
14	Kecamatan Bogor Selatan	0,00	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	-	0,00
15	Kecamatan Bogor Timur	0,00	70.600.000,00	70.600.000,00	0,00	-	0,00
16	Kecamatan Bogor Tengah	0,00	71.400.000,00	71.400.000,00	0,00	-	0,00
17	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	59.615.880,00	59.615.880,00	0,00	-	0,00
18	Badan Pendapatan Daerah	0,00	170.105.600,00	170.105.600,00	0,00	-	0,00
19	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	300.305.000,00	300.305.000,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	**0,00**	**5.244.817.741,00**	**4.723.251.241,00**	**521.566.500,00**	**521.566.500,00**	**100,00**

5.3.1.1.6.25 Perlengkapan Pendukung Olah Raga

Saldo Persediaan Perlengkapan Pendukung Olah Raga Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.225.130,00 dan Rp25.540.616,00. Saldo Persediaan 2024 mengalami penurunan nilai sebesar Rp23.315.486,00 atau 91,29% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp1.523.494.405,60 dan pengurangan persediaan sebesar Rp1.546.809.891,60. Rincian Persediaan Perlengkapan Pendukung Olah Raga pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.64
Persediaan Perlengkapan Pendukung Olah Raga per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	25.540.616,00	1.048.961.405,60	1.072.276.891,60	2.225.130,00	(23.315.486,00)	(91,29)
2	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	63.750.000,00	63.750.000,00	0,00	-	0,00
3	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	0,00	374.969.000,00	374.969.000,00	0,00	-	0,00
4	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	33.150.000,00	33.150.000,00	0,00	-	0,00
5	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	2.664.000,00	2.664.000,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	**25.540.616,00**	**1.523.494.405,60**	**1.546.809.891,60**	**2.225.130,00**	**(23.315.486,00)**	**(91,29)**

5.3.1.1.6.26 Suvenir/Cendera Mata

Saldo Persediaan Suvenir/Cendera Mata Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp68.258.900,00 dan Rp26.327.285,00. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp41.931.615,00 atau 159,27% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp1.119.672.150,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp1.077.740.535,00. Rincian Persediaan Suvenir/Cendera Mata pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.65
Persediaan Suvenir/Cendera Mata per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	2.929.410,00	87.585.000,00	90.514.410,00	0,00	(2.929.410,00)	(100,00)
2	Dinas Kesehatan	7.117.875,00	4.750.000,00	8.542.875,00	3.325.000,00	(3.792.875,00)	(53,29)
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	16.280.000,00	15.240.000,00	31.012.000,00	508.000,00	(15.772.000,00)	(96,88)
4	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	8.741.250,00	2.913.750,00	5.827.500,00	5.827.500,00	100,00
5	Dinas Arsip Dan Perpustakaan	0,00	64.118.700,00	64.118.700,00	0,00	-	0,00
6	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	7.310.000,00	7.310.000,00	0,00	-	0,00
7	Sekretariat Daerah	0,00	540.479.800,00	538.881.400,00	1.598.400,00	1.598.400,00	100,00
8	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	97.200.000,00	40.200.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	100,00
9	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	0,00	32.270.400,00	32.270.400,00	0,00	-	0,00
10	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	38.115.000,00	38.115.000,00	0,00	-	0,00
11	Badan Pendapatan Daerah	0,00	223.862.000,00	223.862.000,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	**26.327.285,00**	**1.119.672.150,00**	**1.077.740.535,00**	**68.258.900,00**	**41.931.615,00**	**159,27**

5.3.1.1.6.27 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Saldo Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp629.126.053,37 dan Rp484.740.847,96. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp144.385.205,41 atau 29,79% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp3.565.060.058,54 dan pengurangan persediaan sebesar Rp3.420.674.853,13. Rincian Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.66
Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	8.764.713,16	534.259.326,00	534.777.298,16	8.246.741,00	(517.972,16)	(5,91)
2	Dinas Kesehatan	22.589.551,80	111.064.390,04	116.909.595,47	16.744.346,37	(5.845.205,43)	(25,88)
3	Rumah Sakit Umum Daerah-BLUD	211.224.834,00	1.253.371.367,50	1.265.054.896,50	199.541.305,00	(11.683.529,00)	(5,53)
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	20.298.465,00	20.298.465,00	0,00	-	0,00
5	Dinas Perumahan Dan Permukiman	2.823.190,00	56.400.000,00	55.833.190,00	3.390.000,00	566.810,00	20,08
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	22.366.500,00	22.366.500,00	0,00	-	0,00
7	Dinas Sosial	4.005.950,00	0,00	3.065.700,00	940.250,00	(3.065.700,00)	(76,53)
8	Dinas Tenaga Kerja	0,00	19.119.000,00	19.119.000,00	0,00	-	0,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	226.657.609,00	732.509.000,00	596.249.498,00	362.917.111,00	136.259.502,00	60,12
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	180.875.950,00	156.536.950,00	24.339.000,00	24.339.000,00	100,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.958.800,00	270.200,00	3.229.000,00	0,00	(2.958.800,00)	(100,00)
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0,00	67.327.050,00	67.327.050,00	0,00	-	0,00
13	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00	-	0,00
14	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	37.491.400,00	37.491.400,00	0,00	-	0,00
15	Sekretariat Daerah	0,00	285.080.000,00	285.080.000,00	0,00	-	0,00
16	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	39.815.000,00	34.850.000,00	4.965.000,00	4.965.000,00	100,00
17	Kecamatan Bogor Selatan	1.279.700,00	62.163.000,00	63.442.700,00	0,00	(1.279.700,00)	(100,00)
18	Kecamatan Bogor Timur	0,00	17.977.525,00	12.447.825,00	5.529.700,00	5.529.700,00	100,00
19	Kecamatan Bogor Barat	0,00	47.861.385,00	47.861.385,00	0,00	-	0,00
20	Kecamatan Bogor Utara	4.436.500,00	174.500,00	2.098.400,00	2.512.600,00	(1.923.900,00)	(43,37)
21	Badan Pendapatan Daerah	0,00	63.250.000,00	63.250.000,00	0,00	-	0,00
22	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	13.238.000,00	13.238.000,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	**484.740.847,96**	**3.565.060.058,54**	**3.420.674.853,13**	**629.126.053,37**	**144.385.205,41**	**29,79**

5.3.1.1.6.28 Obat

Saldo Persediaan Obat Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp18.773.757.900,97 dan Rp14.728.805.362,40. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp4.044.952.538,57 atau 27,46% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp98.506.815.746,43 dan pengurangan persediaan sebesar Rp94.461.863.207,86. Rincian Persediaan Obat pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.67
Persediaan Obat per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	17.053.989,00	155.710.551,00	169.169.040,00	3.595.500,00	(13.458.489,00)	(78,92)
2	Dinas Kesehatan	7.973.861.363,53	59.240.412.224,17	54.102.446.270,78	13.111.827.316,92	5.137.965.953,39	64,44
3	Rumah Sakit Umum Daerah	244.296.663,49	2.696.999.939,45	2.271.455.000,19	669.841.602,75	425.544.939,26	174,19
4	Rumah Sakit Umum Daerah-BLUD	6.239.661.740,38	35.841.919.329,81	37.359.098.586,89	4.722.482.483,30	(1.517.179.257,08)	(24,32)
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	14.050.600,00	14.050.600,00	0,00	-	0,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	253.931.606,00	484.674.802,00	472.595.410,00	266.010.998,00	12.079.392,00	4,76
7	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	0,00	18.958.500,00	18.958.500,00	0,00	-	0,00
8	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	54.089.800,00	54.089.800,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	**14.728.805.362,40**	**98.506.815.746,43**	**94.461.863.207,86**	**18.773.757.900,97**	**4.044.952.538,57**	**27,46**

5.3.1.1.6.29 Obat-Obatan Lainnya

Saldo Persediaan Obat-Obatan Lainnya Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.844.865.006,63 dan Rp4.780.887.638,31. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp3.063.977.368,32 atau 64,09% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp64.000.364.750,05 dan pengurangan persediaan sebesar Rp60.936.387.381,73. Rincian Persediaan Obat-Obatan Lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.68
Persediaan Obat-Obatan Lainnya per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	2.296.520,00	53.742.907,00	55.691.427,00	348.000,00	(1.948.520,00)	(84,85)
2	Dinas Kesehatan	41.672.070,00	9.104.690.618,00	5.126.390.338,74	4.019.972.349,26	3.978.300.279,26	9.546,68
3	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	220.962.910,94	57.595.960,05	163.366.950,89	163.366.950,89	100,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah-BLUD	4.736.919.048,31	54.575.087.564,11	55.676.153.655,94	3.635.852.956,48	(1.101.066.091,83)	(23,24)
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	8.175.000,00	8.175.000,00	0,00	-	0,00
6	Dinas Tenaga Kerja	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	-	0,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	-	0,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	32.052.000,00	6.727.250,00	25.324.750,00	25.324.750,00	100,00
9	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	2.913.750,00	2.913.750,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	**4.780.887.638,31**	**64.000.364.750,05**	**60.936.387.381,73**	**7.844.865.006,63**	**3.063.977.368,32**	**64,09**

5.3.1.1.6.30 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

Saldo Persediaan Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.242.197.202,06 dan Rp19.996.823.518,90. Saldo Persediaan 2024 mengalami penurunan nilai sebesar Rp18.754.626.316,84 atau 93,79% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp16.538.197.207,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp35.292.823.523,84. Rincian Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.69
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Pendidikan	0,00	6.931.800,00	6.931.800,00	0,00	-	0,00
2	Dinas Perumahan Dan Permukiman	19.838.992.049,00	0,00	19.838.992.049,00	0,00	(19.838.992.049,00)	(100,00)
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	404.498.260,00	257.855.050,00	146.643.210,00	146.643.210,00	100,00
4	Dinas Sosial	67.553.438,00	1.803.609.070,00	1.259.167.728,00	611.994.780,00	544.441.342,00	805,94
5	Dinas Tenaga Kerja	0,00	1.618.919.128,00	1.618.919.128,00	0,00	-	0,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	90.278.031,90	3.100.804.000,00	2.723.678.219,84	467.403.812,06	377.125.780,16	417,74
7	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	16.155.400,00	0,00	16.155.400,00	16.155.400,00	100,00
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	0,00	355.681.460,00	355.681.460,00	0,00	-	0,00
9	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	0,00	312.900.000,00	312.900.000,00	0,00	-	0,00
10	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	6.669.173.600,00	6.669.173.600,00	0,00	-	0,00
11	Sekretariat Daerah	0,00	169.399.807,00	169.399.807,00	0,00	-	0,00
12	Kecamatan Bogor Selatan	0,00	2.055.624.682,00	2.055.624.682,00	0,00	-	0,00
13	Kecamatan Bogor Timur	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	**19.996.823.518,90**	**16.538.197.207,00**	**35.292.823.523,84**	**1.242.197.202,06**	**(18.754.626.316,84)**	**(93,79)**

5.3.1.1.6.31 Natura

Saldo Persediaan Natura Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.440.764.293,26 dan Rp10.759.076,00. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp2.430.005.217,26 atau 22.585,63% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp14.825.037.979,74 dan pengurangan persediaan sebesar Rp12.395.032.762,48. Rincian Persediaan Natura pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.70
Persediaan Natura per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Kesehatan	0,00	12.273.291.530,00	10.090.289.104,00	2.183.002.426,00	2.183.002.426,00	100,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah-BLUD	0,00	881.790.949,74	755.752.888,48	126.038.061,26	126.038.061,26	100,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	49.344.000,00	49.344.000,00	0,00	-	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	225.000,00	9.220.000,00	8.965.000,00	480.000,00	255.000,00	113,33
5	Dinas Sosial	10.534.076,00	466.771.700,00	346.061.970,00	131.243.806,00	120.709.730,00	1.145,90
6	Dinas Tenaga Kerja	0,00	345.842.200,00	345.842.200,00	0,00	-	0,00
7	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	31.102.500,00	31.102.500,00	0,00	-	0,00
8	Sekretariat Daerah	0,00	767.675.100,00	767.675.100,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	**10.759.076,00**	**14.825.037.979,74**	**12.395.032.762,48**	**2.440.764.293,26**	**2.430.005.217,26**	**22.585,63**

5.3.1.1.6.32 Pakan

Saldo Persediaan Pakan Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Persediaan 2024 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp180.019.250,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp180.019.250,00. Rincian Persediaan Pakan pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.71
Persediaan Pakan per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	180.019.250,00	180.019.250,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	**0,00**	**180.019.250,00**	**180.019.250,00**	**0,00**	**-**	**0,00**

5.3.1.1.6.33 Komponen Peralatan

Saldo Persediaan Komponen Peralatan Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp121.276.000,00 dan Rp112.163.520,00. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp9.112.480,00 atau 8,12% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp367.053.650,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp357.941.170,00. Rincian Persediaan Komponen Peralatan pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.72
Persediaan Komponen Peralatan per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Perumahan Dan Permukiman	1.500.000,00	343.391.450,00	287.843.350,00	57.048.100,00	55.548.100,00	3.703,21
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	20.535.000,00	20.535.000,00	0,00	-	0,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	110.663.520,00	0,00	46.435.620,00	64.227.900,00	(46.435.620,00)	(41,96)
4	Kecamatan Bogor Timur	0,00	3.127.200,00	3.127.200,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	**112.163.520,00**	**367.053.650,00**	**357.941.170,00**	**121.276.000,00**	**9.112.480,00**	**8,12**

5.3.1.1.6.34 Komponen Lainnya

Saldo Persediaan Komponen Lainnya Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.508.160,00 dan Rp0,00. Saldo Persediaan 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp4.508.160,00 atau 100,00% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan persediaan sebesar Rp6.864.770,00 dan pengurangan persediaan sebesar Rp2.356.610,00. Rincian Persediaan Komponen Lainnya pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.73
Persediaan Komponen Lainnya per Perangkat Daerah

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan 2024 (Rp)	Pengurangan 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)	
						(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7=6-3)	(8=7/3)
1	Dinas Kesehatan	0,00	6.864.770,00	2.356.610,00	4.508.160,00	4.508.160,00	100,00
	Jumlah	**0,00**	**6.864.770,00**	**2.356.610,00**	**4.508.160,00**	**4.508.160,00**	**100,00**

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan merupakan kelompok aset lancar. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset non lancar. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

Nilai Investasi Jangka Panjang Kota Bogor per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.002.293.416.444,24 mengalami kenaikan sebesar Rp167.169.570.961,49 atau 20,02% dari Tahun 2023 sebesar Rp835.123.845.482,75 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.74
Investasi Jangka Panjang

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	**Investasi Jangka Panjang**				
2	**Investasi Jangka Panjang Non Permanen**				
3	Dana Bergulir	51.753.390,00	63.742.100,00	11.988.710,00	18,81
4	Penyisihan Dana Bergulir	(51.753.390,00)	(63.742.100,00)	(11.988.710,00)	18,81
5	**Investasi Jangka Panjang Permanen**	**1.002.293.416.444,24**	**835.123.845.482,75**	**167.169.570.961,49**	**20,02**
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.002.293.416.444,24	835.123.845.482,75	167.169.570.961,49	20,02
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	**1.002.293.416.444,24**	**835.123.845.482,75**	**167.169.570.961,49**	**20,02**

5.3.1.3.1.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir

Saldo Investasi Non Permanen – Dana Bergulir per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp51.753.390,00 dan Rp63.742.100,00. Jumlah dana bergulir per 31 Desember 2024 sebesar Rp51.753.390,00 adalah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang terdiri dari saldo dana bergulir yang dapat tertagih.

Nilai semula Dana Bergulir adalah sebesar Rp1.750.000.000,00. Jumlah tersebut merupakan dana yang disalurkan melalui Program Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Garda Emas). Jumlah tersebut merupakan akumulasi realisasi pencairan SPMU sejak tahun 2000 sampai dengan 2003, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.75
Dana Bergulir

No	Uraian	Nilai
1	**Tahun 2000**	300.000.000,00
2	**Tahun 2001**	300.000.000,00
3	**Tahun 2002**	550.000.000,00
4	**Tahun 2003**	600.000.000,00
5	**Jumlah**	**1.750.000.000,00**
6	Jumlah yang telah diselesaikan sebesar	(1.686.257.900,00)
7	**Saldo sampai akhir tahun 2024 sebesar**	**51.753.390,00**
8	Penyisihan Dana Bergulir Tahun 2024	(51.753.390,00)
9	**Saldo Dana Bergulir Tahun 2024**	**0,00**

Program Dana Bergulir Garda Emas dilaksanakan oleh Tim Kerja yang dibentuk dengan SK Wali Kota Bogor dengan Pelaksana Teknis diketuai oleh Direktur PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), selain itu PINBUK ditunjuk sebagai Konsultan Pelaksanaan Program Garda Emas.

Dana bergulir tahun 2006 sampai dengan 2007 yang masih dapat ditagih sebesar Rp152.721.000,00 dan periode tahun 2008 sampai dengan 2009 terdapat pengembalian ke kas daerah sebesar Rp88.978.900,00. sehingga sisa dana bergulir yang masih dapat ditagih sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp63.742.100,00. Atas saldo sebesar Rp63.742.100,00 Pemerintah Kota Bogor melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bogor telah menyampaikan permohonan untuk dilaksanakan proses penghapusan piutang daerah Program Garda Emas Kota Bogor ke KPKNL berdasarkan surat No. 588/1220-Ekon tanggal 11 Juni 2010 yang dilampiri dengan daftar debitur piutang negara yang berasal dari Program Garda Emas. Daftar debitur piutang tersebut terdiri dari 100 nama debitur dengan total nilai sebesar

Rp55.012.950,00. Hasil proses pemeriksaan oleh KPKNL dari 100 berkas tersebut hanya 74 berkas yang dapat diproses lebih lanjut dengan diterbitkannya Surat Pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT). Keputusan PSBDT tersebut dikeluarkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Barat tanggal 26 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2011.

5.3.1.3.1.2 Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Penyisihan Dana Bergulir

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2024 Rp51.753.390,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp63.742.100,00.

Tabel 5.3.76
Penyisihan Dana Bergulir

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo awal	63.742.100,00	63.742.100,00
2	Penerimaan	0,00	0,00
3	Pengeluaran	11.988.710,00	0,00
4	Saldo Akhir	51.753.390,00	63.742.100,00

5.3.1.3.2 Investasi Jangka Panjang Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Dalam pengakuan nilai penyertaan modal, digunakan metode akuntansi yang disebut Metode Biaya atau *Cost Method* dan Metode Ekuitas atau *Equity Method*.

Metode Biaya diterapkan pada Penyertaan Modal pada PT Bank Jabar sedangkan Metode Ekuitas diterapkan pada Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Pasar, PDAM Kota Bogor, PD Jasa Transportasi, dan pada PD Pasar Pakuan Jaya. Perhitungan nilai penyertaan modal dengan metode ekuitas berdasarkan pada laporan keuangan perusahaan daerah yang bersangkutan.

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada masing-masing perusahaan daerah sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.002.293.416.444,24 atau mengalami kenaikan sebesar Rp167.169.570.961,49 atau 20,02% dari saldo tahun lalu sebesar Rp835.123.845.482,75 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.77
Rincian Penyertaan Modal Pemerintah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Modal yang telah disetor pada Bank BJB	16.078.535.753,00	16.078.535.753,00	-	-
2	Modal yang telah disetor pada PDAM Kota Bogor	536.282.344.004,24	286.594.932.339,65	249.687.411.664,59	87,12
3	Modal yang telah disetor pada BPR Bank Kota Bogor	87.827.113.151,00	61.189.662.448,50	26.637.450.702,50	43,53
4	Modal yang telah disetor pada PD Jasa Transportasi	0,00	5.879.112.472,10	(5.879.112.472,10)	(100,00)
5	Modal yang disetor pada PD Pasar Pakuan Jaya	362.105.423.536,00	465.381.602.469,50	(103.276.178.933,50)	(22,19)
6	**Jumlah**	**1.002.293.416.444,24**	**835.123.845.482,75**	**167.169.570.961,49**	**20,02**

(Rincian penyertaan modal disajikan pada Lampiran 7)

5.3.1.3.2.1 Penyertaan Modal pada PT Bank Jabar Cabang Bogor

Penyertaan modal pada PT Bank Jabar Cabang Bogor sebesar Rp16.078.535.753,00 merupakan setoran modal tunai sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tab el 5.3.78
Mutasi Penyertaan Modal BJB

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo Awal	16.078.535.753,00	16.078.535.753,00
2	Modal disetor	0,00	0,00
3	Penambah Ekuitas	0,00	0,00
4	Pembagian laba pengurang Modal Pemda	0,00	0,00
5	Saldo Akhir	16.078.535.753,00	16.078.535.753,00

Sejak tahun 2011 Pemerintah Kota Bogor tidak menambah penyertaan modalnya kepada PT Bank Jabar Banten Cabang Bogor dengan alasan kepemilikan saham pada PT Bank Jabar Banten sudah *Go Public*.

5.3.1.3.2.2 Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Penyertaan modal pada PDAM didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor dengan modal dasar yang ditetapkan yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00. Jumlah tersebut ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah.

Penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirta Pakuan diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2011 dan ditetapkan menjadi Rp182.000.000.000,00.

Penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirta Pakuan diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2019 dan ditetapkan menjadi Rp280.132.242.000,00, pada tahun 2024 terdapat penyertaan modal berupa Barang Milik Daerah sebesar Rp47.819.268.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor, Berita Acara Serah Terima Nomor: 000.2.3.2/BA.1043-BKAD/2024 dan Nomor: BA/03-Perumda.TPKB/2024 dan Keputusan Wali Kota Nomor 000.2.4/Kep.12-BKAD/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor Berupa Tanah dan Jalan, Jaringan dan Irigasi yang Telah Disertakan Modal Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor.

Berdasarkan persentase kepemilikan Pemerintah Kota Bogor sebesar 91,84% maka jumlah penyertaan modal Pemerintah Kota Bogor sesuai dengan ekuitas pada Laporan Keuangan PDAM Kota Bogor Audited KAP tahun 2024 adalah sebesar Rp536.282.344.004,24 Berikut mutasi Penyertaan Modal PDAM Kota Bogor terdiri dari:

Tabel 5.3.79
Mutasi Penyertaan Modal PDAM

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo Awal	286.594.932.339,65	283.405.374.277,30
2	Koreksi	168.643.863.793,02	-
3	Penambah Investasi	47.819.268.000,00	0,00
4	Laba BUMD penambah Ekuitas	58.812.648.110,57	28.147.205.062,35
5	Pembagian laba pengurang Modal Pemda	25.588.368.239,00	24.957.647.000,00
6	Saldo Akhir (6 = 1 + 2 + 3 + 4 - 5)	536.282.344.004,24	286.594.932.339,65

5.3.1.3.2.3 Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Kota Bogor

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor, modal dasar Perumda BPR Bank Kota Bogor ditetapkan sebesar Rp54.000.000.000,00 dan telah dipenuhi secara keseluruhan dan telah tercatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor S-145/KR.0211/2019 tanggal 16 April 2019

Dengan persentase kepemilikan Pemerintah Kota Bogor sebesar 100%, maka jumlah penyertaan modal pada PD BPR Bank Kota Bogor sesuai dengan ekuitas pada Laporan Keuangan PD BPR Bank Kota per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp87.827.113.151,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.3.80
Mutasi Penyertaan Modal Bank Kota

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo Awal	61.189.662.448,50	60.798.506.475,25
2	Koreksi	25.324.599.731,50	
3	Penambah Investasi	0,00	0,00
4	Laba BUMD penambah Ekuitas	4.087.409.370,00	2.774.558.399,25
5	Pembagian laba pengurang Modal Pemda	2.774.558.399,00	2.383.402.426,00
6	Saldo Akhir (6 = 1 + 2 + 3 + 4 - 5)	87.827.113.151,00	61.189.662.448,50

5.3.1.3.2.4 Penyertaan modal pada PD Jasa Transportasi

Penyertaan modal pada PD Jasa Transportasi didasarkan pada Peraturan Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi dengan modal dasar yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp30.000.000.000,00. Jumlah tersebut ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor ditetapkan kembali modal dasar sebesar Rp35.519.390,00, dengan komposisi kepemilikan sebesar 100%, jumlah modal Pemerintah Kota Bogor sesuai dengan ekuitas pada Laporan Keuangan PD Jasa Transportasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.81
Penyertaan Modal PD Jasa Transportasi

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo Awal	5.879.112.472,10	5.791.374.690,65
2	Koreksi	(5.879.112.472,10)	0,00
3	Penambah Investasi	0,00	
4	Laba BUMD penambah Ekuitas	0,00	87.737.781,45
5	Pembagian laba pengurang Modal Pemda	0,00	0,00
6	Saldo Akhir (6 = 1 + 2 + 3 + 4 - 5)	0,00	5.879.112.472,10

Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor Tahun 2024, total modal sebesar Rp35.519.390.000,00 dengan komposisi kepemilikan modal Pemerintah Kota Bogor adalah 100%.

5.3.1.3.2.5 Penyertaan modal pada PD Pasar Pakuan Jaya

Penyertaan modal pada PD Pasar Pakuan Jaya didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya, dengan modal dasar yang ditetapkan sebesar Rp241.792.583.600,00 yang terdiri dari modal disetor sebesar Rp5.000.000.000,00 dan aset daerah yang dipisahkan sebesar Rp236.792.583.600,00.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah, penyertaan modal kepada PD Pasar Pakuan Jaya ditetapkan menjadi Rp238.279.924.240,00 berupa:

-	Uang Sebesar	Rp	5.000.000.000,00
-	Tanah, Bangunan, serta Peralatan dan Mesin	Rp	233.279.924.240,00
	Jumlah	Rp	238.279.924.240,00

Penyertaan modal daerah kepada PD Pasar Pakuan Jaya diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2011 dan ditetapkan menjadi Rp145.488.132.240,00 terdiri dari:

-	Uang Sebesar	Rp	5.000.000.000,00
-	Tanah, Bangunan, serta Peralatan dan Mesin	Rp	100.361.083.000,00

Penyertaan modal daerah kepada PD Pasar Pakuan Jaya diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2022 dan ditetapkan menjadi Rp503.111.384.240,00 dan sudah terpenuhi seluruhnya terdiri dari:

-	Uang Sebesar	Rp	45.000.000.000,00
-	Tanah, Bangunan, serta Peralatan dan Mesin	Rp	458.111.384.240,00

Dengan persentase kepemilikan Pemerintah Kota Bogor sebesar 100%, maka jumlah penyertaan modal pada PD Pasar Pakuan Jaya sesuai dengan ekuitas pada Laporan Keuangan PD Pasar Pakuan Jaya Tahun

Anggaran 2024 adalah sebesar Rp362.105.423.536,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.82
Penyertaan Modal PD Pasar Pakuan Jaya

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo Awal	465.381.602.469,50	465.563.125.472,60
2	Koreksi	(110.613.577.264,50)	0,00
3	Penambah Investasi	0,00	0,00
4	Laba BUMD penambah Ekuitas	8.300.122.766,00	1.212.724.434,90
5	Pembagian laba pengurang Modal Pemda	962.724.435,00	1.394.247.438,00
6	Saldo Akhir (6 = 1 + 2 + 3 + 4 - 5)	362.105.423.536,00	465.381.602.469,50

5.3.1.3 ASET TETAP

Aset Tetap menggambarkan jumlah dan nilai perolehan Aset Tetap yang dimiliki/ dikuasai oleh Pemerintah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dan 2023. Perolehan Aset Tetap Pemerintah Pemerintah Kota Bogor berasal dari kapitalisasi belanja modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai Aset Tetap tahun anggaran berkenaan. Aset Tetap merupakan aset berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional.

Aset Tetap
Tabel 5.3.83

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
		Tambah	Kurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+3-4)
1. Tanah	5.938.980.428.024,63	84.767.760.238,06	227.586.591.354,00	5.796.161.596.908,69
2. Peralatan dan Mesin	1.136.877.015.590,06	174.138.442.423,67	54.878.749.428,84	1.256.136.708.584,89
3. Gedung dan Bangunan	1.582.373.719.962,85	369.133.763.992,37	63.306.916.023,10	1.888.200.567.932,12
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.483.468.228.932,92	146.690.739.503,01	41.694.310.949,00	3.588.464.657.486,93
5. Aset Tetap Lainnya	11.314.989.293,84	12.674.429.326,15	8.900.598.235,00	15.088.820.384,99
6. KDP	224.422.793.771,34	445.372.660,06	209.284.385.606,40	15.583.780.825,00
Jumlah	**12.377.437.175.575,60**	**787.850.508.143,32**	**605.651.551.596,34**	**12.559.636.132.122,62**
7. Akumulasi Penyusutan	3.162.527.131.333,85	404.471.713.373,18	45.454.837.912,29	3.521.544.006.794,74
Nilai Buku	**9.214.910.044.241,79**	-	-	**9.038.092.125.327,88**

Mutasi Aset Tetap Pemerintah Kota Bogor selama tahun 2024, terdiri dari:

1. Penambahan yang merupakan perolehan aset tetap melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dan perolehan lain yang sah seperti hibah, dan penerimaan fasilitas umum
2. Pengurangan yang merupakan nilai Aset Tetap yang dihapuskan
3. Karena perpindahan (*reclass*) antar Perangkat Daerah dan antar jenis karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan
4. Koreksi atas pencatatan Aset Tetap sebelumnya

Rincian Aset Tetap pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.84
Aset tetap per perangkat daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(5=4/3)
1	Dinas Pendidikan	868.054.962.936,16	743.849.633.839,79	124.205.329.096,37	16,70
2	Dinas Kesehatan	253.588.634.322,50	239.541.976.249,13	14.046.658.073,37	5,86
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	556.951.121.752,49	519.444.710.706,07	37.506.411.046,42	7,22
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	68.510.806.962,31	61.213.301.441,02	7.297.505.521,29	11,92
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.671.797.699.150,86	5.551.697.542.628,83	120.100.156.522,03	2,16
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	1.916.666.939.084,74	1.902.005.023.098,74	14.661.915.986,00	0,77
7	Satuan Polisi Pamong Praja	9.439.694.261,59	8.960.083.366,59	479.610.895,00	5,35
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.685.601.250,05	11.281.737.415,05	403.863.835,00	3,58
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.861.884.500,00	2.735.879.583,00	1.126.004.917,00	41,16
10	Dinas Sosial	9.571.585.070,46	9.199.258.270,46	372.326.800,00	4,05
11	Dinas Tenaga Kerja	15.318.220.175,68	15.727.118.968,46	(408.898.792,78)	(2,60)
12	Dinas Lingkungan Hidup	168.464.135.660,84	173.208.712.623,01	(4.744.576.962,17)	(2,74)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19.580.407.828,38	18.455.852.392,38	1.124.555.436,00	6,09
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.732.493.235,04	8.610.393.735,04	122.099.500,00	1,42
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.200.416.039,68	6.139.796.039,68	60.620.000,00	0,99
16	Dinas Perhubungan	277.131.708.199,92	267.308.324.180,92	9.823.384.019,00	3,67
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	34.178.802.921,74	33.894.516.991,18	284.285.930,56	0,84
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	41.366.316.327,72	59.423.087.258,72	(18.056.770.931,00)	(30,39)
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.285.276.887,14	9.641.022.878,07	(355.745.990,93)	(3,69)
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	172.042.669.674,78	165.979.216.763,78	6.063.452.911,00	3,65
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	36.714.637.101,22	34.997.133.060,24	1.717.504.040,98	4,91
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan	45.539.805.974,90	45.400.368.972,90	139.437.002,00	0,31
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	68.762.285.546,11	61.572.927.069,11	7.189.358.477,00	11,68
24	Sekretariat Daerah	123.302.762.224,00	124.027.842.381,90	(725.080.157,90)	(0,58)
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	170.113.713.845,64	169.401.925.308,20	711.788.537,44	0,42
26	Kecamatan Bogor Selatan	89.808.371.763,07	90.572.758.337,07	(764.386.574,00)	(0,84)
27	Kecamatan Bogor Timur	35.358.580.820,27	34.425.826.097,27	932.754.723,00	2,71
28	Kecamatan Bogor Tengah	43.598.810.429,83	40.861.701.057,01	2.737.109.372,82	6,70
29	Kecamatan Bogor Barat	74.798.834.355,83	71.868.953.303,43	2.929.881.052,40	4,08
30	Kecamatan Bogor Utara	49.533.083.180,69	46.936.702.740,82	2.596.380.439,87	5,53
31	Kecamatan Tanah Sareal	53.679.232.478,79	48.120.054.440,93	5.559.178.037,86	11,55
32	Inspektorat	9.169.269.136,92	8.757.334.498,61	411.934.638,31	4,70
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.373.489.167,74	12.570.135.108,86	(196.645.941,12)	(1,56)
34	Badan Keuangan dan Aset Daerah	30.326.426.664,88	16.361.221.487,17	13.965.205.177,71	85,36
35	Badan Pendapatan Daerah	48.759.609.558,48	58.392.602.656,09	(9.632.993.097,61)	(16,50)
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.956.163.560,06	9.273.404.485,93	(317.240.925,87)	(3,42)
37	PPKD	1.511.516.709.536,77	1.669.595.830.604,77	(158.079.121.068,00)	(9,47)
38	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	24.894.970.535,34	25.983.265.535,41	(1.088.295.000,07)	(4,19)
Jumlah		**12.559.636.132.122,60**	**12.377.437.175.575,60**	**182.198.956.546,98**	**1,47**

Sedangkan Mutasi Aset Tetap Pemerintah Kota Bogor Tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.85
Mutasi Aset Tetap

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Saldo per 31 Desember 2023	12.377.437.175.575,60
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2024	**400.293.631.049,00**
Belanja Operasional yang dikapitalisasi Menjadi Aset tetap	97.607.295,00
Kewajiban kepada Pihak ketiga TA 2024 yang asetnya Telah diakui Tahun Berjalan	1.709.369.921,00
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	15.771.072.190,00
Hibah BMD tahun berjalan	5.981.817.722,00
Belanja Modal yang di reklasifikasi antar KIB	2.275.000,00
Belanja operasional (BOP) yang dikapitalisasi Menjadi Aset tetap	814.370.520,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	89.750.574.999,51
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	206.818.988.748,49
Reklasifikasi dari aset lainnya (inventarisasi) :	
- Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat	852.338.861,32
- Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain (Penelusuran)	3.958.267.356,00
Hibah BMD sebelum Tahun 2024	21.973.414.791,00
BMD belum tercatat (inventarisasi)	75.727.896.094,00
Jumlah Mutasi Tambah	823.751.624.547,32
Mutasi Kurang :	
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	15.771.072.190,00
Belanja Modal yang di reklasifikasi antar KIB	2.275.000,00
Belanja Modal yang dikapitalisasi Menjadi aset ekstrakomtabel	22.925.358.059,00
Belanja Modal yang direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud	-
Belanja Modal tidak menjadi aset tetap	569.486.579,00
Kewajiban kepada pihak ketiga th 2024 yg asetnya telah diakui di tahun 2023	18.783.779.409,00
Belanja Modal yang direklasifikasikan menjadi Aset lain lain	-
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	89.750.574.999,51
Reklasifikasi menjadi Aset Ekstrakomtabel (Inventarisasi)	10.591.098,00
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	206.818.988.748,49
Reklasifikasi menjadi aset lainnya (Inventarisasi) :	
- Reklasifikasi menjadi Aset Rusak Berat	14.703.611.578,86
- Reklasifikasi menjadi Aset Lain-Lain (Penelusuran)	42.486.563,00
Reklasifikasi menjadi Aset Kemitraan dengan Pihak ke Tiga	-
BMD belum tercatat (inventarisasi)	
Koreksi Nilai perolehan	-
Penghapusan BMD (inventarisasi)	51.440.364.534,12
Reklasifikasi Kondisi BMD (inventarisasi)	1.375.637.190,36
BMD Tidak menjadi Aset Tetap (Inventarisasi)	-
Reklas ke properti investasi	219.358.442.051,00
Jumlah Mutasi Kurang	641.552.668.000,34
Total Mutasi	182.198.956.546,98
Saldo per 31 Desember 2024	12.559.636.132.122,60
Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024	(3.521.544.006.794,74)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	9.038.092.125.327,88

Perubahan nilai aset tetap adalah sebesar Rp182.198.956.546,98 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan nilai Aset Tetap sebesar Rp823.751.624.547,32 terdiri dari :
    a. Realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp400.293.631.049,00 terdiri dari :
        i. Dinas Pendidikan sebesar Rp149.929.407.529,00
        ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp11.432.207.074,00
        iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp39.266.988.308,00
        iv. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp6.155.296.666,00
        v. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp127.725.304.235,00
        vi. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp11.389.368.806,00
        vii. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp126.941.000,00
        viii. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp560.286.260,00
        ix. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp1.219.657.998,00
        x. Dinas Sosial sebesar Rp182.756.400,00

xi. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp52.010.160,00
xii. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp13.755.247.882,00
xiii. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp737.063.200,00
xiv. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp122.099.500,00
xv. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp60.620.000,00
xvi. Dinas Perhubungan sebesar Rp747.526.740,00
xvii. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp15.598.270,00
xviii. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp16.399.000,00
xix. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp127.500.000,00
xx. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.910.091.300,00
xxi. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp107.389.000,00
xxii. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp158.745.800,00
xxiii. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp7.440.396.307,00
xxiv. Sekretariat Daerah sebesar Rp3.253.902.356,00
xxv. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp1.505.614.400,00
xxvi. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp1.949.233.196,00
xxvii. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp1.056.952.926,00
xxviii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp2.846.644.491,00
xxix. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp2.698.120.000,00
xxx. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp2.494.548.216,00
xxxi. Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp5.630.783.395,00
xxxii. Inspektorat sebesar Rp916.932.000,00
xxxiii. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp73.808.340,00
xxxiv. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp3.184.165.294,00
xxxv. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp811.325.000,00
xxxvi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp375.500.000,00
xxxvii. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp257.200.000,00

b. Belanja Modal yang di reklas antar KIB sebesar Rp2.275.000,00 yaitu berupa Dinas Pendidikan sebesar Rp2.275.000,00
c. Belanja Operasional yang dikapitalisasi Menjadi Aset tetap sebesar Rp814.370.520,00 terdiri dari :
   i. Dinas Kesehatan sebesar Rp511.817.570
   ii. Dinas Sosial sebesar Rp41.152.000
   iii. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp58.238.000
   iv. Inspektorat sebesar Rp31.881.450
   v. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp171.281.500
d. Belanja modal yang dimutasikan dari perangkat daerah lain sebesar Rp15.771.072.190,00 terdiri dari :
   i. Dinas Pendidikan sebesar Rp3.680.713.000
   ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp7.024.067.524
   iii. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp688.200
   iv. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp1.074.092.000
   v. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp1.201.575
   vi. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp2.510.726.291

vii. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp194.000.000
viii. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp888.404.600
ix. PPKD sebesar Rp397.179.000

e. Hibah tahun perolehan berjalan 2024 sebesar Rp5.981.817.722,00 terdiri dari :
i. Dinas Pendidikan sebesar Rp51.215.916,00
ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp145.295.500,00
iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp5.300.000,00
iv. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp41.049.000,00
v. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp4.186.097.000,00
vi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp111.842.000,00
vii. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp139.500.000,00
viii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp17.806.306,00
ix. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp14.972.000,00
x. PPKD sebesar Rp1.268.740.000,00

f. Belanja Operasi yang dikapitalisasi sebesarRp97.607.295,00 terdiri dari Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp97.607.295,00

g. Kewajiban pihak ketiga yang asetnya telah diakui ditahun 2024 sebesar Rp1.709.369.921,00 terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp1.709.369.921

h. Mutasi dari OPD lain (Inventarisasi) sebesar Rp53.849.458.595,51 terdiri dari :
i. Dinas Pendidikan sebesar Rp2.768.366.491,79
ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp5.523.458.058,00
iii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.415.467.500,00
iv. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp979.876.800,00
v. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp430.284.895,00
vi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp205.000.000,00
vii. Dinas Sosial sebesar Rp67.718.400,00
viii. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp41.150.000,00
ix. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp6.837.567.808,00
x. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp431.426.923,00
xi. Dinas Perhubungan sebesar Rp9.578.088.654,00
xii. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp532.747.930,56
xiii. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp434.600.000
xiv. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp362.782.000
xv. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp723.572.649,00
xvi. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp2.785.646.783,00
xvii. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp83.125.000,00
xviii. Sekretariat Daerah sebesar Rp205.000.000,00
xix. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp1.475.268.444,00
xx. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp135.930.000,00
xxi. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp65.806.052,40
xxii. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp2.724.304,87
xxiii. Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp21.359.642,86
xxiv. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp14.132.556.377,00
xxv. PPKD sebesar Rp4.609.933.882,00

i. Reklas antar KIB (Inventarisasi) sebesar Rp206.818.988.748,49 terdiri dari :
i. Dinas Pendidikan sebesar Rp773.092.032,21
ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp266.041.200,00

iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp48.658.504.434,00
iv. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp148.705.699.712,28
v. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp254.199.870,00
vi. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp69.806.500,00
vii. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp7.943.590.000
viii. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp47.950.000,00
ix. Kecamatan Bogor Tengah sebesar R p100.105.000,00

j. Reklas ke Aset Rusak Berat (Inventarisasi) sebesar Rp852.338.861,32 terdiri dari :
i. Dinas Kesehatan sebesar Rp14.987.250,00
ii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp20.307.340,00
iii. Dinas Sosial sebesar Rp80.700.000,00
iv. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp263.600.000,00
v. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp1.448.000,00
vi. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp1.500.624,00
vii. Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp4.535.000,00
viii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp310.872.427,32
ix. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp40.338.220,00
x. PPKD sebesar Rp114.050.000,00

k. Reklas dari aset lain-lain sebesar Rp3.958.267.356,00 terdiri dari :
i. Dinas Pendidikan sebesar Rp468.000,00
ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp114.750.000,00
iii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp192.900.000,00
iv. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp3.257.185.000,00
v. Sekretariat Daerah sebesar Rp392.964.356,00

l. Hibah aset tahun perolehan sebelum 2024 (Inventarisasi) sebesar Rp21.973.414.791,00 terdiri dari :
i. Dinas Pendidikan sebesar Rp183.486.240,00
ii. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp748.599.775,00
iii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp11.060.227.303,00
iv. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp357.602.180,00
v. Dinas Perhubungan sebesar Rp570.541.815,00
vi. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp5.530.668.962,00
vii. PPKD sebesar Rp3.522.288.516,00

m. Aset belum tercatat (Inventarisasi) sebesar Rp75.727.896.094,00 terdiri dari :
i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.573.175.568,00
ii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp1.504.524.700,00
iii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp11.900.000,00
iv. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp3.393.957.826,00
v. PPKD sebesar Rp68.244.338.000,00

2. Pengurangan nilai Aset Tetap sebesar Rp641.552.668.000,34 terdiri dari :
a. Dropping antar SKPD (BM) sebesar Rp15.771.072.190,00 terdiri dari :
i. Dinas Pendidikan sebesar Rp3.680.713.000,00
ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp7.025.269.099,00
iii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp688.200,00
iv. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp194.000.000,00
v. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp7.432.000,00
vi. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp1.066.660.000,00
vii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp2.510.726.291,00

viii. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp888.404.600,00
ix. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp397.179.000,00

b. Reklasifikasi antar KIB (BM) sebesar Rp2.275.000,00 yaitu pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.275.000,00

c. Belanja Modal yang dikapitalisasi Menjadi aset ekstrakomtabel Rp22.925.358.059,00 terdiri dari :
   i. Dinas Pendidikan sebesar Rp22.373.051.040
   ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp114.752.936,00
   iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp5.300.000,00
   iv. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp197.753.407,00
   v. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp6.193.800,00
   vi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp9.879.000,00
   vii. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp29.445.000,00
   viii. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp970.000,00
   ix. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp688.200,00
   x. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp2.733.700,00
   xi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp125.370.000,00
   xii. Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp14.375.000,00
   xiii. Inspektorat sebesar Rp30.624.600,00
   xiv. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp14.221.376,00

d. Belanja modal yang tidak jadi aset sebesar Rp569.486.579,00 terdiri dari :
   i. Dinas Pendidikan sebesar Rp7.177.000,00
   ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp18.000.000,00
   iii. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp37.394.100,00
   iv. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp172.224.509,00
   v. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp15.598.270,00
   vi. Sekretariat Daerah sebesar Rp18.200.000,00
   vii. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp235.079.400,00
   viii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp2.808.300,00
   ix. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp63.005.000,00

e. Kewajiban pihak ketiga yang asetnya telah diakui ditahun 2024 sebesar Rp18.783.779.409,00 terdiri dari :
   i. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp268.422.114,00
   ii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp16.617.803.295,00
   iii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp57.054.000,00
   iv. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.840.500.000,00

f. Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi) Rp89.750.574.999,51 terdiri dari :
   i. Dinas Pendidikan sebesar Rp2.550.352.280,10
   ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp3.364.197.964
   iii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp5.727.138.800,00
   iv. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp14.008.200,00
   v. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp126.428.572,00
   vi. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp6.837.567.808,03,00
   vii. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp306.700.000,00
   viii. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp2.276.578.528,00
   ix. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp479.318.750,00

x. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp260.380.000,00
xi. Sekretariat Daerah sebesar Rp3.982.182.921,40
xii. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp433.376.462,56
xiii. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp2.721.051.770,00
xiv. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp1.600.668.222,00
xv. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp135.930.000,00
xvi. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp28.045.000,00
xvii. Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp83.125.000,00
xviii. Inspektorat sebesar Rp506.254.211,69
xix. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp2.410.232.524,73
xx. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp13.466.707.627,00
xxi. PPKD sebesar Rp42.440.330.358,00

g. Aset yang dikapitalisasi (Inventarisasi) sebesar Rp10.591.098,00 yaitu Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp10.591.098,00
h. Reklas antar KIB (Inventarisasi) sebesar Rp206.818.988.748,49 terdiri dari :
i. Dinas Pendidikan sebesar Rp773.092.032,21
ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp266.041.200,00
iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp48.658.504.434,00
iv. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp148.705.699.712,28
v. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp254.199.870,00
vi. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp69.806.500,00
vii. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp7.943.590.000,00
viii. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp47.950.000,00
ix. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp100.105.000,00
i. Reklas ke Aset Rusak Berat (Inventarisasi) sebesar Rp14.703.611.578,86 terdiri dari :
i. Dinas Pendidikan sebesar Rp3.207.764.872,32
ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp115.661.753,63
iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp1.690.792.546,29
iv. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp849.585.319,71
v. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp553.612.328,97
vi. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp221.238.952,78
vii. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp3.902.154.274,17
viii. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp28.643.124,00
ix. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp366.709.240,93
x. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp1.175.531.742,02
xi. Sekretariat Daerah sebesar Rp565.516.949,50
xii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp106.726.818,18
xiii. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp177.112.000,00
xiv. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp884.683.701,88
xv. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp531.396.029,61
xvi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp326.481.925,87
j. Reklas dari aset lain-lain sebesar Rp42.486.563,00 terdiri dari :
i. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp28.165.000,00
ii. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp14.321.563,00
k. Penghapusan BMD dan Double Catat sebesar Rp51.440.364.534,12 terdiri dari :
i. Dinas Pendidikan sebesar Rp1.150.000,00
ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp70.750.000,00

iii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp5.613.944.900,00
iv. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp2.025.126.270,00
v. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp49.450.000,00
vi. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp280.820.000,00
vii. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp16.571.000,00
viii. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp12.385.713.000,00
ix. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp93.342.281,12
x. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp52.542.611,00
xi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp366.259.000,00
xii. PPKD sebesar Rp30.388.395.472,00
xiii. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp96.300.000,00

l. Reklasifikasi kondisi asset tetap (Inventarisasi) sebesar Rp1.375.637.190,36 terdiri dari :
i. Dinas Pendidikan sebesar Rp70.331.000,00
ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp11.293.150,00
iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp69.784.715,00
iv. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp26.991.325,00
v. Sekretariat Daerah sebesar Rp11.047.000,00
vi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp1.186.190.000,07

m. Reklas aset tetap tanah menjadi properti investasi tanah sebesar Rp219.358.442.051,00 terdiri dari :
i. Dinas Pendidikan sebesar Rp517.788.888,00
ii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp1.294.880.850,00
iii. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp18.569.541.750,00
iv. Dinas Perhubungan sebesar Rp1.072.773.190,00
v. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp3.845.478.403,00
vi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp334.162.830,00
vii. PPKD sebesar Rp193.723.816.140,00

5.3.1.3.1 Tanah

Saldo Aset Tetap berupa Tanah Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.796.161.596.908,69 dan Rp5.938.980.428.024,63 mengalami penurunan nilai sebesar Rp142.818.831.115,94 atau -2,40%.

Tanah yang dikelompokkan sebagai Aset Tetap adalah Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Berikut tabel perbandingan Aset Tetap Tanah Per Perangkat Daerah pada periode Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

Tabel 5.3.86
Tanah per perangkat daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2-3)	(6=4/3)
1	Dinas Pendidikan	127.657.803.933,34	127.116.486.361,28	541.317.572,06	0,43
2	Dinas Kesehatan	31.924.855.450,00	29.516.095.356,00	2.408.760.094,00	8,16
3	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	367.320.000,00	367.320.000,00	-	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.905.396.615.386,00	2.904.688.641.886,00	707.973.500,00	0,02
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	1.005.437.408.524,00	999.134.674.714,00	6.302.733.810,00	0,63
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	462.013.000,00	462.013.000,00	-	-
7	Dinas Sosial	1.967.398.000,00	1.934.598.000,00	32.800.000,00	1,70
8	Dinas Tenaga Kerja	6.553.399.812,00	6.553.399.812,00	-	-
9	Dinas Lingkungan Hidup	38.143.413.940,00	56.712.955.690,00	(18.569.541.750,00)	(32,74)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	417.239.114,00	417.239.114,00	-	-
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	917.985.750,00	917.985.750,00	-	-
12	Dinas Perhubungan	20.845.615.397,00	21.318.403.587,00	(472.788.190,00)	(2,22)
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	11.259.619.914,35	11.919.968.130,35	(660.348.216,00)	(5,54)
14	Dinas Pemuda dan Olahraga	93.100.320.000,00	93.100.320.000,00	-	-
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.177.389.588,00	5.177.389.588,00	-	-
16	Dinas Arsip dan Perpustakaan	964.254.062,00	964.254.062,00	-	-
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	20.444.181.075,00	20.695.218.905,00	(251.037.830,00)	(1,21)
18	Sekretariat Daerah	28.642.503.804,00	28.642.503.804,00	-	-
19	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	47.348.887.770,00	47.348.887.770,00	-	-
20	Kecamatan Bogor Selatan	27.732.809.249,00	30.453.861.019,00	(2.721.051.770,00)	(8,93)
21	Kecamatan Bogor Timur	1.756.086.324,00	1.795.486.102,00	(39.399.778,00)	(2,19)
22	Kecamatan Bogor Tengah	4.613.591.659,00	4.613.591.659,00	-	-
23	Kecamatan Bogor Barat	12.903.827.468,00	12.903.827.468,00	-	-
24	Kecamatan Bogor Utara	8.315.430.354,00	8.315.430.354,00	-	-
25	Kecamatan Tanah Sareal	5.550.973.150,00	5.634.098.150,00	(83.125.000,00)	(1,48)
26	Inspektorat	133.800.000,00	133.800.000,00	-	-
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.920.000.000,00	1.920.000.000,00	-	-
28	Badan Keuangan dan Aset Daerah	317.196.000,00	317.196.000,00	-	-
29	Badan Pendapatan Daerah	798.624.000,00	798.624.000,00	-	-
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.745.600.000,00	1.745.600.000,00	-	-
31	PPKD	1.383.103.734.469,00	1.513.118.858.027,00	(130.015.123.558,00)	(8,59)
32	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	241.699.716,00	241.699.716,00	-	-
Jumlah		**5.796.161.596.908,69**	**5.938.980.428.024,63**	**(142.818.831.115,94)**	**(2,40)**

Mutasi Aset Tetap berupa Tanah Pemerintah Kota Bogor Tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5.3.87
Rincian Mutasi Tanah

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Saldo per 31 Desember 2023	5.938.980.428.024,63
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2024	2.477.717.100,00
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	813.680.000,00
Hibah BMD tahun berjalan	4.186.097.000,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	11.765.901.706,00
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	307.232.720,06
BMD belum tercatat (inventarisasi)	69.548.963.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	89.099.591.526,06
Mutasi Kurang :	
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	813.680.000,00
Kewajiban kepada pihak ketiga th 2024 yg asetnya telah diakui di tahun 2023	57.054.000,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	11.765.901.706,00
Penghapusan BMD (inventarisasi)	4.331.831.288,00
Reklas ke properti investasi tanah	214.949.955.648,00
Jumlah Mutasi Kurang	231.918.422.642,00
Total Mutasi	(142.818.831.115,94)
Saldo per 31 Desember 2024	5.796.161.596.908,69

Perubahan nilai aset tetap tanah senilai Rp142.818.831.115,94 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penambahan nilai tanah sebesarRp89.099.591.526,06 terdiri dari :
   a. Realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp2.477.717.100,00 terdiri dari :
      i. Dinas Pendidikan sebesar Rp813.680.000,00
      ii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp560.621.000,00
      iii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp1.103.416.100,00
   b. Belanja modal yang dimutasikan dari perangkat daerah lain sebesar Rp813.680.000,00 terdiri yaitu Dinas Pendidikan sebesar Rp813.680.000
   c. Hibah tahun perolehan berjalan 2024 sebesar Rp4.186.097.000,00 yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp4.186.097.000
   d. Mutasi dari OPD lain (Inventarisasi) sebesar Rp11.765.901.706,00 terdiri dari :
      i. Dinas Pendidikan sebesar Rp670.129.440,00
      ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp2.592.645.608,00
      iii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp979.876.800,00
      iv. Dinas Sosial sebesar Rp32.800.000,00
      v. Dinas Perhubungan sebesar Rp599.985.000,00
      vi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp83.125.000,00
      vii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp4.331.831.288,00
      viii. PPKD sebesar Rp2.475.508.570,00
   e. Reklas antar KIB (Inventarisasi) sebesar Rp307.232.720,06 terdiri dari :

i. Dinas Pendidikan sebesar Rp79.226.460,06
ii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp147.352.500,00
iii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp80.653.760,00

f. Aset belum tercatat (Inventarisasi) sebesar Rp69.548.963.000,00 terdiri dari :
i. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp1.304.625.000,00
ii. PPKD sebesar Rp68.244.338.000,00

2. Pengurangan nilai tanah sebesar Rp231.918.422.642,00 terdiri dari :
a. Dropping antar SKPD (BM) sebesar Rp813.680.000,00 yaitu Dinas Pendidikan sebesar Rp813.680.000
b. Kewajiban pihak ketiga yang asetnya telah diakui ditahun 2024 sebesar Rp57.054.000,00 yaitu pada Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp57.054.000
c. Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi) Rp11.765.901.706,00 terdiri dari :
i. Dinas Pendidikan sebesar Rp503.929.440,00
ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp183.885.514,00
iii. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp660.348.216,00
iv. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp2.721.051.770,00
v. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp39.399.778,00
vi. Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp83.125.000,00
vii. PPKD sebesar Rp7.574.161.988,00
d. Penghapusan BMD dan Double Catat sebesar Rp4.331.831.288,00 yaitu pada PPKD sebesar Rp4.331.831.288,00
e. Reklas aset tetap tanah menjadi properti investasi tanah sebesar Rp214.949.955.648,00 terdiri dari :
i. Dinas Pendidikan sebesar Rp517.788.888,00
ii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp1.294.880.850,00
iii. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp18.569.541.750,00
iv. Dinas Perhubungan sebesar Rp1.072.773.190,00
v. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp334.162.830,00
vi. PPKD sebesar Rp193.160.808.140,00

Sampai dengan 31 Desember 2024 dari total perumahan di Kota Bogor, sebanyak 28 perumahan dengan 38 Berita Acara Serah Terima telah diserahkan PSU ke Pemerintah Kota Bogor, sedangkan sebanyak 261 perumahan belum menyerahkan PSU. Dari 299 perumahan, sebanyak 28 PSU telah dicatat sebagi aset Pemerintah Kota Bogor dan sebanyak 261 PSU belum dicatat. Rincian 28 PSU yang sudah diserahkan terdapat pada lampiran dan rincian PSU yang belum diserahkan terdapat pada lampiran 17.

5.3.1.4.1.1. Tanah yang Telah Bersertifikat

Dari total 3.940 bidang tanah pada Pemerintah Kota Bogor telah dilakukan pensertifikatan tanah sebagai upaya pengamanan Barang Milik Daerah dengan total 1.196 bidang tanah dengan total nilai tanah Rp1.919.554.780.981,17. Pensertifikatan tanah hingga saat ini sedang berproses dengan total 299 bidang tanah dengan nilai tanah Rp 442.183.840.608,00. Rincian perkembangan pensertifikatan tanah pada Pemerintah Kota Bogor sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3.88
Bidang Tanah yang Bersertifikat

Uraian	Jumlah Bidang	Luas Bidang	Nilai Perolehan
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,00	1.600,00	1.273.600.000,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1,00	780,00	462.013.000,00
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1,00	6.210,00	317.196.000,00
Badan Pendapatan Daerah	1,00	6.210,00	798.624.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	1,00	4.734,00	1.920.000.000,00
Dinas Arsip Dan Perpustakaan	2,00	1.000,00	964.254.062,00
Dinas Kesehatan	45,00	55.481,00	30.782.452.317,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	6,00	89.039,00	18.495.518.905,00
Dinas Koperasi,Usaha Kecil,Menengah,Perdagangan Dan Perindustrian	4,00	3.848,00	10.974.619.914,35
Dinas Lingkungan Hidup	24,00	376.093,00	38.289.328.144,54
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	3,00	2.232,00	227.489.588,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	280,00	416.445,45	270.181.286.219,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2,00	1.362,00	417.239.114,00
Dinas Pemuda Dan Olahraga	3,00	90.499,00	93.100.320.000,00
Dinas Pendidikan	223,00	400.508,00	119.921.897.459,28
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2,00	1.155,00	917.985.750,00
Dinas Perhubungan	5,00	28.643,00	21.020.865.637,00
Dinas Perumahan Dan Permukiman	385,00	535.005,00	348.189.895.566,00
Dinas Sosial	2,00	2.676,00	1.967.398.000,00
Dinas Tenaga Kerja	2,00	2.356,00	6.553.399.812,00
Inspektorat	1,00	535,00	133.800.000,00
Kecamatan Bogor Barat	17,00	15.051,00	8.064.200.047,00
Kecamatan Bogor Selatan	23,00	47.131,00	21.329.622.086,00
Kecamatan Bogor Tengah	9,00	4.268,00	2.932.333.809,00
Kecamatan Bogor Timur	5,00	2.869,00	692.674.432,00
Kecamatan Bogor Utara	11,00	8.361,00	5.389.458.610,00
Kecamatan Tanah Sareal	26,00	14.964,00	3.837.484.987,00
Pejabatpengelola Keuangan Daerah	104,00	486.620,00	836.880.616.672,00
Rumahsakit Umum Daerah (Blud)	1,00	30.610,00	367.320.000,00
Sekretariat Daerah	3,00	17.606,00	25.802.999.080,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3,00	15.377,00	47.348.887.770,00
Total	**1.196,00**	**2.669.268,45**	**1.919.554.780.981,17**

Tabel 5.3.89
Bidang Tanah yang Dalam Proses Pensertifikatan

Uraian	Jumlah Bidang	Luas Bidang	Nilai Perolehan
Dinas Kesehatan	2,00	1.871,00	818.024.016,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	283,00	550.417,00	303.531.337.152,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	1,00	964,00	241.699.716,00
Dinas Pendidikan	1,00	6.918,00	3.469.191.000,00
Kecamatan Bogor Barat	1,00	400,00	76.500.000,00
Kecamatan Tanah Sareal	1,00	400,00	48.000.000,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	9,00	43.785,00	131.159.584.000,00
Sekretariat Daerah	1,00	545,00	2.839.504.724,00
Total	299,00	605.300,00	442.183.840.608,00

Tabel 5.3.90
Bidang Tanah yang Belum Bersertifikat

Uraian	Jumlah Bidang	Luas Bidang	Nilai Perolehan
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,00	707,00	472.000.000,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	2,00	12.488,00	2.282.825.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	1,00	1.000,00	285.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	6,00	174.897,00	18.423.627.545,46
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1,00	667,00	4.949.900.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.830,00	5.147.290,00	2.331.683.992.015,00
Dinas Perhubungan	1,00	7.000,00	897.522.950,00
Dinas Perumahan Dan Permukiman	304,00	942.233,00	658.542.393.808,00
Dinaskesehatan	3,00	809,00	324.379.117,00
Dinaspendidikan	9,00	16.274,00	4.784.504.362,06
Kecamatan Bogor Barat	9,00	28.175,00	5.425.823.280,00
Kecamatan Bogor Selatan	8,00	27.388,00	6.403.187.163,00
Kecamatan Bogor Tengah	4,00	2.288,00	435.770.000,00
Kecamatan Bogor Timur	1,00	397,00	1.010.312.200,00
Kecamatan Bogor Utara	13,00	16.375,00	2.322.747.190,00
Kecamatan Tanah Sareal	8,00	23.420,00	2.904.604.400,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	244,00	572.737,00	612.556.173.225,00
Total	**2.445,00**	**6.974.145,00**	**3.653.704.762.255,52**

5.3.1.4.1.2. Aset Tanah yang Perlu Perhatian Khusus

Sampai dengan 31 Desember 2024 dari total perumahan di Kota Bogor, sebanyak 28 perumahan dengan 38 Berita Acara Serah Terima telah diserahkan PSU ke Pemerintah Kota Bogor, sedangkan sebanyak 261 perumahan belum menyerahkan PSU. Dari 299 perumahan, sebanyak 28 PSU telah dicatat sebagi aset Pemerintah Kota Bogor dan sebanyak 261 PSU belum dicatat. Rincian 28 PSU yang sudah diserahkan terdapat pada lampiran dan rincian PSU yang belum diserahkan terdapat pada lampiran 17.

a. **Double Pencatatan Tanah SDN Kedung Badak I, Kedung Badak II dan SDN Sempur Kidul**

Tanah SDN Kedung Badak I yang berlokasi di Jalan Kolonel Martadisastra No. 3 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor tercatat di Neraca Pemerintah Kota Bogor dengan luas 2.037 dan No Sertfikat Hak Pakai 26 Kedung Badak Tanggal 6 Desember 2021 dengan nilai perolehan Rp228.525.000 masuk ke pencatatan Aset Kementerian Pertahanan Republik Indonesia c.q TNI-AD cq Kodam III/Slw dengan Sertifikat Hak Pakai No. 5 Tahun 1999.

Tanah SDN Kedung Badak II yang berlokasi di Jalan Kolonel Martadisastra No. 46 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor tercatat di neraca Pemerintah Kota Bogor dengan luas 1.396 dan No Sertfikat Hak Pakai 27 Kedung Badak Tanggal 14 Desember 2021 dengan nilai perolehan Rp110.505.500 masuk ke pencatatan Aset Kementerian Pertahanan Republik Indonesia c.q TNI-AD cq Kodam III/Slw dengan Sertifikat Hak Pakai No. 5 Tahun 1999.

Tanah SDN Sempur Kidul yang berlokasi di Jalan Sempur Kidul No. 40 Kel. Sempur Kec. Bogor Tengah Kota Bogor tercatat di Neraca Pemerintah Kota Bogor dengan luas 1.494 dan No. Sertfikat Hak Pakai 15 Sempur Tanggal 23 September 2019 dengan nilai perolehan Rp114.959.500 masuk ke pencatatan Aset Kementerian Pertahanan Republik Indonesia c.q TNI-AD cq Kodam III/Slw dengan Sertifikat Hak Pakai No. 3 Tahun 1998.

Dalam Permendagri No 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 19 Tahun Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada pasal 433 dimana disebutkan Penghapusan BMD terkait dengan masalah ini adalah dengan melalui mekanisme putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

Menanggapi Permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Kota Bogor telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Mengirimkan Surat Pada BPN melalui Surat Kepala BKAD Nomor 000.2.3.2/2502-Bid.BMD tanggal 24 Juni 2024 perihal Permohonan Konfirmasi yang pada intinya menanyakan konfirmasi tertulis terkait status sertifikat Barang Milik Daerah(BMD) dimaksud dengan jawaban Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor No HP.03.01/3296-32.71/VIII/2024 Tanggal 20 Agustus 2024 Hal Permohonan Konfirmasi yang pada intinya memohon konfirmasi dengan kondisi sekarang kronologis bidang tanah tersebut dan menanyakan apakah termasuk asset yang disita/diblokir;
2. Bahwa menjawab surat BPN Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor No HP.03.01/3296-32.71/VIII/2024 Tanggal 20 Agustus 2024 Hal Permohonan Konfirmasi melalui Surat BKAD Nomor 000.2.3.2/4953-Bid.BMD tanggal 14 Oktober 2025 terkait Tanggapan atas Permohonan Konfirmasi yang pada intinya menjelaskan terkait kronologis pensertipikatan melalui program PTSL dan info pencatatan Aset Tersebut Dalam KIB;
3. Bahwa telah dilaksanakan rapat untuk membahas permasalahan tumpang tindih sertipikat melalui Surat Undangan Kepala BKAD Nomor. 500.16.6.4/5923-Bid.BMD Tanggal 24 Desember 2025 prihal undangan Rapat yang dihadiri oleh unsur Komandan Korem 061/Suryakencana dan unsur Zibang Kota Bogor dan isi notulensi antara lain menjelaskan terkait mekanisme penghapusan sertipikat Pemerintah Kota Bogor yang tumpang tindih dengan Sertipikat an Departemen Pertanahan Cq. Tentara Nasional Angkatan Darat Komandan Daerah Militer III/Siliwangi yang antara lain Sertipikat Hak Pakai No 27/Kedung Badak, Sertipikat Hak Pakai No 15/Sempur dan Sertipikat No. 27/ Kelurahan Sempur secara aturan dalam Permendagri No 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 19 Tahun Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada pasal 433 dimana disebutkan Penghapusan BMD terkait dengan masalah ini yaitu dengan melalui mekanisme putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, namum mengingat permasalahan adalah antar instansi pemerintah hal ini akan menjadi bahan diskusi lebih lanjut dengan BPK; Unsur Komandan Korem 061/Suryakencana mengatakan apabila harus melalui persidangan perlu mempersiapkan anggaran yang belum direncanakan pada tahun ini.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.256.136.716.584,89 dan Rp1.136.877.015.590,06 mengalami peningkatan sebesar Rp119.259.700.994,83 atau 10,49%.

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Adapun rincian peralatan mesin per perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel 5.3.91
Peralatan Mesin Per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dinas Pendidikan	176.929.378.201,09	161.291.953.069,87	15.637.425.131,22	9,70
2	Dinas Kesehatan	126.470.560.094,50	118.539.697.859,13	7.930.862.235,37	6,69
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	277.764.492.813,44	240.258.081.767,02	37.506.411.046,42	15,61
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	55.460.282.818,31	48.124.977.297,02	7.335.305.521,29	15,24
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	59.737.136.034,01	39.692.763.374,98	20.044.372.659,03	50,50
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	27.719.365.292,03	25.780.796.752,03	1.938.568.540,00	7,52
7	Satuan Polisi Pamong Praja	8.811.857.261,59	8.282.796.366,59	529.060.895,00	6,39
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.680.073.750,05	11.276.209.915,05	403.863.835,00	3,58
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.813.475.772,00	1.941.479.894,00	871.995.878,00	44,91
10	Dinas Sosial	4.796.652.467,46	4.492.044.067,46	304.608.400,00	6,78
11	Dinas Tenaga Kerja	6.237.872.274,68	6.365.951.067,46	(128.078.792,78)	(2,01)
12	Dinas Lingkungan Hidup	97.326.296.125,34	85.111.309.719,51	12.214.986.405,83	14,35
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.270.972.630,38	15.146.417.194,38	1.124.555.436,00	7,42
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.127.435.471,04	4.005.335.971,04	122.099.500,00	3,05
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.538.803.139,68	4.478.183.139,68	60.620.000,00	1,35
16	Dinas Perhubungan	51.349.526.123,21	50.565.578.594,21	783.947.529,00	1,55
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	34.167.819.139,74	33.883.533.209,18	284.285.930,56	0,84
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	14.656.456.616,11	14.568.239.616,11	88.217.000,00	0,61
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.285.276.887,14	9.641.022.878,07	(355.745.990,93)	(3,69)
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	4.819.194.896,78	4.286.410.947,78	532.783.949,00	12,43
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.924.600.858,90	7.672.035.400,92	(747.434.542,02)	(9,74)
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan	9.607.991.649,55	9.548.008.649,55	59.983.000,00	0,63
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.626.017.829,11	14.606.274.830,11	19.742.999,00	0,14
24	Sekretariat Daerah	60.178.262.571,00	58.438.404.145,90	1.739.858.425,10	2,98
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	42.864.401.636,64	42.181.893.099,20	682.508.537,44	1,62
26	Kecamatan Bogor Selatan	10.758.878.672,35	9.495.208.672,35	1.263.670.000,00	13,31
27	Kecamatan Bogor Timur	7.502.970.236,08	6.650.118.661,08	852.851.575,00	12,82
28	Kecamatan Bogor Tengah	8.378.906.173,81	7.682.075.091,99	696.831.081,82	9,07
29	Kecamatan Bogor Barat	9.555.698.774,74	8.545.014.762,34	1.010.684.012,40	11,83
30	Kecamatan Bogor Utara	9.026.160.481,30	8.403.060.552,43	623.099.928,87	7,42
31	Kecamatan Tanah Sareal	8.938.498.439,03	7.626.478.796,17	1.312.019.642,86	17,20
32	Inspektorat	5.761.051.760,92	5.349.117.122,61	411.934.638,31	7,70
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.424.119.867,74	6.620.765.808,86	(196.645.941,12)	(2,97)
34	Badan Keuangan dan Aset Daerah	10.888.301.884,88	10.428.000.959,17	460.300.925,71	4,41
35	Badan Pendapatan Daerah	18.623.478.915,48	14.789.764.386,09	3.833.714.529,39	25,92
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.870.744.648,06	5.821.726.573,93	49.018.074,13	0,84
37	PPKD	5.562.594.305,38	4.516.888.305,38	1.045.706.000,00	23,15
38	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	19.681.102.071,34	20.769.397.071,41	(1.088.295.000,07)	(5,24)
Jumlah		**1.256.136.708.584,89**	**1.136.877.015.590,06**	**119.259.692.994,83**	**10,49**

Mutasi Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Pemerintah Kota Bogor tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.92
Mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Saldo per 31 Desember 2023	1.136.877.015.590,06
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2024	133.226.642.367,00
Kewajiban kepada Pihak ketiga TA 2024 yang asetnya Telah diakui Tahun Berjalan	1.709.369.921,00
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	8.064.741.555,00
Hibah BMD tahun berjalan	526.980.722,00
Belanja Operasional (BOP) yang dikapitalisasi Menjadi Aset tetap	814.370.520,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	14.817.840.262,35
Reklasifikasi dari aset lainnya (inventarisasi) :	
- Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat	852.338.861,32
- Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain (Penelusuran)	3.957.799.356,00
Hibah BMD sebelum Tahun 2024	6.562.601.333,00
BMD belum tercatat (inventarisasi)	3.605.757.526,00
Jumlah Mutasi Tambah	174.138.442.423,67
Mutasi Kurang :	
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	8.064.741.555,00
Belanja Modal yang di reklasifikasi antar KIB	2.275.000,00
Belanja Modal yang dikapitalisasi Menjadi aset ekstrakomtabel	14.059.507.922,00
Belanja Modal tidak menjadi aset tetap	512.520.279,00
Kewajiban kepada pihak ketiga th 2024 yg asetnya telah diakui di tahun 2023	268.422.114,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	14.817.840.262,35
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	763.672.072,15
Reklasifikasi menjadi aset lainnya (Inventarisasi) :	
- Reklasifikasi menjadi Aset Rusak Berat	14.657.561.578,86
- Reklasifikasi menjadi Aset Lain-Lain (Penelusuran)	42.486.563,00
Penghapusan BMD (inventarisasi)	314.084.892,12
Reklasifikasi Kondisi BMD (inventarisasi)	1.375.637.190,36
Jumlah Mutasi Kurang	54.878.749.428,84
Total Mutasi 2024	**119.259.692.994,83**
Saldo per 31 Desember 2024	**1.256.136.708.584,89**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	**(1.013.699.588.886,23)**
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**242.437.119.698,66**

Nilai Aset Peralatan dan Mesin mengalami peningkatan sebesar Rp119.259.700.994,83 terdiri dari:

1. Penambahan peralatan mesin sebesar Rp174.138.450.423,67 terdiri dari :
   a. Realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp133.226.642.367,00 terdiri dari :
      i. Dinas Pendidikan sebesar Rp32.832.656.811
      ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp7.475.671.330
      iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp39.266.988.308
      iv. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp6.155.296.666
      v. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp15.652.357.325
      vi. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp1.759.559.040

vii. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp126.941.000
viii. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp560.286.260
ix. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp911.490.959
x. Dinas Sosial sebesar Rp182.756.400
xi. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp52.010.160
xii. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp12.198.505.000
xiii. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp737.063.200
xiv. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp122.099.500
xv. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp60.620.000
xvi. Dinas Perhubungan sebesar Rp213.405.714
xvii. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp15.598.270
xviii. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp16.399.000
xix. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp127.500.000
xx. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp69.591.300
xxi. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp107.389.000
xxii. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp61.035.000
xxiii. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp19.742.999
xxiv. Sekretariat Daerah sebesar Rp3.253.902.356
xxv. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp1.476.334.400
xxvi. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp1.263.670.000
xxvii. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp840.650.000
xxviii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp803.557.900
xxix. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp778.922.960
xxx. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp618.875.000
xxxi. Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp1.300.500.000
xxxii. Inspektorat sebesar Rp916.932.000
xxxiii. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp73.808.340
xxxiv. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.730.501.169
xxxv. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp811.325.000
xxxvi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp375.500.000
xxxvii. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp257.200.000

b. Belanja Operasional yang dikapitalisasi Menjadi Aset tetap sebesar Rp814.370.520,00 terdiri dari :
i. Dinas Kesehatan sebesar Rp511.817.570,00
ii. Dinas Sosial sebesar Rp41.152.000,00
iii. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp58.238.000,00
iv. Inspektorat sebesar Rp31.881.450,00
v. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp171.281.500,00

c. Belanja modal yang dimutasikan dari perangkat daerah lain sebesar Rp8.064.741.555,00 terdiri dari :
i. Dinas Pendidikan sebesar Rp2.867.033.000
ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp3.067.531.780
iii. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp688.200

iv. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp1.066.660.000
v. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp1.201.575
vi. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp470.448.000
vii. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp194.000.000
viii. PPKD sebesar Rp397.179.000

d. Hibah tahun perolehan berjalan 2024 sebesar Rp526.980.722,00 terdiri dari :
i. Dinas Pendidikan sebesar Rp51.215.916
ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp145.295.500
iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp5.300.000
iv. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp41.049.000
v. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp111.842.000
vi. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp139.500.000
vii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp17.806.306
viii. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp14.972.000

e. Kewajiban pihak ketiga yang asetnya telah diakui ditahun 2024 sebesar Rp1.709.369.921,00 yaitu pada Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp1.709.369.921,00

f. Mutasi dari OPD lain (Inventarisasi) sebesar Rp14.817.840.262,35 terdiri dari :
i. Dinas Pendidikan sebesar Rp291.187.857,00
ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp2.664.771.250,00
iii. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp430.284.895,00
iv. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp205.000.000,00
v. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp41.150.000,00
vi. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp6.837.567.808,00
vii. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp431.426.923,00
viii. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp532.747.931,00
ix. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp434.600.000,00
x. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp362.782.000,00
xi. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp723.572.649,00
xii. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp320.708.200,00
xiii. Sekretariat Daerah sebesar Rp205.000.000,00
xiv. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp11.000.000,00
xv. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp35.825.000,00
xvi. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp65.806.052,40
xvii. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp2.724.304,87
xviii. Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp21.359.642,86
xix. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp665.848.750,00
xx. PPKD sebesar Rp534.477.000,00

g. Reklas antar KIB (Inventarisasi) sebesar Rp33.057.967.695,57 terdiri dari :
i. Dinas Kesehatan sebesar Rp14.987.250,00
ii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp20.307.340,00
iii. Dinas Sosial sebesar Rp80.700.000,00
iv. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp263.600.000,00
v. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp1.448.000,00
vi. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp1.500.624,00
vii. Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp4.535.000,00

viii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp310.872.427,32
ix. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp40.338.220,00
x. PPKD sebesar Rp114.050.000,00

h. Reklas ke Aset Rusak Berat (Inventarisasi) sebesar Rp858.374.485,32 terdiri dari:
i. Dinas Kesehatan sebesar Rp14.987.250,00
ii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp20.307.340,00
iii. Dinas Sosial sebesar Rp80.700.000,00
iv. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp263.600.000,00
v. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp1.448.000,00
vi. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp1.500.624,00
vii. Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp4.535.000,00
viii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp316.908.051,00
ix. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp40.338.220,00
x. PPKD sebesar Rp114.050.000,00

i. Reklas dari aset lain-lain sebesar Rp3.957.799.356,00 terdiri dari :
i. Dinas Kesehatan sebesar Rp114.750.000,00
ii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp192.900.000,00
iii. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp3.257.185.000,00
iv. Sekretariat Daerah sebesar Rp392.964.356,00

j. Hibah aset tahun perolehan sebelum 2024 (Inventarisasi) sebesar Rp6.562.601.333,00 terdiri dari :
i. Dinas Pendidikan sebesar Rp183.486.240,00
ii. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp748.599.775,00
iii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp4.702.371.323,00
iv. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp357.602.180,00
v. Dinas Perhubungan sebesar Rp570.541.815,00

k. Aset belum tercatat (Inventarisasi) sebesar Rp3.605.757.526,00 terdiri dari :
i. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp199.899.700,00
ii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp11.900.000,00
iii. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp3.393.957.826,00

2. Pengurangan peralatan mesin sebesar Rp54.878.749.428,84 terdiri dari :
a. Dropping antar SKPD (BM) sebesar Rp8.064.741.555,00 terdiri dari :
i. Dinas Pendidikan sebesar Rp2.867.033.000,00
ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp3.068.733.355,00
iii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp688.200,00
iv. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp194.000.000,00
v. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp1.066.660.000,00
vi. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp470.448.000,00
vii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp397.179.000,00

b. Reklasifikasi antar KIB (BM) sebesar Rp2.275.000,00 yaitu pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.275.000,00

c. Belanja Modal yang dikapitalisasi Menjadi aset ekstrakomtabel Rp14.059.507.922,00 terdiri dari :
i. Dinas Pendidikan sebesar Rp13.507.434.603,00
ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp114.752.936,00
iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp5.300.000,00
iv. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp197.753.407,00

v. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp6.193.800,00
vi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp9.879.000,00
vii. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp29.445.000,00
viii. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp970.000,00
ix. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp688.200,00
x. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp2.500.000,00
xi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp125.370.000,00
xii. Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp14.375.000,00
xiii. Inspektorat sebesar Rp30.624.600,00
xiv. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp14.221.376,00

d. Belanja modal yang tidak jadi aset sebesarRp512.520.279,00 terdiri dari :
i. Dinas Pendidikan sebesar Rp7.177.000,00
ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp18.000.000,00
iii. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp37.394.100,00
iv. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp118.066.509,00
v. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp15.598.270,00
vi. Sekretariat Daerah sebesar Rp18.200.000,00
vii. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp235.079.400,00
viii. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp63.005.000,00

e. Kewajiban pihak ketiga yang asetnya telah diakui ditahun 2024 sebesar Rp268.422.114,00 yaitu pada Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp268.422.114

f. Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi) Rp14.817.840.262,35 terdiri dari :
i. Dinas Pendidikan sebesar Rp239.373.644,94
ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp2.664.771.250,00
iii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp11.000.000,00
iv. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp14.008.200,00
v. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp126.428.572,00
vi. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp6.837.567.808,00
vii. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp306.700.000,00
viii. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp362.782.000,00
ix. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp479.318.750,00
x. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp260.380.000,00
xi. Sekretariat Daerah sebesar Rp1.517.244.338,40
xii. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp433.376.462,56
xiii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp35.825.000,00
xiv. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp28.045.000,00
xv. Inspektorat sebesar Rp506.254.211,69
xvi. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp994.765.024,73

g. Reklas antar KIB (Inventarisasi) sebesar Rp763.672.072,15 terdiri dari :
i. Dinas Pendidikan sebesar Rp693.865.572,15
ii. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp69.806.500,00

h. Reklas ke Aset Rusak Berat (Inventarisasi) sebesar Rp14.657.561.578,86 terdiri dari :
i. Dinas Pendidikan sebesar Rp3.199.514.872,32

ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp115.661.753,63
iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp1.690.792.546,29
iv. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp811.785.319,71
v. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp553.612.328,97
vi. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp221.238.952,78
vii. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp3.902.154.274,17
viii. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp28.643.124,00
ix. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp366.709.240,93
x. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp1.175.531.742,02
xi. Sekretariat Daerah sebesar Rp565.516.949,50
xii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp106.726.818,18
xiii. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp177.112.000,00
xiv. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp884.683.701,88
xv. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp531.396.029,61
xvi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp326.481.925,87

i. Reklas dari aset lain-lain sebesar Rp42.486.563,00 terdiri dari :
i. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp28.165.000,00
ii. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp14.321.563,00

j. Penghapusan BMD dan Double Catat sebesar Rp314.084.892,12 terdiri dari :
i. Dinas Pendidikan sebesar Rp1.150.000,00
ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp70.750.000,00
iii. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp93.342.281,12
iv. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp52.542.611,00
v. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp96.300.000,00

k. Reklasifikasi kondisi asset tetap (Inventarisasi) sebesar Rp1.375.637.190,36 terdiri dari :
i. Dinas Pendidikan sebesar Rp70.331.000,00
ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp11.293.150,00
iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp69.784.715,29
iv. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp26.991.325,00
v. Sekretariat Daerah sebesar Rp11.047.000,00
vi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp1.186.190.000,07

5.3.1.4.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.888.200.567.932,12 dan Rp1.582.373.719.962,85 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp305.826.847.969,27 atau 19,33%.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Berikut tabel perbandingan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per Perangkat Daerah pada periode Tahun Anggaran 2024 dan 2023.

Tabel 5.3.93
Gedung Bangunan per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2-3)	(6=4/3)
1	Dinas Pendidikan	548.176.766.184,71	442.850.492.657,71	105.326.273.527,00	23,78
2	Dinas Kesehatan	94.345.132.278,00	90.372.055.334,00	3.973.076.944,00	4,40
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	276.286.443.669,05	227.627.939.235,05	48.658.504.434,00	21,38
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	5.586.079.344,00	5.623.879.344,00	(37.800.000,00)	(0,67)
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	138.874.488.105,36	11.711.992.753,09	127.162.495.352,27	1.085,75
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	130.931.504.207,53	126.130.781.348,53	4.800.722.859,00	3,81
7	Satuan Polisi Pamong Praja	627.837.000,00	627.837.000,00	-	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	586.395.728,00	332.386.689,00	254.009.039,00	76,42
10	Dinas Sosial	2.751.779.603,00	2.716.861.203,00	34.918.400,00	1,29
11	Dinas Tenaga Kerja	2.482.647.776,00	2.482.647.776,00	-	-
12	Dinas Lingkungan Hidup	17.614.881.214,82	16.958.678.463,82	656.202.751,00	3,87
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.275.605.198,00	3.275.605.198,00	-	-
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.187.818.650,00	4.187.818.650,00	-	-
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	743.627.150,00	743.627.150,00	-	-
16	Dinas Perhubungan	179.944.380.473,49	170.564.069.693,49	9.380.310.780,00	5,50
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	14.806.067.972,26	32.274.957.687,26	(17.468.889.715,00)	(54,13)
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	67.514.025.680,00	54.039.766.718,00	13.474.258.962,00	24,93
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	24.245.939.416,65	21.781.000.833,65	2.464.938.583,00	11,32
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan	32.120.788.874,50	32.120.788.874,50	-	-
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	29.152.705.169,00	21.929.987.599,00	7.222.717.570,00	32,94
24	Sekretariat Daerah	32.899.231.094,00	35.364.169.677,00	(2.464.938.583,00)	(6,97)
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	79.623.826.839,00	79.623.826.839,00	-	-
26	Kecamatan Bogor Selatan	24.153.371.769,00	24.153.371.769,00	-	-
27	Kecamatan Bogor Timur	17.903.142.313,00	17.860.209.898,00	42.932.415,00	0,24
28	Kecamatan Bogor Tengah	17.946.216.153,00	15.805.832.862,00	2.140.383.291,00	13,54
29	Kecamatan Bogor Barat	27.478.193.378,34	26.895.967.280,34	582.226.098,00	2,16
30	Kecamatan Bogor Utara	19.896.174.663,41	18.872.570.527,41	1.023.604.136,00	5,42
31	Kecamatan Tanah Sareal	22.272.721.416,00	19.316.633.621,00	2.956.087.795,00	15,30
32	Inspektorat	3.230.367.376,00	3.230.367.376,00	-	-
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.029.369.300,00	4.029.369.300,00	-	-
34	Badan Keuangan dan Aset Daerah	19.035.236.780,00	5.530.332.528,00	13.504.904.252,00	244,20
35	Badan Pendapatan Daerah	29.337.506.643,00	42.804.214.270,00	(13.466.707.627,00)	(31,46)
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.339.818.912,00	1.339.818.912,00	-	-
37	PPKD	9.879.018.853,00	14.272.402.147,00	(4.393.383.294,00)	(30,78)
38	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.921.458.748,00	4.921.458.748,00	-	-
Jumlah		**1.888.200.567.932,12**	**1.582.373.719.962,85**	**305.826.847.969,27**	**19,33**

Mutasi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan Pemerintah Kota Bogor tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.94
Mutasi Aset Tetap Gedung Bangunan

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Saldo per 31 Desember 2023	1.582.373.719.962,85
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2024	141.166.601.172,00
Belanja Operasional yang dikapitalisasi Menjadi Aset tetap	97.607.295,00
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	6.885.218.635,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	31.011.786.355,10
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	174.561.737.077,27
Reklasifikasi dari aset lainnya (inventarisasi) :	
Hibah BMD sebelum Tahun 2024	15.410.813.458,00
Jumlah Mutasi Tambah	369.133.763.992,37
Mutasi Kurang :	
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	6.885.218.635,00
Belanja Modal tidak menjadi aset tetap	56.966.300,00
Kewajiban kepada pihak ketiga th 2024 yg asetnya telah diakui di tahun 2023	8.465.191.362,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	31.011.786.355,10
Reklasifikasi menjadi aset lainnya (Inventarisasi) :	
- Reklasifikasi menjadi Aset Rusak Berat	37.800.000,00
BMD belum tercatat (inventarisasi)	
Penghapusan BMD (inventarisasi)	12.441.466.968,00
Reklasifikasi menjadi properti investasi gedung bangunan	4.408.486.403,00
Jumlah Mutasi Kurang	63.306.916.023,10
Total Mutasi 2024	305.826.847.969,27
Saldo per 31 Desember 2024	1.888.200.567.932,12
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(335.901.820.675,70)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	1.552.298.747.256,42

Nilai Aset Gedung dan Bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp224.741.334.895,68 terdiri dari:

1. Penambahan gedung bangunan sebesarRp391.672.968.127,37 terdiri dari :
   a. Realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp141.166.601.172,00 terdiri dari :
      i. Dinas Pendidikan sebesar Rp105.326.273.527,00
      ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp3.956.535.744,00
      iii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp8.550.030.791,00
      iv. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp4.788.815.359,00
      v. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp308.167.039,00
      vi. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp586.396.251,00
      vii. Dinas Perhubungan sebesar Rp534.121.026,00
      viii. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.840.500.000,00
      ix. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp7.222.717.570,00
      x. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp91.982.415,00
      xi. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp2.043.086.591,00
      xii. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp582.226.098,00
      xiii. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp925.996.841,00
      xiv. Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp2.956.087.795,00
      xv. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.453.664.125,00
   b. Belanja modal yang dimutasikan dari perangkat daerah lain sebesar Rp6.885.218.635,00 terdiri dari :
      i. Dinas Kesehatan sebesar Rp3.956.535.744,00
      ii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp2.040.278.291,00

iii. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp888.404.600,00

c. Belanja Operasi yang dikapitalisasi sebesarRp97.607.295,00 yaitu pada Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp97.607.295,00

d. Mutasi dari OPD lain (Inventarisasi) sebesar Rp31.011.786.355,10 terdiri dari:
   i. Dinas Pendidikan sebesar Rp1.719.347.735,10
   ii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.415.467.500,00
   iii. Dinas Sosial sebesar Rp34.918.400,00
   iv. Dinas Perhubungan sebesar Rp8.846.189.754,00
   v. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp2.464.938.583,00
   vi. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp1.464.268.444,00
   vii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp13.466.707.627,00
   viii. PPKD sebesar Rp1.599.948.312,00

e. Reklas antar KIB (Inventarisasi) sebesar Rp174.561.737.077,27 terdiri dari :
   i. Dinas Kesehatan sebesar Rp266.041.200,00
   ii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp48.658.504.434,00
   iii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp117.463.832.443,27
   iv. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp11.907.500,00
   v. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp69.806.500,00
   vi. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp7.943.590.000,00
   vii. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp47.950.000,00
   viii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp100.105.000,00

f. Hibah aset tahun perolehan sebelum 2024 (Inventarisasi) sebesar Rp15.410.813.458,00 terdiri dari :
   i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp6.357.855.980,00
   ii. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp5.530.668.962,00
   iii. PPKD sebesar Rp3.522.288.516,00

2. Pengurangan gedung bangunan sebesar Rp63.306.916.023,10 terdiri dari :

a. Dropping antar SKPD (BM) sebesar Rp6.885.218.635,00 terdiri dari :
   i. Dinas Kesehatan sebesar Rp3.956.535.744,00
   ii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp2.040.278.291,00
   iii. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp888.404.600,00

b. Belanja modal yang tidak jadi aset sebesarRp56.966.300,00 terdiri dari :
   i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp54.158.000,00
   ii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp2.808.300,00

c. Kewajiban pihak ketiga yang asetnya telah diakui ditahun 2024 sebesar Rp8.465.191.362,00 terdiri dari :
   i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp6.624.691.362,00
   ii. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.840.500.000,00

d. Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi) Rp31.011.786.355,10 terdiri dari :
   i. Dinas Kesehatan sebesar Rp3.956.535.744,00
   ii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp2.040.278.291,00
   iii. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp888.404.600,00

e. Reklas ke Aset Rusak Berat (Inventarisasi) sebesar Rp37.800.000,00 yaitu pada Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp37.800.000,00

f. Penghapusan BMD dan Double Catat sebesar Rp12.441.466.968,00 terdiri dari:

i. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp12.369.963.000,00
ii. PPKD sebesar Rp71.503.968,00

g. Reklas aset tetap tanah menjadi properti investasi tanah sebesar Rp4.408.486.403,00 terdiri dari :
i. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp3.845.478.403,00
ii. PPKD sebesar Rp563.008.000,00

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.588.464.657.486,93 dan Rp3.483.468.228.932,92 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp104.996.428.554,01 atau 3,01%.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut: (a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan; (b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya; (c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan (d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Berikut disajikan tabel perbandingan Aset Tetap Jalan dan Irigasi Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Tabel 5.3.95
Jaringan, Irigasi dan Jalan per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Lebih/Kurang	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2-3)	(6=4/3)
1	Dinas Pendidikan	4.039.355.021,30	3.648.740.784,30	390.614.237,00	10,71
2	Dinas Kesehatan	785.000.000,00	785.000.000,00	-	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	1.257.855.350,00	1.257.855.350,00	-	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	7.052.568.800,00	7.052.568.800,00	-	0,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.562.315.104.520,49	2.441.394.369.797,48	120.920.734.723,01	4,95
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	752.325.011.061,18	748.425.794.144,18	3.899.216.917,00	0,52
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.527.500,00	5.527.500,00	-	0,00
8	Dinas Tenaga Kerja	44.300.313,00	44.300.313,00	-	0,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	15.283.473.880,68	14.313.127.249,68	970.346.631,00	6,78
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	33.830.000,00	33.830.000,00	-	0,00
11	Dinas Perhubungan	24.794.536.206,22	24.662.622.306,22	131.913.900,00	0,53
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.983.782,00	10.983.782,00	-	0,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	34.549.400,00	34.549.400,00	-	0,00
14	Dinas Pemuda dan Olahraga	678.042.823,00	678.042.823,00	-	0,00
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	221.632.237,67	221.632.237,67	-	0,00
16	Dinas Arsip dan Perpustakaan	62.331.600,00	62.331.600,00	-	0,00
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.508.076.473,00	4.310.140.735,00	197.935.738,00	4,59
18	Sekretariat Daerah	1.386.167.315,00	1.386.167.315,00	-	0,00
19	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	34.903.000,00	34.903.000,00	-	0,00
20	Kecamatan Bogor Selatan	27.056.312.232,00	26.370.749.036,00	685.563.196,00	2,60
21	Kecamatan Bogor Timur	8.192.925.824,00	8.068.605.313,00	124.320.511,00	1,54
22	Kecamatan Bogor Tengah	12.643.649.029,00	12.643.649.029,00	-	0,00
23	Kecamatan Bogor Barat	24.746.311.471,00	23.409.340.529,00	1.336.970.942,00	5,71
24	Kecamatan Bogor Utara	12.287.118.894,00	11.337.442.519,00	949.676.375,00	8,38
25	Kecamatan Tanah Sareal	16.911.758.844,00	15.537.563.244,00	1.374.195.600,00	8,84
26	PPKD	111.702.621.909,39	137.687.682.125,39	(25.985.060.216,00)	0,00
27	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	50.710.000,00	50.710.000,00	-	0,00
Jumlah		**3.588.464.657.486,93**	**3.483.468.228.932,92**	**104.996.428.554,01**	**3,01**

Mutasi Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kota Bogor tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.96
Mutasi Aset Tetap Jaringan Irigasi Jalan

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Saldo per 31 Desember 2023	3.483.468.228.932,92
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2024	112.729.496.656,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	31.701.199.016,00
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	31.256.153.379,01
BMD belum tercatat (inventarisasi)	2.573.175.568,00
Reklasifikasi Kondisi BMD (inventarisasi)	-
Jumlah Mutasi Tambah	178.260.024.619,01
Mutasi Kurang :	
Kewajiban kepada pihak ketiga th 2024 yg asetnya telah diakui di tahun 2023	9.993.111.933,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	31.701.199.016,00
Penghapusan BMD (inventarisasi)	31.569.285.116,00
Jumlah Mutasi Kurang	73.263.596.065,00
Total Mutasi 2024	104.996.428.554,01
Saldo per 31 Desember 2024	3.588.464.657.486,93
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(2.171.942.597.232,81)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	1.416.522.060.254,12

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami Peningkatan sebesar Rp104.996.428.554,01 terdiri dari :

1. Penambahan Jalan,jaringan, dan Irigasi sebesar Rp178.260.024.619,01 terdiri dari:
   a. Realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp112.729.496.656,00 terdiri dari :
      i. Dinas Pendidikan sebesar Rp390.614.237,00
      ii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp102.962.295.119,00
      iii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp3.737.578.307,00
      iv. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp970.346.631,00
      v. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp197.935.738,00
      vi. Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp685.563.196,00
      vii. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp124.320.511,00
      viii. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp1.336.970.942,00
      ix. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp949.676.375,00
      x. Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp1.374.195.600,00
   b. Mutasi dari OPD lain (Inventarisasi) sebesar Rp31.701.199.016,00 terdiri dari Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp31.569.285.116,00 dan Dinas Perhubungan sebesar Rp131.913.900,00
   c. Reklas antar KIB (Inventarisasi) sebesar Rp31.256.153.379,01 terdiri dari :
      i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp31.094.514.769,01
      ii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp161.638.610,00
   d. Aset belum tercatat (Inventarisasi) sebesar Rp2.573.175.568,00 terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.573.175.568,00

2. Pengurangan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp73.263.596.065,00 terdiri dari:
   a. Kewajiban pihak ketiga yang asetnya telah diakui ditahun 2024 sebesar Rp9.993.111.933,00 terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp9.993.111.933,00
   b. Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi) Rp1.701.199.016,00 terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp5.716.138.800,00 dan PPKD sebesar Rp25.985.060.216,00
   c. Penghapusan BMD sebesar Rp31.569.285.116,00 terdiri dari:
      i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp5.584.224.900,00
      ii. PPKD sebesar Rp25.985.060.216,00

5.3.1.3.3 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp15.088.820.384,99 dan Rp11.314.989.293,84 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp3.773.831.091,15 atau 33,35%.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Berikut tabel perbandingan Aset Tetap Lainnya Per Perangkat Daerah pada periode Tahun Anggaran 2024.

Tabel 5.3.97
Aset tetap Lainnya per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dinas Pendidikan	9.972.481.095,72	7.583.556.006,57	2.388.925.089,15	31,50
2	Dinas Kesehatan	4.171.500,00	4.171.500,00	-	0,00
3	Dinas Perumahan dan Permukiman	197.880.000,00	197.880.000,00	-	0,00
4	Dinas Perhubungan	147.232.500,00	147.232.500,00	-	0,00
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	145.075.000,00	145.075.000,00	-	0,00
6	Dinas Arsip dan Perpustakaan	2.784.439.788,85	2.704.985.786,85	79.454.002,00	2,94
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31.305.000,00	31.305.000,00	-	0,00
8	Sekretariat Daerah	196.597.440,00	196.597.440,00	-	0,00
9	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	241.694.600,00	212.414.600,00	29.280.000,00	13,78
10	Kecamatan Bogor Selatan	17.733.640,72	10.301.640,72	7.432.000,00	72,14
11	Kecamatan Bogor Timur	3.456.123,19	3.456.123,19	-	0,00
12	Kecamatan Bogor Tengah	4.947.415,02	4.947.415,02	-	0,00
13	Kecamatan Bogor Barat	15.536.863,75	15.536.863,75	-	0,00
14	Kecamatan Bogor Utara	8.198.787,98	8.198.787,98	-	0,00
15	Kecamatan Tanah Sareal	5.280.629,76	5.280.629,76	-	0,00
16	Inspektorat	44.050.000,00	44.050.000,00	-	0,00
17	PPKD	1.268.740.000,00	-	1.268.740.000,00	0,00
Jumlah		**15.088.820.384,99**	**11.314.989.293,84**	**3.773.831.091,15**	**33,35**

Mutasi Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kota Bogor tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.98
Mutasi Aset Tetap Lainnya

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Saldo per 31 Desember 2023	11.314.989.293,84
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2024	10.693.173.754,00
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	7.432.000,00
Hibah BMD tahun berjalan	1.268.740.000,00
Belanja Modal yang di reklasifikasi antar KIB	2.275.000,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	8.475.000,00
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	693.865.572,15
Reklasifikasi dari aset lainnya (inventarisasi) :	
- Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain (Penelusuran)	468.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	12.674.429.326,15
Mutasi Kurang :	
Belanja Modal yang dimutasi antar Perangkat Daerah	7.432.000,00
Belanja Modal yang dikapitalisasi Menjadi aset ekstrakomtabel	8.865.850.137,00
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	8.475.000,00
Reklasifikasi menjadi Aset Ekstrakomtabel (Inventarisasi)	10.591.098,00
Reklasifikasi menjadi aset lainnya (Inventarisasi) :	
- Reklasifikasi menjadi Aset Rusak Berat	8.250.000,00
BMD belum tercatat (inventarisasi)	
Jumlah Mutasi Kurang	8.900.598.235,00
Total Mutasi 2024	3.773.831.091,15
Saldo per 31 Desember 2024	15.088.820.384,99
Nilai Buku per 31 Desember 2024	15.088.820.384,99

Nilai Aset Tetap Berupa Aset Tetap Lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp3.773.831.091,15 terdiri dari:

1. Penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp12.674.429.326,15 terdiri dari :
   a. Realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp10.693.173.754,00 terdiri dari :
      i. Dinas Pendidikan sebesar Rp10.566.182.954,00
      ii. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp97.710.800,00
      iii. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp29.280.000,00
   b. Belanja Modal yang di reklas antar KIB sebesar Rp2.275.000,00 yaitu pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.275.000,00
   c. Belanja modal yang dimutasikan dari perangkat daerah lain sebesar Rp7.432.000,00 terdiri dari Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp7.432.000,00
   d. Hibah tahun perolehan berjalan 2024 sebesar Rp1.268.740.000,00 terdiri dari PPKD sebesar Rp1.268.740.000,00
   e. Mutasi dari OPD lain (Inventarisasi) sebesar Rp8.475.000,00 terdiri dari Dinas Pendidikan sebesar Rp8.475.000,00
   f. Reklas antar KIB (Inventarisasi) sebesar Rp693.865.572,15 terdiri dari Dinas Pendidikan sebesar Rp693.865.572,15
   g. Reklas dari aset lain-lain sebesar Rp468.000,00 terdiri dari Dinas Pendidikan sebesar Rp468.000,00
2. Pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp8.900.598.235,00 terdiri dari :
   a. Dropping antar SKPD (BM) sebesar Rp7.432.000,00 terdiri dari Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp7.432.000,00
   b. Belanja Modal yang dikapitalisasi Menjadi aset ekstrakomtabel Rp8.865.850.137,00 terdiri dari :

i. Dinas Pendidikan sebesar Rp8.865.616.437,00
ii. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp233.700,00

c. Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi) Rp8.475.000,00 terdiri dari Dinas Pendidikan sebesar Rp8.475.000,00
d. Aset yang dikapitalisasi (Inventarisasi) sebesar Rp10.591.098,00 terdiri dari Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp10.591.098,00
e. Reklas ke Aset Rusak Berat (Inventarisasi) sebesar Rp8.250.000,00 terdiri dari Dinas Pendidikan sebesar Rp8.250.000,00

5.3.1.3.4 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp15.583.780.825,00 dan Rp224.422.793.771,34 mengalami penurunan nilai sebesar Rp208.839.012.946,34 atau 93,06%.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, yang proses perolehannya dan/ atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Berikut tabel perbandingan Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Perangkat Daerah pada periode Tahun Anggaran 2024.

Tabel 5.3.99
Konstruksi Dalam Pengerjaan per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Lebih/Kurang	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dinas Pendidikan	1.279.178.500,00	1.358.404.960,06	(79.226.460,06)	(5,83)
2	Dinas Kesehatan	58.915.000,00	324.956.200,00	(266.041.200,00)	(81,87)
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	1.642.329.920,00	50.300.834.354,00	(48.658.504.434,00)	(96,73)
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	44.556.000,00	44.556.000,00	-	-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.474.355.105,00	154.209.774.817,28	(148.735.419.712,28)	(96,45)
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	55.770.000,00	2.335.096.140,00	(2.279.326.140,00)	(97,61)
7	Satuan Polisi Pamong Praja	-	49.450.000,00	(49.450.000,00)	(100,00)
8	Dinas Sosial	55.755.000,00	55.755.000,00	-	-
9	Dinas Tenaga Kerja	-	280.820.000,00	(280.820.000,00)	(100,00)
10	Dinas Lingkungan Hidup	96.070.500,00	112.641.500,00	(16.571.000,00)	(14,71)
11	Dinas Perhubungan	50.417.500,00	50.417.500,00	-	-
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	609.622.425,00	625.372.425,00	(15.750.000,00)	(2,52)
13	Dinas Pemuda dan Olahraga	5.931.086.275,00	13.874.676.275,00	(7.943.590.000,00)	(57,25)
14	Kecamatan Bogor Selatan	89.266.200,00	89.266.200,00	-	-
15	Kecamatan Bogor Timur	-	47.950.000,00	(47.950.000,00)	(100,00)
16	Kecamatan Bogor Tengah	11.500.000,00	111.605.000,00	(100.105.000,00)	(89,70)
17	Kecamatan Bogor Barat	99.266.400,00	99.266.400,00	-	-
18	Badan Keuangan dan Aset Daerah	85.692.000,00	85.692.000,00	-	-
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	366.259.000,00	(366.259.000,00)	-
Jumlah		15.583.780.825,00	224.422.793.771,34	(208.839.012.946,34)	(93,06)

Mutasi Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kota Bogor tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.100
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Saldo per 31 Desember 2023	224.422.793.771,34
Mutasi Tambah:	
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	445.372.660,06
Jumlah Mutasi Tambah	445.372.660,06
Mutasi Kurang :	
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	445.372.660,06
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	206.055.316.676,34
Reklasifikasi menjadi aset lainnya (Inventarisasi) :	
BMD belum tercatat (inventarisasi)	
Penghapusan BMD (inventarisasi)	2.783.696.270,00
Jumlah Mutasi Kurang	209.284.385.606,40
Total Mutasi 2024	(208.839.012.946,34)
Saldo per 31 Desember 2024	15.583.780.825,00

Perubahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp208.839.012.946,34 terdiri dari:

1. Penambahan konstruksi dalam pengerjaan sebesarRp445.372.660,06 terdiri dari :
   a. Mutasi dari OPD lain (Inventarisasi) sebesar Rp445.372.660,06 terdiri dari :
      i. Dinas Pendidikan sebesar Rp79.226.460,06
      ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp266.041.200,00
      iii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp100.105.000,00
2. Pengurangan konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp209.284.385.606,40 terdiri dari:
   a. Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi) Rp445.372.660,06 terdiri dari :
      i. Dinas Pendidikan sebesar Rp79.226.460,06
      ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp266.041.200,00
      iii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp100.105.000,00
   b. Reklas antar KIB (Inventarisasi) sebesar Rp206.055.316.676,34 terdiri dari :
      i. Dinas Pendidikan sebesar Rp79.226.460,06
      ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp266.041.200,00
      iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp48.658.504.434,00
      iv. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp148.705.699.712,28
      v. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp254.199.870,00
      vi. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp7.943.590.000,00
      vii. Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp47.950.000,00
      viii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp100.105.000,00
   c. Penghapusan BMD dan Double Catat sebesar Rp2.783.696.270,00 terdiri dari:
      i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp29.720.000,00
      ii. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp2.025.126.270,00
      iii. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp49.450.000,00

iv. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp280.820.000,00
v. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp16.571.000,00
vi. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp15.750.000,00
vii. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp366.259.000,00

5.3.1.3.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar RpRp3.521.544.006.794,74 dan Rp3.162.527.131.333,85 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp359.016.875.460,89 atau 11,35%.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.101
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Uraian - Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Peralatan dan Mesin	1.013.699.588.886,23	895.065.903.274,93	118.633.685.611,30	13,25
2	Gedung dan Bangunan	335.901.820.675,70	301.499.745.236,69	34.402.075.439,01	11,41
3	Jalan, Irigasi, dan jaringan	2.171.942.597.232,81	1.965.961.482.822,23	205.981.114.410,58	10,48
	Jumlah	**3.521.544.006.794,74**	**3.162.527.131.333,85**	**359.016.875.460,89**	**11,35**

Tabel 5.3.102
Rincian Beban Penyusutan

No	Uraian	Perubahan Akumulasi Penyusutan per 31 Des 2024	Beban Penyusutan per 31 Des 2024	Selisih Lebih/ (Kurang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)
1	Peralatan dan Mesin	1.013.699.588.886,23	121.272.053.305,14	892.427.535.581,09
2	Gedung dan Bangunan	335.901.820.675,70	36.659.773.287,72	299.242.047.387,98
3	Jalan, Irigasi, dan jaringan	2.171.942.597.232,81	215.277.266.080,06	1.956.665.331.152,75
	Jumlah	**3.521.544.006.794,74**	**373.209.092.672,92**	**3.148.334.914.121,82**

Rincian nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku kelompok aset tetap tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5.3.103
Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap

		Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku	
Uraian	Nilai Perolehan	Rp	%	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4=3/2)	(5=2-3)	(6=5/2)
Tanah	5.796.161.596.908,69		-	5.796.161.596.908,69	100,00
Peralatan dan Mesin	1.256.136.708.584,89	1.013.699.588.886,23	80,70	242.437.119.698,66	19,30
Gedung dan Bangunan	1.888.200.567.932,12	335.901.820.675,70	17,79	1.552.298.747.256,42	82,21
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.588.464.657.486,93	2.171.942.597.232,81	60,53	1.416.522.060.254,12	39,47
Aset Tetap Lainnya	15.088.820.384,99		-	15.088.820.384,99	100,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	15.583.780.825,00		-	15.583.780.825,00	100,00
Jumlah	**12.559.636.132.122,60**	**3.521.544.006.794,74**	28,04	**9.038.092.125.327,88**	71,96

5.3.1.4 DANA CADANGAN

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.398.684.760,00 untuk keperluan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2023 dalam bentuk deposito pada PT Bank DKI Cabang Pembantu Bogor sesuai SK Wali Kota No. 900/Kep.256-BKAD/2023 tanggal 24 Agustus 2023. Dana cadangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.398.684.760,00 sedangkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp46.125.787.358,00 terdiri dari:

Tabel 5.3.104
Dana Cadangan

No	Uraian	Saldo Awal 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**Dana Cadangan**				
	Pembentukan Dana Cadangan	71.336.251.300,00	0,00	0,00	71.336.251.300,00
	Pencairan Dana Cadangan	(25.765.828.400,00)	0,00	38.648.742.600,00	(64.414.571.000,00)
	Bunga	555.364.458,00	921.640.002,00	0,00	1.477.004.460,00
	Jumlah Dana Cadangan	**46.125.787.358,00**	**921.640.002**	**38.648.742.600**	**8.398.684.760,00**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Tahun 2024 bahwa Dana Cadangan ditetapkan paling sedikit Rp71.336.251.300,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) yang dipenuhi pada Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. APBD Tahun Anggaran 2023 paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
2. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 paling sedikit Rp21.336.251.300,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

Pencairan Dana Cadangan pada tanggal 15 Mei 2024 sebesar Rp38.648.742.600,00 sehingga Pencairan Dana Cadangan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp64.414.571.000,00, sedangkan bunga dana cadangan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.477.004.460,00 sehingga Saldo Dana Cadangan Tahun 2024 adalah Rp8.398.684.760,0

5.3.1.5 ASET LAINNYA

Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Saldo Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain Kota Bogor per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp76.403.789.787,11 dan Rp93.886.594.924,42 mengalami penurunan sebesar Rp17.482.805.137,31 atau 18,62%.

Tabel 5.3.105
Aset Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	**Aset Lainnya**				
2	Tagihan Penjualan Angsuran	770.678.122,00	873.259.125,00	(102.581.003,00)	(11,75)
3	Tuntutan Ganti Rugi	351.103.844,90	334.362.178,57	16.741.666,33	5,01
4	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	11.014.184.310,00	11.014.184.310,00	-	-
5	Aset Tak Berwujud	16.970.742.403,80	16.945.217.083,80	25.525.320,00	0,15
6	Aset Lain-lain	187.940.474.139,24	199.888.450.262,74	(11.947.976.123,50)	(5,98)
7	Akumulasi Amortisasi aset Tak Berwujud	(16.493.115.025,80)	(16.066.792.926,55)	(426.322.099,25)	2,65
8	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(131.320.042.007,03)	(142.870.965.109,14)	11.550.923.102,11	(8,08)
9	Treasury Deposit Facility (TDF)	7.169.764.000,00	23.768.880.000,00	(16.599.116.000,00)	(69,84)
	Jumlah	**76.403.789.787,11**	**93.886.594.924,42**	(17.482.805.137,31)	(18,62)

5.3.1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo tagihan jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp770.678.122,00 mengalami penurunan sebesar Rp102.581.003,00 atau turun sebesar 11,75% dibanding saldo 2023 sebesar Rp873.259.125,00. Adapun tagihan jangka panjang Kota Bogor sebesar Rp770.678.122,00 terdiri dari:

Tabel 5.3.106
Tagihan Jangka Panjang

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	**Tagihan Penjualan Angsuran**				
2	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III	745.101.557,00	847.682.560,00	(102.581.003,00)	(12,10)
3	Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	25.576.565,00	25.576.565,00	0,00	-
	Jumlah	**770.678.122,00**	**873.259.125,00**	**(102.581.003,00)**	**(11,75)**

(Rincian tagihan jangka Panjang disajikan pada lampiran 8)

5.3.1.5.2 Tuntutan Ganti Rugi

Saldo tagihan jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp351.103.844,90 atau naik sebesar Rp16.741.665,43 atau 5,01% dibanding saldo 2023 sebesar Rp334.362.178,57. Adapun tagihan jangka panjang Kota Bogor sebesar Rp334.362.178,57 terdiri dari:

Tabel 5.3.107
Tuntutan Ganti Rugi

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	**Tuntutan Ganti Rugi**				
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	0,00	0,00	-	
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	351.103.844,90	334.362.178,57	16.741.666,33	5,01
	Jumlah	**351.103.844,90**	**334.362.178,57**	**16.741.666,33**	**5,01**

(Rincian tagihan jangka Panjang disajikan pada lampiran 9)

5.3.1.6.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.014.184.310,00 atau turun sebesar 0,00% dibanding saldo 2023 sebesar Rp11.014.184.310,00. Adapun rincian kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp11.014.184.310,00 sebagai berikut:

Tabel 5.3.109
Kemitraan dengan Pihak Ketiga

No	Lokasi	Luas	Nilai
1	Tanah Pasar Kebon Kembang Blok C & D	6.054,00	4.871.684.310,00
2	Tanah Plasa Lippo Keboen Raya (ex.Pangrango Plasa) Jl. Raya Pajajaran	12.285,00	6.142.500.000,00
	Jumlah	**18.339,00**	**11.014.184.310,00**

(Rincian kemitraan dengan pihak ketiga disajikan pada lampiran 10)

5.3.1.6.4 Aset Tak Berwujud

Saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.970.742.403,80 atau naik sebesar Rp16.945.217.083,80 atau 0,15% dibanding saldo 2023 sebesar Rp25.525.320,00 Adapun rincian aset tidak berwujud sebesar Rp16.970.742.403,80 sebagai berikut:

Tabel 5.3.110
Aset Tidak Berwujud

No.	Perangkat Daerah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dinas Pendidikan	648.454.690,00	648.454.690,00	-	0,00
2	Dinas Kesehatan	1.183.714.800,00	1.183.714.800,00	-	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	62.009.600,00	62.009.600,00	-	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	54.500.000,00	54.500.000,00	-	0,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	136.895.500,00	117.227.500,00	19.668.000,00	16,78
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	1.851.443.350,00	1.851.443.350,00	-	0,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	0,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	394.021.000,00	394.021.000,00	-	0,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	0,00
10	Dinas Sosial	173.582.500,00	173.582.500,00	-	0,00
11	Dinas Tenaga Kerja	44.220.000,00	44.220.000,00	-	0,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	163.128.500,00	163.128.500,00	-	0,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	632.961.853,86	632.961.853,86	-	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	135.827.500,00	135.827.500,00	-	0,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	245.233.500,00	245.233.500,00	-	0,00
16	Dinas Perhubungan	736.158.074,94	736.158.074,94	-	0,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.297.006.625,00	3.297.006.625,00	-	0,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	490.093.925,00	490.093.925,00	-	0,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	911.560.000,00	911.560.000,00	-	0,00
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	45.055.000,00	45.055.000,00	-	0,00
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	48.000.000,00	-	48.000.000,00	0,00
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan	242.900.000,00	242.900.000,00	-	0,00
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	133.975.570,00	59.620.000,00	74.355.570,00	124,72
24	Sekretariat Daerah	1.157.107.732,00	1.157.107.732,00	-	0,00
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	213.315.000,00	213.315.000,00	-	0,00
26	Kecamatan Bogor Selatan	40.210.000,00	40.210.000,00	-	0,00
27	Kecamatan Bogor Timur	148.950.000,00	148.950.000,00	-	0,00
28	Kecamatan Bogor Tengah	-	-	-	0,00
29	Kecamatan Bogor Barat	-	-	-	0,00
30	Kecamatan Bogor Utara	-	-	-	0,00
31	Kecamatan Tanah Sareal	-	-	-	0,00
32	Inspektorat	99.000.000,00	99.000.000,00	-	0,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	197.657.500,00	197.657.500,00	-	0,00
34	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.728.159.112,00	1.844.657.362,00	(116.498.250,00)	(6,32)
35	Badan Pendapatan Daerah	1.245.281.571,00	1.245.281.571,00	-	0,00
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	510.319.500,00	510.319.500,00	-	0,00
37	PPKD	-	-	-	0,00
38	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-	0,00
Jumlah		**16.970.742.403,80**	**16.945.217.083,80**	**25.525.320,00**	**0,15**

Tabel 5.3.111
Mutasi Aset Tidak Berwujud

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Saldo per 31 Desember 2023	16.945.217.083,80
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2024	74.355.570,00
BMD belum tercatat (inventarisasi)	67.668.000,00
Reklasifikasi Kondisi BMD (inventarisasi)	-
Jumlah Mutasi Tambah	142.023.570,00
Mutasi Kurang :	
Reklasifikasi Kondisi BMD (inventarisasi)	116.498.250,00
Jumlah Mutasi Kurang	116.498.250,00
Total Mutasi 2024	25.525.320,00
Saldo per 31 Desember 2024	16.970.742.403,80
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(16.493.115.025,80)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	477.627.378,00

Nilai Aset Tetap Berupa Aset Tidak Berwujud mengalami peningkatan sebesar Rp25.525.320,00 terdiri dari :

1. Penambahan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp142.023.570 terdiri dari :
   a. Realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp74.355.570,00 terdiri dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp74.355.570,00
   b. Aset belum tercatat (Inventarisasi) sebesar Rp67.668.000,00 terdiri dari :
      i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp19.668.000,00
      ii. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp48.000.000,00
2. Pengurangan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp116.498.250 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp116.498.250,00.

5.3.1.6.5 Aset Lain Lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp187.940.474.137,64 atau turun sebesar Rp11.947.976.121,51 atau 5,98% dibanding saldo 2023 sebesar Rp199.888.450.259,15.Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Adapun rincian aset lain-lain per perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel 5.3.112
Rincian Aset Lain-lain per Perangkat Daerah

NO	Perangkat Daerah	Jumlah	Jumlah	Kenaikan/ (Penurunan)	
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dinas Pendidikan	50.290.488.224,56	46.725.656.100,82	3.564.832.123,74	7,63
2	Dinas Kesehatan	10.543.931.818,11	12.771.731.314,48	(2.227.799.496,37)	(17,44)
3	Rumah Sakit Umum Daerah (PD)	3.734.266.906,71	2.042.597.815,62	1.691.669.091,09	82,82
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	4.762.669.445,28	3.910.148.117,57	852.521.327,71	21,80
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.449.032.218,66	9.376.307.229,69	72.724.988,97	0,78
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	4.873.567.720,98	4.873.567.720,98	-	-
7	Satuan Polisi Pamong Praja	3.491.653.085,41	3.629.663.085,41	(138.010.000,00)	(3,80)
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.180.665.720,66	2.180.665.720,66	-	-
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	211.360.710,00	211.360.710,00	-	-
10	Dinas Sosial	1.538.045.364,59	1.538.045.364,59	-	-
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	439.775.966,32	216.987.013,54	222.788.952,78	102,67
12	Dinas Lingkungan Hidup	14.713.311.110,06	26.156.356.646,05	(11.443.045.535,99)	(43,75)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.129.739.674,23	1.086.774.987,23	42.964.687,00	3,95
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	754.776.652,20	754.776.652,20	-	-
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.326.601.870,48	2.425.585.968,48	(98.984.098,00)	(4,08)
16	Dinas Perhubungan	3.644.436.970,52	3.644.436.970,52	-	-
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	2.283.073.259,71	2.283.073.259,71	-	-
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	2.041.381.541,96	2.041.381.541,96	-	-
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.076.761.564,70	1.513.321.469,11	(436.559.904,41)	(28,85)
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	635.754.468,52	635.754.468,52	-	-
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.115.593.479,35	5.002.061.737,33	1.113.531.742,02	22,26
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.328.262.872,11	1.537.710.872,11	(209.448.000,00)	(13,62)
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.598.020.636,70	4.598.020.636,70	-	-
24	Sekretariat Daerah	34.518.114.768,52	34.901.679.448,02	(383.564.679,50)	(1,10)
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	838.817.819,00	838.817.819,00	-	-
26	Kecamatan Bogor Selatan	1.831.804.351,89	1.831.804.351,89	-	-
27	Kecamatan Bogor Timur	824.923.907,00	824.923.907,00	-	-
28	Kecamatan Bogor Tengah	2.149.133.781,54	2.042.406.963,36	106.726.818,18	5,23
29	Kecamatan Bogor Barat	995.751.829,84	1.172.694.782,84	(176.942.953,00)	(15,09)
30	Kecamatan Bogor Utara	1.003.817.379,00	1.003.817.379,00	-	-
31	Kecamatan Tanah Sareal	1.690.740.994,01	1.690.740.994,01	-	-
32	Inspektorat	248.882.288,34	278.782.288,34	(29.900.000,00)	(10,73)
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.695.246.276,53	2.562.027.402,58	(866.781.126,05)	(33,83)
34	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.410.129.893,51	1.861.747.100,78	548.382.792,73	29,46
35	Badan Pendapatan Daerah	2.619.019.943,94	2.441.480.905,33	177.539.038,61	7,27
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	631.506.120,08	239.782.458,50	391.723.661,58	163,37
37	PPKD	3.399.691.052,00	3.660.755.603,00	(261.064.551,00)	(7,13)
38	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	919.722.452,22	5.381.003.452,22	(4.461.281.000,00)	-
JUMLAH		**187.940.474.139,24**	**199.888.450.259,15**	(11.947.976.119,91)	(5,98)

Tabel 5.3.113
Mutasi Aset Lain-lain

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Saldo per 31 Desember 2023	199.888.450.259,15
Mutasi Tambah:	
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	1.918.452.106,00
- Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat	14.703.611.578,86
- Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain (Penelusuran)	6.394.935.571,00
Reklasifikasi Kondisi BMD (inventarisasi)	2.358.164.682,00
Jumlah Mutasi Tambah	25.375.163.937,86
Mutasi Kurang :	
Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi)	1.918.452.106,00
- Reklasifikasi menjadi Aset Rusak Berat	852.338.861,32
- Reklasifikasi menjadi Aset Lain-Lain (Penelusuran)	10.310.716.364,00
Penghapusan BMD (inventarisasi)	23.501.765.454,45
Reklasifikasi Kondisi BMD (inventarisasi)	739.867.272,00
Jumlah Mutasi Kurang	37.323.140.057,77
Total Mutasi 2024	(11.947.976.119,91)
Saldo per 31 Desember 2024	187.940.474.139,24
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(131.320.042.007,03)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	56.620.432.132,21

Nilai Aset Tetap berupa Aset lain-lain mengalami penurunan sebesar Rp11.947.976. 119,91 yang terdiri dari:

1. Penambahan Aset Lain-lain (RB & Aset lain-lain lainnya) sebesar Rp25.375.163.937,86 terdiri dari :
   a. Mutasi dari OPD lain (Inventarisasi) sebesar Rp1.918.452.106,00 terdiri dari :
      i. Dinas Pendidikan sebesar Rp15.330.408,00
      ii. Dinas Sosial sebesar Rp80.700.000,00
      iii. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp1.500.624,00
      iv. Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp4.535.000,00
      v. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp12.603.125,00
      vi. PPKD sebesar Rp933.426.177,00
      vii. Dinas Pendidikan sebesar Rp3.239.500,00
      viii. Dinas Kesehatan sebesar Rp114.750.000,00
      ix. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp12.500.000,00
      x. PPKD sebesar Rp739.867.272,00
   b. Reklas ke Aset Rusak Berat (Inventarisasi) sebesarRp14.703.611.578,86 terdiri dari :
      i. Dinas Pendidikan sebesar Rp3.207.764.872,32
      ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp115.661.753,63
      iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp1.690.792.546,29
      iv. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp849.585.319,71
      v. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp553.612.328,97
      vi. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp221.238.952,78
      vii. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp3.902.154.274,17
      viii. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp28.643.124,00

ix. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp366.709.240,93
x. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp1.175.531.742,02
xi. Sekretariat Daerah sebesar Rp565.516.948,50
xii. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp106.726.818,18
xiii. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp177.112.000,00
xiv. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp884.683.701,88
xv. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp531.396.029,61
xvi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp326.481.925,87

c. Reklas dari aset lain-lain sebesar Rp6.394.935.571,00 terdiri dari :
i. Dinas Pendidikan sebesar Rp529.690.343,00
ii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp123.750.000,00
iii. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp28.165.000,00
iv. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp144.375.000,00
v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp96.006.800,00
vi. Sekretariat Daerah sebesar Rp324.000.000,00
vii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp55.550.675,00
viii. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp767.470,00
ix. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp78.838.400,00
x. PPKD sebesar Rp2.588.187.410,00
xi. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp28.165.000,00
xii. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp14.321.563,00
xiii. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp2.411.282.910,00

d. Reklasifikasi kondisi asset tetap (Inventarisasi) sebesar Rp2.358.164.682,00 terdiri dari :
i. Dinas Pendidikan sebesar Rp1.459.997.833,82
ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp2.612.000,00
iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp29.441.246,30
iv. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp17.196.230,00
v. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp1.550.000,00
vi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp700.000,00
vii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp35.869.017,17
viii. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp5.689.347,00
ix. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp65.241.735,71
x. PPKD sebesar Rp739.867.272,00

2. Pengurangan Aset Lain-lain (RB & Aset lain-lain lainnya) sebesar Rp37.323.140.057,77 terdiri dari :
a. Mutasi/Alih Status Penggunaan Antar Perangkat Daerah (Hasil Inventarisasi) Rp1.918.452.106,00 terdiri dari :
i. Dinas Pendidikan sebesar Rp351.135.584,00
ii. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp104.000.000,00
iii. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar

Rp52.050.000,00

iv. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp62.000.000,00
v. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp208.000.000,00
vi. Sekretariat Daerah sebesar Rp126.000.000,00
vii. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp132.750.001,00
viii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp6.035.624,00
ix. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp12.603.125,00
x. Dinas Kesehatan sebesar Rp437.000.000,00
xi. Sekretariat Daerah sebesar Rp430.117.272,00

b. Reklas ke Aset Rusak Berat (Inventarisasi) sebesar Rp852.338.861,32 terdiri dari:
i. Dinas Kesehatan sebesar Rp14.987.250,00
ii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp20.307.340,00
iii. Dinas Sosial sebesar Rp80.700.000,00
iv. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp263.600.000,00
v. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp1.448.000,00
vi. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp1.500.624,00
vii. Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp4.535.000,00
viii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp310.872.427,32
ix. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp40.338.220,00
x. PPKD sebesar Rp114.050.000,00

c. Reklas dari aset lain-lain sebesar Rp10.310.716.364,00 terdiri dari :
i. Dinas Pendidikan sebesar Rp530.158.343,00
ii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp316.650.000,00
iii. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp3.401.560.000,00
iv. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp96.006.800,00
v. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp2.411.282.910,00
vi. Sekretariat Daerah sebesar Rp716.964.356,00
vii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp55.550.675,00
viii. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp767.470,00
ix. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp78.838.400,00
x. PPKD sebesar Rp2.588.187.410,00

d. Penghapusan BMD dan Double Catat sebesar Rp23.501.765.454,45 terdiri dari :
i. Dinas Pendidikan sebesar Rp773.136.406,40
ii. Dinas Kesehatan sebesar Rp1.894.086.000,00
iii. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp28.564.701,50
iv. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp14.260.222,00
v. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp280.180.000,00
vi. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp35.600.000,00
vii. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp11.199.014.810,16
viii. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp23.634.098,00
ix. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp803.969.145,34
x. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp159.933.436,00
xi. Inspektorat sebesar Rp29.900.000,00
xii. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp911.143.125,05

xiii. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp67.865.000,00
xiv. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp235.604.993,00
xv. PPKD sebesar Rp1.820.308.000,00
xvi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp4.461.281.000,00
xvii. Dinas Pendidikan sebesar Rp5.962.118,00
xviii. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp26.575.000,00
xix. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp625.400.000
xx. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp23.300.000,00
xxi. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp17.009.517,00
xxii. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp71.000.000,00

e. Reklasifikasi kondisi asset tetap (Inventarisasi) sebesar Rp437.000.000,00 terdiri dari :
i. PPKD sebesar Rp437.000.000,00

5.3.1.6.6 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo akumulasi amortisasi aset tak berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.493.115.025,80 naik sebesar Rp426.322.099,25 atau 2,65% dibanding saldo 2023 sebesar Rp16.066.792.926,55. Adapun rincian Aset lain-lain sebesar Rp16.493.115.025,80 sebagai berikut:

Tabel 5.3.114
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Aset Tidak Berwujud	(16.493.115.025,80)	(16.066.792.926,55)	(426.322.099,25)	2,65
Jumlah		**(16.493.115.025,80)**	**(16.066.792.926,55)**	**(426.322.099,25)**	**2,65**

Tabel 5.3.115
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

URAIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)
Saldo per 31 Desember 2023	16.066.792.926,55
Mutasi Tambah:	
Beban amortisasi Aset Tidak Berwujud	528.069.349,25
Jumlah Mutasi Tambah	528.069.349,25
Mutasi Kurang :	
Koreksi Akumulasi Amortisasi karena pengurangan Aset Tidak Berwujud	101.747.250,00
Jumlah Mutasi Kurang	101.747.250,00
Total Mutasi 2024	426.322.099,25
Saldo per 31 Desember 2024	16.493.115.025,80

Nilai Aset Tetap Berupa Amortisasi mengalami peningkatan sebesar Rp 426.359.224,25 terdiri dari :

1. Penambahan Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp528.069.349,25 terdiri dari:
   a. Dinas Pendidikan sebesar Rp139.613.673
   b. Dinas Kesehatan sebesar Rp90.453.700
   c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp15.411.375
   d. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp73.441.625
   e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp52.891.500
   f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp16.970.000

g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp20.123.125
h. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp17.379.931
i. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp36.000.000
j. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp26.068.893
k. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp14.790.528
l. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp24.925.000

2. Pengurangan Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp101.747.250,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp101.747.250

5.3.1.6.7 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo akumulasi amortisasi aset tak berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.493.115.025,80 naik sebesar Rp426.322.099,25 atau 2,65% dibanding saldo 2023 sebesar Rp16.066.792.926,55. Adapun rincian Aset lain-lain sebesar Rp16.493.115.025,80 sebagai berikut:

Tabel 5.3.116
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Aset Lainnya (Rusak Berat dan Aset Lain-Lain Lainnya)	(131.320.042.007,03)	(142.870.965.109,14)	11.550.923.102,11	-8,08
Jumlah		**(131.320.042.007,03)**	**(142.870.965.109,14)**	11.550.923.102,11	-8,08

Nilai Aset Tetap Berupa Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp11.550.923.102,11 terdiri dari :

1. Penambahan akumulasi penyusutan aset lainnya sebesarRp20.393.761.919,65 terdiri dari :
   a. Dinas Pendidikan sebesar Rp3.496.251.013,75
   b. Dinas Kesehatan sebesar Rp225.255.503,62
   c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp627.987.328,96
   d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp42.964.687,00
   e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp3.091.237.498,68
   f. PPKD sebesar Rp1.479.734.544,00
   g. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp1.580.665.317,67
   h. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp730.781.073,44
   i. Dinas Sosial sebesar Rp80.700.000,00
   j. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp221.238.952,78
   k. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp4.005.584.858,61
   l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp28.643.124,00
   m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp455.666.040,81
   n. Sekretariat Daerah sebesar Rp889.516.948,50
   o. Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp106.726.818,18
   p. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp1.500.624,00
   q. Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp4.535.000,00
   r. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp145.202.100,00

s. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp947.752.209,01
t. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp530.913.499,61
u. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp380.120.069,23
v. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp28.165.000,00

2. Pengurangan akumulasi penyusutan aset lainnya sebesarRp31.944.685.021,76 terdiri dari :

a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp76.363.400,00
b. Dinas Pendidikan sebesar Rp1.109.534.838,00
c. Dinas Kesehatan sebesar Rp2.460.823.250,00
d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp555.262.340,00
e. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp154.785.714,28
f. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp14.746.107.829,21
g. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp98.984.098,00
h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp871.492.249,50
i. Sekretariat Daerah sebesar Rp1.204.421.449,14
j. Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp165.052.846,92
k. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp426.937.224,61
l. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp353.112.022,28
m. PPKD sebesar Rp1.911.956.170,00
n. Rumah Sakit Umum Daerah (PD) sebesar Rp5.712.940,30
o. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp13.486.000,00
p. Dinas Sosial sebesar Rp80.700.000,00
q. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp1.977.705.756,67
r. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp209.448.000,00
s. Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp1.500.624,00
t. Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp4.535.000,00
u. Inspektorat sebesar Rp29.900.000,00
v. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp1.025.582.268,85
w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp4.461.281.000,00

5.3.1.6.8 Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF)

Saldo *Dana Transfer Treasury Deposit Facility* tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp7.169.764.000,00 dan Rp23.768.880.000,00 yang merupakan Dana Bagi Hasil yang disalurkan ke rekening *Treasury Deposit Facility* sesuai surat dari DJP Kementerian Keuangan RI No. S-35/PK/PK.2/2025 tanggal 17 April 2025.

Tabel 5.3.117
Dana *Transfer Treasury Deposit Facility*

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo awal TDF	23.768.880.000,00	12.400.188.687,00
2	Penambahan	7.169.764.000,00	23.768.880.000,00
3	Pengurangan	23.768.880.000,00	12.400.188.687,00
4	Saldo Akhir TDF	7.169.764.000,00	23.768.880.000,00

5.3.1.6 PROPERTI INVESTASI

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAP) Berbasis Akrual Nomor 17 tentang Properti Investasi dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

Termasuk dalam kategori properti investasi antara lain:

1. Tanah yang dikuasai dan/atau dikuasai dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya dimasa depan untuk digunakan sendiri atau dijual dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka peningkatan nilai.
3. Bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
4. Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah daerah tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
5. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang dimasa depan digunakan sebagai properti investasi.

Tidak termasuk dan bukan merupakan bagian dari definisi properti investasi aset-aset sebagai berikut:

1. Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan dan/atau pengembangan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Properti yang masih dalam proses pembangunan dan/atau pengembangan atas nama pihak ketiga.
3. Properti yang digunakan sendiri termasuk diantaranya properti yang dikuasai untuk digunakan dimasa depan sebagai properti yang digunakan sendiri.
4. Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan.
5. Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa dibawah harga pasar, misalnya pemerintah daerah membangun apartemen atau rumah susun yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenaikan sewa dibawah harga pasar.
6. Properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

Properti investasi diakui sebagai aset jika:

1. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan

2. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Dalam menentukan suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.

Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal/saat perolehan.

Pada Tahun Anggaran 2024 senilai Rp218.175.889.862,00, menjadi potensi properti investasi tanah Pemerintah Kota Bogor. Sebanyak 49 bidang tanah tersebut dengan total nilai perolehan Rp213.767.403.459,00 dan 2 gedung bangunan dengan total nilai perolehan Rp4.408.486.403,00. Rincian 51 bidang aset properti investasi sebagaimana tabel dalam *lampiran 15*.

5.3.2 KEWAJIBAN

Kewajiban merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Pemerintah Kota Bogor. Kewajiban Kota Bogor pada tahun 2024 sebesar Rp172.758.274.730,79 mengalami penurunan sebesar Rp6.565.139.485,28 atau 3,66% dibanding dengan tahun 2023 sebesar Rp179.323.414.216,07.

Tabel 5.3.118
Kewajiban

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	**Kewajiban**				
2	Kewajiban Jangka Pendek	110.091.452.175,79	106.374.711.749,07	3.716.740.426,72	3,49
3	Kewajiban Jangka Panjang	62.666.822.555,00	72.948.702.467,00	(10.281.879.912,00)	(14,09)
	Jumlah Kewajiban	172.758.274.730,79	179.323.414.216,07	(6.565.139.485,28)	**(3,66)**

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp110.091.452.175,79 mengalami penurunan sebesar Rp3.716.740.426,72 atau 3,49% dari saldo 31 Desember 2023 sebesar Rp106.374.711.749,07 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.119
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	**Kewajiban Jangka Pendek**				
2	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	158.277.901,00	260.050.896,00	(101.772.995,00)	(39,14)
3	Utang Bunga	543.668.056,00	-	543.668.056,00	-
4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	10.281.879.912,00	10.281.879.912,00	-	-
5	Pendapatan Diterima Dimuka	2.569.064.213,13	413.113.467,07	2.155.950.746,06	521,88
6	Utang Belanja	96.531.896.093,66	95.418.767.474,00	1.113.128.619,66	1,17
7	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.666.000,00	900.000,00	5.766.000,00	640,67
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	110.091.452.175,79	106.374.711.749,07	3.716.740.426,72	**3,49**

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo utang perhitungan pihak ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 sebesar Rp158.277.901,00 atau turun sebesar Rp101.772.995,00 atau 39,14% dibanding saldo 2023 sebesar Rp260.050.896,00. Adapun rincian utang perhitungan pihak ketiga sebagai berikut:

Tabel 5.3.120
Utang Perhitungan Pihak Ketiga per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	**Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**				
2	**Utang PPN**				
	- Rumah Sakit Umum Daerah - BLUD	8.777.901,00	0,00	8.777.901,00	-
	- Puskesmas Bogor Timur	0,00	11.050.896,00	(11.050.896,00)	(100,00)
3	**Utang Jaminan Bongkar Reklame**				
	- Badan Pendapatan Daerah	149.500.000,00	249.000.000,00	(99.500.000,00)	(39,96)
	Jumlah Utang PFK	**158.277.901,00**	**260.050.896,00**	**(101.772.995,00)**	(39,14)

(Rincian utang perhitungan pihak ketiga (PFK) disajikan pada lampiran 11, dan 12)

5.3.2.1.1 Utang Bunga

Saldo utang bunga per 31 Desember 2024 sebesar Rp543.668.056,00 sedangkan saldo 2023 sebesar Rp0,00. Adapun utang bunga merupakan utang bunga atas penerusan pinjaman jangka Panjang ke Lembaga Keuangan sesuai dengan Laporan Keuangan Audited PDAM Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.121
Utang Bunga

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Utang Bunga				
1	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Panjang	543.668.056,00	0,00	543.668.056,00	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**543.668.056,00**	**0,00**	**543.668.056,00**	-

5.3.2.1.2 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo bagian lancar utang jangka Panjang Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.281.879.912,00 tidak mengalami kenaikan atau penurunan dari saldo 31 Desember 2023 sebesar Rp10.281.879.912,00. Adapun rincian bagian lancar utang jangka Panjang sebagai berikut.

Tabel 5.3.122
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	**Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**				
2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Penerusan Pinjaman Luar Negeri - Jangka Panjang	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMD - Jangka Panjang	4.797.113.736,00	4.797.113.736,00	0,00	0,00
	Jumlah Bagian Lancar	**10.281.879.912,00**	**10.281.879.912,00**	0,00	0,00

Saldo bagian lancar utang jangka panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.797.113.736,00 terdiri dari bagian lancar utang atas penerusan pinjaman luar negeri berasal dari dana pinjaman sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota Bogor Nomor: SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Dana Pinjaman dari *International Bank For Reconstruction and Development* No. 7730-10 Tanggal 1 September 2009 dalam rangka

pembiayaan *Urban Water Supply and Sanitation Project* sebesar Rp5.484.766.176,00 dan bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank sesuai dengan Risalah Rapat Rekonsiliasi Pinjaman Antara PT Sarana Mukti Infrastruktur (Persero) dengan Pemerintah Kota Bogor sebesar Rp4.797.879.912,00

5.3.2.1.3 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pos untuk mencatat pendapatan yang seharusnya belum diterima sampai dengan tanggal neraca tetapi sudah diterima didepan/dimuka, pada Tahun Anggaran 2024 ini terdapat pendapatan diterima dimuka total senilai Rp2.569.064.213,13 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.123
Pendapatan Diterima Dimuka per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	**Pendapatan Diterima Dimuka**				
2	**Pendapatan Diterima Dimuka BLUD**				
	- Rumah Sakit Umum Daerah - BLUD	2.312.520.955,64	159.594.328,45	2.152.926.627,19	1.349,00
3	**Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah**				
	- Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	256.543.257,49	253.519.138,62	3.024.118,87	-
	Jumlah Pendapatan diterima dimuka	**2.569.064.213,13**	**413.113.467,07**	**2.155.950.746,06**	**521,88**

(Rincian pendapatan diterima dimuka disajikan pada lampiran 13.1 dan 13.2)

5.3.2.1.4 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp96.531.896.093,66 atau naik sebesar Rp1.113.128.619,66 atau 1,17% dibanding saldo 2023 sebesar Rp95.418.767.474,00. Adapun rincian utang belanja sebagai berikut:

Tabel 5.3.124
Rincian Utang Belanja Per Objek

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
2	Utang Belanja Pegawai	2.753.356.083,00	3.448.530.966,00	(695.174.883,00)	(20,16)
3	Utang Belanja Barang dan Jasa	92.069.170.089,66	73.186.457.099,00	18.882.712.990,66	25,80
4	Utang Belanja Modal Tanah	0,00	57.054.000,00	(57.054.000,00)	-
5	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.709.369.921,00	268.422.114,00	1.440.947.807,00	536,82
6	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan (KDP)	0,00	8.465.191.362,00	(8.465.191.362,00)	(100,00)
7	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	9.993.111.933,00	(9.993.111.933,00)	(100,00)
	Jumlah Utang Belanja	**96.531.896.093,66**	**95.418.767.474,00**	**1.113.128.619,66**	**1,17**

(Rincian utang belanja per perangkat daerah disajikan pada lampiran 14.1 dan 14.2)

5.3.2.1.5 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.666.000,00 sedangkan Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp900.000,00 merupakan Utang Transfer Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi atas sisa dana Kegiatan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 yang belum dikembalikan ke RKUD Provinsi. Adapun mutasi Utang Transfer Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi sebagai berikut:

Tabel 5.3.125
Utang Jangka Pendek Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Utang Jangka Pendek Lainnya				
1	Utang Transfer Bantuan Keuangan antar Daerah	6.666.000,00	900.000,00	5.766.000,00	640,67
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**6.666.000,00**	**900.000,00**	**5.766.000,00**	**640,67**

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp72.948.702.467,00 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari saldo 31 Desember 2023 sebesar Rp72.948.702.467,00. Adapun rincian kewajiban jangka panjang sebagai berikut:

Tabel 5.3.126
Kewajiban Jangka Panjang

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	**Kewajiban Jangka Panjang**				
2	**Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri**				
	-Badan Keuangan dan Aset Daerah	43.878.129.419,00	49.362.895.595,00	(5.484.766.176,00)	(11,11)
3	**Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMD**				
	-Badan Keuangan dan Aset Daerah	18.788.693.136,00	23.585.806.872,00	(4.797.113.736,00)	(20,34)
	Jumlah Utang	**62.666.822.555,00**	**72.948.702.467,00**	**(10.281.879.912,00)**	**(14,09)**

5.3.2.2.1 Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri

Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri berasal dari dana pinjaman sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota Bogor Nomor: SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Dana Pinjaman dari *International Bank For Reconstruction and Development* No. 7730-10 Tanggal 1 September 2009 dalam rangka pembiayaan *Urban Water Supply and Sanitation Project*. Pemerintah Kota Bogor sebagai pihak yang menandatangani NPPP wajib menganggarkan didalam APBD Pembiayaan cicilan pinjaman yang terdiri dari atas pokok pinjaman dan bunga pinjaman, dengan mengakui adanya hutang jangka panjang terlebih dahulu. Adapun sumber dana untuk pembayaran cicilan hutang jangka panjang tersebut berasal dari PDAM Tirta Pakuan. Mekanisme penyetoran uang pinjaman langsung dari Pusat ke PDAM dan tidak melalui rekening Kas Daerah.

Pembayaran utang pokok sesuai jadwal pembayaran dari bulan Nopember 2018 s.d. Nopember 2033 /tahunnya, sebesar Rp2.748.516.129,03 dan untuk bunganya baru dapat diketahui setelah Surat Tagihan Pembayaran Jatuh tempo dari Dirjen Perbendaharaan/ Kanwil Perbendaharaan.

Tabel 5.3.127
Mutasi Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri

Jenis Kewajiban	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pembayaran s/d tahun 2024 (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Jangka Panjang (Rp)
Utang Jangka Panjang atas Pinjaman World Bank No SLA-1226/DSMI/2009						
- 2017	85.013.875.741,00	0,00	0,00	85.013.875.741,00	0,00	85.013.875.741,00
- 2018		0,00	2.742.383.088,00	82.271.492.653,00	0,00	82.271.492.653,00
- 2019		0,00	5.484.766.176,00	76.786.726.477,00	5.484.766.176,00	71.301.960.301,00
- 2020		0,00	5.484.766.176,00	71.301.960.301,00	5.484.766.176,00	65.817.194.125,00
- 2021		0,00	5.484.766.176,00	65.817.194.125,00	5.484.766.176,00	60.332.427.949,00
- 2022		0,00	5.484.766.176,00	60.332.427.949,00	5.484.766.176,00	54.847.661.773,00
- 2023		0,00	5.484.766.176,00	54.847.661.773,00	5.484.766.176,00	49.362.895.597,00
- 2024		0,00	5.484.766.176,00	49.362.895.597,00	5.484.766.176,00	43.878.129.421,00

5.3.2.2.2 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMD

Utang kepada Lembaga keuangan bukan bank merupakan perjanjian pemberian pinjaman Nomor: 45 untuk membiayai kegiatan Peningkatan Jalan Suryakencana (Kawasan Suryakencana).

Pembayaran pokok dilakukan dengan cara pemotongan langsung terhadap penyaluran Dana Transfer Umum (DTU) yang mengacu kepada perjanjian pengelolaan pinjaman. Besaran DTU dapat diperhitungkan sesuai dengan hasil rekonsiliasi antara pihak pertama dengan DJPK. Besarnya angsuran pokok setiap bulan sebesar 1/12 dari nilai DTU yang dapat diperhitungkan di tahun berkenaan yang dibayarkan setiap akhir bulan setelah masa tenggang terakhir

Utang atas penerusan pinjaman luar negeri per 31 Desember 2024 sebesar Rp18.788.693.136,00 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp23.585.806.872,00. Adapun pada tahun 2024 utang kepada Lembaga keuangan bukan bank direklasifikasi ke bagian lancar kewajiban jangka Panjang sebesar Rp4.797.113.736,00. Berikut mutasi utang atas penerusan pinjaman luar negeri tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.3.128
Mutasi Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMD

Jenis Kewajiban	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pembayaran (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Jangka Panjang (Rp)
Utang kepada Lembaga keuangan bukan bank merupakan perjanjian pemberian pinjaman nomor : 45 untuk membiayai kegiatan Peningkatan Jalan Suryakencana (Kawasan Suryakencana)						
- 2021	0,00	30.405.414.751,00	0,00	30.405.414.751,00	0,00	30.405.414.751,00
- 2022	30.405.414.751,00	0,00	1.622.734.665,00	28.782.680.086,00	799.518.956,00	27.983.161.130,00
- 2023	27.983.161.130,00	0,00	399.759.478,00	28.382.920.608,00	4.797.113.736,00	23.585.806.872,00
- 2024	23.585.806.872,00	0,00	4.797.113.736,00	23.585.806.872,00	4.797.113.736,00	18.788.693.136,00

5.3.3 EKUITAS

Saldo Ekuitas Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.869.386.015.526,97 mengalami kenaikan sebesar Rp256.271.342.592,00 atau sebesar 2,41% dibanding saldo 31 Desember 2023 sebesar Rp10.613.114.672.934,97. Adapun rincian ekuitas sebagai berikut:

Tabel 5.3.129
Ekuitas

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	**Ekuitas**				
2	Ekuitas Awal	10.613.114.672.934,97	10.174.464.362.679,95	438.650.310.255,00	4,31
3	Surplus / Defisit - LO	58.676.399.723,31	156.235.389.193,60	(97.558.989.470,29)	(62,44)
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	197.594.942.868,69	282.414.921.061,42	(84.819.978.192,73)	(30,03)
5	**Ekuitas Akhir**	**10.869.386.015.526,97**	**10.613.114.672.934,97**	**256.271.342.592,00**	**2,41**

5.4 PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaanya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan Pos – Pos Luar Biasa.

Laporan Operasional Pemerintah Kota Bogor diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu *kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa*.

5.4.1 Pendapatan Daerah - LO

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bogor dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan LO pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing masing dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.1

Pendapatan Daerah LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.613.207.035.756,08	1.433.294.780.168,91	179.912.255.587,17	12,55
2	Pendapatan Transfer	1.701.821.239.565,00	1.636.490.268.772,00	65.330.970.793,00	3,99
3	Lain - Lain Pendapatan yang Sah	42.961.879.333,77	66.574.926.398,81	(23.613.047.065,04)	(35,47)
Jumlah		3.357.990.154.654,85	3.136.359.975.339,72	221.630.179.315,13	7,07

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Daerah – LO TA 2024 sebesar Rp3.357.990.154.654,85 mengalami peningkatan sebesar Rp221.630.179.315,13 atau 7,07% dibandingkan Pendapatan – LO TA 2023 sebesar Rp3.136.359.975.339,72.

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode TA 2024 dan 2023, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.2

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pajak Daerah	1.072.592.914.165,00	972.314.483.639,00	100.278.430.526,00	10,31
2	Retribusi Daerah	429.458.652.647,18	31.421.925.232,38	398.036.727.414,80	1.266,75
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	75.711.032.790,57	36.551.189.768,95	39.159.843.021,62	107,14
4	Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah	35.444.436.153,33	393.007.181.528,58	(357.562.745.375,25)	(90,98)
Jumlah		1.613.207.035.756,08	1.433.294.780.168,91	179.912.255.587,17	12,55

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Asli Daerah – LO TA 2024 sebesar Rp1.613.207.035.756,08 mengalami kenaikan sebesar Rp179.912.255.587,17 atau 12,55% dari Pendapatan – LO TA 2023 sebesar Rp1.433.294.780.168,91.

Rincian masing-masing Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut;

5.4.1.1.1 Pajak Daerah - LO

Pajak Daerah - LO adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola Pemerintah Kota Bogor, pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2024, sehingga nilai pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang ditetapkan

pada tahun 2024 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditetapkan tahun 2024, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.3

Pajak Daerah - LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pajak Hotel	128.990.798.187,00	120.127.841.958,00	8.862.956.229,00	7,38
2	Pajak Restoran	214.101.747.593,00	193.851.366.374,00	20.250.381.219,00	10,45
3	Pajak Hiburan	30.285.088.596,00	22.617.679.228,00	7.667.409.368,00	33,90
4	Pajak Reklame	10.128.298.469,00	10.898.485.520,00	(770.187.051,00)	(7,07)
5	Pajak Penerangan Jalan	95.818.548.299,00	61.678.951.202,00	34.139.597.097,00	55,35
6	Pajak Parkir	7.965.418.166,00	14.628.794.964,00	(6.663.376.798,00)	(45,55)
7	Pajak Air Tanah	2.014.470.394,00	2.518.760.477,00	(504.290.083,00)	(20,02)
8	PBB P2	296.832.276.011,00	285.770.146.458,00	11.062.129.553,00	3,87
9	Pajak BPHTB	286.456.268.450,00	260.222.457.458,00	26.233.810.992,00	10,08
Jumlah		**1.072.592.914.165,00**	**972.314.483.639,00**	**100.278.430.526,00**	**10,31**

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan PAD Pajak Daerah - LO TA 2024 sebesar Rp1.072.592.914.165,00 mengalami peningkatan sebesar Rp100.278.430.526,00 atau 10,31% dari PAD Pajak Daerah - LO TA 2023 sebesar Rp972.314.483.639,00.

Berikut rincian PAD - Pajak Daerah per Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.4

Rincian PAD - Pajak Daerah - LO Per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Badan Pendapatan Daerah				
1	Pajak Hotel	128.990.798.187,00	120.127.841.958,00	8.862.956.229,00	7,38
2	Pajak Restoran	214.101.747.593,00	193.851.366.374,00	20.250.381.219,00	10,45
3	Pajak Hiburan	30.285.088.596,00	22.617.679.228,00	7.667.409.368,00	33,90
4	Pajak Reklame	10.128.298.469,00	10.898.485.520,00	(770.187.051,00)	(7,07)
5	Pajak Penerangan Jalan	95.818.548.299,00	61.678.951.202,00	34.139.597.097,00	55,35
6	Pajak Parkir	7.965.418.166,00	14.628.794.964,00	(6.663.376.798,00)	(45,55)
7	Pajak Air Tanah	2.014.470.394,00	2.518.760.477,00	(504.290.083,00)	(20,02)
8	PBB P2	296.832.276.011,00	285.770.146.458,00	11.062.129.553,00	3,87
9	Pajak BPHTB	286.456.268.450,00	260.222.457.458,00	26.233.810.992,00	10,08
Jumlah		**1.072.592.914.165,00**	**972.314.483.639,00**	**100.278.430.526,00**	**10,31**

Adapun perbandingan nilai PAD - Pajak Daerah antara LO dan LRA TA 2024 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.5

Perbandingan Nilai PAD - Pajak Daerah pada LO dan LRA TA 2024

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
1	Pajak Hotel	128.990.798.187,00	123.207.802.097,00	5.782.996.090,00
2	Pajak Restoran	214.101.747.593,00	208.515.593.649,00	5.586.153.944,00
3	Pajak Hiburan	30.285.088.596,00	29.358.580.222,00	926.508.374,00
4	Pajak Reklame	10.128.298.469,00	9.736.486.534,00	391.811.935,00

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
5	Pajak Penerangan Jalan	95.818.548.299,00	95.818.548.299,00	-
6	Pajak Parkir	7.965.418.166,00	7.859.694.368,00	105.723.798,00
7	Pajak Air Tanah	2.014.470.394,00	1.924.708.540,00	89.761.854,00
8	PBB P2	296.832.276.011,00	210.911.617.241,00	85.920.658.770,00
9	Pajak BPHTB	286.456.268.450,00	286.435.829.900,00	20.438.550,00
Jumlah		**1.072.592.914.165,00**	**973.768.860.850,00**	**98.824.053.315,00**

Selisih/perbedaan PAD – Pajak Daerah antara LO dan LRA sebesar Rp98.824.053.315,00 terdiri atas:

1. Perbedaan Pajak Hotel antara LO dan LRA sebesar Rp5.782.996.090,00, merupakan piutang berjalan tahun 2024 sebesar Rp8.759.322.301,00 dan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp2.976.326.211,00;
2. Perbedaan Pajak Restoran antara LO dan LRA sebesar Rp5.586.153.944,00. Perbedaan tersebut merupakan piutang berjalan tahun 2024 sebesar Rp9.588.172.522,00 dan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp4.002.018.578,00;
3. Perbedaan Pajak Hiburan antara LO dan LRA sebesar Rp926.508.374,00. Perbedaan tersebut merupakan piutang berjalan tahun 2024 sebesar Rp953.925.678,00 dan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp27.417.304,00;
4. Perbedaan Pajak Reklame antara LO dan LRA sebesar Rp391.811.935,00. Perbedaan tersebut merupakan piutang berjalan tahun 2024 sebesar Rp767.991.196,00 dan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp376.179.261,00;
5. Perbedaan Pajak Parkir antara LO dan LRA sebesar Rp105.723.798,00. Perbedaan tersebut merupakan piutang berjalan tahun 2024 sebesar Rp129.114.756,00 dan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp23.390.958;
6. Perbedaan Pajak Air Tanah antara LO dan LRA sebesar Rp89.761.854,00. Perbedaan tersebut merupakan piutang berjalan tahun 2024 sebesar Rp151.966.984,00 dan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp62.205.130;
7. Perbedaan PBB P2 antara LO dan LRA sebesar Rp85.920.658.770,00. Perbedaan tersebut merupakan piutang berjalan tahun 2024 sebesar Rp112.033.757.579,00 dan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp26.113.098.809,00;
8. Perbedaan Pajak BPHTB antara LO dan LRA sebesar Rp20.438.550,00. Perbedaan tersebut merupakan piutang berjalan tahun 2024 sebesar Rp99.968.550,00 adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp79.530.000,00,00.

5.4.1.1.2 Retribusi Daerah – LO

Retribusi Daerah - LO dipungut oleh beberapa Perangkat Daerah penghasil retribusi yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bogor. Pemungutan Retribusi Daerah Kota Bogor didasarkan atas Perda tentang Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.6

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Retribusi Jasa Umum	412.636.564.581,05	16.756.686.953,00	395.879.877.628,05	2.362,52
2	Retribusi Jasa Usaha	8.734.683.322,00	6.628.165.318,00	2.106.518.004,00	31,78
3	Retribusi Perizinan Tertentu	8.087.404.744,13	8.037.072.961,38	50.331.782,75	0,63
Jumlah		**429.458.652.647,18**	**31.421.925.232,38**	**398.036.727.414,80**	**1.266,75**

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2024 sebesar Rp429.458.652.647,18 mengalami kenaikan sebesar Rp398.036.727.414,80 atau 1.266,75% dari PAD Retribusi Daerah – LO TA 2023 sebesar Rp31.421.925.232,38.

Adapun perbandingan nilai PAD – Retribusi Daerah antara LO dan LRA TA 2024 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.7

Perbandingan Nilai PAD - Retribusi Daerah pada LO dan LRA TA 2024

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
1	Retribusi Jasa Umum	412.636.564.581,05	400.997.137.220,24	11.639.427.360,81
2	Retribusi Jasa Usaha	8.734.683.322,00	7.953.316.342,00	781.366.980,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	8.087.404.744,13	8.494.999.428,00	(407.594.683,87)
Jumlah		**429.458.652.647,18**	**417.445.452.990,24**	**12.013.199.656,94**

Selisih/perbedaan PAD – Retribusi Daerah antara LO dan LRA sebesar Rp12.013.199.656,94 terdiri atas:

1. Perbedaan Retribusi Jasa Umum antara LO dan LRA sebesar Rp11.639.427.360,81 terdiri dari :
   a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
      - Perbedaan tersebut merupakan pembayaran atas piutang tahun 2023 pada retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp6.925.500,00.

   b. Rumah Sakit Umum Daerah- BLUD
      - Perbedaan retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah - BLUD antara LRA dan LO sebesar Rp11.646.352.860,81. Perbedaan tersebut merupakan piutang berjalan tahun 2024 sebesar Rp67.876.193.775 dan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp56.229.840.914.
2. Perbedaan Retribusi Jasa Usaha antara LO dan LRA sebesar Rp781.366.980,00 terdapat pada:
   a. Dinas Perumahan dan Permukiman
      - Perbedaan retribusi penyewaan tanah dan bangunan pada Dinas Perumahan dan Permukiman antara LRA dan LO sebesar Rp135.495.000,00. Perbedaan tersebut merupakan piutang berjalan tahun 2024 sebesar 516.655.000,00 dan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar 381.160.000,00.

   b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
      - Perbedaan retribusi penyewaan tanah dan bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap antara LRA dan LO sebesar Rp568.507.890,00. Perbedaan tersebut merupakan piutang berjalan tahun 2024 sebesar Rp88.548.000,00 dan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp11.183.910,00.

   c. Badan Keuangan dan Aset Daerah
      - Perbedaan retribusi penyewaan tanah dan bangunan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah antara LRA dan LO sebesar Rp568.507.890,00. Perbedaan tersebut merupakan piutang berjalan tahun 2024 sebesar Rp627.839.746,00 dan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp59.331.856,00.
3. Perbedaan Retribusi Perizinan Tertentu antara LO dan LRA sebesar Rp407.594.683,87 terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu karena adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp1.755.337,00 untuk retribusi izin mendirikan bangunan, adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp740.445.788,00 dan piutang tahun 2024 sebesar Rp337.630.560,00 untuk retribusi persetujuan bangunan gedung, adanya pendapatan retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA) tahun 2024 sebesar Rp253.519.138,62 atas pembayaran pendapatan

diterima dimuka tahun sebelumnya, dan adanya pembayaran pendapatan diterima dimuka retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada tahun 2024 sebesar Rp256.543.257,49.

5.4.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum - LO

Retribusi Jasa Umum - LO merupakan sumber PAD yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintah Kota Bogor, Retribusi Jasa Umum dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.8

Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pelayanan Kesehatan	394.860.277.019,05	63.630.000,00	394.796.647.019,05	620.456,78
2	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.682.315.717,00	11.903.096.282,00	2.779.219.435,00	23,35
3	Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	39.171.500,00	636.841.750,00	(597.670.250,00)	(93,85)
4	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.753.673.000,00	2.133.247.000,00	620.426.000,00	29,08
5	Pengujian Kendaraan Bermotor	-	1.184.020.000,00	(1.184.020.000,00)	(100,00)
6	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	-	201.657.050,00	(201.657.050,00)	(100,00)
7	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	246.100.000,00	227.050.000,00	19.050.000,00	8,39
8	Pengolahan Limbah Cair	55.027.345,00	45.368.621,00	9.658.724,00	21,29
9	Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	200.302.750,00	(200.302.750,00)	(100,00)
10	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	161.473.500,00	(161.473.500,00)	(100,00)
Jumlah		**412.636.564.581,05**	**16.756.686.953,00**	**395.879.877.628,05**	**2.362,52**

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO TA 2024 sebesar Rp412.636.564.581,05 mengalami peningkatan sebesar Rp395.879.877.628,05 atau 2.362,52% dari PAD Retribusi Jasa Umum – LO TA 2023 sebesar Rp16.756.686.953,00.

Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.9

Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	**DINAS KESEHATAN**				
	Pelayanan Kesehatan	63.335.707.917,00	63.630.000,00		
	Jumlah	**63.335.707.917,00**	**63.630.000,00**	**63.272.077.917,00**	**99.437,49**
2	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH - BLUD**				
	Pelayanan Kesehatan	331.524.569.102,05	-		
	Jumlah	**331.524.569.102,05**	**-**	**331.524.569.102,05**	**100,00**
3	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				
	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	246.100.000,00	227.050.000,00		
	Pengolahan Limbah Cair	55.027.345,00	45.368.621,00		
	Jumlah	**301.127.345,00**	**272.418.621,00**	**28.708.724,00**	**10,54**
4	**DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN**				
	Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	39.171.500,00	636.841.750,00		
	Jumlah	**39.171.500,00**	**636.841.750,00**	**(597.670.250,00)**	**(93,85)**
5	**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**				
	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	-	201.657.050,00		
	Jumlah	**-**	**201.657.050,00**	**(201.657.050,00)**	**(100,00)**
6	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**				
	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.682.315.717,00	11.903.096.282,00		
	Jumlah	**14.682.315.717,00**	**11.903.096.282,00**	**2.779.219.435,00**	**23,35**

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
7	DINAS PERHUBUNGAN				
	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.753.673.000,00	2.133.247.000,00		
	Pengujian Kendaraan Bermotor	-	1.184.020.000,00		
	Jumlah	**2.753.673.000,00**	**3.317.267.000,00**	**(563.594.000,00)**	**(16,99)**
8	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				
	Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	200.302.750,00		
	Jumlah	**-**	**200.302.750,00**	**(200.302.750,00)**	**(100,00)**
9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	161.473.500,00		
	Jumlah	**-**	**161.473.500,00**	**(161.473.500,00)**	**(100,00)**
TOTAL		**412.636.564.581,05**	**16.756.686.953,00**	**395.879.877.628,05**	**2.362,52**

5.4.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha - LO

Retribusi Jasa Usaha - LO merupakan sumber PAD yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah Kota Bogor, Retribusi Jasa Usaha dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.10
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pemakaian Kekayaan Daerah	6.202.153.322,00	4.472.703.998,00	1.729.449.324,00	38,67
2	Terminal	-	118.145.320,00	(118.145.320,00)	(100,00)
3	Tempat Khusus Parkir	54.970.000,00	52.120.000,00	2.850.000,00	5,47
4	Rumah Potong Hewan	813.828.000,00	632.902.000,00	180.926.000,00	28,59
5	Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.663.732.000,00	1.352.294.000,00	311.438.000,00	23,03
Jumlah		**8.734.683.322,00**	**6.628.165.318,00**	**2.106.518.004,00**	**31,78**

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Retribusi Jasa Usaha – LO TA 2024 sebesar Rp8.734.683.322,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.106.518.004,00 atau 31,78% dari PAD Retribusi Jasa Usaha – LO TA 2023 sebesar Rp6.628.165.318,00.

Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.11
Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha per Perangkat Daerah
TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				
	Pemakaian Kekayaan Daerah	2.068.270.000,00	2.084.105.000,00		
	Tempat Rekreasi dan Olahraga	110.430.000,00	-		
	Jumlah	**2.178.700.000,00**	**2.084.105.000,00**	**94.595.000,00**	**4,54**
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	Pemakaian Kekayaan Daerah	151.750.000,00	146.350.000,00		
	Jumlah	**151.750.000,00**	**146.350.000,00**	**5.400.000,00**	**3,69**

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
3	**DINAS PERHUBUNGAN**				
	Terminal	-	118.145.320,00		
	Tempat Khusus Parkir	54.970.000,00	52.120.000,00		
	Jumlah	**54.970.000,00**	**170.265.320,00**	**(115.295.320,00)**	**(67,72)**
4	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**				
	Rumah Potong Hewan	813.828.000,00	632.902.000,00		
	Jumlah	**813.828.000,00**	**632.902.000,00**	**180.926.000,00**	**28,59**
5	**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**				
	Pemakaian Kekayaan Daerah	54.000.000,00	41.750.000,00		
	Jumlah	**54.000.000,00**	**41.750.000,00**	**12.250.000,00**	**29,34**
6	**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**				
	Pemakaian Kekayaan Daerah	3.291.148.384,00	1.934.411.177,00		
	Jumlah	**3.291.148.384,00**	**1.934.411.177,00**	**1.356.737.207,00**	**70,14**
7	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**				
	Pemakaian Kekayaan Daerah	636.984.938,00	266.087.821,00		
	Jumlah	**636.984.938,00**	**266.087.821,00**	**370.897.117,00**	**139,39**
8	**DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA**				
	Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.553.302.000,00	1.352.294.000,00		
	Jumlah	**1.553.302.000,00**	**1.352.294.000,00**	**201.008.000,00**	**14,86**
Jumlah Keseluruhan		**8.734.683.322,00**	**6.628.165.318,00**	**2.106.518.004,00**	**31,78**

5.4.1.1.2.3 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan sumber PAD yang berhubungan dengan fungsi Pemerintah Kota Bogor sebagai Regulator dan Otorisasi untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Retribusi Perizinan Tertentu dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.12
Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	80.625.000,00	(80.625.000,00)	(100,00)
2	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	253.519.138,62	167.188.861,38	86.330.277,24	51,64
3	Persetujuan Bangunan Gedung	7.645.206.363,00	7.789.259.100,00	(144.052.737,00)	(1,85)
4	Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	188.679.242,51	-	188.679.242,51	100,00
Jumlah		**8.087.404.744,13**	**8.037.072.961,38**	**50.331.782,75**	**0,63**

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Retribusi Perizinan Tertentu – LO TA 2024 sebesar Rp8.087.404.744,13 mengalami peningkatan sebesar Rp50.331.782,75 atau 0,63% dari PAD Retribusi Perizinan Tertentu – LO TA 2023 sebesar Rp8.037.072.961,38.

Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.13

Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**				
	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	253.519.138,62	167.188.861,38	86.330.277,24	**51,64**
	Persetujuan Bangunan Gedung	7.645.206.363,00	7.789.259.100,00	(144.052.737,00)	**(1,85)**
	Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	188.679.242,51	-	188.679.242,51	**100,00**
	Jumlah	**8.087.404.744,13**	**7.956.447.961,38**	**(57.722.459,76)**	**(0,73)**
2	**DINAS PERHUBUNGAN**				
	Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	80.625.000,00	(80.625.000,00)	**(100,00)**
	Jumlah	**-**	**80.625.000,00**	**(80.625.000,00)**	**(100,00)**
TOTAL		**8.087.404.744,13**	**8.037.072.961,38**	**(138.347.459,76)**	**(1,72)**

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah - LO yang Dipisahkan merupakan sumber PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Bogor pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan realisasi TA 2024 dan 2023 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.14

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LO - Bank Kota	4.087.409.370,00	2.774.558.399,25	1.312.850.970,75	47,32
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LO - Bank BJB	4.260.852.544,00	4.750.663.159,00	(489.810.615,00)	(10,31)
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) - LO - PD Pasar Pakuan Jaya	8.550.122.766,00	791.025.366,90	7.759.097.399,10	980,89
4	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) - LO - PD Jasa Transportasi	-	87.737.781,45	(87.737.781,45)	(100,00)
5	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) - LO - PERUMDA Tirta Pakuan	58.812.648.110,57	28.147.205.062,35	30.665.443.048,22	108,95
Jumlah		**75.711.032.790,57**	**36.551.189.768,95**	**39.159.843.021,62**	**107,14**

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA 2024 sebesar Rp75.711.032.790,57 mengalami peningkatan sebesar Rp39.159.843.021,62 atau 107,14% dari PAD Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA 2023 sebesar Rp36.551.189.768,95.

Adapun perbandingan nilai PAD - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah - LO antara LO dan LRA TA 2024 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.15
Perbandingan Nilai PAD - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
pada LO dan LRA TA 2024

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LO - Bank Kota	4.087.409.370,00	2.774.558.399,00	1.312.850.971,00
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LO - Bank BJB	4.260.852.544,00	4.750.663.159,00	(489.810.615,00)
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) - LO - PD Pasar Pakuan Jaya	8.550.122.766,00	1.173.573.966,00	7.376.548.800,00
4	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) - LO - PD Jasa Transportasi	-	-	-
5	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) - LO - PERUMDA Tirta Pakuan	58.812.648.110,57	25.588.368.239,00	33.224.279.871,57
Jumlah		**75.711.032.790,57**	**34.287.163.763,00**	**41.423.869.027,57**

Selisih/perbedaan PAD - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO antara LO dan LRA sebesar Rp41.423.869.027,57 terdiri atas:

1. Perbedaan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - *Bank Kota* antara LO dan LRA merupakan setoran bagian laba yang dibagikan atas penyertaan modal Pemda pada BUMD pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.774.558.399,00 dan penyertaan modal Pemda pada BUMD sebesar Rp4.087.409.370,00.
2. Perbedaan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada *PT Bank BJB Banten* antara LO dan LRA merupakan pemindahbukuan atas dividen sebesar Rp4.750.663.159,00 dan piutang bagian laba (dividen) TA 2024 sebesar Rp4.260.852.544,00.
3. Perbedaan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) - PD Pasar Pakuan Jaya antara LO dan LRA merupakan penyertaan modal Pemda pada BUMD sebesar Rp8.300.122.766,00, bagian laba yang dibagikan atas penyertaan modal Pemda pada BUMD Tahun 2024 sebesar Rp962.724.435,00, setoran atas kekurangan laba yang dibagikan atas penyertaan modal Pemda tahun 2017 sebesar Rp210.849.531,00 dan piutang bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp250.000.000,00.
4. Perbedaan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum) - PERUMDA Tirta Pakuan antara LO dan LRA merupakan penyertaan modal Pemda pada BUMD sebesar Rp58.812.648.110,57 dan bagian laba yang dibagikan atas penyertaan modal Pemda pada BUMD tahun 2024 sebesar Rp25.588.369.000,00 serta terdapat koreksi kelebihan setor bagian laba sebesar Rp761,00.

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah - LO

Lain-lain PAD yang Sah - LO merupakan Pendapatan Asli Daerah selain Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang diterima Pemerintah Kota Bogor dengan realisasi TA 2024 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.16

Lain-lain PAD yang Sah - LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	**Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**	**1.365.249.800,00**	**2.069.346.709,00**	**(704.096.909,00)**	**(34,03)**
	Hasil Penjualan Tanah - LO	-	6.214.425,00	(6.214.425,00)	(100,00)
	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LO	40.529.200,00	-	40.529.200,00	100,00
	Hasil Penjualan Aset Lainnya - Aset Lain - Lain - Aset Rusak Berat / Usang - LO	1.324.720.600,00	2.063.132.284,00	(738.411.684,00)	(35,79)
2	**Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan**	**12.629.016,00**	**167.802.000,00**	**(155.172.984,00)**	**(92,47)**
	Hasil dari Bangun Guna Serah - LO	-	167.802.000,00	(167.802.000,00)	(100,00)
	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	12.629.016,00	-	12.629.016,00	100,00
3	**Hasil Kerja Sama Daerah**	**-**	**1.361.135.000,00**	**(1.361.135.000,00)**	(100,00)
	Hasil Kerja Sama Daerah -LO	-	1.361.135.000,00	(1.361.135.000,00)	(100,00)
4	**Jasa Giro**	**4.035.307.746,00**	**5.177.638.309,00**	**(1.142.330.563,00)**	**(22,06)**
	Jasa Giro pada Kas Daerah - LO	3.815.384.199,00	4.941.090.813,00	(1.125.706.614,00)	(22,78)
	Jasa Giro pada Kas di Bendahara - LO	202.022.634,00	236.543.185,00	(34.520.551,00)	(14,59)
	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS - LO	-	4.311,00	(4.311,00)	(100,00)
	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas-LO	17.900.913,00	-	17.900.913,00	100,00
5	**Pendapatan Bunga**	**7.768.345.613,00**	**6.994.811.761,14**	**773.533.851,86**	**11,06**
	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah - LO	7.768.345.613,00	6.994.811.761,14	773.533.851,86	11,06
6	**Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO**	**30.183.333,33**	**204.756.749,57**	**(174.573.416,24)**	**(85,26)**
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - LO	30.183.333,33	204.756.749,57	(174.573.416,24)	(85,26)
7	**Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain**	**397.410.826,00**	**454.743.324,00**	**(57.332.498,00)**	**(12,61)**
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO	397.410.826,00	454.743.324,00	(57.332.498,00)	(12,61)
8	**Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**	**627.473.886,00**	**474.650.538,00**	**152.823.348,00**	**32,20**
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	627.473.886,00	474.650.538,00	152.823.348,00	32,20
	Pendapatan Denda Pajak Daerah	**16.438.061.894,00**	**12.054.815.837,00**	**4.383.246.057,00**	**36,36**
9	**Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO**	**3.244.055.932,00**	**161.757.503,00**	**3.082.298.429,00**	**1.905,51**
	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO	3.140.153.308,00	125.352.086,00	3.014.801.222,00	2.405,07
	Pendapatan Denda Pajak Motel - LO	47.882.788,00	5.255.790,00	42.626.998,00	811,05
	Pendapatan Denda Pajak Losmen - LO	-	472.891,00	(472.891,00)	(100,00)
	Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata - LO	35.715.158,00	21.023.038,00	14.692.120,00	69,89
	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) - LO	20.304.678,00	9.653.698,00	10.650.980,00	110,33
10	**Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO**	**3.214.597.200,00**	**878.509.386,00**	**2.336.087.814,00**	**265,91**
	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya - LO	1.978.177.460,00	399.738.617,00	1.578.438.843,00	394,87
	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya - LO	789.017.894,00	334.328.582,00	454.689.312,00	136,00
	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya - LO	434.557.862,00	104.869.861,00	329.688.001,00	314,38
	Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya - LO	12.843.984,00	39.572.326,00	(26.728.342,00)	(67,54)
11	**Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO**	**2.187.996.389,00**	**17.252.599,00**	**2.170.743.790,00**	**12.582,13**
	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film - LO	22.721.538,00	82.228,00	22.639.310,00	27.532,36
	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana - LO	-	43.350,00	(43.350,00)	(100,00)
	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya - LO	20.277.030,00	3.822.645,00	16.454.385,00	430,45

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling - LO	7.076.228,00	932.402,00	6.143.826,00	658,92
	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan - LO	1.327.363.446,00	1.688.843,00	1.325.674.603,00	78.496,02
	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (*Fitness \Center*) - LO	810.558.147,00	10.683.131,00	799.875.016,00	7.487,27
12	**Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO**	**215.296.946,00**	**198.012.497,00**	**17.284.449,00**	**8,73**
	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron - LO	208.396.888,00	185.115.799,00	23.281.089,00	12,58
	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain - LO	3.273.058,00	7.057.198,00	(3.784.140,00)	(53,62)
	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat / Stiker - LO	34.500,00	34.500,00	-	-
	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan - LO	3.592.500,00	5.805.000,00	(2.212.500,00)	(38,11)
13	**Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO**	**153.087.508,00**	**357.390.225,00**	**(204.302.717,00)**	**(57,17)**
	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO	153.087.508,00	357.390.225,00	(204.302.717,00)	(57,17)
14	**Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO**	**5.183.848,00**	**4.171.272,00**	**1.012.576,00**	**24,27**
	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO	5.183.848,00	4.171.272,00	1.012.576,00	24,27
15	**Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) - LO**	**7.405.094.071,00**	**10.430.222.355,00**	**(3.025.128.284,00)**	**(29,00)**
	Pendapatan Denda PBBP2 - LO	7.405.094.071,00	10.430.222.355,00	(3.025.128.284,00)	(29,00)
16	**Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO**	**12.750.000,00**	**7.500.000,00**	**5.250.000,00**	**70,00**
	Pendapatan Denda BPHTB - Pemberian Hak Baru - LO	12.750.000,00	7.500.000,00	5.250.000,00	70,00
	Denda Retribusi Daerah	**112.865.276,00**	**136.899.297,00**	**(24.034.021,00)**	**(17,56)**
17	**Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum - LO**	**1.999.437,00**	**23.825.989,00**	**(21.826.552,00)**	**(91,61)**
	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	-	176.800,00	(176.800,00)	(100,00)
	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	1.748.337,00	2.717.049,00	(968.712,00)	(35,65)
	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	248.600,00	45.750,00	202.850,00	443,39
	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	-	20.025.600,00	(20.025.600,00)	(100,00)
	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO	-	29.730,00	(29.730,00)	(100,00)
	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	-	831.060,00	(831.060,00)	(100,00)
	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus - LO	2.500,00	-	2.500,00	100,00
18	**Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha**	**70.080.578,00**	**82.036.427,00**	**(11.955.849,00)**	**(14,57)**
	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	50.064.491,00	80.154.287,00	(30.089.796,00)	(37,54)
	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	20.016.087,00	1.857.140,00	18.158.947,00	977,79
	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan - LO	-	25.000,00	(25.000,00)	(100,00)
19	**Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu**	**40.785.261,00**	**31.036.881,00**	**9.748.380,00**	**31,41**
	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum - LO	-	637.500,00	(637.500,00)	(100,00)
	Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	40.785.261,00	30.399.381,00	10.385.880,00	34,16

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
20	**Pendapatan dari Pengembalian**	**3.836.302.493,00**	**3.926.504.331,00**	**(90.201.838,00)**	**(2,30)**
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS - LO	38.096.568,00	-	38.096.568,00	100,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO	20.508.895,00	65.745.380,00	(45.236.485,00)	(68,81)
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa - LO	-	246.789.583,00	(246.789.583,00)	(100,00)
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri-Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri - LO	1.051.981.009,00	-	1.051.981.009,00	100,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK - LO	20.767,00	37.490,00	(16.723,00)	(44,61)
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM - LO	62.301,00	112.474,00	(50.173,00)	(44,61)
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS - LO	1.355.880,00	-	1.355.880,00	100,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang - LO	575.358.160,00	-	575.358.160,00	100,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa - LO	-	1.279.500,00	(1.279.500,00)	(100,00)
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat - LO	3.379.500,00	-	3.379.500,00	100,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia - LO	137.823.000,00	264.420.611,00	(126.597.611,00)	(47,88)
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu - LO	9.500.000,00	22.025.000,00	(12.525.000,00)	100,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah - LO	-	473.174.610,00	(473.174.610,00)	(100,00)
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Alat Angkutan - LO	38.340.994,00	-	38.340.994,00	100,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Bangunan Gedung - LO	878.426.277,00	1.270.967.269,00	(392.540.992,00)	(30,89)
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan - LO	1.050.601.362,00	1.430.363.961,00	(379.762.599,00)	(26,55)
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air - LO	15.318.823,00	74.351.255,00	(59.032.432,00)	(79,40)
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS - LO	12.228.957,00	77.237.198,00	(65.008.241,00)	(84,17)
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas-LO	3.300.000,00	-	3.300.000,00	100,00
21	**Pendapatan dari BLUD:**	**813.022.806,00**	**359.976.497.147,87**	**(359.163.474.341,87)**	**(99,77)**
	Pendapatan dari BLUD - LO	-	359.976.497.147,87	(359.976.497.147,87)	(100,00)
	Pendapatan BLUD dari Hibah - LO	668.815.000,00	-	668.815.000,00	100,00
	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain - LO	122.290.221,00	-	122.290.221,00	100,00
	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah - LO	21.917.585,00	-	21.917.585,00	100,00

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
22	**Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**	**4.481.604,00**	**4.080.525,00**	**401.079,00**	**9,83**
	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD - LO	4.481.604,00	4.080.525,00	401.079,00	9,83
23	**Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah**	**3.101.860,00**	**3.500.000,00**	**(398.140,00)**	**(11,38)**
	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO	3.101.860,00	3.500.000,00	(398.140,00)	(11,38)
Jumlah		**35.444.436.153,33**	**393.007.181.528,58**	**(357.562.745.375,25)**	**(90,98)**

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 sebesar 35.444.436.153,33 mengalami penurunan sebesar Rp357.562.745.375,25 atau 90,98% dari Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 sebesar Rp393.007.181.528,58.

Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Bogor Per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.17

Lain-lain PAD yang Sah - LO per Perangkat Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	**DINAS KESEHATAN**				
	Denda Retribusi Daerah	-	176.800,00		
	Pendapatan dari BLUD - LO	813.022.806,00	-		
	Jumlah	**813.022.806,00**	**176.800,00**	**812.846.006,00**	**459.754,53**
2	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				
	Denda Retribusi Daerah	2.500,00	**29.730,00**		
	Jumlah	**2.500,00**	**29.730,00**	**(27.230,00)**	**(91,59)**
3	**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**				
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO	5.000,00	10.178,00		
	Denda Retribusi Daerah	45.463.975,00	35.971.300,00		
	Jumlah	**45.468.975,00**	**35.981.478,00**	**9.487.497,00**	**26,37**
4	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**				
	Denda Retribusi Daerah	1.748.337,00	2.717.049,00		
	Jumlah	**1.748.337,00**	**2.717.049,00**	**(968.712,00)**	**(35,65)**
5	**DINAS PERHUBUNGAN**				
	Denda Retribusi Daerah	-	20.663.100,00		
	Jumlah	**-**	**20.663.100,00**	**(20.663.100,00)**	**(100,00)**
6	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**				
	Kerja sama Daerah	-	1.361.135.000,00		
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	167.057.344,00	367.079.779,00		
	Denda Pajak Daerah	16.438.061.894,00	12.054.815.837,00		
	Jumlah	**16.605.119.238,00**	**13.783.030.616,00**	**2.822.088.622,00**	**20,48**
7	**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**				
	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.365.249.800,00	2.069.346.709,00	(704.096.909,00)	(0,34)
	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	12.629.016,00	167.802.000,00	(155.172.984,00)	(0,92)
	Jasa Giro	4.035.307.746,00	5.177.638.309,00	(1.142.330.563,00)	(0,22)
	Pendapatan Bunga	7.768.345.613,00	6.994.811.761,14	773.533.851,86	0,11
	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO	30.183.333,33	204.756.749,57	(174.573.416,24)	(0,85)
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	230.348.482,00	87.653.367,00	142.695.115,00	1,63
	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	627.473.886,00	474.650.538,00	152.823.348,00	0,32
	Denda Retribusi Daerah	17.786.906,00	44.228.737,00	(26.441.831,00)	(0,60)

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	Pendapatan dari Pengembalian	3.836.302.493,00	3.926.504.331,00	(90.201.838,00)	(0,02)
	Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	4.481.604,00	4.080.525,00	401.079,00	0,10
	Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	3.101.860,00	3.500.000,00	(398.140,00)	(0,11)
	Jumlah	**17.931.210.739,33**	**19.154.973.026,71**	**(1.223.762.287,38)**	(0,06)
8	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**				
	Denda Retribusi Daerah	47.863.558,00	33.087.581,00		
	Jumlah	**47.863.558,00**	**33.087.581,00**	**14.775.977,00**	**44,66**
9	**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**				
	Denda Retribusi Daerah	-	25.000,00		
	Jumlah	**-**	**25.000,00**	**(25.000,00)**	**(100,00)**
10	**RSUD, PUSKESMAS DAN LABKESDA**				
	Pendapatan dari BLUD	-	359.976.497.147,87		
	Jumlah	**-**	**359.976.497.147,87**	**(359.976.497.147,87)**	**(100,00)**
Jumlah Keseluruhan		**35.444.436.153,33**	**393.007.181.528,58**	**(357.562.745.375,25)**	**(90,98)**

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan transfer meliputi transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah pusat - lainnya dan transfer pemerintah provinsi.

Tabel 5.4.18
Pendapatan Transfer - LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :**				
	Dana Perimbangan LO	1.329.578.089.178,00	1.255.511.526.314,00	74.066.562.864,00	**5,90**
	Insentif Fiskal-LO	28.047.664.000,00	5.912.254.000,00	22.135.410.000,00	**374,40**
2	**Pendapatan Transfer Antar Daerah :**				
	Pendapatan Bagi Hasil	304.828.525.662,00	297.334.928.892,00	7.493.596.770,00	**2,52**
	Bantuan Keuangan	39.366.960.725,00	77.731.559.566,00	(38.364.598.841,00)	**(49,36)**
Jumlah		**1.701.821.239.565,00**	**1.636.490.268.772,00**	**65.330.970.793,00**	**3,99**

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Transfer-LO TA 2024 sebesar Rp1.701.821.239.565,00 mengalami peningkatan sebesar Rp65.330.970.793,00 atau 3,99% dari Pendapatan Transfer TA 2023 sebesar Rp1.636.490.268.772,00. Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut.

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

5.4.1.2.1.1 Transfer Pemerintah Pusat - LO (Dana Perimbangan)

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Pemerintah Kota Bogor untuk Periode TA 2024 dan TA 2023 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.19
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	97.824.228.000,00	113.574.543.000,00	(15.750.315.000,00)	(13,87)
2	Dana Alokasi Umum	858.600.617.000,00	792.904.391.521,00	65.696.225.479,00	8,29
3	DAK Fisik	44.829.645.150,00	55.796.999.805,00	(10.967.354.655,00)	(19,66)
4	DAK Non Fisik	328.323.599.028,00	293.235.591.988,00	35.088.007.040,00	11,97
Jumlah		**1.329.578.089.178,00**	**1.255.511.526.314,00**	74.066.562.864,00	5,90

Adapun perbandingan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO (Dana Perimbangan) antara LO dan LRA TA 2024 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.20
Perbandingan Nilai Pendapatan Transfer Pusat – LO (Dana Perimbangan) pada LO dan LRA TA 2024

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	97.824.228.000,00	114.423.344.000,00	(16.599.116.000,00)
2	Dana Alokasi Umum	858.600.617.000,00	853.803.503.264,00	4.797.113.736,00
3	DAK Fisik	44.829.645.150,00	44.829.645.150,00	-
4	DAK Non Fisik	328.323.599.028,00	328.323.599.028,00	-
Jumlah		**1.329.578.089.178,00**	**1.341.380.091.442,00**	**(11.802.002.264,00)**

Selisih/perbedaan Pendapatan Transfer Pusat – LO (Dana Perimbangan) antara LO dan LRA sebesar Rp11.802.002.264,00 terdiri atas:

1. Perbedaan Dana Bagi Hasil (DBH) antara LO dan LRA merupakan pembayaran Dana Transfer *Treasury Deposit facility* tahun 2024 sebesar Rp7.870.190.000,00 yang merupakan Dana Bagi Hasil yang disalurkan dari rekening *Treasury Deposit Facility* dan adanya penarikan dana *Treasury Deposit Facility* sebesar Rp24.469.306.000,00.
2. Perbedaan Dana Alokasi Umum antara LO dan LRA sebesarRp4.797.113.736,00 merupakan pembayaran bagian lancar utang jangka Panjang Lembaga keuangan bukan bank tahun 2023.

5.4.1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan kepada Kota Bogor untuk periode TA 2024 dan 2023, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.21
Dana Perimbangan - DBH Pajak TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	PBB	3.582.925.000,00	15.137.671.000,00	(11.554.746.000,00)	(76,33)
2	PPh Pasal 21	57.889.358.000,00	52.800.042.167,00	5.089.315.833,00	9,64
3	PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	7.908.567.000,00	9.631.760.833,00	(1.723.193.833,00)	(17,89)
4	Cukai Hasil Tembakau	7.956.105.000,00	7.826.434.000,00	129.671.000,00	1,66
Jumlah		**77.336.955.000,00**	**85.395.908.000,00**	(8.058.953.000,00)	(9,44)

5.4.1.2.1.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan kepada Kota Bogor untuk periode TA 2024 dan 2023, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.22
Dana Perimbangan - DBH Sumber Daya Alam TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Minyak Bumi	3.560.692.000,00	16.945.467.000,00	(13.384.775.000,00)	(78,99)
2	Gas Bumi	1.805.424.000,00	1.160.660.000,00	644.764.000,00	55,55
3	Pengusahaan Panas Bumi	11.540.845.000,00	6.868.605.000,00	4.672.240.000,00	68,02
4	A Mineral dan Batubara - Landrent	-	102.000,00	(102.000,00)	(100,00)
5	Mineral dan Batubara-*Royalty*	1.448.455.000,00	781.299.000,00	667.156.000,00	85,39
6	Kehutanan - PSDH	1.034.702.000,00	1.056.684.000,00	(21.982.000,00)	(2,08)
7	Perikanan	1.097.155.000,00	1.365.818.000,00	(268.663.000,00)	(19,67)
Jumlah		**20.487.273.000,00**	**28.178.635.000,00**	**(7.691.362.000,00)**	**(27,30)**

5.4.1.2.1.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan kepada Kota Bogor untuk periode TA 2024 dan 2023, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.23
Dana Alokasi Umum TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dana Alokasi Umum	746.216.401.000,00	792.904.391.521,00	(46.687.990.521,00)	(5,89)
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan LO	13.600.000.000,00	-	13.600.000.000,00	100,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - LO	36.138.888.000,00	-	36.138.888.000,00	100,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	31.725.202.000,00	-	31.725.202.000,00	100,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	17.761.219.000,00	-	17.761.219.000,00	100,00
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum-LO	13.158.907.000,00	-	13.158.907.000,00	100,00
Jumlah		**858.600.617.000,00**	**792.904.391.521,00**	65.696.225.479,00	8,29

5.4.1.2.1.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat – DAK kepada Kota Bogor untuk periode TA 2024 dan TA 2023, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.24
Dana Alokasi Khusus TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	44.829.645.150,00	55.796.999.805,00	(10.967.354.655,00)	(19,66)
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	328.323.599.028,00	293.235.591.988,00	35.088.007.040,00	11,97
Jumlah		**373.153.244.178,00**	**349.032.591.793,00**	24.120.652.385,00	6,91

Rincian Dana Alokasi Khusus pada masing-masing bidang kegiatan dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.25
Dana Alokasi Khusus per Bidang Kegiatan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	**DAK FISIK**	**44.829.645.150,00**	**55.796.999.805,00**	**(10.967.354.655,00)**	(19,66)
	DAK FISIK REGULER :				
	- Pendidikan - PAUD	204.102.129,00	-	204.102.129,00	100,00
	- Pendidikan - SD	1.977.458.787,00	1.012.349.920,00	965.108.867,00	95,33
	- Pendidikan - SKB	-	591.507.340,00	(591.507.340,00)	(100,00)
	- Kesehatan & KB: KB	77.707.500,00	74.265.000,00	3.442.500,00	4,64
	- Kesehatan & KB: Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	-	36.341.295.245,00	(36.341.295.245,00)	(100,00)
	- Kesehatan & KB: Penguatan Sistem Kesehatan	33.035.596.734,00	-	33.035.596.734,00	100,00
	- Sanitasi	9.534.780.000,00	10.439.380.000,00	(904.600.000,00)	(8,67)
Jumlah		**44.829.645.150,00**	**48.458.797.505,00**	**(3.629.152.355,00)**	**(7,49)**

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	DAK PENUGASAN				
	- Penugasan - Penguatan Intervensi Stunting	-	5.570.202.300,00	(5.570.202.300,00)	(100,00)
	- Penugasan - Kes & KB : Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	-	1.768.000.000,00	(1.768.000.000,00)	(100,00)
Jumlah		**-**	**7.338.202.300,00**	(7.338.202.300,00)	**(100,00)**
2	**DAK NON FISIK**	**328.323.599.028,00**	**293.235.591.988,00**	**35.088.007.040,00**	**11,97**
	- BOS Regular	152.805.914.824,00	143.271.043.020,00	9.534.871.804,00	6,66
	- BOS Kinerja	-	1.882.500.000,00	(1.882.500.000,00)	(100,00)
	- TPG PNSD	103.382.644.000,00	104.353.815.000,00	(971.171.000,00)	(0,93)
	- Tamsil Guru PNSD	3.816.547.000,00	666.642.000,00	3.149.905.000,00	100,00
	- BOP PAUD	9.076.914.900,00	8.522.091.000,00	554.823.900,00	6,51
	- BOP Pendidikan Kesetaraan	-	12.689.369.200,00	(12.689.369.200,00)	(100,00)
	- BOKKB BOK	8.036.889.807,00	5.042.916.209,00	2.993.973.598,00	59,37
	- Akreditasi Puskesmas	-	11.406.964.000,00	(11.406.964.000,00)	100,00
	- Fasilitasi Penanaman Modal	354.633.800,00	269.023.600,00	85.610.200,00	31,82
	- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	-	406.000.000,00	100,00
	- BOKKB BOKB	-	4.715.903.419,00	(4.715.903.419,00)	(100,00)
	- PK2UKM	-	415.324.540,00	(415.324.540,00)	(100,00)
	- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	520.000.000,00	-	520.000.000,00	100,00
	- Dana BOSP-BOS Kinerja-LO	2.335.000.000,00			100,00
	- Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	90.000.000,00	-	90.000.000,00	100,00
	- Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler-LO	15.616.122.000,00	-	15.616.122.000,00	100,00
	- Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja-LO	180.000.000,00	-	180.000.000,00	100,00
	- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO	15.174.498.103,00	-	15.174.498.103,00	100,00
	- Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	16.528.434.594,00	-	16.528.434.594,00	100,00
Jumlah		**328.323.599.028,00**	**293.235.591.988,00**	**35.088.007.040,00**	**11,97**
Total		**373.153.244.178,00**	**349.032.591.793,00**	**24.120.652.385,00**	**6,91**

5.4.1.2.1.2 Insentif Fiskal

Insentif Fiskal adalah dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang dicapai. Insentif ini diberikan berdasarkan kriteria tertentu, seperti: Pengelolaan keuangan daerah, Pelayanan umum pemerintahan, Pelayanan dasar, Dukungan terhadap kebijakan nasional. Berikut rincian Dana Insentif Daerah dan Insentif Fiskal.

Tabel 5.4.26

Insentif Fiskal TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Insentif Fiskal-LO	28.047.664.000,00	5.912.254.000,00	22.135.410.000,00	374,40
Jumlah		**28.047.664.000,00**	**5.912.254.000,00**	22.135.410.000,00	374,40

Adapun perbandingan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO (Insentif Fiskal) antara LO dan LRA TA 2024 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.27
Perbandingan Nilai Pendapatan Transfer Pusat - LO (Dana Insentif Daerah)
pada LO dan LRA TA 2024

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
1	Insentif Fiskal-LO	28.047.664.000,00	28.047.664.000,00	-
Jumlah		**28.047.664.000,00**	**28.047.664.000,00**	**-**

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Penerimaan Transfer Antar Daerah merupakan transfer Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dialokasikan pada Pemerintah Kota Bogor untuk dikelola oleh pemerintah daerah, dalam rangka penyelengaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Meliputi Pendapatan Bagi Hasil - LO dan Bantuan Keuangan dan Bantuan Keuangan – LO.

5.4.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil - LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah – Pendapatan Bagi Hasil Pemerintah Kota Bogor untuk Periode TA 2024 dan TA 2023 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.28
Pendapatan Bagi Hasil-LO TA. 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Bagi Hasil - LO	304.828.525.662,00	297.334.928.892,00	7.493.596.770,00	2,52
Jumlah		**304.828.525.662,00**	**297.334.928.892,00**	7.493.596.770,00	2,52

Rincian Pendapatan bagi hasil dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.29
Rincian Pendapatan Bagi Hasil-LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LO	108.974.953.470,00	103.840.048.665,00	5.134.904.805,00	4,95
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	68.503.297.560,00	68.251.281.510,00	252.016.050,00	0,37
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	66.022.909.185,00	66.691.547.125,00	(668.637.940,00)	(1,00)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan - LO	211.792.750,00	221.442.600,00	(9.649.850,00)	(4,36)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LO	61.115.572.697,00	58.330.608.992,00	2.784.963.705,00	4,77
Jumlah		**304.828.525.662,00**	**297.334.928.892,00**	**7.493.596.770,00**	**2,52**

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Bagi Hasil - LO TA 2024 sebesar Rp304.828.525.662,00 mengalami peningkatan sebesar Rp7.493.596.770,00 atau 2,52% dari Pendapatan Bagi Hasil – LO TA 2023 sebesar Rp297.334.928.892,00.

Adapun perbandingan nilai Pendapatan Bagi Hasil - LO antara LO dan LRA TA 2024 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.30
Perbandingan Nilai Pendapatan Bagi Hasil-LO
Pada LO dan LRA Tahun 2024

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LO	108.974.953.470,00	107.078.086.620,00	1.896.866.850,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	68.503.297.560,00	66.162.370.710,00	2.340.926.850,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	66.022.909.185,00	70.084.028.487,00	(4.061.119.302,00)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan - LO	211.792.750,00	219.606.800,00	(7.814.050,00)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LO	61.115.572.697,00	59.532.701.014,00	1.582.871.683,00
Jumlah		**304.828.525.662,00**	**303.076.793.631,00**	**1.751.732.031,00**

Selisih/perbedaan Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO (Pendapatan Bagi Hasil-LO) antara LO dan LRA sebesar Rp1.751.732.031,00 terdiri atas:

1. Perbedaan pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor (PKB) antara LO dan LRA merupakan piutang transfer antar daerah tahun 2023 yang telah dibayarkan kepada RKUD Kota Bogor sebesar Rp3.277.418.190,00 sesuai dengan sesuai Keputusan Gubernur No 973/Kep.116-Bapenda/2024 tgl 05 April 2024 dan adanya piutang transfer antar daerah sebesar Rp5.174.285.040,00 sesuai Keputusan Gubernur No. 973/Kep.139-Bapenda/2025.
2. Perbedaan pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor (BBN KB) antara LO dan LRA merupakan piutang transfer antar daerah tahun 2023 yang telah dibayarkan kepada RKUD Kota Bogor sebesar Rp2.325.876.900,00 sesuai Keputusan Gubernur No 973/Kep.116-Bapenda/2024 tgl 05 April 2024 dan adanya piutang transfer antar daerah sebesar Rp4.666.803.750,00 sesuai Keputusan Gubernur No. 973/Kep.139-Bapenda/2025.
3. Perbedaan pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB KB) antara LO dan LRA merupakan piutang transfer antar daerah tahun 2023 yang telah dibayarkan kepada RKUD Kota Bogor sebesar Rp5.356.324.047,00 sesuai Keputusan Gubernur No 973/Kep.116-Bapenda/2024 tgl 05 April 2024 dan adanya piutang transfer antar daerah sebesar Rp1.295.204.745,00 sesuai Keputusan Gubernur No. 973/Kep.139-Bapenda/2025.
4. Perbedaan pendapatan bagi hasil pajak air permukaan antara LO dan LRA merupakan piutang transfer antar daerah tahun 2023 yang telah dibayarkan kepada RKUD Kota Bogor sebesar Rp22.383.950,00 sesuai Keputusan Gubernur No 973/Kep.116-Bapenda/2024 tgl 05 April 2024 dan adanya piutang transfer antar daerah sebesar Rp14.569.900,00 sesuai Keputusan Gubernur No. 973/Kep.139-Bapenda/2025.
5. Perbedaan pendapatan bagi hasil pajak rokok antara LO dan LRA merupakan piutang transfer antar daerah sebesar Rp1.582.871.683,00 sesuai Keputusan Gubernur No. 973/Kep.139-Bapenda/2025

5.4.1.2.2.2 Bantuan Keuangan - LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah – Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Bogor untuk Periode TA 2024 dan TA 2023 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.31
Bantuan Keuangan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Bantuan Keuangan - LO	39.366.960.725,00	77.731.559.566,00	(38.364.598.841,00)	(49,36)
Jumlah		**39.366.960.725,00**	**77.731.559.566,00**	(38.364.598.841,00)	(49,36)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Bantuan Keuangan-LO TA 2024 sebesar Rp39.366.960.725,00 mengalami penurunan sebesar Rp38.364.598.841,00 atau 49,36% dari Bantuan Keuangan – LO TA 2023 sebesar Rp77.731.559.566,00.

Adapun perbandingan nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO (Bantuan Keuangan) antara LO dan LRA TA 2024 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.32
Perbandingan Nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO (Bantuan Keuangan - LO)
Pada LO dan LRA Tahun 2024

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	39.366.960.725,00	39.373.626.725,00	(6.666.000,00)
Jumlah		**39.366.960.725,00**	**39.373.626.725,00**	**(6.666.000,00)**

Selisih/perbedaan Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO (Bantuan Keuangan) antara LO dan LRA sebesar Rp6.666.000,00 merupakan utang transfer bantuan keuangan dari Provinsi DKI Jakarta.

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Penerimaan Pendapatan Hibah – LO Pemerintah Kota Bogor untuk periode TA 2024 dan 2023, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.4.33
Pendapatan Hibah - LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Hibah	42.961.879.333,77	66.574.926.398,81	(23.613.047.065,04)	(35,47)
Jumlah		**42.961.879.333,77**	**66.574.926.398,81**	(23.613.047.065,04)	(35,47)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Hibah - LO TA 2024 sebesar Rp42.961.879.333,77 mengalami penurunan sebesar Rp23.613.047.065,04 atau 35,47% dari Bantuan Keuangan – LO TA 2023 sebesar Rp66.574.926.398,81.

Rincian Pendapatan Hibah – LO dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.34
Rincian Pendapatan Hibah - LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	41.235.040.882,17	42.485.384.426,31	(1.250.343.544,14)	(2,94)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	154.925.460,00	-	154.925.460,00	100,00
3	Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Dalam Negeri	303.172.991,60	842.831.252,00	(539.658.260,40)	(64,03)
4	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	1.268.740.000,00	23.246.710.720,50	(21.977.970.720,50)	(94,54)
Jumlah		**42.961.879.333,77**	**66.574.926.398,81**	(23.613.047.065,04)	(35,47)

Pendapatan Hibah - LO sebesar Rp42.961.879.333,77 per Perangkat Daerah terdiri atas:

Tabel 5.4.35

Rincian Pendapatan Hibah - LO TA 2024 Per Perangkat Daerah

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	**Dinas Pendidikan**				
	Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Dalam Negeri	208.715.916,00	-		
	Jumlah	**208.715.916,00**	**-**	**208.715.916,00**	**100,00**
2	**Dinas Kesehatan**				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	31.268.494.837,18	27.974.858.462,31		
	Jumlah	**31.268.494.837,18**	**27.974.858.462,31**	**3.293.636.374,87**	**11,77**
3	**Rumah Sakit Umum Daerah**				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	8.162.788,99	**68.980.340,00**		
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	10.143.460,00	**250.600.852,00**		
	Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Dalam Negeri	79.485.075,60	**2.318.166.175,00**		
	Jumlah	**97.791.324,59**	**2.637.747.367,00**	**(2.539.956.042,41)**	**(96,29)**
4	**Dinas Perumahan dan Permukiman**				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	-	9.669.945.302,00		
	Jumlah	**-**	**9.669.945.302,00**	**(9.669.945.302,00)**	**(100,00)**
5	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	144.782.000,00	-		
	Jumlah	**144.782.000,00**	**-**	**144.782.000,00**	**100,00**
6	**Dinas Lingkungan Hidup**				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	715.068.000,00		
	Jumlah	**-**	**715.068.000,00**	**(715.068.000,00)**	**(100,00)**
7	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.298.728.523,00	1.242.204.000,00		
	Jumlah	**1.298.728.523,00**	**1.242.204.000,00**	**56.524.523,00**	**4,55**
8	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	434.994.894,00	494.872.386,00		
	Jumlah	**434.994.894,00**	**494.872.386,00**	**(59.877.492,00)**	**(12,10)**
9	**Dinas Perhubungan**				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	6.490.000.000,00		
	Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Dalam Negeri	-	4.641.650.076,00		
	Jumlah	**-**	**11.131.650.076,00**	**(11.131.650.076,00)**	**(100,00)**
10	**Dnas Arsip dan Perpustakaan**				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	175.500.000,00		
	Pendapatan Hibah dari Lembaga / Organisasi Swasta Dalam Negeri	-	1.312.574.167,50		
	Jumlah	**-**	**1.488.074.167,50**	**(1.488.074.167,50)**	**(100,00)**
11	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	4.702.371.323,00			
	Jumlah	**4.702.371.323,00**	**-**	**4.702.371.323,00**	**100,00**

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
12	**Badan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)**				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.522.288.516,00	5.323.901.238,00		
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	-	592.230.400,00		
	Pendapatan Hibah dari Lembaga / Organisasi Swasta Dalam Negeri	1.268.740.000,00	5.304.375.000,00		
	Jumlah	**4.791.028.516,00**	**11.220.506.638,00**	**(6.429.478.122,00)**	**(57,30)**
13	**Badan Pendapatan Daerah**				
	Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Dalam Negeri	14.972.000,00			
	Jumlah	**14.972.000,00**	**-**	**14.972.000,00**	**100,00**
	TOTAL	**42.961.879.333,77**	**66.574.926.398,81**	**(23.613.047.065,04)**	**(35,47)**

5.4.2 Beban Daerah

5.4.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi merupakan belanja atau beban yang telah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan yang digunakan untuk menunjang operasional kegiatan Pemerintah Kota Bogor, dengan realisasi pada TA 2024 dan 2023 pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.4.37

Beban Operasi TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Pegawai	1.242.262.790.024,00	1.063.356.108.648,00	178.906.681.376,00	16,82
2	Beban Persediaan	361.655.139.056,65	271.413.541.867,89	90.241.597.188,76	33,25
3	Beban Jasa	763.459.300.802,48	759.836.121.957,66	3.623.178.844,82	0,48
4	Beban Pemeliharaan	146.011.452.259,00	161.408.670.532,86	(15.397.218.273,86)	(9,54)
5	Beban Perjalanan Dinas	94.617.582.922,00	86.703.519.468,00	7.914.063.454,00	9,13
6	Beban Bunga	7.571.414.651,00	6.191.682.700,00	1.379.731.951,00	22,28
7	Beban Hibah	176.519.335.387,00	147.381.004.434,00	29.138.330.953,00	19,77
8	Beban Bantuan Sosial	43.580.019.500,00	54.438.915.000,00	(10.858.895.500,00)	(19,95)
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	373.846.048.605,39	373.280.306.704,50	565.741.900,89	0,15
10	Beban Penyisihan Piutang	62.607.181.457,02	47.569.042.893,21	15.038.138.563,81	31,61
11	Beban Lain-Lain	23.335.696.382,00	5.818.267.540,00	17.517.428.842,00	301,08
Jumlah		3.295.465.961.046,54	2.977.397.181.746,12	318.068.779.300,42	10,68

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan Beban Operasi TA 2024 sebesar Rp3.295.465.961.046,54 mengalami peningkatan sebesar Rp318.068.779.300,42 atau 10,68% jika dibandingkan dari Belanja Operasi TA 2023 sebesar Rp2.979.057.931.764,12.

Berikut penjelasan rincian masing masing Beban Operasi.

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban Pemerintah Kota Bogor dalam pengeluaran yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Kota Bogor yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban pegawai Kota Bogor TA 2024 sebesar Rp 1.242.262.790.024,00 mengalami peningkatan sebesar Rp178.906.681.376,00 atau 16,82% dari TA 2023 sebesar Rp1.063.356.108.648,00. Berikut beban pegawai disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.4.38

Beban Pegawai TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	572.966.490.524,00	483.142.741.393,00	89.823.749.131,00	18,59
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	393.260.379.090,00	314.944.193.159,00	78.316.185.931,00	24,87
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	148.688.467.311,00	145.108.326.637,00	3.580.140.674,00	2,47
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	47.141.457.844,00	47.497.252.680,00	(355.794.836,00)	(0,75)
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	64.134.616,00	179.275.989,00	(115.141.373,00)	(64,23)
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.329.008.000,00	2.018.520.000,00	310.488.000,00	15,38
7.	Beban Pegawai BLUD	77.812.852.639,00	70.465.798.790,00	7.347.053.849,00	10,43
Jumlah		1.242.262.790.024,00	1.063.356.108.648,00	178.906.681.376,00	16,82

Adapun perbandingan nilai Beban Pegawai antara LO dan LRA TA 2024 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.39

Perbandingan Nilai Beban Pegawai pada LO dan LRA Tahun 2024

No	Uraian	LO	LRA	Selisih/Perbedaan
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	572.966.490.524,00	572.966.490.524,00	0,00
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	393.260.379.090,00	393.170.766.177,00	89.612.913,00
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	148.688.467.311,00	148.571.534.471,00	116.932.840,00
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	47.141.457.844,00	47.141.457.844,00	0,00
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	64.134.616,00	64.134.616,00	0,00
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.329.008.000,00	2.329.008.000,00	0,00
7.	Beban Pegawai BLUD	77.812.852.639,00	78.710.603.275,00	(897.750.636,00)
Jumlah		1.242.262.790.024,00	1.242.953.994.907,00	(691.204.883,00)

Selisih/perbedaan Beban Pegawai antara LO dan LRA sebesar 691.204.883,00 merupakan Utang belanja pegawai BLUD pada Puskesmas dan pembayaran utang belanja pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) – BLUD yang timbul pada periode TA 2024.

5.4.2.1.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah beban pemakaian persediaan atau konsumsi persediaan barang tertentu untuk menunjang operasional kegiatan Pemerintah Kota Bogor, pada TA 2024 terdapat Beban Persediaan sebesar Rp361.655.139.056,65. Jika dibandingkan dengan beban persediaan TA 2023 sebesar Rp271.413.541.867,89 maka mengalami peningkatan sebesar Rp90.241.597.188,76 atau 33,25%.

Berikut beban persediaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.40

Beban Persediaan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
	BEBAN PERSEDIAAN				
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	26.019.025.651,60	18.770.338.661,29	7.248.686.990,31	38,62
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	4.214.346.014,11	5.500.631.693,44	(1.286.285.679,33)	(23,38)
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	23.480.239.414,00	26.737.452.418,50	(3.257.213.004,50)	(12,18)
4	Beban Bahan-Bahan Baku	36.376.006,00	91.761.284,00	(55.385.278,00)	(60,36)
5	Beban Bahan-Bahan / Bibit Tanaman	1.613.783.572,00	1.236.734.810,00	377.048.762,00	30,49
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	115.183.899,00	92.227.790,00	22.956.109,00	24,89
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	140.423.631,00	163.253.900,00	(22.830.269,00)	(13,98)
8	Beban Bahan-Bahan / Bibit Ternak / Bibit Ikan	84.456.100,00	62.469.200,00	21.986.900,00	35,20
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	12.271.520.628,09	12.884.228.035,59	(612.707.407,50)	(4,76)
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	6.088.531.212,00	6.043.415.145,00	45.116.067,00	0,75
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	1.005.456.300,00	397.781.820,00	607.674.480,00	152,77
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	3.270.422.569,00	1.656.324.502,00	1.614.098.067,00	97,45
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	213.277.720,00	14.417.000,00	198.860.720,00	1.379,35
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	469.134.002,00	399.877.780,00	69.256.222,00	17,32
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	4.935.500,00	42.715.380,00	(37.779.880,00)	(88,45)

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
16	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	110.013.207,00	176.297.666,00	(66.284.459,00)	(37,60)
17	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.622.384.472,55	32.189.137.736,22	(9.566.753.263,67)	(29,72)
18	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	5.478.611.089,30	4.513.859.881,71	964.751.207,59	21,37
19	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.530.743.055,00	885.987.028,00	644.756.027,00	72,77
20	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	181.379.040,00	100.072.800,00	81.306.240,00	81,25
21	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen / Administrasi Tender	-	600.000,00	(600.000,00)	(100,00)
22	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.384.340.891,00	7.767.891.032,50	(383.550.141,50)	(4,94)
23	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.390.899.411,88	7.911.554.622,34	(1.520.655.210,46)	(19,22)
24	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.734.035.408,47	10.827.202.823,46	1.906.832.585,01	17,61
25	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.508.598.290,00	1.465.764.676,00	2.042.833.614,00	139,37
26	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	1.721.910.966,00	1.092.315.416,00	629.595.550,00	57,64
27	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir / Cendera Mata	1.657.432.852,00	1.949.891.864,00	(292.459.012,00)	(15,00)
28	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.989.915.503,10	6.089.268.530,54	(2.099.353.027,44)	(34,48)
29	Beban Obat-Obatan-Obat	54.812.443.046,51	72.635.309.397,40	(17.822.866.350,89)	(24,54)
30	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	58.108.454.272,72	28.021.309.006,80	30.087.145.265,92	107,37
31	Beban Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	81.468.616.560,84	18.564.604.043,10	62.904.012.517,74	338,84
32	Beban Natura dan Pakan-Natura	7.279.299.394,48	2.373.404.744,00	4.905.894.650,48	206,70
33	Beban Natura dan Pakan-Pakan	180.019.250,00	82.388.780,00	97.630.470,00	118,50
34	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	4.218.000,00	25.868.700,00	(21.650.700,00)	(83,69)
35	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	11.878.624,00	4.119.000,00	7.759.624,00	188,39
36	Beban Komponen-Komponen Peralatan	358.487.170,00	313.423.780,00	45.063.390,00	14,38
37	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	13.085.459.723,00	104.839.500,00	12.980.620.223,00	12.381,42
38	Beban Komponen - Komponen Lainnya	2.356.610,00	-	2.356.610,00	100,00
39	Beban Pipa-Pipa Beton Pratekan	-	199.047.420,00	(199.047.420,00)	(100,00)
40	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	-	25.754.000,00	(25.754.000,00)	(100,00)
41	Beban Pipa-Pipa Lainnya	6.530.000,00	-	6.530.000,00	100,00
Jumlah		**361.655.139.056,65**	**271.413.541.867,89**	**90.241.597.188,76**	**33,25**

Adapun perbandingan nilai Beban Persediaan antara LO dan LRA TA 2024 yang disajikan pada tabel berikut .

Tabel 5.4.41
Perbandingan Nilai Beban Persediaan pada LO dan LRA Tahun 2024

No	Uraian	LO	LRA	Selisih/Perbedaan
	BEBAN PERSEDIAAN			
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	26.019.025.651,60	25.026.384.824,00	992.640.827,60
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	4.214.346.014,11	857.616.794,00	3.356.729.220,11
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	23.480.239.414,00	23.211.237.995,00	269.001.419,00
4	Beban Bahan-Bahan Baku	36.376.006,00	17.238.400,00	19.137.606,00
5	Beban Bahan-Bahan / Bibit Tanaman	1.613.783.572,00	1.485.632.693,00	128.150.879,00

No	Uraian	LO	LRA	Selisih/Perbedaan
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	115.183.899,00	78.261.580,00	36.922.319,00
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	140.423.631,00	91.385.800,00	49.037.831,00
8	Beban Bahan-Bahan / Bibit Ternak / Bibit Ikan	84.456.100,00	84.456.100,00	0,00
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	12.271.520.628,09	23.790.997,00	12.247.729.631,09
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	6.088.531.212,00	6.934.596.162,00	(846.064.950,00)
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	1.005.456.300,00	1.007.446.900,00	(1.990.600,00)
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	3.270.422.569,00	63.901.500,00	3.206.521.069,00
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	213.277.720,00	157.444.500,00	55.833.220,00
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	469.134.002,00	492.945.500,00	(23.811.498,00)
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	4.935.500,00	4.935.500,00	-
16	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	110.013.207,00	85.962.285,00	24.050.922,00
17	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.622.384.472,55	11.743.323.305,00	10.879.061.167,55
18	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	5.478.611.089,30	2.483.294.736,00	2.995.316.353,30
19	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.530.743.055,00	301.562.500,00	1.229.180.555,00
20	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	181.379.040,00	130.859.500,00	50.519.540,00
21	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.384.340.891,00	5.047.890.088,00	2.336.450.803,00
22	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.390.899.411,88	3.648.005.970,00	2.742.893.441,88
23	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.734.035.408,47	12.507.618.756,00	226.416.652,47
24	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.508.598.290,00	3.770.180.910,00	(261.582.620,00)
25	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	1.721.910.966,00	666.319.525,00	1.055.591.441,00
26	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir / Cendera Mata	1.657.432.852,00	1.483.594.450,00	173.838.402,00
27	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.989.915.503,10	2.168.920.605,00	1.820.994.898,10
28	Beban Obat-Obatan-Obat	54.812.443.046,51	9.296.454.388,00	45.515.988.658,51
29	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	58.108.454.272,72	6.511.845.076,00	51.596.609.196,72
30	Beban Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	81.468.616.560,84	64.223.539.412,00	17.245.077.148,84
31	Beban Natura dan Pakan-Natura	7.279.299.394,48	9.053.422.401,00	(1.774.123.006,52)
32	Beban Natura dan Pakan-Pakan	180.019.250,00	180.019.250,00	-
33	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	4.218.000,00	-	4.218.000,00
34	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	11.878.624,00	11.878.624,00	-
35	Beban Komponen-Komponen Peralatan	358.487.170,00	367.599.650,00	(9.112.480,00)
36	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	13.085.459.723,00	13.085.459.723,00	-
37	Beban Komponen - Komponen Lainnya	2.356.610,00	-	2.356.610,00
38	Beban Pipa-Pipa Lainnya	6.530.000,00	6.530.000,00	-
Jumlah		**361.655.139.056,65**	**206.311.556.399,00**	**155.343.582.657,65**

Selisih/perbedaan Beban Persediaan antara LO dan LRA sebesar Rp132.921.359.140,89 terdiri atas:

1. Anggaran yang bersumber dari beban barang jasa BLUD yang di rinci ke dalam rekening sub rincian objek beban persediaan.
2. Anggaran yang bersumber dari barang jasa BOS yang di rinci ke dalam rekening sub rincian objek beban persediaan.
3. Persediaan yang bersumber dari hibah pemerintah provinsi/pusat serta lembaga/organisasi.
4. Persedian yang berasal dari belanja modal yang tidak menjadi aset.
5. Reklasifikasi beban pemeliharaan ke beban persediaan

5.4.2.1.3 Beban Jasa

Beban Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Pada TA 2024 terdapat beban jasa sebesar Rp763.459.300.802,48 jika dibandingkan dengan beban jasa TA 2023 sebesar Rp759.836.121.957,66 maka mengalami peningkatan sebesar Rp3.623.178.844,82 atau 0,48% disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.42
Beban Jasa TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Makanan dan Minuman	53.682.898.848,00	47.594.985.799,50	6.087.913.048,50	12,79
2	Beban Pakaian Dinas	3.198.398.489,00	4.676.958.980,00	(1.478.560.491,00)	(31,61)
3	Beban Jasa Kantor	478.503.096.959,61	486.021.557.333,48	(7.518.460.373,87)	(1,55)
4	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	96.645.980.490,38	82.034.205.025,17	14.611.775.465,21	17,81
5	Beban Sewa Tanah	356.097.800,00	393.016.000,00	(36.918.200,00)	(9,39)
6	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	6.296.625.379,00	4.092.784.959,00	2.203.840.420,00	53,85
7	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.842.682.109,49	2.534.000.286,51	308.681.822,98	12,18
8	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	171.295.200,00	147.548.420,00	23.746.780,00	16,09
9	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	-	1.874.810.704,00	(1.874.810.704,00)	(100,00)
10	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	23.959.911.450,00	17.977.521.985,00	5.982.389.465,00	33,28
11	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	9.532.646.909,00	16.116.180.091,00	(6.583.533.182,00)	(40,85)
12	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)	39.415.058.975,00	34.398.858.387,00	5.016.200.588,00	14,58
13	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	215.000.000,00	802.623.872,00	(587.623.872,00)	(73,21)
14	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.024.814.164,00	4.367.139.829,00	(2.342.325.665,00)	(53,64)
15	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	34.959.181.016,00	24.871.786.923,00	10.087.394.093,00	40,56
16	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/pihak Lain/Masyarakat	11.655.613.013,00	31.932.143.363,00	(20.276.530.350,00)	(63,50)
Jumlah		**763.459.300.802,48**	**759.836.121.957,66**	**3.623.178.844,82**	**0,48**

Adapun perbandingan nilai Beban Jasa antara LO dan LRA TA 2024 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.43
Perbandingan Nilai Beban Jasa pada LO dan LRA Tahun 2024

No	Uraian	LO	LRA	Selisih/Perbedaan
1	Beban Makanan dan Minuman	53.682.898.848,00	28.269.376.913,00	25.413.521.935,00
2	Beban Pakaian Dinas	3.198.398.489,00	3.034.091.993,00	164.306.496,00
3	Beban Jasa Kantor	478.503.096.959,61	414.617.730.955,00	63.885.366.004,61

No	Uraian	LO	LRA	Selisih/Perbedaan
4	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	96.645.980.490,38	90.619.751.117,00	6.026.229.373,38
5	Beban Sewa Tanah	356.097.800,00	245.547.800,00	110.550.000,00
6	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	6.296.625.379,00	5.597.071.769,00	699.553.610,00
7	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.842.682.109,49	2.427.195.544,00	415.486.565,49
8	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	171.295.200,00	171.295.200,00	-
9	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	-	-	-
10	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	23.959.911.450,00	25.709.456.398,00	(1.749.544.948,00)
11	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	9.532.646.909,00	9.960.307.309,00	(427.660.400,00)
12	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)	39.415.058.975,00	-	39.415.058.975,00
13	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	215.000.000,00	215.000.000,00	-
14	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.024.814.164,00	1.345.448.000,00	679.366.164,00
15	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	34.959.181.016,00	34.615.846.401,00	343.334.615,00
16	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.655.613.013,00	11.654.127.314,00	1.485.699,00
Jumlah		**763.459.300.802,48**	**628.482.246.713,00**	**134.977.054.089,48**

Selisih/perbedaan Beban Jasa antara LO dan LRA sebesar Rp134.977.054.089,48 terdiri atas:

1. Anggaran yang bersumber dari beban barang jasa BLUD yang di rinci ke dalam rekening sub rincian objek beban jasa.
2. Anggaran yang bersumber barang jasa BOS yang di rinci ke dalam rekening sub rincian objek beban jasa.
3. Utang jasa kantor tahun 2024.
4. Beban barang jasa yang menjadi beban dibayar dimuka.

5.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan untuk menjaga aset tetap agar terjaga nilai ekonominya. Pada TA 2024 terdapat beban pemeliharaan sebesar Rp146.011.452.259,00 jika dibandingkan dengan beban pemeliharaan TA 2023 sebesar Rp161.788.901.032,86 maka mengalami penurunan sebesar Rp15.777.448.773,86 atau 9,75% disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.44

Beban Pemeilharaan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Pemeliharaan Tanah	100.835.984,00	64.843.330,00	35.992.654,00	55,51
2.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.491.055.567,00	27.858.646.050,00	632.409.517,00	2,27
3.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	51.731.467.969,00	58.891.444.492,86	(7.159.976.523,86)	(12,16)
4.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.296.933.439,00	74.575.576.660,00	(9.278.643.221,00)	(12,44)
5.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.928.800,00	18.160.000,00	(7.231.200,00)	(39,82)
6.	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	380.230.500,00	380.230.500,00	-	-
Jumlah		**146.011.452.259,00**	**161.788.901.032,86**	**(15.777.448.773,86)**	**(9,75)**

Adapun perbandingan nilai Beban Pemeliharaan antara LO dan LRA TA 2024 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.45

Perbandingan Nilai Beban Pemeliharaan pada LO dan LRA tahun 2024

No	Uraian	LO	LRA	Selisih/Perbedaan
1.	Beban Pemeliharaan Tanah	100.835.984,00	-	100.835.984,00
2.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.491.055.567,00	19.973.470.812,00	8.517.584.755,00
3.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	51.731.467.969,00	29.483.233.842,00	22.248.234.127,00
4.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.296.933.439,00	66.961.131.393,00	(1.664.197.954,00)
5.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.928.800,00	-	10.928.800,00
6.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	380.230.500,00	380.230.500,00	-
Jumlah		**146.011.452.259,00**	**116.798.066.547,00**	**29.213.385.712,00**

Selisih/perbedaan Beban Pemeliharaan antara LO dan LRA sebesar Rp29.213.385.712,00 terdiri atas:

1. Anggaran yang bersumber dari beban barang jasa BLUD yang di rinci ke dalam rekening sub rincian objek beban pemeliharaan.
2. Anggaran yang bersumber barang jasa BOS yang di rinci ke dalam rekening sub rincian objek beban pemeliharaan.
3. Reklasifikasi beban pemeliharaan ke beban persediaan.

5.4.2.1.5 Beban Perjalanan dinas

Beban Perjalanan dinas Pemerintah Kota Bogor pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp94.617.582.922,00, sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp86.703.519.468,00,00. Terdapat peningkatan sebesar Rp7.914.063.454,00 atau 9,13%. Disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.46

Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	58.247.062.579,00	41.378.236.545,00	16.868.826.034,00	40,77
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.506.888.709,00	11.941.097.100,00	2.565.791.609,00	21,49
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.809.716.287,00	14.773.175.061,00	1.036.541.226,00	7,02
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.763.324.809,00	4.587.076.394,00	(823.751.585,00)	(17,96)
5	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	2.290.590.538,00	14.023.934.368,00	(11.733.343.830,00)	(83,67)
Jumlah		**94.617.582.922,00**	**86.703.519.468,00**	**7.914.063.454,00**	**9,13**

Adapun perbandingan nilai Beban Perjalanan Dinas antara LO dan LRA TA 2024 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.47

Perbandingan Nilai Beban Perjalanan Dinas pada LO dan LRA Tahun 2024

No	Uraian	LO	LRA	Selisih/Perbedaan
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	58.247.062.579,00	57.514.851.625,00	732.210.954,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.506.888.709,00	5.967.853.850,00	8.539.034.859,00
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.809.716.287,00	15.802.146.287,00	7.570.000,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.763.324.809,00	3.692.573.810,00	70.750.999,00
5	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	2.290.590.538,00	2.290.590.538,00	-
Jumlah		**94.617.582.922,00**	**85.268.016.110,00**	**9.349.566.812,00**

Selisih/perbedaan Beban Perjalanan Dinas antara LO dan LRA sebesar Rp9.349.566.812,00 terdiri atas:

1. Anggaran yang bersumber dari beban barang jasa BLUD yang di rinci ke dalam rekening sub rincian objek beban perjalanan dinas.
2. Anggaran yang bersumber dari beban barang jasa BOS yang di rinci ke dalam rekening sub rincian objek beban perjalanan dinas.

5.4.2.1.6 Beban Bunga

Beban ini merupakan beban bunga yang harus dibayarkan/ dikeluarkan akibat dari peminjaman uang kepada pihak lain, pada TA 2024 terdapat beban bunga sebesar Rp7.027.746.595,00 jika dibandingkan dengan beban bunga TA 2023 sebesar Rp6.191.682.700,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp836.063.895,00 atau 13,50% pada tabel berikut.

Tabel 5.4.48
Beban Bunga TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	6.035.551.928,00	6.144.188.950,00	(108.637.022,00)	(1,77)
2.	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka Panjang	543.668.056,00	-	543.668.056,00	100,00
3.	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) - BUMN - Jangka Pendek	992.194.667,00	47.493.750,00	944.700.917,00	1.989,11
Jumlah		**7.571.414.651,00**	**6.191.682.700,00**	**1.379.731.951,00**	**22,28**

Adapun perbandingan nilai Beban Bunga antara LO dan LRA TA 2024 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.49
Perbandingan Nilai Beban Bunga pada LO dan LRA Tahun 2024

No	Uraian	LO	LRA	Selisih/Perbedaan
1.	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	6.035.551.928,00	6.035.551.928,00	-
2.	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka Panjang	543.668.056,00	-	543.668.056,00
3.	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) - BUMN - Jangka Pendek	992.194.667,00	992.194.667,00	-
Jumlah		**7.571.414.651,00**	**7.027.746.595,00**	**543.668.056,00**

Selisih/perbedaan Beban bunga antara LO dan LRA sebesar Rp543.668.056,00 merupakan utang bunga penerusan pinjaman luar negeri sesuai dengan Laporan Keuangan PDAM Audited 2024.

5.4.2.1.7 Beban Hibah

Beban Hibah adalah beban Pemerintah Kota Bogor dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada pemerintah daerah lainnya/masyarakat yang timbul karena adanya perikatan, pada TA 2024 terdapat beban hibah sebesar Rp176.519.335.387,00. Jika dibandingkan dengan beban hibah TA 2023 sebesar Rp147.381.004.434,00 mengalami peningkatan sebesar Rp29.138.330.953,00 atau 19,77%, beban hibah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.50
Beban Hibah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	**Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat**	**64.853.633.758,00**	**41.728.854.095,00**	**23.124.779.663,00**	**55,42**
	- Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	53.933.637.450,00	40.929.414.447,00	13.004.223.003,00	31,77
	- Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	10.919.996.308,00	799.439.648,00	10.120.556.660,00	1.265,96

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
2	**Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**	**38.968.786.299,00**	**60.856.007.008,00**	**(21.887.220.709,00)**	**(35,97)**
	- Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	18.128.279.189,00	18.770.796.708,00	(642.517.519,00)	(3,42)
	- Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	486.350.000,00	21.345.035.200,00	(20.858.685.200,00)	(97,72)
	- Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	20.314.157.110,00	20.601.575.100,00	(287.417.990,00)	(1,40)
	- Beban Hibah Uang kepada Koperasi	40.000.000,00	138.600.000,00	(98.600.000,00)	(71,14)
3	**Beban Hibah Dana BOS**	**44.978.226.430,00**	**41.508.389.331,00**	**3.469.837.099,00**	**8,36**
	- Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	44.978.226.430,00	41.508.389.331,00	3.469.837.099,00	8,36
4	**Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik**	**3.397.282.000,00**	**3.287.754.000,00**	**109.528.000,00**	**3,33**
	- Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.397.282.000,00	3.287.754.000,00	109.528.000,00	3,33
5	**Beban Hibah Dana BOSP**	**24.321.406.900,00**	**-**	**24.321.406.900,00**	**100,00**
	- Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	8.812.864.900,00	-	8.812.864.900,00	100,00
	- Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	15.508.542.000,00	-	15.508.542.000,00	100,00
Jumlah		**176.519.335.387,00**	**147.381.004.434,00**	**29.138.330.953,00**	**19,77**

Adapun perbandingan nilai Beban Hibah antara LO dan LRA TA 2024 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.51

Perbandingan Nilai Beban Hibah pada LO dan LRA Tahun 2024

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan/Selisih
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	64.853.633.758,00	64.853.633.758,00	-
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	38.968.786.299,00	38.968.786.299,00	-
3	Beban Hibah Dana BOS	44.978.226.430,00	44.978.226.430,00	-
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.397.282.000,00	3.397.282.000,00	-
5	Beban Hibah Dana BOSP	24.321.406.900,00	24.321.406.900,00	-
Jumlah		**176.519.335.387,00**	**176.519.335.387,00**	**-**

5.4.2.1.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial adalah beban Pemerintah Kota Bogor dalam bentuk uang/barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, pada TA 2024 beban bantuan sosial sebesar Rp43.580.019.500,00 apabila dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp54.438.915.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.858.895.500,00 atau 19,95%.

Tabel 5.4.52

Beban Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	33.118.435.000,00	46.032.665.000,00	(12.914.230.000,00)	(28,05)
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya	10.461.584.500,00	8.406.250.000,00	2.055.334.500,00	24,45
Jumlah		**43.580.019.500,00**	**54.438.915.000,00**	**(10.858.895.500,00)**	**(19,95)**

Adapun perbandingan nilai Beban Bantuan Sosial antara LO dan LRA TA 2024 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.53

Perbandingan Nilai Beban Bantuan Sosial pada LO dan LRA Tahun 2024

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan / selisih
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	33.118.435.000,00	33.118.435.000,00	-
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya	10.461.584.500,00	10.461.584.500,00	-
Jumlah		**43.580.019.500,00**	**43.580.019.500,00**	**-**

5.4.2.1.9 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari entitas lain, penghitungan beban penyisihan piutang tergantung jenis piutang dan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Kota Bogor tentang Akuntansi Piutang. Pada tahun 2024 beban penyisihan piutang sebesar Rp62.607.181.457,02. Jika dibandingkan dengan beban penyisihan pada TA 2023 sebesar Rp47.569.042.893,21 maka mengalami peningkatan sebesar Rp15.038.138.563,81 atau 31,61%. Beban penyisihan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.54a

Beban Penyisihan Piutang TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	40.037.270.138,00	31.430.348.679,00	8.606.921.459,00	27,38
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	702.963.994,06	(39.311.104,12)	742.275.098,18	(1.888,21)
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	21.945.225.793,96	16.154.574.511,33	5.790.651.282,63	35,85
4	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(78.278.469,00)	23.430.807,00	(101.709.276,00)	(434,08)
Jumlah		**62.607.181.457,02**	**47.569.042.893,21**	**15.038.138.563,81**	**31,61**

Adapun perangkat daerah yang memiliki beban penyisihan piutang tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.4.54b

Beban Penyisihan Piutang TA 2024 dan 2023

Per Perangkat Daerah

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BLUD)**				
	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	1.996.623.748,00	1.995.843.117,00	780.631,00	0,04
	Jumlah	**1.996.623.748,00**	**1.995.843.117,00**	**780.631,00**	**0,04**

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
2	**DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN**				
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	173.450.800,00	150.689.300,00	22.761.500,00	15,10
	Jumlah	**173.450.800,00**	**150.689.300,00**	**22.761.500,00**	**15,10**
3	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**				
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	98.415.000,00	(45.744.750,00)	144.159.750,00	(315,14)
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	17.569.908,75	5.868.412,50	11.701.496,25	199,40
	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	(43.211.545,89)	(110.330.651,52)	67.119.105,63	(60,83)
	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	16.585.508,96	(91.801.946,67)	108.387.455,63	(118,07)
	Jumlah	**89.358.871,82**	**(242.008.935,69)**	**331.367.807,51**	(136,92)
4	**BADAN KEUANGAN DAN ASET DADRAH**				
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	456.739.831,20	(39.793.415,10)	496.533.246,30	(1.247,78)
	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	(78.278.469,00)	23.430.807,00	(101.709.276,00)	(434,08)
	Jumlah	**378.461.362,20**	**(16.362.608,10)**	**394.823.970,30**	**(2.412,96)**
5	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**				
	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	4.552.782.227,00	3.964.252.323,00	588.529.904,00	14,85
	Penyisihan Pajak Restoran	44.611.918,00	(26.609.343,00)	71.221.261,00	(267,66)
	Penyisihan Pajak Hiburan	259.847.423,00	553.143,00	259.294.280,00	46.876,54
	Penyisihan Pajak Reklame	10.021.388,00	12.714.158,00	(2.692.770,00)	(21,18)
	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	5.565.117,00	10.441.492,00	(4.876.375,00)	(46,70)
	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	67.533.093,00	69.085,00	67.464.008,00	97.653,63
	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	35.096.806.779,00	27.468.530.171,00	7.628.276.608,00	27,77
	Beban Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	102.193,00	397.650,00	(295.457,00)	(74,30)
	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	19.932.016.537,00	14.250.533.341,00	5.681.483.196,00	**39,87**
	Jumlah	**59.969.286.675,00**	**45.680.882.020,00**	**14.288.404.655,00**	**31,28**
TOTAL		**62.607.181.457,02**	**47.569.042.893,21**	**15.038.138.563,81**	**31,61**

5.4.2.1.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama manfaat aset yang ada pada Kota Bogor. Beban penyusutan TA 2024 sebesar Rp373.846.048.605,39. Jika dibandingkan dengan beban penyusutan TA 2023 sebesar Rp373.280.306.704,50 maka mengalami peningkatan sebesar Rp565.741.900,89 atau 0,15%.

Beban Penyusutan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.55

Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	121.272.053.305,14	118.811.713.291,28	2.460.340.013,86	2,07
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	36.659.773.287,72	30.611.092.959,66	6.048.680.328,06	19,76
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	215.277.266.080,06	222.840.832.178,99	(7.563.566.098,93)	(3,39)
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	504.069.349,25	863.053.200,50	(358.983.851,25)	(41,59)
5	Beban Penyusutan Aset Lain - Lain	50.819.695,62	153.615.074,07	(102.795.378,45)	(66,92)
6	Beban Penyusutan Properti Investasi	82.066.887,60	-	82.066.887,60	100,00
Jumlah		**373.846.048.605,39**	**373.280.306.704,50**	**565.741.900,89**	**0,15**

5.4.2.1.11 Beban Lain-Lain

Beban lain-lain merupakan beban yang tidak termasuk beban pegawai, beban barang dan jasa, beban transfer dan beban hibah. Beban lain-lain ini sebagian besar adalah beban reklasifikasi Belanja Modal yang tidak dapat dikapitalisasi menjadi aset karena harga beli dibawah nilai minimum kapitalisasi, pada TA 2024 terdapat beban lain-lain sebesar Rp23.288.538.862,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp17.470.271.322,00 atau 300,27% dari TA 2023 sebesar Rp5.818.267.540,00 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.56
Beban Lain-lain TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Lain-Lain	23.288.538.862,00	5.818.267.540,00	17.470.271.322,00	300,27
	- Reklas dari Peralatan Mesin	14.422.688.725,00	5.376.043.414,00	9.046.645.311,00	168,28
	- Reklas dari Jalan Irigasi dan Jalan	-	324.597.926,00	(324.597.926,00)	(100,00)
	- Reklas dari Aset Tetap Lainnya	8.865.850.137,00	17.549.200,00	8.848.300.937,00	50.419,97
	- Reklas dari Aset tidak berwujud	-	100.077.000,00	(100.077.000,00)	(100,00)
Jumlah		**23.288.538.862,00**	**5.818.267.540,00**	**17.470.271.322,00**	**300,27**

5.4.2.1.12 Beban Transfer

Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh suatu peraturan perundang-undangan.

Beban Transfer pada TA 2024 sebesar Rp1.660.750.000,00 tidak mengalami perubahan nilai dengan beban transfer pada TA 2023 yaitu sebesar Rp1.660.750.000,00. Beban Transfer disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.57
Beban Transfer TA 2024 dan 2023

No	Keterangan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1.	Beban Bantuan Keuangan umum antar Daerah Kabupaten/Kota	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00	-	-
Jumlah		**1.660.750.000,00**	**1.660.750.000,00**	**-**	**-**

Adapun rincian beban transfer bantuan keuangan TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bantuan Keuangan kepada Desa Galuga Kabupaten Bogor dalam rangka Kompensasi dampak lingkungan terhadap masyarakat disekitar TPAS Galuga sebesar Rp913.412.500,00.
2. Bantuan Keuangan kepada Desa Cijujung Kabupaten Bogor dalam rangka Kompensasi dampak lingkungan terhadap masyarakat disekitar TPAS Galuga sebesar Rp498.225.000,00.
3. Bantuan Keuangan kepada Desa Dukuh Kabupaten Bogor dalam rangka Kompensasi dampak lingkungan terhadap masyarakat disekitar TPAS Galuga sebesar Rp249.112.500,00.

Adapun perbandingan nilai Beban transfer antara LO dan LRA TA 2024 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.58
Perbandingan Nilai Beban Transfer pada LO dan LRA Tahun 2024

No	Uraian	LO	LRA	Perbandingan/selisih
1.	Bantuan Keuangan umum antar Daerah Kabupaten/Kota	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00	-
Jumlah		**1.660.750.000,00**	**1.660.750.000,00**	**-**

5.4.3 Surplus/ (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional

5.4.3.1 Surplus Dari Kegiatan Non Operasional - LO

5.4.3.1.1 Surplus Penjualan / Pertukaran / Pelepasan Aset Non Lancar - LO

Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas kegiatan non operasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Pada TA 2024 terdapat Surplus Pelepasan Penyertaan Modal - LO sebesar Rp14.388.624.170,56 dan TA 2023 sebesar Rp0,00. Adapun Surplus Pelepasan Penyertaan Modal - LO merupakan selisih lebih atas pelepasan aset tetap dari Pemerintah Daerah Kota Bogor kepada Perusahaan Daerah Air Minum (BUMD) Kota Bogor.

5.4.3.2 Defisit Dari Kegiatan Non Operasional - LO

5.4.3.2.1 Defisit Penjualan / Pertukaran / Pelepasan Aset Non Lancar - LO

Digunakan untuk mencatat selisih kurang dari kegiatan non operasional lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Defisit dari kegiatan non operasional lainnya – LO Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

5.4.4 Pos Luar Biasa

5.4.4.1 Pendapatan Luar Biasa - LO

5.4.4.1.1 Pendapatan Luar Biasa - LO

Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pendapatan luar biasa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Pada TA 2024 dan 2023 Pemerintah Kota Bogor tidak memiliki pendapatan luar biasa – LO.

5.4.4.2 Beban Luar Biasa - LO

5.4.4.2.1. Beban Luar Biasa - LO

Penurunan ekuitas akibat peristiwa luar biasa yaitu kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Beban luar biasa ini terdiri atas beban tidak terduga dan beban luar biasa lainnya.

Beban Luar Biasa – LO Tahun 2024 sebesar Rp2.187.043.885,00 mengalami peningkatan Rp1.120.389.485,00 atau 105,04% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp1.066.654.400,00 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.59
Rincian Beban Luar Biasa TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=5/4)
1	Beban Tidak Terduga	2.187.043.885,00	1.066.654.400,00	1.120.389.485,00	105,04
Jumlah		**2.187.043.885,00**	**1.066.654.400,00**	1.120.389.485,00	105,04

Adapun realisasi penggunaan beban tidak terduga tahun anggaran 2024 merupakan:

1. Pengembalian Sisa Bantuan Keuangan Provinsi Periode Tahun 2023 sebesar Rp900.000,00
2. Pengembalian atas kelebihan pembayaran kerugian daerah hasil pemerikaan BPK-RI sebesar Rp489.843.885,00.
3. Bantuan tidak terduga dan bantuan sosial tidak terencana sebesar Rp1.696.300.000,00.

5.4.5 Surplus/Defisit-LO.

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Surplus/Defisit-LO Kota Bogor Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp73.065.023.893,87 mengalami penurunan dibandingkan Surplus/Defisit-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp156.235.389.193,60

5.5 PENJELASAN POS-POS ARUS KAS

5.5.1 Tujuan Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

5.5.2 Definisi Arus Kas

1. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
2. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.
3. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

5.5.3 Aktivitas Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

1. Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Penerimaan aktivitas operasi antara lain berupa penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, penerimaan hibah, penerimaan bagian laba BUMD, investasi lainnya dan penerimaan transfer, sedangkan pengeluaran aktivitas operasi antara lain berupa belanja pegawai, belanja barang.
2. Aktivitas investasi aset non keuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari penjualan aset tetap dan penjualan aset lainnya. Sedangkan arus keluar kas terdiri dari perolehan aset tetap dan perolehan aset lainnya.
3. Aktivitas Pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain penerimaan pinjaman, penerimaan hasil penjualan surat utang Negara, penerimaan dari divestasi, penerimaan kembali pinjaman dan pencairan dana cadangan. Sedangkan arus keluar kas antara lain penyertaan modal pemerintah, pembayaran pokok pinjaman, dan pembentukan dana cadangan.
4. Aktivitas nonanggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah. Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang masuk. Arus keluar kas dari aktivitas non anggaran meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening di Kas Daerah.

5.5.4 Posisi Kas

Posisi saldo awal kas pada Laporan Arus Kas tahun 2024 sebesar Rp54.510.496.495,14 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.1
Rincian Saldo Awal Kas Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Rincian SiLPA	Saldo Awal 2024	Saldo Awal 2023
		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
1	Kas di Kas Daerah	33.520.359.707,00	130.401.482.495,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	922.000,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.260.000,00	0,00
4	Kas di BLUD	17.674.821.168,14	29.011.343.370,34
5	Kas Lainnya	1.108.045.406,00	204.120.800,00
6	Kas Dana BOS Pusat	1.649.723.756,00	1.990.834.186,00
7	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
8	Bunga Dana Cadangan	555.364.458,00	0,00
Total		**54.510.496.495,14**	**161.607.780.851,34**

Posisi Kas pada 31 Desember 2024 sebesar Rp83.616.865.127,38 mengalami kenaikan sebesar Rp30.583.373.092,24 dibandingkan saldo kas pada tahun 2023 Rp54.510.496.495,14 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.2
Arus Kas Masuk Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Aktivitas Operasi	3.169.108.210.680,24	2.965.387.709.605,80
2	Aktivitas Investasi	1.389.417.875,00	2.087.860.934,00
3	Aktivitas Pembiayaan	170.833.508.776,00	31.250.594.576,00
4	Aktivitas Transitoris	240.850.026.337,48	227.042.881.499,50
Jumlah		**3.582.181.163.668,72**	**3.225.769.046.615,30**

Tabel 5.5.3
Arus Kas Keluar Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Aktivitas Operasi	2.778.098.747.514,00	2.510.850.711.371,00
2	Aktivitas Investasi	400.367.986.619,00	518.164.968.738,00
3	Aktivitas Pembiayaan	132.184.766.176,00	76.821.017.476,00
4	Aktivitas Transitoris	240.946.290.267,48	227.029.633.386,50
Jumlah		**3.551.597.790.576,48**	**3.332.866.330.971,50**

Tabel 5.5.4
Kenaikan/ (Penurunan Kas) Tahun Anggaran 2024 dan 2023

	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Arus Kas Masuk	3.582.181.163.668,72	3.006.233.851.498,92
2	Arus Kas Keluar	3.551.597.790.576,48	3.209.673.877.638,00
Arus Kas Bersih		**30.583.373.092,24**	**(203.440.026.139,08)**

5.5.5 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2024 adalah sebesar Rp391.009.463.166,24 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp454.536.998.234,80 yang diperoleh dari selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas sebagai berikut:

Tabel 5.5.5
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Arus Kas Masuk	3.169.108.210.680,24	2.965.387.709.605,80
2	Arus Kas Keluar	2.778.098.747.514,00	2.510.850.711.371,00
Arus Kas Bersih		**391.009.463.166,24**	**454.536.998.234,80**

5.5.5.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari Aktivitas Operasi tahun 2024 sebesar Rp3.169.108.210.680,24 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp2.965.387.709.605,80 terdiri dari:

Tabel 5.5.6
Arus masuk kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	973.768.860.850,00	897.753.380.910,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	417.445.452.990,24	31.081.390.548,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34.287.163.763,00	33.960.776.435,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	31.728.557.279,00	373.734.859.341,80
5	Dana Bagi Hasil Pajak	85.946.116.000,00	82.465.899.156,00
6	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	28.477.228.000,00	19.739.952.531,00
7	Dana Alokasi Umum (DAU)	853.803.503.264,00	792.504.632.043,00
8	Dana Alokasi Khusus	373.153.244.178,00	349.032.591.793,00
9	Dana Penyesuaian	28.047.664.000,00	5.912.254.000,00
10	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	303.076.793.631,00	301.185.316.222,00
11	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
12	Penerimaan Lainnya	39.373.626.725,00	78.016.656.626,00
Jumlah		**3.169.108.210.680,24**	**2.965.387.709.605,80**

Arus masuk kas dari Penerimaan Pajak Daerah tahun 2024 sebesar Rp973.768.860.850,00 sedangkan 2023 sebesar Rp897.753.380.910,00 terdiri dari:

Tabel 5.5.7
Arus masuk kas dari Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel	123.207.802.097,00	111.465.747.482,00
2	Pajak Restoran	208.515.593.649,00	194.752.128.901,00
3	Pajak Hiburan	29.358.580.222,00	22.605.708.227,00
4	Pajak Reklame	9.736.486.534,00	10.809.834.939,00
5	Pajak Penerangan Jalan	95.818.548.299,00	61.678.951.202,00
6	Pajak Parkir	7.859.694.368,00	14.652.462.793,00
7	Pajak Air Tanah	1.924.708.540,00	2.545.938.043,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	210.911.617.241,00	219.099.681.865,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	286.435.829.900,00	260.142.927.458,00
Jumlah		**973.768.860.850,00**	**897.753.380.910,00**

Arus masuk kas dari Penerimaan Retribusi Daerah tahun 2024 sebesar Rp417.445.452.990,24 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp31.081.390.548,00 terdiri dari:

Tabel 5.5.8
Arus masuk kas dari Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	400.997.137.220,24	16.742.835.953,00
2	Retribusi Jasa Usaha	7.953.316.342,00	6.380.013.963,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	8.494.999.428,00	7.958.540.632,00
Jumlah		**417.445.452.990,24**	**31.081.390.548,00**

Arus masuk kas dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2024 sebesar Rp34.287.163.763,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp33.960.776.435,00 terdiri dari:

Tabel 5.5.9
Arus masuk kas dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Bagian Laba PDAM Kota Bogor	25.588.368.239,00	24.957.647.000,00
2	Bagian Laba PT Bank Jabar Banten	4.750.663.159,00	5.225.479.571,00
3	Bagian Laba Bank Kota Bogor	2.774.558.399,00	2.383.402.426,00
4	Bagian Laba PD Pasar Pakuan Jaya	1.173.573.966,00	1.394.247.438,00
	Jumlah	**34.287.163.763,00**	**33.960.776.435,00**

Arus masuk kas dari Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah tahun 2024 sebesar Rp31.728.557.279,00 sedangkan tahun 2023 Rp373.734.859.341,80. Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:

Tabel 5.5.10
Arus masuk kas dari Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	167.802.000,00
	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	12.629.016,00	0,00
2	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	1.361.135.000,00
3	Jasa Giro	4.035.307.746,00	5.177.638.309,00
4	Pendapatan Bunga	7.224.677.557,00	6.997.819.184,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	13.441.667,00	24.235.714,00
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	397.410.914,00	454.743.324,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	627.473.886,00	474.700.538,00
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	14.649.420.176,00	4.067.750.115,00
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	111.287.554,00	223.447.933,00
10	Pendapatan dari Pengembalian	3.836.302.493,00	3.926.504.331,00
11	Pendapatan BLUD	813.022.806,00	350.851.552.368,80
12	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	4.481.604,00	4.080.525,00
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	3.101.860,00	3.450.000,00
	Jumlah	**31.728.557.279,00**	**373.734.859.341,80**

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar tahun 2024 Rp85.946.116.000,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp82.465.899.156,00 terdiri dari:

Tabel 5.5.11
Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil PBB	14.620.813.000,00	4.704.756.064,00
2	Dana Bagi Hasil PPh pasal 21	54.897.720.000,00	59.405.855.566,00
3	Dana Bagi Hasil PPh 25 dan PPh 29	8.471.478.000,00	9.878.818.000,00
4	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	7.956.105.000,00	8.476.469.526,00
	Jumlah	**85.946.116.000,00**	**82.465.899.156,00**

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam tahun 2024 sebesar Rp28.477.228.000,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp19.739.952.531,00 merupakan Bagi Hasil dari:

Tabel 5.5.12
Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	14.970.852.000,00	5.937.485.977,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	1.451.833.000,00	1.422.922.063,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	8.852.128.000,00	8.556.970.811,00

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-*Landrent*	0,00	102.000,00
5	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - *Royalty*	1.073.803.000,00	1.177.352.919,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.031.457.000,00	1.067.547.550,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.097.155.000,00	1.577.571.211,00
	Jumlah	**28.477.228.000,00**	**19.739.952.531,00**

Arus masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2024 sebesar Rp853.803.503.264,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp792.504.632.043,00.

Arus masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 sebesar Rp373.153.244.178,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp349.032.591.793,00, merupakan Dana Alokasi Khusus dari :

Tabel 5.5.13
Arus masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	44.829.645.150,00	55.796.999.805,00
2	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	328.323.599.028,00	293.235.591.988,00
	Jumlah	**373.153.244.178,00**	**349.032.591.793,00**

Arus masuk Kas dari Penerimaan Dana Penyesuaian tahun 2024 sebesar Rp28.047.664.000,00 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp5.912.254.000,00.

Arus Masuk dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2023 sebesar Rp303.076.793.631,00 , Rp301.185.316.222,00

Tabel 5.5.14
Arus masuk Kas dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	107.078.086.620,00	104.770.397.085,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	66.162.370.710,00	68.172.519.150,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	70.084.028.487,00	64.638.380.437,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	219.606.800,00	208.652.187,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	59.532.701.014,00	63.395.367.363,00
	Jumlah	**303.076.793.631,00**	**301.185.316.222,00**

Arus Masuk dari penerimaan lainnya tahun 2024 sebesar Rp39.373.626.725,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp78.016.656.626,00 dengan rincian:

Tabel 5.5.15
Arus Masuk dari penerimaan lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	39.373.626.725,00	78.016.656.626,00
	Jumlah	**39.373.626.725,00**	**78.016.656.626,00**

5.5.5.2 Arus Keluar Kas

Arus keluar kas untuk Aktivitas Operasi tahun 2024 adalah sebesar Rp2.778.098.747.514,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp2.510.850.711.371,00. Jumlah tersebut merupakan pengeluaran-

pengeluaran dalam kaitannya dengan pengeluaran untuk aktivitas operasional, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.16
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.242.957.964.907,00	1.063.654.426.888,00
2	Belanja Barang dan jasa	1.304.164.987.240,00	1.236.457.277.949,00
3	Belanja Bunga	7.027.746.595,00	6.191.682.700,00
4	Belanja Hibah	176.519.335.387,00	147.381.004.434,00
5	Bantuan Sosial	43.580.019.500,00	54.438.915.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00
7	Belanja Tidak Terduga	2.187.943.885,00	1.066.654.400,00
	Jumlah	**2.778.098.747.514,00**	**2.510.850.711.371,00**

5.5.6 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Penurunan Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi tahun 2024 adalah sebesar Rp398.978.568.744,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp516.077.107.804,00 yang merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas sebagai berikut:

Tabel 5.5.17
Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	1.389.417.875,00	2.087.860.934,00
2	Arus Keluar Kas	400.367.986.619,00	518.164.968.738,00
	Arus Kas Bersih	**(398.978.568.744,00)**	**(516.077.107.804,00)**

5.5.6.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari Aktivitas Investasi tahun 2024 sebesar Rp1.389.417.875,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp2.087.860.934,00Arus masuk tersebut diperoleh dari:

Tabel 5.5.18
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan Tanah	24.168.075,00	24.728.650,00
2	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	40.529.200,00	0,00
3	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	2.063.132.284,00
4	Hasil Penjualan Aset Lain-lain	1.324.720.600,00	0,00
	Jumlah	**1.389.417.875,00**	**2.087.860.934,00**

5.5.6.2 Arus Keluar Kas

Arus kas keluar dari Aktivitas Investasi tahun 2024 sebesar Rp400.367.986.619,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp518.164.968.738,00 yang merupakan belanja modal/aset tetap yang dilaksanakan pada Dinas/Kantor/Badan Pemerintah Kota Bogor, yang terdiri dari:

Tabel 5.5.19
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Belanja Tanah	2.477.717.100,00	1.287.152.960,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	133.226.642.367,00	97.928.993.032,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	141.166.601.172,00	178.951.840.395,00
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	112.729.496.656,00	238.985.747.391,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	10.693.173.754,00	911.157.960,00
6	Belanja Aset Lainnya	74.355.570,00	100.077.000,00
	Jumlah	**400.367.986.619,00**	**518.164.968.738,00**

5.5.7 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp38.648.742.600,00 sedangkan tahun 2023 sebesar (Rp45.570.422.900,00) yang merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas sebagai berikut:

Tabel 5.5.20
Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Arus Kas masuk	170.833.508.776,00	31.250.594.576,00
2	Arus Kas Keluar	132.184.766.176,00	76.821.017.476,00
Arus Kas Bersih		**38.648.742.600,00**	**(45.570.422.900,00)**

5.5.7.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan tahun 2024 adalah sebesar Rp170.833.508.776,00 sedangan tahun 2023 sebesar Rp31.250.594.576,00 terdiri dari:

Tabel 5.5.21
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Pencairan Dana Cadangan	38.648.742.600,00	25.765.828.400,00
2	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan	126.700.000.000,00	0,00
3	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00
Jumlah		**170.833.508.776,00**	**31.250.594.576,00**

5.5.7.2 Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan tahun 2024 adalah sebesar Rp132.184.766.176,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp76.821.017.476,00 yang terdiri dari penyertaan modal pemda dan pemberian pinjaman daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.22
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	71.336.251.300,00
2	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00
3	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	126.700.000.000,00	0,00
Jumlah		**132.184.766.176,00**	**76.821.017.476,00**

5.5.8. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2024 adalah sebesar (Rp96.263.930,00) sedangkan tahun 2023 sebesar Rp13.248.113,00 Rincian arus masuk dan keluar kas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.23
Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Arus Kas masuk	240.850.026.337,48	227.042.881.499,50
2	Arus Kas Keluar	240.946.290.267,48	227.029.633.386,50
Arus Kas Bersih		**(96.263.930,00)**	**13.248.113,00**

5.5.8.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2024 adalah sebesar Rp240.850.026.337,48 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp227.042.881.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.24
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Utang Taspen	527.485.149,00	482.055
2	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	32.767.962.848,00	30.570.537.097
3	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	821.437.502,00	695.511.753
4	Utang Iuran Jaminan Kematian	2.464.307.763,00	2.099.936.992
5	Utang PPh Pusat	88.426.580.829,29	74.169.827.138
6	Utang PPN Pusat	79.276.207.939,19	86.162.725.848
7	Utang Iuran Wajib Pegawai	36.531.994.307,00	32.981.210.617
8	Uang Jaminan	28.500.000,00	360.150.000
9	Koreksi Kas di BOS	5.550.000,00	2.500.000
Jumlah		**240.850.026.337,48**	**227.042.881.500,00**

5.5.8.2 Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2024 adalah sebesar Rp240.946.290.267,48 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp213.440.595.029,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.25
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Utang Taspen	527.485.149,00	482.055,00
2	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	32.767.962.848,00	30.617.839.880,00
3	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	821.437.502,00	695.511.753,00
4	Utang Iuran Jaminan Kematian	2.464.307.763,00	2.099.936.992,00
5	Utang PPh Pusat	88.437.631.725,29	74.158.776.241,50
6	Utang PPN Pusat	79.267.430.038,19	86.162.725.848,00
7	Utang Iuran Wajib Pegawai	36.531.994.307,00	32.981.210.617,00
8	Utang Jaminan Bongkar	128.000.000,00	313.150.000,00
9	Koreksi SILPA	40.935,00	0,00
	Jumlah	**240.946.290.267,48**	**227.029.633.386,50**

5.5.9 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas pada 31 Desember 2024 sebesar Rp83.616.865.127,38 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.26
Rincian Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Rincian SiLPA	Saldo 2024	Saldo 2023
		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
1	Kas di Kas Daerah	79.503.327.898,00	33.520.359.707,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	2.153.130.596,38	922.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.260.000,00
4	Kas di BLUD	0,00	17.674.821.168,14
5	Kas Lainnya	1.012.808.839,00	1.108.045.406,00
6	Kas Dana BOS Pusat	947.597.794,00	1.649.723.756,00
	Total	**83.616.865.127,38**	**53.955.132.037,14**

Terdapat selisih Saldo Akhir Kas BUD Tahun 2024 dengan saldo Akhir Kas sebesar Rp1.477.004.460,00 (Rp85.093.869.587,38 – Rp83.616.865.127,38) yang berasal dari pendapatan atas bunga dana cadangan, dimana bunga dana cadangan tersebut dicatat sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang menambah dana cadangan.

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/(defisit) – LO, koreksi dan ekuitas akhir, dimana ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 berasal dari Saldo Ekuitas Awal ditambah/dikurang dengan Surplus/(Defisit) LO dan Perubahan ekuitas lainnya.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Saldo awal ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp10.613.114.672.934,97 Surplus/(Defisit) – LO sebesar Rp73.065.023.893,87 merupakan surplus atas kegiatan operasional yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kota Bogor. Dampak kumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sebesar Rp183.206.318.698,13 sehingga Ekuitas Akhir Tahun 2024 sebesar Rp10.869.386.015.526,97 dapat dirinci sebagai berikut.

5.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal pada tahun 2024 sebesar Rp10.613.114.672.934,97 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp10.174.464.362.679,95 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp438.650.310.255,00 atau 4,31%.

5.6.2 Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO TA 2024 sebesar Rp73.065.023.893,87 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp156.235.389.193,60 mengalami penurunan sebesar (Rp83.170.365.299,73) atau sebesar (53,23%).

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif merupakan kumpulan dari dampak-dampak yang terjadi akibat dari adanya perubahan kebijakan akuntansi ataupun kegiatan-kegiatan pada periode sebelumnya, saat ini dan yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp183.206.318.698,13 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp282.414.921.061,42, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.1
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2024

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Koreksi Nilai Persediaan	25.303.013,44	104.721.309,87
2	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Tanah)	73.815.713.760,00	247.125.783.197,00
3	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Peralatan dan Mesin)	(6.852.682.613,17)	(9.808.532.275,77)
4	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Gedung dan Bangunan)	(509.028.026,00)	(2.304.200.000,00)
5	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Jalan Irigasi dan Jaringan)	2.734.814.178,00	34.703.110.048,00
6	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Aset Tetap Lainnya)	677.492.474,15	(3.900.000,00)
7	Hasil Inventarisasi - Aset Lainnya	(12.075.219.301,50)	11.121.085.120,79
8	Hasil Inventarisasi - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	9.643.553.427,56	(2.100.845.643,27)
9	Hasil Inventarisasi - Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	11.679.490.047,73	(8.344.381.920,47)
10	Koreksi Ekuitas Lainnya	104.066.881.737,92	11.922.081.225,27
Jumlah		**183.206.318.698,13**	**282.414.921.061,42**

5.6.3.a. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar – Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan pada tahun 2024 sebesar Rp25.303.012,44 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp104.721.309,87 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2
Koreksi Nilai Persediaan

No	Uraian	Saldo TA 2024			Saldo TA 2023
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan	13.960.088,02	0,03	13.960.087,99	0,00
2	Dinas Kesehatan	7.265.381.945,24	7.677.242.581,55	(411.860.636,31)	(13.695.545.835,38)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	421.392.374,76	0,01	421.392.374,75	693.330.392,90
4	Dinas Tenaga Kerja	1.086.187,00	0,00	1.086.187,00	0,00
5	Kecamatan Bogor Utara	725.000,00	0,00	725.000,00	0,00
6	Kecamatan Tanah Sareal	0,01	0,00	0,01	0,00
	Jumlah	**7.702.545.598,03**	**7.677.242.585,59**	**25.303.012,44**	**104.721.309,87**

5.6.3.b. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar – Selisih Revaluasi Aktiva Tetap

Selisih revaluasi aktiva tetap pada tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan pada tahun 2023 juga sebesar Rp0,00.

5.6.3.c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar – Lain lain

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar – lain lain tahun anggaran 2024 sebesar Rp183.181.015.684,68 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp282.310.199.751,55 mengalami penurunan sebesar (Rp99.129.184.066,87) atau sebesar (35,11%).

Tabel 5.6.3
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar – Lain lain

No	Uraian	Saldo TA 2024			Saldo TA 2023
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Tanah)	80.745.854.738,00	6.930.140.978,00	73.815.713.760,00	247.125.783.197,00
2	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Peralatan dan Mesin)	29.782.915.238,23	36.635.597.851,40	(6.852.682.613,17)	(9.808.532.275,77)
3	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Gedung dan Bangunan)	40.005.651.669,56	40.514.679.695,56	(509.028.026,00)	(2.304.200.000,00)
4	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Jalan Irigasi dan Jaringan)	2.866.728.078,00	131.913.900,00	2.734.814.178,00	34.703.110.048,00
5	Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Aset Tetap Lainnya)	922.176.524,93	244.684.050,78	677.492.474,15	(3.900.000,00)
6	Hasil Inventarisasi - Aset Lainnya	34.402.955.289,33	46.478.174.590,83	(12.075.219.301,50)	11.121.085.120,79
7	Hasil Inventarisasi - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	43.657.981.570,57	34.014.428.143,02	9.643.553.427,55	(2.100.845.643,27)
8	Hasil Inventarisasi - Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	35.085.017.732,77	23.405.527.685,04	11.679.490.047,73	(8.344.381.920,47)
9	Koreksi Ekuitas Lainnya	229.557.418.906,27	125.490.537.168,35	104.066.881.737,92	11.922.081.225,27
	Jumlah	**497.026.699.747,66**	**313.845.684.062,98**	**183.181.015.684,68**	**282.310.199.751,55**

Salah satu faktor terjadinya perubahan ekuitas melalui inventarisasi karena adanya perubahan batasan nilai kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor No. 12 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bogor.

5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir pada tahun 2024 sebesar Rp10.869.386.015.526,97 pada tahun 2023 sebesar Rp10.613.114.672.934,97 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp256.271.342.592,00 atau sebesar 2,00%. Ekuitas Akhir merupakan jumlah dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO serta Koreksi Ekuitas.

BAB VI
INFORMASI TAMBAHAN

6.1. Visi dan Misi Kota Bogor

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024. Pernyataan Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 dirumuskan sebagai berikut:

"Terwujudnya kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga"

Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi untuk mewujudkan Visi Kota Bogor pada Tahun 2024.

Adapun 3 (tiga) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019-2024 yaitu:

1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat, Kota Bogor Yang Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi Kota yang bersih nyaman, aman dan sehat.
2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas, Kota Bogor Yang Cerdas adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota. Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (*sensing*), memahami kondisi permasalahannya (*understanding*), dan mengatur/mengambil tindakan (*acting*) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Kota Cerdas bukan "kota" ditambah "teknologi" namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota. Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota.
3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera, Kota Bogor Yang Sejahtera adalah suatu kondisi Kota dimana kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi Adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan sosial ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera. Kota yang sejahtera dapat terwujud apabila kondisi perekonomian masyarakat kota meningkat. Ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi daerah. Daya saing daerah sendiri merupakan kemampuan daerah untuk menumbuhkembangkan daerah yang bersangkutan yang direfleksikan pada adanya

pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan daya beli, kemakmuran rakyat, dan kualitas diri rakyat (masyarakat), tingginya daya tarik daerah bersangkutan bagi para investor luar untuk berinvestasi dan berbisnis, dan kemampuan daerah itu menghasilkan *output*-nya (produk atau jasa) untuk bersaing dan menang dalam persaingan dengan output (produk atau jasa) yang dihasilkan pihak lain di luar daerah yang bersangkutan secara global.

6.2 Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2024 adalah sejumlah 7.717 orang dengan rincian jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin adalah 3.093 Laki-laki dan 4.624 Perempuan, adapun rincian jumlah pegawai setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor terdapat dalam tabel sebagai berikut

Tabel 6.2.1

Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

OPD	Laki-laki	Perempuan	Total
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	28	22	50
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19	3	22
Badan Keuangan dan Aset Daerah	28	20	48
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor	15	4	19
Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor	54	29	83
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor	24	22	46
Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor	9	21	30
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	31	17	48
Dinas Kesehatan Kota Bogor	119	845	964
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor	32	36	68
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor	32	26	58
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor	38	20	58
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	227	23	250
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	16	18	34
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	84	17	101
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor	63	2	65
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor	11	18	29
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor	32	12	44
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor	28	14	42
Dinas Pendidikan Kota Bogor	1.136	2.911	4.047
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor	7	19	26
Dinas Perhubungan Kota Bogor	193	18	211
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor	70	14	84
Dinas Sosial Kota Bogor	25	14	39
Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor	25	10	35
Inspektorat Daerah Kota Bogor	27	26	53
Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor	65	52	117
Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor	80	42	122
Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor	61	30	91
Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor	41	14	55
Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor	46	25	71
Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor	48	38	86
RSUD Kota Bogor	72	142	214
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	181	4	185
Sekretariat Daerah Kota Bogor	94	75	169
Sekretariat DPRD Kota Bogor	32	21	53
Jumlah	**3.093**	**4.624**	**7.717**

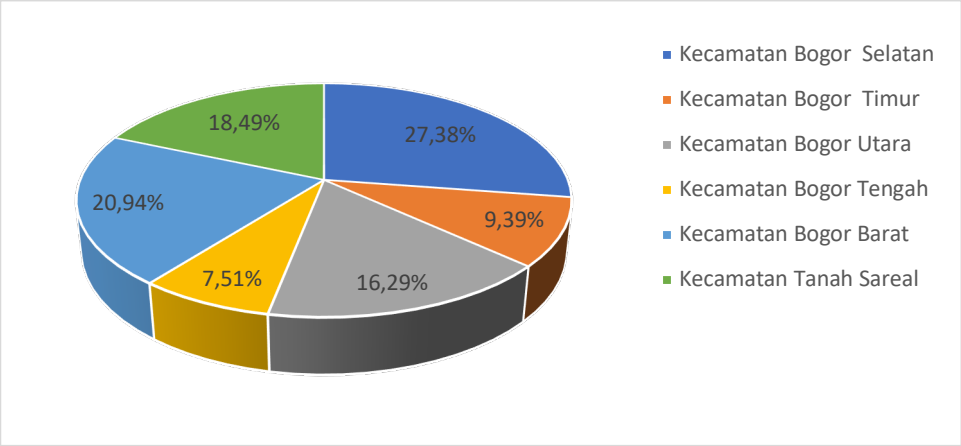
6.3 Kondisi Geografis

Secara geografis Kota Bogor terletak di antara 106□48′ BT dan 6□26′ LS. Posisi geografis Kota Bogor di tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara, merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Kota Bogor mempunyai rata-rata ketinggian minimum 190 m dan maksimum 330 m dari permukaan laut.

Luas Wilayah Kota Bogor sebesar 111,39 km^2 terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Luas wilayah masing-masing kecamatan, yaitu: Kecamatan Bogor Selatan (30,50 km^2), Kecamatan Bogor Timur (10,46 km^2), Kecamatan Bogor Utara (18,14 km^2), Kecamatan Bogor Tengah (8,37 km^2), Kecamatan Bogor Barat (23,32 km^2) dan Kecamatan Tanah Sareal (20,60 km^2).

Jika dilihat dari persentase luas wilayah kecamatan terhadap luas wilayah Kota Bogor, Kecamatan Bogor Selatan merupakan Kecamatan terluas yakni sebesar 27,38 persen dan Kecamatan terkecil yakni Kecamatan Bogor Tengah sebesar 7,51 persen.

Tabel 6.3.1
Luas daerah per kecamatan (%)



Tabel 6.3.2
Luas Daerah menurut Kecamatan

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Area (km2)	Persentase terhadap Luas Kota
1	2	3	4
Kecamatan Bogor Selatan	Empang	30,50	27,38%
Kecamatan Bogor Timur	Baranangsiang	10,46	9,39%
Kecamatan Bogor Utara	Tegalgundil	18,14	16,29%
Kecamatan Bogor Tengah	Pabaton	8,37	7,51%
Kecamatan Bogor Barat	Loji	23,32	20,94%
Kecamatan Tanah Sareal	Kebonpedes	20,60	18,49%
Kota Bogor	**Bogor Tengah - Pabaton**	**111,39**	**100,00%**

Suhu rata-rata tiap bulan 25,50°-27,70°C dengan suhu terendah 19,50°-22,20°C dan suhu tertinggi 32,3°-36,0°C. Kelembaban udara rata- rata antara 72,20%-86,30%. Kota Bogor dijuluki kota hujan, karena banyaknya hari hujan di setiap bulannya. Tahun 2023 rata rata jumlah hari hujan sebesar 18 hari per bulan.

Curah hujan tertinggi pada tahun 2023 terjadi pada bulan November dan Desember masing-masing tercatat sebesar 1.068 mm/bulandan 563,60 mm/bulan, sedangkan curah hujan terendah pada bulan September dan Oktober tercatat sebesar 62,20 mm/bulan dan 102,10 mm/bulan.

BAB VII
PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan karena berisi penjelasan dari pos-pos Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo (LP-SAL), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta kebijakan akuntansinya.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini, dapat dijadikan bahan evaluasi atas pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam rangka pelayanan kepada masyarakat Kota Bogor. Serta, dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan baru di tahun-tahun berikutnya. Untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bogor.

Bogor, Mei. 2025

WALI KOTA BOGOR

DEDIE A. RACHIM

DAFTAR ISI LAMPIRAN

Lampiran No.	Nama Lampiran
1.1	Rincian Kas di kas daerah sesuai RKUD
1.2	Rincian Kas di Kas Daerah pada Neraca
2	Rincian Kas di Bendahara BOS Pusat Pendidikan Kota Bogor
3	Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang Pajak
4.1	Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Menteng Asri)
4.2	Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Cibuluh)
4.3	Daftar Piutang Retribusi Daerah dan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4.4	Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
4.5	Rincian Piutang Retribusi pada Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)
5.1	Daftar Piutang dan Penyishan Piutang Denda Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah
5.2	Daftar Piutang Denda Retribusi Daerah dan Penyisihan Piutang Denda Retribusi Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Rincian Beban Dibayar Dimuka
7	Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
8	Daftar Tagihan Penjualan Angsuran
9	Daftar Tuntutan Ganti Rugi
10	Daftar Kemitraan pada Pihak Ketiga
11	Rekapitulasi Utang Perhitungan Pihak Ketiga
12	Rincian Utang Jaminan Bongkar Pada Badan Pendapatan Daerah
13.1	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada RSUD-BLUD
13.2	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14.1	Rincian Utang Belanja Per Perangkat Daerah
14.2	Rincian Utang Belanja pada RSUD - BLUD
15	Daftar Properti Investasi Barang Milik Daerah Kota Bogor

Lampiran 1.1

PEMERINTAH KOTA BOGOR
Kas di Kas Daerah
Per 31 Desember 2024

No	Bank	Nomor Rekening	Nama Rekening	Saldo 31 Desember 2023	Debit	Kredit	Saldo 31 Desember 2024	Keperluan (Sisi Debet)	Keperluan (Sisi Kredit)	Keterangan
A	Bank BJB Kantor Cabang Bogor	0130270203013	REK KAS UMUM DAERAH	33.769.359.707,00	9.986.710.881.372,00	9.940.827.413.181,00	79.652.827.898,00	Pengeluaran	Penerimaan	

Lampiran 1.2

PEMERINTAH KOTA BOGOR
KAS DI KAS DAERAH DI NERACA
PER 31 DESEMBER 2024

(Rupiah)

No.	Uraian	Saldo 2023	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo 2024
1	**DAK NON FISIK**				
	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	852.217.897,00	15.174.498.103,00	13.778.283.936,00	2.248.432.064,00
	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana	275.530.193,00	8.036.889.807,00	7.969.277.659,00	343.142.341,00
	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	2.891.904.440,00	103.382.644.000,00	106.146.488.420,00	128.060.020,00
	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	128.336.700,00	3.816.547.000,00	3.496.900.000,00	447.983.700,00
	DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	406.000.000,00	222.200.000,00	183.800.000,00
	DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal	60.544.200,00	415.178.000,00	403.608.644,00	72.113.556,00
	DAK Non Fisik Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	520.000.000,00	519.999.000,00	1.000,00
	DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	57.970.400,00	-	-	57.970.400,00
2	**DAK FISIK**				
	DAK Reguler Bidang Kesehatan	1.125.635.135,00	-	-	1.125.635.135,00
	DAK Reguler Bidang Sanitasi	2.829.732,00	-	-	2.829.732,00
	DAK Reguler Cadangan Bidang Jalan	8.200.000,00	-	-	8.200.000,00
	DAK Penugasan Bidang Kesehatan	5.320.251,00	33.035.596.734,00	33.035.596.734,00	5.320.251,00
	DAK Penugasan Bidang Air Minum	788.403.001,00	-	-	788.403.001,00
	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	523.076.450,00	9.534.780.000,00	9.534.780.000,00	523.076.450,00
	DAK Tambahan Bidang Jalan	112.590.935,00	-	-	112.590.935,00
	DAK Tambahan Bidang Irigasi	601.190.000,00	-	-	601.190.000,00
3	**DAU**				
	DAU SG Pendidikan	6.722.333.946,00	31.725.202.000,00	30.015.304.666,00	8.432.231.280,00
	DAU SG Kesehatan	1.665.615.876,00	17.761.219.000,00	18.616.850.420,00	809.984.456,00
	DAU SG PU	-	13.158.907.000,00	13.118.560.641,00	40.346.359,00
	DAU SG Kelurahan	1.647.220.830,00	13.600.000.000,00	14.505.461.170,00	741.759.660,00
4	**SILPA DANA BANTUAN KEUANGAN PROVINSI**	409.929.190,00	38.378.800.725,00	38.788.729.915,00	-
5	**IF**	242.498.932,00	28.047.664.000,00	27.960.271.550,00	329.891.382,00
6	**DBHCHT**	6.876.867.394,00	7.390.030.000,00	13.437.952.931,00	828.944.463,00
7	**DBH SAWIT**	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.861.400.080,00	138.599.920,00
8	**KAS EARMARKED/NON RKUD**	7.522.144.205,00	2.526.642.763.446,00	2.472.632.085.858,00	61.532.821.793,00
	TOTAL	**33.520.359.707,00**	**2.852.026.719.815,00**	**2.806.043.751.624,00**	**79.503.327.898,00**

Lampiran 2

PEMERINTAH KOTA BOGOR
REALISASI BOS APBN/REGULER TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR

NO	NAMA SEKOLAH	JENJANG	KECAMATAN	SALDO BOS 2023	KOREKSI SALDO AWAL	PENDAPATAN	JUMLAH PENDAPATAN	BELANJA BARANG DAN JASA BOS REGULER	BEL M. PERALATAN MESIN BOS REGULER	BEL M. ASET LAINNYA BOS REGULER	BELANJA BARANG DAN JASA BOS KINERJA	BEL M. PERALATAN MESIN BOS KINERJA	BEL M. ASET LAINNYA BOS KINERJA	KOREKSI BELANJA BARANG DAN JASA BOS	KOREKSI BEL M. PERALATAN MESIN BOS	KOREKSI BEL M. ASET LAINNYA BOS	JUMLAH BELANJA	SALDO BOS
				1	2	3	4 =1+2+3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (5+6+7+8+9+10)-(11+12+13)	15 = 4 - 14
1	SDN BALUNGBANG JAYA 1	SD	Bogor Barat	481.988	-	348.718.012	349.200.000	195.865.501	106.397.200	22.141.000	22.500.000	-	-	-	-	-	346.903.701	2.296.299
2	SDN BALUNGBANG JAYA 2	SD	Bogor Barat	36.068.830	36.068.830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SDN BALUNGBANG JAYA 3	SD	Bogor Barat	1.945.546	-	263.154.454	265.100.000	163.519.063	74.691.890	23.119.900	-	-	-	-	-	-	261.330.853	3.769.147
4	SDN BUBULAK 1	SD	Bogor Barat	1.659.810	-	430.640.190	432.300.000	219.881.548	188.600.000	23.504.700	-	-	-	-	-	-	431.986.248	313.752
5	SDN BUBULAK 2	SD	Bogor Barat	922.919	-	244.377.081	245.300.000	151.304.416	82.552.000	11.229.400	-	-	-	-	-	-	245.085.816	214.184
6	SDN BUBULAK 3	SD	Bogor Barat	26.635	-	287.573.365	287.600.000	191.025.047	56.247.000	17.783.010	22.500.000	-	-	-	-	-	287.555.057	44.943
7	SDN CEMPLANG	SD	Bogor Barat	1.609.875	-	275.590.125	277.200.000	141.185.144	106.200.000	28.044.800	-	-	-	-	-	-	275.429.944	1.770.056
8	SDN CIBALAGUNG 1	SD	Bogor Barat	6.361.488	-	185.038.512	191.400.000	133.836.285	39.600.000	9.100.300	-	-	-	-	-	-	182.536.585	8.863.415
9	SDN CIBALAGUNG 2	SD	Bogor Barat	260.041	-	219.139.959	219.400.000	107.571.311	70.900.000	14.360.400	22.500.000	-	-	-	-	-	215.331.711	4.068.289
10	SDN CIBALAGUNG 3	SD	Bogor Barat	1.939.137	-	274.160.863	276.100.000	192.982.328	46.140.000	33.435.700	-	-	-	-	-	-	272.558.028	3.541.972
11	SDN CIBALAGUNG 4	SD	Bogor Barat	1.132.981	-	225.467.019	226.600.000	123.459.479	72.154.200	30.205.800	-	-	-	-	-	-	225.819.479	780.521
12	SDN CIBALAGUNG 5	SD	Bogor Barat	1.078.252	-	353.121.748	354.200.000	265.721.809	62.100.000	25.719.400	-	-	-	-	-	-	353.541.209	658.791
13	SDN CIJAHE CURUG	SD	Bogor Barat	332.692	-	236.167.308	236.500.000	127.846.621	87.035.000	21.465.400	-	-	-	-	-	-	236.347.021	152.979
14	SDN CILENDEK 1	SD	Bogor Barat	552.540	-	532.947.460	533.500.000	360.967.305	76.500.000	94.908.000	-	-	-	-	-	-	532.375.305	1.124.695
15	SDN CILENDEK 2	SD	Bogor Barat	3.517.174	-	214.282.826	217.800.000	72.403.120	123.630.000	18.885.800	-	-	-	-	-	-	214.918.920	2.881.080
16	SDN CILENDEK 4	SD	Bogor Barat	234.780	-	323.165.220	323.400.000	174.662.182	117.696.300	30.390.800	-	-	-	-	-	-	322.749.282	650.718
17	SDN CILENDEK TIMUR 1	SD	Bogor Barat	5.196.712	-	605.303.288	610.500.000	347.439.660	218.649.650	41.138.600	-	-	-	-	-	-	607.227.910	3.272.090
18	SDN CILENDEK TIMUR 2	SD	Bogor Barat	78.104	-	260.621.896	260.700.000	225.822.999	24.627.300	9.724.000	-	-	-	-	-	-	260.174.299	525.701
19	SDN CURUG 1	SD	Bogor Barat	2.376.842	-	304.523.158	306.900.000	193.899.662	98.030.000	14.358.000	-	-	-	-	-	-	306.287.662	612.338
20	SDN CURUG 3	SD	Bogor Barat	3.447.601	-	275.952.399	279.400.000	188.321.442	53.100.000	30.294.000	-	-	-	240.000	-	-	271.475.442	7.924.558
21	SDN GUNUNG BATU 1	SD	Bogor Barat	923.496	-	745.384.578	746.308.074	470.147.360	187.400.000	65.844.000	22.500.000	-	-	-	-	-	745.891.360	416.714
22	SDN GUNUNG BATU 2	SD	Bogor Barat	4.868.213	-	770.631.787	775.500.000	485.740.657	226.900.000	59.641.400	-	-	-	-	-	-	772.282.057	3.217.943
23	SDN LOJI 1	SD	Bogor Barat	569.111	-	309.030.889	309.600.000	249.262.308	19.500.000	17.894.000	22.500.000	-	-	-	-	-	309.156.308	443.692
24	SDN LOJI 2	SD	Bogor Barat	1.841.862	-	287.958.138	289.800.000	154.448.693	81.342.700	28.621.100	22.500.000	-	-	-	-	-	286.912.493	2.887.507
25	SDN LOJI 3	SD	Bogor Barat	161.560	-	195.038.440	195.200.000	96.762.062	68.550.000	6.982.500	22.500.000	-	-	-	-	-	194.794.562	405.438
26	SDN MARGAJAYA 1	SD	Bogor Barat	2.614.344	-	586.685.656	589.300.000	357.797.187	142.574.500	61.876.500	3.450.000	-	21.550.000	-	-	-	587.248.187	2.051.813
27	SDN MARGAJAYA 2	SD	Bogor Barat	1.062.215	-	455.437.785	456.500.000	288.967.213	80.310.000	84.699.100	-	-	-	-	-	-	453.976.313	2.523.687
28	SDN MARGAJAYA 3	SD	Bogor Barat	286.061	-	378.113.939	378.400.000	246.919.758	103.040.550	28.427.500	-	-	-	-	-	-	378.387.808	12.192
29	SDN MARGAJAYA 4	SD	Bogor Barat	887.965	-	465.512.035	466.400.000	309.253.334	108.199.000	48.782.800	-	-	-	-	-	-	466.235.134	164.866
30	SDN MENTENG	SD	Bogor Barat	741.158	-	335.759.842	336.501.000	223.385.910	85.666.400	27.094.000	-	-	-	-	-	-	336.146.310	354.690
31	SDN MERDEKA	SD	Bogor Barat	1.203.048	-	360.096.952	361.300.000	225.699.931	89.450.000	22.548.600	22.500.000	-	-	-	-	-	360.198.531	1.101.469
32	SDN NEGLASARI BOGOR BARAT	SD	Bogor Barat	5.856.990	5.000.000	453.143.010	464.000.000	425.515.692	30.800.000	-	-	-	-	-	-	-	456.315.692	7.684.308
33	SDN PABUARAN CILENDEK	SD	Bogor Barat	1.194.958	-	308.905.042	310.100.000	220.549.165	44.130.000	-	20.920.000	18.070.000	6.010.000	-	-	-	309.679.165	420.835
34	SDN PURBASARI	SD	Bogor Barat	7.132.961	-	750.767.039	757.900.000	406.683.926	274.150.000	75.460.600	-	-	-	-	-	-	756.294.526	1.605.474
35	SDN SELAKOPI	SD	Bogor Barat	112.682	-	309.487.318	309.600.000	189.620.836	77.090.000	18.692.400	22.500.000	-	-	-	-	-	307.903.236	1.696.764
36	SDN SEMERU 1	SD	Bogor Barat	10.589.998	-	707.710.002	718.300.000	459.759.027	136.708.500	120.186.000	-	-	-	-	-	-	716.653.527	1.646.473
37	SDN SEMERU 5	SD	Bogor Barat	1.195.502	-	189.104.498	190.300.000	125.674.445	56.140.000	7.372.000	-	-	-	-	-	-	189.186.445	1.113.555
38	SDN SEMERU 6	SD	Bogor Barat	996.420	-	200.303.580	201.300.000	185.238.103	5.450.000	6.000.000	-	-	-	-	-	-	196.688.103	4.611.897
39	SDN SEMPLAK 1	SD	Bogor Barat	2.435.480	-	736.764.520	739.200.000	486.229.695	155.200.000	96.508.600	-	-	-	-	-	-	737.938.295	1.261.705
40	SDN SEMPLAK 2	SD	Bogor Barat	324.243	-	901.075.757	901.400.000	744.532.608	72.540.000	60.870.200	22.500.000	-	-	-	-	-	900.442.808	957.192
41	SDN SINDANG BARANG 1	SD	Bogor Barat	530.320	-	337.169.680	337.700.000	215.361.386	107.200.000	14.909.000	-	-	-	-	-	-	337.470.386	229.614
42	SDN SINDANG BARANG 2	SD	Bogor Barat	1.609.336	-	419.690.664	421.300.000	285.692.113	104.450.000	29.229.000	-	-	-	-	-	-	419.371.113	1.928.887
43	SDN SINDANG BARANG 3	SD	Bogor Barat	395.194	-	344.404.806	344.800.000	165.536.118	150.600.000	5.813.200	22.500.000	-	-	-	-	-	344.449.318	350.682
44	SDN SINDANG BARANG 4	SD	Bogor Barat	270.963	-	179.031.937	179.302.900	154.650.365	19.696.816	4.900.000	-	-	-	-	-	-	179.247.181	55.719
45	SDN SINDANGRASA BOGOR BARAT	SD	Bogor Barat	7.457.560	-	247.742.440	255.200.000	175.400.482	57.235.000	15.918.100	-	-	-	-	-	-	248.553.582	6.646.418
46	SDN SITUGEDE 1	SD	Bogor Barat	287.838	-	246.612.162	246.900.000	173.917.076	28.000.000	21.151.600	22.500.000	-	-	-	-	-	245.568.676	1.331.324
47	SDN SITUGEDE 2	SD	Bogor Barat	245.390	-	346.754.610	347.000.000	252.398.100	47.400.000	24.682.600	22.500.000	-	-	-	-	-	346.980.700	19.300
48	SDN SITUGEDE 3	SD	Bogor Barat	71.700	-	413.528.300	413.600.000	269.124.800	116.400.000	27.663.600	-	-	-	-	-	-	413.188.400	411.600
49	SDN SITUGEDE 4	SD	Bogor Barat	286.035	-	577.713.965	578.000.000	439.910.000	68.750.000	46.838.800	22.500.000	-	-	-	-	-	577.998.800	1.200
50	SDN SITUGEDE 5	SD	Bogor Barat	1.695.100	-	281.004.900	282.700.000	227.563.600	40.236.000	14.900.400	-	-	-	-	-	-	282.700.000	-
51	SDN BATUTULIS 1	SD	Bogor Selatan	4.888.262	-	549.511.738	554.400.000	339.374.400	147.780.000	65.604.200	-	-	-	-	-	-	552.758.600	1.641.400
52	SDN BATUTULIS 2	SD	Bogor Selatan	3.979.551	-	418.220.449	422.200.000	294.835.808	45.060.000	35.740.000	10.500.000	13.000.000	11.500.000	-	-	-	410.635.808	11.564.192
53	SDN BATUTULIS 3	SD	Bogor Selatan	560.488	-	364.639.512	365.200.000	225.025.578	53.250.000	86.691.000	-	-	-	-	-	-	364.966.578	233.422
54	SDN BATUTULIS 4	SD	Bogor Selatan	1.468.392	1.468.392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	SDN BOJONG KERTA	SD	Bogor Selatan	88.250	-	496.511.750	496.600.000	347.222.000	57.050.000	69.748.200	22.500.000	-	-	-	-	-	496.520.200	79.800
56	SDN BONDONGAN	SD	Bogor Selatan	1.759.960	-	632.940.040	634.700.000	369.028.794	124.880.000	139.953.500	-	-	-	-	-	-	633.862.294	837.706
57	SDN CIBEUREUM 1	SD	Bogor Selatan	102.395.383	80.000.000	749.804.617	772.200.000	457.799.332	185.148.000	111.566.300	-	-	-	-	-	-	754.513.632	17.686.368
58	SDN CIBEUREUM 2	SD	Bogor Selatan	603.413	-	467.996.587	468.600.000	291.899.100	104.185.000	70.736.200	-	-	-	-	-	-	466.820.300	1.779.700
59	SDN CIBEUREUM 4	SD	Bogor Selatan	12.834.345	-	415.065.655	427.900.000	225.258.412	155.844.000	37.260.000	-	-	-	-	-	-	418.362.412	9.537.588
60	SDN CIKARET 1	SD	Bogor Selatan	12.583.811	-	808.016.189	820.600.000	555.649.588	131.362.000	130.533.200	-	-	-	-	-	-	817.544.788	3.055.212
61	SDN CIKARET 2	SD	Bogor Selatan	8.087.922	-	426.412.078	434.500.000	216.305.598	159.350.000	51.164.900	-	-	-	-	-	-	426.820.498	7.679.502
62	SDN CIPAKU 1	SD	Bogor Selatan	3.323.125	-	347.576.875	350.900.000	245.939.300	82.300.000	14.290.000	-	-	-	-	-	-	342.529.300	8.370.700
63	SDN CIPAKU 2	SD	Bogor Selatan	2.005.380	-	182.794.620	184.800.000	130.806.064	53.056.300	-	-	-	-	-	-	-	183.862.364	937.636
64	SDN CIPAKU 4	SD	Bogor Selatan	542.246	-	381.157.754	381.700.000	235.015.138	110.800.000	35.816.000	-	-	-	-	-	-	381.631.138	68.862
65	SDN CIPAKU PERUMDA	SD	Bogor Selatan	1.220.528	-	603.779.472	605.000.000	335.736.398	169.200.002	100.012.600	-	-	-	-	-	-	604.949.000	51.000
66	SDN CIRANJANG	SD	Bogor Selatan	166.087	-	129.633.913	129.800.000	105.089.912	15.000.000	9.409.200	-	-	-	-	-	-	129.499.112	300.888
67	SDN GENTENG	SD	Bogor Selatan	2.363.314	-	472.236.686	474.600.000	296.606.466	120.500.000	34.022.900	22.500.000	-	-	-	-	-	473.629.366	970.634
68	SDN HARJASARI 1	SD	Bogor Selatan	2.526.392	-	691.573.608	694.100.000	455.282.509	122.250.000	112.958.900	-	-	-	-	-	-	690.491.409	3.608.591
69	SDN HARJASARI 2	SD	Bogor Selatan	4.514.172	-	346.385.828	350.900.000	119.990.065	195.779.515	30.690.000	-	-	-	-	-	-	346.459.580	4.440.420
70	SDN KERTAMAYA	SD	Bogor Selatan	3.702.489	-	660.097.511	663.800.000	288.230.192	206.750.000	129.785.200	22.500.000	-	-	-	-	-	647.265.392	16.534.608
71	SDN LAWANG GINTUNG 1	SD	Bogor Selatan	9.613.440	-	408.386.560	418.000.000	337.806.769	22.500.000	52.165.100	-	-	-	-	-	-	412.471.869	5.528.131
72	SDN LAWANG GINTUNG 2	SD	Bogor Selatan	1.296.789	-	313.303.211	314.600.000	269.982.240	24.200.000	10.960.300	-	-	-	-	-	-	305.142.540	9.457.460
73	SDN LAWANG GINTUNG 4	SD	Bogor Selatan	847.843	-	241.152.157	242.000.000	203.453.612	11.500.000	26.990.260	-	-	-	-	-	-	241.943.872	56.128
74	SDN LAYUNGSARI 1	SD	Bogor Selatan	2.352.246	-	379.347.754	381.700.000	323.801.296	36.840.000	16.025.200	-	-	-	-	-	-	376.666.496	5.033.504
75	SDN LAYUNGSARI 2	SD	Bogor Selatan	969.269	-	377.430.731	378.400.000	198.593.039	108.022.000	69.006.600	-	-	-	-	-	-	375.621.639	2.778.361
76	SDN MUARASARI 1	SD	Bogor Selatan	310.396	-	297.789.604	298.100.000	165.940.691	101.509.200	30.228.600	-	-	-	-	-	-	297.678.491	421.509
77	SDN MUARASARI 2	SD	Bogor Selatan	328.570	-	378.071.430	378.400.000	276.384.456	83.025.000	12.067.000	-	-	-	-	-	-	371.476.456	6.923.544
78	SDN MUARASARI 3	SD	Bogor Selatan	230.315	-	509.069.685	509.300.000	256.849.619	176.257.000	74.160.500	-	-	-	-	-	-	507.267.119	2.032.881
79	SDN MULYAHARJA 1	SD	Bogor Selatan	1.010.434	-	347.089.566	348.100.000	191.097.152	101.650.000	29.276.500	22.500.000	-	-	-	-	-	344.523.652	3.576.348
80	SDN MULYAHARJA 2	SD	Bogor Selatan	410.358	-	326.289.642	326.700.000	187.372.656	115.970.800	22.113.100	-	-	-	-	-	-	325.456.556	1.243.444
81	SDN PABUARAN	SD	Bogor Selatan	11.037.765	-	564.262.235	575.300.000	470.884.011	66.548.000	35.515.600	-	-	-	-	-	-	572.947.611	2.352.389
82	SDN PAKUAN	SD	Bogor Selatan	2.280.159	-	592.819.841	595.100.000	458.961.468	27.500.000	107.201.900	-	-	-	-	-	-	593.663.368	1.436.632
83	SDN PAMOYANAN 1	SD	Bogor Selatan	3.369.262	-	370.630.738	374.000.000	202.756.050	95.800.000	72.668.800	-	-	-	-	-	-	371.224.850	2.775.150
84	SDN PAMOYANAN 2	SD	Bogor Selatan	123.500	-	546.576.500	546.700.000	393.456.275	46.500.000	105.768.000	-	-	-	-	-	-	545.724.275	975.725
85	SDN PAMOYANAN 3	SD	Bogor Selatan	4.990.534	-	499.909.466	504.900.000	277.388.250	183.700.000	40.888.900	-	-	-	-	-	-	501.977.150	2.922.850
86	SDN RANCAMAYA 1	SD	Bogor Selatan	6.889.765	-	482.610.235	489.500.000	401.708.668	41.210.844	44.087.600	-	-	-	-	-	-	487.007.112	2.492.888
87	SDN RANCAMAYA 2	SD	Bogor Selatan	813.584	-	526.086.416	526.900.000	373.115.662	92.059.220	61.630.100	-	-	-	-	-	-	526.804.982	95.018
88	SDN RANGGA MEKAR	SD	Bogor Selatan	1.336.282	-	298.963.718	300.300.000	130.942.107	114.891.400	41.902.694	-	-	-	-	-	-	287.736.201	12.563.799
89	SDN BABAKAN	SD	Bogor Tengah	922.036	-	441.277.964	442.200.000	352.781.893	57.282.400	27.928.700	-	-	-	-	-	-	437.992.993	4.207.007

NO	NAMA SEKOLAH	JENJANG	KECAMATAN	SALDO BOS 2023	KOREKSI SALDO AWAL	PENDAPATAN	JUMLAH PENDAPATAN	BELANJA BARANG DAN JASA BOS REGULER	BEL M. PERALATAN MESIN BOS REGULER	BEL M. ASET LAINNYA BOS REGULER	BELANJA BARANG DAN JASA BOS KINERJA	BEL M. PERALATAN MESIN BOS KINERJA	BEL M. ASET LAINNYA BOS KINERJA	KOREKSI BELANJA BARANG DAN JASA BOS	KOREKSI BEL M. PERALATAN MESIN BOS	KOREKSI BEL M. ASET LAINNYA BOS	JUMLAH BELANJA	SALDO BOS
				1	2	3	4 =1+2+3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (5+6+7+8+9+10)-(11+12+13)	15 = 4 - 14
90	SDN BARANANGSIANG	SD	Bogor Tengah	10.074.205	-	332.025.795	342.100.000	215.427.420	97.530.000	29.042.300	-	-	-	-	-	-	341.999.720	100.280
91	SDN CIMANGGU KECIL	SD	Bogor Tengah	4.032.793	-	440.367.207	444.400.000	231.129.259	156.055.000	52.754.400	-	-	-	-	-	-	439.938.659	4.461.341
92	SDN DEWI SARTIKA 1	SD	Bogor Tengah	1.610.559	-	149.089.441	150.700.000	124.573.044	15.700.000	9.235.400	-	-	-	-	-	-	149.508.444	1.191.556
93	SDN DEWI SARTIKA 2	SD	Bogor Tengah	1.096.570	-	204.603.430	205.700.000	164.927.939	34.399.770	5.942.000	-	-	-	-	-	-	205.269.709	430.291
94	SDN DEWI SARTIKA 3	SD	Bogor Tengah	337.480	-	161.862.520	162.200.000	109.128.120	22.100.000	8.282.700	22.500.000	-	-	-	-	-	162.010.820	189.180
95	SDN EMPANG 1	SD	Bogor Tengah	3.359.253	-	567.540.747	570.900.000	366.511.407	124.900.000	79.142.600	-	-	-	-	-	-	570.554.007	345.993
96	SDN EMPANG 2	SD	Bogor Tengah	4.070.937	-	451.329.063	455.400.000	346.641.087	34.650.000	72.426.100	-	-	-	-	-	-	453.717.187	1.682.813
97	SDN GANG AUT	SD	Bogor Tengah	2.685.626	-	397.714.374	400.400.000	233.582.495	130.620.000	35.739.000	-	-	-	-	-	-	399.941.495	458.505
98	SDN GUNUNG GEDE	SD	Bogor Tengah	1.073.556	-	513.726.444	514.800.000	379.640.427	89.750.000	43.748.000	-	-	-	-	-	-	513.138.427	1.661.573
99	SDN KAMPUNG RAMBUTAN	SD	Bogor Tengah	911.645	-	237.788.355	238.700.000	173.837.122	47.134.999	15.861.900	-	-	-	-	-	-	236.834.021	1.865.979
100	SDN KEBON KOPI	SD	Bogor Tengah	1.347.775	-	251.652.225	253.000.000	152.170.616	97.950.000	-	-	-	-	-	-	-	250.120.616	2.879.384
101	SDN MALABAR	SD	Bogor Tengah	937.163	-	289.462.837	290.400.000	196.628.854	79.723.500	13.143.900	-	-	-	-	-	-	289.496.254	903.746
102	SDN PABRIK ES	SD	Bogor Tengah	211.169	-	132.888.831	133.100.000	110.446.075	14.400.000	7.760.500	-	-	-	-	-	-	132.606.575	493.425
103	SDN PANARAGAN 1	SD	Bogor Tengah	1.299.171	-	531.100.829	532.400.000	378.663.728	133.490.000	18.389.800	-	-	-	-	-	-	530.543.528	1.856.472
104	SDN PANARAGAN 2	SD	Bogor Tengah	7.245.856	-	485.554.144	492.800.000	292.433.388	99.580.500	96.425.300	-	-	-	-	-	-	488.439.188	4.360.812
105	SDN PANARAGAN 3	SD	Bogor Tengah	2.297.395	-	244.102.605	246.400.000	147.289.667	62.150.000	28.822.200	-	-	-	-	-	-	238.261.867	8.138.133
106	SDN PANARAGAN KIDUL	SD	Bogor Tengah	278.296	-	258.221.704	258.500.000	163.066.674	60.900.000	33.844.100	-	-	-	-	-	-	257.810.774	689.226
107	SDN PAPANDAYAN	SD	Bogor Tengah	3.437.616	-	863.362.384	866.800.000	544.575.075	231.979.250	88.814.280	-	-	-	-	-	-	865.368.605	1.431.395
108	SDN PENGADILAN 1	SD	Bogor Tengah	4.504.834	-	371.695.166	376.200.000	295.611.336	61.460.000	19.121.600	-	-	-	-	-	-	376.192.936	7.064
109	SDN PENGADILAN 2	SD	Bogor Tengah	8.492.095	-	356.707.905	365.200.000	209.108.552	99.120.000	56.813.200	-	-	-	-	-	-	365.041.752	158.248
110	SDN PENGADILAN 3	SD	Bogor Tengah	99.980	-	163.800.020	163.900.000	155.824.506	-	8.072.200	-	-	-	-	-	-	163.896.706	3.294
111	SDN PENGADILAN 5	SD	Bogor Tengah	1.454.840	-	379.145.160	380.600.000	270.201.827	58.348.950	51.714.900	-	-	-	-	-	-	380.265.677	334.323
112	SDN PERWIRA	SD	Bogor Tengah	826.896	-	143.273.104	144.100.000	101.941.463	25.300.000	14.126.500	-	-	-	-	-	-	141.367.963	2.732.037
113	SDN POLISI 1	SD	Bogor Tengah	6.845.848	-	923.754.152	930.600.000	703.072.832	134.072.000	93.077.800	-	-	-	-	-	-	930.222.632	377.368
114	SDN POLISI 2	SD	Bogor Tengah	867.086	-	264.232.914	265.100.000	229.943.743	14.200.000	20.616.400	-	-	-	-	-	-	264.760.143	339.857
115	SDN POLISI 4	SD	Bogor Tengah	16.220	-	859.083.780	859.100.000	683.869.131	99.499.430	70.412.000	-	-	-	-	-	-	853.780.561	5.319.439
116	SDN POLISI 5	SD	Bogor Tengah	1.208.196	-	234.191.804	235.400.000	190.409.779	21.565.000	22.692.500	-	-	-	-	-	-	234.667.279	732.721
117	SDN RODA	SD	Bogor Tengah	967.089	-	249.832.911	250.800.000	145.522.837	90.868.000	14.396.200	-	-	-	-	-	-	250.787.037	12.963
118	SDN SEMPUR KALER	SD	Bogor Tengah	1.629.784	-	193.070.216	194.700.000	135.665.924	34.900.000	22.536.000	-	-	-	-	-	-	193.101.924	1.598.076
119	SDN SEMPUR KIDUL	SD	Bogor Tengah	539.228	-	162.260.772	162.800.000	101.711.200	51.204.500	8.617.000	-	-	-	-	-	-	161.532.700	1.267.300
120	SDN SINDANGSARI BOGOR TENGAH	SD	Bogor Tengah	1.823.707	-	272.076.293	273.900.000	227.540.240	20.500.000	22.215.800	-	-	-	-	-	-	270.256.040	3.643.960
121	SDN TEGALLEGA 1	SD	Bogor Tengah	1.443.171	-	296.838.430	298.281.601	167.950.701	69.250.000	60.308.300	-	-	-	-	-	-	297.509.001	772.600
122	SDN TEGALLEGA 2	SD	Bogor Tengah	595.595	-	332.210.965	332.806.560	152.377.171	103.231.800	54.478.200	22.500.000	-	-	-	-	-	332.587.171	219.389
123	SDN BABAKAN ASEM	SD	Bogor Timur	738.349	-	165.361.651	166.100.000	97.643.981	46.200.000	21.650.300	-	-	-	-	-	-	165.494.281	605.719
124	SDN BANGKA 3	SD	Bogor Timur	5.846.625	-	718.453.375	724.300.000	452.892.670	199.287.980	46.342.700	22.500.000	-	-	-	-	-	721.023.350	3.276.650
125	SDN BANTARKEMANG 1	SD	Bogor Timur	1.042.436	-	224.457.564	225.500.000	97.309.032	106.510.000	21.627.100	-	-	-	-	-	-	225.446.132	53.868
126	SDN BANTARKEMANG 2	SD	Bogor Timur	3.624.570	-	198.775.430	202.400.000	143.147.000	41.300.000	17.801.180	-	-	-	-	-	-	202.248.180	151.820
127	SDN BANTARKEMANG 3	SD	Bogor Timur	1.306.972	-	383.693.028	385.000.000	225.177.997	100.800.000	59.008.000	-	-	-	-	-	-	384.985.997	14.003
128	SDN BANTARKEMANG 6	SD	Bogor Timur	4.149.800	-	528.250.200	532.400.000	305.921.743	154.278.200	67.759.300	-	-	-	-	-	-	527.959.243	4.440.757
129	SDN CIHEULEUT 1	SD	Bogor Timur	611.853	-	330.488.147	331.100.000	223.321.033	67.950.100	37.793.700	-	-	-	-	-	-	329.064.833	2.035.167
130	SDN CIHEULEUT 2	SD	Bogor Timur	9.642.078	-	398.957.922	408.600.000	249.872.827	81.000.000	54.971.800	22.500.000	-	-	-	-	-	408.344.627	255.373
131	SDN DUTA PAKUAN	SD	Bogor Timur	470.483	-	402.129.517	402.600.000	270.565.056	82.000.000	50.032.900	-	-	-	-	-	-	402.597.956	2.044
132	SDN KATULAMPA 1	SD	Bogor Timur	387.665	-	459.412.335	459.800.000	337.026.000	116.767.000	6.000.000	-	-	-	-	-	-	459.793.000	7.000
133	SDN KATULAMPA 2	SD	Bogor Timur	2.323.536	-	262.776.464	265.100.000	95.936.160	145.760.000	23.212.500	-	-	-	-	-	-	264.908.660	191.340
134	SDN KATULAMPA 3	SD	Bogor Timur	52.449	-	300.247.551	300.300.000	229.454.000	60.450.000	10.396.000	-	-	-	-	-	-	300.300.000	-
135	SDN KATULAMPA 5	SD	Bogor Timur	1.525.950	-	463.774.050	465.300.000	364.999.293	88.850.000	9.368.000	-	-	-	-	-	-	463.217.293	2.082.707
136	SDN OTISTA	SD	Bogor Timur	1.214.944	-	307.885.056	309.100.000	193.072.750	82.834.000	32.777.200	-	-	-	-	-	-	308.683.950	416.050
137	SDN PAJAJARAN	SD	Bogor Timur	354.344	-	361.545.656	361.900.000	232.498.092	62.950.000	65.630.000	-	-	-	-	-	-	361.078.092	821.908
138	SDN SINDANGRASA BOGOR TIMUR	SD	Bogor Timur	4.561.988	-	554.238.012	558.800.000	446.010.280	79.673.500	31.821.000	-	-	-	-	-	-	557.504.780	1.295.220
139	SDN SINDANGSARI 1	SD	Bogor Timur	1.388.331	-	362.111.669	363.500.000	272.978.458	55.730.000	11.667.400	22.500.000	-	-	-	-	-	362.875.858	624.142
140	SDN SINDANGSARI 2	SD	Bogor Timur	6.045.306	-	352.554.694	358.600.000	176.140.889	162.705.800	12.294.000	-	-	-	-	-	-	351.140.689	7.459.311
141	SDN SUKASARI	SD	Bogor Timur	4.311.088	-	667.788.912	672.100.000	405.659.439	177.160.000	87.762.000	-	-	-	-	-	-	670.581.439	1.518.561
142	SDN TAJUR 1	SD	Bogor Timur	2.974.673	-	432.625.327	435.600.000	290.528.000	114.302.200	30.019.800	-	-	-	-	-	-	434.850.000	750.000
143	SDN TAJUR 2	SD	Bogor Timur	2.626.402	-	408.773.598	411.400.000	317.675.915	51.870.000	40.471.500	-	-	-	-	-	-	410.017.415	1.382.585
144	SDN TAJUR 3	SD	Bogor Timur	1.638.251	-	232.661.749	234.300.000	142.452.656	75.900.000	14.920.600	-	-	-	-	-	-	233.273.256	1.026.744
145	SDN BANTARJATI 1	SD	Bogor Utara	2.494.007	-	344.005.993	346.500.000	194.633.357	111.582.100	38.092.900	-	-	-	-	-	-	344.308.357	2.191.643
146	SDN BANTARJATI 5	SD	Bogor Utara	844.942	-	534.855.058	535.700.000	432.578.095	44.400.000	57.482.000	-	-	-	-	-	-	534.460.095	1.239.905
147	SDN BANTARJATI 6	SD	Bogor Utara	357.160	-	291.142.840	291.500.000	180.483.820	77.436.000	32.880.800	-	-	-	-	-	-	290.800.620	699.380
148	SDN BANTARJATI 7	SD	Bogor Utara	155.752	-	143.944.248	144.100.000	110.283.471	25.360.000	8.194.300	-	-	-	-	-	-	143.837.771	262.229
149	SDN BANTARJATI 8	SD	Bogor Utara	255.616	-	338.544.384	338.800.000	171.332.890	146.636.000	20.513.100	-	-	-	-	-	-	338.481.990	318.010
150	SDN BANTARJATI 9	SD	Bogor Utara	2.261.370	-	436.638.630	438.900.000	296.714.550	103.910.600	34.190.700	-	-	-	-	-	-	434.815.850	4.084.150
151	SDN BHAYANGKARI	SD	Bogor Utara	427.600	-	210.772.400	211.200.000	153.314.101	36.598.399	21.241.500	-	-	-	-	-	-	211.154.000	46.000
152	SDN BOGOR BARU	SD	Bogor Utara	926.128	-	187.173.872	188.100.000	102.860.305	63.525.300	21.539.300	-	-	-	-	-	-	187.924.905	175.095
153	SDN CEGER 1	SD	Bogor Utara	52.947	-	298.547.053	298.600.000	198.391.304	58.240.000	18.474.000	22.500.000	-	-	-	-	-	297.605.304	994.696
154	SDN CEGER 2	SD	Bogor Utara	840.400	-	192.759.600	193.600.000	115.455.100	60.939.000	15.218.400	-	-	-	-	-	-	191.612.500	1.987.500
155	SDN CIBULUH 1	SD	Bogor Utara	26.823.200	-	563.876.800	590.700.000	386.226.701	112.025.000	70.310.250	-	-	-	-	-	-	568.561.951	22.138.049
156	SDN CIBULUH 2	SD	Bogor Utara	4.799.080	-	429.700.920	434.500.000	337.111.040	57.740.850	35.655.600	-	-	-	-	-	-	430.507.490	3.992.510
157	SDN CIBULUH 3	SD	Bogor Utara	2.233.830	-	375.066.170	377.300.000	274.774.379	76.379.050	22.236.000	-	-	-	-	-	-	373.389.429	3.910.571
158	SDN CIBULUH 4	SD	Bogor Utara	7.165.332	-	502.134.668	509.300.000	254.707.310	148.490.000	87.083.100	-	-	-	-	-	-	490.280.410	19.019.590
159	SDN CIBULUH 5	SD	Bogor Utara	87.089.330	- 87.089.330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	SDN CIBULUH 6	SD	Bogor Utara	1.124.293	-	353.075.707	354.200.000	203.411.501	146.400.000	-	-	-	-	-	-	-	349.811.501	4.388.499
161	SDN CILUAR 1	SD	Bogor Utara	5.181.940	-	420.518.060	425.700.000	197.354.620	171.325.000	43.989.500	-	-	-	-	-	-	412.669.120	13.030.880
162	SDN CILUAR 2	SD	Bogor Utara	2.053.070	-	594.646.930	596.700.000	382.713.445	137.242.900	53.869.100	22.500.000	-	-	-	-	-	596.325.445	374.555
163	SDN CILUAR 3	SD	Bogor Utara	1.964.451	-	442.435.549	444.400.000	266.638.795	92.470.741	81.303.800	-	-	-	-	-	-	440.413.336	3.986.664
164	SDN CIMAHPAR 1	SD	Bogor Utara	72.750	-	548.827.250	548.900.000	347.030.800	157.435.000	44.373.800	-	-	-	-	-	-	548.839.600	60.400
165	SDN CIMAHPAR 2	SD	Bogor Utara	390.212	-	579.309.788	579.700.000	477.956.539	31.303.969	69.810.300	-	-	-	-	-	-	579.070.808	629.192
166	SDN CIMAHPAR 3	SD	Bogor Utara	1.944.977	-	353.355.023	355.300.000	201.759.057	100.350.843	52.788.500	-	-	-	-	-	-	354.898.400	401.600
167	SDN CIMAHPAR 4	SD	Bogor Utara	1.334.603	-	315.465.397	316.800.000	206.138.400	71.739.000	37.339.800	-	-	-	-	-	-	315.217.200	1.582.800
168	SDN CIMAHPAR 5	SD	Bogor Utara	3.054.250	-	231.745.750	234.800.000	164.588.238	22.759.600	24.462.800	22.500.000	-	-	-	-	-	234.310.638	489.362
169	SDN CIPARIGI	SD	Bogor Utara	35.744.434	-	485.655.566	521.400.000	373.479.135	128.330.000	19.802.000	-	-	-	-	-	4.592.000	517.019.135	4.380.865
170	SDN KAMPUNG SAWAH	SD	Bogor Utara	1.147.712	-	395.952.288	397.100.000	269.180.538	73.275.000	51.784.700	-	-	-	-	-	-	394.240.238	2.859.762
171	SDN KAUMSARI	SD	Bogor Utara	1.066.627	-	224.433.373	225.500.000	195.428.190	21.089.880	8.574.600	-	-	-	-	-	-	225.092.670	407.330
172	SDN KAWUNGLUWUK	SD	Bogor Utara	4.590.543	-	714.809.457	719.400.000	530.572.032	110.990.800	62.077.400	-	-	-	-	-	-	703.640.232	15.759.768
173	SDN KEDUNG HALANG 1	SD	Bogor Utara	2.675.518	-	495.624.482	498.300.000	252.851.055	197.632.500	42.280.100	-	-	-	-	-	-	492.763.655	5.536.345
174	SDN KEDUNG HALANG 2	SD	Bogor Utara	2.604.731	-	381.795.269	384.400.000	194.191.052	99.020.000	65.758.000	22.500.000	-	-	-	-	-	381.469.052	2.930.948
175	SDN KEDUNG HALANG 3	SD	Bogor Utara	1.591.446	-	379.008.554	380.600.000	246.130.997	103.820.000	30.319.500	-	-	-	-	-	-	380.270.497	329.503
176	SDN KEDUNG HALANG 5	SD	Bogor Utara	155.406	-	417.244.594	417.400.000	254.965.250	107.710.100	30.734.500	22.500.000	-	-	-	-	-	415.909.850	1.490.150
177	SDN NEGLASARI	SD	Bogor Utara	320.544	-	290.079.456	290.400.000	192.583.598	64.876.900	32.935.600	-	-	-	-	-	-	290.396.098	3.902
178	SDN SELAAWI	SD	Bogor Utara	1.258.941	-	423.341.059	424.600.000	247.045.295	111.050.000	63.993.850	-	-	-	-	-	-	422.089.145	2.510.855
179	SDN SINDANGSARI BOGOR UTARA	SD	Bogor Utara	464.585	-	700.235.415	700.700.000	431.838.210	215.410.000	48.810.100	-	-	-	-	-	-	696.058.310	4.641.690
180	SDN TUNGGILIS	SD	Bogor Utara	1.401.346	-	181.198.654	182.600.000	110.367.861	47.650.000	23.896.600	-	-	-	-	-	-	181.914.461	685.539
181	SDN BUBULAK	SD	Tanah Sereal	1.504.465	-	212.995.535	214.500.000	133.474.784	59.350.000	20.209.400	-	-	-	-	-	-	213.034.184	1.465.816
182	SDN CIBADAK	SD	Tanah Sereal	142.986	-	387.557.014	387.700.000	323.069.340	39.240.500	-	22.500.000	-	-	-	-	-	384.809.840	2.890.160
183	SDN CIMANGGU	SD	Tanah Sereal	1.175.887	-	725.924.113	727.100.000	411.010.800	147.632.300	167.982.100	-	-	-	-	-	-	726.625.200	474.800
184	SDN JULANG	SD	Tanah Sereal	1.888.460	-	523.911.540	525.800.000	394.559.015	107.640.000	8.486.000	-	-	-	-	-	-	510.685.015	15.114.985
185	SDN KAYUMANIS 1	SD	Tanah Sereal	14.604.513	-	716.895.487	731.500.000	432.186.739	237.826.000	60.890.000	-	-	-	-	-	-	730.902.739	597.261

NO	NAMA SEKOLAH	JENJANG	KECAMATAN	SALDO BOS 2023	KOREKSI SALDO AWAL	PENDAPATAN	JUMLAH PENDAPATAN	BELANJA BARANG DAN JASA BOS REGULER	BEL M. PERALATAN MESIN BOS REGULER	BEL M. ASET LAINNYA BOS REGULER	BELANJA BARANG DAN JASA BOS KINERJA	BEL M. PERALATAN MESIN BOS KINERJA	BEL M. ASET LAINNYA BOS KINERJA	KOREKSI BELANJA BARANG DAN JASA BOS	KOREKSI BEL M. PERALATAN MESIN BOS	KOREKSI BEL M. ASET LAINNYA BOS	JUMLAH BELANJA	SALDO BOS
				1	2	3	4 =1+2+3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (5+6+7+8+9+10)-(11+12+13)	15 = 4 - 14
186	SDN KAYUMANIS 2	SD	Tanah Sereal	3.223.074	-	272.876.926	276.100.000	85.813.249	168.442.500	19.952.500	-	-	-	-	-	-	274.208.249	1.891.751
187	SDN KEBON PEDES 1	SD	Tanah Sereal	55.080.414	-	688.519.586	743.600.000	473.395.870	196.749.000	69.916.300	-	-	-	-	-	-	740.061.170	3.538.830
188	SDN KEBON PEDES 3	SD	Tanah Sereal	1.628.395	-	764.471.605	766.100.000	480.847.368	136.630.000	124.611.900	22.500.000	-	-	-	-	-	764.589.268	1.510.732
189	SDN KEBON PEDES 5	SD	Tanah Sereal	2.261.977	-	717.138.023	719.400.000	424.791.576	148.750.000	145.828.800	-	-	-	-	-	-	719.370.376	29.624
190	SDN KEBON PEDES 7	SD	Tanah Sereal	25.565.818	-	365.819.645	391.385.463	225.571.241	98.200.000	61.267.400	-	-	-	-	-	-	385.038.641	6.346.822
191	SDN KEDUNG BADAK 1	SD	Tanah Sereal	11.668.781	-	364.531.219	376.200.000	279.510.200	89.115.700	-	-	-	-	-	-	-	368.625.900	7.574.100
192	SDN KEDUNG BADAK 2	SD	Tanah Sereal	3.129.050	-	302.670.950	305.800.000	207.480.859	35.989.084	57.368.105	-	-	-	-	-	-	300.838.048	4.961.952
193	SDN KEDUNG BADAK 3	SD	Tanah Sereal	13.811	-	151.786.189	151.800.000	124.832.012	12.210.000	14.666.000	-	-	-	-	-	-	151.708.012	91.988
194	SDN KEDUNG BADAK 4	SD	Tanah Sereal	31.870	-	455.368.130	455.400.000	284.228.625	130.133.300	40.311.900	-	-	-	-	-	-	454.673.825	726.175
195	SDN KEDUNG JAYA 1	SD	Tanah Sereal	433.430	-	293.266.570	293.700.000	255.080.976	13.750.000	23.818.800	-	-	-	-	-	-	292.649.776	1.050.224
196	SDN KEDUNG JAYA 2	SD	Tanah Sereal	1.127.696	-	426.772.304	427.900.000	289.746.897	81.500.000	54.775.000	-	-	-	-	-	-	426.021.897	1.878.103
197	SDN KEDUNG WARINGIN	SD	Tanah Sereal	1.661.407	-	388.838.593	390.500.000	242.797.105	101.400.000	39.124.800	-	-	-	-	-	-	383.321.905	7.178.095
198	SDN KENCANA 1	SD	Tanah Sereal	5.807.189	-	494.092.811	499.900.000	384.587.080	36.850.000	53.284.700	22.500.000	-	-	-	-	-	497.221.780	2.678.220
199	SDN KENCANA 2	SD	Tanah Sereal	1.025.788	-	674.874.212	675.900.000	440.594.935	131.460.000	80.558.600	22.500.000	-	-	-	-	-	675.113.535	786.465
200	SDN KENCANA 3	SD	Tanah Sereal	8.313.997	-	516.386.003	524.700.000	278.135.450	182.512.600	45.200.100	-	-	-	-	-	-	505.848.150	18.851.850
201	SDN KUKUPU 1	SD	Tanah Sereal	4.369.938	-	430.130.062	434.500.000	160.339.680	180.156.300	81.339.300	-	-	-	4.430.000	5.604.505	-	411.800.775	22.699.225
202	SDN KUKUPU 2	SD	Tanah Sereal	6.735.087	-	563.064.913	569.800.000	396.115.010	141.100.000	28.737.800	-	-	-	-	-	-	565.952.810	3.847.190
203	SDN KUKUPU 3	SD	Tanah Sereal	814.862	-	358.885.138	359.700.000	197.176.498	136.447.800	25.975.500	-	-	-	-	-	-	359.599.798	100.202
204	SDN PONDOK RUMPUT	SD	Tanah Sereal	10.017.918	-	712.682.082	722.700.000	451.925.909	161.314.800	108.113.400	-	-	-	-	-	-	721.354.109	1.345.891
205	SDN SITUPETE	SD	Tanah Sereal	15.819.728	-	437.380.272	453.200.000	201.315.970	170.320.200	81.128.000	-	-	-	-	-	-	452.764.170	435.830
206	SDN SUKADAMAI 1	SD	Tanah Sereal	4.384.228	-	383.915.772	388.300.000	257.838.566	87.656.700	42.171.600	-	-	-	-	-	-	387.666.866	633.134
207	SDN SUKADAMAI 2	SD	Tanah Sereal	15.320.635	-	510.479.365	525.800.000	315.453.364	171.100.000	34.765.400	-	-	-	-	-	-	521.318.764	4.481.236
208	SDN SUKADAMAI 3	SD	Tanah Sereal	8.575.526	-	848.324.474	856.900.000	634.801.000	130.785.500	89.205.325	-	-	-	-	-	-	854.791.825	2.108.175
209	SDN SUKARESMI	SD	Tanah Sereal	5.483.282	-	347.016.718	352.500.000	249.290.531	34.839.692	39.808.800	22.500.000	-	-	-	-	-	346.439.023	6.060.977
210	SDN TANAH SAREAL 1	SD	Tanah Sereal	1.036.729	-	312.463.271	313.500.000	274.875.148	17.830.000	17.878.100	-	-	-	-	-	-	310.583.248	2.916.752
211	SDN TANAH SAREAL 4	SD	Tanah Sereal	2.456.877	-	318.743.123	321.200.000	201.531.044	80.472.500	32.159.300	-	-	-	-	-	-	314.162.844	7.037.156
JUMLAH jENJANG SD NEGERI				**902.450.325**	**(199.626.552)**	**84.423.161.825**	**85.125.985.598**	**55.437.002.222**	**19.609.831.174**	**8.663.335.854**	**777.370.000**	**31.070.000**	**39.060.000**	**4.670.000**	**5.604.505**	**4.592.000**	**84.542.802.745**	**583.182.853**
212	SMP NEGERI 1	SMP		34.240.595		1328099405	1.362.340.000	1.066.703.264	178.298.880	113.278.000							1.358.280.144	4.059.856
213	SMP NEGERI 2	SMP		27.629.524		1338710476	1.366.340.000	1.059.804.984	187.100.000	110.538.700							1.357.443.684	8.896.316
214	SMP NEGERI 3	SMP		37.814.960		1268225040	1.306.040.000	908.796.780	346.994.300	27.031.900							1.282.822.980	23.217.020
215	SMP NEGERI 4	SMP		13.411.100		1335968900	1.349.380.000	950.810.789	253.020.622	138.448.400							1.342.279.811	7.100.189
216	SMP NEGERI 5	SMP		46.540.377		1399639623	1.446.180.000	972.311.903	377.299.300	88.623.500							1.438.234.703	7.945.297
217	SMP NEGERI 6	SMP		11.396.212		1325923788	1.337.320.000	992.861.303	276.950.000	67.308.600							1.337.119.903	200.097
218	SMP NEGERI 7	SMP		25.109.474		1285410526	1.310.520.000	894.780.860	319.795.600	76.317.400							1.290.893.860	19.626.140
219	SMP NEGERI 8	SMP		55.123.111		1292916889	1.348.040.000	704.908.555	549.924.000	71.503.500							1.326.336.055	21.703.945
220	SMP NEGERI 9	SMP		58.470.501		1278389499	1.336.860.000	956.446.257	259.365.850	90.109.000							1.305.921.107	30.938.893
221	SMP NEGERI 10	SMP		39.313.680		1142726320	1.182.040.000	791.061.090	287.366.000	89.935.500							1.168.362.590	13.677.410
222	SMP NEGERI 11	SMP		35.232.388		1288687612	1.323.920.000	950.368.138	222.976.690	86.446.900							1.259.791.728	64.128.272
223	SMP NEGERI 12	SMP		42.088.412		1348371588	1.390.460.000	776.320.069	505.337.000	107.147.700							1.388.804.769	1.655.231
224	SMP NEGERI 13	SMP		15.373.362		1013746638	1.029.120.000	778.368.533	139.877.900	110.671.500							1.028.917.933	202.067
225	SMP NEGERI 14	SMP		32.340.862		1366939138	1.399.280.000	998.734.495	209.410.000	109.450.200							1.317.594.695	81.685.305
226	SMP NEGERI 15	SMP		21.028.418		1392831582	1.413.860.000	992.154.348	329.741.300	80.004.800							1.401.900.448	11.959.552
227	SMP NEGERI 16	SMP		33.163.934		1714836066	1.748.000.000	1.239.996.653	360.265.000	135.361.600							1.735.623.253	12.376.747
228	SMP NEGERI 17	SMP		56.816.698		1033483302	1.090.300.000	798.760.090	198.850.700	85.268.000							1.082.878.790	7.421.210
229	SMP NEGERI 18	SMP		63.628.150		1187931850	1.251.560.000	824.936.603	284.841.700	117.487.800							1.227.266.103	24.293.897
230	SMP NEGERI 19	SMP		24.896.903		1324643097	1.349.540.000	959.363.389	258.534.100	126.027.200							1.343.924.689	5.615.311
231	SMP NEGERI 20	SMP		73.654.770		1072045230	1.145.700.000	885.106.814	205.462.100	37.418.900							1.127.987.814	17.712.186
JUMLAH JENJANG SMP NEGERI				**747.273.431**	**-**	**25.739.526.569**	**26.486.800.000**	**18.502.594.917**	**5.751.411.042**	**1.868.379.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26.122.385.059**	**364.414.941**
JUMLAH KAS DANA BOS TAHUN 2024				**1.649.723.756**	**- 199.626.552**	**110.162.688.394**	**111.612.785.598**	**73.939.597.139**	**25.361.242.216**	**10.531.714.954**	**777.370.000**	**31.070.000**	**39.060.000**	**4.670.000**	**5.604.505**	**4.592.000**	**110.665.187.804**	**947.597.794**

Lampiran 3

PEMERINTAH KOTA BOGOR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
DAFTAR PENYISIHAN PIUTANG POKOK PAJAK
PER 31 DESEMBER TAHUN 2024

NO	JENIS PAJAK	PIUTANG	KRITERIA KUALITAS PIUTANG				PENYISIHAN PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN
			LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	LANCAR (0,5%)	KURANG LANCAR (10%)	DIRAGUKAN (50%)	MACET (100%)	
1	Pajak Hotel	**14.623.197.503,00**	**315.993.910,00**	**4.830.089.509,00**	**2.761.789.875,00**	**6.715.324.209,00**	**1.579.968,00**	**483.008.949,00**	**1.380.894.937,00**	**6.715.324.209,00**	**8.580.808.067**
	Pajak Hotel	14.359.247.439,00	257.336.709,00	4.667.935.299,00	2.754.275.925,00	6.679.699.506,00	1.286.683,00	466.793.529,00	1.377.137.962,00	6.679.699.506,00	8.524.917.682
	Pajak Motel	76.430.577,00	40.740.847,00	9.388.355,00	7.513.950,00	18.787.425,00	203.704,00	938.835,00	3.756.975,00	18.787.425,00	23.686.940
	Pajak Wisma Pariwisata	14.974.370,00	2.528.000,00	-	-	12.446.370,00	12.640,00	-	-	12.446.370,00	12.459.010
	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	172.545.117,00	15.388.354,00	152.765.855,00	-	4.390.908,00	76.941,00	15.276.585,00	-	4.390.908,00	19.744.435
2	Pajak Restoran	12.515.948.758,00	7.624.858.479,00	1.771.832.441,00	1.194.192.537,00	1.925.065.300,00	38.124.292,40	177.183.244,00	597.096.268,00	1.925.065.300,00	2.737.469.106
	Pajak Restoran dan Sejenisnya	7.607.108.491,00	6.314.170.256,00	636.695.069,00	330.406.271,00	325.836.894,00	31.570.851,00	63.669.506,00	165.203.135,00	325.836.894,00	586.280.389
	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.934.459.243,00	1.169.411.995,00	759.273.538,00	534.778.320,00	470.995.390,00	5.847.059,00	75.927.353,00	267.389.160,00	470.995.390,00	820.158.964
	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	796.192.760,00	100.427.304,00	344.146.613,00	177.420.779,00	174.198.064,00	502.136,00	34.414.661,00	88.710.389,00	174.198.064,00	297.825.251
	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.178.188.264,00	40.848.924,00	31.717.221,00	151.587.167,00	954.034.952,00	204.244,00	3.171.722,00	75.793.583,00	954.034.952,00	1.033.204.502
								-	-	-	-
										-	-
3	Pajak Reklame	**1.960.325.995,00**	**791.088.071,00**	**98.386.042,00**	**16.505.071,00**	**1.054.346.811,00**	3.955.440,36	9.838.604,00	8.252.535,00	1.054.346.811,00	1.076.393.391
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.583.010.700,00	697.840.689,00	96.306.967,00	-	788.863.044,00	3.489.203,00	9.630.696,00	-	788.863.044,00	801.982.944
	Pajak Reklame Kain	233.429.982,00	22.997.382,00	2.079.075,00	16.505.071,00	191.848.454,00	114.986,00	207.907,00	8.252.535,00	191.848.454,00	200.423.884
	Pajak Reklame Melekat/Stiker	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00	1.500.000
	Pajak Reklame Berjalan	142.385.313,00	70.250.000,00	-	-	72.135.313,00	351.250,00	-	-	72.135.313,00	72.486.563
	Pajak Reklame Udara							-	-	-	-
									-	-	-
4	Pajak Parkir	273.039.183,00	125.930.181,00	22.373.488,00	10.841.594,00	113.893.920,00	629.650,00	2.237.348,00	5.420.797,00	113.893.920,00	122.181.717
								-	-	-	-
5	Pajak Hiburan	**1.000.174.810,00**	**269.055.847,00**	**347.260.509,00**	**247.181.057,00**	**136.677.397,00**	**1.345.276,00**	**34.726.050,00**	**123.590.528,00**	**136.677.397,00**	**296.339.256**
	Pajak Tontonan Film	47.541.249,00	47.186.364,00	-	-	354.885,00	235.931,00	-	-	354.885,00	590.817
	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	1.318.750,00	100.000,00	1.147.500,00	-	71.250,00	500,00	114.750,00	-	71.250,00	186.500
	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	41.936.045,00	16.432.546,00	9.270.000,00	-	16.233.499,00	82.162,00	927.000,00	-	16.233.499,00	17.242.662
	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	27.601.125,00	20.101.319,00	222.000,00	-	7.277.806,00	100.506,00	22.200,00	-	7.277.806,00	7.400.513
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	750.359.240,00	112.116.869,00	305.784.180,00	224.285.480,00	108.172.711,00	560.584,00	30.578.418,00	112.142.740,00	108.172.711,00	251.454.453
	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran	131.418.401,00	73.118.749,00	30.836.829,00	22.895.577,00	4.567.246,00	365.593,00	3.083.682,00	11.447.788,00	4.567.246,00	19.464.311
6	Pajak Air Tanah	351.031.902,00	86.216.468,00	69.984.278,00	131.816.930,00	63.014.226,00	431.082,00	6.998.427,00	65.908.465,00	63.014.226,00	136.352.201
	BPHTB	99.968.550,00	99.968.550,00				499.842,00	-	-	-	499.843
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	586.951.846.128,00	109.026.844.792,00	151.885.828.022,00	127.538.973.750,00	198.500.199.564,00	545.134.223,00	15.188.582.802,00	63.769.486.875,00	198.500.199.564,00	278.003.403.465
	JUMLAH	**617.775.532.829,00**	**118.339.956.298,00**	**159.025.754.289,00**	**131.901.300.814,00**	**208.508.521.427,00**	591.699.773,00	**15.902.575.424,00**	**65.950.650.405,00**	**208.508.521.427,00**	**290.953.447.046**

-

Lampiran 4.1

REKAPITULASI

PENDAPATAN, PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG
RETRIBUSI PENYEWAAN TANAH DAN BANGUNAN
PADA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR
PER : 31 DESEMBER 2024

Pendapatan dan Piutang 2024							PENYISIHAN PIUTANG 2024									
No.	Nama Wajib Retribusi	Saldo Awal Piutang per 31 Desember 2023	Penerimaan Tahun Berjalan	Pembayaran Piutang s/d Tahun 2023	Penambahan Piutang 2024	Saldo Akhir Piutang 2024	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang				
							lancar	kurang lancar	diragukan	macet	Jumlah	0,5 %	10 %	50 %	100 %	Jumlah
1	RSUD	-	54.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Yanti Priyanti	-	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Erza Frahmadika	300.000	2.400.000	300.000	1.200.000	1.200.000	-	-	1.200.000	-	1.200.000	-	-	600.000	-	600.000
4	Evy Syarifah	5.100.000	2.400.000	5.100.000	1.200.000	1.200.000	-	-	1.200.000	-	1.200.000	-	-	600.000	-	600.000
5	Rumsiah	-	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RSUD	-	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Khaerus Sobar	900.000	2.700.000	900.000	900.000	900.000	-	900.000	-	-	900.000	-	90.000	-	-	90.000
8	Yanti Mayasari	-	3.000.000	-	600.000	600.000	-	600.000	-	-	600.000	-	60.000	-	-	60.000
9	Diki Tiandi	300.000	2.700.000	300.000	900.000	900.000	-	900.000	-	-	900.000	-	90.000	-	-	90.000
10	Linah Lianti	300.000	3.600.000	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Husin Hamid	300.000	3.300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	-	-	-	300.000	1.500	-	-	-	1.500
12	Suyitno Hasyim	-	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Achmad Sandy Sopian		2.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Iwan Suhendar	-	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	R. Sofiati		300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Maryani	900.000	3.900.000	900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Ari Ardiyansyah	1.500.000	-	1.500.000	3.600.000	3.600.000	-	-	-	3.600.000	3.600.000	-	-	-	3.600.000	3.600.000
18	R. Hardjadinata	-	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Ryan Taufik	1.200.000	-	-	-	1.200.000	-	-	-	1.200.000	1.200.000	-	-	-	1.200.000	1.200.000
20	R Widiatmoko	-	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	R Dwiansyah	300.000	3.000.000	300.000	600.000	600.000	-	600.000	-	-	600.000	-	60.000	-	-	60.000
22	Fitri Windar	-	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Badriyah Nurjanah	1.500.000	3.000.000	1.500.000	600.000	600.000	-	600.000	-	-	600.000	-	60.000	-	-	60.000
24	Deki Firmansyah	275.000	2.200.000	275.000	1.100.000	1.100.000	-	-	1.100.000	-	1.100.000	-	-	550.000	-	550.000
25	Firdaus	825.000	1.100.000	825.000	2.200.000	2.200.000	-	-	-	2.200.000	2.200.000	-	-	-	2.200.000	2.200.000
26	Ridwan Sopian	-	1.100.000	-	2.200.000	2.200.000	-	-	-	2.200.000	2.200.000	-	-	-	2.200.000	2.200.000
27	Restu Rizkiana	1.100.000	2.750.000	1.100.000	550.000	550.000	-	550.000	-	-	550.000	-	55.000	-	-	55.000
28	Anisa Sri Andini	-	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Sukirman	-	2.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Chandra Irawan	-	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Handy Rizky	-	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Rinto Supriyadi	3.850.000	-	2.750.000	3.300.000	4.400.000	-	-	-	4.400.000	4.400.000	-	-	-	4.400.000	4.400.000
33	Yonda Dava Yusfriani	-	1.375.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Suherman		1.375.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Lukman	550.000	3.025.000	550.000	275.000	275.000	275.000	-	-	-	275.000	1.375	-	-	-	1.375
36	Susanto	1.375.000	2.750.000	1.375.000	550.000	550.000	-	550.000	-	-	550.000	-	55.000	-	-	55.000
37	Abdul Aziz	1.650.000	-	-	-	1.650.000	-	-	-	1.650.000	1.650.000	-	-	-	1.650.000	1.650.000
38	Gilang Rachmat	-	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Aini Fatmawati	275.000	3.025.000	275.000	275.000	275.000	275.000	-	-	-	275.000	1.375	-	-	-	1.375
40	Oki Oktafiana	5.775.000	-	-	-	5.775.000	-	-	-	5.775.000	5.775.000	-	-	-	5.775.000	5.775.000
41	Muhammad Syachroni	-	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Nursanti	3.850.000	-	-	-	3.850.000	-	-	-	3.850.000	3.850.000	-	-	-	3.850.000	3.850.000
43	A. Jeffri Ricardo/ prog per oktober	550.000	-	550.000	2.475.000	2.475.000	-	-	-	2.475.000	2.475.000	-	-	-	2.475.000	2.475.000
44	Herna Rismawati Gultom	275.000	3.300.000	275.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Adhi Deka Mulyono	675.000	-	-	-	675.000	-	-	-	675.000	675.000	-	-	-	675.000	675.000
46	Burhanudin	-	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Renaldy R.Y (Rendy Rizki Yadi)	2.750.000	-	1.925.000	3.300.000	4.125.000	-	-	-	4.125.000	4.125.000	-	-	-	4.125.000	4.125.000
48	Agus Setiadi	550.000	2.750.000	550.000	550.000	550.000	-	550.000	-	-	550.000	-	55.000	-	-	55.000
49	Cecep Sobari	675.000	1.800.000	675.000	900.000	900.000	-	-	900.000	-	900.000	-	-	450.000	-	450.000
50	Junaidi Toha	675.000	2.025.000	675.000	675.000	675.000	-	675.000	-	-	675.000	-	67.500	-	-	67.500

Pendapatan dan Piutang 2024							PENYISIHAN PIUTANG 2024									
No.	Nama Wajib Retribusi	Saldo Awal Piutang per 31 Desember 2023	Penerimaan Tahun Berjalan	Pembayaran Piutang s/d Tahun 2023	Penambahan Piutang 2024	Saldo Akhir Piutang 2024	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang				
							lancar	kurang lancar	diragukan	macet	Jumlah	0,5 %	10 %	50 %	100 %	Jumlah
51	Wahyu Sugih Rahayu	225.000	2.475.000	225.000	225.000	225.000	225.000	-	-	-	225.000	1.125	-	-	-	1.125
52	Batara Sutarmas	675.000	-	-	-	675.000	-	-	-	675.000	675.000	-	-	-	675.000	675.000
53	Yusuf		1.575.000	-	675.000	675.000	-	675.000	-	-	675.000	-	67.500	-	-	67.500
54	Abdulloh	675.000	2.025.000	675.000	675.000	675.000	-	675.000	-	-	675.000	-	67.500	-	-	67.500
55	Roy Afrio	2.250.000	675.000	2.250.000	2.025.000	2.025.000	-	-	-	2.025.000	2.025.000	-	-	-	2.025.000	2.025.000
56	Darsa	450.000	1.800.000	450.000	900.000	900.000	-	-	900.000	-	900.000	-	-	450.000	-	450.000
57	Rian Ariansyah	1.575.000	1.125.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	-	-	-	1.575.000	1.575.000	-	-	-	1.575.000	1.575.000
58	Mulaika	225.000	2.475.000	225.000	225.000	225.000	225.000	-	-	-	225.000	1.125	-	-	-	1.125
59	Oki Darmadi	3.375.000	-	225.000	2.700.000	5.850.000	-	-	-	5.850.000	5.850.000	-	-	-	5.850.000	5.850.000
60	Zulfikar	-	2.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Yudhi Malapsa	2.025.000	675.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	-	-	-	2.025.000	2.025.000	-	-	-	2.025.000	2.025.000
62	Corneis M.Leuhery	675.000	1.575.000	675.000	1.125.000	1.125.000	-	-	1.125.000	-	1.125.000	-	-	562.500	-	562.500
63	Yaya	225.000	675.000	225.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Nuraeni		1.575.000	-	450.000	450.000	-	450.000	-	-	450.000	-	45.000	-	-	45.000
65	Iim Mutakin	900.000	1.575.000	900.000	1.125.000	1.125.000	-	-	1.125.000	-	1.125.000	-	-	562.500	-	562.500
66	Bachtiar	900.000	1.350.000	900.000	1.350.000	1.350.000	-	-	1.350.000	-	1.350.000	-	-	675.000	-	675.000
67	Ani Santika	1.350.000	225.000	1.350.000	2.475.000	2.475.000	-	-	-	2.475.000	2.475.000	-	-	-	2.475.000	2.475.000
68	Sery Elister Tarigan	-	2.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	M Aliyudin/Ani	-	2.250.000	-	450.000	450.000	-	450.000	-	-	450.000	-	45.000	-	-	45.000
70	Riko Rama Danu	-	2.475.000	-	225.000	225.000	225.000	-	-	-	225.000	1.125	-	-	-	1.125
71	ABDURAHMAN HAMID		200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Onizar	5.425.000	-	-	-	5.425.000	-	-	-	5.425.000	5.425.000	-	-	-	5.425.000	5.425.000
73	Maryani	1.800.000	1.600.000	1.800.000	800.000	800.000	-	-	800.000	-	800.000	-	-	400.000	-	400.000
74	Neni Yuliani	200.000	2.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	-	-	-	200.000	1.000	-	-	-	1.000
75	Riknal Zupri	600.000	2.000.000	600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Sudarma	-	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Ahmad Yusuf	400.000	2.000.000	400.000	400.000	400.000	-	400.000	-	-	400.000	-	40.000	-	-	40.000
78	Ratih Prihatin	-	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	M Syarifudin	-	600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Agus Suyatman		1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Ahmad Sadely	600.000	2.400.000	600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Darso program pem jan 24	3.600.000	-	-	-	3.600.000	-	-	-	3.600.000	3.600.000	-	-	-	3.600.000	3.600.000
83	Yati	-	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Danu	2.000.000	200.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	-	-	-	2.200.000	2.200.000	-	-	-	2.200.000	2.200.000
85	Iwan Setiawan	-	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Suherman	-	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Ujang Jaswil	200.000	1.800.000	200.000	600.000	600.000	-	600.000	-	-	600.000	-	60.000	-	-	60.000
88	Abdullah Nursin	1.000.000	600.000	1.000.000	800.000	800.000	-	-	-	800.000	800.000	-	-	-	800.000	800.000
89	Rima Yantisyah		600.000	-	400.000	400.000	-	400.000	-	-	400.000	-	40.000	-	-	40.000
90	Ahmad Ardhi Faisal	200.000	2.400.000	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Sadikin	1.000.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	500.000	-	500.000
92	Pamor Anugrah Indrakila	2.000.000	-	1.400.000	2.400.000	3.000.000	-	-	-	3.000.000	3.000.000	-	-	-	3.000.000	3.000.000
93	Wawan Gunawan	4.800.000	-	-	-	4.800.000	-	-	-	4.800.000	4.800.000	-	-	-	4.800.000	4.800.000
94	Natalia Wienda	-	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Kuswana	600.000	3.300.000	600.000	300.000	300.000	300.000	-	-	-	300.000	1.500	-	-	-	1.500
96	Poppy Amelia	1.800.000	300.000	1.800.000	3.300.000	3.300.000	-	-	-	3.300.000	3.300.000	-	-	-	3.300.000	3.300.000
97	Endang Sukardi	5.100.000	-	-	-	5.100.000	-	-	-	5.100.000	5.100.000	-	-	-	5.100.000	5.100.000
98	Mohamad Rusydi	300.000	3.600.000	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Andi Kurnia	2.100.000	900.000	2.100.000	2.700.000	2.700.000	-	-	-	2.700.000	2.700.000	-	-	-	2.700.000	2.700.000
100	Achmad Ishak	1.200.000	3.000.000	1.200.000	600.000	600.000	-	600.000	-	-	600.000	-	60.000	-	-	60.000
101	Hadi Sucipto	-	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Aldian Saputra	-	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Edy Suyanto	-	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Sri Elia Tuti	600.000	3.000.000	600.000	600.000	600.000	-	600.000	-	-	600.000	-	60.000	-	-	60.000
105	Nana Supriatna	-	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Mimie Sudarmi	900.000	2.700.000	900.000	900.000	900.000	-	900.000	-	-	900.000	-	90.000	-	-	90.000
107	Wawan Gunawan	600.000	3.000.000	600.000	600.000	600.000	-	600.000	-	-	600.000	-	60.000	-	-	60.000
108	Denny Setiawan	-	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Treesje Kurnaesih	600.000	600.000	600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	M. Rochmat		2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Anceu Lunin	-	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Taufik Walhidayat	900.000	1.800.000	900.000	1.800.000	1.800.000	-	-	1.800.000	-	1.800.000	-	-	900.000	-	900.000

Pendapatan dan Piutang 2024							PENYISIHAN PIUTANG 2024									
No.	Nama Wajib Retribusi	Saldo Awal Piutang per 31 Desember 2023	Penerimaan Tahun Berjalan	Pembayaran Piutang s/d Tahun 2023	Penambahan Piutang 2024	Saldo Akhir Piutang 2024	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang				
							lancar	kurang lancar	diragukan	macet	Jumlah	0,5 %	10 %	50 %	100 %	Jumlah
113	R. Widi Sofianto	600.000	1.500.000	600.000	2.100.000	2.100.000	-	-	-	2.100.000	2.100.000	-	-	-	2.100.000	2.100.000
114	Ida Rosida	1.800.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	1.200.000	-	-	1.200.000	-	1.200.000	-	-	600.000	-	600.000
115	Khaerul Saleh	-	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Eko Purwiyanto / Bantuan Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	Afif Hamdhan Ramadan	-	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	Yeti Mulyati	-	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	Rizal Jaconiah Elias	550.000	2.750.000	550.000	550.000	550.000	-	550.000	-	-	550.000	-	55.000	-	-	55.000
120	Satim	1.100.000	1.650.000	1.100.000	1.650.000	1.650.000	-	-	1.650.000	-	1.650.000	-	-	825.000	-	825.000
121	M Yofi	-	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Supriyanto	275.000	2.750.000	275.000	550.000	550.000	-	550.000	-	-	550.000	-	55.000	-	-	55.000
123	Nining Juningsih	275.000	-	-	-	275.000	-	-	-	275.000	275.000	-	-	-	275.000	275.000
124	Nur Annisa Prastiwi		1.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	Agus Fauzi		1.930.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	Erwin M. Malik	3.850.000	275.000	3.850.000	3.025.000	3.025.000	-	-	-	3.025.000	3.025.000	-	-	-	3.025.000	3.025.000
127	Ismet Sudrajat	-	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	Ade Hatta	-	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	Rizki Abdurahman	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.925.000	1.925.000	-	-	-	1.925.000	1.925.000	-	-	-	1.925.000	1.925.000
130	Tita Saputra	1.650.000	3.025.000	1.650.000	275.000	275.000	275.000	-	-	-	275.000	1.375	-	-	-	1.375
131	Dewi Ardiati	-	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	Ahmad Kosasih	1.100.000	1.925.000	1.100.000	1.375.000	1.375.000	-	-	1.375.000	-	1.375.000	-	-	687.500	-	687.500
133	Edi Kusnadi	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	-	-	1.650.000	-	1.650.000	-	-	825.000	-	825.000
134	Eka Sujana	275.000	550.000	275.000	275.000	275.000	-	-	-	275.000	275.000	-	-	-	275.000	275.000
135	Egi Pratama		1.650.000	-	275.000	275.000	275.000	-	-	-	275.000	1.375	-	-	-	1.375
136	Rasum	275.000	3.025.000	275.000	275.000	275.000	275.000	-	-	-	275.000	1.375	-	-	-	1.375
137	Syarip	-	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	Euis Sri Rahayu	275.000	2.200.000	275.000	1.100.000	1.100.000	-	-	1.100.000	-	1.100.000	-	-	550.000	-	550.000
139	Abdul Hair	-	2.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Agung Saepudin	-	2.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Yana Suryana	225.000	2.475.000	225.000	225.000	225.000	225.000	-	-	-	225.000	1.125	-	-	-	1.125
142	Mali / Sasmito	900.000	2.025.000	900.000	675.000	675.000	-	675.000	-	-	675.000	-	67.500	-	-	67.500
143	Dadi Marhadi	900.000	1.800.000	900.000	900.000	900.000	-	-	900.000	-	900.000	-	-	450.000	-	450.000
144	Emang Sulaeman	675.000	2.025.000	675.000	675.000	675.000	-	675.000	-	-	675.000	-	67.500	-	-	67.500
145	Febri Ardiansyah	4.050.000	-	1.125.000	2.700.000	5.625.000	-	-	-	5.625.000	5.625.000	-	-	-	5.625.000	5.625.000
146	Derris	-	2.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	Erpan Handoko	225.000	2.475.000	225.000	225.000	225.000	225.000	-	-	-	225.000	1.125	-	-	-	1.125
148	Mulyadi	450.000	2.250.000	450.000	450.000	450.000	-	450.000	-	-	450.000	-	45.000	-	-	45.000
149	Fathul Hayat	450.000	2.250.000	450.000	450.000	450.000	-	450.000	-	-	450.000	-	45.000	-	-	45.000
150	Sofyan Aji Wahid		2.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Mukri	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	-	-	1.350.000	-	1.350.000	-	-	675.000	-	675.000
152	Emi Suhaemi	-	2.250.000	-	450.000	450.000	-	450.000	-	-	450.000	-	45.000	-	-	45.000
153	Ahmad Nur	1.800.000	-	-	-	1.800.000	-	-	-	1.800.000	1.800.000	-	-	-	1.800.000	1.800.000
154	Merlia Delany K.	-	2.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	Iin Nur Indahsari	900.000	2.250.000	900.000	450.000	450.000	-	450.000	-	-	450.000	-	45.000	-	-	45.000
156	Ariadi/Novita Andriani	900.000	1.800.000	900.000	900.000	900.000	-	-	900.000	-	900.000	-	-	450.000	-	450.000
157	Neni Nuraeni	675.000	1.800.000	675.000	900.000	900.000	-	-	900.000	-	900.000	-	-	450.000	-	450.000
158	Rini Eka Ps	450.000	1.800.000	450.000	900.000	900.000	-	-	900.000	-	900.000	-	-	450.000	-	450.000
159	Ema Salamah	4.275.000	1.350.000	4.275.000	1.350.000	1.350.000	-	-	1.350.000	-	1.350.000	-	-	675.000	-	675.000
160	Agus Mulyadi	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	500.000	-	500.000
161	Rendi Permana	-	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	Yani Rahmawati	-	2.200.000	-	200.000	200.000	200.000	-	-	-	200.000	1.000	-	-	-	1.000
163	Mulyana	800.000	-	-	400.000	1.200.000	-	-	1.200.000	-	1.200.000	-	-	600.000	-	600.000
164	Isa Sondara		2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	Lilis Holisoh	-	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	Burhan Suryadi	600.000	1.600.000	600.000	800.000	800.000	-	-	800.000	-	800.000	-	-	400.000	-	400.000
167	Insan Kamil	2.975.000	-	-	-	2.975.000	-	-	-	2.975.000	2.975.000	-	-	-	2.975.000	2.975.000
168	Dewi Yulianingrum	400.000	800.000	400.000	1.600.000	1.600.000	-	-	-	1.600.000	1.600.000	-	-	-	1.600.000	1.600.000
169	Mas'ud Al Rahman	1.000.000	1.800.000	1.000.000	600.000	600.000	-	600.000	-	-	600.000	-	60.000	-	-	60.000
170	Dewi Henny	-	2.200.000	-	200.000	200.000	200.000	-	-	-	200.000	1.000	-	-	-	1.000
171	Nanjar Wahyudi	200.000	1.800.000	200.000	600.000	600.000	-	600.000	-	-	600.000	-	60.000	-	-	60.000
172	Agus Setia Budi	1.750.000	-	-	-	1.750.000	-	-	-	1.750.000	1.750.000	-	-	-	1.750.000	1.750.000
173	Rana Saca Kusumah	600.000	1.800.000	600.000	600.000	600.000	-	600.000	-	-	600.000	-	60.000	-	-	60.000
174	Iis Susilawati	-	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	Iskandar	200.000	2.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	-	-	-	200.000	1.000	-	-	-	1.000
176	Yayan Ahmad	800.000	1.800.000	800.000	600.000	600.000	-	600.000	-	-	600.000	-	60.000	-	-	60.000

Pendapatan dan Piutang 2024							PENYISIHAN PIUTANG 2024									
No.	Nama Wajib Retribusi	Saldo Awal Piutang per 31 Desember 2023	Penerimaan Tahun Berjalan	Pembayaran Piutang s/d Tahun 2023	Penambahan Piutang 2024	Saldo Akhir Piutang 2024	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang				
							lancar	kurang lancar	diragukan	macet	Jumlah	0,5 %	10 %	50 %	100 %	Jumlah
177	Lutfi Tirta Saputra	600.000	1.200.000	600.000	1.200.000	1.200.000	-	-	1.200.000	-	1.200.000	-	-	600.000	-	600.000
178	Junidar	1.200.000	2.000.000	1.200.000	400.000	400.000	-	400.000	-	-	400.000	-	40.000	-	-	40.000
179	Ade Mukhtar	5.125.000	-	-	-	5.125.000	-	-	-	5.125.000	5.125.000	-	-	-	5.125.000	5.125.000
180	Adi Jumadi	600.000	1.800.000	600.000	600.000	600.000	-	600.000	-	-	600.000	-	60.000	-	-	60.000
181	Abidin	600.000	1.800.000	600.000	600.000	600.000	-	600.000	-	-	600.000	-	60.000	-	-	60.000
182	Abdul Rohman	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	2.000.000	-	-	-	2.000.000	2.000.000
183	Reka Lestari	-	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	RSUD	-	120.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	Deri Aria Agustian	3.600.000	-	3.200.000	4.800.000	5.200.000	-	-	-	5.200.000	5.200.000	-	-	-	5.200.000	5.200.000
186	Erwan Hermawan	-	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	Lukman Nur hakim	-	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	Upi Raudathul Jannah	800.000	2.800.000	800.000	2.000.000	2.000.000	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	1.000.000	-	1.000.000
189	Indra Irvani Ischak	1.600.000	2.800.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	1.000.000	-	1.000.000
190	Meigosari	2.400.000	-	2.000.000	4.800.000	5.200.000	-	-	-	5.200.000	5.200.000	-	-	-	5.200.000	5.200.000
191	Rita Nurita	-	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	Rizki Ginanjar	400.000	800.000	400.000	400.000	400.000	-	-	-	400.000	400.000	-	-	-	400.000	400.000
193	Ahmad Hamdi		800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	Decy Astuti Rahayu		2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	Yeni Suryani	400.000	4.800.000	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	Yuliana	800.000	4.000.000	800.000	800.000	800.000	-	800.000	-	-	800.000	-	80.000	-	-	80.000
197	Yus Tanjung	-	4.000.000	-	800.000	800.000	-	800.000	-	-	800.000	-	80.000	-	-	80.000
198	Batara Sutarmas	-	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	Hendra Gunawan	-	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	Dian Firmansyah	-	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	Alek Lambertus	-	4.400.000	-	400.000	400.000	400.000	-	-	-	400.000	2.000	-	-	-	2.000
202	Dani Ramdani	800.000	4.000.000	800.000	800.000	800.000	-	800.000	-	-	800.000	-	80.000	-	-	80.000
203	Danu Setiawan	2.000.000	400.000	2.000.000	4.400.000	4.400.000	-	-	-	4.400.000	4.400.000	-	-	-	4.400.000	4.400.000
204	Rifka Rindasari	800.000	4.800.000	800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	Syahrir	2.000.000	2.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	1.000.000	-	1.000.000
206	Budiharjo	-	4.000.000	-	800.000	800.000	-	800.000	-	-	800.000	-	80.000	-	-	80.000
207	Mieke Ivone	3.375.000	1.500.000	3.375.000	3.000.000	3.000.000	-	-	-	3.000.000	3.000.000	-	-	-	3.000.000	3.000.000
208	Siti Maryam	-	2.625.000	-	1.875.000	1.875.000	-	-	1.875.000	-	1.875.000	-	-	937.500	-	937.500
209	Jalaludin	-	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	Mutyara Putri Pratiwi	-	1.125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	Muhamad Iqbal Saefulloh		3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	Ivan Wed Tiendy	2.250.000	-	375.000	4.500.000	6.375.000	-	-	-	6.375.000	6.375.000	-	-	-	6.375.000	6.375.000
213	Uci Sanusi	750.000	4.125.000	750.000	375.000	375.000	375.000	-	-	-	375.000	1.875	-	-	-	1.875
214	Setyo Purnomo	1.875.000	-	-	-	1.875.000	-	-	-	1.875.000	1.875.000	-	-	-	1.875.000	1.875.000
215	Dhea Reviana	-	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	Dede Yusuf	-	4.125.000	-	375.000	375.000	375.000	-	-	-	375.000	1.875	-	-	-	1.875
217	Nurhadi Siregar	-	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	Iwan Suherman	-	3.750.000	-	750.000	750.000	-	750.000	-	-	750.000	-	75.000	-	-	75.000
219	Budi Juniarsyah	4.875.000	-	1.500.000	4.500.000	7.875.000	-	-	-	7.875.000	7.875.000	-	-	-	7.875.000	7.875.000
220	Lani Zaelani	-	4.125.000	-	375.000	375.000	375.000	-	-	-	375.000	1.875	-	-	-	1.875
221	Dera Irawan	-	375.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	Nur Ikhsan Hikmahtiar		2.625.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	Halim	-	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	Muhamad Muslim	-	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	Jamaludin	-	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	Deviyanti Putri	2.250.000	750.000	2.250.000	3.750.000	3.750.000	-	-	-	3.750.000	3.750.000	-	-	-	3.750.000	3.750.000
227	Ii Syafrillah	6.375.000	-	-	4.500.000	10.875.000	-	-	-	10.875.000	10.875.000	-	-	-	10.875.000	10.875.000
228	Hendra Kariyawan	3.750.000	1.875.000	3.750.000	2.625.000	2.625.000	-	-	-	2.625.000	2.625.000	-	-	-	2.625.000	2.625.000
229	Muhamad Mahruf	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	Sunaryo		1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231	Amanto Nugroho	325.000	3.575.000	325.000	325.000	325.000	325.000	-	-	-	325.000	1.625	-	-	-	1.625
232	Sudarlina	1.300.000	2.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	-	-	1.300.000	-	1.300.000	-	-	650.000	-	650.000
233	Jakaria	-	3.575.000	-	325.000	325.000	325.000	-	-	-	325.000	1.625	-	-	-	1.625
234	Sujihaddin	-	3.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pendapatan dan Piutang 2024							PENYISIHAN PIUTANG 2024									
No.	Nama Wajib Retribusi	Saldo Awal Piutang per 31 Desember 2023	Penerimaan Tahun Berjalan	Pembayaran Piutang s/d Tahun 2023	Penambahan Piutang 2024	Saldo Akhir Piutang 2024	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang				
							lancar	kurang lancar	diragukan	macet	Jumlah	0,5 %	10 %	50 %	100 %	Jumlah
235	Harun Suwandi	-	3.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	Dudi Setiawan s	-	3.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	Raditino	-	3.575.000	-	325.000	325.000	325.000	-	-	-	325.000	1.625	-	-	-	1.625
238	Threis Joke	1.300.000	2.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	-	-	1.300.000	-	1.300.000	-	-	650.000	-	650.000
239	Endang Iskandar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	Decy Astuti Rahayu		1.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	Ahmad Hamdi		1.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	Rangga Firdaus	4.550.000	-	3.575.000	3.900.000	4.875.000	-	-	-	4.875.000	4.875.000	-	-	-	4.875.000	4.875.000
243	Romi	1.625.000	-	325.000	325.000	1.625.000	-	-	-	1.625.000	1.625.000	-	-	-	1.625.000	1.625.000
244	Zahra Amelia		2.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	Satrio Putranto	-	3.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	Herman Setiawan	5.200.000	-	-	3.900.000	9.100.000	-	-	-	9.100.000	9.100.000	-	-	-	9.100.000	9.100.000
247	Brasto Sapto Nugroho	325.000	3.575.000	325.000	325.000	325.000	325.000	-	-	-	325.000	1.625	-	-	-	1.625
248	Iswatun Hasanah	6.825.000	-	-	325.000	7.150.000	-	-	-	7.150.000	7.150.000	-	-	-	7.150.000	7.150.000
249	Suhanda		2.275.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Indra Irvani	325.000	-	-	-	325.000	-	-	-	325.000	325.000	-	-	-	325.000	325.000
251	Yohana	-	3.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	Denada Priatna	975.000	2.275.000	975.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	Fauziah Casmita Hassan		1.625.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254	Marlina	1.950.000	2.275.000	1.950.000	1.625.000	1.625.000	-	-	1.625.000	-	1.625.000	-	-	812.500	-	812.500
255	Budi Susanto	3.250.000	-	1.625.000	3.250.000	4.875.000	-	-	-	4.875.000	4.875.000	-	-	-	4.875.000	4.875.000
256	Cahyani Lestari		325.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257	Hendra Saputra	3.900.000	-	1.300.000	3.900.000	6.500.000	-	-	-	6.500.000	6.500.000	-	-	-	6.500.000	6.500.000
258	Ruswandi	2.400.000	-	-	-	2.400.000	-	-	-	2.400.000	2.400.000	-	-	-	2.400.000	2.400.000
259	Indra Sopian	600.000	3.000.000	600.000	600.000	600.000	-	600.000	-	-	600.000	-	60.000	-	-	60.000
260	Afriadi Chandra	300.000	3.300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	-	-	-	300.000	1.500	-	-	-	1.500
261	Rizal Efendi	-	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
262	Andri Zulfikar	900.000	2.400.000	900.000	1.200.000	1.200.000	-	-	1.200.000	-	1.200.000	-	-	600.000	-	600.000
263	Rudi Setiadi	600.000	3.000.000	600.000	600.000	600.000	-	600.000	-	-	600.000	-	60.000	-	-	60.000
264	Amir Suparman	-	3.300.000	-	300.000	300.000	300.000	-	-	-	300.000	1.500	-	-	-	1.500
265	Ervan Erlangga	4.150.000	-	-	-	4.150.000	-	-	-	4.150.000	4.150.000	-	-	-	4.150.000	4.150.000
266	Elly (Relokasi) / bantuan pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
267	Supriyadi	-	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	Mulyadi b. Sait	1.200.000	1.800.000	1.200.000	1.800.000	1.800.000	-	-	1.800.000	-	1.800.000	-	-	900.000	-	900.000
269	Tata Santana	600.000	2.700.000	600.000	600.000	600.000	-	600.000	-	-	600.000	-	60.000	-	-	60.000
270	Mohamad Ismet	1.200.000	2.400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-	-	1.200.000	-	1.200.000	-	-	600.000	-	600.000
271	Dodi Iskandar	900.000	2.700.000	900.000	900.000	900.000	-	900.000	-	-	900.000	-	90.000	-	-	90.000
272	Fitriyana	-	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	Aceng Suherman	1.200.000	3.000.000	1.200.000	600.000	600.000	-	600.000	-	-	600.000	-	60.000	-	-	60.000
274	Meldina Santi	2.700.000	1.200.000	2.700.000	2.400.000	2.400.000	-	-	-	2.400.000	2.400.000	-	-	-	2.400.000	2.400.000
275	Elisabeth	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
276	Suryana		3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277	Taryono	-	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
278	Saripudin	-	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279	Eko Krisna	-	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	RSUD		88.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	Tri Hartini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	Adam Damiri	-	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
283	Hamzah Dhiyaul Islam	-	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
284	Rita Susanah	-	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
285	Deni Rahman	3.400.000	-	-	2.400.000	5.800.000	-	-	-	5.800.000	5.800.000	-	-	-	5.800.000	5.800.000
286	Muhammad Sani Rafsanjani	-	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287	Ruslan A	2.000.000	2.400.000	2.000.000	2.400.000	2.400.000	-	-	2.400.000	-	2.400.000	-	-	1.200.000	-	1.200.000
288	Ratih Vuji Puspitasari	-	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289	Widiar Wahyudi	-	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Nining Sri Ningsih	800.000	4.000.000	800.000	800.000	800.000	-	800.000	-	-	800.000	-	80.000	-	-	80.000
291	Lukman	4.000.000	-	2.800.000	4.800.000	6.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000
292	Christian Iskandar	1.200.000	-	800.000	4.800.000	5.200.000	-	-	-	5.200.000	5.200.000	-	-	-	5.200.000	5.200.000
293	Inayah	-	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294	Agus Dirhamsayah		4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	Saeful Anwar	-	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	Bastian	400.000	4.400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	-	-	-	400.000	2.000	-	-	-	2.000
297	Rosdiana	800.000	4.400.000	800.000	400.000	400.000	400.000	-	-	-	400.000	2.000	-	-	-	2.000
298	Adi Mulyadi	-	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	Jejen Suhardi	2.000.000	2.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	1.000.000	-	1.000.000
300	Sri Budhi Nata	-	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301	Toni Dwi P	6.500.000	-	-	-	6.500.000	-	-	-	6.500.000	6.500.000	-	-	-	6.500.000	6.500.000
302	Tubagus Achmad	3.750.000	-	-	4.500.000	8.250.000	-	-	-	8.250.000	8.250.000	-	-	-	8.250.000	8.250.000
303	Amal Adri	2.625.000	375.000	2.625.000	4.125.000	4.125.000	-	-	-	4.125.000	4.125.000	-	-	-	4.125.000	4.125.000
304	R. Rinal Wiyasa	750.000	3.750.000	750.000	750.000	750.000	-	750.000	-	-	750.000	-	75.000	-	-	75.000
305	Enny Afriani	-	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306	Adi Rochman	2.625.000	1.875.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	-	-	-	2.625.000	2.625.000	-	-	-	2.625.000	2.625.000
307	Erik	9.000.000	-	-	4.500.000	13.500.000	-	-	-	13.500.000	13.500.000	-	-	-	13.500.000	13.500.000
308	Cep Topik	2.250.000	-	1.500.000	4.500.000	5.250.000	-	-	-	5.250.000	5.250.000	-	-	-	5.250.000	5.250.000

Pendapatan dan Piutang 2024							PENYISIHAN PIUTANG 2024									
No.	Nama Wajib Retribusi	Saldo Awal Piutang per 31 Desember 2023	Penerimaan Tahun Berjalan	Pembayaran Piutang s/d Tahun 2023	Penambahan Piutang 2024	Saldo Akhir Piutang 2024	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang				
							lancar	kurang lancar	diragukan	macet	Jumlah	0,5 %	10 %	50 %	100 %	Jumlah
309	Mardianti	1.875.000	2.625.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	-	-	1.875.000	-	1.875.000	-	-	937.500	-	937.500
310	Puri Febrina Rohmani	3.000.000	2.250.000	3.000.000	2.250.000	2.250.000	-	-	2.250.000	-	2.250.000	-	-	1.125.000	-	1.125.000
311	Dwi Mulya Subardini	1.500.000	2.250.000	1.500.000	2.250.000	2.250.000	-	-	2.250.000	-	2.250.000	-	-	1.125.000	-	1.125.000
312	Suwito	3.375.000	375.000	3.375.000	4.125.000	4.125.000	-	-	-	4.125.000	4.125.000	-	-	-	4.125.000	4.125.000
313	Arif Prabowo	3.000.000	-	-	3.750.000	6.750.000	-	-	-	6.750.000	6.750.000	-	-	-	6.750.000	6.750.000
314	Ferni Overking / bantuan pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	Widdy Nur Fadillah	-	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
316	Moch. Ferdiansyah	5.625.000	-	-	4.500.000	10.125.000	-	-	-	10.125.000	10.125.000	-	-	-	10.125.000	10.125.000
317	Ruslan B	2.250.000	1.875.000	2.250.000	2.625.000	2.625.000	-	-	-	2.625.000	2.625.000	-	-	-	2.625.000	2.625.000
318	Awaludin	750.000	3.750.000	750.000	750.000	750.000	-	750.000	-	-	750.000	-	75.000	-	-	75.000
319	Djaenudin Sape'i	375.000	4.125.000	375.000	375.000	375.000	375.000	-	-	-	375.000	1.875	-	-	-	1.875
320	Agmi Indra Nadhi	1.125.000	3.375.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	-	1.125.000	-	-	1.125.000	-	112.500	-	-	112.500
321	Arnie Sulistianto	375.000	-	-	-	375.000	-	-	-	375.000	375.000	-	-	-	375.000	375.000
322	Novita Abimanyu	-	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	S. Naibaho	650.000	2.925.000	650.000	975.000	975.000	-	975.000	-	-	975.000	-	97.500	-	-	97.500
324	Tedi Suryadi	1.625.000	1.950.000	1.625.000	1.950.000	1.950.000	-	-	1.950.000	-	1.950.000	-	-	975.000	-	975.000
325	Suci Sumantri	-	3.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
326	Niken Megawati	325.000	3.900.000	325.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327	Marsusi	1.625.000	2.275.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	-	-	1.625.000	-	1.625.000	-	-	812.500	-	812.500
328	Ervina Noorman	3.250.000	-	1.950.000	3.900.000	5.200.000	-	-	-	5.200.000	5.200.000	-	-	-	5.200.000	5.200.000
329	Titin Solehati	325.000	3.250.000	325.000	650.000	650.000	-	650.000	-	-	650.000	-	65.000	-	-	65.000
330	Irfan Hidayat	325.000	3.575.000	325.000	325.000	325.000	325.000	-	-	-	325.000	1.625	-	-	-	1.625
331	Moch Yusuf	975.000	2.600.000	975.000	1.300.000	1.300.000	-	-	1.300.000	-	1.300.000	-	-	650.000	-	650.000
332	Ernie Yulia W	-	3.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	Ari Nugroho	975.000	2.925.000	975.000	975.000	975.000	-	975.000	-	-	975.000	-	97.500	-	-	97.500
334	Tony Hatoni	650.000	3.250.000	650.000	650.000	650.000	-	650.000	-	-	650.000	-	65.000	-	-	65.000
335	Oky Setianto	2.275.000	1.950.000	2.275.000	1.950.000	1.950.000	-	-	1.950.000	-	1.950.000	-	-	975.000	-	975.000
336	Maulana H	2.275.000	975.000	2.275.000	2.925.000	2.925.000	-	-	-	2.925.000	2.925.000	-	-	-	2.925.000	2.925.000
337	Hendri Asari	650.000	2.925.000	650.000	975.000	975.000	-	975.000	-	-	975.000	-	97.500	-	-	97.500
338	Ferdian Mufti Aziz	975.000	-	-	3.900.000	4.875.000	-	-	-	4.875.000	4.875.000	-	-	-	4.875.000	4.875.000
339	Nata Agustian	325.000	3.900.000	325.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	Diego Armando	650.000	3.250.000	650.000	650.000	650.000	-	650.000	-	-	650.000	-	65.000	-	-	65.000
341	Rivaldy Rizky Syafira	650.000	1.300.000	650.000	2.600.000	2.600.000	-	-	-	2.600.000	2.600.000	-	-	-	2.600.000	2.600.000
342	Mila Indriani	1.300.000	-	325.000	3.900.000	4.875.000	-	-	-	4.875.000	4.875.000	-	-	-	4.875.000	4.875.000
343	Elis Kurnia	-	325.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344	Km. Tousin	3.000.000	2.700.000	3.000.000	900.000	900.000	-	900.000	-	-	900.000	-	90.000	-	-	90.000
345	Trisno F	3.900.000	1.200.000	3.900.000	2.400.000	2.400.000	-	-	-	2.400.000	2.400.000	-	-	-	2.400.000	2.400.000
346	Arif Firmansyah	-	2.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	Jhon Madestan	900.000	1.800.000	900.000	1.800.000	1.800.000	-	-	1.800.000	-	1.800.000	-	-	900.000	-	900.000
348	M Nurhendi Yusup	3.600.000	-	-	2.400.000	6.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000
349	Riko Andili		1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350	Ahmad Fauzi	300.000	3.300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	-	-	-	300.000	1.500	-	-	-	1.500
351	Widya Gardika	-	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	Jejen Jaenudin	-	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	Ellayana Budi Suliasih	-	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	Salam Takara	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	Sarah Yulianti	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	Rahmat		3.300.000	-	300.000	300.000	300.000	-	-	-	300.000	1.500	-	-	-	1.500
357	Eri Irawan	1.800.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000	2.400.000	-	-	-	2.400.000	2.400.000	-	-	-	2.400.000	2.400.000
358	Hendro Sulistio	-	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	Mulya Wijaya	300.000	3.300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	-	-	-	300.000	1.500	-	-	-	1.500
360	Ahmad Fauzi	2.700.000	-	-	1.800.000	4.500.000	-	-	-	4.500.000	4.500.000	-	-	-	4.500.000	4.500.000
361	Bob Buchari		1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	Yudith Supratman	-	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	Siti Martini	-	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	Yayan Sopian Alwi	2.400.000	1.500.000	2.400.000	2.100.000	2.100.000	-	-	-	2.100.000	2.100.000	-	-	-	2.100.000	2.100.000
365	Lilis Rahmawati	2.100.000	600.000	2.100.000	3.000.000	3.000.000	-	-	-	3.000.000	3.000.000	-	-	-	3.000.000	3.000.000
366	Maradona Supratman	3.300.000	300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	-	-	-	3.300.000	3.300.000	-	-	-	3.300.000	3.300.000
367	Ariadi	360.000	2.880.000	360.000	1.440.000	1.440.000	-	-	1.440.000	-	1.440.000	-	-	720.000	-	720.000
368	Inayah	-	4.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	Linah Lianti	720.000	3.960.000	720.000	360.000	360.000	360.000	-	-	-	360.000	1.800	-	-	-	1.800
370	Prajna Paramitha	1.800.000	1.440.000	1.800.000	2.880.000	2.880.000	-	-	-	2.880.000	2.880.000	-	-	-	2.880.000	2.880.000
371	Sumarni	-	3.960.000	-	360.000	360.000	360.000	-	-	-	360.000	1.800	-	-	-	1.800
372	Lilis Holisoh	-	1.980.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
373	Iwan M. Ridwan	540.000	1.620.000	540.000	540.000	540.000	-	540.000	-	-	540.000	-	54.000	-	-	54.000
374	Iwan M. Ridwan	540.000	1.620.000	540.000	540.000	540.000	-	540.000	-	-	540.000	-	54.000	-	-	54.000
375	Evy Pajriani	-	540.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376	Hendra Apriyansyah/ Nyimas		1.440.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
377	Natalia Wienda	-	360.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
378	Yena		180.000	-	180.000	180.000	180.000	-	-	-	180.000	900	-	-	-	900
379	Mia Rosmiati	-	7.200.000	-	1.440.000	1.440.000	-	1.440.000	-	-	1.440.000	-	144.000	-	-	144.000
380	Tri sulisyaningsih	-	4.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381	Ii Syafrillah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	Dr. Rosdiana Rasyidi	-	4.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pendapatan dan Piutang 2024							PENYISIHAN PIUTANG 2024									
No.	Nama Wajib Retribusi	Saldo Awal Piutang per 31 Desember 2023	Penerimaan Tahun Berjalan	Pembayaran Piutang s/d Tahun 2023	Penambahan Piutang 2024	Saldo Akhir Piutang 2024	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang				
							lancar	kurang lancar	diragukan	macet	Jumlah	0,5 %	10 %	50 %	100 %	Jumlah
383	Ferian Syahrul	-	4.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384	Neneng Sri Rahayu	-	720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	Saeful anwar	-	4.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
386	Yudhi malapsa	720.000	3.960.000	720.000	360.000	360.000	360.000	-	-	-	360.000	1.800	-	-	-	1.800
387	Puri Febrina Rohmani	1.080.000	4.320.000	1.080.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
388	Meydi Yusman	-	3.960.000	-	360.000	360.000	360.000	-	-	-	360.000	1.800	-	-	-	1.800
389	Rahmidian	-	4.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390	Erlina	-	4.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391	Lilis Rahmawati	-	360.000	-	3.960.000	3.960.000	-	-	-	3.960.000	3.960.000	-	-	-	3.960.000	3.960.000
392	Nurul Hikmah	-	720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
393	Evy Pajriani		3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394	Linah Lianti	-	-	-	2.160.000	2.160.000	-	-	-	2.160.000	2.160.000	-	-	-	2.160.000	2.160.000
395	Kosong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396	Wawang Sunarya	900.000	4.000.000	800.000	800.000	900.000	-	900.000	-	-	900.000	-	90.000	-	-	90.000
397	Pudiastuti	1.350.000	3.600.000	1.300.000	400.000	450.000	-	450.000	-	-	450.000	-	45.000	-	-	45.000
398	Dirman Akuba	1.350.000	4.000.000	1.250.000	800.000	900.000	-	900.000	-	-	900.000	-	90.000	-	-	90.000
399	Sigit Supriyono	3.150.000	-	-	-	3.150.000	-	-	-	3.150.000	3.150.000	-	-	-	3.150.000	3.150.000
400	Sahendra Putra	1.800.000	3.200.000	1.600.000	1.600.000	1.800.000	-	-	1.800.000	-	1.800.000	-	-	900.000	-	900.000
401	Tri Setyawati	12.150.000	-	-	-	12.150.000	-	-	-	12.150.000	12.150.000	-	-	-	12.150.000	12.150.000
402	Nurlis Winashanty	-	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
403	Agus S	5.400.000	-	-	-	5.400.000	-	-	-	5.400.000	5.400.000	-	-	-	5.400.000	5.400.000
404	Wahyu Agung Budi S	-	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405	Indah Nurhayati	1.350.000	3.200.000	1.200.000	1.600.000	1.750.000	-	-	1.750.000	-	1.750.000	-	-	875.000	-	875.000
406	Welly Susanti	450.000	-	450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
407	Eva Nurhaifah	-	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
408	M.Deda Wardita	2.250.000	-	-	-	2.250.000	-	-	-	2.250.000	2.250.000	-	-	-	2.250.000	2.250.000
409	Nanda Rega Trisno	1.800.000	2.400.000	1.650.000	2.400.000	2.550.000	-	-	2.550.000	-	2.550.000	-	-	1.275.000	-	1.275.000
410	Dhea Yuniarti	2.250.000	800.000	2.000.000	4.000.000	4.250.000	-	-	-	4.250.000	4.250.000	-	-	-	4.250.000	4.250.000
411	Sundari HS	4.050.000	400.000	3.850.000	4.400.000	4.600.000	-	-	-	4.600.000	4.600.000	-	-	-	4.600.000	4.600.000
412	Erwati Kusmianingsih	-	4.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413	Windarsih	3.150.000	1.300.000	3.150.000	3.600.000	3.600.000	-	-	-	3.600.000	3.600.000	-	-	-	3.600.000	3.600.000
414	Melki Sedek AS	1.800.000	-	-	-	1.800.000	-	-	-	1.800.000	1.800.000	-	-	-	1.800.000	1.800.000
415	Isnaeni Haryadi	2.700.000	4.000.000	2.600.000	800.000	900.000	-	900.000	-	-	900.000	-	90.000	-	-	90.000
416	Syukur Waluya / bantuan pemerintah	16.200.000	-	-	-	16.200.000	-	-	-	16.200.000	16.200.000	-	-	-	16.200.000	16.200.000
417	Abdurahman Shahab	-	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
418	Enok Pipin Sopiah	18.000.000	-	-	-	18.000.000	-	-	-	18.000.000	18.000.000	-	-	-	18.000.000	18.000.000
419	Nani Sumarni	450.000	1.200.000	400.000	400.000	450.000	-	-	-	450.000	450.000	-	-	-	450.000	450.000
420	Iryan Verdian	-	3.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421	Tim Tim Yanziona	3.150.000	800.000	3.150.000	4.000.000	4.000.000	-	-	-	4.000.000	4.000.000	-	-	-	4.000.000	4.000.000
422	Nani Karningsih / bantuan pemerintah	5.400.000	-	-	-	5.400.000	-	-	-	5.400.000	5.400.000	-	-	-	5.400.000	5.400.000
423	Sunarno	10.350.000	-	-	-	10.350.000	-	-	-	10.350.000	10.350.000	-	-	-	10.350.000	10.350.000
424	Rudi Firmansyah	-	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425	Aninda Ludyu Siswanti	-	3.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
426	Siti Ramlah Ali	2.700.000	800.000	2.550.000	4.000.000	4.150.000	-	-	-	4.150.000	4.150.000	-	-	-	4.150.000	4.150.000
427	Tiurma Carolina	9.900.000	-	-	4.800.000	14.700.000	-	-	-	14.700.000	14.700.000	-	-	-	14.700.000	14.700.000
428	Erman Soeid BSC	450.000	4.400.000	450.000	400.000	400.000	400.000	-	-	-	400.000	2.000	-	-	-	2.000
429	Endang Sri	17.100.000	-	-	-	17.100.000	-	-	-	17.100.000	17.100.000	-	-	-	17.100.000	17.100.000
430	Amprung Qodratulah	-	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431	Tiominar Siahaan	4.950.000	-	2.700.000	4.800.000	7.050.000	-	-	-	7.050.000	7.050.000	-	-	-	7.050.000	7.050.000
432	Fauzi Hendra Wijaya	4.050.000	-	-	-	4.050.000	-	-	-	4.050.000	4.050.000	-	-	-	4.050.000	4.050.000
433	Hendarsih Yusep	-	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	Nugraha Surya Sumantri	2.975.000	-	-	-	2.975.000	-	-	-	2.975.000	2.975.000	-	-	-	2.975.000	2.975.000
435	Arif Zulfie	2.975.000	375.000	2.725.000	4.125.000	4.375.000	-	-	-	4.375.000	4.375.000	-	-	-	4.375.000	4.375.000
436	Dolly Indriawan	-	4.125.000	-	375.000	375.000	375.000	-	-	-	375.000	1.875	-	-	-	1.875
437	Katmiati	1.275.000	3.375.000	1.125.000	1.125.000	1.275.000	-	1.275.000	-	-	1.275.000	-	127.500	-	-	127.500
438	Anindia Ponto	2.975.000	1.500.000	2.875.000	3.000.000	3.100.000	-	-	-	3.100.000	3.100.000	-	-	-	3.100.000	3.100.000
439	Yayat Fadillah	425.000	3.375.000	375.000	1.125.000	1.175.000	-	1.175.000	-	-	1.175.000	-	117.500	-	-	117.500
440	Lie Goan An	5.950.000	-	4.375.000	4.500.000	6.075.000	-	-	-	6.075.000	6.075.000	-	-	-	6.075.000	6.075.000
441	Mahendra	15.725.000	-	-	-	15.725.000	-	-	-	15.725.000	15.725.000	-	-	-	15.725.000	15.725.000
442	Yulio Mariem Putra	1.275.000	3.375.000	1.125.000	1.125.000	1.275.000	-	1.275.000	-	-	1.275.000	-	127.500	-	-	127.500
443	Nerpi Boru	6.800.000	-	-	-	6.800.000	-	-	-	6.800.000	6.800.000	-	-	-	6.800.000	6.800.000
444	Lilis Ahmawati	-	2.625.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445	Putra Milni Rizki Romadhoni	-	1.125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446	Selvina Latuihamallo	-	375.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447	Alfred	10.200.000	-	-	-	10.200.000	-	-	-	10.200.000	10.200.000	-	-	-	10.200.000	10.200.000
448	Martha H Maitha	2.975.000	-	2.975.000	4.500.000	4.500.000	-	-	-	4.500.000	4.500.000	-	-	-	4.500.000	4.500.000
449	Nofi Latuihamallo	8.075.000	-	3.825.000	4.500.000	8.750.000	-	-	-	8.750.000	8.750.000	-	-	-	8.750.000	8.750.000
450	Omar Bawmenewi	4.675.000	375.000	4.625.000	4.125.000	4.175.000	-	-	-	4.175.000	4.175.000	-	-	-	4.175.000	4.175.000
451	Ida Hamda	4.675.000	375.000	4.475.000	4.125.000	4.325.000	-	-	-	4.325.000	4.325.000	-	-	-	4.325.000	4.325.000
452	Mochamad Naufal	3.400.000	3.000.000	3.200.000	1.500.000	1.700.000	-	-	1.700.000	-	1.700.000	-	-	850.000	-	850.000
453	RANO HARISANDI MANUHUTU	-	375.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454	Iik Kresna	8.500.000	-	-	-	8.500.000	-	-	-	8.500.000	8.500.000	-	-	-	8.500.000	8.500.000
455	Sondang Ully	850.000	-	750.000	750.000	850.000	-	-	-	850.000	850.000	-	-	-	850.000	850.000

Pendapatan dan Piutang 2024							PENYISIHAN PIUTANG 2024									
No.	Nama Wajib Retribusi	Saldo Awal Piutang per 31 Desember 2023	Penerimaan Tahun Berjalan	Pembayaran Piutang s/d Tahun 2023	Penambahan Piutang 2024	Saldo Akhir Piutang 2024	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang				
							lancar	kurang lancar	diragukan	macet	Jumlah	0,5 %	10 %	50 %	100 %	Jumlah
456	Theresianti Gobel	-	3.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
457	Abdul Latif	5.100.000	-	-	-	5.100.000	-	-	-	5.100.000	5.100.000	-	-	-	5.100.000	5.100.000
458	Wulan Cahya Dwi	-	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
459	Fero Febrianto	2.550.000	3.375.000	2.450.000	1.125.000	1.225.000	-	1.225.000	-	-	1.225.000	-	122.500	-	-	122.500
460	Dedi Sunarya/Titin Sutini	19.550.000	-	1.700.000	4.500.000	22.350.000	-	-	-	22.350.000	22.350.000	-	-	-	22.350.000	22.350.000
461	E Hodijah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	Nuryati	2.550.000	-	-	-	2.550.000	-	-	-	2.550.000	2.550.000	-	-	-	2.550.000	2.550.000
463	Nike Oktavia	1.700.000	2.250.000	1.600.000	2.250.000	2.350.000	-	-	2.350.000	-	2.350.000	-	-	1.175.000	-	1.175.000
464	Ganjar Yoga Setiawan	850.000	3.375.000	800.000	1.125.000	1.175.000	-	1.175.000	-	-	1.175.000	-	117.500	-	-	117.500
465	Dasrul	850.000	3.750.000	750.000	750.000	850.000	-	850.000	-	-	850.000	-	85.000	-	-	85.000
466	Mutia Novita	1.275.000	-	-	-	1.275.000	-	-	-	1.275.000	1.275.000	-	-	-	1.275.000	1.275.000
467	Vivi Novita	-	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
468	Parlindungan Lumban Gaol	400.000	3.575.000	325.000	325.000	400.000	400.000	-	-	-	400.000	2.000	-	-	-	2.000
469	Niar Marpiana Kuswara	800.000	3.250.000	650.000	650.000	800.000	-	800.000	-	-	800.000	-	80.000	-	-	80.000
470	Kosong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	Tiyo Juli Nugroho	4.800.000	-	-	-	4.800.000	-	-	-	4.800.000	4.800.000	-	-	-	4.800.000	4.800.000
472	Achmad Mahrus Ali Pillah	-	3.250.000	-	325.000	325.000	325.000	-	-	-	325.000	1.625	-	-	-	1.625
473	Arif Syarifudin	800.000	3.250.000	650.000	650.000	800.000	-	800.000	-	-	800.000	-	80.000	-	-	80.000
474	Ari Agung Gumilar	-	-	-	3.250.000	3.250.000	-	-	-	3.250.000	3.250.000	-	-	-	3.250.000	3.250.000
475	Desyari Sagita	-	975.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
476	Kamalia	-	2.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
477	Oce Firdaus	7.600.000	-	2.000.000	3.900.000	9.500.000	-	-	-	9.500.000	9.500.000	-	-	-	9.500.000	9.500.000
478	Siti Maesaroh	-	325.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
479	Puji Hastutik	-	975.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Yulius Liambormias	1.200.000	-	-	-	1.200.000	-	-	-	1.200.000	1.200.000	-	-	-	1.200.000	1.200.000
481	Gunawan Patria	-	1.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
482	Lauksin Lainsamputty	8.800.000	-	2.400.000	3.900.000	10.300.000	-	-	-	10.300.000	10.300.000	-	-	-	10.300.000	10.300.000
483	Sony Kenova	1.600.000	650.000	1.375.000	3.250.000	3.475.000	-	-	-	3.475.000	3.475.000	-	-	-	3.475.000	3.475.000
484	Erwin Darsa Permana	400.000	3.575.000	325.000	325.000	400.000	400.000	-	-	-	400.000	2.000	-	-	-	2.000
485	Kosong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
486	Kosong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
487	Muhamad Dhori	8.400.000	-	-	-	8.400.000	-	-	-	8.400.000	8.400.000	-	-	-	8.400.000	8.400.000
488	Lucky Indria Rahayu	3.200.000	-	800.000	3.900.000	6.300.000	-	-	-	6.300.000	6.300.000	-	-	-	6.300.000	6.300.000
489	Rizki Rief Dianto	6.800.000	1.300.000	6.600.000	2.600.000	2.800.000	-	-	-	2.800.000	2.800.000	-	-	-	2.800.000	2.800.000
490	Tika Rahayu Puspita Sari	400.000	3.575.000	325.000	325.000	400.000	400.000	-	-	-	400.000	2.000	-	-	-	2.000
491	Siti Latifah	-	3.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
492	Luthfi Andriyan Saputra	800.000	975.000	650.000	650.000	800.000	-	-	-	800.000	800.000	-	-	-	800.000	800.000
493	Deti Wihartati	-	1.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
494	Madhany Bianthar Idris	2.800.000	-	-	-	2.800.000	-	-	-	2.800.000	2.800.000	-	-	-	2.800.000	2.800.000
495	Vidya Ariska Paramita Budianta	-	3.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496	Yuliah Akhriyani	1.200.000	-	1.050.000	650.000	800.000	-	-	-	800.000	800.000	-	-	-	800.000	800.000
497	Marfans Lainsamputty	15.000.000	-	-	3.600.000	18.600.000	-	-	-	18.600.000	18.600.000	-	-	-	18.600.000	18.600.000
498	Kosong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
499	Kosong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	Kosong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
501	Kosong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502	Kosong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503	Kosong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
504	Kosong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
505	Yoga Hartadi	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
506	Kosong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
507	Kosong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
508	Kosong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
509	Ferdy	6.750.000	-	-	-	6.750.000	-	-	-	6.750.000	6.750.000	-	-	-	6.750.000	6.750.000
510	Minci Selvia Delinna	-	900.000	-	2.700.000	2.700.000	-	-	-	2.700.000	2.700.000	-	-	-	2.700.000	2.700.000
511	Berlied	8.625.000	-	-		8.625.000	-	-	-	8.625.000	8.625.000	-	-	-	8.625.000	8.625.000
512	Kosong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
513	Kosong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
514	Noegroho	5.625.000	-	-	-	5.625.000	-	-	-	5.625.000	5.625.000	-	-	-	5.625.000	5.625.000
515	Nur Cholis	4.500.000	-	-	-	4.500.000	-	-	-	4.500.000	4.500.000	-	-	-	4.500.000	4.500.000
516	Yoga Hartadi		300.000		-	-										
517	Kosong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
518	Kosong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519	Kosong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520	Kosong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	Kosong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
522	Kosong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523	Kosong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
524	Kosong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
525	Komariah / bantuan pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
526	Mohamad Zaelani	900.000	4.000.000	800.000	800.000	900.000	-	900.000	-	-	900.000	-	90.000	-	-	90.000
527	Iwan Riadi	900.000	3.200.000	800.000	1.600.000	1.700.000	-	-	1.700.000	-	1.700.000	-	-	850.000	-	850.000
528	Cepi As'ri	2.250.000	2.800.000	2.000.000	2.000.000	2.250.000	-	-	2.250.000	-	2.250.000	-	-	1.125.000	-	1.125.000
529	Komariah / bantuan pemerintah	8.100.000	-	-	-	8.100.000	-	-	-	8.100.000	8.100.000	-	-	-	8.100.000	8.100.000

Pendapatan dan Piutang 2024							PENYISIHAN PIUTANG 2024									
No.	Nama Wajib Retribusi	Saldo Awal Piutang per 31 Desember 2023	Penerimaan Tahun Berjalan	Pembayaran Piutang s/d Tahun 2023	Penambahan Piutang 2024	Saldo Akhir Piutang 2024	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang				
							lancar	kurang lancar	diragukan	macet	Jumlah	0,5 %	10 %	50 %	100 %	Jumlah
530	Sunarni	-	3.200.000	-	1.600.000	1.600.000	-	-	1.600.000	-	1.600.000	-	-	800.000	-	800.000
531	Ya'man Bawamenewi	4.050.000	2.000.000	3.900.000	2.800.000	2.950.000	-	-	-	2.950.000	2.950.000	-	-	-	2.950.000	2.950.000
532	Rizcky lismonika	9.450.000	-	-	-	9.450.000	-	-	-	9.450.000	9.450.000	-	-	-	9.450.000	9.450.000
533	Deni Taryadi	3.600.000	-	1.200.000	1.200.000	3.600.000	-	-	-	3.600.000	3.600.000	-	-	-	3.600.000	3.600.000
534	Pachrudin Aziz	-	3.200.000	-	400.000	400.000	400.000	-	-	-	400.000	2.000	-	-	-	2.000
535	Hendrik Wijaya	5.850.000	400.000	5.750.000	4.400.000	4.500.000	-	-	-	4.500.000	4.500.000	-	-	-	4.500.000	4.500.000
536	Ulfalida	10.350.000	-	-	-	10.350.000	-	-	-	10.350.000	10.350.000	-	-	-	10.350.000	10.350.000
537	Sumi Puji astuti	-	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
538	Amirudin	8.550.000	-	-	-	8.550.000	-	-	-	8.550.000	8.550.000	-	-	-	8.550.000	8.550.000
539	Siti Juariah	-	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540	Asep M Ramdan	450.000	4.800.000	450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541	Yuliati Oktaria	2.250.000	3.200.000	2.100.000	1.600.000	1.750.000	-	-	1.750.000	-	1.750.000	-	-	875.000	-	875.000
542	Zulkarnaen	14.850.000	-	-	-	14.850.000	-	-	-	14.850.000	14.850.000	-	-	-	14.850.000	14.850.000
543	Christin A Anwar	-	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
544	Eka Agustin	9.000.000	-	-	-	9.000.000	-	-	-	9.000.000	9.000.000	-	-	-	9.000.000	9.000.000
545	Neneng Salbiah	3.150.000	2.400.000	2.850.000	2.400.000	2.700.000	-	-	2.700.000	-	2.700.000	-	-	1.350.000	-	1.350.000
546	M.Indra Nurjana	1.800.000	-	-	-	1.800.000	-	-	-	1.800.000	1.800.000	-	-	-	1.800.000	1.800.000
547	Agus Salim	3.600.000	400.000	3.300.000	4.400.000	4.700.000	-	-	-	4.700.000	4.700.000	-	-	-	4.700.000	4.700.000
548	Nurlaela	5.400.000	-	-	-	5.400.000	-	-	-	5.400.000	5.400.000	-	-	-	5.400.000	5.400.000
549	Kustini/ program pemerintah	14.400.000	-	-	-	14.400.000	-	-	-	14.400.000	14.400.000	-	-	-	14.400.000	14.400.000
550	Kosong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551	Suprapti	1.350.000	800.000	1.250.000	2.800.000	2.900.000	-	-	-	2.900.000	2.900.000	-	-	-	2.900.000	2.900.000
552	Rahmat Heryana	-	800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
553	Siti Musripah	1.350.000	3.600.000	1.200.000	1.200.000	1.350.000	-	1.350.000	-	-	1.350.000	-	135.000	-	-	135.000
554	Hariawan Santoso	-	5.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
555	Wahyu Fitriyanto	2.250.000	2.800.000	2.000.000	2.000.000	2.250.000	-	-	2.250.000	-	2.250.000	-	-	1.125.000	-	1.125.000
556	Rini Krisna Oktaviani	450.000	4.800.000	450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
557	Umi Sarini	1.800.000	3.600.000	1.700.000	1.200.000	1.300.000	-	1.300.000	-	-	1.300.000	-	130.000	-	-	130.000
558	Hari Kusumo	10.350.000	-	-	-	10.350.000	-	-	-	10.350.000	10.350.000	-	-	-	10.350.000	10.350.000
559	Yovie Yoviansah	900.000	4.000.000	900.000	800.000	800.000	-	800.000	-	-	800.000	-	80.000	-	-	80.000
560	Erwin Koswara	2.250.000	2.800.000	2.000.000	2.000.000	2.250.000	-	-	2.250.000	-	2.250.000	-	-	1.125.000	-	1.125.000
561	Nyayu Nancy Akib	850.000	4.125.000	850.000	375.000	375.000	375.000	-	-	-	375.000	1.875	-	-	-	1.875
562	Widiandono Savekti Putro	2.125.000	-	1.500.000	1.500.000	2.125.000	-	-	-	2.125.000	2.125.000	-	-	-	2.125.000	2.125.000
563	Wirogo	-	2.625.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564	Kosong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
565	Didimus Kamutap	3.400.000	3.000.000	3.200.000	1.500.000	1.700.000	-	-	1.700.000	-	1.700.000	-	-	850.000	-	850.000
566	Rachmat Jayeng	9.350.000	-	-	-	9.350.000	-	-	-	9.350.000	9.350.000	-	-	-	9.350.000	9.350.000
567	Muthia Dwi Novawaty	425.000	4.500.000	425.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
568	Aditya Ramandhani	425.000	-	-	-	425.000	-	-	-	425.000	425.000	-	-	-	425.000	425.000
569	Allan Desandi Liman	425.000	4.500.000	425.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	Marlina	2.975.000	-	-	-	2.975.000	-	-	-	2.975.000	2.975.000	-	-	-	2.975.000	2.975.000
571	RR Netty Trisna Herawati	1.700.000	3.375.000	1.550.000	1.125.000	1.275.000	-	1.275.000	-	-	1.275.000	-	127.500	-	-	127.500
572	Rafela Soultan	12.750.000	-	-	4.500.000	17.250.000	-	-	-	17.250.000	17.250.000	-	-	-	17.250.000	17.250.000
573	Mia Alamanda	10.200.000	1.875.000	9.950.000	2.625.000	2.875.000	-	-	-	2.875.000	2.875.000	-	-	-	2.875.000	2.875.000
574	Aditiya Putra Nugraha	5.100.000	-	-	-	5.100.000	-	-	-	5.100.000	5.100.000	-	-	-	5.100.000	5.100.000
575	Rika Regina	-	1.875.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
576	Angga Kusuma	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
577	Nisa Agniatun Nisa	850.000	4.125.000	800.000	375.000	425.000	425.000	-	-	-	425.000	2.125	-	-	-	2.125
578	Donni Muharram	850.000	3.750.000	800.000	750.000	800.000	-	800.000	-	-	800.000	-	80.000	-	-	80.000
579	Dani Radityo Gumilar	1.275.000	3.375.000	1.125.000	1.125.000	1.275.000	-	1.275.000	-	-	1.275.000	-	127.500	-	-	127.500
580	Kosong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581	Mohamad Alivudin / bantuan pemerintah	9.350.000	-	-	-	9.350.000	-	-	-	9.350.000	9.350.000	-	-	-	9.350.000	9.350.000
582	Ery Nugraha	1.275.000	3.750.000	1.175.000	750.000	850.000	-	850.000	-	-	850.000	-	85.000	-	-	85.000
583	Syarifudin	425.000	-	-	-	425.000	-	-	-	425.000	425.000	-	-	-	425.000	425.000
584	Ilham Hakim	1.275.000	1.125.000	1.225.000	3.375.000	3.425.000	-	-	-	3.425.000	3.425.000	-	-	-	3.425.000	3.425.000
585	Tedy Tangkas	1.700.000	3.375.000	1.600.000	1.125.000	1.225.000	-	1.225.000	-	-	1.225.000	-	122.500	-	-	122.500
586	Sarah Amani Umar	1.275.000	3.375.000	1.125.000	1.125.000	1.275.000	-	1.275.000	-	-	1.275.000	-	127.500	-	-	127.500
587	Afriansyah	-	850.000	-	1.125.000	1.125.000	-	-	-	1.125.000	1.125.000	-	-	-	1.125.000	1.125.000
588	Yana Muzayanah	-	2.625.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
589	Irvan Ismu Wardhana	1.700.000	3.750.000	1.600.000	750.000	850.000	-	850.000	-	-	850.000	-	85.000	-	-	85.000
590	Deni Restiono Kurniawan	1.700.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.700.000	-	-	1.700.000	-	1.700.000	-	-	850.000	-	850.000
591	Arief Wahyudin	2.125.000	3.375.000	1.975.000	1.125.000	1.275.000	-	1.275.000	-	-	1.275.000	-	127.500	-	-	127.500
592	Arie Herdianto	850.000	4.500.000	850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
593	Esti Nurzein	800.000	3.900.000	800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
594	Nani Sumarni	1.600.000	-	-	-	1.600.000	-	-	-	1.600.000	1.600.000	-	-	-	1.600.000	1.600.000
595	Widiyastuti	-	3.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596	Kosong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
597	Aas Maryati	400.000	-	-	-	400.000	-	-	-	400.000	400.000	-	-	-	400.000	400.000
598	Winoto	3.200.000	-	-	-	3.200.000	-	-	-	3.200.000	3.200.000	-	-	-	3.200.000	3.200.000
599	Lisna Widyawati	-	3.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Syarif Komarudin	-	3.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601	Berry Ciptadi	2.000.000	2.925.000	1.775.000	975.000	1.200.000	-	1.200.000	-	-	1.200.000	-	120.000	-	-	120.000
602	Kosong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
603	Kosong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pendapatan dan Piutang 2024							PENYISIHAN PIUTANG 2024									
No.	Nama Wajib Retribusi	Saldo Awal Piutang per 31 Desember 2023	Penerimaan Tahun Berjalan	Pembayaran Piutang s/d Tahun 2023	Penambahan Piutang 2024	Saldo Akhir Piutang 2024	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang				
							lancar	kurang lancar	diragukan	macet	Jumlah	0,5 %	10 %	50 %	100 %	Jumlah
604	Yuliati	400.000	3.900.000	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
605	Fajar Alamsyah, SH	400.000	4.775.000	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
606	Runiyantoro	800.000	-	-	-	800.000	-	-	-	800.000	800.000	-	-	-	800.000	800.000
607	Sri Hastuti	-	3.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
608	Nandang Suhendi	800.000	2.925.000	650.000	975.000	1.125.000	-	1.125.000	-	-	1.125.000	-	112.500	-	-	112.500
609	Tian Bahtiar	400.000	-	325.000	325.000	400.000	-	-	-	400.000	400.000	-	-	-	400.000	400.000
610	Riki Andrikni	-	2.925.000	-	650.000	650.000	-	650.000	-	-	650.000	-	65.000	-	-	65.000
611	Liponia Yugiwati	-	3.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
612	Diwan Wahyu Saputra	1.600.000	2.600.000	1.300.000	1.300.000	1.600.000	-	-	1.600.000	-	1.600.000	-	-	800.000	-	800.000
613	Wulandari	400.000	-	-	-	400.000	-	-	-	400.000	400.000	-	-	-	400.000	400.000
614	Aria Afriandi Nur Isnaeni	-	3.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
615	Rubino	1.200.000	2.925.000	975.000	975.000	1.200.000	-	1.200.000	-	-	1.200.000	-	120.000	-	-	120.000
616	Agus Suherman	1.200.000	2.925.000	975.000	975.000	1.200.000	-	1.200.000	-	-	1.200.000	-	120.000	-	-	120.000
617	Elfan August Timothy Koan	-	3.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
618	Yacob A Ismail	8.000.000	-	-	-	8.000.000	-	-	-	8.000.000	8.000.000	-	-	-	8.000.000	8.000.000
619	Galang Rambu Anarki	7.200.000	-	-	-	7.200.000	-	-	-	7.200.000	7.200.000	-	-	-	7.200.000	7.200.000
620	Janery Jacoeb Molden	-	2.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
621	Siti Maesaroh	-	1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622	Evi Virdayanti	1.200.000	3.250.000	1.050.000	650.000	800.000	-	800.000	-	-	800.000	-	80.000	-	-	80.000
623	Enjang Eadi Kurnia	400.000	-	-	-	400.000	-	-	-	400.000	400.000	-	-	-	400.000	400.000
624	Chris Richard Oberto Nassa	2.000.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	2.000.000	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	1.000.000	-	1.000.000
625	Nurjanah	3.000.000	600.000	2.850.000	3.000.000	3.150.000	-	-	-	3.150.000	3.150.000	-	-	-	3.150.000	3.150.000
626	Yulius Jambornias	-	3.975.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
627	Rina Sari	750.000	-	-	-	750.000	-	-	-	750.000	750.000	-	-	-	750.000	750.000
628	Sutisna	7.500.000	-	-	-	7.500.000	-	-	-	7.500.000	7.500.000	-	-	-	7.500.000	7.500.000
629	Kosong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	Elmus Hutabarat	4.125.000	-	-	-	4.125.000	-	-	-	4.125.000	4.125.000	-	-	-	4.125.000	4.125.000
631	Widiansa	1.125.000	2.700.000	1.125.000	900.000	900.000	-	900.000	-	-	900.000	-	90.000	-	-	90.000
632	Nurlaely	5.625.000	-	750.000	3.600.000	8.475.000	-	-	-	8.475.000	8.475.000	-	-	-	8.475.000	8.475.000
633	Agus Firmansyah	1.125.000	3.675.000	1.125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
634	Kosong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635	Restiani Puji Permatasari	-	2.325.000	-	300.000	300.000	-	-	300.000	-	300.000	-	-	150.000	-	150.000
636	Vivia / prog pem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637	Kosong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
638	Muhamad Rizki	-	2.400.000	-	1.200.000	1.200.000	-	-	1.200.000	-	1.200.000	-	-	600.000	-	600.000
639	Nova Roslinawati	-	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
640	Ockty Fitri Vianty	7.125.000	-	-	3.600.000	10.725.000	-	-	-	10.725.000	10.725.000	-	-	-	10.725.000	10.725.000
641	Juwita	1.125.000	3.000.000	975.000	600.000	750.000	-	750.000	-	-	750.000	-	75.000	-	-	75.000
642	Dani Permana	1.125.000	2.700.000	975.000	900.000	1.050.000	-	1.050.000	-	-	1.050.000	-	105.000	-	-	105.000
643	Nadda Nurkhalita	-	4.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
644	Muhammad Gosemal Setyo Wibowo	2.625.000	-	-	-	2.625.000	-	-	-	2.625.000	2.625.000	-	-	-	2.625.000	2.625.000
645	Amirudin	1.125.000	-	-	3.600.000	4.725.000	-	-	-	4.725.000	4.725.000	-	-	-	4.725.000	4.725.000
646	Ellya	1.500.000	-	375.000	3.600.000	4.725.000	-	-	-	4.725.000	4.725.000	-	-	-	4.725.000	4.725.000
647	Romy Yahya	1.875.000	-	-	-	1.875.000	-	-	-	1.875.000	1.875.000	-	-	-	1.875.000	1.875.000
648	Rusdiawan	-	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
649	Hilmi Mupid	-	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650	Agun Gunawan	-	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651	Kosong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652	Mizharun Muhamad Sastra	750.000	-	-	-	750.000	-	-	-	750.000	750.000	-	-	-	750.000	750.000
653	Putri Ayu Lestari	750.000	-	-	-	750.000	-	-	-	750.000	750.000	-	-	-	750.000	750.000
	JUMLAH	**977.860.000**	**1.551.615.000**	**381.160.000**	**516.655.000**	**1.113.355.000**	**14.845.000**	**73.270.000**	**100.265.000**	**924.975.000**	**1.113.355.000**	**74.225**	**7.327.000**	**50.132.500**	**924.975.000**	**982.508.725**

Lampiran 4.2

PEMERINTAH KOTA BOGOR
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah
(Yang dipungut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor)
Per 31 Desember 2024

No.	Nama Jenis Retribusi	Saldo Awal 31 Desember 2024	Progres Penyelesaian Piutang Pokok	Koreksi Piutang Tahun Sebelumnya	Piutang 2024	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Kriteria Kualitas Piutang				Penyisihan Piutang				Jumlah Penyisihan Piutang
							Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Lancar 0.5%	Kurang Lancar 10%	Diragukan 50%	Macet 100%	
1	**Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**														
	Tahun 2009	51.142.345,00				51.142.345,00				51.142.345,00				51.142.345,00	51.142.345,00
	Tahun 2010	60.480.365,00				60.480.365,00				60.480.365,00				60.480.365,00	60.480.365,00
	Tahun 2011	40.396.240,00				40.396.240,00				40.396.240,00				40.396.240,00	40.396.240,00
	Tahun 2012	51.275.140,00				51.275.140,00				51.275.140,00				51.275.140,00	51.275.140,00
	Tahun 2013	214.732.458,00				214.732.458,00				214.732.458,00				214.732.458,00	214.732.458,00
	Tahun 2014	1.173.203.259,00				1.173.203.259,00				1.173.203.259,00				1.173.203.259,00	1.173.203.259,00
	Tahun 2015	46.322.219,00				46.322.219,00				46.322.219,00				46.322.219,00	46.322.219,00
	Tahun 2016	41.488.028,00	-			41.488.028,00				41.488.028,00				41.488.028,00	41.488.028,00
	Tahun 2017	155.611.252,00	-			155.611.252,00				155.611.252,00				155.611.252,00	155.611.252,00
	Tahun 2018	73.280.452,00				73.280.452,00		-	-	73.280.452,00				73.280.452,00	73.280.452,00
	Tahun 2019	91.440.224,00	-			91.440.224,00				91.440.224,00				91.440.224,00	91.440.224,00
	Tahun 2020	90.733.581,00	1.755.337,00		-	88.978.244,00	-	-	-	88.978.244,00	-	-	-	88.978.244,00	88.978.244,00
	Tahun 2021	62.219.934,00	-		-	62.219.934,00				62.219.934,00	-	-	-	62.219.934,00	62.219.934,00
	Tahun 2022	39.099.917,00	-	(39.099.917,00)	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**2.191.425.414,00**	**1.755.337,00**		**-**	**2.150.570.160,00**	**-**	**-**	**-**	**2.150.570.160,00**	**-**	-	**-**	**2.150.570.160,00**	**2.150.570.160,00**
2	**Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)**														
	Tahun 2022		32.762.651,00	39.099.917,00		6.337.266,00				6.337.266,00				6.337.266,00	6.337.266,00
	Tahun 2023	723.282.153,00	707.683.137,00		-	15.599.016,00			3.143.090,00	12.455.926,00	-	-	1.571.545,00	12.455.926,00	14.027.471,00
	Tahun 2024				337.630.560,00	337.630.560,00	253.671.089,00	15.015.696,00	68.943.775,00		1.268.355,45	1.501.569,60	34.471.887,50	-	37.241.812,55
	Jumlah	**723.282.153,00**	**740.445.788,00**	**39.099.917,00**	**337.630.560,00**	**359.566.842,00**	**253.671.089,00**	**15.015.696,00**	**72.086.865,00**	**18.793.192,00**	**1.268.355,45**	**1.501.569,60**	**36.043.432,50**	**18.793.192,00**	**57.606.549,55**
3	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan (PPTR)**														
	Tahun 2009									-				-	-
	Tahun 2010									-				-	-
	Tahun 2011	51.007.926,00				51.007.926,00				51.007.926,00				51.007.926,00	51.007.926,00
	Tahun 2012	3.910.950,00				3.910.950,00				3.910.950,00				3.910.950,00	3.910.950,00
	Tahun 2013	18.079.550,00				18.079.550,00				18.079.550,00				18.079.550,00	18.079.550,00
	Tahun 2014	49.089.900,00				49.089.900,00				49.089.900,00				49.089.900,00	49.089.900,00
	Tahun 2015	18.103.650,00				18.103.650,00			-	18.103.650,00				18.103.650,00	18.103.650,00
	Tahun 2016	6.630.300,00				6.630.300,00				6.630.300,00				6.630.300,00	6.630.300,00
	Tahun 2017					-				-				-	-
	Tahun 2018					-				-				-	-
	Tahun 2019					-				-				-	-
	Tahun 2020					-				-				-	-
	Tahun 2021	1.875.750,00	561.750,00			1.314.000,00	-		-	1.314.000,00	-	-	-	1.314.000,00	1.314.000,00
	Tahun 2022	877.500,00			-	877.500,00	-			877.500,00	-	-	-	877.500,00	877.500,00
	Tahun 2023	49.866.660,00	10.622.160,00	6.226.500,00	-	33.018.000,00	-		28.019.250,00	4.998.750,00	-	-	14.009.625,00	4.998.750,00	19.008.375,00
	Tahun 2024	-	-		88.548.000,00	88.548.000,00	43.941.750,00	44.606.250,00			219.708,75	4.460.625,00	-	-	4.680.333,75
	Jumlah	**199.442.186,00**	**11.183.910,00**	**6.226.500,00**	**88.548.000,00**	**270.579.776,00**	**43.941.750,00**	**44.606.250,00**	**28.019.250,00**	**154.012.526,00**	**219.708,75**	**4.460.625,00**	**14.009.625,00**	**154.012.526,00**	**172.702.484,75**

No.	Nama Jenis Retribusi	Saldo Awal 31 Desember 2024	Progres Penyelesaian Piutang Pokok	Koreksi Piutang Tahun Sebelumnya	Piutang 2024	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Kriteria Kualitas Piutang				Penyisihan Piutang				Jumlah Penyisihan Piutang
							Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Lancar 0.5%	Kurang Lancar 10%	Diragukan 50%	Macet 100%	
4	**Retribusi Izin Gangguan tempat usaha/kegiatan (HO)**														
	Tahun 2009									-				-	-
	Tahun 2010									-				-	-
	Tahun 2011									-				-	-
	Tahun 2012									-				-	-
	Tahun 2013	21.114.150,00				21.114.150,00				21.114.150,00				21.114.150,00	21.114.150,00
	Tahun 2014	5.955.680,00				5.955.680,00				5.955.680,00				5.955.680,00	5.955.680,00
	Tahun 2015	81.109.570,00				81.109.570,00				81.109.570,00				81.109.570,00	81.109.570,00
	Tahun 2016	9.015.725,00				9.015.725,00				9.015.725,00				9.015.725,00	9.015.725,00
	Tahun 2017														-
	Tahun 2018														-
	Tahun 2019														-
	Tahun 2020														-
	Jumlah	**117.195.125,00**	-		-	**117.195.125,00**	-	-	-	**117.195.125,00**	-	-	-	**117.195.125,00**	**117.195.125,00**
5	**Retribusi Izin Pengendalian Menara**														
	Tahun 2020	139.968.000,00	-			139.968.000,00				139.968.000,00				139.968.000,00	139.968.000,00
	Tahun 2021	27.337.500,00			-	27.337.500,00	-			27.337.500,00	-	-	-	27.337.500,00	27.337.500,00
	Tahun 2022	91.489.500,00			-	91.489.500,00			-	91.489.500,00	-	-	-	91.489.500,00	91.489.500,00
	Tahun 2023	13.851.000,00	6.925.500,00		-	6.925.500,00		-	-	6.925.500,00	-	-	-	6.925.500,00	6.925.500,00
	Jumlah	**272.646.000,00**	**6.925.500,00**		-	**265.720.500,00**	-	-	-	**265.720.500,00**	-	-	-	**265.720.500,00**	**265.720.500,00**
	Jumlah	**3.503.990.878,00**	**760.310.535,00**	**45.326.417,00**	**426.178.560,00**	**3.163.632.403,00**	**297.612.839,00**	**59.621.946,00**	**100.106.115,00**	**2.706.291.503,00**	**1.488.064,20**	**5.962.194,60**	**50.053.057,50**	**2.706.291.503,00**	**2.763.794.819,30**

Lampiran 4.3

PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Subjek Nama	Piutang Saldo Akhir 2024	Tunggakan	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
				Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
1	YUSTANTO ANDRIADY	989.280	12	-	-	989.280	-	989.280	-	-	494.640	-	494.640
2	SUSWATI	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
3	MAYLIANA	1.176.144	12	-	-	1.176.144	-	1.176.144	-	-	588.072	-	588.072
4	DARNO SUJOTO	495.504	18	-	-	-	495.504	495.504	-	-	-	495.504	495.504
5	Rudolf Simatupang	1.177.848	11	-	-	1.177.848	-	1.177.848	-	-	588.924	-	588.924
6	BANTA CUT, SE	648.528	37	-	-	-	648.528	648.528	-	-	-	648.528	648.528
7	BANTA CUT, SE	648.528	48	-	-	-	648.528	648.528	-	-	-	648.528	648.528
8	BANTA CUT, SE	648.528	74	-	-	-	648.528	648.528	-	-	-	648.528	648.528
9	BANTA CUT, SE	648.528	48	-	-	-	648.528	648.528	-	-	-	648.528	648.528
10	BANTA CUT, SE	648.528	48	-	-	-	648.528	648.528	-	-	-	648.528	648.528
11	Diana Widianingsih	1.570.464	11	-	-	1.570.464	-	1.570.464	-	-	785.232	-	785.232
12	Suhardi	1.033.200	11	-	-	1.033.200	-	1.033.200	-	-	516.600	-	516.600
13	DARNO SUJOTO	395.712	37	-	-	-	395.712	395.712	-	-	-	395.712	395.712
14	DARNO SUJOTO	857.376	37	-	-	-	857.376	857.376	-	-	-	857.376	857.376
15	DARNO SUJOTO	395.712	74	-	-	-	395.712	395.712	-	-	-	395.712	395.712
16	DARNO SUJOTO	395.712	40	-	-	-	395.712	395.712	-	-	-	395.712	395.712
17	DARNO SUJOTO	857.376	40	-	-	-	857.376	857.376	-	-	-	857.376	857.376
18	DARNO SUJOTO	395.712	47	-	-	-	395.712	395.712	-	-	-	395.712	395.712
19	DARNO SUJOTO	395.712	47	-	-	-	395.712	395.712	-	-	-	395.712	395.712
20	Paryo	2.830.968	11	-	-	2.830.968	-	2.830.968	-	-	1.415.484	-	1.415.484
21	PARYO	1.505.904	37	-	-	-	1.505.904	1.505.904	-	-	-	1.505.904	1.505.904
22	PARYO	1.505.904	74	-	-	-	1.505.904	1.505.904	-	-	-	1.505.904	1.505.904
23	PARYO	1.505.904	40	-	-	-	1.505.904	1.505.904	-	-	-	1.505.904	1.505.904
24	PARYO	1.505.904	47	-	-	-	1.505.904	1.505.904	-	-	-	1.505.904	1.505.904
25	PARYO	1.505.904	47	-	-	-	1.505.904	1.505.904	-	-	-	1.505.904	1.505.904
26	PARYO	1.885.668	18	-	-	-	1.885.668	1.885.668	-	-	-	1.885.668	1.885.668
27	Darma	1.095.192	11	-	-	1.095.192	-	1.095.192	-	-	547.596	-	547.596
28	DARMA	582.576	37	-	-	-	582.576	582.576	-	-	-	582.576	582.576
29	DARMA	582.576	40	-	-	-	582.576	582.576	-	-	-	582.576	582.576
30	DARMA	582.576	47	-	-	-	582.576	582.576	-	-	-	582.576	582.576
31	DARMA	729.492	18	-	-	-	729.492	729.492	-	-	-	729.492	729.492
32	Rukanto	3.368.232	11	-	-	3.368.232	-	3.368.232	-	-	1.684.116	-	1.684.116
33	TITI.	5.550.960	48	-	-	-	5.550.960	5.550.960	-	-	-	5.550.960	5.550.960
34	AGATHA SUKARDYAH	1.308.048	37	-	-	-	1.308.048	1.308.048	-	-	-	1.308.048	1.308.048
35	AGATHA SUKARDYAH	1.308.048	48	-	-	-	1.308.048	1.308.048	-	-	-	1.308.048	1.308.048
36	AGATHA SUKARDYAH	1.308.048	48	-	-	-	1.308.048	1.308.048	-	-	-	1.308.048	1.308.048
37	Surianto	2.706.984	11	-	-	2.706.984	-	2.706.984	-	-	1.353.492	-	1.353.492
38	AGATHA SUKARDYAH	1.637.916	18	-	-	-	1.637.916	1.637.916	-	-	-	1.637.916	1.637.916
39	TITI	1.390.164	18	-	-	-	1.390.164	1.390.164	-	-	-	1.390.164	1.390.164
40	ABDUL ROJAK	1.366.560	16	-	-	-	1.366.560	1.366.560	-	-	-	1.366.560	1.366.560
41	HJ. AMINAH	1.810.692	16	-	-	-	1.810.692	1.810.692	-	-	-	1.810.692	1.810.692
42	NICO SURYADI	294.120	37	-	-	-	294.120	294.120	-	-	-	294.120	294.120
43	NICO SURYADI	1.176.480	48	-	-	-	1.176.480	1.176.480	-	-	-	1.176.480	1.176.480
44	NICO SURYADI	945.312	12	-	-	945.312	-	945.312	-	-	472.656	-	472.656

No	Subjek Nama	Piutang Saldo Akhir 2024	Tunggakan	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
				Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
45	Nico Suryadi	945.312	5	-	-	945.312	-	945.312	-	-	472.656	-	472.656
46	TUSNO SLAMET	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
47	TUSNO SLAMET	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
48	TUSNO SLAMET	589.440	18	-	-	-	589.440	589.440	-	-	-	589.440	589.440
49	TUSNO SLAMET	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
50	Tusno Slamet	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
51	MARIAM	791.424	12	-	-	791.424	-	791.424	-	-	395.712	-	395.712
52	Mariam	791.424	5	-	-	791.424	-	791.424	-	-	395.712	-	395.712
53	SENTANI	287.280	37	-	-	-	287.280	287.280	-	-	-	287.280	287.280
54	SENTANI	287.280	78	-	-	-	287.280	287.280	-	-	-	287.280	287.280
55	SENTANI	287.280	40	-	-	-	287.280	287.280	-	-	-	287.280	287.280
56	SENTANI	287.280	48	-	-	-	287.280	287.280	-	-	-	287.280	287.280
57	SENTANI	287.280	48	-	-	-	287.280	287.280	-	-	-	287.280	287.280
58	SENTANI	618.912	18	-	-	-	618.912	618.912	-	-	-	618.912	618.912
59	SENTANI	923.328	12	-	-	923.328	-	923.328	-	-	461.664	-	461.664
60	Sentani	923.328	5	-	-	923.328	-	923.328	-	-	461.664	-	461.664
61	Siti Hodijah	956.592	16	-	-	-	956.592	956.592	-	-	-	956.592	956.592
62	Ependi Sulaeman	956.592	16	-	-	-	956.592	956.592	-	-	-	956.592	956.592
63	Acih Sukarsih	1.275.456	16	-	-	-	1.275.456	1.275.456	-	-	-	1.275.456	1.275.456
64	Ijah.	535.236	16	-	-	-	535.236	535.236	-	-	-	535.236	535.236
65	H. Zaenal	398.580	16	-	-	-	398.580	398.580	-	-	-	398.580	398.580
66	Warsimin	854.100	16	-	-	-	854.100	854.100	-	-	-	854.100	854.100
67	Yadi.	136.656	16	-	-	-	136.656	136.656	-	-	-	136.656	136.656
68	Dahlan	1.275.456	16	-	-	-	1.275.456	1.275.456	-	-	-	1.275.456	1.275.456
69	Tati.	740.220	16	-	-	-	740.220	740.220	-	-	-	740.220	740.220
70	Muklis	4.327.440	16	-	-	-	4.327.440	4.327.440	-	-	-	4.327.440	4.327.440
71	Asti Hastuti	1.617.096	16	-	-	-	1.617.096	1.617.096	-	-	-	1.617.096	1.617.096
72	Dra. Sukmawati	1.368.000	48	-	-	-	1.368.000	1.368.000	-	-	-	1.368.000	1.368.000
73	SUKMAWATI, Dra	589.440	18	-	-	-	589.440	589.440	-	-	-	589.440	589.440
74	M. Junaedi	748.800	48	-	-	-	748.800	748.800	-	-	-	748.800	748.800
75	AGUS TURIYONO	659.520	12	-	-	659.520	-	659.520	-	-	329.760	-	329.760
76	AGUS TURIYONO	450.672	12	-	-	450.672	-	450.672	-	-	225.336	-	225.336
77	Agus Turiyono	659.520	5	-	-	659.520	-	659.520	-	-	329.760	-	329.760
78	Agus Turiyono	450.672	5	-	-	450.672	-	450.672	-	-	225.336	-	225.336
79	Yurniza	4.360.104	11	-	-	4.360.104	-	4.360.104	-	-	2.180.052	-	2.180.052
80	YUNIMAN LAROSA	1.747.728	48	-	-	-	1.747.728	1.747.728	-	-	-	1.747.728	1.747.728
81	BAMBANG IRAWAN / IYET	3.133.333	11	-	-	3.133.333	-	3.133.333	-	-	1.566.666,50	-	1.566.666,50
82	BAMBANG IRAWAN	6.741.000	69	-	-	-	6.741.000	6.741.000	-	-	-	6.741.000	6.741.000
83	BAMBANG IRAWAN	720.000	69	-	-	-	720.000	720.000	-	-	-	720.000	720.000
84	DODY AHDIAT,S.SOS/KETUA DEWAN PENGURUS KORPRI KOTA BOGOR	84.048.000	38	-	-	-	84.048.000	84.048.000	-	-	-	84.048.000	84.048.000
85	PT Meyto Sarana Usaha	89.458.776	48	-	-	-	89.458.776	89.458.776	-	-	-	89.458.776	89.458.776
86	SUJOTO SUTEDJA	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
87	IR. EKO BUDI RAHARJO	14.205.312	2	-	14.205.312	-	-	14.205.312	-	1.420.531,20	-	-	1.420.531,20
88	Godjali Zakaria	4.725.600	48	-	-	-	4.725.600	4.725.600	-	-	-	4.725.600	4.725.600
89	H. Mumu Hermana	2.860.050	48	-	-	-	2.860.050	2.860.050	-	-	-	2.860.050	2.860.050
90	YUSUF	963.480	18	-	-	-	963.480	963.480	-	-	-	963.480	963.480

No	Subjek Nama	Piutang Saldo Akhir 2024	Tunggakan	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
				Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
91	Maman Sudama	503.250	28	-	-	-	503.250	503.250	-	-	-	503.250	503.250
92	Maman Sudama	2.025.000	17	-	-	-	2.025.000	2.025.000	-	-	-	2.025.000	2.025.000
93	Suyatmi	9.326.250	48	-	-	-	9.326.250	9.326.250	-	-	-	9.326.250	9.326.250
94	Hartikah	331.600	48	-	-	-	331.600	331.600	-	-	-	331.600	331.600
95	Daud Maulana	165.800	48	-	-	-	165.800	165.800	-	-	-	165.800	165.800
96	Asnaria Gultom	1.183.752	13	-	-	-	1.183.752	1.183.752	-	-	-	1.183.752	1.183.752
97	Mariyah	1.492.200	48	-	-	-	1.492.200	1.492.200	-	-	-	1.492.200	1.492.200
98	Mariyah	1.492.200	48	-	-	-	1.492.200	1.492.200	-	-	-	1.492.200	1.492.200
99	Kartini	497.400	48	-	-	-	497.400	497.400	-	-	-	497.400	497.400
100	Kartini	497.400	48	-	-	-	497.400	497.400	-	-	-	497.400	497.400
101	H. Fauzi Djarmuji	3.108.750	48	-	-	-	3.108.750	3.108.750	-	-	-	3.108.750	3.108.750
102	MULYADI	88.920	48	-	-	-	88.920	88.920	-	-	-	88.920	88.920
103	MULYADI	537.864	20	-	-	-	537.864	537.864	-	-	-	537.864	537.864
104	MULHADI	249.660	40	-	-	-	249.660	249.660	-	-	-	249.660	249.660
105	MULHADI	205.200	40	-	-	-	205.200	205.200	-	-	-	205.200	205.200
106	MULHADI	205.200	48	-	-	-	205.200	205.200	-	-	-	205.200	205.200
107	MULHADI	249.660	48	-	-	-	249.660	249.660	-	-	-	249.660	249.660
108	MULHADI	249.660	48	-	-	-	249.660	249.660	-	-	-	249.660	249.660
109	Apid Suryadi	994.800	48	-	-	-	994.800	994.800	-	-	-	994.800	994.800
110	Samsul Bahri	1.554.375	48	-	-	-	1.554.375	1.554.375	-	-	-	1.554.375	1.554.375
111	Hj. Sunyani / Rian Purnawan	3.202.920	11	-	-	3.202.920	-	3.202.920	-	-	1.601.460	-	1.601.460
112	Sartono	497.400	48	-	-	-	497.400	497.400	-	-	-	497.400	497.400
113	Sudarji	2.487.000	48	-	-	-	2.487.000	2.487.000	-	-	-	2.487.000	2.487.000
114	Yuliarti	870.450	48	-	-	-	870.450	870.450	-	-	-	870.450	870.450
115	IIN KURNIA MAHASTUTI	1.343.784	16	-	-	-	1.343.784	1.343.784	-	-	-	1.343.784	1.343.784
116	NINA HERLINA	1.047.696	16	-	-	-	1.047.696	1.047.696	-	-	-	1.047.696	1.047.696
117	Saman	124.350	48	-	-	-	124.350	124.350	-	-	-	124.350	124.350
118	Rully Suharta	2.718.000	16	-	-	-	2.718.000	2.718.000	-	-	-	2.718.000	2.718.000
119	Cucun	829.000	48	-	-	-	829.000	829.000	-	-	-	829.000	829.000
120	Mad Turo	1.405.152	11	-	-	1.405.152	-	1.405.152	-	-	702.576	-	702.576
121	Utis Sutisna	2.025.000	17	-	-	-	2.025.000	2.025.000	-	-	-	2.025.000	2.025.000
122	Sudarya	393.225	48	-	-	-	393.225	393.225	-	-	-	393.225	393.225
123	H. Tatang S Ali Gozaeni	2.238.300	48	-	-	-	2.238.300	2.238.300	-	-	-	2.238.300	2.238.300
124	Odji Sastra	2.190.384	11	-	-	2.190.384	-	2.190.384	-	-	1.095.192	-	1.095.192
125	KOKO RAHMAT	879.360	37	-	-	-	879.360	879.360	-	-	-	879.360	879.360
126	KOKO RAHMAT	879.360	40	-	-	-	879.360	879.360	-	-	-	879.360	879.360
127	KOKO RAHMAT	879.360	47	-	-	-	879.360	879.360	-	-	-	879.360	879.360
128	KOKO RAHMAT	879.360	47	-	-	-	879.360	879.360	-	-	-	879.360	879.360
129	AMIN.	342.000	37	-	-	-	342.000	342.000	-	-	-	342.000	342.000
130	AMIN	1.099.200	12	-	-	1.099.200	-	1.099.200	-	-	549.600	-	549.600
131	Amin	1.099.200	5	-	-	1.099.200	-	1.099.200	-	-	549.600	-	549.600
132	Sri Gesnawati	497.400	48	-	-	-	497.400	497.400	-	-	-	497.400	497.400
133	YUSTANTO ANDRIADY	307.800	37	-	-	-	307.800	307.800	-	-	-	307.800	307.800
134	YUSTANTO ANDRIADY	307.800	48	-	-	-	307.800	307.800	-	-	-	307.800	307.800
135	YUSTANTO ANDRIADY	307.800	78	-	-	-	307.800	307.800	-	-	-	307.800	307.800
136	YUSTANTO ANDRIADY	307.800	48	-	-	-	307.800	307.800	-	-	-	307.800	307.800
137	YUSTANTO ANDRIADY	663.120	18	-	-	-	663.120	663.120	-	-	-	663.120	663.120
138	SUSWATI	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600

No	Subjek Nama	Piutang Saldo Akhir 2024	Tunggakan	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
				Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
139	SUSWATI	273.600	78	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
140	SUSWATI	273.600	40	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
141	SUSWATI	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
142	SUSWATI	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
143	SUSWATI	589.440	18	-	-	-	589.440	589.440	-	-	-	589.440	589.440
144	SRI MULYANI	6.741.000	48	-	-	-	6.741.000	6.741.000	-	-	-	6.741.000	6.741.000
145	Ida Bagus Made Astawa	2.128.392	11	-	-	2.128.392	-	2.128.392	-	-	1.064.196	-	1.064.196
146	ENDA RUHENDA	533.520	37	-	-	-	533.520	533.520	-	-	-	533.520	533.520
147	ENDA RUHENDA	533.520	40	-	-	-	533.520	533.520	-	-	-	533.520	533.520
148	ENDA RUHENDA	533.520	48	-	-	-	533.520	533.520	-	-	-	533.520	533.520
149	ENDA RUHENDA	533.520	48	-	-	-	533.520	533.520	-	-	-	533.520	533.520
150	ENCA RUHENDA	1.149.408	18	-	-	-	1.149.408	1.149.408	-	-	-	1.149.408	1.149.408
151	ENCA RUHENDA	1.714.752	12	-	-	1.714.752	-	1.714.752	-	-	857.376	-	857.376
152	Enca Ruhenda	1.714.752	5	-	-	1.714.752	-	1.714.752	-	-	857.376	-	857.376
153	UDJANG SAEPUDIN	106.020	37	-	-	-	106.020	106.020	-	-	-	106.020	106.020
154	UDJANG SAEPUDIN	106.020	78	-	-	-	106.020	106.020	-	-	-	106.020	106.020
155	UDJANG SAEPUDIN	228.408	18	-	-	-	228.408	228.408	-	-	-	228.408	228.408
156	UDJANG SAEPUDIN	340.752	12	-	-	340.752	-	340.752	-	-	170.376	-	170.376
157	Udjang Saepudin	340.752	5	-	-	340.752	-	340.752	-	-	170.376	-	170.376
158	TATANG EPENDI BIN SOHIB	589.440	18	-	-	-	589.440	589.440	-	-	-	589.440	589.440
159	TATANG EPENDI BIN SOHIB	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
160	Tatang Ependi Bin Sohib	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
161	BIBIN TUNGGAL	287.280	78	-	-	-	287.280	287.280	-	-	-	287.280	287.280
162	M. ALI	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
163	M. ALI	273.600	40	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
164	M. Ali	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
165	NANO DJOHANA	300.960	37	-	-	-	300.960	300.960	-	-	-	300.960	300.960
166	NANO DJOHANA	300.960	78	-	-	-	300.960	300.960	-	-	-	300.960	300.960
167	NANO DJOHANA	648.384	18	-	-	-	648.384	648.384	-	-	-	648.384	648.384
168	NANO DJOHANA	967.296	12	-	-	967.296	-	967.296	-	-	483.648	-	483.648
169	Nano Djohana	967.296	5	-	-	967.296	-	967.296	-	-	483.648	-	483.648
170	ROHMAN	331.740	37	-	-	-	331.740	331.740	-	-	-	331.740	331.740
171	ROHMAN	331.740	78	-	-	-	331.740	331.740	-	-	-	331.740	331.740
172	ROHMAN	331.740	40	-	-	-	331.740	331.740	-	-	-	331.740	331.740
173	ROHMAN	331.740	48	-	-	-	331.740	331.740	-	-	-	331.740	331.740
174	ROHMAN	331.740	48	-	-	-	331.740	331.740	-	-	-	331.740	331.740
175	ROHMAN	714.696	18	-	-	-	714.696	714.696	-	-	-	714.696	714.696
176	ROHMAN	1.066.224	12	-	-	1.066.224	-	1.066.224	-	-	533.112	-	533.112
177	Rohman	1.066.224	5	-	-	1.066.224	-	1.066.224	-	-	533.112	-	533.112
178	DIYANTO	228.480	48	-	-	-	228.480	228.480	-	-	-	228.480	228.480
179	DIYANTO	825.216	18	-	-	-	825.216	825.216	-	-	-	825.216	825.216
180	DIYANTO	1.231.104	12	-	-	1.231.104	-	1.231.104	-	-	615.552	-	615.552
181	Diyanto	1.231.104	5	-	-	1.231.104	-	1.231.104	-	-	615.552	-	615.552
182	TOLIP BACHTIAR	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
183	TOLIP BACHTIAR	589.440	18	-	-	-	589.440	589.440	-	-	-	589.440	589.440
184	TOLIP BACHTIAR	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
185	Tolip Bachtiar	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
186	HARJADI BOGORIND	736.800	18	-	-	-	736.800	736.800	-	-	-	736.800	736.800

No	Subjek Nama	Piutang Saldo Akhir 2024	Tunggakan	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
				Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
187	JEJEN	437.760	37	-	-	-	437.760	437.760	-	-	-	437.760	437.760
188	JEJEN	437.760	48	-	-	-	437.760	437.760	-	-	-	437.760	437.760
189	JEJEN	437.760	40	-	-	-	437.760	437.760	-	-	-	437.760	437.760
190	JEJEN	437.760	48	-	-	-	437.760	437.760	-	-	-	437.760	437.760
191	JEJEN	1.406.976	12	-	-	1.406.976	-	1.406.976	-	-	703.488	-	703.488
192	Jejen	1.406.976	5	-	-	1.406.976	-	1.406.976	-	-	703.488	-	703.488
193	SAM GUNAWAN	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
194	Sam Gunawan	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
195	UJANG JAENUDIN	448.020	78	-	-	-	448.020	448.020	-	-	-	448.020	448.020
196	UJANG JAENUDIN	1.439.952	12	-	-	1.439.952	-	1.439.952	-	-	719.976	-	719.976
197	Ujang Jaenudin	1.439.952	5	-	-	1.439.952	-	1.439.952	-	-	719.976	-	719.976
198	Iman Firmansyah	2.829.456	13	-	-	-	2.829.456	2.829.456	-	-	-	2.829.456	2.829.456
199	Tasmidi	1.446.480	11	-	-	1.446.480	-	1.446.480	-	-	723.240	-	723.240
200	TASMIDI	769.440	37	-	-	-	769.440	769.440	-	-	-	769.440	769.440
201	TASMIDI	769.440	74	-	-	-	769.440	769.440	-	-	-	769.440	769.440
202	TASMIDI	769.440	40	-	-	-	769.440	769.440	-	-	-	769.440	769.440
203	TASMIDI	769.440	47	-	-	-	769.440	769.440	-	-	-	769.440	769.440
204	TASMIDI	769.440	47	-	-	-	769.440	769.440	-	-	-	769.440	769.440
205	MANSYUR ASWIN	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
206	Mansyur Aswin	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
207	DANIEL JOHAR	290.700	37	-	-	-	290.700	290.700	-	-	-	290.700	290.700
208	DANIEL JOHAR	290.700	78	-	-	-	290.700	290.700	-	-	-	290.700	290.700
209	DANIEL JOHAR	626.280	18	-	-	-	626.280	626.280	-	-	-	626.280	626.280
210	DANIEL JOHAR	934.320	12	-	-	934.320	-	934.320	-	-	467.160	-	467.160
211	Daniel Johar	934.320	5	-	-	934.320	-	934.320	-	-	467.160	-	467.160
212	MULHADI	802.416	12	-	-	802.416	-	802.416	-	-	401.208	-	401.208
213	Mulhadi	802.416	5	-	-	802.416	-	802.416	-	-	401.208	-	401.208
214	CAHYADI	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
215	CAHYADI	273.600	78	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
216	CAHYADI	273.600	40	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
217	CAHYADI	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
218	CAHYADI	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
219	CAHYADI	589.440	18	-	-	-	589.440	589.440	-	-	-	589.440	589.440
220	CAHYADI	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
221	Cahyadi	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
222	MALIKI	465.120	37	-	-	-	465.120	465.120	-	-	-	465.120	465.120
223	MALIKI	465.120	40	-	-	-	465.120	465.120	-	-	-	465.120	465.120
224	MALIKI	465.120	48	-	-	-	465.120	465.120	-	-	-	465.120	465.120
225	MALIKI	465.120	48	-	-	-	465.120	465.120	-	-	-	465.120	465.120
226	MALIKI	1.002.048	18	-	-	-	1.002.048	1.002.048	-	-	-	1.002.048	1.002.048
227	MALIKI	1.494.912	12	-	-	1.494.912	-	1.494.912	-	-	747.456	-	747.456
228	Maliki	1.494.912	5	-	-	1.494.912	-	1.494.912	-	-	747.456	-	747.456
229	BIBIN TUNGGAL	923.328	12	-	-	923.328	-	923.328	-	-	461.664	-	461.664
230	Bibin Tunggal	923.328	5	-	-	923.328	-	923.328	-	-	461.664	-	461.664
231	DODO ALI MURTADO	136.800	37	-	-	-	136.800	136.800	-	-	-	136.800	136.800
232	DODO ALI MURTADO	136.800	48	-	-	-	136.800	136.800	-	-	-	136.800	136.800
233	DODO ALI MURTADO	136.800	48	-	-	-	136.800	136.800	-	-	-	136.800	136.800
234	DODO ALI MURTADO	294.720	18	-	-	-	294.720	294.720	-	-	-	294.720	294.720
235	HOLIL	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
236	Holil	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680

No	Subjek Nama	Piutang Saldo Akhir 2024	Tunggakan	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
				Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
237	A. Kusnadi	1.645.704	13	-	-	-	1.645.704	1.645.704	-	-	-	1.645.704	1.645.704
238	TOMMY IMANUEL	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
239	TOMMY IMANUEL	273.600	78	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
240	TOMMY IMANUEL	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
241	TOMMY IMANUEL	589.440	18	-	-	-	589.440	589.440	-	-	-	589.440	589.440
242	TOMMY IMANUEL	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
243	Tommy Imanuel	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
244	BENNY ACHAN T	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
245	Benny Achan T	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
246	JUNAEDI	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
247	JUNAEDI	140.220	37	-	-	-	140.220	140.220	-	-	-	140.220	140.220
248	JUNAEDI	140.220	78	-	-	-	140.220	140.220	-	-	-	140.220	140.220
249	JUNAEDI	140.220	40	-	-	-	140.220	140.220	-	-	-	140.220	140.220
250	JUNAEDI	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
251	JUNAEDI	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
252	JUNAEDI	140.220	48	-	-	-	140.220	140.220	-	-	-	140.220	140.220
253	JUNAEDI	140.220	48	-	-	-	140.220	140.220	-	-	-	140.220	140.220
254	JUNAEDI	302.088	18	-	-	-	302.088	302.088	-	-	-	302.088	302.088
255	JUNAEDI	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
256	Junaedi	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
257	Danil Gunawan	967.296	5	-	-	967.296	-	967.296	-	-	483.648	-	483.648
258	AGUS SN	451.080	18	-	-	-	451.080	451.080	-	-	-	451.080	451.080
259	Agus Sadidun Nasir	2.021.040	13	-	-	-	2.021.040	2.021.040	-	-	-	2.021.040	2.021.040
260	SURYA	290.700	48	-	-	-	290.700	290.700	-	-	-	290.700	290.700
261	SURYA	626.280	18	-	-	-	626.280	626.280	-	-	-	626.280	626.280
262	SURYA	934.320	12	-	-	934.320	-	934.320	-	-	467.160	-	467.160
263	Surya	934.320	5	-	-	934.320	-	934.320	-	-	467.160	-	467.160
264	ALEXANDER REZA	1.989.552	12	-	-	1.989.552	-	1.989.552	-	-	994.776	-	994.776
265	Alexander Reza	1.989.552	5	-	-	1.989.552	-	1.989.552	-	-	994.776	-	994.776
266	SUJANA LATIF ISKANDAR	273.600	78	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
267	SUPARMAN	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
268	Suparman	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
269	O M A	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
270	OMA	273.600	78	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
271	OMA	589.440	18	-	-	-	589.440	589.440	-	-	-	589.440	589.440
272	OMA	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
273	Oma	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
274	TJIA WE NIO	872.100	48	-	-	-	872.100	872.100	-	-	-	872.100	872.100
275	Tjia We Nio	934.320	5	-	-	934.320	-	934.320	-	-	467.160	-	467.160
276	BAMBANG	273.600	78	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
277	BAMBANG	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
278	BAMBANG	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
279	BANGBANG	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
280	Bangbang	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
281	NGADIYO	549.600	12	-	-	549.600	-	549.600	-	-	274.800	-	274.800
282	Ngadiyo	549.600	5	-	-	549.600	-	549.600	-	-	274.800	-	274.800
283	JAKARIA	589.440	18	-	-	-	589.440	589.440	-	-	-	589.440	589.440
284	JAKARIA	294.720	18	-	-	-	294.720	294.720	-	-	-	294.720	294.720
285	JAKARIA	439.680	12	-	-	439.680	-	439.680	-	-	219.840	-	219.840

No	Subjek Nama	Piutang Saldo Akhir 2024	Tunggakan	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
				Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
286	Jakaria	439.680	5	-	-	439.680	-	439.680	-	-	219.840	-	219.840
287	JUNAEDI	450.672	12	-	-	450.672	-	450.672	-	-	225.336	-	225.336
288	Junaedi	450.672	5	-	-	450.672	-	450.672	-	-	225.336	-	225.336
289	ACANG KURNIAWAN	923.328	12	-	-	923.328	-	923.328	-	-	461.664	-	461.664
290	Acang Kurniawan	923.328	5	-	-	923.328	-	923.328	-	-	461.664	-	461.664
291	SUKARNO	256.800	37	-	-	-	256.800	256.800	-	-	-	256.800	256.800
292	SUKARNO	770.400	48	-	-	-	770.400	770.400	-	-	-	770.400	770.400
293	SUKARNO	256.800	40	-	-	-	256.800	256.800	-	-	-	256.800	256.800
294	SUKARNO	788.376	18	-	-	-	788.376	788.376	-	-	-	788.376	788.376
295	LEPI GUNAWAN	506.160	37	-	-	-	506.160	506.160	-	-	-	506.160	506.160
296	LEPI GUNAWAN	506.160	40	-	-	-	506.160	506.160	-	-	-	506.160	506.160
297	LEPI GUNAWAN	1.626.816	12	-	-	1.626.816	-	1.626.816	-	-	813.408	-	813.408
298	Mila Nopiyanti	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
299	Muhyidin	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
300	M.Rana	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
301	Harjadi Bogorind	1.099.200	5	-	-	1.099.200	-	1.099.200	-	-	549.600	-	549.600
302	Lay Oen Niang	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
303	Jejen Jaenal	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
304	Sinta	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
305	Lepi Gunawan	1.626.816	5	-	-	1.626.816	-	1.626.816	-	-	813.408	-	813.408
306	Padmasari Penny	1.703.760	5	-	-	1.703.760	-	1.703.760	-	-	851.880	-	851.880
307	Supriadi	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
308	Jaji	901.344	5	-	-	901.344	-	901.344	-	-	450.672	-	450.672
309	M. Yahya Suherman	1.099.200	5	-	-	1.099.200	-	1.099.200	-	-	549.600	-	549.600
310	Yustanto Andriady	989.280	5	-	-	989.280	-	989.280	-	-	494.640	-	494.640
311	Suswati	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
312	Mayliana	1.176.144	5	-	-	1.176.144	-	1.176.144	-	-	588.072	-	588.072
313	Erika, Se	2.110.464	5	-	-	2.110.464	-	2.110.464	-	-	1.055.232	-	1.055.232
314	APIT HAPIFUDIN	136.800	37	-	-	-	136.800	136.800	-	-	-	136.800	136.800
315	APIT HAPIFUDIN	136.800	40	-	-	-	136.800	136.800	-	-	-	136.800	136.800
316	APIT HAPIFUDIN	136.800	48	-	-	-	136.800	136.800	-	-	-	136.800	136.800
317	APIT HAPIFUDIN	136.800	48	-	-	-	136.800	136.800	-	-	-	136.800	136.800
318	APIT HAPIFUDIN	439.680	12	-	-	439.680	-	439.680	-	-	219.840	-	219.840
319	Apit Hapifudin	439.680	5	-	-	439.680	-	439.680	-	-	219.840	-	219.840
320	WAHYU HIDAYAT	437.760	37	-	-	-	437.760	437.760	-	-	-	437.760	437.760
321	WAHYU HIDAYAT	437.760	78	-	-	-	437.760	437.760	-	-	-	437.760	437.760
322	WAHYU HIDAYAT	437.760	40	-	-	-	437.760	437.760	-	-	-	437.760	437.760
323	WAHYU HIDAYAT	437.760	48	-	-	-	437.760	437.760	-	-	-	437.760	437.760
324	WAHYU HIDAYAT	437.760	48	-	-	-	437.760	437.760	-	-	-	437.760	437.760
325	WAHYU HIDAYAT	943.104	18	-	-	-	943.104	943.104	-	-	-	943.104	943.104
326	WAHYU HIDAYAT	1.406.976	12	-	-	1.406.976	-	1.406.976	-	-	703.488	-	703.488
327	Wahyu Hidayat	1.406.976	5	-	-	1.406.976	-	1.406.976	-	-	703.488	-	703.488
328	IDRIS	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
329	IDRIS	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
330	IDRIS	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
331	Idris	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
332	SITI LESTARI	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
333	SITI LESTARI	273.600	40	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
334	SITI LESTARI	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
335	SITI LESTARI	589.440	18	-	-	-	589.440	589.440	-	-	-	589.440	589.440

No	Subjek Nama	Piutang Saldo Akhir 2024	Tunggakan	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
				Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
336	SITI LESTARI	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
337	Siti Lestari	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
338	S. MULYANA	192.000	37	-	-	-	192.000	192.000	-	-	-	192.000	192.000
339	S. MULYANA	589.440	20	-	-	-	589.440	589.440	-	-	-	589.440	589.440
340	S. MULYANA	192.000	78	-	-	-	192.000	192.000	-	-	-	192.000	192.000
341	S. MULYANA	192.000	40	-	-	-	192.000	192.000	-	-	-	192.000	192.000
342	S. MULYANA	192.000	48	-	-	-	192.000	192.000	-	-	-	192.000	192.000
343	S. MULYANA	192.000	48	-	-	-	192.000	192.000	-	-	-	192.000	192.000
344	S. MULYANA	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
345	S. Mulyana	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
346	YUDI WIJAYA	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
347	YUDI WIJAYA	273.600	40	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
348	YUDI WIJAYA	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
349	YUDI WIJAYA	589.440	18	-	-	-	589.440	589.440	-	-	-	589.440	589.440
350	YUDI WIJAYA	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
351	Yudi Wijaya	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
352	SUPRIADI	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
353	DAMIS	589.440	18	-	-	-	589.440	589.440	-	-	-	589.440	589.440
354	ICAH	725.472	12	-	-	725.472	-	725.472	-	-	362.736	-	362.736
355	DAMIS	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
356	Icah	725.472	5	-	-	725.472	-	725.472	-	-	362.736	-	362.736
357	Damis	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
358	Hotben Gultom	1.443.600	13	-	-	-	1.443.600	1.443.600	-	-	-	1.443.600	1.443.600
359	MIHARJA	1.406.976	12	-	-	1.406.976	-	1.406.976	-	-	703.488	-	703.488
360	Miharja	1.406.976	5	-	-	1.406.976	-	1.406.976	-	-	703.488	-	703.488
361	RONY BADRU KAMAL	376.200	37	-	-	-	376.200	376.200	-	-	-	376.200	376.200
362	RONY BADRU KAMAL	376.200	48	-	-	-	376.200	376.200	-	-	-	376.200	376.200
363	RONY BADRU KAMAL	376.200	40	-	-	-	376.200	376.200	-	-	-	376.200	376.200
364	RONY BADRU KAMAL	376.200	48	-	-	-	376.200	376.200	-	-	-	376.200	376.200
365	RONY BADRU KAMAL	376.200	48	-	-	-	376.200	376.200	-	-	-	376.200	376.200
366	RONY BADRUL KAMAL	810.480	18	-	-	-	810.480	810.480	-	-	-	810.480	810.480
367	RONY BADRUL KAMAL	1.209.120	12	-	-	1.209.120	-	1.209.120	-	-	604.560	-	604.560
368	Rony Badrul Kamal	1.209.120	5	-	-	1.209.120	-	1.209.120	-	-	604.560	-	604.560
369	M. Irfan Asmara	1.443.600	13	-	-	-	1.443.600	1.443.600	-	-	-	1.443.600	1.443.600
370	JAJI	280.440	78	-	-	-	280.440	280.440	-	-	-	280.440	280.440
371	AGUS BUNYAMIN	287.280	37	-	-	-	287.280	287.280	-	-	-	287.280	287.280
372	AGUS BUNYAMIN	287.280	78	-	-	-	287.280	287.280	-	-	-	287.280	287.280
373	AGUS BUNYAMIN	287.280	40	-	-	-	287.280	287.280	-	-	-	287.280	287.280
374	AGUS BUNYAMIN	287.280	48	-	-	-	287.280	287.280	-	-	-	287.280	287.280
375	AGUS BUNYAMIN	287.280	48	-	-	-	287.280	287.280	-	-	-	287.280	287.280
376	AGUS BUNYAMIN	618.912	18	-	-	-	618.912	618.912	-	-	-	618.912	618.912
377	AGUS BUNYAMIN	923.328	12	-	-	923.328	-	923.328	-	-	461.664	-	461.664
378	Agus Bunyamin	923.328	5	-	-	923.328	-	923.328	-	-	461.664	-	461.664
379	SURIYAWAM/SITI HAWA	359.100	37	-	-	-	359.100	359.100	-	-	-	359.100	359.100
380	SURIYAWAM/SITI HAWA	359.100	78	-	-	-	359.100	359.100	-	-	-	359.100	359.100
381	SURIYAWAM/SITI HAWA	359.100	40	-	-	-	359.100	359.100	-	-	-	359.100	359.100

No	Subjek Nama	Piutang Saldo Akhir 2024	Tunggakan	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
				Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
382	SURIYAWAM/SITI HAWA	359.100	48	-	-	-	359.100	359.100	-	-	-	359.100	359.100
383	SURIYAWAM/SITI HAWA	359.100	48	-	-	-	359.100	359.100	-	-	-	359.100	359.100
384	SURIYAWAN / SUKARNA	773.640	18	-	-	-	773.640	773.640	-	-	-	773.640	773.640
385	SURIYAWAN / SUKARNA	1.154.160	12	-	-	1.154.160	-	1.154.160	-	-	577.080	-	577.080
386	Sukarna	1.154.160	5	-	-	1.154.160	-	1.154.160	-	-	577.080	-	577.080
387	JAMALUDIN	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
388	JAMALUDIN	273.600	78	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
389	JAMALUDIN	273.600	40	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
390	JAMALUDIN	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
391	JAMALUDIN	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
392	JAMALUDIN	589.440	18	-	-	-	589.440	589.440	-	-	-	589.440	589.440
393	JAMALUDIN	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
394	Jamaludin	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
395	ICAH/WAHYUDIN	192.000	37	-	-	-	192.000	192.000	-	-	-	192.000	192.000
396	ICAH/WAHYUDIN	192.000	40	-	-	-	192.000	192.000	-	-	-	192.000	192.000
397	ICAH	486.288	18	-	-	-	486.288	486.288	-	-	-	486.288	486.288
398	INDRA DJAYA DINATA	589.440	18	-	-	-	589.440	589.440	-	-	-	589.440	589.440
399	INDRA DJAJA DINATA	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
400	Indra Djaja Dinata	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
401	HAMIDAN	506.160	37	-	-	-	506.160	506.160	-	-	-	506.160	506.160
402	HAMIDAN	506.160	78	-	-	-	506.160	506.160	-	-	-	506.160	506.160
403	HAMIDAN	506.160	40	-	-	-	506.160	506.160	-	-	-	506.160	506.160
404	HAMIDAN	506.160	48	-	-	-	506.160	506.160	-	-	-	506.160	506.160
405	HAMIDAN	506.160	48	-	-	-	506.160	506.160	-	-	-	506.160	506.160
406	HAMIDAN	1.090.464	18	-	-	-	1.090.464	1.090.464	-	-	-	1.090.464	1.090.464
407	HAMIDAN	1.626.816	12	-	-	1.626.816	-	1.626.816	-	-	813.408	-	813.408
408	Hamidan	1.626.816	5	-	-	1.626.816	-	1.626.816	-	-	813.408	-	813.408
409	SUTRISNO	439.680	12	-	-	439.680	-	439.680	-	-	219.840	-	219.840
410	HOK TJUI	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
411	HOK TJUI	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
412	HOK TJUI	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
413	HOK TJUI	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
414	Hok Tjui	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
415	SUKIRJO	663.120	18	-	-	-	663.120	663.120	-	-	-	663.120	663.120
416	SUKIRJO	989.280	12	-	-	989.280	-	989.280	-	-	494.640	-	494.640
417	Sukirjo	989.280	5	-	-	989.280	-	989.280	-	-	494.640	-	494.640
418	AGUNG WIRJANTO	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
419	Agung Wirjanto	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
420	LULUS WIDINUGROHO	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
421	LULUS WIDINUGROHO	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
422	LULUS WIDINUGROHO	589.440	18	-	-	-	589.440	589.440	-	-	-	589.440	589.440
423	LULUS WIDINUGROHO	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
424	Lulus Widinugroho	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
425	PADOLLY	817.848	20	-	-	-	817.848	817.848	-	-	-	817.848	817.848
426	PADOLLY	1.220.112	12	-	-	1.220.112	-	1.220.112	-	-	610.056	-	610.056
427	Padolly	1.220.112	5	-	-	1.220.112	-	1.220.112	-	-	610.056	-	610.056

No	Subjek Nama	Piutang Saldo Akhir 2024	Tunggakan	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
				Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
428	HASBULLAH	439.680	12	-	-	439.680	-	439.680	-	-	219.840	-	219.840
429	Hasbullah	439.680	5	-	-	439.680	-	439.680	-	-	219.840	-	219.840
430	FERRY HERMAN	290.700	37	-	-	-	290.700	290.700	-	-	-	290.700	290.700
431	FERRY HERMAN	290.700	48	-	-	-	290.700	290.700	-	-	-	290.700	290.700
432	FERRY HERMAN	290.700	78	-	-	-	290.700	290.700	-	-	-	290.700	290.700
433	FERRY HERMAN	626.280	18	-	-	-	626.280	626.280	-	-	-	626.280	626.280
434	FERRY HERMAN	934.320	12	-	-	934.320	-	934.320	-	-	467.160	-	467.160
435	Ferry Herman	934.320	5	-	-	934.320	-	934.320	-	-	467.160	-	467.160
436	YUDIE HARIYANTO	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
437	YUDIE HARIYANTO	589.440	18	-	-	-	589.440	589.440	-	-	-	589.440	589.440
438	YUDIE HARIYANTO	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
439	Yudie Hariyanto	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
440	Bambang Gentawan	901.344	5	-	-	901.344	-	901.344	-	-	450.672	-	450.672
441	ISKANDAR DK	218.880	37	-	-	-	218.880	218.880	-	-	-	218.880	218.880
442	ISKANDAR DK	218.880	78	-	-	-	218.880	218.880	-	-	-	218.880	218.880
443	ISKANDAR DK	218.880	48	-	-	-	218.880	218.880	-	-	-	218.880	218.880
444	ISKANDAR DK	218.880	48	-	-	-	218.880	218.880	-	-	-	218.880	218.880
445	MISNANDAR DARMA KUSUMAH	703.488	12	-	-	703.488	-	703.488	-	-	351.744	-	351.744
446	Misnandar Darma Kusumah	703.488	5	-	-	703.488	-	703.488	-	-	351.744	-	351.744
447	ISKANDAR DK	471.552	18	-	-	-	471.552	471.552	-	-	-	471.552	471.552
448	UJANG RUHIYAT	232.560	37	-	-	-	232.560	232.560	-	-	-	232.560	232.560
449	UJANG RUHIYAT	232.560	48	-	-	-	232.560	232.560	-	-	-	232.560	232.560
450	UJANG RUHIYAT	232.560	48	-	-	-	232.560	232.560	-	-	-	232.560	232.560
451	UJANG RUHIYAT	501.024	18	-	-	-	501.024	501.024	-	-	-	501.024	501.024
452	UJANG RUHIYAT	747.456	12	-	-	747.456	-	747.456	-	-	373.728	-	373.728
453	Ujang Ruhiyat	747.456	5	-	-	747.456	-	747.456	-	-	373.728	-	373.728
454	RONIH RUDIANTO	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
455	Ronih Rudianto	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
456	ANTA SASMITA	437.760	37	-	-	-	437.760	437.760	-	-	-	437.760	437.760
457	DEDE PERMANA	218.880	78	-	-	-	218.880	218.880	-	-	-	218.880	218.880
458	DEDE PERMANA	471.552	18	-	-	-	471.552	471.552	-	-	-	471.552	471.552
459	DEDE PERMANA	703.488	12	-	-	703.488	-	703.488	-	-	351.744	-	351.744
460	Dede Permana	703.488	5	-	-	703.488	-	703.488	-	-	351.744	-	351.744
461	F.V. PARIAN	273.600	40	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
462	ZAENAL ALIPIN	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
463	Zaenal Alipin	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
464	HERNAWATI	342.000	37	-	-	-	342.000	342.000	-	-	-	342.000	342.000
465	HERNAWATI	18.000	48	-	-	-	18.000	18.000	-	-	-	18.000	18.000
466	HERNAWATI	342.000	78	-	-	-	342.000	342.000	-	-	-	342.000	342.000
467	HERNAWATI	324.000	40	-	-	-	324.000	324.000	-	-	-	324.000	324.000
468	HERNAWATI	342.000	48	-	-	-	342.000	342.000	-	-	-	342.000	342.000
469	HERNAWATI	342.000	48	-	-	-	342.000	342.000	-	-	-	342.000	342.000
470	HERNAWATI	736.800	18	-	-	-	736.800	736.800	-	-	-	736.800	736.800
471	HERNAWATI	1.099.200	12	-	-	1.099.200	-	1.099.200	-	-	549.600	-	549.600
472	Hernawati	1.099.200	5	-	-	1.099.200	-	1.099.200	-	-	549.600	-	549.600
473	JAKARIA	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
474	JAKARIA	136.800	48	-	-	-	136.800	136.800	-	-	-	136.800	136.800
475	JAKARIA	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
476	JAKARIA	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600

No	Subjek Nama	Piutang Saldo Akhir 2024	Tunggakan	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
				Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
477	JAKARIA	136.800	48	-	-	-	136.800	136.800	-	-	-	136.800	136.800
478	JAKARIA	136.800	48	-	-	-	136.800	136.800	-	-	-	136.800	136.800
479	JAKARIA	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
480	Jakaria	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
481	SYAFRUDIN ZULKARNAEN	1.000.272	12	-	-	1.000.272	-	1.000.272	-	-	500.136	-	500.136
482	Sutrisno	1.549.800	11	-	-	1.549.800	-	1.549.800	-	-	774.900	-	774.900
483	Roni Setiawan	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
484	JOHAN MANAJANG	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
485	Johan Manajang	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
486	Hisar Tampubolon	1.443.600	13	-	-	-	1.443.600	1.443.600	-	-	-	1.443.600	1.443.600
487	YAYASAN BARAYA BANGUN BANGSA	11.469.600	48	-	-	-	11.469.600	11.469.600	-	-	-	11.469.600	11.469.600
488	M. RAHMAT	136.800	37	-	-	-	136.800	136.800	-	-	-	136.800	136.800
489	M. RAHMAT	136.800	78	-	-	-	136.800	136.800	-	-	-	136.800	136.800
490	MARIANI/ZULSAAD	290.700	37	-	-	-	290.700	290.700	-	-	-	290.700	290.700
491	MARIANI/ZULSAAD	290.700	78	-	-	-	290.700	290.700	-	-	-	290.700	290.700
492	MARIANI/ZULSAAD	290.700	40	-	-	-	290.700	290.700	-	-	-	290.700	290.700
493	MARIANI/ZULSAAD	290.700	48	-	-	-	290.700	290.700	-	-	-	290.700	290.700
494	MARIANI	626.280	18	-	-	-	626.280	626.280	-	-	-	626.280	626.280
495	MARIANI	934.320	12	-	-	934.320	-	934.320	-	-	467.160	-	467.160
496	Mariani	934.320	5	-	-	934.320	-	934.320	-	-	467.160	-	467.160
497	LUKMAN HERIYANTO	923.328	12	-	-	923.328	-	923.328	-	-	461.664	-	461.664
498	Lukman Heriyanto	923.328	5	-	-	923.328	-	923.328	-	-	461.664	-	461.664
499	Hinsa Tambunan	2.396.376	13	-	-	-	2.396.376	2.396.376	-	-	-	2.396.376	2.396.376
500	NURLELA	485.640	40	-	-	-	485.640	485.640	-	-	-	485.640	485.640
501	NURLELA	1.046.256	18	-	-	-	1.046.256	1.046.256	-	-	-	1.046.256	1.046.256
502	NA KIM SIONG	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
503	KARIM	300.960	78	-	-	-	300.960	300.960	-	-	-	300.960	300.960
504	KARIM	967.296	12	-	-	967.296	-	967.296	-	-	483.648	-	483.648
505	Karim	967.296	5	-	-	967.296	-	967.296	-	-	483.648	-	483.648
506	WARDINATA TASMIDI	318.060	78	-	-	-	318.060	318.060	-	-	-	318.060	318.060
507	WARDINATA TASMIDI	685.224	18	-	-	-	685.224	685.224	-	-	-	685.224	685.224
508	WATDINATA TARMIDI	1.022.256	12	-	-	1.022.256	-	1.022.256	-	-	511.128	-	511.128
509	Watdinata Tarmidi	1.022.256	5	-	-	1.022.256	-	1.022.256	-	-	511.128	-	511.128
510	Bosur H Tambunan	2.482.992	13	-	-	-	2.482.992	2.482.992	-	-	-	2.482.992	2.482.992
511	ARIE AGUSTINUS	766.272	20	-	-	-	766.272	766.272	-	-	-	766.272	766.272
512	ARIE AGUSTINUS	1.143.168	12	-	-	1.143.168	-	1.143.168	-	-	571.584	-	571.584
513	Arie Agustinus	1.143.168	5	-	-	1.143.168	-	1.143.168	-	-	571.584	-	571.584
514	JIMMY ARYAMARDA	136.800	37	-	-	-	136.800	136.800	-	-	-	136.800	136.800
515	JIMY ARYAMARDA	439.680	12	-	-	439.680	-	439.680	-	-	219.840	-	219.840
516	Jimy Aryamarda	439.680	5	-	-	439.680	-	439.680	-	-	219.840	-	219.840
517	MISBAH	246.240	78	-	-	-	246.240	246.240	-	-	-	246.240	246.240
518	MISBAH	791.424	12	-	-	791.424	-	791.424	-	-	395.712	-	395.712
519	Misbah	791.424	5	-	-	791.424	-	791.424	-	-	395.712	-	395.712
520	MUCH AFANDI	283.860	48	-	-	-	283.860	283.860	-	-	-	283.860	283.860
521	MUCH AFANDI	283.860	78	-	-	-	283.860	283.860	-	-	-	283.860	283.860
522	MUCH AFANDI	283.860	40	-	-	-	283.860	283.860	-	-	-	283.860	283.860
523	MUCH AFANDI	283.860	48	-	-	-	283.860	283.860	-	-	-	283.860	283.860
524	MUCH AFANDI	283.860	48	-	-	-	283.860	283.860	-	-	-	283.860	283.860

No	Subjek Nama	Piutang Saldo Akhir 2024	Tunggakan	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
				Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
525	MUCH AFNGADI	611.544	18	-	-	-	611.544	611.544	-	-	-	611.544	611.544
526	MUCH AFNGADI	912.336	12	-	-	912.336	-	912.336	-	-	456.168	-	456.168
527	IWAN SALMAN RIDWAN	1.330.032	12	-	-	1.330.032	-	1.330.032	-	-	665.016	-	665.016
528	Iwan Salman Ridwan	1.330.032	5	-	-	1.330.032	-	1.330.032	-	-	665.016	-	665.016
529	WALDY	779.760	37	-	-	-	779.760	779.760	-	-	-	779.760	779.760
530	WALDY	779.760	78	-	-	-	779.760	779.760	-	-	-	779.760	779.760
531	WALDY	779.760	40	-	-	-	779.760	779.760	-	-	-	779.760	779.760
532	WALDY	779.760	48	-	-	-	779.760	779.760	-	-	-	779.760	779.760
533	WALDY	779.760	48	-	-	-	779.760	779.760	-	-	-	779.760	779.760
534	WALIDI	1.679.904	18	-	-	-	1.679.904	1.679.904	-	-	-	1.679.904	1.679.904
535	WALDY	2.506.176	12	-	-	2.506.176	-	2.506.176	-	-	1.253.088	-	1.253.088
536	Waldy	2.506.176	5	-	-	2.506.176	-	2.506.176	-	-	1.253.088	-	1.253.088
537	NICO POLIS	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
538	NICO POLIS	273.600	78	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
539	NICO POLIS	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
540	NICO POLIS	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
541	NICO POLIS	589.440	18	-	-	-	589.440	589.440	-	-	-	589.440	589.440
542	NICO POLIS	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
543	Nico Polis	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
544	H. ABDUROQMAN TOHIR/SALIM	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
545	ISHAK	300.960	37	-	-	-	300.960	300.960	-	-	-	300.960	300.960
546	ISHAK	300.960	78	-	-	-	300.960	300.960	-	-	-	300.960	300.960
547	ISHAK	300.960	48	-	-	-	300.960	300.960	-	-	-	300.960	300.960
548	ISHAK	300.960	48	-	-	-	300.960	300.960	-	-	-	300.960	300.960
549	ISHAK	967.296	12	-	-	967.296	-	967.296	-	-	483.648	-	483.648
550	Ishak	967.296	5	-	-	967.296	-	967.296	-	-	483.648	-	483.648
551	SOLEHUDIN	439.680	12	-	-	439.680	-	439.680	-	-	219.840	-	219.840
552	Solehudin	439.680	5	-	-	439.680	-	439.680	-	-	219.840	-	219.840
553	DUDUNG	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
554	DUDUNG	660.504	16	-	-	-	660.504	660.504	-	-	-	660.504	660.504
555	DUDUNG	273.600	78	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
556	DUDUNG	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
557	DUDUNG	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
558	DUDUNG	589.440	18	-	-	-	589.440	589.440	-	-	-	589.440	589.440
559	DUDUNG	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
560	Dudung	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
561	DRS. R. WALUYOJATI, S	365.940	37	-	-	-	365.940	365.940	-	-	-	365.940	365.940
562	Drs. R. WALUYOJATI, S	788.376	18	-	-	-	788.376	788.376	-	-	-	788.376	788.376
563	Drs. R. WALUYOJATI, S	1.176.144	12	-	-	1.176.144	-	1.176.144	-	-	588.072	-	588.072
564	Drs. R. Waluyojati, S	1.176.144	5	-	-	1.176.144	-	1.176.144	-	-	588.072	-	588.072
565	YAHYA WIRO SUDARMO	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
566	YAHYA WIRO SUDARMO	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
567	YAHYA WIRO SUDARMO	547.200	48	-	-	-	547.200	547.200	-	-	-	547.200	547.200
568	YAYAH WIRO SUDARMO	589.440	18	-	-	-	589.440	589.440	-	-	-	589.440	589.440

No	Subjek Nama	Piutang Saldo Akhir 2024	Tunggakan	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
				Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
569	LULUS WIDINUGROHO	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
570	Lulus Widinugroho	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
571	IR. DAUD AMEN	290.700	48	-	-	-	290.700	290.700	-	-	-	290.700	290.700
572	Ir. DAUD AMEN	626.280	18	-	-	-	626.280	626.280	-	-	-	626.280	626.280
573	Ir. DAUD AMEN	626.280	18	-	-	-	626.280	626.280	-	-	-	626.280	626.280
574	Ir. DAUD AMEN	934.320	12	-	-	934.320	-	934.320	-	-	467.160	-	467.160
575	Ir. DAUD AMEN	934.320	12	-	-	934.320	-	934.320	-	-	467.160	-	467.160
576	Ir. Daud Amen	934.320	5	-	-	934.320	-	934.320	-	-	467.160	-	467.160
577	Ir. Daud Amen	934.320	5	-	-	934.320	-	934.320	-	-	467.160	-	467.160
578	SONGKO	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
579	SONGKO	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
580	SONGKO	589.440	18	-	-	-	589.440	589.440	-	-	-	589.440	589.440
581	SONGKO	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
582	Songko	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
583	HARRY	338.580	78	-	-	-	338.580	338.580	-	-	-	338.580	338.580
584	Harry	1.088.208	5	-	-	1.088.208	-	1.088.208	-	-	544.104	-	544.104
585	BOWO PRAYOGO	1.989.552	12	-	-	1.989.552	-	1.989.552	-	-	994.776	-	994.776
586	Bowo Prayogo	1.989.552	5	-	-	1.989.552	-	1.989.552	-	-	994.776	-	994.776
587	USEP SUPENDI	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
588	Usep Supendi	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
589	DEDY	235.980	78	-	-	-	235.980	235.980	-	-	-	235.980	235.980
590	DEDY	758.448	12	-	-	758.448	-	758.448	-	-	379.224	-	379.224
591	Dedy	758.448	5	-	-	758.448	-	758.448	-	-	379.224	-	379.224
592	MUHAMAD JUNAEDI	633.600	48	-	-	-	633.600	633.600	-	-	-	633.600	633.600
593	MUHAMAD JUNAEDI	648.384	20	-	-	-	648.384	648.384	-	-	-	648.384	648.384
594	MUHAMMAD DJUNAEDI	967.296	12	-	-	967.296	-	967.296	-	-	483.648	-	483.648
595	MUHAMMAD DJUNAEDI	857.376	12	-	-	857.376	-	857.376	-	-	428.688	-	428.688
596	Muhammad Djunaedi	967.296	5	-	-	967.296	-	967.296	-	-	483.648	-	483.648
597	Muhammad Djunaedi	857.376	5	-	-	857.376	-	857.376	-	-	428.688	-	428.688
598	M. YAHYA SUHERMAN	342.000	37	-	-	-	342.000	342.000	-	-	-	342.000	342.000
599	Baharudin	1.674.576	13	-	-	-	1.674.576	1.674.576	-	-	-	1.674.576	1.674.576
600	JEJEN JAENAL	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
601	JEJEN JAENAL	273.600	78	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
602	JEJEN JAENAL	273.600	40	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
603	JEJEN JAENAL	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
604	JEJEN JAENAL	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
605	JEJEN JAENAL	589.440	18	-	-	-	589.440	589.440	-	-	-	589.440	589.440
606	JEJEN JAENAL	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
607	SUPIAH	589.440	18	-	-	-	589.440	589.440	-	-	-	589.440	589.440
608	SUPIAH	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
609	Supiah	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
610	SAMSIYAH	619.020	37	-	-	-	619.020	619.020	-	-	-	619.020	619.020
611	SAMSIYAH	619.020	48	-	-	-	619.020	619.020	-	-	-	619.020	619.020
612	SAMSIYAH	619.020	40	-	-	-	619.020	619.020	-	-	-	619.020	619.020
613	SAMSIYAH	619.020	48	-	-	-	619.020	619.020	-	-	-	619.020	619.020
614	SAMSIYAH	619.020	48	-	-	-	619.020	619.020	-	-	-	619.020	619.020
615	ERNA	820.800	48	-	-	-	820.800	820.800	-	-	-	820.800	820.800
616	Liana	329.760	5	-	-	329.760	-	329.760	-	-	164.880	-	164.880

No	Subjek Nama	Piutang Saldo Akhir 2024	Tunggakan	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
				Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
617	SUMANAH	324.900	37	-	-	-	324.900	324.900	-	-	-	324.900	324.900
618	SUMANAH	324.900	40	-	-	-	324.900	324.900	-	-	-	324.900	324.900
619	SUMANAH	699.960	18	-	-	-	699.960	699.960	-	-	-	699.960	699.960
620	SUMANAH	1.044.240	12	-	-	1.044.240	-	1.044.240	-	-	522.120	-	522.120
621	Sumanah	1.044.240	5	-	-	1.044.240	-	1.044.240	-	-	522.120	-	522.120
622	Law Lie Ha	835.392	5	-	-	835.392	-	835.392	-	-	417.696	-	417.696
623	Law Lie Ha	791.424	5	-	-	791.424	-	791.424	-	-	395.712	-	395.712
624	S u t i n a h	1.443.600	13	-	-	-	1.443.600	1.443.600	-	-	-	1.443.600	1.443.600
625	SUMARNI	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
626	SUMARNI	273.600	78	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
627	SUMARNI	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
628	SUMARNI	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
629	SUMARNI	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
630	Sumarni	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
631	BENNY ACHAN T	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
632	BENNY ACHAN T	273.600	78	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
633	BENNY ACHAN T	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
634	IJAH	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
635	Ijah	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
636	AISAH	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
637	AISAH	355.680	37	-	-	-	355.680	355.680	-	-	-	355.680	355.680
638	AISAH	355.680	78	-	-	-	355.680	355.680	-	-	-	355.680	355.680
639	AISAH	355.680	40	-	-	-	355.680	355.680	-	-	-	355.680	355.680
640	AISAH	355.680	48	-	-	-	355.680	355.680	-	-	-	355.680	355.680
641	AISAH	355.680	48	-	-	-	355.680	355.680	-	-	-	355.680	355.680
642	AISAH	766.272	18	-	-	-	766.272	766.272	-	-	-	766.272	766.272
643	PURWATI	136.800	37	-	-	-	136.800	136.800	-	-	-	136.800	136.800
644	PURWATI	136.800	78	-	-	-	136.800	136.800	-	-	-	136.800	136.800
645	PURWATI	136.800	40	-	-	-	136.800	136.800	-	-	-	136.800	136.800
646	PURWATI	136.800	48	-	-	-	136.800	136.800	-	-	-	136.800	136.800
647	PURWATI	136.800	48	-	-	-	136.800	136.800	-	-	-	136.800	136.800
648	PURWATI	294.720	18	-	-	-	294.720	294.720	-	-	-	294.720	294.720
649	PURWATI	439.680	12	-	-	439.680	-	439.680	-	-	219.840	-	219.840
650	Purwati	439.680	5	-	-	439.680	-	439.680	-	-	219.840	-	219.840
651	NANI NURAENI	136.800	37	-	-	-	136.800	136.800	-	-	-	136.800	136.800
652	NANI NURAENI	136.800	40	-	-	-	136.800	136.800	-	-	-	136.800	136.800
653	NANI NURAENI	294.720	18	-	-	-	294.720	294.720	-	-	-	294.720	294.720
654	NANI NURAENI	439.680	12	-	-	439.680	-	439.680	-	-	219.840	-	219.840
655	Nani Nuraeni	439.680	5	-	-	439.680	-	439.680	-	-	219.840	-	219.840
656	M. Rahmat	439.680	5	-	-	439.680	-	439.680	-	-	219.840	-	219.840
657	DRS. SUMIATI	365.940	48	-	-	-	365.940	365.940	-	-	-	365.940	365.940
658	Sumiati	1.176.144	5	-	-	1.176.144	-	1.176.144	-	-	588.072	-	588.072
659	TITIN	201.600	37	-	-	-	201.600	201.600	-	-	-	201.600	201.600
660	TITIN	201.600	48	-	-	-	201.600	201.600	-	-	-	201.600	201.600
661	TITIN	201.600	48	-	-	-	201.600	201.600	-	-	-	201.600	201.600
662	TITIN	923.328	12	-	-	923.328	-	923.328	-	-	461.664	-	461.664
663	Titin	923.328	5	-	-	923.328	-	923.328	-	-	461.664	-	461.664
664	ENCAH	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
665	ENCAH	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
666	ENCAH	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600

No	Subjek Nama	Piutang Saldo Akhir 2024	Tunggakan	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
				Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
667	ENCAH	589.440	18	-	-	-	589.440	589.440	-	-	-	589.440	589.440
668	ENCAH	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
669	Encah	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
670	ANNA/AMALIA	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
671	ANNA/AMALIA	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
672	ANNA	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
673	Anna	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
674	SUSILAWATI	329.760	12	-	-	329.760	-	329.760	-	-	164.880	-	164.880
675	Susilawati	329.760	5	-	-	329.760	-	329.760	-	-	164.880	-	164.880
676	NURHAYATI	430.920	37	-	-	-	430.920	430.920	-	-	-	430.920	430.920
677	NURHAYATI	861.840	48	-	-	-	861.840	861.840	-	-	-	861.840	861.840
678	NURHAYATI	237.360	48	-	-	-	237.360	237.360	-	-	-	237.360	237.360
679	NURHAYATI	430.920	40	-	-	-	430.920	430.920	-	-	-	430.920	430.920
680	NURHAYATI	928.368	18	-	-	-	928.368	928.368	-	-	-	928.368	928.368
681	NURHAYATI	1.384.992	12	-	-	1.384.992	-	1.384.992	-	-	692.496	-	692.496
682	Nurhayati	1.384.992	5	-	-	1.384.992	-	1.384.992	-	-	692.496	-	692.496
683	Tjoe Soan Nio	1.055.232	5	-	-	1.055.232	-	1.055.232	-	-	527.616	-	527.616
684	MARIAM	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
685	MILA NOPIYANTI	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
686	ENDANG KARTIWA/EHA JULAEHA	588.240	37	-	-	-	588.240	588.240	-	-	-	588.240	588.240
687	ENDANG KARTIWA/EHA JULAEHA	588.240	78	-	-	-	588.240	588.240	-	-	-	588.240	588.240
688	ENDANG KARTIWA/EHA JULAEHA	588.240	40	-	-	-	588.240	588.240	-	-	-	588.240	588.240
689	ENDANG KARTIWA	1.267.296	18	-	-	-	1.267.296	1.267.296	-	-	-	1.267.296	1.267.296
690	ENDANG KARTIWA	1.890.624	12	-	-	1.890.624	-	1.890.624	-	-	945.312	-	945.312
691	Endang Kartiwa	1.890.624	5	-	-	1.890.624	-	1.890.624	-	-	945.312	-	945.312
692	MISKI MILAH	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
693	MISKI MILAH	273.600	78	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
694	MISKI MILAH	273.600	40	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
695	MISKI MILAH	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
696	MISKI MILAH	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
697	MANAH	328.320	48	-	-	-	328.320	328.320	-	-	-	328.320	328.320
698	MANAH	1.055.232	12	-	-	1.055.232	-	1.055.232	-	-	527.616	-	527.616
699	Manah	1.055.232	5	-	-	1.055.232	-	1.055.232	-	-	527.616	-	527.616
700	SUKAESIH	273.600	78	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
701	KARNINGSIH	290.700	78	-	-	-	290.700	290.700	-	-	-	290.700	290.700
702	KARNINGSIH	934.320	12	-	-	934.320	-	934.320	-	-	467.160	-	467.160
703	YEN HOA.2	259.920	48	-	-	-	259.920	259.920	-	-	-	259.920	259.920
704	YEN HOA.3	259.920	48	-	-	-	259.920	259.920	-	-	-	259.920	259.920
705	GOUW YEN HOA	989.280	12	-	-	989.280	-	989.280	-	-	494.640	-	494.640
706	GOUW YEN HOA	835.392	12	-	-	835.392	-	835.392	-	-	417.696	-	417.696
707	GOUW YEN HOA	835.392	12	-	-	835.392	-	835.392	-	-	417.696	-	417.696
708	Gouw Yen Hoa	989.280	5	-	-	989.280	-	989.280	-	-	494.640	-	494.640
709	Gouw Yen Hoa	835.392	5	-	-	835.392	-	835.392	-	-	417.696	-	417.696
710	Gouw Yen Hoa	835.392	5	-	-	835.392	-	835.392	-	-	417.696	-	417.696

No	Subjek Nama	Piutang Saldo Akhir 2024	Tunggakan	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
				Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
711	LUKMAN HERIYANTO/ERLINAWATY	1.077.300	48	-	-	-	1.077.300	1.077.300	-	-	-	1.077.300	1.077.300
712	LUKMAN HERIYANTO/ERLINAWATY	790.020	48	-	-	-	790.020	790.020	-	-	-	790.020	790.020
713	LUKMAN HERIYANTO/ERLINAWATY	359.100	40	-	-	-	359.100	359.100	-	-	-	359.100	359.100
714	LUKMAN HERIYANTO/ERLINAWATY	359.100	48	-	-	-	359.100	359.100	-	-	-	359.100	359.100
715	LUKMAN HERIYANTO	773.640	18	-	-	-	773.640	773.640	-	-	-	773.640	773.640
716	LUKMAN HERIYANTO	618.912	18	-	-	-	618.912	618.912	-	-	-	618.912	618.912
717	LUKMAN HERIYANTO	1.154.160	12	-	-	1.154.160	-	1.154.160	-	-	577.080	-	577.080
718	Lukman Heriyanto	1.154.160	5	-	-	1.154.160	-	1.154.160	-	-	577.080	-	577.080
719	SUSANNAWATI ADIWANA	287.280	37	-	-	-	287.280	287.280	-	-	-	287.280	287.280
720	SUSANNAWATI ADIWANA	287.280	78	-	-	-	287.280	287.280	-	-	-	287.280	287.280
721	SUSANNAWATI ADIWANA	287.280	48	-	-	-	287.280	287.280	-	-	-	287.280	287.280
722	SUSANNA WATI ADIWANA	923.328	12	-	-	923.328	-	923.328	-	-	461.664	-	461.664
723	Susanna Wati Adiwana	923.328	5	-	-	923.328	-	923.328	-	-	461.664	-	461.664
724	Suminten	1.033.200	11	-	-	1.033.200	-	1.033.200	-	-	516.600	-	516.600
725	SUMINTEN	688.200	18	-	-	-	688.200	688.200	-	-	-	688.200	688.200
726	SUMINTEN	549.600	40	-	-	-	549.600	549.600	-	-	-	549.600	549.600
727	SUMINTEN	549.600	47	-	-	-	549.600	549.600	-	-	-	549.600	549.600
728	SUMINTEN	549.600	47	-	-	-	549.600	549.600	-	-	-	549.600	549.600
729	ROTUA ULIWATI	302.088	18	-	-	-	302.088	302.088	-	-	-	302.088	302.088
730	FATIMAH	1.406.976	12	-	-	1.406.976	-	1.406.976	-	-	703.488	-	703.488
731	Fatimah	1.406.976	5	-	-	1.406.976	-	1.406.976	-	-	703.488	-	703.488
732	FATIMAH	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
733	FATIMAH	273.600	78	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
734	FATIMAH	273.600	40	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
735	FATIMAH	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
736	FATIMAH	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
737	FATIMAH	589.440	18	-	-	-	589.440	589.440	-	-	-	589.440	589.440
738	FATIMAH	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
739	Fatimah	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
740	F.V. Parian	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
741	Roside Gultom	1.154.880	13	-	-	-	1.154.880	1.154.880	-	-	-	1.154.880	1.154.880
742	TJIONG KIM NIO	273.600	78	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
743	Tjiong Kim Nio	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
744	ASTRIED AZRA	978.288	12	-	-	978.288	-	978.288	-	-	489.144	-	489.144
745	Astried Azra	978.288	5	-	-	978.288	-	978.288	-	-	489.144	-	489.144
746	GOUW KWI SAN/TJIONG LIAN NIO	307.800	78	-	-	-	307.800	307.800	-	-	-	307.800	307.800
747	ARAH	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600

No	Subjek Nama	Piutang Saldo Akhir 2024	Tunggakan	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
				Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
748	ARAH	273.600	78	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
749	ARAH	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
750	ARAH	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
751	ARAH	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
752	Arah	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
753	S u m a r n i	2.598.480	13	-	-	-	2.598.480	2.598.480	-	-	-	2.598.480	2.598.480
754	MINAH	437.760	37	-	-	-	437.760	437.760	-	-	-	437.760	437.760
755	MINAH	437.760	40	-	-	-	437.760	437.760	-	-	-	437.760	437.760
756	MINAH	437.760	48	-	-	-	437.760	437.760	-	-	-	437.760	437.760
757	MINAH	437.760	48	-	-	-	437.760	437.760	-	-	-	437.760	437.760
758	MINAH	943.104	18	-	-	-	943.104	943.104	-	-	-	943.104	943.104
759	TJIONG ELLY	589.440	18	-	-	-	589.440	589.440	-	-	-	589.440	589.440
760	ANITA SUSANTI ZAKARIA/BUDI DHARMA	352.260	48	-	-	-	352.260	352.260	-	-	-	352.260	352.260
761	ANITA SUSANTI ZAKARIA/BUDI DHARMA	352.260	48	-	-	-	352.260	352.260	-	-	-	352.260	352.260
762	ANITA SUSANTI ZAKARIA/BUDI DHARMA	352.260	78	-	-	-	352.260	352.260	-	-	-	352.260	352.260
763	ANITA SUSANTI ZAKARIA/BUDI DHARMA	352.260	78	-	-	-	352.260	352.260	-	-	-	352.260	352.260
764	ANITA SUSANTI ZAKARIA	758.904	18	-	-	-	758.904	758.904	-	-	-	758.904	758.904
765	ANITA SUSANTI ZAKARIA	758.904	18	-	-	-	758.904	758.904	-	-	-	758.904	758.904
766	ANITA SUSANTI ZAKARIA	1.132.176	12	-	-	1.132.176	-	1.132.176	-	-	566.088	-	566.088
767	ANITA SUSANTI ZAKARIA	1.132.176	12	-	-	1.132.176	-	1.132.176	-	-	566.088	-	566.088
768	Anita Susanti Zakaria	1.132.176	5	-	-	1.132.176	-	1.132.176	-	-	566.088	-	566.088
769	Anita Susanti Zakaria	1.132.176	5	-	-	1.132.176	-	1.132.176	-	-	566.088	-	566.088
770	Fitriawati	692.928	13	-	-	-	692.928	692.928	-	-	-	692.928	692.928
771	SURYANAH	348.840	37	-	-	-	348.840	348.840	-	-	-	348.840	348.840
772	SURYANAH	348.840	48	-	-	-	348.840	348.840	-	-	-	348.840	348.840
773	SURYANAH	751.536	18	-	-	-	751.536	751.536	-	-	-	751.536	751.536
774	SURYANAH	1.121.184	12	-	-	1.121.184	-	1.121.184	-	-	560.592	-	560.592
775	Suryanah	1.121.184	5	-	-	1.121.184	-	1.121.184	-	-	560.592	-	560.592
776	SITI SUTARSIH	386.460	37	-	-	-	386.460	386.460	-	-	-	386.460	386.460
777	SITI SUTARSIH	386.460	40	-	-	-	386.460	386.460	-	-	-	386.460	386.460
778	SITI SUTARSIH	386.460	48	-	-	-	386.460	386.460	-	-	-	386.460	386.460
779	SITI SUTARSIH	386.460	48	-	-	-	386.460	386.460	-	-	-	386.460	386.460
780	SITI SUTARSIH	832.584	18	-	-	-	832.584	832.584	-	-	-	832.584	832.584
781	SITI SUTARSIH	1.242.096	12	-	-	1.242.096	-	1.242.096	-	-	621.048	-	621.048
782	Siti Sutarsih	1.242.096	5	-	-	1.242.096	-	1.242.096	-	-	621.048	-	621.048
783	MULYAWATI	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
784	MULYAWATI	273.600	40	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
785	MULYAWATI	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600

No	Subjek Nama	Piutang Saldo Akhir 2024	Tunggakan	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
				Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
786	MULYAWATI	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
787	MULYAWATI	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
788	Mulyawati	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
789	EFA NOFIANTI	143.640	37	-	-	-	143.640	143.640	-	-	-	143.640	143.640
790	EFA NOFIANTI	143.640	48	-	-	-	143.640	143.640	-	-	-	143.640	143.640
791	EFA NOFIANTI	718.200	48	-	-	-	718.200	718.200	-	-	-	718.200	718.200
792	EKA NOFIANTI	143.640	78	-	-	-	143.640	143.640	-	-	-	143.640	143.640
793	EKA NOFIANTI	143.640	78	-	-	-	143.640	143.640	-	-	-	143.640	143.640
794	EKA NOFIANTI	143.640	48	-	-	-	143.640	143.640	-	-	-	143.640	143.640
795	EFA NOFIANTI	461.664	12	-	-	461.664	-	461.664	-	-	230.832	-	230.832
796	EFA NOFIANTI	461.664	12	-	-	461.664	-	461.664	-	-	230.832	-	230.832
797	Efa Nofianti	461.664	5	-	-	461.664	-	461.664	-	-	230.832	-	230.832
798	Efa Nofianti	461.664	5	-	-	461.664	-	461.664	-	-	230.832	-	230.832
799	PADMASARI PENNY	1.703.760	12	-	-	1.703.760	-	1.703.760	-	-	851.880	-	851.880
800	LENNY HENDRIANI HS.	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
801	AAS	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
802	AAS	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
803	AAS	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
804	AAS	589.440	18	-	-	-	589.440	589.440	-	-	-	589.440	589.440
805	AAS	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
806	Aas	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
807	MEY SUN	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
808	MEY SUN	273.600	78	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
809	MEY SUN	273.600	40	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
810	MEY SUN	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
811	MEY SUN	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
812	MEY SUN	589.440	18	-	-	-	589.440	589.440	-	-	-	589.440	589.440
813	MEY SUN	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
814	Mey Sun	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
815	SRI MULYATI	383.040	37	-	-	-	383.040	383.040	-	-	-	383.040	383.040
816	SRI MULYATI	383.040	78	-	-	-	383.040	383.040	-	-	-	383.040	383.040
817	SRI MULYATI	383.040	40	-	-	-	383.040	383.040	-	-	-	383.040	383.040
818	SRI MULYATI	1.231.104	12	-	-	1.231.104	-	1.231.104	-	-	615.552	-	615.552
819	Sri Mulyati	1.231.104	5	-	-	1.231.104	-	1.231.104	-	-	615.552	-	615.552
820	YOHANA	249.660	37	-	-	-	249.660	249.660	-	-	-	249.660	249.660
821	YOHANA	249.660	78	-	-	-	249.660	249.660	-	-	-	249.660	249.660
822	YOHANA	249.660	40	-	-	-	249.660	249.660	-	-	-	249.660	249.660
823	YOHANA	249.660	48	-	-	-	249.660	249.660	-	-	-	249.660	249.660
824	YOHANA	249.660	48	-	-	-	249.660	249.660	-	-	-	249.660	249.660
825	YOHANA	537.864	18	-	-	-	537.864	537.864	-	-	-	537.864	537.864
826	YOHANA	802.416	12	-	-	802.416	-	802.416	-	-	401.208	-	401.208
827	Yohana	802.416	5	-	-	802.416	-	802.416	-	-	401.208	-	401.208
828	SUMIJATI	287.280	78	-	-	-	287.280	287.280	-	-	-	287.280	287.280
829	CECEP HIDAYAT/LALA NURLAELA	434.340	37	-	-	-	434.340	434.340	-	-	-	434.340	434.340
830	CECEP HIDAYAT/LALA NURLAELA	434.340	40	-	-	-	434.340	434.340	-	-	-	434.340	434.340
831	CECEP HIDAYAT/LALA NURLAELA	434.340	48	-	-	-	434.340	434.340	-	-	-	434.340	434.340
832	SHANTI KAMELIA	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600

No	Subjek Nama	Piutang Saldo Akhir 2024	Tunggakan	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
				Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
833	SHANTI KAMELIA	273.600	78	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
834	SHANTI KAMELIA	273.600	40	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
835	SHANTI KAMELIA	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
836	SHANTI KAMELIA	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
837	SANTI KAMELIA	589.440	18	-	-	-	589.440	589.440	-	-	-	589.440	589.440
838	SANTI KAMELIA	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
839	Santi Kamelia	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
840	TATI KUSWATI	483.648	12	-	-	483.648	-	483.648	-	-	241.824	-	241.824
841	Tati Kuswati	483.648	5	-	-	483.648	-	483.648	-	-	241.824	-	241.824
842	SITI MUNIGAR	439.680	12	-	-	439.680	-	439.680	-	-	219.840	-	219.840
843	Siti Munigar	439.680	5	-	-	439.680	-	439.680	-	-	219.840	-	219.840
844	CUCUN SUSANTI	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
845	CUCUN SUSANTI	273.600	78	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
846	CUCUN SUSANTI	589.440	18	-	-	-	589.440	589.440	-	-	-	589.440	589.440
847	CUCUN SUSANTI	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
848	Cucun Susanti	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
849	SRI HARTATI	246.240	37	-	-	-	246.240	246.240	-	-	-	246.240	246.240
850	SRI HARTATI	530.496	18	-	-	-	530.496	530.496	-	-	-	530.496	530.496
851	SRI HARTATI	791.424	12	-	-	791.424	-	791.424	-	-	395.712	-	395.712
852	Sri Hartati	791.424	5	-	-	791.424	-	791.424	-	-	395.712	-	395.712
853	W a r t i n i	1.847.808	13	-	-	-	1.847.808	1.847.808	-	-	-	1.847.808	1.847.808
854	TATI HERAWATI	439.680	12	-	-	439.680	-	439.680	-	-	219.840	-	219.840
855	Tati Herawati	439.680	5	-	-	439.680	-	439.680	-	-	219.840	-	219.840
856	Yani Mulyani	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
857	ERIKA, SE	448.020	37	-	-	-	448.020	448.020	-	-	-	448.020	448.020
858	ERIKA, SE	965.208	18	-	-	-	965.208	965.208	-	-	-	965.208	965.208
859	ERIKA, SE	2.110.464	12	-	-	2.110.464	-	2.110.464	-	-	1.055.232	-	1.055.232
860	Imas Pupah	1.905.552	13	-	-	-	1.905.552	1.905.552	-	-	-	1.905.552	1.905.552
861	NANI MARYANI	273.600	78	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
862	NANI MARYANI	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
863	Nani Maryani	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
864	EHA JULAEHA	439.680	12	-	-	439.680	-	439.680	-	-	219.840	-	219.840
865	Eha Julaeha	439.680	5	-	-	439.680	-	439.680	-	-	219.840	-	219.840
866	SUKMAWATI, Dra	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
867	Sukmawati, Dra	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
868	NOVIE EKA PERMATA SARI	376.200	37	-	-	-	376.200	376.200	-	-	-	376.200	376.200
869	Novie Eka Permata Sari	1.209.120	5	-	-	1.209.120	-	1.209.120	-	-	604.560	-	604.560
870	Sri Rahayu Kurnia	1.880.424	11	-	-	1.880.424	-	1.880.424	-	-	940.212	-	940.212
871	Sri Rahayu Kurnia	1.694.448	11	-	-	1.694.448	-	1.694.448	-	-	847.224	-	847.224
872	SUMINARTI	890.352	12	-	-	890.352	-	890.352	-	-	445.176	-	445.176
873	Suminarti	890.352	5	-	-	890.352	-	890.352	-	-	445.176	-	445.176
874	ROSTINI/RIDWAN	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
875	ROSTINI/RIDWAN	273.600	78	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
876	ROSTINI/RIDWAN	273.600	40	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
877	ROSTINI/RIDWAN	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
878	ROSTINI/RIDWAN	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
879	ROSTINI / RIDWAN	589.440	18	-	-	-	589.440	589.440	-	-	-	589.440	589.440
880	ROSTINI / RIDWAN	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
881	Ridwan	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680

No	Subjek Nama	Piutang Saldo Akhir 2024	Tunggakan	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
				Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
882	Restu Damaryanti	1.818.936	13	-	-	-	1.818.936	1.818.936	-	-	-	1.818.936	1.818.936
883	YANI NURHAYANI	205.200	37	-	-	-	205.200	205.200	-	-	-	205.200	205.200
884	YANI NURHAYANI	205.200	48	-	-	-	205.200	205.200	-	-	-	205.200	205.200
885	YANI NURHAYANI	205.200	78	-	-	-	205.200	205.200	-	-	-	205.200	205.200
886	YANI NURHAYANI	205.200	48	-	-	-	205.200	205.200	-	-	-	205.200	205.200
887	YANI NURHAYANI	205.200	48	-	-	-	205.200	205.200	-	-	-	205.200	205.200
888	M u l y a t i	1.097.136	13	-	-	-	1.097.136	1.097.136	-	-	-	1.097.136	1.097.136
889	YANI NURHAYANI	442.080	18	-	-	-	442.080	442.080	-	-	-	442.080	442.080
890	YANI NURHAYANI	659.520	12	-	-	659.520	-	659.520	-	-	329.760	-	329.760
891	Yani Nurhayani	659.520	5	-	-	659.520	-	659.520	-	-	329.760	-	329.760
892	Imakulata Sri Maryati	1.242.096	5	-	-	1.242.096	-	1.242.096	-	-	621.048	-	621.048
893	OEY LAK NIO	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
894	OEY LAK NIO	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
895	OEY LAK NIO	589.440	18	-	-	-	589.440	589.440	-	-	-	589.440	589.440
896	OEY LAK NIO	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
897	Oey Lak Nio	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
898	NINA MARTINI	88.920	37	-	-	-	88.920	88.920	-	-	-	88.920	88.920
899	NINA MARTINI	285.792	12	-	-	285.792	-	285.792	-	-	142.896	-	142.896
900	Nina Martini	285.792	5	-	-	285.792	-	285.792	-	-	142.896	-	142.896
901	NENAH	300.960	37	-	-	-	300.960	300.960	-	-	-	300.960	300.960
902	NENAH	300.960	78	-	-	-	300.960	300.960	-	-	-	300.960	300.960
903	NENAH	300.960	48	-	-	-	300.960	300.960	-	-	-	300.960	300.960
904	NENAH	300.960	48	-	-	-	300.960	300.960	-	-	-	300.960	300.960
905	NENAH	648.384	18	-	-	-	648.384	648.384	-	-	-	648.384	648.384
906	NENAH	967.296	12	-	-	967.296	-	967.296	-	-	483.648	-	483.648
907	Nenah	967.296	5	-	-	967.296	-	967.296	-	-	483.648	-	483.648
908	Rosita	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
909	AMINAH	1.341.024	12	-	-	1.341.024	-	1.341.024	-	-	670.512	-	670.512
910	ABRAHAM TALLA/ANA JULIANA	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
911	ABRAHAM TALLA/ANA JULIANA	273.600	78	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
912	ABRAHAM TALLA	589.440	18	-	-	-	589.440	589.440	-	-	-	589.440	589.440
913	ANA JULIANA TALLA	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
914	Ana Juliana Talla	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
915	NURLELA	485.640	37	-	-	-	485.640	485.640	-	-	-	485.640	485.640
916	NURLELA	485.640	40	-	-	-	485.640	485.640	-	-	-	485.640	485.640
917	NURLELA	1.560.864	12	-	-	1.560.864	-	1.560.864	-	-	780.432	-	780.432
918	Nurlela	1.560.864	5	-	-	1.560.864	-	1.560.864	-	-	780.432	-	780.432
919	MELIYANA	1.395.984	12	-	-	1.395.984	-	1.395.984	-	-	697.992	-	697.992
920	Meliyana	1.395.984	5	-	-	1.395.984	-	1.395.984	-	-	697.992	-	697.992
921	HERAWATI	417.696	12	-	-	417.696	-	417.696	-	-	208.848	-	208.848
922	Herawati	417.696	5	-	-	417.696	-	417.696	-	-	208.848	-	208.848
923	AISAH	1.143.168	12	-	-	1.143.168	-	1.143.168	-	-	571.584	-	571.584
924	Aisah	1.143.168	5	-	-	1.143.168	-	1.143.168	-	-	571.584	-	571.584
925	TJO KIM YAN	290.700	37	-	-	-	290.700	290.700	-	-	-	290.700	290.700
926	TJO KIM YAN	290.700	78	-	-	-	290.700	290.700	-	-	-	290.700	290.700
927	TJO KIM YAN	290.700	40	-	-	-	290.700	290.700	-	-	-	290.700	290.700
928	TJO KIM YAN	290.700	48	-	-	-	290.700	290.700	-	-	-	290.700	290.700
929	TJO KIM YAN	626.280	18	-	-	-	626.280	626.280	-	-	-	626.280	626.280

No	Subjek Nama	Piutang Saldo Akhir 2024	Tunggakan	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
				Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
930	TJO KIM YAN	934.320	12	-	-	934.320	-	934.320	-	-	467.160	-	467.160
931	Tjo Kim Yan	934.320	5	-	-	934.320	-	934.320	-	-	467.160	-	467.160
932	HARJADI BOGORIND	1.099.200	12	-	-	1.099.200	-	1.099.200	-	-	549.600	-	549.600
933	Lilis Yulistiawati	2.417.688	11	-	-	2.417.688	-	2.417.688	-	-	1.208.844	-	1.208.844
934	DAIK	978.288	40	-	-	-	978.288	978.288	-	-	-	978.288	978.288
935	DAIK	1.224.996	18	-	-	-	1.224.996	1.224.996	-	-	-	1.224.996	1.224.996
936	Yusuf	1.446.480	11	-	-	1.446.480	-	1.446.480	-	-	723.240	-	723.240
937	Yusuf	769.440	37	-	-	-	769.440	769.440	-	-	-	769.440	769.440
938	YUSUF	769.440	74	-	-	-	769.440	769.440	-	-	-	769.440	769.440
939	Yusuf	769.440	40	-	-	-	769.440	769.440	-	-	-	769.440	769.440
940	Yusuf	769.440	47	-	-	-	769.440	769.440	-	-	-	769.440	769.440
941	Yusuf	769.440	47	-	-	-	769.440	769.440	-	-	-	769.440	769.440
942	ANNE/ODI GUNAWAN	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
943	ANNE/ODI GUNAWAN	273.600	78	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
944	ANNE/ODI GUNAWAN	273.600	40	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
945	ANNE/ODI GUNAWAN	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
946	ANNE/ODI GUNAWAN	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
947	ANNE	589.440	18	-	-	-	589.440	589.440	-	-	-	589.440	589.440
948	ANNE	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
949	Anne	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
950	BUDIMAN	1.000.272	40	-	-	-	1.000.272	1.000.272	-	-	-	1.000.272	1.000.272
951	MUKRI	1.262.040	14	-	-	-	1.262.040	1.262.040	-	-	-	1.262.040	1.262.040
952	Torang Simanjuntak	971.208	11	-	-	971.208	-	971.208	-	-	485.604	-	485.604
953	TORANG SIMANJUNTAK	516.624	37	-	-	-	516.624	516.624	-	-	-	516.624	516.624
954	TORANG SIMANJUNTAK	516.624	40	-	-	-	516.624	516.624	-	-	-	516.624	516.624
955	TORANG SIMANJUNTAK	516.624	47	-	-	-	516.624	516.624	-	-	-	516.624	516.624
956	Guntari	557.928	11	-	-	557.928	-	557.928	-	-	278.964	-	278.964
957	GUNTARI	296.784	37	-	-	-	296.784	296.784	-	-	-	296.784	296.784
958	GUNTARI	296.784	40	-	-	-	296.784	296.784	-	-	-	296.784	296.784
959	GUNTARI	296.784	47	-	-	-	296.784	296.784	-	-	-	296.784	296.784
960	GUNTARI	371.628	18	-	-	-	371.628	371.628	-	-	-	371.628	371.628
961	Mijan	1.053.864	11	-	-	1.053.864	-	1.053.864	-	-	526.932	-	526.932
962	Mijan	929.880	11	-	-	929.880	-	929.880	-	-	464.940	-	464.940
963	MIJAN	560.592	37	-	-	-	560.592	560.592	-	-	-	560.592	560.592
964	MIJAN	494.640	37	-	-	-	494.640	494.640	-	-	-	494.640	494.640
965	MIJAN	494.640	39	-	-	-	494.640	494.640	-	-	-	494.640	494.640
966	MIJAN	560.592	47	-	-	-	560.592	560.592	-	-	-	560.592	560.592
967	MIJAN	560.592	47	-	-	-	560.592	560.592	-	-	-	560.592	560.592
968	MIJAN	494.640	47	-	-	-	494.640	494.640	-	-	-	494.640	494.640
969	MIJAN	494.640	47	-	-	-	494.640	494.640	-	-	-	494.640	494.640
970	Carli Larosa	1.136.520	11	-	-	1.136.520	-	1.136.520	-	-	568.260	-	568.260
971	CARITO	604.560	37	-	-	-	604.560	604.560	-	-	-	604.560	604.560
972	CARITO	604.560	74	-	-	-	604.560	604.560	-	-	-	604.560	604.560
973	CARITO	604.560	48	-	-	-	604.560	604.560	-	-	-	604.560	604.560
974	CARITO	604.560	48	-	-	-	604.560	604.560	-	-	-	604.560	604.560
975	Budianto	2.397.024	11	-	-	2.397.024	-	2.397.024	-	-	1.198.512	-	1.198.512
976	BUDIYANTO	1.879.632	37	-	-	-	1.879.632	1.879.632	-	-	-	1.879.632	1.879.632

No	Subjek Nama	Piutang Saldo Akhir 2024	Tunggakan	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
				Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
977	BUDIYANTO	1.879.632	74	-	-	-	1.879.632	1.879.632	-	-	-	1.879.632	1.879.632
978	BUDIYANTO	1.879.632	40	-	-	-	1.879.632	1.879.632	-	-	-	1.879.632	1.879.632
979	BUDIYANTO	1.879.632	47	-	-	-	1.879.632	1.879.632	-	-	-	1.879.632	1.879.632
980	BUDIYANTO	1.879.632	47	-	-	-	1.879.632	1.879.632	-	-	-	1.879.632	1.879.632
981	Janan Rosyid	640.584	11	-	-	640.584	-	640.584	-	-	320.292	-	320.292
982	JANAN ROSYID	340.752	37	-	-	-	340.752	340.752	-	-	-	340.752	340.752
983	JANAN ROSYID	340.752	74	-	-	-	340.752	340.752	-	-	-	340.752	340.752
984	JANAN ROSYID	340.752	40	-	-	-	340.752	340.752	-	-	-	340.752	340.752
985	JANAN ROSYID	340.752	47	-	-	-	340.752	340.752	-	-	-	340.752	340.752
986	JANAN ROSYID	340.752	47	-	-	-	340.752	340.752	-	-	-	340.752	340.752
987	RISA SAMUEL SUNATDI	736.464	37	-	-	-	736.464	736.464	-	-	-	736.464	736.464
988	RISA SAMUEL SUNATDI	736.464	74	-	-	-	736.464	736.464	-	-	-	736.464	736.464
989	RISA SAMUEL SUNATDI	736.464	40	-	-	-	736.464	736.464	-	-	-	736.464	736.464
990	RISA SAMUEL SUNATDI	736.464	47	-	-	-	736.464	736.464	-	-	-	736.464	736.464
991	RISA SAMUEL SUNATDI	736.464	47	-	-	-	736.464	736.464	-	-	-	736.464	736.464
992	Adang	991.872	11	-	-	991.872	-	991.872	-	-	495.936	-	495.936
993	ADANG	527.616	37	-	-	-	527.616	527.616	-	-	-	527.616	527.616
994	ADANG	527.616	40	-	-	-	527.616	527.616	-	-	-	527.616	527.616
995	ADANG	527.616	47	-	-	-	527.616	527.616	-	-	-	527.616	527.616
996	ADANG	527.616	47	-	-	-	527.616	527.616	-	-	-	527.616	527.616
997	ADANG	660.672	18	-	-	-	660.672	660.672	-	-	-	660.672	660.672
998	ODANG SOBARI	549.600	37	-	-	-	549.600	549.600	-	-	-	549.600	549.600
999	ODANG SOBARI	65.952	37	-	-	-	65.952	65.952	-	-	-	65.952	65.952
1000	Rasman	1.384.488	11	-	-	1.384.488	-	1.384.488	-	-	692.244	-	692.244
1001	RASMAN	736.464	37	-	-	-	736.464	736.464	-	-	-	736.464	736.464
1002	RASMAN	736.464	74	-	-	-	736.464	736.464	-	-	-	736.464	736.464
1003	RASMAN	736.464	40	-	-	-	736.464	736.464	-	-	-	736.464	736.464
1004	RASMAN	736.464	47	-	-	-	736.464	736.464	-	-	-	736.464	736.464
1005	RASMAN	736.464	47	-	-	-	736.464	736.464	-	-	-	736.464	736.464
1006	RASMAN	922.188	18	-	-	-	922.188	922.188	-	-	-	922.188	922.188
1007	Sudiaman	3.140.928	11	-	-	3.140.928	-	3.140.928	-	-	1.570.464	-	1.570.464
1008	SUDIAMAN	1.670.784	37	-	-	-	1.670.784	1.670.784	-	-	-	1.670.784	1.670.784
1009	SUDIAMAN	1.670.784	47	-	-	-	1.670.784	1.670.784	-	-	-	1.670.784	1.670.784
1010	Baziduhu Waruwu	3.719.520	11	-	-	3.719.520	-	3.719.520	-	-	1.859.760	-	1.859.760
1011	Sarumi	1.756.440	11	-	-	1.756.440	-	1.756.440	-	-	878.220	-	878.220
1012	SURADI	824.400	37	-	-	-	824.400	824.400	-	-	-	824.400	824.400
1013	SURADI	824.400	40	-	-	-	824.400	824.400	-	-	-	824.400	824.400
1014	Hamsari	1.735.776	11	-	-	1.735.776	-	1.735.776	-	-	867.888	-	867.888
1015	HAMSARI	923.328	37	-	-	-	923.328	923.328	-	-	-	923.328	923.328
1016	HAMSARI	923.328	74	-	-	-	923.328	923.328	-	-	-	923.328	923.328
1017	HAMSARI	923.328	40	-	-	-	923.328	923.328	-	-	-	923.328	923.328
1018	HAMSARI	923.328	47	-	-	-	923.328	923.328	-	-	-	923.328	923.328
1019	HAMSARI	923.328	47	-	-	-	923.328	923.328	-	-	-	923.328	923.328
1020	HAMSARI	1.156.176	18	-	-	-	1.156.176	1.156.176	-	-	-	1.156.176	1.156.176
1021	Nurhayati	1.033.200	11	-	-	1.033.200	-	1.033.200	-	-	516.600	-	516.600
1022	Ida Hapsah	5.889.240	11	-	-	5.889.240	-	5.889.240	-	-	2.944.620	-	2.944.620
1023	A. SARJONO	604.560	37	-	-	-	604.560	604.560	-	-	-	604.560	604.560
1024	A. SARJONO	1.165.152	48	-	-	-	1.165.152	1.165.152	-	-	-	1.165.152	1.165.152
1025	A. SARJONO	757.020	18	-	-	-	757.020	757.020	-	-	-	757.020	757.020
1026	A. SARJONO	1.458.984	18	-	-	-	1.458.984	1.458.984	-	-	-	1.458.984	1.458.984

No	Subjek Nama	Piutang Saldo Akhir 2024	Tunggakan	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
				Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
1027	A. SARJONO	604.560	74	-	-	-	604.560	604.560	-	-	-	604.560	604.560
1028	A. SARJONO	1.165.152	74	-	-	-	1.165.152	1.165.152	-	-	-	1.165.152	1.165.152
1029	A. SARJONO	604.560	40	-	-	-	604.560	604.560	-	-	-	604.560	604.560
1030	A. SARJONO	1.165.152	40	-	-	-	1.165.152	1.165.152	-	-	-	1.165.152	1.165.152
1031	A. SARJONO	604.560	48	-	-	-	604.560	604.560	-	-	-	604.560	604.560
1032	A. SARJONO	604.560	48	-	-	-	604.560	604.560	-	-	-	604.560	604.560
1033	A. SARJONO	1.165.152	48	-	-	-	1.165.152	1.165.152	-	-	-	1.165.152	1.165.152
1034	A. SARJONO	1.165.152	48	-	-	-	1.165.152	1.165.152	-	-	-	1.165.152	1.165.152
1035	RUHENDA	1.890.624	37	-	-	-	1.890.624	1.890.624	-	-	-	1.890.624	1.890.624
1036	RUHENDA	1.890.624	40	-	-	-	1.890.624	1.890.624	-	-	-	1.890.624	1.890.624
1037	RUHENDA	1.890.624	47	-	-	-	1.890.624	1.890.624	-	-	-	1.890.624	1.890.624
1038	RUHENDA	1.890.624	47	-	-	-	1.890.624	1.890.624	-	-	-	1.890.624	1.890.624
1039	Handayani	826.560	11	-	-	826.560	-	826.560	-	-	413.280	-	413.280
1040	ODJI SASTRA	1.165.152	37	-	-	-	1.165.152	1.165.152	-	-	-	1.165.152	1.165.152
1041	ODJI SASTRA	1.165.152	40	-	-	-	1.165.152	1.165.152	-	-	-	1.165.152	1.165.152
1042	ODJI SASTRA	1.165.152	47	-	-	-	1.165.152	1.165.152	-	-	-	1.165.152	1.165.152
1043	ODJI SASTRA	1.165.152	47	-	-	-	1.165.152	1.165.152	-	-	-	1.165.152	1.165.152
1044	ODJI SASTRA	1.458.984	18	-	-	-	1.458.984	1.458.984	-	-	-	1.458.984	1.458.984
1045	Sartin	2.851.632	11	-	-	2.851.632	-	2.851.632	-	-	1.425.816	-	1.425.816
1046	ASEP HARYADI	494.640	37	-	-	-	494.640	494.640	-	-	-	494.640	494.640
1047	ASEP HARYADI	494.640	74	-	-	-	494.640	494.640	-	-	-	494.640	494.640
1048	ASEP HARYADI	494.640	47	-	-	-	494.640	494.640	-	-	-	494.640	494.640
1049	ASEP HARYADI	494.640	47	-	-	-	494.640	494.640	-	-	-	494.640	494.640
1050	Agatha Sukardyah	2.459.016	11	-	-	2.459.016	-	2.459.016	-	-	1.229.508	-	1.229.508
1051	YANUARI TALAUMBANUA	1.824.672	37	-	-	-	1.824.672	1.824.672	-	-	-	1.824.672	1.824.672
1052	YANUARI TALAUMBANUA	1.824.672	40	-	-	-	1.824.672	1.824.672	-	-	-	1.824.672	1.824.672
1053	YANUARI TALAUMBANUA	1.824.672	48	-	-	-	1.824.672	1.824.672	-	-	-	1.824.672	1.824.672
1054	YANUARI TALAUMBANUA	1.824.672	48	-	-	-	1.824.672	1.824.672	-	-	-	1.824.672	1.824.672
1055	YANUARI TALAUMBANUA	2.284.824	18	-	-	-	2.284.824	2.284.824	-	-	-	2.284.824	2.284.824
1056	Nado	4.442.760	11	-	-	4.442.760	-	4.442.760	-	-	2.221.380	-	2.221.380
1057	NADO	2.363.280	37	-	-	-	2.363.280	2.363.280	-	-	-	2.363.280	2.363.280
1058	NADO	2.363.280	74	-	-	-	2.363.280	2.363.280	-	-	-	2.363.280	2.363.280
1059	NADO	2.363.280	40	-	-	-	2.363.280	2.363.280	-	-	-	2.363.280	2.363.280
1060	NADO	2.363.280	47	-	-	-	2.363.280	2.363.280	-	-	-	2.363.280	2.363.280
1061	NADO	2.363.280	47	-	-	-	2.363.280	2.363.280	-	-	-	2.363.280	2.363.280
1062	Idim	847.224	11	-	-	847.224	-	847.224	-	-	423.612	-	423.612
1063	IDIM	450.672	37	-	-	-	450.672	450.672	-	-	-	450.672	450.672
1064	IDIM	450.672	74	-	-	-	450.672	450.672	-	-	-	450.672	450.672
1065	IDIM	450.672	40	-	-	-	450.672	450.672	-	-	-	450.672	450.672
1066	IDIM	450.672	47	-	-	-	450.672	450.672	-	-	-	450.672	450.672
1067	IDIM	450.672	47	-	-	-	450.672	450.672	-	-	-	450.672	450.672
1068	IDIM	564.324	18	-	-	-	564.324	564.324	-	-	-	564.324	564.324
1069	Katiman	1.942.416	11	-	-	1.942.416	-	1.942.416	-	-	971.208	-	971.208
1070	KATIMAN	1.033.248	37	-	-	-	1.033.248	1.033.248	-	-	-	1.033.248	1.033.248
1071	KATIMAN	1.033.248	40	-	-	-	1.033.248	1.033.248	-	-	-	1.033.248	1.033.248

No	Subjek Nama	Piutang Saldo Akhir 2024	Tunggakan	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
				Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
1072	MOCH TARBA	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
1073	MOCH TARBA	273.600	78	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
1074	MOCH TARBA	273.600	40	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
1075	MOCH TARBA	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
1076	MOCH TARBA	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
1077	MOCH TARBA	589.440	18	-	-	-	589.440	589.440	-	-	-	589.440	589.440
1078	MUHAMMAD TARBA	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
1079	Muhammad Tarba	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
1080	Suhardi	227.304	11	-	-	227.304	-	227.304	-	-	113.652	-	113.652
1081	Darno Sujoto	743.904	11	-	-	743.904	-	743.904	-	-	371.952	-	371.952
1082	SUHARDI	120.912	37	-	-	-	120.912	120.912	-	-	-	120.912	120.912
1083	SUHARDI	549.600	37	-	-	-	549.600	549.600	-	-	-	549.600	549.600
1084	SUHARDI	549.600	40	-	-	-	549.600	549.600	-	-	-	549.600	549.600
1085	SUHARDI	120.912	40	-	-	-	120.912	120.912	-	-	-	120.912	120.912
1086	SUHARDI	120.912	47	-	-	-	120.912	120.912	-	-	-	120.912	120.912
1087	SUHARDI	120.912	48	-	-	-	120.912	120.912	-	-	-	120.912	120.912
1088	SUHARDI	151.404	18	-	-	-	151.404	151.404	-	-	-	151.404	151.404
1089	LUKMAN	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
1090	LUKMAN	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
1091	LUKMAN	589.440	18	-	-	-	589.440	589.440	-	-	-	589.440	589.440
1092	LUKMAN	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
1093	Lukman	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
1094	Hj. Sunyani / Luli Rinaldi	3.161.592	11	-	-	3.161.592	-	3.161.592	-	-	1.580.796	-	1.580.796
1095	Suyono	826.560	11	-	-	826.560	-	826.560	-	-	413.280	-	413.280
1096	SUYONO	439.680	37	-	-	-	439.680	439.680	-	-	-	439.680	439.680
1097	SUYONO	439.680	40	-	-	-	439.680	439.680	-	-	-	439.680	439.680
1098	SUYONO	439.680	47	-	-	-	439.680	439.680	-	-	-	439.680	439.680
1099	Slamet Riyadi	1.033.200	11	-	-	1.033.200	-	1.033.200	-	-	516.600	-	516.600
1100	SLAMET RIYADI	549.600	37	-	-	-	549.600	549.600	-	-	-	549.600	549.600
1101	Supari	516.600	11	-	-	516.600	-	516.600	-	-	258.300	-	258.300
1102	Triono	1.260.504	11	-	-	1.260.504	-	1.260.504	-	-	630.252	-	630.252
1103	TRIONO	670.512	37	-	-	-	670.512	670.512	-	-	-	670.512	670.512
1104	TRIONO	2.682.048	37	-	-	-	2.682.048	2.682.048	-	-	-	2.682.048	2.682.048
1105	MUHAMAD IDWAN	1.203.792	14	-	-	-	1.203.792	1.203.792	-	-	-	1.203.792	1.203.792
1106	Dedeh Nurseha	3.719.520	11	-	-	3.719.520	-	3.719.520	-	-	1.859.760	-	1.859.760
1107	SUPARDI	879.360	37	-	-	-	879.360	879.360	-	-	-	879.360	879.360
1108	SUPARDI	879.360	74	-	-	-	879.360	879.360	-	-	-	879.360	879.360
1109	SUPARDI	879.360	40	-	-	-	879.360	879.360	-	-	-	879.360	879.360
1110	SUPARDI	879.360	48	-	-	-	879.360	879.360	-	-	-	879.360	879.360
1111	SUPARDI	879.360	47	-	-	-	879.360	879.360	-	-	-	879.360	879.360
1112	SUMARNO	241.824	37	-	-	-	241.824	241.824	-	-	-	241.824	241.824
1113	SUMARNO	241.824	47	-	-	-	241.824	241.824	-	-	-	241.824	241.824
1114	SUMARNO	241.824	47	-	-	-	241.824	241.824	-	-	-	241.824	241.824
1115	Sutino	743.904	11	-	-	743.904	-	743.904	-	-	371.952	-	371.952
1116	Desy Listya Sunarya	1.012.536	11	-	-	1.012.536	-	1.012.536	-	-	506.268	-	506.268
1117	Jemi Siswanto	1.756.440	11	-	-	1.756.440	-	1.756.440	-	-	878.220	-	878.220
1118	JEMI SISWANTO	934.320	37	-	-	-	934.320	934.320	-	-	-	934.320	934.320
1119	JEMI SISWANTO	934.320	40	-	-	-	934.320	934.320	-	-	-	934.320	934.320
1120	JEMI SISWANTO	934.320	47	-	-	-	934.320	934.320	-	-	-	934.320	934.320
1121	JEMI SISWANTO	934.320	47	-	-	-	934.320	934.320	-	-	-	934.320	934.320

No	Subjek Nama	Piutang Saldo Akhir 2024	Tunggakan	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
				Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
1122	Suryadi	764.568	11	-	-	764.568	-	764.568	-	-	382.284	-	382.284
1123	SURYADI	406.704	37	-	-	-	406.704	406.704	-	-	-	406.704	406.704
1124	SURYADI	406.704	40	-	-	-	406.704	406.704	-	-	-	406.704	406.704
1125	SURYADI	406.704	47	-	-	-	406.704	406.704	-	-	-	406.704	406.704
1126	SURYADI	406.704	47	-	-	-	406.704	406.704	-	-	-	406.704	406.704
1127	SURYADI	509.268	18	-	-	-	509.268	509.268	-	-	-	509.268	509.268
1128	Erland Reandry	1.492.200	48	-	-	-	1.492.200	1.492.200	-	-	-	1.492.200	1.492.200
1129	WAWANG JUANDI	483.648	37	-	-	-	483.648	483.648	-	-	-	483.648	483.648
1130	WAWANG JUANDI	483.648	74	-	-	-	483.648	483.648	-	-	-	483.648	483.648
1131	WAWANG JUANDI	483.648	40	-	-	-	483.648	483.648	-	-	-	483.648	483.648
1132	WAWANG JUANDI	483.648	48	-	-	-	483.648	483.648	-	-	-	483.648	483.648
1133	WAWANG JUANDI	483.648	48	-	-	-	483.648	483.648	-	-	-	483.648	483.648
1134	Komarudin	1.921.752	11	-	-	1.921.752	-	1.921.752	-	-	960.876	-	960.876
1135	KOMARUDIN	1.022.256	37	-	-	-	1.022.256	1.022.256	-	-	-	1.022.256	1.022.256
1136	KOMARUDIN	1.022.256	40	-	-	-	1.022.256	1.022.256	-	-	-	1.022.256	1.022.256
1137	KOMARUDIN	1.022.256	47	-	-	-	1.022.256	1.022.256	-	-	-	1.022.256	1.022.256
1138	Delfin Sahertian	723.900	28	-	-	-	723.900	723.900	-	-	-	723.900	723.900
1139	Delfin Sahertian	2.718.000	16	-	-	-	2.718.000	2.718.000	-	-	-	2.718.000	2.718.000
1140	Lisania Firdyati Larosa	4.566.744	11	-	-	4.566.744	-	4.566.744	-	-	2.283.372	-	2.283.372
1141	I Nyoman Gunadi	4.132.800	11	-	-	4.132.800	-	4.132.800	-	-	2.066.400	-	2.066.400
1142	I NYOMAN GUNADI	2.198.400	37	-	-	-	2.198.400	2.198.400	-	-	-	2.198.400	2.198.400
1143	Yuniman Larosa	3.285.576	11	-	-	3.285.576	-	3.285.576	-	-	1.642.788	-	1.642.788
1144	SURIANTO	1.439.952	37	-	-	-	1.439.952	1.439.952	-	-	-	1.439.952	1.439.952
1145	SURIANTO	1.439.952	74	-	-	-	1.439.952	1.439.952	-	-	-	1.439.952	1.439.952
1146	SURIANTO	1.439.952	40	-	-	-	1.439.952	1.439.952	-	-	-	1.439.952	1.439.952
1147	SURIANTO	1.439.952	48	-	-	-	1.439.952	1.439.952	-	-	-	1.439.952	1.439.952
1148	SURIANTO	1.439.952	48	-	-	-	1.439.952	1.439.952	-	-	-	1.439.952	1.439.952
1149	SURIANTO	1.803.084	18	-	-	-	1.803.084	1.803.084	-	-	-	1.803.084	1.803.084
1150	SUJADI HADI SUCIPTO	1.000.272	37	-	-	-	1.000.272	1.000.272	-	-	-	1.000.272	1.000.272
1151	SUJADI HADI SUCIPTO	901.344	37	-	-	-	901.344	901.344	-	-	-	901.344	901.344
1152	SUJADI HADI SUCIPTO	1.000.272	74	-	-	-	1.000.272	1.000.272	-	-	-	1.000.272	1.000.272
1153	SUJADI HADI SUCIPTO	1.000.272	40	-	-	-	1.000.272	1.000.272	-	-	-	1.000.272	1.000.272
1154	SUJADI HADI SUCIPTO	1.000.272	47	-	-	-	1.000.272	1.000.272	-	-	-	1.000.272	1.000.272
1155	SUJADI HADI SUCIPTO	1.000.272	47	-	-	-	1.000.272	1.000.272	-	-	-	1.000.272	1.000.272
1156	Titi Yanto	1.115.856	11	-	-	1.115.856	-	1.115.856	-	-	557.928	-	557.928
1157	HENDRI JONES SIMANJUNTAK	703.488	37	-	-	-	703.488	703.488	-	-	-	703.488	703.488
1158	HENDRI JONES SIMANJUNTAK	703.488	40	-	-	-	703.488	703.488	-	-	-	703.488	703.488
1159	HENDRI JONES SIMANJUNTAK	880.896	18	-	-	-	880.896	880.896	-	-	-	880.896	880.896
1160	Suwarno	1.177.848	11	-	-	1.177.848	-	1.177.848	-	-	588.924	-	588.924
1161	SUWARNO	626.544	37	-	-	-	626.544	626.544	-	-	-	626.544	626.544
1162	SUWARNO	626.544	48	-	-	-	626.544	626.544	-	-	-	626.544	626.544
1163	SUWARNO	626.544	47	-	-	-	626.544	626.544	-	-	-	626.544	626.544
1164	Ricky Effendi Simanjuntak	1.921.752	11	-	-	1.921.752	-	1.921.752	-	-	960.876	-	960.876
1165	Ricky Effendi Simanjuntak	1.239.840	11	-	-	1.239.840	-	1.239.840	-	-	619.920	-	619.920
1166	RICKY EFFENDI SIMANJUNTAK	1.022.256	37	-	-	-	1.022.256	1.022.256	-	-	-	1.022.256	1.022.256

No	Subjek Nama	Piutang Saldo Akhir 2024	Tunggakan	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
				Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
1167	RICKY EFFENDI SIMANJUNTAK	659.520	37	-	-	-	659.520	659.520	-	-	-	659.520	659.520
1168	RICKY EFFENDI SIMANJUNTAK	1.022.256	40	-	-	-	1.022.256	1.022.256	-	-	-	1.022.256	1.022.256
1169	RICKY EFFENDI SIMANJUNTAK	659.520	40	-	-	-	659.520	659.520	-	-	-	659.520	659.520
1170	RICKY EFFENDI SIMANJUNTAK	1.022.256	47	-	-	-	1.022.256	1.022.256	-	-	-	1.022.256	1.022.256
1171	RICKY EFFENDI SIMANJUNTAK	659.520	47	-	-	-	659.520	659.520	-	-	-	659.520	659.520
1172	Gino	351.288	11	-	-	351.288	-	351.288	-	-	175.644	-	175.644
1173	GINO	186.864	37	-	-	-	186.864	186.864	-	-	-	186.864	186.864
1174	Muhammad Badrusalam	1.033.200	11	-	-	1.033.200	-	1.033.200	-	-	516.600	-	516.600
1175	Muhammad Badrusalam	123.984	11	-	-	123.984	-	123.984	-	-	61.992	-	61.992
1176	Subagio	1.363.824	11	-	-	1.363.824	-	1.363.824	-	-	681.912	-	681.912
1177	SUBAGIO	725.472	37	-	-	-	725.472	725.472	-	-	-	725.472	725.472
1178	SUBAGIO	725.472	40	-	-	-	725.472	725.472	-	-	-	725.472	725.472
1179	SUBAGIO	725.472	47	-	-	-	725.472	725.472	-	-	-	725.472	725.472
1180	SUBAGIO	725.472	47	-	-	-	725.472	725.472	-	-	-	725.472	725.472
1181	SUBAGIO	908.424	18	-	-	-	908.424	908.424	-	-	-	908.424	908.424
1182	Midi	826.560	11	-	-	826.560	-	826.560	-	-	413.280	-	413.280
1183	MIDI	439.680	74	-	-	-	439.680	439.680	-	-	-	439.680	439.680
1184	MIDI	439.680	40	-	-	-	439.680	439.680	-	-	-	439.680	439.680
1185	MIDI	439.680	47	-	-	-	439.680	439.680	-	-	-	439.680	439.680
1186	MIDI	439.680	47	-	-	-	439.680	439.680	-	-	-	439.680	439.680
1187	Muhammad Izroil	1.115.856	11	-	-	1.115.856	-	1.115.856	-	-	557.928	-	557.928
1188	MUHAMMAD IZROIL	593.568	37	-	-	-	593.568	593.568	-	-	-	593.568	593.568
1189	MUHAMMAD IZROIL	593.568	40	-	-	-	593.568	593.568	-	-	-	593.568	593.568
1190	MUHAMMAD IZROIL	593.568	47	-	-	-	593.568	593.568	-	-	-	593.568	593.568
1191	Agus Setiawan Wicaksana	1.839.096	11	-	-	1.839.096	-	1.839.096	-	-	919.548	-	919.548
1192	RUJIMAN MANUNRUNG	1.406.976	48	-	-	-	1.406.976	1.406.976	-	-	-	1.406.976	1.406.976
1193	Hendri Jones Simanjuntak	1.322.496	11	-	-	1.322.496	-	1.322.496	-	-	661.248	-	661.248
1194	RUDOLF SIMATUPANG	626.544	37	-	-	-	626.544	626.544	-	-	-	626.544	626.544
1195	RUDOLF SIMATUPANG	626.544	74	-	-	-	626.544	626.544	-	-	-	626.544	626.544
1196	RUDOLF SIMATUPANG	626.544	40	-	-	-	626.544	626.544	-	-	-	626.544	626.544
1197	RUDOLF SIMATUPANG	626.544	48	-	-	-	626.544	626.544	-	-	-	626.544	626.544
1198	RUDOLF SIMATUPANG	626.544	48	-	-	-	626.544	626.544	-	-	-	626.544	626.544
1199	Hadiyanto	2.004.408	11	-	-	2.004.408	-	2.004.408	-	-	1.002.204	-	1.002.204
1200	Carito	1.136.520	11	-	-	1.136.520	-	1.136.520	-	-	568.260	-	568.260
1201	MAD TURO	747.456	74	-	-	-	747.456	747.456	-	-	-	747.456	747.456
1202	MAD TURO	747.456	48	-	-	-	747.456	747.456	-	-	-	747.456	747.456
1203	MAD TURO	747.456	48	-	-	-	747.456	747.456	-	-	-	747.456	747.456
1204	MAD TURO	935.952	18	-	-	-	935.952	935.952	-	-	-	935.952	935.952
1205	Darno Sujoto	1.611.792	11	-	-	1.611.792	-	1.611.792	-	-	805.896	-	805.896
1206	SUTRISNO WIDODO	1.472.928	37	-	-	-	1.472.928	1.472.928	-	-	-	1.472.928	1.472.928
1207	SUTRISNO WIDODO	1.472.928	40	-	-	-	1.472.928	1.472.928	-	-	-	1.472.928	1.472.928
1208	SUTRISNO WIDODO	1.472.928	47	-	-	-	1.472.928	1.472.928	-	-	-	1.472.928	1.472.928
1209	SUTRISNO WIDODO	1.472.928	47	-	-	-	1.472.928	1.472.928	-	-	-	1.472.928	1.472.928
1210	Parno	1.405.152	11	-	-	1.405.152	-	1.405.152	-	-	702.576	-	702.576
1211	Ida Sudarti	1.797.768	11	-	-	1.797.768	-	1.797.768	-	-	898.884	-	898.884

No	Subjek Nama	Piutang Saldo Akhir 2024	Tunggakan	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
				Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
1212	RUKANTO	1.791.696	37	-	-	-	1.791.696	1.791.696	-	-	-	1.791.696	1.791.696
1213	RUKANTO	1.791.696	74	-	-	-	1.791.696	1.791.696	-	-	-	1.791.696	1.791.696
1214	RUKANTO	1.791.696	40	-	-	-	1.791.696	1.791.696	-	-	-	1.791.696	1.791.696
1215	RUKANTO	1.791.696	47	-	-	-	1.791.696	1.791.696	-	-	-	1.791.696	1.791.696
1216	RUKANTO	1.791.696	47	-	-	-	1.791.696	1.791.696	-	-	-	1.791.696	1.791.696
1217	RUKANTO	2.243.532	18	-	-	-	2.243.532	2.243.532	-	-	-	2.243.532	2.243.532
1218	Hj. Zahrotul Aini	3.347.568	11	-	-	3.347.568	-	3.347.568	-	-	1.673.784	-	1.673.784
1219	YANDI RACHYANDI	846.384	37	-	-	-	846.384	846.384	-	-	-	846.384	846.384
1220	YANDI RACHYANDI	846.384	40	-	-	-	846.384	846.384	-	-	-	846.384	846.384
1221	YANDI RACHYANDI	846.384	48	-	-	-	846.384	846.384	-	-	-	846.384	846.384
1222	YANDI RACHYANDI	846.384	48	-	-	-	846.384	846.384	-	-	-	846.384	846.384
1223	Sukimin	1.839.096	11	-	-	1.839.096	-	1.839.096	-	-	919.548	-	919.548
1224	SUKIMIN	978.288	37	-	-	-	978.288	978.288	-	-	-	978.288	978.288
1225	SUKIMIN	978.288	40	-	-	-	978.288	978.288	-	-	-	978.288	978.288
1226	SUKIMIN	978.288	47	-	-	-	978.288	978.288	-	-	-	978.288	978.288
1227	SUKIMIN	1.224.996	18	-	-	-	1.224.996	1.224.996	-	-	-	1.224.996	1.224.996
1228	Banta Cut, Se	1.219.176	11	-	-	1.219.176	-	1.219.176	-	-	609.588	-	609.588
1229	CARLI LAROSA	604.560	37	-	-	-	604.560	604.560	-	-	-	604.560	604.560
1230	CARLI LAROSA	604.560	40	-	-	-	604.560	604.560	-	-	-	604.560	604.560
1231	CARLI LAROSA	604.560	48	-	-	-	604.560	604.560	-	-	-	604.560	604.560
1232	CARLI LAROSA	604.560	48	-	-	-	604.560	604.560	-	-	-	604.560	604.560
1233	Tuti Trianingsih	1.756.440	11	-	-	1.756.440	-	1.756.440	-	-	878.220	-	878.220
1234	ABIH BIN HASAN	934.320	37	-	-	-	934.320	934.320	-	-	-	934.320	934.320
1235	ABIH BIN HASAN	934.320	40	-	-	-	934.320	934.320	-	-	-	934.320	934.320
1236	ABIH BIN HASAN	1.169.940	18	-	-	-	1.169.940	1.169.940	-	-	-	1.169.940	1.169.940
1237	Siti Aisah	1.570.464	11	-	-	1.570.464	-	1.570.464	-	-	785.232	-	785.232
1238	RAHMAT JAELANI	1.000.272	37	-	-	-	1.000.272	1.000.272	-	-	-	1.000.272	1.000.272
1239	RAHMAT JAELANI	1.000.272	74	-	-	-	1.000.272	1.000.272	-	-	-	1.000.272	1.000.272
1240	RAHMAT JAELANI	1.000.272	40	-	-	-	1.000.272	1.000.272	-	-	-	1.000.272	1.000.272
1241	RAHMAT JAELANI	1.000.272	47	-	-	-	1.000.272	1.000.272	-	-	-	1.000.272	1.000.272
1242	RAHMAT JAELANI	1.000.272	47	-	-	-	1.000.272	1.000.272	-	-	-	1.000.272	1.000.272
1243	RAHMAT JAELANI	1.252.524	18	-	-	-	1.252.524	1.252.524	-	-	-	1.252.524	1.252.524
1244	Yanuari Talaumbanua	3.430.224	11	-	-	3.430.224	-	3.430.224	-	-	1.715.112	-	1.715.112
1245	TAN PENG LEN	934.320	37	-	-	-	934.320	934.320	-	-	-	934.320	934.320
1246	TAN PENG LEN	934.320	74	-	-	-	934.320	934.320	-	-	-	934.320	934.320
1247	TAN PENG LEN	934.320	48	-	-	-	934.320	934.320	-	-	-	934.320	934.320
1248	TAN PENG LEN	934.320	48	-	-	-	934.320	934.320	-	-	-	934.320	934.320
1249	Roni Mulyani	1.673.784	11	-	-	1.673.784	-	1.673.784	-	-	836.892	-	836.892
1250	SARTIN	1.516.896	47	-	-	-	1.516.896	1.516.896	-	-	-	1.516.896	1.516.896
1251	Asep Haryadi	929.880	11	-	-	929.880	-	929.880	-	-	464.940	-	464.940
1252	EMPAT FATIMAH	1.890.624	37	-	-	-	1.890.624	1.890.624	-	-	-	1.890.624	1.890.624
1253	EMPAT FATIMAH	1.890.624	40	-	-	-	1.890.624	1.890.624	-	-	-	1.890.624	1.890.624
1254	EMPAT FATIMAH	1.890.624	47	-	-	-	1.890.624	1.890.624	-	-	-	1.890.624	1.890.624
1255	EMPAT FATIMAH	1.890.624	47	-	-	-	1.890.624	1.890.624	-	-	-	1.890.624	1.890.624
1256	Karjinah	1.405.152	11	-	-	1.405.152	-	1.405.152	-	-	702.576	-	702.576
1257	SARUMI	934.320	37	-	-	-	934.320	934.320	-	-	-	934.320	934.320
1258	SARUMI	912.336	48	-	-	-	912.336	912.336	-	-	-	912.336	912.336
1259	SARUMI	934.320	40	-	-	-	934.320	934.320	-	-	-	934.320	934.320
1260	SARUMI	934.320	47	-	-	-	934.320	934.320	-	-	-	934.320	934.320
1261	Rahmat Jaelani	1.880.424	11	-	-	1.880.424	-	1.880.424	-	-	940.212	-	940.212

No	Subjek Nama	Piutang Saldo Akhir 2024	Tunggakan	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
				Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
1262	MINARSIH	384.720	37	-	-	-	384.720	384.720	-	-	-	384.720	384.720
1263	MINARSIH	384.720	40	-	-	-	384.720	384.720	-	-	-	384.720	384.720
1264	MINARSIH	384.720	47	-	-	-	384.720	384.720	-	-	-	384.720	384.720
1265	MINARSIH	384.720	47	-	-	-	384.720	384.720	-	-	-	384.720	384.720
1266	H. T. Suryana	3.099.600	11	-	-	3.099.600	-	3.099.600	-	-	1.549.800	-	1.549.800
1267	HENI SURYANI	679.560	14	-	-	-	679.560	679.560	-	-	-	679.560	679.560
1268	Hj. Sunyani / Dewi Reni Widuri	2.479.680	11	-	-	2.479.680	-	2.479.680	-	-	1.239.840	-	1.239.840
1269	Ong Alen	2.521.008	11	-	-	2.521.008	-	2.521.008	-	-	1.260.504	-	1.260.504
1270	ONG ALEN	1.679.208	18	-	-	-	1.679.208	1.679.208	-	-	-	1.679.208	1.679.208
1271	Rakijem	867.888	11	-	-	867.888	-	867.888	-	-	433.944	-	433.944
1272	IDA SUDARTI	956.304	37	-	-	-	956.304	956.304	-	-	-	956.304	956.304
1273	IDA SUDARTI	956.304	74	-	-	-	956.304	956.304	-	-	-	956.304	956.304
1274	IDA SUDARTI	956.304	40	-	-	-	956.304	956.304	-	-	-	956.304	956.304
1275	IDA SUDARTI	956.304	47	-	-	-	956.304	956.304	-	-	-	956.304	956.304
1276	IDA SUDARTI	956.304	47	-	-	-	956.304	956.304	-	-	-	956.304	956.304
1277	IDA SUDARTI	1.197.468	18	-	-	-	1.197.468	1.197.468	-	-	-	1.197.468	1.197.468
1278	FANNY SARI WIJAYANTI	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
1279	Fanny Sari Wijayanti	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
1280	A. Sarjono	1.136.520	11	-	-	1.136.520	-	1.136.520	-	-	568.260	-	568.260
1281	TITI YANTO	593.568	37	-	-	Lampiran 3 -	593.568	593.568	-	-	-	593.568	593.568
1282	TITI YANTO	593.568	74	-	-	-	593.568	593.568	-	-	-	593.568	593.568
1283	TITI YANTO	593.568	40	-	-	-	593.568	593.568	-	-	-	593.568	593.568
1284	TITI YANTO	593.568	48	-	-	-	593.568	593.568	-	-	-	593.568	593.568
1285	TITI YANTO	593.568	48	-	-	-	593.568	593.568	-	-	-	593.568	593.568
1286	TITI YANTO	743.256	18	-	-	-	743.256	743.256	-	-	-	743.256	743.256
1287	Minarsih	723.240	11	-	-	723.240	-	723.240	-	-	361.620	-	361.620
1288	Sutrisno Widodo	2.768.976	11	-	-	2.768.976	-	2.768.976	-	-	1.384.488	-	1.384.488
1289	Tan Peng Len	1.756.440	11	-	-	1.756.440	-	1.756.440	-	-	878.220	-	878.220
1290	HJ. ZAHROTUL AINI	2.229.768	18	-	-	-	2.229.768	2.229.768	-	-	-	2.229.768	2.229.768
1291	Wawang Juandi	909.216	11	-	-	909.216	-	909.216	-	-	454.608	-	454.608
1292	TETI ASWATI	637.536	37	-	-	-	637.536	637.536	-	-	-	637.536	637.536
1293	TETI ASWATI	637.536	74	-	-	-	637.536	637.536	-	-	-	637.536	637.536
1294	TETI ASWATI	637.536	48	-	-	-	637.536	637.536	-	-	-	637.536	637.536
1295	TETI ASWATI	637.536	48	-	-	-	637.536	637.536	-	-	-	637.536	637.536
1296	R. Suhariantini	2.851.632	11	-	-	2.851.632	-	2.851.632	-	-	1.425.816	-	1.425.816
1297	R. Suhariantini	1.735.776	11	-	-	1.735.776	-	1.735.776	-	-	867.888	-	867.888
1298	Hj. Sunyani / Hertin Mardiani	4.050.144	11	-	-	4.050.144	-	4.050.144	-	-	2.025.072	-	2.025.072
1299	Hj. Sunyani / Hertin Mardiani	2.087.064	11	-	-	2.087.064	-	2.087.064	-	-	1.043.532	-	1.043.532
1300	Ramelan	1.797.768	11	-	-	1.797.768	-	1.797.768	-	-	898.884	-	898.884
1301	RAMELAN	956.304	37	-	-	-	956.304	956.304	-	-	-	956.304	956.304
1302	RAMELAN	956.304	40	-	-	-	956.304	956.304	-	-	-	956.304	956.304
1303	RAMELAN	956.304	47	-	-	-	956.304	956.304	-	-	-	956.304	956.304
1304	RAMELAN	956.304	47	-	-	-	956.304	956.304	-	-	-	956.304	956.304
1305	RAMELAN	1.197.468	18	-	-	-	1.197.468	1.197.468	-	-	-	1.197.468	1.197.468
1306	Hari Setiono	3.864.168	11	-	-	3.864.168	-	3.864.168	-	-	1.932.084	-	1.932.084
1307	Rujiman Manurung	2.644.992	11	-	-	2.644.992	-	2.644.992	-	-	1.322.496	-	1.322.496

No	Subjek Nama	Piutang Saldo Akhir 2024	Tunggakan	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
				Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
1308	YURNIZA	2.319.312	48	-	-	-	2.319.312	2.319.312	-	-	-	2.319.312	2.319.312
1309	Suratmi	1.136.520	11	-	-	1.136.520	-	1.136.520	-	-	568.260	-	568.260
1310	Daik	1.839.096	11	-	-	1.839.096	-	1.839.096	-	-	919.548	-	919.548
1311	Maria Lambok	1.732.320	13	-	-	-	1.732.320	1.732.320	-	-	-	1.732.320	1.732.320
1312	Suradi	1.549.800	11	-	-	1.549.800	-	1.549.800	-	-	774.900	-	774.900
1313	HANDAYANI	439.680	37	-	-	-	439.680	439.680	-	-	-	439.680	439.680
1314	HANDAYANI	439.680	40	-	-	-	439.680	439.680	-	-	-	439.680	439.680
1315	Jiem	1.012.536	11	-	-	1.012.536	-	1.012.536	-	-	506.268	-	506.268
1316	JIEM	538.608	37	-	-	-	538.608	538.608	-	-	-	538.608	538.608
1317	JIEM	538.608	40	-	-	-	538.608	538.608	-	-	-	538.608	538.608
1318	JIEM	538.608	47	-	-	-	538.608	538.608	-	-	-	538.608	538.608
1319	Yandi Rachyandi	1.591.128	11	-	-	1.591.128	-	1.591.128	-	-	795.564	-	795.564
1320	DEDEH NURSEHA	1.978.560	48	-	-	-	1.978.560	1.978.560	-	-	-	1.978.560	1.978.560
1321	Abih Bin Hasan	1.756.440	11	-	-	1.756.440	-	1.756.440	-	-	878.220	-	878.220
1322	SUPARMI	1.000.272	37	-	-	-	1.000.272	1.000.272	-	-	-	1.000.272	1.000.272
1323	SUPARMI	1.000.272	74	-	-	-	1.000.272	1.000.272	-	-	-	1.000.272	1.000.272
1324	SUPARMI	1.000.272	40	-	-	-	1.000.272	1.000.272	-	-	-	1.000.272	1.000.272
1325	SUPARMI	1.000.272	47	-	-	-	1.000.272	1.000.272	-	-	-	1.000.272	1.000.272
1326	SUPARMI	1.000.272	47	-	-	-	1.000.272	1.000.272	-	-	-	1.000.272	1.000.272
1327	SUPARMI	1.252.524	18	-	-	-	1.252.524	1.252.524	-	-	-	1.252.524	1.252.524
1328	Sumarti	1.033.200	11	-	-	1.033.200	-	1.033.200	-	-	516.600	-	516.600
1329	SUMARTI	549.600	37	-	-	-	549.600	549.600	-	-	-	549.600	549.600
1330	NURHAYATI	430.920	48	-	-	-	430.920	430.920	-	-	-	430.920	430.920
1331	NURHAYATI	430.920	48	-	-	-	430.920	430.920	-	-	-	430.920	430.920
1332	NURHAYATI	688.200	18	-	-	-	688.200	688.200	-	-	-	688.200	688.200
1333	Eva Meliyana	2.686.320	11	-	-	2.686.320	-	2.686.320	-	-	1.343.160	-	1.343.160
1334	Tintawati	1.570.464	11	-	-	1.570.464	-	1.570.464	-	-	785.232	-	785.232
1335	TINTAWATI	835.392	37	-	-	-	835.392	835.392	-	-	-	835.392	835.392
1336	TINTAWATI	835.392	48	-	-	-	835.392	835.392	-	-	-	835.392	835.392
1337	TINTAWATI	835.392	74	-	-	-	835.392	835.392	-	-	-	835.392	835.392
1338	TINTAWATI	835.392	47	-	-	-	835.392	835.392	-	-	-	835.392	835.392
1339	TINTAWATI	835.392	47	-	-	-	835.392	835.392	-	-	-	835.392	835.392
1340	Supardi	1.653.120	11	-	-	1.653.120	-	1.653.120	-	-	826.560	-	826.560
1341	RONI MULYANI	890.352	37	-	-	-	890.352	890.352	-	-	-	890.352	890.352
1342	Suparmi	1.880.424	11	-	-	1.880.424	-	1.880.424	-	-	940.212	-	940.212
1343	KARJINAH	747.456	37	-	-	-	747.456	747.456	-	-	-	747.456	747.456
1344	KARJINAH	747.456	40	-	-	-	747.456	747.456	-	-	-	747.456	747.456
1345	KARJINAH	747.456	47	-	-	-	747.456	747.456	-	-	-	747.456	747.456
1346	KARJINAH	747.456	47	-	-	-	747.456	747.456	-	-	-	747.456	747.456
1347	SITI SALMAH	737.808	14	-	-	-	737.808	737.808	-	-	-	737.808	737.808
1348	Doretea Ririn	1.963.080	11	-	-	1.963.080	-	1.963.080	-	-	981.540	-	981.540
1349	DORETEA RIRIN	1.044.240	37	-	-	-	1.044.240	1.044.240	-	-	-	1.044.240	1.044.240
1350	DORETEA RIRIN	1.044.240	40	-	-	-	1.044.240	1.044.240	-	-	-	1.044.240	1.044.240
1351	DORETEA RIRIN	1.044.240	47	-	-	-	1.044.240	1.044.240	-	-	-	1.044.240	1.044.240
1352	DORETEA RIRIN	1.044.240	47	-	-	-	1.044.240	1.044.240	-	-	-	1.044.240	1.044.240
1353	Elsye Takalalumang	2.045.736	11	-	-	2.045.736	-	2.045.736	-	-	1.022.868	-	1.022.868
1354	ELSYE TAKALALUMANG	1.088.208	37	-	-	-	1.088.208	1.088.208	-	-	-	1.088.208	1.088.208
1355	ELSYE TAKALALUMANG	1.088.208	40	-	-	-	1.088.208	1.088.208	-	-	-	1.088.208	1.088.208

No	Subjek Nama	Piutang Saldo Akhir 2024	Tunggakan	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
				Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
1356	ELSYE TAKALALUMANG	1.088.208	47	-	-	-	1.088.208	1.088.208	-	-	-	1.088.208	1.088.208
1357	Dr. IDA MARIATI HUTABARAT	2.429.232	48	-	-	-	2.429.232	2.429.232	-	-	-	2.429.232	2.429.232
1358	Dr. IDA MARIATI HUTABARAT	2.429.232	48	-	-	-	2.429.232	2.429.232	-	-	-	2.429.232	2.429.232
1359	Titi	2.087.064	11	-	-	2.087.064	-	2.087.064	-	-	1.043.532	-	1.043.532
1360	DIANA WIDIANINGSIH	835.392	37	-	-	-	835.392	835.392	-	-	-	835.392	835.392
1361	DIANA WIDIANINGSIH	835.392	40	-	-	-	835.392	835.392	-	-	-	835.392	835.392
1362	DIANA WIDIANINGSIH	835.392	47	-	-	-	835.392	835.392	-	-	-	835.392	835.392
1363	DIANA WIDIANINGSIH	835.392	47	-	-	-	835.392	835.392	-	-	-	835.392	835.392
1364	Suwanto	2.169.720	11	-	-	2.169.720	-	2.169.720	-	-	1.084.860	-	1.084.860
1365	IDA HAPSAH	3.132.720	37	-	-	-	3.132.720	3.132.720	-	-	-	3.132.720	3.132.720
1366	IDA HAPSAH	3.922.740	18	-	-	-	3.922.740	3.922.740	-	-	-	3.922.740	3.922.740
1367	IDA HAPSAH	3.132.720	74	-	-	-	3.132.720	3.132.720	-	-	-	3.132.720	3.132.720
1368	IDA HAPSAH	3.132.720	40	-	-	-	3.132.720	3.132.720	-	-	-	3.132.720	3.132.720
1369	IDA HAPSAH	3.132.720	48	-	-	-	3.132.720	3.132.720	-	-	-	3.132.720	3.132.720
1370	IDA HAPSAH	3.132.720	48	-	-	-	3.132.720	3.132.720	-	-	-	3.132.720	3.132.720
1371	Sianny	826.560	11	-	-	826.560	-	826.560	-	-	413.280	-	413.280
1372	SIANNY	439.680	40	-	-	-	439.680	439.680	-	-	-	439.680	439.680
1373	SIANNY	439.680	47	-	-	-	439.680	439.680	-	-	-	439.680	439.680
1374	SIANNY	439.680	47	-	-	-	439.680	439.680	-	-	-	439.680	439.680
1375	Ari Hariana	3.554.208	11	-	-	3.554.208	-	3.554.208	-	-	1.777.104	-	1.777.104
1376	LILIS YULISTIAWATI	1.286.064	37	-	-	-	1.286.064	1.286.064	-	-	-	1.286.064	1.286.064
1377	LILIS YULISTIAWATI	1.286.064	74	-	-	-	1.286.064	1.286.064	-	-	-	1.286.064	1.286.064
1378	LILIS YULISTIAWATI	1.286.064	47	-	-	-	1.286.064	1.286.064	-	-	-	1.286.064	1.286.064
1379	LILIS YULISTIAWATI	1.286.064	47	-	-	-	1.286.064	1.286.064	-	-	-	1.286.064	1.286.064
1380	Yuningsih	702.576	11	-	-	702.576	-	702.576	-	-	351.288	-	351.288
1381	TATI MULYATI	131.904	37	-	-	-	131.904	131.904	-	-	-	131.904	131.904
1382	TATI MULYATI	131.904	40	-	-	-	131.904	131.904	-	-	-	131.904	131.904
1383	TATI MULYATI	131.904	47	-	-	-	131.904	131.904	-	-	-	131.904	131.904
1384	TATI MULYATI	131.904	47	-	-	-	131.904	131.904	-	-	-	131.904	131.904
1385	Erna Maryana	1.219.176	11	-	-	1.219.176	-	1.219.176	-	-	609.588	-	609.588
1386	Koko Rachmat	1.653.120	11	-	-	1.653.120	-	1.653.120	-	-	826.560	-	826.560
1387	HJ. SUNYANI	8.145.072	37	-	-	-	8.145.072	8.145.072	-	-	-	8.145.072	8.145.072
1388	HJ. SUNYANI	8.145.072	40	-	-	-	8.145.072	8.145.072	-	-	-	8.145.072	8.145.072
1389	HJ. SUNYANI	8.145.072	47	-	-	-	8.145.072	8.145.072	-	-	-	8.145.072	8.145.072
1390	Jelita Tambunan	1.183.752	13	-	-	-	1.183.752	1.183.752	-	-	-	1.183.752	1.183.752
1391	Teti Aswati	1.198.512	11	-	-	1.198.512	-	1.198.512	-	-	599.256	-	599.256
1392	SITI SARAH NURJANAH	846.384	37	-	-	-	846.384	846.384	-	-	-	846.384	846.384
1393	SITI SARAH NURJANAH	846.384	74	-	-	-	846.384	846.384	-	-	-	846.384	846.384
1394	SITI SARAH NURJANAH	846.384	40	-	-	-	846.384	846.384	-	-	-	846.384	846.384
1395	SITI SARAH NURJANAH	846.384	48	-	-	-	846.384	846.384	-	-	-	846.384	846.384
1396	SITI SARAH NURJANAH	846.384	48	-	-	-	846.384	846.384	-	-	-	846.384	846.384
1397	SITI SARAH NURJANAH	1.059.828	18	-	-	-	1.059.828	1.059.828	-	-	-	1.059.828	1.059.828
1398	Risa Samuel Sunardi	1.384.488	11	-	-	1.384.488	-	1.384.488	-	-	692.244	-	692.244
1399	YUNINGSIH	373.728	37	-	-	-	373.728	373.728	-	-	-	373.728	373.728
1400	YUNINGSIH	373.728	74	-	-	-	373.728	373.728	-	-	-	373.728	373.728
1401	YUNINGSIH	373.728	40	-	-	-	373.728	373.728	-	-	-	373.728	373.728
1402	YUNINGSIH	373.728	47	-	-	-	373.728	373.728	-	-	-	373.728	373.728

No	Subjek Nama	Piutang Saldo Akhir 2024	Tunggakan	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
				Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
1403	YUNINGSIH	373.728	47	-	-	-	373.728	373.728	-	-	-	373.728	373.728
1404	YUNINGSIH	467.976	18	-	-	-	467.976	467.976	-	-	-	467.976	467.976
1405	Ratih Ratunahati	22.486.625	48	-	-	-	22.486.625	22.486.625	-	-	-	22.486.625	22.486.625
1406	A. Sarjono	2.190.384	11	-	-	2.190.384	-	2.190.384	-	-	1.095.192	-	1.095.192
1407	Siti Aisah	1.053.864	11	-	-	1.053.864	-	1.053.864	-	-	526.932	-	526.932
1408	Siti Aisah	578.592	11	-	-	578.592	-	578.592	-	-	289.296	-	289.296
1409	SITI AISAH	835.392	37	-	-	-	835.392	835.392	-	-	-	835.392	835.392
1410	SITI AISAH	560.592	37	-	-	-	560.592	560.592	-	-	-	560.592	560.592
1411	SITI AISAH	1.231.104	48	-	-	-	1.231.104	1.231.104	-	-	-	1.231.104	1.231.104
1412	SITI AISAH	835.392	74	-	-	-	835.392	835.392	-	-	-	835.392	835.392
1413	SITI AISAH	835.392	40	-	-	-	835.392	835.392	-	-	-	835.392	835.392
1414	SITI AISAH	560.592	40	-	-	-	560.592	560.592	-	-	-	560.592	560.592
1415	SITI AISAH	835.392	47	-	-	-	835.392	835.392	-	-	-	835.392	835.392
1416	SITI AISAH	835.392	47	-	-	-	835.392	835.392	-	-	-	835.392	835.392
1417	SITI AISAH	560.592	47	-	-	-	560.592	560.592	-	-	-	560.592	560.592
1418	SITI AISAH	560.592	47	-	-	-	560.592	560.592	-	-	-	560.592	560.592
1419	K. SUMPENA	1.446.276	16	-	-	-	1.446.276	1.446.276	-	-	-	1.446.276	1.446.276
1420	CEP NURDIN	9.858.720	12	-	-	9.858.720	-	9.858.720	-	-	4.929.360	-	4.929.360
1421	ALI SUHENDAR	637.728	16	-	-	-	637.728	637.728	-	-	-	637.728	637.728
1422	PARTA SUANDA	1.366.560	16	-	-	-	1.366.560	1.366.560	-	-	-	1.366.560	1.366.560
1423	Didi Junaedi	1.571.544	16	-	-	-	1.571.544	1.571.544	-	-	-	1.571.544	1.571.544
1424	Ir. Mardinus Haji Tulis	1.514.604	16	-	-	-	1.514.604	1.514.604	-	-	-	1.514.604	1.514.604
1425	NURJAMAN	455.520	16	-	-	-	455.520	455.520	-	-	-	455.520	455.520
1426	H. AHMAD WAHID	2.881.164	16	-	-	-	2.881.164	2.881.164	-	-	-	2.881.164	2.881.164
1427	H. AHMAD WAHID	967.980	16	-	-	-	967.980	967.980	-	-	-	967.980	967.980
1428	Deni Herdiyanto	994.800	48	-	-	-	994.800	994.800	-	-	-	994.800	994.800
1429	Djunaedi	1.184.352	16	-	-	-	1.184.352	1.184.352	-	-	-	1.184.352	1.184.352
1430	GOW TJENG TIANG	290.700	37	-	-	-	290.700	290.700	-	-	-	290.700	290.700
1431	GOW TJENG TIANG	290.700	40	-	-	-	290.700	290.700	-	-	-	290.700	290.700
1432	GOW TJENG TIANG	290.700	48	-	-	-	290.700	290.700	-	-	-	290.700	290.700
1433	GOUW TJING TIANG	626.280	18	-	-	-	626.280	626.280	-	-	-	626.280	626.280
1434	GOUW TJING TIANG	934.320	12	-	-	934.320	-	934.320	-	-	467.160	-	467.160
1435	Gouw Tjing Tiang	934.320	5	-	-	934.320	-	934.320	-	-	467.160	-	467.160
1436	NAJMUDIN	649.116	16	-	-	-	649.116	649.116	-	-	-	649.116	649.116
1437	ROSITA APOLINA R	11.235.000	69	-	-	-	11.235.000	11.235.000	-	-	-	11.235.000	11.235.000
1438	ROSITA APOLINA R	1.200.000	69	-	-	-	1.200.000	1.200.000	-	-	-	1.200.000	1.200.000
1439	SUJOTO SUTEDJA	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
1440	SUJOTO SUTEDJA	273.600	48	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
1441	SUJOTO SUTEDJA	273.600	40	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
1442	JUMINTA	626.340	16	-	-	-	626.340	626.340	-	-	-	626.340	626.340
1443	Adjam	663.200	48	-	-	-	663.200	663.200	-	-	-	663.200	663.200
1444	SUPARDI	933.816	16	-	-	-	933.816	933.816	-	-	-	933.816	933.816
1445	H. MAKSUM HENDRAWAN	1.537.380	16	-	-	-	1.537.380	1.537.380	-	-	-	1.537.380	1.537.380
1446	Muhammad Rifki	503.250	28	-	-	-	503.250	503.250	-	-	-	503.250	503.250
1447	Muhammad Rifki	2.025.000	17	-	-	-	2.025.000	2.025.000	-	-	-	2.025.000	2.025.000
1448	BAGJA SUBAGJADI	922.428	16	-	-	-	922.428	922.428	-	-	-	922.428	922.428
1449	WARDI	364.416	16	-	-	-	364.416	364.416	-	-	-	364.416	364.416
1450	BAMBANG.	273.600	37	-	-	-	273.600	273.600	-	-	-	273.600	273.600
1451	Bambang S	808.548	16	-	-	-	808.548	808.548	-	-	-	808.548	808.548

No	Subjek Nama	Piutang Saldo Akhir 2024	Tunggakan	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
				Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
1452	AGUS SADIKIN	979.368	16	-	-	-	979.368	979.368	-	-	-	979.368	979.368
1453	DEDY CAHYADI	9.080.400	22	-	-	-	9.080.400	9.080.400	-	-	-	9.080.400	9.080.400
1454	Nining	1.218.516	16	-	-	-	1.218.516	1.218.516	-	-	-	1.218.516	1.218.516
1455	TUTI ATIKAH	284.700	16	-	-	-	284.700	284.700	-	-	-	284.700	284.700
1456	Herlina	994.800	48	-	-	-	994.800	994.800	-	-	-	994.800	994.800
1457	BARTIKA	1.104.636	16	-	-	-	1.104.636	1.104.636	-	-	-	1.104.636	1.104.636
1458	Eti Suryati	994.800	48	-	-	-	994.800	994.800	-	-	-	994.800	994.800
1459	HODIJAH	945.204	16	-	-	-	945.204	945.204	-	-	-	945.204	945.204
1460	KUSYATIN	990.756	16	-	-	-	990.756	990.756	-	-	-	990.756	990.756
1461	D. RODIAH	1.423.500	16	-	-	-	1.423.500	1.423.500	-	-	-	1.423.500	1.423.500
1462	NY. EKA PUSPITASARI	1.787.916	16	-	-	-	1.787.916	1.787.916	-	-	-	1.787.916	1.787.916
1463	TATI SUGIARTI	717.444	16	-	-	-	717.444	717.444	-	-	-	717.444	717.444
1464	NINA SARMINAH	1.434.888	16	-	-	-	1.434.888	1.434.888	-	-	-	1.434.888	1.434.888
1465	HJ. SURASTIKA	2.642.016	16	-	-	-	2.642.016	2.642.016	-	-	-	2.642.016	2.642.016
1466	HJ. SUKARSIH	1.548.768	16	-	-	-	1.548.768	1.548.768	-	-	-	1.548.768	1.548.768
1467	HJ. SUKARSIH	2.858.388	16	-	-	-	2.858.388	2.858.388	-	-	-	2.858.388	2.858.388
1468	HJ. SUKARSIH	1.275.456	16	-	-	-	1.275.456	1.275.456	-	-	-	1.275.456	1.275.456
1469	HJ. SUKARSIH	3.143.088	16	-	-	-	3.143.088	3.143.088	-	-	-	3.143.088	3.143.088
1470	Nyai Suryati	829.000	48	-	-	-	829.000	829.000	-	-	-	829.000	829.000
1471	Rita Widihartati	455.950	48	-	-	-	455.950	455.950	-	-	-	455.950	455.950
1472	Rita Widihartati	994.800	48	-	-	-	994.800	994.800	-	-	-	994.800	994.800
1473	NOFIE EKA SUDARYANDTI	1.138.800	16	-	-	-	1.138.800	1.138.800	-	-	-	1.138.800	1.138.800
1474	NITI SUNDARI	1.981.512	16	-	-	-	1.981.512	1.981.512	-	-	-	1.981.512	1.981.512
1475	H. SUKAESIH	2.015.676	16	-	-	-	2.015.676	2.015.676	-	-	-	2.015.676	2.015.676
1476	Tutik Ibawati	3.108.750	48	-	-	-	3.108.750	3.108.750	-	-	-	3.108.750	3.108.750
1477	SAODAH	3.133.333	11	-	-	3.133.333	-	3.133.333	-	-	1.566.666,50	-	1.566.666,50
1478	Ikin Sodikin	9.409.150	48	-	-	-	9.409.150	9.409.150	-	-	-	9.409.150	9.409.150
1479	Hendra	2.718.000	16	-	-	-	2.718.000	2.718.000	-	-	-	2.718.000	2.718.000
1480	Aryanto	224.700	48	-	-	-	224.700	224.700	-	-	-	224.700	224.700
1481	Soeroso	505.575	48	-	-	-	505.575	505.575	-	-	-	505.575	505.575
1482	Wahyu Subehi	337.050	48	-	-	-	337.050	337.050	-	-	-	337.050	337.050
1483	Soegandi	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
1484	Suhaedi	2.717.100	9	-	-	2.717.100	-	2.717.100	-	-	1.358.550	-	1.358.550
1485	Abdul Rochim	337.050	48	-	-	-	337.050	337.050	-	-	-	337.050	337.050
1486	The Thing Nien	934.320	5	-	-	934.320	-	934.320	-	-	467.160	-	467.160
1487	H. Saprudin	3.108.750	48	-	-	-	3.108.750	3.108.750	-	-	-	3.108.750	3.108.750
1488	Herry Baehaki	4.970.700	48	-	-	-	4.970.700	4.970.700	-	-	-	4.970.700	4.970.700
1489	Herry Baehaki	1.150.242	48	-	-	-	1.150.242	1.150.242	-	-	-	1.150.242	1.150.242
1490	Herry Baehaki	777.192	48	-	-	-	777.192	777.192	-	-	-	777.192	777.192
1491	DAHLIA ARYANTI	4.155.400	20	-	-	-	4.155.400	4.155.400	-	-	-	4.155.400	4.155.400
1492	Atik Suryati	165.800	48	-	-	-	165.800	165.800	-	-	-	165.800	165.800
1493	Asep Permana	994.800	48	-	-	-	994.800	994.800	-	-	-	994.800	994.800
1494	Rizzal Febriliyan	603.250	28	-	-	-	603.250	603.250	-	-	-	603.250	603.250
1495	Rizzal Febriliyan	2.265.000	17	-	-	-	2.265.000	2.265.000	-	-	-	2.265.000	2.265.000
1496	Jaenudin	1.492.200	48	-	-	-	1.492.200	1.492.200	-	-	-	1.492.200	1.492.200
1497	Jaenudin	186.525	48	-	-	-	186.525	186.525	-	-	-	186.525	186.525
1498	TB. Taufiq Muharam	503.250	28	-	-	-	503.250	503.250	-	-	-	503.250	503.250
1499	TB. Taufiq Muharam	2.025.000	17	-	-	-	2.025.000	2.025.000	-	-	-	2.025.000	2.025.000
1500	Jajat Sudrajat	4.075.650	9	-	-	4.075.650	-	4.075.650	-	-	2.037.825	-	2.037.825

No	Subjek Nama	Piutang Saldo Akhir 2024	Tunggakan	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
				Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
1501	Hakim Hadi	2.717.100	9	-	-	2.717.100	-	2.717.100	-	-	1.358.550	-	1.358.550
1502	Rima Handayuni	2.265.000	17	-	-	-	2.265.000	2.265.000	-	-	-	2.265.000	2.265.000
1503	Lilis Atikah	2.025.000	17	-	-	-	2.025.000	2.025.000	-	-	-	2.025.000	2.025.000
1504	TK SBB BAITUL MU'MININ/IRMA WIDYANTI	1.843.387	48	-	-	-	1.843.387	1.843.387	-	-	-	1.843.387	1.843.387
1505	Siti Nurachmania	4.145.000	48	-	-	-	4.145.000	4.145.000	-	-	-	4.145.000	4.145.000
1506	Siti Nurachmania	746.100	48	-	-	-	746.100	746.100	-	-	-	746.100	746.100
1507	Hj. Ina Harnita	15.854.625	48	-	-	-	15.854.625	15.854.625	-	-	-	15.854.625	15.854.625
1508	YETTY SUHARTINI	3.133.333	11	-	-	3.133.333	-	3.133.333	-	-	1.566.666,50	-	1.566.666,50
1509	YETTY SUHARTINI	6.741.000	69	-	-	-	6.741.000	6.741.000	-	-	-	6.741.000	6.741.000
1510	Ester Novitri	1.405.152	11	-	-	1.405.152	-	1.405.152	-	-	702.576	-	702.576
1511	ESTER NOVITRI	747.456	37	-	-	-	747.456	747.456	-	-	-	747.456	747.456
1512	ESTER NOVITRI	935.952	18	-	-	-	935.952	935.952	-	-	-	935.952	935.952
1513	ESTER NOVITRI	747.456	40	-	-	-	747.456	747.456	-	-	-	747.456	747.456
1514	ESTER NOVITRI	747.456	47	-	-	-	747.456	747.456	-	-	-	747.456	747.456
1515	ESTER NOVITRI	747.456	47	-	-	-	747.456	747.456	-	-	-	747.456	747.456
1516	Tati Supriyanti	6.217.500	48	-	-	-	6.217.500	6.217.500	-	-	-	6.217.500	6.217.500
1517	HJ. Fatimah	2.265.000	17	-	-	-	2.265.000	2.265.000	-	-	-	2.265.000	2.265.000
1518	SURATI SUWARNI	170.820	16	-	-	-	170.820	170.820	-	-	-	170.820	170.820
1519	Endah Jubaedah	1.989.600	48	-	-	-	1.989.600	1.989.600	-	-	-	1.989.600	1.989.600
1520	Suheris	2.717.100	9	-	-	2.717.100	-	2.717.100	-	-	1.358.550	-	1.358.550
1521	WILIAM GUNAWAN/SURJADI SOHAN	355.680	37	-	-	-	355.680	355.680	-	-	-	355.680	355.680
1522	WILIAM GUNAWAN/SURJADI SOHAN	1.313.280	48	-	-	-	1.313.280	1.313.280	-	-	-	1.313.280	1.313.280
1523	WILIAM GUNAWAN/SURJADI SOHAN	1.368.000	48	-	-	-	1.368.000	1.368.000	-	-	-	1.368.000	1.368.000
1524	WILIAM GUNAWAN/SURJADI SOHAN.2	355.680	37	-	-	-	355.680	355.680	-	-	-	355.680	355.680
1525	WILIAM GUNAWAN/SURJADI SOHAN.2	1.067.040	48	-	-	-	1.067.040	1.067.040	-	-	-	1.067.040	1.067.040
1526	WILIAM GUNAWAN	766.272	18	-	-	-	766.272	766.272	-	-	-	766.272	766.272
1527	WILIAM GUNAWAN/SURJADI SOHAN.3	355.680	37	-	-	-	355.680	355.680	-	-	-	355.680	355.680
1528	WILIAM GUNAWAN/SURJADI	1.067.040	48	-	-	-	1.067.040	1.067.040	-	-	-	1.067.040	1.067.040
1529	SOHAN.3												
1530	WILIAM GUNAWAN	766.272	18	-	-	-	766.272	766.272	-	-	-	766.272	766.272
1531	WILIAM GUNAWAN/SURJADI SOHAN.4	649.800	48	-	-	-	649.800	649.800	-	-	-	649.800	649.800

No	Subjek Nama	Piutang Saldo Akhir 2024	Tunggakan	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
				Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
1532	WILIAM GUNAWAN/SURJADI SOHAN.4	417.240	78	-	-	-	417.240	417.240	-	-	-	417.240	417.240
1533	WILIAM GUNAWAN	766.272	18	-	-	-	766.272	766.272	-	-	-	766.272	766.272
1534	WILIAM GUNAWAN	1.143.168	12	-	-	1.143.168	-	1.143.168	-	-	571.584	-	571.584
1535	WILIAM GUNAWAN	1.143.168	12	-	-	1.143.168	-	1.143.168	-	-	571.584	-	571.584
1536	WILIAM GUNAWAN	1.143.168	12	-	-	1.143.168	-	1.143.168	-	-	571.584	-	571.584
1537	Wiliam Gunawan	1.143.168	5	-	-	1.143.168	-	1.143.168	-	-	571.584	-	571.584
1538	Wiliam Gunawan	1.143.168	5	-	-	1.143.168	-	1.143.168	-	-	571.584	-	571.584
1539	Wiliam Gunawan	1.143.168	5	-	-	1.143.168	-	1.143.168	-	-	571.584	-	571.584
1540	William Gunawan	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
1541	William Gunawan	1.341.024	5	-	-	1.341.024	-	1.341.024	-	-	670.512	-	670.512
1542	SURYO SUBIAKTO	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
1543	Suryo Subiakto	879.360	5	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
1544	Siti Maesaroh	1.822.500	17	-	-	-	1.822.500	1.822.500	-	-	-	1.822.500	1.822.500
1545	NURHALIMAH	328.320	37	-	-	-	328.320	328.320	-	-	-	328.320	328.320
1546	NURHALIMAH	328.320	78	-	-	-	328.320	328.320	-	-	-	328.320	328.320
1547	NURHALIMAH	328.320	40	-	-	-	328.320	328.320	-	-	-	328.320	328.320
1548	NURHALIMAH	328.320	48	-	-	-	328.320	328.320	-	-	-	328.320	328.320
1549	NURHALIMAH	328.320	48	-	-	-	328.320	328.320	-	-	-	328.320	328.320
1550	NURHALIMAH	707.328	18	-	-	-	707.328	707.328	-	-	-	707.328	707.328
1551	NURHALIMAH	1.055.232	12	-	-	1.055.232	-	1.055.232	-	-	527.616	-	527.616
1552	Nurhalimah	1.055.232	5	-	-	1.055.232	-	1.055.232	-	-	527.616	-	527.616
1553	Enih Rohayani	503.250	28	-	-	-	503.250	503.250	-	-	-	503.250	503.250
1554	Marsiam	934.320	5	-	-	934.320	-	934.320	-	-	467.160	-	467.160
1555	Joppy Kusuma	5.512.850	48	-	-	-	5.512.850	5.512.850	-	-	-	5.512.850	5.512.850
1556	HARYANTO	1.055.232	12	-	-	1.055.232	-	1.055.232	-	-	527.616	-	527.616
1557	Haryanto	1.055.232	5	-	-	1.055.232	-	1.055.232	-	-	527.616	-	527.616
1558	LAY OEN NIANG	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
1559	SINTA	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
1560	SUPRIADI	879.360	12	-	-	879.360	-	879.360	-	-	439.680	-	439.680
1561	M. RAHMAT	439.680	12	-	-	439.680	-	439.680	-	-	219.840	-	219.840
1562	ARDIANSAH FEBRIANTOKO	23.146.000	37	-	-	-	23.146.000	23.146.000	-	-	-	23.146.000	23.146.000
1563	MOH.MAHSUS	388.320	14	-	-	-	388.320	388.320	-	-	-	388.320	388.320
1564	Widati Wulandari	17.272.000	48	-	-	-	17.272.000	17.272.000	-	-	-	17.272.000	17.272.000
1565	Siti Sarah Nurjanah	1.591.128	11	-	-	1.591.128	-	1.591.128	-	-	795.564	-	795.564
1566	AGUS SETIAWAN WICAKSANA	978.288	37	-	-	-	978.288	978.288	-	-	-	978.288	978.288
1567	AGUS SETIAWAN WICAKSANA	978.288	74	-	-	-	978.288	978.288	-	-	-	978.288	978.288
1568	AGUS SETIAWAN WICAKSANA	978.288	40	-	-	-	978.288	978.288	-	-	-	978.288	978.288
1569	AGUS SETIAWAN WICAKSANA	978.288	48	-	-	-	978.288	978.288	-	-	-	978.288	978.288
1570	AGUS SETIAWAN WICAKSANA	978.288	48	-	-	-	978.288	978.288	-	-	-	978.288	978.288
1571	AGUS SETIAWAN WICAKSANA	1.224.996	18	-	-	-	1.224.996	1.224.996	-	-	-	1.224.996	1.224.996
1572	ACMAD SYAHRONI	5.288.400	15	-	-	-	5.288.400	5.288.400	-	-	-	5.288.400	5.288.400

No	Subjek Nama	Piutang Saldo Akhir 2024	Tunggakan	Kriteria Piutang					Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
				Lancar (0 sd 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 Bulan)	Diragukan (3 sd 12 Bulan)	Macet (Lebih dari 12 Bulan)	Jumlah	Kualitas Lancar (0,5 %)	Kualitas Kurang Lancar (10 %)	Kualitas Diragukan (50 %)	Kualitas Macet (100 %)	Jumlah
1573	MAMAN S	3.133.333	11	-	-	3.133.333	-	3.133.333	-	-	1.566.666,50	-	1.566.666,50
1574	PT. Pilar Artha Mandiri	145.260.000	47	-	-	-	145.260.000	145.260.000	-	-	-	145.260.000	145.260.000
1575	ACANG KURNIAWAN	618.912	18	-	-	-	618.912	618.912	-	-	-	618.912	618.912
1576	SARIP	1.359.120	14	-	-	-	1.359.120	1.359.120	-	-	-	1.359.120	1.359.120
1577	H. MAHRUS	1.359.120	14	-	-	-	1.359.120	1.359.120	-	-	-	1.359.120	1.359.120
1578	SOFIAN	1.320.288	14	-	-	-	1.320.288	1.320.288	-	-	-	1.320.288	1.320.288
1579	M. SAHIR	757.224	14	-	-	-	757.224	757.224	-	-	-	757.224	757.224
1580	M. SAHIR	601.896	14	-	-	-	601.896	601.896	-	-	-	601.896	601.896
1581	A. BADERI	601.896	14	-	-	-	601.896	601.896	-	-	-	601.896	601.896
1582	ENDANG SUHENDAR	1.572.696	14	-	-	-	1.572.696	1.572.696	-	-	-	1.572.696	1.572.696
1583	RUSLAN	1.048.464	14	-	-	-	1.048.464	1.048.464	-	-	-	1.048.464	1.048.464
1584	Hj. MARIANI	2.757.072	14	-	-	-	2.757.072	2.757.072	-	-	-	2.757.072	2.757.072
1585	M. YUSUP	465.984	14	-	-	-	465.984	465.984	-	-	-	465.984	465.984
1586	GRACE NURANI ADI LAKSANA	1.378.536	14	-	-	-	1.378.536	1.378.536	-	-	-	1.378.536	1.378.536
1587	SRI REJEKI	2.446.416	14	-	-	-	2.446.416	2.446.416	-	-	-	2.446.416	2.446.416
1588	OMI	951.384	14	-	-	-	951.384	951.384	-	-	-	951.384	951.384
1589	Suhandi Saputra/Novi Eka Sudaryati	1.730.976	16	-	-	-	1.730.976	1.730.976	-	-	-	1.730.976	1.730.976
1590	Lilis Haryati	671.892	16	-	-	-	671.892	671.892	-	-	-	671.892	671.892
1591	Neneng (Zalini)	888.264	16	-	-	-	888.264	888.264	-	-	-	888.264	888.264
		1.934.710.247		**-**	**14.205.312**	**613.634.434**	**1.306.870.501**	**1.934.710.247**	**-**	**1.420.531,20**	**306.817.217**	**1.306.870.501**	**1.615.108.249,20**

Lampiran 5.1

PEMERINTAH KOTA BOGOR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
DAFTAR PENYISIHAN PIUTANG DENDA PAJAK
31 DESEMBER TAHUN 2024

NO	JENIS PAJAK	PIUTANG	KRITERIA KUALITAS PIUTANG				PENYISIHAN PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN
			LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	
1	Pajak Hotel	**1.472.581.407,00**	**59.063.638,00**	**1.578.201,00**	-	**1.411.939.568,00**	**295.318,19**	**157.820,10**	**-**	**1.411.939.568,00**	**1.412.392.706,00**
	Pajak Hotel	1.401.360.593,00	46.175.879,00	1.108.601,00		1.354.076.113,00	230.879,40	110.860,10	-	1.354.076.113,00	1.354.417.853,00
	Pajak Motel	24.530.771,00	2.563.082,00			21.967.689,00	12.815,41	-	-	21.967.689,00	21.980.504,00
	Pajak Wisma Pariwisata	36.268.243,00	26.830,00	469.600,00		35.771.813,00	134,15	46.960,00	-	35.771.813,00	35.818.907,00
	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	10.421.800,00	10.297.847,00			123.953,00	51.489,24	-	-	123.953,00	175.442,00
2	Pajak Restoran	**2.954.542.981,00**	**282.091.025,00**	**156.541.162,00**	-	**2.515.910.794,00**	**1.410.455,13**	**15.654.116,20**	**-**	**2.515.910.794,00**	**2.532.975.366,00**
	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.264.675.775,00	182.071.724,00	103.978.762,00		978.625.289,00	910.358,62	10.397.876,20	-	978.625.289,00	989.933.524,00
	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	946.286.621,00	70.308.643,00	37.916.624,00		838.061.354,00	351.543,22	3.791.662,40	-	838.061.354,00	842.204.560,00
	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	272.845.927,00	27.380.617,00	7.905.322,00		237.559.988,00	136.903,09	790.532,20	-	237.559.988,00	238.487.423,00
	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	470.734.658,00	2.330.041,00	6.740.454,00		461.664.163,00	11.650,21	674.045,40	-	461.664.163,00	462.349.859,00
3	Pajak Reklame	**314.795.594,00**	**7.203.432,00**	**2.367.888,00**	-	**305.224.274,00**	**36.017,16**	**236.788,80**	**-**	**305.224.274,00**	**305.497.080,00**
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	277.878.352,00	6.509.074,00			271.369.278,00	32.545,37	-	-	271.369.278,00	271.401.823,00
	Pajak Reklame Kain	10.213.742,00	4.358,00	425.388,00		9.783.996,00	21,79	42.538,80	-	9.783.996,00	9.826.557,00
	Pajak Reklame Melekat/Stiker	737.250,00				737.250,00	-	-	-	737.250,00	737.250,00
	Pajak Reklame Berjalan	25.966.250,00	690.000,00	1.942.500,00		23.333.750,00	3.450,00	194.250,00	-	23.333.750,00	23.531.450,00
							-	-	-	-	-
4	Pajak Parkir	105.921.696,00	8.916.096,00	3.927.765,00		93.077.835,00	44.580,48	392.776,50	-	93.077.835,00	93.515.192,00
							-	-	-	-	-
5	Pajak Hiburan	**1.095.972.148,00**	**23.002.798,00**	**1.200.082,00**	-	**1.071.769.268,00**	**115.013,99**	**120.008,20**	**-**	**1.071.769.268,00**	**1.072.004.291,00**
	Pajak Tontonan Film	11.394.969,00	531.864,00	-		10.863.105,00	2.659,32	-	-	10.863.105,00	10.865.764,00
	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	160.650,00	5.000,00	-		155.650,00	25,00	-	-	155.650,00	155.675,00
	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	11.629.638,00	682.746,00	349.200,00		10.597.692,00	3.413,73	34.920,00	-	10.597.692,00	10.636.026,00
	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	3.884.622,00	732.243,00	508.572,00		2.643.807,00	3.661,22	50.857,20	-	2.643.807,00	2.698.326,00
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	663.696.123,00	17.651.225,00	28.800,00		646.016.098,00	88.256,13	2.880,00	-	646.016.098,00	646.107.234,00
	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran	405.206.146,00	3.399.720,00	313.510,00		401.492.916,00	16.998,60	31.351,00	-	401.492.916,00	401.541.266,00
6	Pajak Air Tanah	42.430.994,00	3.983.454,00	3.096.358,00		35.351.182,00	-	309.635,80	-	35.351.182,00	35.660.818,00
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	169.524.195.201,00	6.502.390.274,00	59.702.263.644,00	60.792.956.672,00	42.526.584.611,00	32.511.951,37	5.970.226.364,40	30.396.478.336,00	42.526.584.611,00	78.925.801.263,00
	JUMLAH	**175.510.440.021,00**	**6.886.650.717,00**	**59.870.975.100,00**	**60.792.956.672,00**	**47.959.857.532,00**	**34.413.336,31**	**5.987.097.510,00**	**30.396.478.336,00**	**47.959.857.532,00**	**84.377.846.716,00**

Lampiran 5.2

PEMERINTAH KOTA BOGOR
Penyisihan Piutang Denda Retribusi Daerah
(Yang dipungut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor)
Per 31 Desember 2024

No.	Nama Jenis Retribusi	Saldo Awal 31 Desember 2023	Progres Penyelesaian Piutang Denda 2024	Koreksi Piutang Tahun Sebelumnya	Penambahan Piutang Denda 2024	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Kriteria Kualitas Piutang Denda				Penyisihan Piutang Denda				Jumlah Penyisihan Piutang Denda
							Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Lancar 0.5%	Kurang Lancar 10%	Diragukan 50%	Macet 100%	
1	**Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**														
	Tahun 2009	1.138.000,00	-		-	1.138.000,00	-	-	-	1.138.000,00	-	-	-	1.138.000,00	1.138.000,00
	Tahun 2010	1.387.107,00	-		-	1.387.107,00	-	-	-	1.387.107,00	-	-	-	1.387.107,00	1.387.107,00
	Tahun 2011	1.163.296,00	-		-	1.163.296,00	-	-	-	1.163.296,00	-	-	-	1.163.296,00	1.163.296,00
	Tahun 2012	22.019.458,00	-		-	22.019.458,00	-	-	-	22.019.458,00	-	-	-	22.019.458,00	22.019.458,00
	Tahun 2013	118.687.425,00	-		-	118.687.425,00	-	-	-	118.687.425,00	-	-	-	118.687.425,00	118.687.425,00
	Tahun 2014	440.935.944,00	-		-	440.935.944,00	-	-	-	440.935.944,00	-	-	-	440.935.944,00	440.935.944,00
	Tahun 2015	22.234.665,00	-		-	22.234.665,00	-	-	-	22.234.665,00	-	-	-	22.234.665,00	22.234.665,00
	Tahun 2016	19.914.254,00	-		-	19.914.254,00	-	-	-	19.914.254,00	-	-	-	19.914.254,00	19.914.254,00
	Tahun 2017	74.693.401,00	-			74.693.401,00	-	-	-	74.693.401,00	-	-	-	74.693.401,00	74.693.401,00
	Tahun 2018	35.174.617,00				35.174.617,00	-	-	-	35.174.617,00	-	-	-	35.174.617,00	35.174.617,00
	Tahun 2019	43.891.308,00			-	43.891.308,00				43.891.308,00	-	-	-	43.891.308,00	43.891.308,00
	Tahun 2020	39.561.922,00	842.561,00		-	38.719.361,00	-	-	-	38.719.361,00	-	-	-	38.719.361,00	38.719.361,00
	Tahun 2021	5.984.151,00	-		-	5.984.151,00	-	-	-	5.984.151,00	-	-	-	5.984.151,00	5.984.151,00
	Tahun 2022	(2.536.165,00)	-	2.536.165,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**824.249.383,00**	**842.561,00**	**2.536.165,00**	**-**	**825.942.987,00**	**-**	**-**	**-**	**825.942.987,00**	**-**	**-**	**-**	**825.942.987,00**	**825.942.987,00**
2	**Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)**														
	Tahun 2022	-	12.512.295,00	-	15.554.183,00	3.041.888,00				3.041.888,00				3.041.888,00	3.041.888,00
	Tahun 2023	12.462.825,00	23.638.716,00		15.113.398,00	3.937.507,00	-	-	-	3.937.507,00	-	-	-	3.937.507,00	3.937.507,00
	Tahun 2024				9.175.405,00	9.175.405,00	2.620.668,00	738.296,00	5.816.441,00		13.103,34	73.829,60	2.908.220,50	-	2.995.153,44
	Jumlah	**12.462.825,00**	**36.151.011,00**	**-**	**39.842.986,00**	**16.154.800,00**	**2.620.668,00**	**738.296,00**	**5.816.441,00**	**6.979.395,00**	**13.103,34**	**73.829,60**	**2.908.220,50**	**6.979.395,00**	**9.974.548,44**
3	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan (PPTR)**														
	Tahun 2009	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tahun 2010	(91.126,00)	-		-	(91.126,00)	-	-	-	(91.126,00)	-	-	-	(91.126,00)	(91.126,00)
	Tahun 2011	1.030.425,00	-		-	1.030.425,00	-	-	-	1.030.425,00	-	-	-	1.030.425,00	1.030.425,00
	Tahun 2012	292.982,00	-		-	292.982,00	-	-	-	292.982,00	-	-	-	292.982,00	292.982,00
	Tahun 2013	17.683.872,00	-		-	17.683.872,00	-	-	-	17.683.872,00	-	-	-	17.683.872,00	17.683.872,00
	Tahun 2014	16.971.465,00	-		-	16.971.465,00	-	-	-	16.971.465,00	-	-	-	16.971.465,00	16.971.465,00
	Tahun 2015	8.689.752,00	-		-	8.689.752,00	-	-	-	8.689.752,00	-	-	-	8.689.752,00	8.689.752,00
	Tahun 2016	3.182.544,00	-		-	3.182.544,00	-	-	-	3.182.544,00	-	-	-	3.182.544,00	3.182.544,00
	Tahun 2017	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tahun 2018	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	Tahun 2019					-				-	-	-	-	-	-
	Tahun 2020					-				-	-	-	-	-	-
	Tahun 2021	1.151.013,00	269.640,00		-	881.373,00				881.373,00	-	-	-	881.373,00	881.373,00
	Tahun 2022	17.550,00			-	17.550,00	-			17.550,00	-	-	-	17.550,00	17.550,00
	Tahun 2023	1.653.304,00	1.878.187,00		-	(224.883,00)	-	-		(224.883,00)	-	-	-	(224.883,00)	(224.883,00)
	Tahun 2024				1.291.665,00	1.291.665,00	167.160,00	1.124.505,00			835,80	112.450,50	-	-	113.286,30
	Jumlah	**50.581.781,00**	**2.147.827,00**		**1.291.665,00**	**49.725.619,00**	**167.160,00**	**1.124.505,00**	**-**	**48.433.954,00**	**835,80**	**112.450,50**	**-**	**48.433.954,00**	**48.547.240,30**
4	**Retribusi Izin Gangguan tempat usaha/kegiatan (HO)**														
	Tahun 2009	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tahun 2010	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tahun 2011	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Nama Jenis Retribusi	Saldo Awal 31 Desember 2023	Progres Penyelesaian Piutang Denda 2024	Koreksi Piutang Tahun Sebelumnya	Penambahan Piutang Denda 2024	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Kriteria Kualitas Piutang Denda				Penyisihan Piutang Denda				Jumlah Penyisihan Piutang Denda
							Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Lancar 0.5%	Kurang Lancar 10%	Diragukan 50%	Macet 100%	
	Tahun 2012	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tahun 2013	15.968.501,00	-		-	15.968.501,00	-	-	-	15.968.501,00	-	-	-	15.968.501,00	15.968.501,00
	Tahun 2014	50.021.021,00	-		-	50.021.021,00	-	-	-	50.021.021,00	-	-	-	50.021.021,00	50.021.021,00
	Tahun 2015	38.932.594,00	-		-	38.932.594,00	-	-	-	38.932.594,00	-	-	-	38.932.594,00	38.932.594,00
	Tahun 2016	4.327.548,00	-		-	4.327.548,00	-	-	-	4.327.548,00	-	-	-	4.327.548,00	4.327.548,00
	Tahun 2017	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tahun 2018	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tahun 2019					-									
	Jumlah	**109.249.664,00**	**-**		**-**	**109.249.664,00**	**-**	**-**	**-**	**109.249.664,00**	**-**	**-**	**-**	**109.249.664,00**	**109.249.664,00**
5	**Retribusi Izin Pengendalian Menara**														
	Tahun 2020	-													
	Tahun 2021														
	Tahun 2022	9.076.050,00			-	9.076.050,00				9.076.050,00			-	9.076.050,00	18.152.100,00
	Tahun 2023	831.060,00	415.530,00		-	415.530,00		-	-	415.530,00	-	-	-	415.530,00	831.060,00
	Jumlah	**9.907.110,00**	**415.530,00**		**-**	**9.491.580,00**	**-**	**-**	**-**	**9.491.580,00**	**-**	**-**	**-**	**9.491.580,00**	**18.983.160,00**
	Jumlah	**1.006.450.763,00**	**39.556.929,00**	**2.536.165,00**	**41.134.651,00**	**1.010.564.650,00**	**2.787.828,00**	**1.862.801,00**	**5.816.441,00**	**1.000.097.580,00**	**13.939,14**	**186.280,10**	**2.908.220,50**	**1.000.097.580,00**	**1.012.697.599,74**

Lampiran 6

PEMERINTAH KOTA BOGOR
Beban di Bayar di Muka
Per 31 Desember 2024

1 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BLUD)

NO	NAMA PERUSAHAAN	PEMEGANG POLIS	NO POLIS	JENIS POLIS	JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN	JUMLAH HARI PERTANGGUNGAN	JUMLAH HARI YANG BELUM JATUH TEMPO	NILAI PREMI (Rp)	SISA YANG BELUM JATUH TEMPO (Rp)
1	PT Asuransi Central Asia (ACA Asuransi)	RSUD Kota Bogor	102020124100001613	Asuransi Kendaraan Bermotor	25 Oktober 2024 sd 25 Oktober 2025	365	298	7.689.720,00	6.278.182,36
								7.689.720,00	**6.278.182,36**

2 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	NAMA PERUSAHAAN	PEMEGANG POLIS	NO POLIS	JENIS POLIS	JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN	JUMLAH HARI PERTANGGUNGAN	JUMLAH HARI YANG BELUM JATUH TEMPO	NILAI PREMI (Rp)	SISA YANG BELUM JATUH TEMPO (Rp)
1	Asuransi Bumida Bumiputra	Dinas Perumahan dan Permukiman	1017090124050001	Asuransi Kendaraan Bermotor	09 Juni 2024 sd 09 Juni 2025	365	160	200.000.000,00	87.671.232,88
								200.000.000,00	**87.671.232,88**

3 KECAMATAN BOGOR SELATAN

NO	NAMA PEMILIK	NAMA PELANGGAN	PERJANJIAN	JENIS LAYANAN	JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN	JUMLAH HARI PERTANGGUNGAN	JUMLAH HARI YANG BELUM JATUH TEMPO	NILAI PREMI (Rp)	SISA YANG BELUM JATUH TEMPO (Rp)
1	Djoni Kustari, SE	Kelurahan Pakuan	027/001//SP/Sewa.KP/Bosel/XI/2024	Sewa Gedung Bangunan	17 Nopember 2024 s.d 16 Nopember 2025	365	320	106.700.000,00	93.545.205,00
								106.700.000,00	**93.545.205,00**

4 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	NAMA PERUSAHAAN	PEMEGANG POLIS	NO POLIS	JENIS POLIS	JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN	JUMLAH HARI PERTANGGUNGAN	JUMLAH HARI YANG BELUM JATUH TEMPO	NILAI PREMI (Rp)	SISA YANG BELUM JATUH TEMPO (Rp)
1	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	BKAD	16021024004392-2/1	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor	22 Mei 2024 s.d 22 Mei 2025	365	142	816.709.469,00	317.733.547,00
								816.709.469,00	**317.733.547**
TOTAL									**505.228.167,24**

Lampiran 7

Penyertaan Modal Pemda
(Pencatatan Berdasarkan Metode Biaya dan Metode Ekuitas)
Per 31 Desember 2024

No.	Nama Rekening	Metode Pencatatan	Ekuitas Perusahaan Daerah (Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah 2024) Unaudited						Saldo Akhir Per 31 Desember 2024
			Saldo Investasi Akhir 31 Desember 2023	Koreksi	Penambahan Investasi Tahun 2024	Pendapatan kekayaan yang dipisahkan atau rugi penurunan Nilai Investasi (LO)	Pembagian Laba yang mengurangi Modal pemda	Jumlah Ekuitas Pemda di neraca BUMD 2024	
1	2	3	5	6	7	9	10	11=5+6+7+9-10	12 = 11
1	Penyertaan Modal pada Bank Jabar	Biaya	16.078.535.753,00					16.078.535.753,00	16.078.535.753,00
2	Penyertaan Modal pada PDAM Kota Bogor	Ekuitas	286.594.932.339,65	168.643.863.793,02	47.819.268.000,00	58.812.648.110,57	25.588.369.000,00	536.282.343.243,24	536.282.343.243,24
3	Penyertaan Modal pada BPR Bank Kota Bogor	Ekuitas	61.189.662.448,50	25.324.599.731,50		4.087.409.370,00	2.774.558.399,00	87.827.113.151,00	87.827.113.151,00
4	Penyertaan Modal pada PD Jasa Transportasi	Ekuitas	5.879.112.472,10	(5.879.112.472,10)		-	-	(0,00)	(0,00)
5	Penyertaan Modal pada PD Pasar Pakuan	Ekuitas	465.381.602.469,50	(110.613.577.264,50)		8.300.122.766,00	962.724.435,00	362.105.423.536,00	362.105.423.536,00
Jumlah			**835.123.845.482,75**	**77.475.773.787,92**	**47.819.268.000,00**	**71.200.180.246,57**	**29.325.651.834,00**	**1.002.293.415.683,24**	**1.002.293.415.683,24**

Lampiran 8

PEMERINTAH KOTA BOGOR
Tagihan Penjualan Angsuran
Per 31 Desember 2024

No	U r a i a n	Nilai (Rp)
	TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN	
1	Penjualan Rumah Golongan III	5.491.595,00
2	Penjualan Kendaraan Roda Dua	4.642.470,00
3	Penjualan Kendaraan Roda Empat	15.442.500,00
	Jumlah I	25.576.565,00
4	Penjualan Tanah Eks Tanah Sewa :	
	- Kelurahan Kebon Pedes	39.394.531,00
	- Kelurahan Babakan Pasar	80.379.617,00
	- Kelurahan Sukasari	625.327.409,00
	Jumlah II	745.101.557,00
	J u m l a h (I dan II)	**770.678.122,00**

Lampiran 9

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH
KASUS KERUGIAN DAERAH YANG TELAH MEMPEROLEH PENETAPAN PEMBEBANAN
SEMESTER II TAHUN 2024

Obyek/Entitas Pemantauan: : Pemerintah Kota Bogor

No	Jenis Kerugian	Penanggung Jawab (nama/NIP/jabatan/Status)	Pengampu/ Kuasa Hukum/ Ahli Waris	Jumlah Kasus		Pengembalian *)		Sisa		Permasalahan			Keterangan
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Masalah	Rekomendasi	Komentar Instansi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	**Bendahara (TP)**												
	JUMLAH A			**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**				
B	**Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain**												
1	Hilangnya Kendaraan Operasional Pemkot Bogor Merk Toyota Kijang Nomor.F.637.A.Tahun 1990	Nama : Letkol.Inf.Soemardji NIP : - Tgl Lahir : Alamat : Cianjur Jabatan : - Status : Anggota DPRD		1	14.000.000,00	1	2.000.000,00	1	12.000.000,00	Waktu kejadian yang telah lama, surat tidak sampai karena alamat baru tidak diketahui dan mengingat yang bersangkutan juga seorang mantan anggota DPRD yang oleh Majelis TPTGR masih dikaji proses penyelesaiannya mengingat yang bersangkutan bukan seorang PNS. Namun, berdasarkan jawaban BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang bersangkutan tetap dalam proses penuntutan ganti rugi barang meskipun bukan seorang PNS. Jadi, komunikasi dengan yang bersangkutan merupakan masalah utama penyelesaian kerugian daerah ini. Belum ada pembayaran selama semester	Melakukan kajian secara hukum dan melayangkan surat kepada BPK untuk mengetahui penyelesaiannya (surat sudah dikirim)	Proses pengajuan penyelesaian piutang di KPKNL	
2	Hilangnya Kendaraan Operasional Pemkot Bogor Merk Toyota Kijang Nomor.F.686.A.Tahun 1990	Nama : Alm. Drh.Nana Supriatna,MPH NIP : 080 033 960 Tgl Lahir : Bogor, 19 Desember 1949 Alamat : Jl Biduri Blok 1 No. 8 RT 8/7 Pabaton Indah Tanah Sareal Jabatan : Kepala Dinas Status : Meninggal dunia		1	16.500.000,00	1	4.812.500,00	1	11.687.500,00	Yang bersangkutan telah meninggal dunia dan ahli waris telah mengajukan permohonan penghapusan ganti rugi meskipun SKTJM telah ada. Hal ini dalam proses kajian hukum oleh Majelis TPTGR mengenai saran kepada Walikota terhadap permohonan ahli waris. Belum ada pembayaran selama semester	sda	Proses pengajuan penyelesaian piutang di KPKNL	
3	Hilangnya Kendaraan Operasional Pemkot Bogor Merk Daihatsu Esspas Nomor.F.1129.A.Tahun 1997	Nama : Surtiwa Iskandar NIP : 480 071 505 Tgl Lahir : Jakarta, 16 Oktober 1954 Alamat : Jl. Tatapan 1 Bantarjati Bogor Jabatan : Pelaksana Status : Pensiun		1	40.000.000,00	1	3.350.000,00	1	36.650.000,00	Yang bersangkutan telah meninggal dunia. Surat teguran belum dapat disampaikan karena alamat yang kurang jelas. Belum ada pembayaran selama semester		Akan segera dilaksanakan	
4	Hilangnya Kendaraan Operasional Pemkot Bogor Merk Honda Win Nomor.F.2002.A.Tahun 1990	Nama : Dedy Supardi NIP : 480 090 034 Tgl Lahir : Majalengka, 7 Mei 1970 Alamat : Komplek Asrama Badak Putih I Kota Batu RT/03/5 Ciomas Bogor Jabatan : Pelaksana Status : Pensiun		1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	-	-				Telah diterbitkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 951.45-412 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian Daerah Atas Nama Saudara Dedi Supardi

No	Jenis Kerugian	Penanggung Jawab (nama/NIP/jabatan/Status)	Pengampu/ Kuasa Hukum/ Ahli Waris	Jumlah Kasus		Pengembalian *)		Sisa		Permasalahan			Keterangan
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Masalah	Rekomendasi	Komentar Instansi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Hilangnya Kendaraan Operasional Pemkot Bogor Merk Toyota Kijang Nomor.F.663.A.Tahun 1990	Nama : H.R.Sudradjat.H,BE NIP : - Tgl Lahir : Rangkasbitung, 17 Februari 1946 Alamat : Jl. Jambu III No. 10 RT 08/06 Kel. Baranangsiang Kecamatan Bogor Jabatan : Mantan Kabag Penyusunan Program Status : Meninggal dunia		1	14.000.000,00	1	6.500.000,00	1	7.500.000,00	Yang bersangkutan telah meninggal dunia. Ahli waris telah datang ke Majelis untuk menjelaskan bahwa tidak bersedia membayar sisanya karena menurut pengakuan almarhum bahwa sisanya akan dibantu dibayarkan oleh Sekda pada saat kejadian berlangsung. ***Belum ada pembayaran selama semester ke-2 TA 2018***	Dibuatkan kajian hukum untuk proses penghapusan.	Proses pengajuan penyelesaian piutang di KPKNL	
6	Hilangnya Kendaraan Operasional Pemkot Bogor Merk Honda Win Nomor.F.2002.A.Tahun 1990	Nama : Syamsudin NIP : 480 098 762 Tgl Lahir : Bogor, 28 Juni 1957 Alamat : Kp. Nyalindung RT 1/08 Jabatan : Pelaksana Status : Aktif		1	3.750.000,00	1	3.750.000,00	-	-				Telah diterbitkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 951.45-415 Tahun 2012 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian Daerah
7	Hilangnya Kendaraan Operasional Pemkot Bogor Merk Honda MCB Nomor.F.2128.A.Tahun 1997	Nama : Prihatno NIP : 196205021986111001 Tgl Lahir : Banjarmasin, 2 Mei 1962 Alamat : Sukasari 3 No. 54 RT 07 RW 01 Bogor Timur Jabatan : Pelaksana DLLAJ Status : Aktif		1	3.960.000,00	1	3.960.000,00	-	-				Telah diterbitkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 951.45-173 Tahun 2007 Tahun 2007 tanggal 3 September 2007 tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian Daerah
8	Hilangnya Kendaraan Operasional Pemkot Bogor Merk Honda MCB Nomor.F.3267.A.Tahun 2003	Nama : Arwandi NIP : 010 205 700 Tgl Lahir : Bogor, 24 Februari 1956 Alamat : Kp. Babalur Sari RT 04/01 Kel. Muarasari Kec. Bogor Selatan Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan Status : Pensiun		1	4.004.000,00	1	4.004.000,00	-	-				**(Pemantauan KNKD Semester I Tahun 2017) :** Telah diterbitkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 951.45-223 Tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian Daerah Atas Nama Saudara Arwandi
9	Hilangnya Kendaraan Operasional Pemkot Bogor Merk Honda MF Nomor.F.3532.A.Tahun 2006	Nama : Dyah Herawati NIP : 140 298 388 Tgl Lahir : Subang, 31 Maret 1969 Alamat : Jalan Pakis Gunung II RT 5/9 Kelurahan Cilendek Timur Kec. Bogor Barat Jabatan : Pelaksana Gizi Status : Aktif		1	7.304.000,00	1	7.304.000,00	-	-				Sampai dengan semester I 2015 telah diangsur sebesar Rp410.000,00. Pada semester II 2015 dilakukan angsuran sebesar Rp1.020.000,00, dengan rincian: 1. STS No. 01/Aset/TPTGR/XI/2015 tgl 30 Nov 2015 sebesar Rp200.000,00; 2. STS tgl 30 Des 2015 sebesar Rp820.000,00 (STS tidak bernomor)
													Pemantauan Kerugda Semester I Th 2019: SK Walikota No. 951.45-118 Tahun 2019 tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian Daerah
10	Hilangnya Kendaraan Operasional Pemkot Bogor Merk Honda Kirana Nomor.F.3223.A.Tahun 2003	Nama : Deddy Mulyadi NIP : 010 127 868 Tgl Lahir : Majalengka, 26 Juni 1955 Alamat : BTN Ciparigi Indah Blok I No. 7 RT 02/VII Bogor Jabatan : Kasubag Keagamaan Status : Aktif		1	3.600.000,00	1	3.600.000,00	-	-				**(Pemantauan KNKD Semester I Tahun 2017) :** Telah diterbitkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 951.45-226 Tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian Daerah Atas Nama Saudara Deddy Mulyadi

No	Jenis Kerugian	Penanggung Jawab (nama/NIP/jabatan/Status)	Pengampu/ Kuasa Hukum/ Ahli Waris	Jumlah Kasus		Pengembalian *)		Sisa		Permasalahan			Keterangan
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Masalah	Rekomendasi	Komentar Instansi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Hilangnya Kendaraan Operasional Pemkot Bogor Merk Honda MCB Nomor.F.3112.A.Tahun 2001	Nama : Dedi Hidayat NIP : 480 182 046 Tgl Lahir : Bandung, 28 Desember 1963 Alamat : Kp. Tajur RT 04/04 Kel. Muarasari Kec. Bogor Selatan Jabatan : Pelaksana Status : Aktif		1	6.424.000,00	1	3.915.000,00	1	2.509.000,00	Yang bersangkutan merasa cukup membayar setengah dari nilai kerugian karena secara lisan telah disampaikan bahwa Camat bogor selatan pada waktu kejadian akan membantu melunasi setenganya. Namun kenyataannya tidak. Diberikan Teguran/ Tagihan tgl 30 Januari 2015 **Belum ada pembayaran selama semester ke-2 TA 2018**	Diupayakan melakukan penagihan kepada ybs dengan membuat surat kuasa pemotongan gaji.	Akan segera dipanggil oleh Majelis TP TGR	
12	Hilangnya CPU dan Printer Merk Merk Cannon Tahun 2004	Nama : Hidayatulloh NIP : - Tgl Lahir : Bogor, 23 Juli 1956 Alamat : Warung Limus RT 04/09 Mulyaharja Bogor Jabatan : Pelaksana Status : Aktif		1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	-	-				Telah diterbitkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 951.45-416 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian Daerah Atas Nama Saudara Hidayatullah
13	Hilangnya Kendaraan Operasional Pemkot Bogor Merk Toyota Pick Up Nomor.F.8100.A.Tahun 1995	Nama : Ir. Daud Arsandi NIP : 19610303 199303 1 003 Tgl Lahir : Palembang, 3 Maret 1961 Alamat : Jl. Taman Sari III Blok V 16 No. 5 Taman Cimanggu Kedung Waringin Jabatan : Kepala Bidang Status : Aktif		1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	-	-				Telah diterbitkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 951.45-78 Tahun 2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian Daerah Atas Nama Saudara Ir. Daud Arsandi
14	Hilangnya Kendaraan Operasional Pemkot Bogor Merk Honda MCB Nomor.F.3142.A.Tahun 2002	Nama : Drs.Ayep Ruhiyat NIP : 19631210 199203 1 006 Tgl Lahir : Bandung, 10 Desember 1963 Alamat : Jl. Rd. Khanafiah RT 02/03 Kel. Cimahpar Kec. Bogor Utara Jabatan : Lurah Status : Aktif		1	5.700.000,00	1	800.000,00	1	4.900.000,00	Yang bersangkutan belum merespon surat teguran Walikota. Diberikan teguran tgl 30 Januari 2015 Belum ada pembayaran selama semester ke-2 TA 2018	Diupayakan melakukan penagihan kepada ybs dengan membuat surat kuasa pemotongan gaji.	Yang bersangkutan sudah beberapa kali diundang tp yg bersangkutan tidak pernah datang, akan dipanggil kembali	STS tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp480.000,00
15	Hilangnya Kendaraan Operasional Pemkot Bogor Merk Toyota Kijang Mini Bus KF.50 LSX Nomor.F.670.A Tahun 1990	Nama : Ilyas/Dudi Suhardi(Alm) NIP : 19620116 199211 1 002 Tgl Lahir : Bogor, 16 Januari 1962 Alamat : Komplek Pagelaran Ciomas Bogor Jabatan : Pelaksana Status : Aktif		1	7.200.000,00	1	7.200.000,00	-	-				**(Pemantauan KNKD Semester I Tahun 2017)** : Telah diterbitkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 951.45-225 Tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian Daerah Atas Nama Saudara Ilyas
16	Hilangnya Kendaraan Operasional Pemkot Bogor Merk Honda Supra Fit.X Nomor.F.3499.A.Tahun 2006	Nama : Iswan Muhamad,Amd NIP : 480 114 186 Tgl Lahir : Bogor, 17 September 1967 Alamat : Muara lebak Rt.02/10 Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat Jabatan : Pelaksana Status : Aktif		1	6.156.000,00			1	6.156.000,00	Yang bersangkutan belum merespon surat teguran Walikota Belum ada pembayaran selama semester ke-2 TA 2018	Diupayakan melakukan penagihan kepada ybs dengan membuat surat kuasa pemotongan gaji.	Yang bersangkutan sdh pernah diundang dan akan segera melakukan pembayaran	
17	Hilangnya Kendaraan Operasional Pemkot Bogor Merk Toyota Pick Up Nomor.F.8107.A.Tahun 1990	Nama : Rully Syahrul NIP : 010 252 936 Tgl Lahir : Bogor, 17 Desember 1958 Alamat : Jln Raya Parung RT 01/03 Kp Kemang Jabatan : Pelaksana Status : Aktif		1	4.200.000,00	1	4.200.000,00	-	-				Telah diterbitkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 951.45-104 Tahun 2016 tanggal 9 April 2016 tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian Daerah Atas Nama Saudara Rully Syachrul

No	Jenis Kerugian	Penanggung Jawab (nama/NIP/jabatan/Status)	Pengampu/ Kuasa Hukum/ Ahli Waris	Jumlah Kasus		Pengembalian *)		Sisa		Permasalahan			Keterangan
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Masalah	Rekomendasi	Komentar Instansi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	Hilangnya Kendaraan Operasional Pemkot Bogor Merk Honda Supra Fit.X Nomor.F.3704.A.Tahun 2007	Nama : Atik Misna NIP : 480 160 045 Tgl Lahir : Bandung, 23 September 1963 Alamat : Kp.Sinar Mulya Ciomas RT 06/06 No. 123 Ciomas Bogor Jabatan : Pelaksana Status : Aktif		1	7.392.000,00	1	7.392.000,00	0	-				Pemantauan KNKD Semester II 2017: **Pemantauan Kerugda Semester II Th 2018:** a. SK Pembebanan Nomor 951.45-95 tanggal 8 Maret 2010 b. SKTJM tanggal 5 Maret 2010 dengan BA pemotongan gaji setiap bulannya (BA tgl 13 Oktober 2017) c. STS tanggal 2 Agustus 2018, 10 September 2018, 3 Oktober 2018, 1 November 2018 @Rp300.000,00 dan rekening koran yang telah divalidasi oleh Bank BJB **Pemantauan Kerugda Semester I Th 2019:** STS Januari-Juni (@ Rp300.000) **Pemantauan Kerugda Semester II Th 2019:** -STS tanggal 5 Agustus, 2 September, 1 Oktober, & 11 November 2019 @Rp300.000,00 - STS tanggal 25 Oktober 2012 sebesar Rp200.000,00 - STS tanggal 8 Februari, 6 Maret, dan 4 Desember
19	Hilangnya Kendaraan Operasional Pemkot Bogor Merk Susuki ST 150 Futura Nomor.F.1370.A.Tahun 2007	Nama : Drs.Bambang Suhermawan NIP : 19620704 198603 1 021 Tgl Lahir : Malang, 4 Juli 1962 Alamat : Jl. Pancasan Gg. Muhtar No. 18 A Rt.03/06 Bogor Jabatan : Kabid PAD Status : Aktif		1	31.200.000,00	1	31.200.000,00	0	-				**Pemantauan Smtr II 2017:** STS tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp1.300.000,00 **Pemantauan Kerugda Semester II Th 2018:** 4 Oktober 2018 sebesar Rp4.500.000,00 dan rekening koran yang telah divalidasi oleh Bank BJB
20	Hilangnya Kendaraan Operasional Pemkot Bogor Merk Susuki ST 1500 Futura Nomor.F.1313.A.Tahun 2004	Nama : Ir.H.Asep Yayat Suryana NIP : 19590704 198603 1 016 Tgl Lahir : Bandung, 4 Juli 1959 Alamat : Jln R Kan An No 1 RT 05/04 Tanah Baru Kec Bogor Utara Jabatan : Kepala Bidang Status : Aktif		1	23.200.000,00	1	23.200.000,00		-				**(Pemantauan KNKD Semester I Tahun 2017) :** Telah diterbitkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 951.45-228 Tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian Daerah Atas Nama Saudara Asep Yayat Suryana
21	Hilangnya Kendaraan Operasional Pemkot Bogor Merk Honda GL Max II Nomor.F.3327.A.Tahun 2003	Nama : Deni Aviantara,SE NIP : 19570204 198503 1 012 Tgl Lahir : Cianjur, 4 Februari 1957 Alamat : Gg. Pahlawan Rt. 04/18 No. 38 Kel. Cilendek Barat Kec. Bogor Barat Jabatan : Lurah Status : Aktif		1	3.960.000,00	1	3.960.000,00	-	-				Telah diterbitkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 951.45-409 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian Daerah Atas Nama Saudara Deni Aviantara, SE
22	Hilangnya Kendaraan Operasional Pemkot Bogor Merk Honda GL Max II Nomor.F.3327.A.Tahun 2003	Nama : Sanusi NIP : 050 059 398 Tgl Lahir : Sumedang, 20 September 1966 Alamat : Kp. Baru Pilar II Rt.04/01 Kel. Bubulak Kota Bogor Jabatan : Pelaksana Status : Aktif		1	6.384.000,00	1	6.384.000,00	-	-	Belum terdapat SK Pelunasan	Agar segera diterbitkan SK Pelunasan	Akan segera dilaksanakan	
23	Hilangnya Kendaraan Operasional Pemkot Bogor Merk Toyota Kijang Nomor.F.696.A.Tahun 1991	Nama : Titik Supiati,BSc NIP : 19600418 198701 1 002 Tgl Lahir : Surabaya, 18 April 1960 Alamat : Jl Lolongok RT I/5 Blk.43 Empang Bogor Jabatan : Auditor Status : Aktif		1	7.800.000,00	1	7.800.000,00	-	-				Telah diterbitkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 951.45-408 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian Daerah Atas Nama Saudara Titik Supiati, B,Sc

No	Jenis Kerugian	Penanggung Jawab (nama/NIP/jabatan/Status)	Pengampu/ Kuasa Hukum/ Ahli Waris	Jumlah Kasus		Pengembalian *)		Sisa		Permasalahan			Keterangan
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Masalah	Rekomendasi	Komentar Instansi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	Hilangnya Kendaraan Operasional Pemkot Bogor Merk Yamaha Nomor.F.2941.A.Tahun 1997	Nama : Drs.Hermen NIP : 19630520 198203 1 002 Tgl Lahir : Bukit Tinggi, 20 Mei 1963 Alamat : Komplek Tirta Mas Ciomas Bogor Jabatan : Irban Pembangunan Wilayah III Status : Aktif		1	2.320.000,00	1	2.320.000,00	-	-				Telah diterbitkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 951.45-414 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian Daerah Atas Nama Saudara Drs. Hermen
25	Hilangnya Kendaraan Operasional Pemkot Bogor Merk Honda/NF 100SL Nomor.F.3477.A.Tahun 2006	Nama : H.Anwar Hadi,SE NIP : 19580413 198191 1 002 Tgl Lahir : Lampung, 19 April 1958 Alamat : Jl. Arzimar II No. 6 Rt.03/II Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara Jabatan : Lurah Status : Aktif		1	4.368.000,00	1	1.274.000,00	1	3.094.000,00	Belum ada pembayaran selama semester ke-2 TA 2018	Perlu tetap dipantau	akan dipanggil kembali	**Pemantauan Smtr II 2017:** STS tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp182.000,00
26	Hilangnya Kendaraan Operasional Pemkot Bogor Merk Honda Win/MCB Nomor.F.3113.A.Tahun 2001	Nama : Haris Munandar NIP : 19580506 198503 1 013 Tgl Lahir : Bogor, 6 Mei 1958 Alamat : Bantar kemang RT 01/07 Kelurahan Baranagsiang Kec Bogor Timur Jabatan : Kasi Pemerintahan dan Ketentraman dan Ketertiban Status : Aktif		1	1.460.000,00	1	1.460.000,00		-				**(Pemantauan KNKD Semester I Tahun 2017) :** Telah diterbitkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 951.45-227 Tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian Daerah Atas Nama Saudara Haris Munandar
27	Penggunaan Uang Setoran Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin)	Nama : R.Andrie Koesnendar,SSTP NIP : 19770718 199612 1 001 Tgl Lahir : Ciamis, 18 Juli 1977 Alamat : Lebak Sari Rt 05/09 Kel.Paledang Kec.Bogor Tengah Jabatan : Pelaksana Status : Aktif		1	71.100.000,00	1	47.500.000,00	1	23.600.000,00				**(Pemantauan KNKD Semester I Tahun 2017) :** sampai dengan 13 Jan 2017 telah diangsur sebanyak 33 kali sebesar Rp17.500.000,00 **Pemantauan Kerugda Semester II 2018:** STS tanggal 23 Agustus 2018 sebesar Rp500.000,00 dan rekening koran yang telah divalidasi oleh Bank BJB **Pemantauan Kerugda Semester II Th 2018:** STS Januari 2019 Rp500.000 **Pemantauan Kerugda Semester II Th 2019:** STS Februari - Juni 2014 @Rp500.000,00 STS Agustus 2014 Rp1.000.000,00 STS September - November 2014 @Rp500.000,00 STS Januari 2015 Rp1.000.000,00 STS Februari - Juli 2015 @Rp500.000,00 STS tanggal 2&29 September 2015 @Rp500.000,00 STS November 2015 s.d Januari 2017 @Rp500.000,00 STS September 2018 Rp500.000,00 STS November 2018 s.d Oktober 2019 @Rp500.000,00
													Pemantauan Kerugda Semester II Th 2020: STS tanggal 24 Jan 2020; 20 Mar 2020; 28 Apr 2020; 14 Mei 2020; 12 Jun 2020; 16 Jul 2020; 11 Agt 2020 masing-masing sebesar Rp500.000,00 **Pemantauan Semester II Th 2021:** STS tanggal 28 Jan 2021; 15 Feb 2021; 15 Apr 2021; 21 Juni 2021; 19 Juli 2021; 19 Agst 2021; 13 Sept 2021 ; 12 Okt 2021 ; 17 Nov 2021 ; 09 Des 2021 masing-masing sebesar Rp500.000,00

No	Jenis Kerugian	Penanggung Jawab (nama/NIP/jabatan/Status)	Pengampu/ Kuasa Hukum/ Ahli Waris	Jumlah Kasus		Pengembalian *)		Sisa		Permasalahan			Keterangan
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Masalah	Rekomendasi	Komentar Instansi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	Hilangnya Kendaraan Operasional Pemkot Bogor Merk Honda Mega Pro Nomor Polisi F 4009 A Tahun 2011	Nama : Ir. Soni Gumilar, M.Si NIP : 19670506 199602 1 002 Tgl Lahir : ,06-05-1967 Alamat : Jalan Terusan Seruni No. 1 Laladon Permai Desa Laladon Kecamatan Ciomas Bogor Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian Kota Bogor Status : Aktif		1	18.200.000,00	1	18.200.000,00		-	Belum terdapat SK Pelunasan	Agar segera diterbitkan SK Pelunasan	Akan segera dilaksanakan	Penetapan pembebanan ganti rugi berdasarkan Kep. Walikota Bogor Nomor 591.45 - 459 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pembebanan Ganti Rugi dalam proses TGR kepada saudara Ir, Soni Gumilar, M.Si atas Hilangnya kendaraan Dinas Roda Dua Milik Pemerintah Kota Bogor
29	Hilangnya seperangkat sound system Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Nama : Herlyn Meiningtyas, SH.,M.Si NIP : 196905091989032002' Tgl Lahir : 09-05-1969 Alamat : Jl. Pandu Raya No. 45 Bogor Utara Blok G No.9 BNR Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor		1	45.682.000,00	1	45.682.000,00	-	-				Sampai dengan 31 Desember 2015 telah diangsur sebesar Rp36.166.500,00. Pada semester II 2016 terdapat penambahan setoran sebesar Rp9.517.500,00 dengan rincian: 1. STS No 20/Disbudparekraf/TPTGR/2015 Tgl 5 Agustus 2016 Rp1.903.500,00 2. STS No 21/Disbudparekraf/TPTGR/2016 Tgl 19 September 2016 Rp1.903.500,00 3. STS No 22/Disbudparekraf/TPTGR/2016 Tgl 7 Oktober 2016 Rp1.903.500,00 4. STS No 23/Disbudparekraf/TPTGR/2016 Tgl 1 November 2016 Rp1.903.500,00 5. STS No 24/Disbudparekraf/TPTGR/2016 Tgl 1 November 2016 Rp1.903.500,00
		Status : Aktif											(Pemantauan KNKD Semester I Tahun 2017) : Telah diterbitkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 951.45-224 Tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian Daerah Atas Nama Saudara Herlyn
30	Bukti Pertanggungjawaban atas Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor Senilai Rp192.500.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya	Nama : Andi Surya Wijaya, SH NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Anggota DPRD Kota Bogor Status :		1	7.500.000,00	1	7.500.000,00						SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017
31	Bukti Pertanggungjawaban atas Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor Senilai Rp192.500.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya	Nama : Ani Sumarni NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Anggota DPRD Kota Bogor Status :		1	7.500.000,00	1	7.500.000,00						SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017
32	Bukti Pertanggungjawaban atas Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor Senilai Rp192.500.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya	Nama : Dra. Euis Widaningsih MARS NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Anggota DPRD Kota Bogor Status :		1	7.500.000,00	1	7.500.000,00						SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017

No	Jenis Kerugian	Penanggung Jawab (nama/NIP/jabatan/Status)	Pengampu/ Kuasa Hukum/ Ahli Waris	Jumlah Kasus		Pengembalian *)		Sisa		Permasalahan			Keterangan
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Masalah	Rekomendasi	Komentar Instansi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	Bukti Pertanggungjawaban atas Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor Senilai Rp192.500.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya	Nama : Ir Muaz HD NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Anggota DPRD Kota Bogor Status :		1	7.500.000,00	1	7.500.000,00						SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017
34	Bukti Pertanggungjawaban atas Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor Senilai Rp192.500.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya	Nama : Ir. Usmar Hariman NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Anggota DPRD Kota Bogor Status :		1	7.500.000,00	1	7.500.000,00						SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017
35	Bukti Pertanggungjawaban atas Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor Senilai Rp192.500.000,00 Tidak Dapat Diyakini	Nama : Jajat Sudrajat NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Anggota DPRD Kota Bogor Status :		1	7.500.000,00	1	7.500.000,00						SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017
36	Bukti Pertanggungjawaban atas Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor Senilai Rp192.500.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya	Nama : Sopian, SE NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Anggota DPRD Kota Bogor Status :		1	7.500.000,00	1	7.500.000,00						SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017
37	Bukti Pertanggungjawaban atas Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor Senilai Rp192.500.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya	Nama : Ujang Sugandi NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Anggota DPRD Kota Bogor Status :		1	7.500.000,00	1	7.500.000,00						SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017
38	Bukti Pertanggungjawaban atas Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor Senilai Rp192.500.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya	Nama : Untung W Maryono NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Anggota DPRD Kota Bogor Status :		1	7.500.000,00	1	7.500.000,00						SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017
39	Bukti Pertanggungjawaban atas Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor Senilai Rp192.500.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya	Nama : Yasir A Liputo NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Anggota DPRD Kota Bogor Status :		1	7.500.000,00	1	7.500.000,00						SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017
40	Bukti Pertanggungjawaban atas Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor Senilai Rp192.500.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya	Nama : Yusuf Dardiri NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Anggota DPRD Kota Bogor Status :		1	7.500.000,00	1	7.500.000,00						SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017

No	Jenis Kerugian	Penanggung Jawab (nama/NIP/jabatan/Status)	Pengampu/ Kuasa Hukum/ Ahli Waris	Jumlah Kasus		Pengembalian *)		Sisa		Permasalahan			Keterangan
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Masalah	Rekomendasi	Komentar Instansi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	Bukti Pertanggungjawaban atas Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor Senilai Rp192.500.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya	Nama : Aep Saepulloh, S.Pd NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Anggota DPRD Kota Bogor Status :		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00						SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017
42	Bukti Pertanggungjawaban atas Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor Senilai Rp192.500.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya	Nama : Agus Suherman NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Anggota DPRD Kota Bogor Status :		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00						SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017
43	Bukti Pertanggungjawaban atas Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor Senilai Rp192.500.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya	Nama : Agus Sulaksana, SIP. NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Anggota DPRD Kota Bogor Status :		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00						SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017
44	Bukti Pertanggungjawaban atas Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor Senilai Rp192.500.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya	Nama : Didin Muchidin, Bc.Hk NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Anggota DPRD Kota Bogor Status :		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00						SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017
45	Bukti Pertanggungjawaban atas Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor Senilai Rp192.500.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya	Nama : Faisal Alatas NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Anggota DPRD Kota Bogor Status :		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00						SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017
46	Bukti Pertanggungjawaban atas Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor Senilai Rp192.500.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya	Nama : Ferro Sopacua NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Anggota DPRD Kota Bogor Status :		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00						SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017
47	Bukti Pertanggungjawaban atas Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor Senilai Rp192.500.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya	Nama : Franico L. Marbun NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Anggota DPRD Kota Bogor Status :		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00						SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017
48	Bukti Pertanggungjawaban atas Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor Senilai Rp192.500.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya	Nama : H Taufik Khusnun NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Anggota DPRD Kota Bogor Status :		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00						SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017

No	Jenis Kerugian	Penanggung Jawab (nama/NIP/jabatan/Status)	Pengampu/ Kuasa Hukum/ Ahli Waris	Jumlah Kasus		Pengembalian *)		Sisa		Permasalahan			Keterangan
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Masalah	Rekomendasi	Komentar Instansi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	Bukti Pertanggungjawaban atas Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor Senilai Rp192.500.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya	Nama : H. Mulyadi, SH NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Anggota DPRD Kota Bogor Status :		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00						SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017
50	Bukti Pertanggungjawaban atas Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor Senilai Rp192.500.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya	Nama : H.R. Oyok Sukardi NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Anggota DPRD Kota Bogor Status :		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00						SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017
51	Bukti Pertanggungjawaban atas Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor Senilai Rp192.500.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya	Nama : Hj. Nanny Ratnawaty NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Anggota DPRD Kota Bogor Status :		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00						SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017
52	Bukti Pertanggungjawaban atas Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor Senilai Rp192.500.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya	Nama : Ika Kartika, A.Md NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Anggota DPRD Kota Bogor Status :		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00						SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017
53	Bukti Pertanggungjawaban atas Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor Senilai Rp192.500.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya	Nama : Ir H Gatut Susanta NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Anggota DPRD Kota Bogor Status :		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00						SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017
54	Bukti Pertanggungjawaban atas Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor Senilai Rp192.500.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya	Nama : Ir. Budi Sulistio NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Anggota DPRD Kota Bogor Status :		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00						SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017
55	Bukti Pertanggungjawaban atas Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor Senilai Rp192.500.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya	Nama : Ir. Mufti Faogi NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Anggota DPRD Kota Bogor Status :		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00						SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017
56	Bukti Pertanggungjawaban atas Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor Senilai Rp192.500.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya	Nama : Mulyadi, SE NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Anggota DPRD Kota Bogor Status :		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00						SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017

No	Jenis Kerugian	Penanggung Jawab (nama/NIP/jabatan/Status)	Pengampu/ Kuasa Hukum/ Ahli Waris	Jumlah Kasus		Pengembalian *)		Sisa		Permasalahan			Keterangan
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Masalah	Rekomendasi	Komentar Instansi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	Bukti Pertanggungjawaban atas Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor Senilai Rp192.500.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya	Nama : R. Laniasari NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Anggota DPRD Kota Bogor Status :		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00						SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017
58	Bukti Pertanggungjawaban atas Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor Senilai Rp192.500.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya	Nama : Sumiati NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Anggota DPRD Kota Bogor Status :		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00						SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017
59	Bukti Pertanggungjawaban atas Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor Senilai Rp192.500.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya	Nama : Suparman Supandji, SH NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Anggota DPRD Kota Bogor Status :		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00						SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017
60	Bukti Pertanggungjawaban atas Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor Senilai Rp192.500.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya	Nama : Tauhid J Tagor NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Anggota DPRD Kota Bogor Status :		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00						SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017
61	Bukti Pertanggungjawaban atas Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor Senilai Rp192.500.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya	Nama : Vera Manida Febriana NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Anggota DPRD Kota Bogor Status :		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00						SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017
62	Bukti Pertanggungjawaban atas Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor Senilai Rp192.500.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya	Nama : Yayu Wahyudin NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Anggota DPRD Kota Bogor Status :		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00						SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017
63	Realisasi Belanja Tidak Terduga Tidak Sesuai Dengan Ketentuan sebesar Rp1.755.000.000,00 Termasuk Didalamnya Belum Dipertanggungjawabkan sebesar Rp225.102.825,00	Nama : - NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Kepala BPKAD Status :		1	225.102.825,00	1	225.102.825,00						SK Pembebanan No.951.45-269 Th 2017 - SK Pelunasan No.951.45-270 Th 2017

No	Jenis Kerugian	Penanggung Jawab (nama/NIP/jabatan/Status)	Pengampu/ Kuasa Hukum/ Ahli Waris	Jumlah Kasus		Pengembalian *)		Sisa		Permasalahan			Keterangan
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Masalah	Rekomendasi	Komentar Instansi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	Kekurangan Volume Pekerjaan pada Kegiatan Optimalisasi Terminal Baranangsiang (Luncuran) dan Kegiatan Revitalisasi Mesjid Raya Bogor (Lanjutan)	Nama : NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Perumahan dan pemukiman (d/h Wasbangkim) Status :		1	84.521.511,94	1	84.521.511,94						SK Pembebanan No.951.45-269 Th 2017 - SK Pelunasan No.951.45-270 Th 2017
65	Kekurangan Volume Pekerjaan atas 9 (Sembilan) Ruas Jalan Dinas Bina Marga dan Pengairan dan 6 (Enam) Ruas Jalan Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Nama : NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang dan Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Perumahan dan pemukiman Status :		1	106.639.738,30	1	106.639.738,30						SK Pembebanan No.951.45-269 Th 2017 - SK Pelunasan No.951.45-270 Th 2017
66	Kekurangan Volume Pekerjaan Atas 4 (Empat) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi Dinas Bina Marga dan Pengairan dan 2 (dua) Kegiatan Pembangunan Talud/Keermer Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp. 103.244.715,80	Nama : NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang dan Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Perumahan dan pemukiman Status :		1	103.244.715,80	1	103.244.715,80						SK Pembebanan No.951.45-269 Th 2017 - SK Pelunasan No.951.45-270 Th 2017 **Pemantauan Kerugda per Semester II 2018:** STS No.900/011-Perkeulap/2018 tanggal 20 Juli 2018 (kekurangan pembayaran CV AP pekerjaan pembangunan dinding penahan tanah SMP N 4) beserta rekening koran yang telah dilegalisir oleh Bank BJB sebesar Rp442.750,00.
67	Kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Binamarga dan Pengairan sebesar Rp.183.948.916,66	Nama : NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Status :		1	183.948.916,66	1	183.948.916,66						SK Pembebanan No.951.45-269 Th 2017 - SK Pelunasan No.951.45-270 Th 2017
68	Realisasi Pekerjaan Lima Kegiatan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tidak Sesuai Dengan Kontrak sebesar Rp.76.898.340,88 dan Denda Keterlambatan Belum ditetapkan dan Ditagihkan sebesar Rp.8.305.248,00	Nama : NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan pemukiman (d/h Wasbangkim) Status :		1	76.898.340,88	1	76.898.340,88						SK Pembebanan No.951.45-269 Th 2017 - SK Pelunasan No.951.45-270 Th 2017

No	Jenis Kerugian	Penanggung Jawab (nama/NIP/jabatan/Status)	Pengampu/ Kuasa Hukum/ Ahli Waris	Jumlah Kasus		Pengembalian *)		Sisa		Permasalahan			Keterangan
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Masalah	Rekomendasi	Komentar Instansi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Pada Dinas Pengawasan Bangunan dan Pemukiman Kota Bogor Sebesar Rp114.201.032,20	Nama : NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Status :		1	114.201.032,20	1	114.201.032,20						SK Pembebanan No.951.45-269 Th 2017 - SK Pelunasan No.951.45-270 Th 2017
70	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas atas Kegiatan Bina Pengelolaan Keuangan Daerah Sebesar Rp198.914.200,00	Nama : NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Kepala BPKAD Status :		1	198.914.200,00	1	198.914.200,00						SK Pembebanan No.951.45-269 Th 2017 - SK Pelunasan No.951.45-270 Th 2017
71	Belanja Bantuan Sosial Sebesar Rp649.600.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya dan di Antaranya Terdapat Indikasi Kerugian Daerah Sebesar Rp63.000.000,00	Nama : NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Kepala BPKAD Status :		1	63.000.000,00	1	63.000.000,00						SK Pembebanan No.951.45-269 Th 2017 - SK Pelunasan No.951.45-270 Th 2017
72	Kekurangan Volume pekerjaan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Bogor Sebesar Rp224.835.830,57	Nama : NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Dan Dinas PU dan Penataan Ruang Status :		1	224.835.830,57	1	155.252.295,00	1	69.583.535,57	Belum ada pembayaran selama semester ke-2 TA 2018		Majelis akan melakukanpemangilan melaui inspektorat	SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017
73	Kekurangan Volume Pekerjaan Sebesar Rp275.132.547,82 pada Dinas Pengawasan Bangunan dan Pemukiman dan Dinas Pertanian Kota Bogor	Nama : NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (d/h Wasbangkim) Status :		1	275.132.547,82	1	275.132.547,82						SK Pembebanan No.951.45-269 Th 2017 - SK Pelunasan No.951.45-270 Th 2017
74	Kelebihan Pembayaran pada Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah di Sekretariat Daerah Sebesar Rp163.450.900,00	Nama : NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Status :		1	163.450.900,00	1	163.450.900,00						SK Pembebanan No.951.45-269 Th 2017 - SK Pelunasan No.951.45-270 Th 2017
75	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan dan Pemeliharaan Berkala Jalan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor Senilai Rp179.231.000,00	Nama : NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Status :		1	179.231.000,00	1	179.231.000,00						SK Pembebanan No.951.45-269 Th 2017 - SK Pelunasan No.951.45-270 Th 2017

No	Jenis Kerugian	Penanggung Jawab (nama/NIP/jabatan/Status)	Pengampu/ Kuasa Hukum/ Ahli Waris	Jumlah Kasus		Pengembalian *)		Sisa		Permasalahan			Keterangan
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Masalah	Rekomendasi	Komentar Instansi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Kota Bogor Sebesar Rp525.802.851,00	Nama : NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Kepala Sekretariat DPRD Status :		1	525.802.851,00	1	525.802.851,00						SK Pembebanan No.951.45-269 Th 2017 - SK Pelunasan No.951.45-270 Th 2017
77	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Bangunan Utama Mesjid Raya Kota Bogor (Lanjutan) pada Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor Senilai Rp139.732.000,00	Nama : NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Kepala Dinas Dinas Perumahan dan Pemukiman (d/h Wasbangkim) Status :		1	139.732.000,00	1	139.732.000,00						SK Pembebanan No.951.45-269 Th 2017 - SK Pelunasan No.951.45-270 Th 2017
78	Kelebihan Pembayaran pada Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebesar Rp99.602.500,00	Nama : NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Kepala BPKAD Status :		1	99.142.500,00	1	99.142.500,00						SK Pembebanan No.951.45-269 Th 2017 - SK Pelunasan No.951.45-270 Th 2017
79	Kelebihan Pembayaran Atas Pekerjaan Jasa Konsultansi, Desain dan Implementasi Simbada Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Senilai Rp15.000.000,00	Nama : NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Kepala BPKAD Status :		1	15.000.000,00	1	15.000.000,00						SK Pembebanan No.951.45-269 Th 2017 - SK Pelunasan No.951.45-270 Th 2017
80	Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp127.526.741,00, dan Kekurangan Volume Pekerjaan Sebesar Rp8.778.000,00, pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor	Nama : NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Status :		1	136.304.741,00	1	136.304.741,00		-				SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017 Rekening koran belum disampaikan. SK Pelunasan No.951.45-270 Th 2017
81	Pemutusan Kontrak Pekerjaan Lift Gedung Sekretariat Daerah Tidak Diikuti dengan Sanksi Berupa Pencantuman Dalam Daftar Hitam Maupun Pencairan Jaminan Pelaksanaan Sebesar Rp259.386.150,00	Nama : NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah, PT Uno Tanoh Seuramo Status :		1	259.386.150,00	1	259.386.150,00						SK Pembebanan No.951.45-269 Th 2017 - SK Pelunasan No.951.45-270 Th 2017
82	Pengendalianatas Pengadaan Material pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tidak Memadai dan Terdapat Pembayaran yang Tidak Didukung Bukti Penerimaan Barang Sebesar Rp81.258.800,00	Nama : NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Status :		1	81.258.800,00	1	81.258.800,00						SK Pembebanan No.951.45-269 Th 2017 - SK Pelunasan No.951.45-270 Th 2017

No	Jenis Kerugian	Penanggung Jawab (nama/NIP/jabatan/Status)	Pengampu/ Kuasa Hukum/ Ahli Waris	Jumlah Kasus		Pengembalian *)		Sisa		Permasalahan			Keterangan
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Masalah	Rekomendasi	Komentar Instansi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Dalam Rangka Pengadaan Langsung Pada Bidang Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tidak Berdasarkan Harga Hasil Survei yang Sebenarnya	Nama : NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Status :		1	231.099.440,00	1	231.099.440,00						SK Pembebanan No.951.45-269 Th 2017 - SK Pelunasan No.951.45-270 Th 2017
84	Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Dalam Rangka Lelang Pengadaan Komponen PJU Triwulan III Pada Bidang Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tidak Berdasarkan Harga Hasil Survei yang Sebenarnya dan Terdapat Indikasi Proses Pelelangan Dilakukan Melalui Persaingan Yang Tidak Sehat	Nama : NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Status :		1	20.798.140,00	1	20.798.140,00						SK Pembebanan No.951.45-269 Th 2017 - SK Pelunasan No.951.45-270 Th 2017
85	Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Dalam Rangka Lelang Pengadaan Komponen PJU Triwulan III Pada Bidang Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tidak Berdasarkan Harga Hasil Survei yang Sebenarnya dan Terdapat Indikasi Proses Pelelangan Dilakukan Melalui Persaingan Yang Tidak Sehat	Nama : NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Status :		1	27.410.000,00	1	27.410.000,00						SK Pembebanan No.951.45-269 Th 2017 - SK Pelunasan No.951.45-270 Th 2017
86	Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Akses Menuju Tempat Pembuangan Akhir pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tidak Sesuai Kontrak	Nama : NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Status :		1	41.099.850,00	1	41.099.850,00						SK Pembebanan No.951.45-269 Th 2017 - SK Pelunasan No.951.45-270 Th 2017
87	Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Akses Menuju Tempat Pembuangan Akhir pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tidak Sesuai Kontrak	Nama : NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Status :		1	528.387.517,72	1	528.387.517,72						SK Pembebanan No.951.45-269 Th 2017 - SK Pelunasan No.951.45-270 Th 2017

No	Jenis Kerugian	Penanggung Jawab (nama/NIP/jabatan/Status)	Pengampu/ Kuasa Hukum/ Ahli Waris	Jumlah Kasus		Pengembalian *)		Sisa		Permasalahan			Keterangan
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Masalah	Rekomendasi	Komentar Instansi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	Terdapat Kekurangan Volume pada 7 Paket Pekerjaan dan Keterlambatan pada Pembangunan/Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman pada Dinas Pengawasan Bangunan dan Pemukiman	Nama : NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Status :		1	145.226.758,81	1	145.226.758,81						SK Pembebanan No.951.45-269 Th 2017 - SK Pelunasan No.951.45-270 Th 2017
89	Kelebihan Klaim Tagihan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebesar Rp570.203.904,48 tanpa melalui tahap verifikasi	Nama : NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan (RS Bogor Kidney Center) Status :		1	38,00	1	38,00		-	Belum ada SK Pelunasan			SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017 Kompensasi Klaim Belum ada SK Pelunasan
90	Kelebihan Klaim Tagihan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebesar Rp570.203.904,48 tanpa melalui tahap verifikasi	Nama : NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan (RSUD Cibinong) Status :		1	41.393.772,43	1	41.393.772,43		-	Belum ada SK Pelunasan			SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017 Kompensasi Klaim Belum ada SK Pelunasan
91	Kelebihan Klaim Tagihan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebesar Rp570.203.904,48 tanpa melalui tahap verifikasi	Nama : NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan (RS Marzoeki Mahdi) Status :		1	506.480.048,05	1	506.480.048,05		-	Belum ada SK Pelunasan			SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017 Kompensasi Klaim Belum ada SK Pelunasan
92	Kelebihan Klaim Tagihan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebesar Rp570.203.904,48 tanpa melalui tahap verifikasi	Nama : NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan (RS Medika Dramaga) Status :		1	8.386.940,00	1	8.386.940,00		-	Belum ada SK Pelunasan			SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017 Kompensasi Klaim Belum ada SK Pelunasan
93	Kelebihan Klaim Tagihan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebesar Rp570.203.904,48 tanpa melalui tahap verifikasi	Nama : NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan (RS Palang Merah Indonesia) Status :		1	165.047,00	1	165.047,00		-	Belum ada SK Pelunasan			SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017 Kompensasi Klaim Belum ada SK Pelunasan
94	Kelebihan Klaim Tagihan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebesar Rp570.203.904,48 tanpa melalui tahap verifikasi	Nama : NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan (RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo) Status :		1	13.778.059,00	1	13.778.059,00		-	Belum ada SK Pelunasan			SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017 Kompensasi Klaim Belum ada SK Pelunasan

No	Jenis Kerugian	Penanggung Jawab (nama/NIP/jabatan/Status)	Pengampu/ Kuasa Hukum/ Ahli Waris	Jumlah Kasus		Pengembalian *)		Sisa		Permasalahan			Keterangan
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Masalah	Rekomendasi	Komentar Instansi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kota Bogor Belum Memadai serta Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap pada Laporan Keuangan Belum Sesuai dengan SAP	Nama : NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Status :		1	106.800.000,00			1	106.800.000,00	Belum ada pembayaran selama semester ke-2 TA 2018		akan dikoordinasikan dg inspektorat	SK Pembebanan No. 950.45-134 Th 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017
96	Terdapat Ketekoran Kas pada Kecamatan Bogor Timur Sebesar Rp163.411.623,00	Nama : NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Kepala Kecamatan Bogor Timur Status :		1	163.411.623,00	1	163.411.623,00						SK Pembebanan No.951.45-269 Th 2017 - SK Pelunasan No.951.45-270 Th 2017
97	Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil untuk 23 pegawai Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp108.781.735,00	Nama : NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Kepala BPKAD (Dinas Pendidikan dan BKPP) Status :		1	108.781.735,00	1	108.781.735,00						SK Pembebanan No.951.45-269 Th 2017 - SK Pelunasan No.951.45-270 Th 2017
98	Penggunaan 54 Personil oleh Penyedia Jasa dalam Pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan pada Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp241.197.500,00	Nama : NIP : Tgl Lahir : Alamat : Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Status :		1	241.197.500,00	1	241.197.500,00						SK Pembebanan No.951.45-269 Th 2017 - SK Pelunasan No.951.45-270 Th 2017
99	Hilangnya 1 (satu) unit kendaraan roda dua nomor polisi F 5487 A	Nama : Agus Salim NIP : 196209271989011000' Tgl Lahir : 29-09-1962 Alamat : Jl. Lodaya II Cilibende RT 02 RW 02 Bogor Tengah Jabatan : Pelaksana Status : Aktif		1	11.100.000,00	1	925.000,00	1	10.175.000,00	a. Belum ada pembayaran selama semester ke-2 TA 2018 b. SKTJM tanpa didukung jaminan		akan dipanggil oleh Majelis TGR	SKTJM tanggal 17 Maret 2015 SK Pembebanan No.951.45-262 Th 2017
100	Hilangnya 1 (satu) unit kendaraan roda dua nomor polisi F 3943 A	Nama : Wahyudin NIP : 196702182008011000' Tgl Lahir : 18-02-1967 Alamat : Jl. Komplek Tulus Rejo No.88 RT 003/003 Bogor Selatan Jabatan : Pelaksana Status : Aktif		1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	-	-	Belum ada SK Pelunasan			SKTJM tanggal 17 Maret 2015 SK Pembebanan No.951.45-267 Th 2017 **Pemantauan Kerugda Semester II Th 2018:** STS tanggal 9 Agustus 2018, 4 September 2018, 5 Oktober 2018, 5 November 2018 sebesar @Rp500.000,00 dan rekening koran yang telah divalidasi oleh Bank BJB. Pemantauan Kerugda Semester I Th 2019: STS Jan-Maret 2019 @500.000 Belum ada SK Pelunasan

No	Jenis Kerugian	Penanggung Jawab (nama/NIP/jabatan/Status)	Pengampu/ Kuasa Hukum/ Ahli Waris	Jumlah Kasus		Pengembalian *)		Sisa		Permasalahan			Keterangan
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Masalah	Rekomendasi	Komentar Instansi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	Kehilangan kendaraan dinas roda 2 (dua) nomor polisi F 5098 A Tahun 2016 an. Pemkot Bogor	Nama : Cucu Hanapi, SE, MM NIP : 19810104 200604 1 010 Tgl Lahir : 04-Jan-81 Alamat : Nangggewer Kaum RT 004/002 Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor Jabatan : Pelaksana		1	8.781.143,00	1	8.781.143,00	-	-	SKTJM tanpa didukung jaminan		yang brsangkutan rutin bayar tiap bulan	SK Pembebanan No. 951.45-261 Th 2017 tanggal 8 Agustus 2017 - SK Pelunasan No.950.45-136 Th 2017 **Semester I Tahun 2017** : 1. STS Tanggal 30-11-2016 Sebesar 370.000 2. STS Tanggal 30-12-2016 Sebesar 370.000 3.STS Tanggal 30-01-2017 Sebesar Rp 370.000,00. 4. STS Tanggal 28-02-2017 Sebesar Rp 370.000,00. 5. STS Tanggal 3-05- 2017 Sebesar Rp 370.000 6. STS Tanggal 3-05- 2017 Sebesar Rp 370.000 7. STS Tanggal 18-07-2017 Sebesar Rp370.000 8. STS Tanggal 18-07-2017 Sebesar Rp370.000 9. STS Tanggal 17-10-2017 Sebesar Rp370.000 10. STS Tanggal 17-10-2017 Sebesar Rp370.000 11. STS Tanggal 24-11-2017 Sebesar Rp370.000 Pemantauan Kerugda Semester II Th 2018: a. SKTJM tanggal 7 Oktober 2016 (tanpa didukung jaminan) b. STS tanggal 23 Agustus 2018, 25 September 2018, 16 Oktober 2018, dan 23 November 2018 @Rp370.000,00 dan rekening koran yang telah
102	Hilangnya kendaraan dinas roda 2 (dua) nomor polisi F 5540 A Tahun 2014 an. Pemkot Bogor	Nama : Erwin Subastian, SE NIP : 19750515 199001 1 001 Tgl Lahir : Alamat : Kp. Patas RT. 004 RW.008 Kelurahan Ranggamekar Kec Bogor Selatan Jabatan : Kasi Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Standarisasi Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor Status : PNS		1	12.135.714,00	1	12.135.714,00		-	a. Belum ada pembayaran selama semester ke-2 TA 2018 b. SKTJM tanpa didukung jaminan		akan dilakukan pemanggilan oleh Majelis TGR	Pada Semester II 2017 telah dilakukan angsuran sebesar Rp150.000,00 dengan bukti STS tanggal 28 April 2017 **Pemantauan Kerugda Semester II Th 2018:** a. SK Pembebanan No. 951.45-268 Th 2017 tanggal 8 Agustus 2017 b. SKTJM tanggal 20 maret 2017 (tanpa didukung jaminan) **Pemantauan Kerugda Semester I Th 2019:** STS Januari-Februari @ Rp500.600 **Pemantauan Kerugda Semester II Th 2019:** STS Maret-Juli 2019 @Rp500.600
103	Hilangnya kendaraan dinas roda dua nomor polisi F 4883 A Tahun 2016	Nama : Purba Warsita NIP : 19690509 198903 2 002 Tgl Lahir : Alamat : Kp. Kukupu Rt.004/006 Kel Cibadak Kec Tanah Sareal Kota Bogor Jabatan : Pelaksana/Fungsional Umum		1	6.586.765,00	1	6.586.765,00	-	-	SKTJM tanpa didukung jaminan		sdh dibuat BA Pemotongan Gaji, yg bersangkutan rutin membayar setiap bulan	SK Pembebanan No.951.45-265 Th 2017 tanggal 8 Agustus 2017 - SK Pelunasan No.951.45-270 Th 2017 Semester II 2017 telah dilakukan angsuran sebesar Rp275.000,00 dengan bukti STS tanggal 06 November 2017 dan Rp2.200.000,00 tanggal 12 Oktober 2017

No	Jenis Kerugian	Penanggung Jawab (nama/NIP/jabatan/Status)	Pengampu/ Kuasa Hukum/ Ahli Waris	Jumlah Kasus		Pengembalian *)		Sisa		Permasalahan			Keterangan
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Masalah	Rekomendasi	Komentar Instansi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Status : PNS											**Pemantauan Kerugda Semester II Th 2018:** a. STS tanggal 2 Agustus 2018, 10 September 2018, 3 Oktober 2018, dan 1 November 2018 @Rp275.000,00 dan rekening koran yang telah divalidasi oleh Bank BJB b. SKTJM tanggal 20 Maret 2017 (tanpa didukung jaminan) Pemantauan Kerugda Semester I Th 2019: STS Januari-Maret @ Rp275.000
104	Hilangnya kendaraan dinas Roda 2 (dua) Honda Blade F 3856 A	Nama : Udin Zaenudin SE NIP : 19650916 199012 1 001 Tgl Lahir : Alamat : Bogor Baru Blok B1 No.4 RT.004/008 Kel Tegallega Kec Bogor Tengah Kota bogor Jabatan : Kepala Seksi Perekonomian Kec. Bogor Tengah Status : PNS		1	3.571.429,00	1	2.450.000,00	1	1.121.429,00				SK Pembebanan No.951.45-264 Th 2017 tanggal 8 Agustus 2017 - SK Pelunasan No.951.45-270 Th 2017 **Pemantauan Kerugda Semester II Th 2018:** SKTJM tanggal 20 Maret 2017 (tanpa didukung jaminan) **Pemantauan Kerugda Smt II Th 2020:** STS tanggal 20 Jul 2020 sebesar Rp200.000,00; STS tanggal 19 Agt 2020 sebesar Rp200.000,00; STS tanggal 31 Agt 2020 sebesar Rp1.600.000,00.
105	Hilangnya kendaraan roda dua No.Pol F 5154 A Tahun 2016	Nama : Mochamat Fattah NIP : 19750607 200902 1 001 Tgl Lahir : Alamat : Perumahan Ikramina Residence Blok B1 No.01 Kp Bojong Rt.04/07 Ds Bojong Kec Kemang Kab Bogor Jabatan : Fungsional Umum Status : PNS		1	18.000.000,00	1	18.000.000,00		-				Pada Semester II 2017 telah dilakukan angsuran sebesar Rp18.000.000,00 dengan bukti STS tanggal 07 Maret 2017. 2. SK Pembebanan Nomor 951.45-263 Th 2017 3.SK Pelunasan belum ada
106	Hilangnya Yamaha NMAX/2 DP R A/T No. Pol F 3736 B	Nama : Marrisa, S.STP NIP : 198608022004122001 Tgl Lahir : 02-Aug-86 Alamat : Jl. Dr. Semeru Gang Mesjid Rt/Rw 003/002 Kelurahan Cilendek Timur Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Status : PNS		1	24.050.000,00	0	7.000.000,00	1	17.050.000,00				Kerugda Smt I 2023: - SKTJM
107	Yamaha NMAX Tahun pembelian 2019 No. Pol F 3216 B	Nama : Apit Budiman, S.Pd NIP : 197909242009011005 Tgl Lahir : 29122 Alamat : Kp. Cibogel Gg. Bebas No. 10A RT. 003/008 Kel. Kota Batu Kec. Ciomas Jabatan : Satpol PP Ahli Muda Status : PNS		1	15.185.714,00	1	650.000,00	1	14.535.714,00				Kerugda Smt I 2023: - SKTJM - STS No. 001/STS/Sat Pol PP/VI/2023 sebesar Rp650.000,00 tanggal 12 Juni 2023 dan rekening korannya
108	Kendaraan roda dua Nopol 3043 B, Merk/Type Yamaha N-Max /2DP RA A/T Tahun 2018	Nama : Jamilah Tuti, SP NIP : 196811101991032011 Tgl Lahir : 10/11/68 Alamat : BTN Kebon Raya Blok B3 No.22 RT 002 RW 006 Kel. Pamoyanan Kec. Bogor Selatan Kota Bogor		1	19.583.333,33		2.166.667,00		17.416.666,33				Sedang dalam proses pembayaran ke 4

No	Jenis Kerugian	Penanggung Jawab (nama/NIP/jabatan/Status)	Pengampu/ Kuasa Hukum/ Ahli Waris	Jumlah Kasus		Pengembalian *)		Sisa		Permasalahan			Keterangan
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Masalah	Rekomendasi	Komentar Instansi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor											
		Status : PNS											
109	Kendaraan Roda Dua Merek/Type Honda Nopol F 4677 A	Nama : Toha NIP : 196809132010011001 Tgl Lahir : 13/09/68 Alamat : Kp. Seremped Barat RT/RW 02/04 Kelurahan Cibadak Kec. Tanah Sarel Kota Bogor Jabatan : Pelaksana Status : PNS		1	6.600.000		275.000,00		6.325.000,00				Sedang dalam proses pembayaran ke 2
	Jumlah B			**107**	**6.140.123.168,51**	**104**	**5.789.019.323,61**	**15**	**351.103.844,90**				
C	**Pihak Ketiga (P.III)**												
	Jumlah C			**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**				
	JUMLAH A+B+C			**107**	**6.140.123.168,51**	**104**	**5.789.019.323,61**	**15**	**351.103.844,90**				

*) Pengembalian: Jumlah pembayaran kerugian negara baik dengan angsuran, pelunasan, pencatatan, penghapusan, maupun pembebasan.

Lampiran 10

PEMERINTAH KOTA BOGOR
TANAH YANG DIMANFAATKAN PIHAK KETIGA
BANGUN, GUNA, SERAH (BGS)
PER 31 DESEMBER 2024

NO	LOKASI	TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA BOGOR SEBAGAI OBJEK BANGUN, GUNA, SERAH (BGS)		BANGUNAN YANG DIKELOLA OLEH PIHAK KETIGA		PERJANJIAN KERJASAMA		JANGKA WAKTU PERJANJIAN	BATAS AKHIR PERJANJIAN
		LUAS TANAH (M^2)	NILAI TANAH (Rp.)	LUAS BANGUNAN (M^2)	NILAI BANGUNAN (Rp.)	MITRA BGS	NOMOR DAN TANGGAL PERJANJIAN		
1	Tanah Pasar Kebon Kembang Blok C & D	6.054	4.871.684.310,00	13.806	-	PT. PROPINDO MULIA UTAMA	1. Perjanjian Kerjasama Bagi Tempat Usaha antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dengan PT Propindo Mulia Utama tentang Penataan Ruang Sekaligus Penataan Bangunan serta Pengelolaan Plaza dan Pasar Kebon Kembang Kotamadya Bogor Nomor 644/SP.08-Huk/1996, tanggal 30 Desember 1996	30 TAHUN	24/09/2027
						PT. PROPINDO MULIA UTAMA	2. Addendum Perjanjian Kerjasama Bagi Tempat Usaha antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dengan PT Propindo Mulia Utama tentang Penataan Ruang Sekaligus Penataan Bangunan serta Pengelolaan Plaza dan Pasar Kebon Kembang Kotamadya Bogor Nomor 644/SP.08-Huk/1998, tanggal 30 Desember 1998		
						PT. PROPINDO MULIA UTAMA	3. Addendum Kedua Perjanjian Kerjasama Bagi Tempat Usaha antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT Propindo Mulia Utama tentang Penataan Ruang Sekaligus Penataan Bangunan serta Pengelolaan Blok C, D dan E Pasar Kebon Kembang Kota Bogor Nomor 644/SP.09-Huk/2000, tanggal 30 Juni 2000.		
						PT. PROPINDO MULIA UTAMA	4. Addendum Ketiga Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT Propindo Mulia Utama tentang Pengelolaan Blok C dan D Pasar Kebon Kembang Kota Bogor, Nomor 644/SP.10-Huk/2000, tanggal 11 Oktober 2000.		
						PT. PROPINDO MULIA UTAMA	5. Addendum Keempat Perjanjian Kerjasama Nomor 644/SP.10-Huk/2000, tanggal 11 Oktober 2000 antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT Propindo Mulia Utama tentang Pengelolaan Blok C dan D Pasar Kebon Kembang Kota Bogor, Nomor 511.2/Perj.4-PPKA/2010 dan Nomor 168/PMU-PKS PB/2010 , tanggal 9 Februari 2010.		
2	Tanah Plasa Lippo Keboen Raya (ex.Pangrango Plasa) Jl. Raya Pajajaran	12.285	6.142.500.000,00	65.710	-	PT BOGOR INTERNUSA PLAZA	No. 511.21/Perj.01-Huk/2003 tentang Pembangunan Kembali/Renovasi dan Pengelolaan Bangunan Gedung Bogor Internusa Plaza , tanggal 19 Februari 2003	30 TAHUN	04/04/33
						PT GIRIMULIA PERKASA JAYA	No. 640/Perj.32-BPKAD/2015 dan Nomor 001/LGL-GPJA/PKS/IX/2015 tentang Renovasi dan Pengelolaan Bangunan Pangrango Plasa, tanggal 1 September 2015		
JUMLAH		**18.339**	**11.014.184.310**						

Lampiran 11

PEMERINTAH KOTA BOGOR
UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA
Per 31 Desember 2024

(Dalam Rp)

No	Nama SKPD	URAIAN	Saldo Utang per 31 Desember 2023	Penambahan 2024	Pengurangan / Pembayaran	Saldo Utang Per 31 Desember 2024
1	Rumah Sakit umum Daerah (BLUD	Taspen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		PPh Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
		PPN Pusat	0,00	12.016.301.419,00	12.007.523.518,00	8.777.901,00
		Taperum	0,00	0,00	0,00	0,00
		Iuran Wajib Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		JUMLAH	**0,00**	**12.016.301.419,00**	**12.007.523.518,00**	**8.777.901,00**
2	Badan Pendapatan Daerah	Taspen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
		PPh Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
		PPN Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
		Taperum	0,00	0,00	0,00	0,00
		Iuran Wajib Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
		Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		Utang Jaminan	249.000.000	28.500.000,00	128000000,00	149.500.000,00
		JUMLAH	**249.000.000,00**	**28.500.000,00**	**128.000.000,00**	**149.500.000,00**
TOTAL			**249.000.000,00**	**12.044.801.419,00**	**12.135.523.518,00**	**158.277.901,00**

Lampiran 12

APITULASI SURAT KETETAPAN UANG JAMINAN BONGKAR (SKUJB) PADA WEB-REGISTER TAHUN 2022

IPR TAHUN 2022		NAMA WAJIB PAJAK	NASKAH REKLAME	LOKASI REKLAME	PERIODE IPR	KETETAPAN SKUJB	NOMOR BAYAR SKUJB	PERPANJANGAN IPR TAHUN 2024			KETERANGAN	UANG JAMINAN BONGKAR
NOMER	TANGGAL							NOMER IPR	TANGGAL IPR	PERIODE IPR		
503-1024-IPR/2022	15 Agustus 2022	Mulyadi H.	Produk SAMSUNG	Jl. Pajajaran - Tegallega / RTH	18 Agustus 2022 - 17 Agustus 2023	Rp 25.000.000	32712240400000004	503-0871-IPR/2024	11 Juli 2024	18 Agustus 2024 - 17 Agustus 2025	Perpanjangan IPR sebelum periode IPR berakhir	Rp -
503-1096-IPR/2022	30 Agustus 2022	Rhendie Arindra Ferdian	BANK MANDIRI	Jl. Pajajaran - Terminal Baranangsiang / RTH	30 September 2022 - 29 September 2023	Rp 15.000.000	32712240400000011	503-1441-IPR/2024	15 November 2024	30 September 2024 - 29 September 2025	Perpanjangan IPR melewati 10 hari dari berakhir periode IPR sebelumnya	Rp 15.000.000
503-1096-IPR/2022	30 Agustus 2022	Rhendie Arindra Ferdian	BANK MANDIRI	Jl. Pajajaran - Terminal Baranangsiang / RTH	30 September 2022 - 29 September 2023	Rp 3.000.000	32712240400000012	503-1441-IPR/2024	15 November 2024	30 September 2024 - 29 September 2025	Perpanjangan IPR melewati 10 hari dari berakhir periode IPR sebelumnya	Rp 3.000.000
503-1173-IPR/2022	19 September 2022	Johannes Paulus Arifin	HOKBEN	Jl. Pajajaran - Baranangsiang / RTH	15 Februari 2022 - 14 Februari 2023	Rp 2.000.000	32712240400000019	-	-	- - -	Tidak melakukan perpanjangan IPR	Rp 2.000.000
503-1250-IPR/2022	30 September 2022	Musa Nio	(Petunjuk Arah) DENSO / Central AC	Jl. Sholeh Iskandar - Kedung Badak / RTH	11 Oktober 2022 - 10 Oktober 2023	Rp 2.000.000	32712240400000022	503-1358-IPR/2024	05 November 2024	11 Oktober 2024 - 10 Oktober 2025	Perpanjangan IPR melewati 10 hari dari berakhir periode IPR sebelumnya	Rp 2.000.000
503-1250-IPR/2022	30 September 2022	Musa Nio	(Petunjuk Arah) DENSO / Central AC	Jl. Sholeh Iskandar - Kedung Badak / RTH	11 Oktober 2022 - 10 Oktober 2023	Rp 2.000.000	32712240400000023	503-1358-IPR/2024	05 November 2024	11 Oktober 2024 - 10 Oktober 2025	Perpanjangan IPR melewati 10 hari dari berakhir periode IPR sebelumnya	Rp 2.000.000
503-1298-IPR/2022	10 Oktober 2022	Mulyadi H.	(Petunjuk Arah) BANK PANIN	Jl. Padi / RTH	05 November 2022 - 04 November 2023	Rp 2.000.000	32712240400000025	503-1330-IPR/2024	25 Oktober 2024	05 November 2024 - 04 November 2025	Perpanjangan IPR sebelum periode IPR berakhir	Rp -
503-1412-IPR/2022	03 November 2022	M. Husen Alidrus	(Petunjuk Arah) SKI / TAS TAJUR	Jl. Durian Raya / SLT	25 November 2022 - 24 November 2023	Rp 2.000.000	32712240400000054	503-1372-IPR/2024	08 November 2024	25 November 2024 - 24 November 2025	Perpanjangan IPR sebelum periode IPR berakhir	Rp -
503-1465-IPR/2022	14 November 2022	Ir. Husdi Karyono	ROYAL TAJUR	Jl. Pajajaran - Depan Damkar / MJ	10 November 2022 - 09 November 2023	Rp 7.500.000	32712240400000058	503-1539-IPR/2024	02 Desember 2024	10 November 2024 - 09 November 2025	Perpanjangan IPR melewati 10 hari dari berakhir periode IPR sebelumnya	Rp 7.500.000
503-1500-IPR/2022	22 November 2022	Ranji Al Rafsanjani	(Petunjuk Arah) BEBEK TEPI SAWAH	Jl. Kantor Pos / RTH	22 November 2022 - 21 November 2023	Rp 2.000.000	32712240400000064	503-1487-IPR/2024	21 November 2024	22 November 2024 - 21 November 2025	Perpanjangan IPR sebelum periode IPR berakhir	Rp -
						Rp 62.500.000						**Rp 31.500.000**

APITULASI SURAT KETETAPAN UANG JAMINAN BONGKAR (SKUJB) PADA WEB-REGISTER TAHUN 2023

IPR TAHUN 2023		NAMA WAJIB PAJAK	NASKAH REKLAME	LOKASI REKLAME	PERIODE IPR	KETETAPAN SKUJB	NOMOR BAYAR SKUJB	PERPANJANGAN IPR TAHUN 2024			KETERANGAN	UANG JAMINAN BONGKAR
NOMER	TANGGAL							NOMER IPR	TANGGAL IPR	PERIODE IPR		
503-0061-IPR/2023	17 Januari 2023	Nabila Hasiba Abidin	(Petunjuk Arah) CSY	Jl. Tumenggung Wiradiredja / RTH	13 Januari 2023 - 12 Januari 2024	Rp 2.000.000	32712340400000002	503-0090-IPR/2024	22 Januari 2024	13 Januari 2024 - 12 Januari 2025	Perpanjangan IPR sebelum periode IPR berakhir	Rp -
503-0093-IPR/2023	25 Januari 2023	Surjanto Widjaja	RM. RIUNG GILI GILI	Jl. Pajajaran - Baranangsiang / RTH	24 Januari 2023 - 23 Januari 2024	Rp 2.000.000	32712340400000005	503-0032-IPR/2024	09 Januari 2024	24 Januari 2024 - 22 Januari 2025	Perpanjangan IPR sebelum periode IPR berakhir	Rp -
503-0118-IPR/2023	30 Januari 2023	Ir. Husdi Karyono	Perumahan RANCAMAYA	Jl. Raya Sukabumi - Ciawi / RTH	30 Januari 2023 - 29 Januari 2024	Rp 25.500.000	32712340400000007	503-0134-IPR/2024	02 Februari 2024	30 Januari 2024 - 29 Januari 2025	Perpanjangan IPR sebelum periode IPR berakhir	Rp -
503-0197-IPR/2023	21 Februari 2023	Ir. Hadijanto Husen	(Petunjuk Arah) BANK PANIN	Jl. Pakuan / RTH	10 Januari 2023 - 09 Januari 2024	Rp 2.000.000	32712340400000014	503-0047-IPR/2024	11 Januari 2024	10 Januari 2024 - 09 Januari 2025	Perpanjangan IPR sebelum periode IPR berakhir	Rp -
503-0197-IPR/2023	21 Februari 2023	Ir. Hadijanto Husen	(Petunjuk Arah) BANK PANIN	Jl. Binamarga / RTH	10 Januari 2023 - 09 Januari 2024	Rp 2.000.000	32712340400000015	503-0047-IPR/2024	11 Januari 2024	10 Januari 2024 - 09 Januari 2025	Perpanjangan IPR sebelum periode IPR berakhir	Rp -
503-0256-IPR/2023	07 Maret 2023	Dr. Petrus Sediawan	RSKIA SAWOJAJAR	Jl. Sawojajar / RTH	15 Maret 2023 - 14 Maret 2024	Rp 2.000.000	32712340400000017	503-0607-IPR/2024	28 Mei 2024	18 Januari 2024 - 17 Januari 2025	Perpanjangan IPR melewati 10 hari dari berakhir periode IPR sebelumnya	Rp 2.000.000
503-0373-IPR/2023	27 Maret 2023	Ir. Husdi Karyono	GRAND PAJAJARAN RESIDENCE	Jl. Pajajaran - Simpang Bale Binarum / RTH	02 Maret 2023 - 01 Maret 2024	Rp 15.000.000	32712340400000022	503-0369-IPR/2024	21 Maret 2024	02 Maret 2024 - 01 Maret 2025	Perpanjangan IPR sebelum periode IPR berakhir	Rp -
503-0374-IPR/2023	27 Maret 2023	Ir. Husdi Karyono	BIZNET / PT. Supra Primatama Nusantara	Jl. Pajajaran - Simpang Bangbarung / RTH	02 Maret 2023 - 01 Maret 2024	Rp 15.000.000	32712340400000020	503-1197-IPR/2024	30 September 2024	02 Maret 2024 - 01 Maret 2025	Perpanjangan IPR melewati 10 hari dari berakhir periode IPR sebelumnya	Rp 15.000.000
503-0418-IPR/2023	30 Maret 2023	Rhendie Arindra Ferdian	Provider / Property / Perbankan / Consumer	Jl. Pajajaran - Dekat Simpang Lodaya / RTH	25 Maret 2023 - 24 Maret 2024	Rp 15.000.000	32712340400000026	-	-	- - -	Tidak melakukan perpanjangan IPR	Rp 15.000.000
503-0421-IPR/2023	31 Maret 2023	Franky Ibrahim	(Petunjuk Arah) HIGHLAND PARK RESORT	Jl. Rd. Aria Sumalagar / RTH	20 Maret 2023 - 19 Maret 2024	Rp 2.000.000	32712340400000027	503-0426-IPR/2024	01 April 2024	20 Maret 2024 - 19 Maret 2025	Perpanjangan IPR sebelum periode IPR berakhir	Rp -
503-0505-IPR/2023	10 April 2023	Widiarto Koesela	(Petunjuk Arah) KFC - Ramayana Tajur	Jl. Raya Tajur - Wangun / RTH	25 Maret 2023 - 24 Maret 2024	Rp 2.000.000	32712340400000030	-	-	- - -	Tidak melakukan perpanjangan IPR	Rp 2.000.000
503-0538-IPR/2023	14 April 2023	Ir. Yulianti Hayuningthias	BOTANI SQUARE / Edufun Fest	Jl. Pajajaran (Area Botani Square)	01 Juli 2023 - 30 Juni 2024	Rp 7.500.000	32712340400000031	-	-	- - -	Rekalme pada lahan swasta	Rp -
503-0617-IPR/2023	11 Mei 2023	PT. Bogor Raya Develop	BOGOR RAYA	Jl. Pajajaran - Baranangsiang / RTH	07 Mei 2023 - 06 Mei 2024	Rp 7.500.000	32712340400000032	503-0605-IPR/2024	14 Mei 2024	07 April 2024 - 06 April 2025	Perpanjangan IPR melewati 10 hari dari berakhir periode IPR sebelumnya	Rp 7.500.000
503-0620-IPR/2023	12 Mei 2023	Ir. Husdi Karyono	BIZNET / PT. Supra Primatama Nusantara	Jl. Jend. Sudirman - Dekat RS. Salak / RTH	10 Mei 2023 - 09 Mei 2024	Rp 7.500.000	32712340400000033	503-1198-IPR/2024	30 September 2024	10 Mei 2024 - 09 Mei 2025	Perpanjangan IPR melewati 10 hari dari berakhir periode IPR sebelumnya	Rp 7.500.000
503-0636-IPR/2023	16 Mei 2023	Ir. Husdi Karyono	PT. AVINDO BANGUN GEMILANG	Jl. A. Sunaliaga - Simpang Pasir Kuda / RTH	12 Mei 2023 - 11 Mei 2024	Rp 2.000.000	32712340400000034	503-0630-IPR/2024	16 Mei 2024	12 Mei 2024 - 11 Mei 2025	Perpanjangan IPR sebelum periode IPR berakhir	Rp -
503-0666-IPR/2023	24 Mei 2023	Dadang Rohendi, SH.	(Petunjuk Arah) UNIVERSITAS PAKUAN	Jl. Pakuan / SLT	29 Mei 2023 - 28 Mei 2024	Rp 2.000.000	32712340400000035	503-0895-IPR/2024	15 Juli 2024	29 Mei 2024 - 28 Mei 2025	Perpanjangan IPR melewati 10 hari dari berakhir periode IPR sebelumnya	Rp 2.000.000
503-0666-IPR/2023	24 Mei 2023	Dadang Rohendi, SH.	(Petunjuk Arah) UNIVERSITAS PAKUAN	Jl. Binamarga / SLT	29 Mei 2023 - 28 Mei 2024	Rp 2.000.000	32712340400000036	503-0895-IPR/2024	15 Juli 2024	29 Mei 2024 - 28 Mei 2025	Perpanjangan IPR melewati 10 hari dari berakhir periode IPR sebelumnya	Rp 2.000.000
503-0679-IPR/2023	24 Mei 2023	Ir. Husdi Karyono	GRAB	Jl. Pajajaran - Dekat Garda Oto / RTH	08 Juli 2023 - 07 Juli 2024	Rp 15.000.000	32712340400000037	503-1264-IPR/2024	09 Oktober 2024	08 Juli 2024 - 07 Juli 2025	Perpanjangan IPR melewati 10 hari dari berakhir periode IPR sebelumnya	Rp 15.000.000
503-0683-IPR/2023	24 Mei 2023	Ir. Husdi Karyono	MOWILEX / CENDANA PAINTS	Jl. Pajajaran (Area Bale Binarum)	24 Mei 2023 - 23 Mei 2024	Rp 15.000.000	32712340400000038	-	-	- - -	Rekalme pada lahan swasta	Rp -
503-0803-IPR/2023	16 Juni 2023	Ir. H. Teuku Zamach Amin	(Petunjuk Arah) WISMA DJUANDA	Jl. Kantor Batu / RTH	27 Maret 2023 - 26 Maret 2024	Rp 2.000.000	32712340400000040	503-0472-IPR/2024	16 April 2024	27 Maret 2024 - 26 Maret 2025	Perpanjangan IPR melewati 10 hari dari berakhir periode IPR sebelumnya	Rp 2.000.000
503-0808-IPR/2023	19 Juni 2023	Muhamad Nurdin	PAKUAN HILL	Jl. Pajajaran - Baranangsiang / RTH	02 April 2023 - 01 April 2024	Rp 7.500.000	32712340400000041	503-0786-IPR/2024	25 Juni 2024	02 April 2024 - 01 April 2025	Perpanjangan IPR melewati 10 hari dari berakhir periode IPR sebelumnya	Rp 7.500.000
503-0832-IPR/2023	21 Juni 2023	Djunaidi	RM. TAMAN LAUT	Jl. Pajajaran - Baranangsiang / RTH	30 Juni 2023 - 29 Juni 2024	Rp 2.000.000	32712340400000045	503-0883-IPR/2024	15 Juli 2024	30 Juni 2024 - 29 Juni 2025	Perpanjangan IPR melewati 10 hari dari berakhir periode IPR sebelumnya	Rp 2.000.000
503-0995-IPR/2023	14 Juli 2023	Mira Yuliawati	TRUFFLE / Kursus Bahasa Asing	Jl. Pajajaran - Baranangsiang / RTH	13 Juli 2023 - 12 Juli 2024	Rp 2.000.000	32712340400000048	-	-	- - -	Tidak melakukan perpanjangan IPR	Rp 2.000.000
503-1096-IPR/2023	09 Agustus 2023	Agus Suparman	LED / Media Promosi PT. Vista Asta Persada	JPO Warung Jambu - Jl. Pajajaran	02 Agustus 2023 - 01 Agustus 2024	Rp 15.000.000	32712340400000049	503-1011-IPR/2024	05 Agustus 2024	02 Agustus 2024 - 01 Agustus 2025	Perpanjangan IPR sebelum periode IPR berakhir	Rp -
503-1220-IPR/2023	05 September 2023	Ayuni Mirlina, SE, MM.	PINHOME	Jl. Pajajaran - Depan All Fresh / RTH	04 September 2023 - 03 September 2024	Rp 15.000.000	32712340400000050	-	-	- - -	Tidak melakukan perpanjangan IPR	Rp 15.000.000
						Rp 186.500.000						**Rp 96.500.000**

APITULASI SURAT KETETAPAN UANG JAMINAN BONGKAR (SKUJB) PADA WEB-REGISTER TAHUN 2024

IPR TAHUN 2024		NAMA WAJIB PAJAK	NASKAH REKLAME	LOKASI REKLAME	PERIODE IPR	KETETAPAN SKUJB	NOMOR BAYAR SKUJB	PERPANJANGAN IPR TAHUN 2024			KETERANGAN	UANG JAMINAN BONGKAR
NOMER	TANGGAL							NOMER IPR	TANGGAL IPR	PERIODE IPR		
503-0088-IPR/2024	22 Januari 2024	Ir. Kriswandono	SANA HILLS	Jl. Padi - Baranangsiang / RTH	22 Januari 2024 - 21 Januari 2025	Rp 2.000.000	32712440400000001	-	-	- - -	Periode IPR belum berakhir	Rp -
503-0972-IPR/2024	25 Juli 2024	Nita Susanti	HANJAWAR	Jl. Pajajaran - Babakan / RTH	25 Juli 2024 - 24 Juli 2025	Rp 2.000.000	32712440400000011	-	-	- - -	Periode IPR belum berakhir	Rp -
503-1287-IPR/2024	15 Oktober 2024	Yohanes Samuel	D' SAWAH	Jl. Cifor - Simpang Dramaga / RTH	14 Oktober 2024 - 13 Oktober 2025	Rp 2.000.000	32712440400000019	-	-	- - -	Periode IPR belum berakhir	Rp -
503-1353-IPR/2024	01 November 2024	Arifin Kurniawan	LED	Jl. Jend. Sudirman - Depan Denpom / RTH	01 November 2024 - 31 Oktober 2025	Rp 15.000.000	32712440400000020	-	-	- - -	Periode IPR belum berakhir	Rp -
503-1440-IPR/2024	15 November 2024	PT. Reggy Pratama Adv.	Provider Property Perbankan Consumer Goods	Jl. Sliwangi - Batutulis / RTH	14 November 2024 - 13 November 2025	Rp 7.500.000	32712440400000023	-	-	- - -	Periode IPR belum berakhir	Rp -
						Rp 28.500.000						**Rp -**

APITULASI SURAT KETETAPAN UANG JAMINAN BONGKAR (SKUJB) PADA WEB-REGISTER TAHUN 2022, 2023 & 2024

Sisa Tahun 2022	Rp 62.500.000	Rp 31.500.000	Rp	31.000.000
Sisa Tahun 2023	Rp 186.500.000	Rp 96.500.000	Rp	90.000.000
Tambahan 2024	Rp 28.500.000		Rp	28.500.000
Total	**Rp 277.500.000**	**Rp 128.000.000**	**Rp**	**149.500.000**

Lampiran 13.1

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BOGOR
RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
31 Desember 2024

No	Keterangan	Jumlah
1	Fullerton (Double Bayar pd tgl 3/10/2018)	66.705.717,00
2	Yayasan	2.317.738,00
3	Weekday	70.661.157,02
4	Roti'O	476.666.666,67
5	Venus	40.000.000,00
6	Indomart	934.194.191,65
7	Koperasi	30.485.477,94
8	BJB	665.887.585,64
9	ATM BSI	25.602.421,72
	Jumlah	**2.312.520.955,64**

Lampiran 13.2

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR
RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA TENAGA KERJA ASING (TKA)
JANUARI S.D DESEMBER 2024

No.	No. SKRD	Uraian						Penerima Retribusi TKA Tahun 2024	Masa Berlaku (hari)	Jumlah Hari Tahun 2024	Jumlah Hari Tahun 2025	Pendapatan Diterima dimuka Tahun 2023
		Kode IMTA	Tanggal Bayar	Nama Tenaga Asing	Alamat	Nama Perusahaan	Asal Tenaga Asing					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m = L/j x i
1	202441203120001	(0001/IMTA) 0013k9400062917	11 Januari 2024	JOHN EDWARD OLIVER	PERUMAHAN DANAU BOGOR RAYA, KOTA BOGOR,JAWA BARAT,	YAYASAN DANASHA	INGGRIS	18.840.000	366	358	8	411.803,28
2	202441203120002	(0002/IMTA) 0013k9400064666	02 Februari 2024	SELVAKUMAR GUNASEKAR	JL. PEMUDA NO. 27, KEL. KEBON PEDES, KEC. TANAH SAREAL, KOTA BOGOR	GOODYEAR INDONESIA TBK, P	INDIA	18.612.000	366	344	22	1.118.754,10
3	202441203120003	(0003/IMTA) 0013K7510043639	26 Februari 2024	DIEGO ZANIBONI	JL. SALEH DANASASMITA, NOMOR 165, RT 003, RW 008, KOTA BOGOR	PT SPECIALE ITALIANO INDONESIA	ITALIA	18.576.000	366	315	51	2.588.459,02
4	202441203120004	(0004/IMTA) 0013YAX30023433	2-Apr-24	SHIMA TOYOSADA	JALAN KAUM SARI NOMOR 1, RT 001, RW 005, KOTA BOGOR	PT ONE SENTRAL BOGOR	Jepang	18.978.000	365	300	65	3.379.643,84
5	202441203120005	(0005/IMTA) 0013J3440043214	16 Mei 2024	SUMEDHA THILINA DE TISSERA	TAMAN YASMIN CLUSTER MAWAR JL. MAWAR 1 NO 17, CURUG MEKAR, BOGOR BARAT, BOGOR	PT. INDONESIA TEA TRADERS	SRI LANKA	18.954.000	365	231	134	6.958.454,79
6	202441203120006	(0006/IMTA) 0013YAX30026961	31 Mei 2024	MAURICE GRACE CLAVECILLA VRIELING	PERUMAHAN DANAU BOGOR RAYA, KOTA BOGOR,JAWA BARAT, BOGOR	YAYASAN DANASHA	PHILIPPINA	19.680.000	365	216	149	8.033.753,42
7	202441203120007	(0007/IMTA) 0013YAX30027543	5 Juni 2024	SHANNON RACHEL LYNN DIXON	PERUMAHAN DANAU BOGOR RAYA, KOTA BOGOR,JAWA BARAT, BOGOR	YAYASAN DANASHA	AMERIKA SERIKAT	19.698.000	365	211	154	8.310.936,99
8	202441203120008	(0008/IMTA) 0013YAX30027843	07 Juni 2024	SUMEDHA THILINA TISSERA	JL TAMAN PAJAJARAN BLOK A1 NO 1A LT 2 RT 003 RW 007 KEL BARANANGSIANG KEC BOGOR TIMUR KOTA BOGOR., BOGOR	PT. SISTEM ASIAN TEKNOLOGI	SRI LANKA	19.662.000	365	211	154	8.295.747,95
9	202441203120009	(0009/IMTA) 001307120091698	10 Juni 2024	BHOOPENDRA N/A	JL TAMAN PAJAJARAN BLOK A1 NO 1A LT 2 RT 003 RW 007 KEL BARANANGSIANG KEC BOGOR TIMUR KOTA BOGOR	PT. TEX CHEM GLOBAL	INDIA	19.302.000	365	178	187	9.888.969,86
10	202441203120010	(0010/IMTA) 20240606085916736989 / 0130270203013	14 Juni 2024	ANA ARANETA BALBOA	JALAN PAPANDAYAN 7, BOGOR 16151, BOGOR	YAYASAN PENDIDIKAN ANAK-ANAK BANGSA ASING	AMERIKA SERIKAT	4.852.500	92	92	0	-
11	202441203120011	(0011/IMTA) 20240606101145750928 / 0130270203013	14 Juni 2024	JONATHAN DOMINIC WRIGHT	JALAN PAPANDAYAN 7, BOGOR 16151, BOGOR	YAYASAN PENDIDIKAN ANAK-ANAK BANGSA ASING	AUSTRALIA	19.410.000	365	210	155	8.242.602,74
12	202441203120012	(0012/IMTA) 0013J3440049262	3 Juli 2024	TERUSHIGE NAKANISHI	JL. RAYA TAJUR NO.1, SINDANGRASA, BOGOR TIMUR, BOGOR	UNITEX TBK PT	JEPANG	19.842.000	365	183	182	9.893.819,18
13	202441203120013	(0013/IMTA) 001307120095529	11 Juli 2024	JANG JONGKEUN	SITU BEUREUM RT. 002 RW. 001 KEL. BOJONGKERTA, KEC. BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR, BOGOR	PT AGUNG CIPTA INDAH	KOREA SELATAN	19.620.000	365	183	182	9.783.123,29
14	202441203120014	(0014/IMTA) 0130270203013	5 September 202	LEE BYUNGNAM	JL. RAYA PAJAJARAN RT.003 RW.005 KEL. BANTARJATI KEC. BOGOR UTARA KOTA BOGOR, KOTA BOGOR	PT. SUKSES NADA PRIMA	KOREA SELATAN	18.282.000	365	89	276	13.824.197,26
15	202441203120015	(0015/IMTA)) 0013K9400092453	7 Oktober 2024	WARNER ILYAAS	JL.ABDULLAH BIN NUH NO 33-35 , BOGOR	PT.ANTARBAHASA GLOBAL SUKSES	AFRIKA SELATAN	18.978.000	365	89	276	14.350.487,67
16	202441203120016	(0015/IMTA) 0013K7510060796	22 Oktober 2024	BIAUW LOK KWEE	JL. SILIWANGI NO. 14, KEL. BONDONGAN KEC. BOGOR SELATAN, BOGOR	PT. MURNI MOTOR	Belanda	18.846.000	365	71	294	15.180.065,75
17	202441203120017	(0017/IMTA) 001307120111564	29 Oktober 2024	FAHIM FAHIM	VILA BOGOR INDAH 3 BLOK AB 1, NOMOR 1, RT 006, RW 015, BOGOR	PT BUMI BARA ENERGY	AFGHANISTAN	19.050.000	365	64	301	15.709.726,03
18	202441203120018	(0018/IMTA) 0013K9400095308	30 Oktober 2024	DIETER OSWALD SPEER	JALAN BOGOR BARU, BLOK A.X, NOMOR 1-2, BOGOR	PT GERBANG BOGA UTAMA	JERMAN	19.068.000	365	75	290	15.149.917,81
19	202441203120019	(0019/IMTA) 0013K9400097373	1 November 202	YANG RITA	SITU BEUREUM, KEL. BOJONGKERTA, KEC. BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR,	PT AGUNG CIPTA INDAH	KOREA SELATAN	18.960.000	365	51	314	16.310.794,52
20	202441203120020	(0020/TKA) 0013K7510064719	1 November 202	NATALIE ANN VINING	PERUMAHAN DANAU BOGOR RAYA, KOTA BOGOR,JAWA BARAT, BOGOR	YAYASAN DANASHA	INGGRIS	19.320.000	365	41	324	17.149.808,22

No.	No. SKRD	Uraian						Penerima Retribusi TKA Tahun 2024	Masa Berlaku (hari)	Jumlah Hari Tahun 2024	Jumlah Hari Tahun 2025	Pendapatan Diterima dimuka Tahun 2023
		Kode IMTA	Tanggal Bayar	Nama Tenaga Asing	Alamat	Nama Perusahaan	Asal Tenaga Asing					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m = L/j x i
21	202441203120021	(0021/TKA) 0013K7510065870	3 Desember 2024	JOHN EDWARD OLIVER	PERUMAHAN DANAU BOGOR RAYA, KOTA BOGOR,JAWA BARAT, BOGOR	YAYASAN DANASHA	INGGRIS	19.308.000	365	27	338	17.879.736,99
22	202441203120022	(0023TKA) 0013J3440066824	0 Desember 2024	YASUHIRO KATAYAMA	JL. RAYA TAJUR NO.1, SINDANGRASA, BOGOR TIMUR, BOGOR	UNITEX TBK PT	JEPANG	19.224.000	365	21	344	18.117.961,64
23	202441203120023	(0025TKA) 00131674014532	1 Desember 2024	RAMACHANDRAN SUBRAMANIAN	JL. RAYA PAJAJARAN NO. 8 RT 003 RW 004 BARANANGSIANG KEC BOGOR TIMUR KOTA BOGOR., BOGOR	TMS FASHION (HK) LTD	SRI LANKA	19.260.000	365	21	344	18.151.890,41
24	202441203120024	(0022/TKA) 00136M1960030823	1 Desember 2024	RYO NAKAMURA	JL. ACHMAD ADNAWIJAYA (PANDU RAYA) NO.76, BOGOR UTARA, BOGOR-JAWA BARAT., BOGOR	SANUBARI AMERTA ELOK, PT	JEPANG	18.900.000	365	21	344	17.812.602,74
	JUMLAH							**445.222.500**				**256.543.257,49**

Lampiran 14.1

PEMERINTAH KOTA BOGOR
UTANG BELANJA
PERIODE 31 DESEMBER 2024

No.	Nama SKPD	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	Telepon	Air	Listrik	Surat Kabar	Internet	Utang Belanja Iuran Jaminan / Asuransi-Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	Utang Belanja Pemeliharaan	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Total
1	Dinas Pendidikan					3.359.082	87.454.285	195.966.713	10.195.000	182.850.328				479.825.408
2	Dinas Kesehatan					3.180.071	4.989.800	47.536.465			92.375.000			148.081.336
3	Puskesmas Bogor Selatan					53.391	482.600	3.121.776		1.764.900				5.422.667
4	Puskesmas Cipaku					51.657	1.996.900	6.437.901		1.153.390				9.639.848
5	Puskesmas Bondongan						307.800	1.875.600		582.950				2.766.350
6	Puskesmas Lawang Gintung	12.141.363,00		3.338.454,00	1.100.000,00					1.362.500				17.942.317
7	Puskesmas Bogor Timur					405.370	1.178.200	5.180.409		1.454.100				8.218.079
8	Puskesmas Pulo Armyn		89.612.913,00			43.956	426.300	2.991.011		940.580				94.014.760
9	Puskesmas Bogor Tengah					1.024.530	1.125.300	3.474.918						5.624.748
10	Puskesmas Sempur													-
11	Puskesmas Gang Aut					67.155				571.650				638.805
12	Puskesmas Belong									1.293.594				1.293.594
13	Puskesmas Merdeka						1.425.300	3.384.096		1.831.500				6.640.896
14	Puskesmas Semplak						965.800	2.868.102						3.833.902
15	Puskesmas Pancasan		13.742.790,00				172.700	2.664.774		735.930				17.316.194
16	Puskesmas Pasir Mulya						714.150,00	2.298.408,00		280.941,00				3.293.499
17	Puskesmas Gang Kelor						486.400,00	1.940.855,00		921.300,00				3.348.555
18	Puskesmas Sindang Barang					53.391,00	408.600,00	4.924.251,00		593.850,00				5.980.092
19	Puskesmas Bogor Utara					53.391,00	3.359.700,00	5.682.650,00		830.003,00				9.925.744
20	Puskesmas Tegal Gundil						1.010.000,00	3.339.902,00		1.157.730,00				5.507.632
21	Puskesmas Warung Jambu					2.081.472,00	1.423.350,00	3.171.263,00						6.676.085
22	Puskesmas Tanah Sereal					58.941,00	1.270.300,00	4.930.902,00						6.260.143
23	Puskesmas Pondok Rumput									860.250,00				860.250
24	Puskesmas Kedung Badak					31.857,00	831.100,00	3.559.602,00		877.677,00				5.300.236
25	Puskesmas Kayu Manis						445.100,00	3.747.917,00		953.500,00				5.146.517
26	Puskesmas Mekarwangi		103.190.050,00			268.620,00	668.700,00	4.086.153,00		576.342,00				108.789.865
27	Puskesmas Mulyaharja							1.698.885,00						1.698.885
28	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah					494.500,00		8.743.368,00		454.205,00				9.692.073
29	Rumah Sakit Umum Daerah													-
30	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					203.019	6.666.200	30.683.532		2.551.890				40.104.641
31	Dinas Perumahan Dan Permukiman					867.576	13.603.100	44.868.831		3.832.830				63.172.337
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					218.950	171.800	8.437.266		1.445.500				10.273.516
33	Satuan Polisi Pamong Praja					31.857	994.800	6.981.812		-				8.008.469
34	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan					70.041	4.525.400	5.342.368						9.937.809
35	Dinas Sosial					796.314	4.635.700	10.398.442						15.830.456
36	Dinas Tenaga Kerja					347.430	1.872.600	10.626.403		738.150				13.584.583
37	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak					192.438	2.643.800	8.421.874						11.258.112
38	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					1.832.277	4.115.400	24.051.080						29.998.757
39	Dinas Lingkungan Hidup					53.391	12.510.200	14.182.036		754.800				27.500.427
40	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil					96.348	2.763.800	17.602.855						20.463.003
41	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana					92.907	581.400	5.644.449						6.318.756
42	Dinas Perhubungan					61.941	3.055.550	3.057.069.053						3.060.186.544
43	Dinas Komunikasi dan Informatika					248.307								248.307
44	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian					242.535	1.444.400	15.995.966						17.682.901
45	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					31.857	646.800							678.657
46	Dinas Pemuda Dan Olah Raga						31.147.000	38.661.042		411.028				70.219.070
47	Dinas Arsip Dan Perpustakaan					104.007	3.773.100	29.316.135						33.193.242
48	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan					37.407	673.100	13.024.870						13.735.377
49	Sekretariat Daerah					1.553.786	52.896.300	124.050.855						178.500.941
50	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						4.190.100	156.453.619						160.643.719
51	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah					37.407	719.300	9.359.115						10.115.822
52	Badan Keuangan Dan Aset Daerah					53.391								53.391
53	Badan Pendapatan Daerah					763.729	6.574.500	58.265.953						65.604.182
54	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur					107.942	3.430.800	9.735.606						13.274.348
55	Inspektorat					104.423	603.300	8.447.079						9.154.802
56	Kecamatan Bogor Utara					1.498.722	3.940.400	15.418.840						20.857.962
57	Kecamatan Bogor Selatan					3.418.323	10.100.400	14.162.127						27.680.850
58	Kecamatan Bogor Timur					4.055.384	3.591.500	10.288.924						17.935.808
59	Kecamatan Bogor Barat					1.149.960	13.299.900	12.892.478						27.342.338
60	Kecamatan Bogor Tengah					807.525	4.805.300	11.705.044						17.317.869
61	Kecamatan Tanah Sareal					465.680	4.159.600	13.437.502						18.062.782
62	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik					141.414	468.300	2.695.794						3.305.508
	Jumlah (I)	**12.141.363**	**206.545.753**	**3.338.454**	**1.100.000**	**30.913.672**	**315.746.235**	**4.111.846.871**	**10.195.000**	**211.781.418**	**92.375.000**	**-**	**-**	**4.995.983.766**

No.	Nama SKPD	Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Barang dan Jasa	Utang Belanja Modal			
1	Rumah Sakit Umum Daerah - BLUD	2.546.810.330,00	87.279.732.077	**1.709.369.921**			**91.535.912.327,66**
							96.531.896.093,66

Lampiran 14.2

PEMERINTAH KOTA BOGOR
UTANG BELANJA BARANG DAN JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BLUD)
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	Uraian	Nilai (Rp)
2.1.06.01.99.9999	Utang Belanja Pegawai BLUD	2.546.810.330,00
2.1.06.02.01.0002	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia	271.027.854,00
2.1.06.02.01.0009	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	23.643.000,00
2.1.06.02.01.0010	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	9.990.000,00
2.1.06.02.01.0012	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	496.329.292,00
2.1.06.02.01.0015	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.786.364.839,00
2.1.06.02.01.0023	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	5.890.000,00
2.1.06.02.01.0024	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	247.816.500,00
2.1.06.02.01.0026	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	415.984.609,00
2.1.06.02.01.0031	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	230.825.810,00
2.1.06.02.01.0035	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir / Cendera Mata	15.920.000,00
2.1.06.02.01.0036	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	191.520.630,00
2.1.06.02.01.0037	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	16.449.444.158,81
2.1.06.02.01.0038	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	31.168.640.911,11
2.1.06.02.01.0043	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura	529.513.173,74
2.1.06.02.01.0052	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	4.423.800,00
2.1.06.02.01.0056	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	4.587.674.060,00
2.1.06.02.01.0058	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	176.001.600,00
2.1.06.02.01.0063	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.450.000,00
2.1.06.02.01.0064	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	7.179.480,00
2.1.06.02.01.0067	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Penyelamatan	3.300.000,00
2.1.06.02.02.0003	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	262.370.519,00
2.1.06.02.02.0004	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	98.911.540,00
2.1.06.02.02.0007	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Rohaniwan	2.400.000,00
2.1.06.02.02.0011	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	856.083.060,00
2.1.06.02.02.0014	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	4.774.669.079,00
2.1.06.02.02.0016	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.400.000,00
2.1.06.02.02.0030	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	736.422.666,00
2.1.06.02.02.0050	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Kalibrasi	6.963.500,00
2.1.06.02.02.0051	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	409.907.552,00
2.1.06.02.02.0052	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	81.585.000,00
2.1.06.02.02.0055	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan	169.181.000,00
2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	6.828.720,00

Kode Rekening	Uraian	Nilai (Rp)
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	20.261.300,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	405.739.975,00
2.1.06.02.02.0062	Utang Belanja Jasa Kantor-Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	2.125.000,00
2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	36.000.000,00
2.1.06.02.02.0067	Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	33.855.000,00
2.1.06.02.02.0071	Utang Belanja Jasa Kantor-Lembur	175.169.170,00
2.1.06.02.02.0080	Utang Belanja Iuran Jaminan / Asuransi-Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.500.000,00
2.1.06.02.02.0159	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	248.977.500,00
2.1.06.02.02.0935	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	67.000.000,00
2.1.06.02.02.0959	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) -Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	2.647.212.478,00
2.1.06.02.02.0968	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) -Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Kesehatan	12.418.746.047,00
2.1.06.02.02.1028	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	2.595.863.999,00
2.1.06.02.03.0069	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu Lainnya	148.795.500,00
2.1.06.02.03.0153	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Mebel	6.053.940,00
2.1.06.02.03.0156	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin	543.272.882,00
2.1.06.02.03.0158	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.144.601,00
2.1.06.02.03.0272	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.711.021.769,00
2.1.06.02.03.0440	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Personal Computer	54.334.500,00
2.1.06.02.03.0545	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor	2.036.026.412,00
2.1.06.02.03.0734	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik Lainnya	18.484.402,00
2.1.06.02.04.0001	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri–Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.633.000,00
2.1.06.02.05.0002	Utang Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat-Penghargaan atas Suatu Prestasi	2.000.000,00
2.1.06.02.05.0006	Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain	53.852.248,00
2.1.06.07.02.0010	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	30.300.000,00
2.1.06.07.05.0004	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	67.278.000,00
2.1.06.07.05.0005	Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	306.845.800,00
2.1.06.07.05.0006	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel	348.835.735,00
2.1.06.07.05.0009	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	-
2.1.06.07.05.0010	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	3.100.000,00
2.1.06.07.05.0011	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	214.220.276,00
2.1.06.07.07.0001	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	185.857.000,00
2.1.06.07.07.0002	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	7.500.000,00
2.1.06.07.07.0004	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	47.816.244,00
2.1.06.07.07.0005	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	38.850.000,00
2.1.06.07.07.0008	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	36.085.091,00
2.1.06.07.07.0012	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	8.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Nilai (Rp)
2.1.06.07.07.0014	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung	92.000.000,00
2.1.06.07.07.0015	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	56.663.557,00
2.1.06.07.07.0021	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	28.040.820,00
2.1.06.07.07.0034	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	104.839.500,00
2.1.06.07.08.0011	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	50.616.000,00
2.1.06.07.08.0091	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika-System / Power Supply	24.876.898,00
2.1.06.07.10.0001	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Komputer Jaringan	43.845.000,00
2.1.06.07.10.0002	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer	13.200.000,00
		91.535.912.327,66

PEMERINTAH KOTA BOGOR
DAFTAR PROPERTI INVESTASI
PER 31 DESEMBER 2024

No.	SKPD	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor	Tahun Pembelian	Letak / Alamat	Status Tanah	Penggunaan	Asal Usul	Jumlah	Harga
			Kode Barang			Hak				
1	01.02.103 - SDN Kebon Kopi 1	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002	2003	Jl. Kebon Kopi Kel. Kebon Kelapa Kec. Bogor Tengah	HAK PAKAI	Bangunan Sekolah Eks SDN Kebon Kopi 2	Non APBD	1	188.888,00
2	01.02.190 - SDN Kebon Pedes 1	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002	1999	Jl. Kebon Pedes, Gg. Pacilong - Eks SDN Kebon Pedes 2 Kel. Kebon Pedes Kec. Tanah Sareal	HAK PAKAI	Exs SDN Kebon Pedes 3	NON APBD	1	517.600.000,00
3	06.00.000 - DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Lain-Lain Tanah Untuk Taman	1.3.1.01.03.13.003	2003	Taman jl.Padi dari simpang pakuan s/d ujung jl.Binamarga (kanan) Kel.Baranangsiang	HAK PAKAI	(Taman/RTH) Gedung Kuliner, dekranasda, taman	NON APBD	1	1.294.880.850,00
4	13.00.000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Lain-Lain Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.3.1.01.01.04.026	2010	Kel. Kayu Manis Kec. Tanah Sareal		(TPS) Tempat Pembuangan Akhir Kayumanis	-	1	5.311.079.250,42
5	13.00.000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Lain-Lain Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.3.1.01.01.04.026	2010	Kel. Kayu Manis Kec. Tanah Sareal	HAK PAKAI	(TPS) Tempat Pembuangan Akhir Kayumanis	APBD	1	13.258.462.499,58
6	17.00.000 - DINAS PERHUBUNGAN	Tanah Bangunan Pasar	1.3.1.01.01.02.001	2003	Jl. Cifor Kel. Bubulak Kec. Bogor Barat	HAK PAKAI	(Terminal) PSP Ke Dishub untuk dioperasionalkan ke PDJT dalam rangka pelayanan angkutan pull bis PDJT	Pinjam Pakai	1	1.072.773.190,00
7	24.00.000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Lain-Lain Tanah Untuk Taman	1.3.1.01.03.13.003	2003	Taman jl.Padi dari simpang pakuan s/d ujung jl.Binamarga (kanan) Kel.Baranangsiang	HAK PAKAI	(Taman/RTH) Gedung Kuliner, dekranasda, aqurium, taman	NON APBD	1	334.162.830,00
8	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Lain-Lain Tanah Kering	1.3.1.01.02.02.004	2003	Babakan Perumnas Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Timur		(Rumah Tinggal) Pemakaian Kekayaan Daerah-rumah tinggal	-	1	8.424.000.000,00
9	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Lain-Lain Tanah Kering	1.3.1.01.02.02.004	2011	Gang Kelor, Kel. Menteng Kec. Bogor Barat - RW 09, RW 10	HAK PAKAI	(Rumah Tinggal) Pemakaian Kekayaan Daerah-rumah tinggal	-	1	1.858.000.500,00
10	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Tanah Kampung	1.3.1.01.03.17.001	2003	Tanah Kampung Kel. Tanah Baru Kec. Bogor Utara - Tanah Untuk Pemukiman (Belakang Perumahan Taman Soka)	HAK PAKAI	(Idle)	NON APBD	1	3.115.000.000,00
11	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Tanah Tegalan	1.3.1.01.02.02.001	2003	Kp. Cilubang RT. 3/2 Desa Sukadamai Kec. Ciomas Kabupaten Bogor		(Idle) Tanah Kosong (Tanah Bengkok)	-	1	636.552.000,00
12	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	1.3.1.01.03.09.003	2003	RT. 3/4 Kel. Ciluar Kec. Bogor Utara	HAK PAKAI	(TPS)	Untuk Bangunan Instalasi Pengolohan SampahStasion Peralihan Antara (SPA) - Tanah pembelian dari PTP 13/m65.5373/1983/HGB, .Koreksi luasan menjadi 2,5 Ha	1	3.997.100.000,00
13	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Tanah Bangunan Stasiun Penelitian	1.3.1.01.01.04.016	2003	Terminal Agribisnis Ikan Hias Jl. Rancamaya Kel. Rancamaya Kec. Bogor Selatan	HAK PAKAI	(PINJAM PAKAI) - Kepolisian Resor Kota Bogor (Lahan Ketahanan Pangan) (Taman/RTH)	Fasos Fasum perumahan rancamaya	1	11.329.171.811,00
14	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi	1.3.1.01.03.08.001	2003	Jl. Dadali Kel. Tanah Sareal Kec. Tanah Sareal	HAK PAKAI	idle	Tanah Negara, sebelumnya digunakan sebagai pom bensin dadali	1	1.200.000.000,00
15	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Tanah Kaveling Tanah Matang	1.3.1.01.01.01.011	2023	Jl. Jendral Sudirman No.5 Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor	-	(Jalan) sisa	Inventarisasi BMD	1	2.439.000.000,00
16	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Lain-Lain Tanah Kering	1.3.1.01.02.02.004	2003	Tanah Kosong Lainnya TANAH SEWA KELURAHAN BABAKAN KEC. BOGOR TENGAH - TANAH DISEWA MASYARAKAT	Milik Pemerintah	(Rumah Tinggal) Pemakaian Kekayaan Daerah-rumah tinggal	APBD	1	1.183.896.000,00
17	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002	2021	Jl. Sukasari III Kel. Sukasari Kec. Bogor Timur	HAK PAKAI	(SD/Sederajat) Pemakaian Kekayaan Daerah-usaha	Sarana Pendidikan SD Pertiwi	1	6.484.480.000,00
18	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.3.1.01.02.02.002	2003	Jl. Cimanggu Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal	HAK PAKAI	(Sarana Ibadah) Mesjid Al - Falaah dan TK Al - Falaah	NON APBD	1	1.326.066.000,00
19	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002	2021	Perumahan Bogor Raya Permai Blok FF-01, RT.004/RW.013 Kel. Curug Kec. Bogor Barat	HAK PAKAI	(Sarana Ibadah) Sarana Pendidikan Baitusalam dan mesjid	Fasos Fasum dari Perumahan Bogor Raya Permai yang dipakai sarana pendidikan (2.398) dan mesjid (6398)	1	17.668.101.000,00
20	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002	2014	Perumahan Taman Yasmin Sektor II dan VII Kel. Cilendek Timur Kec. Bogor Barat (2 unit)	HAK PAKAI	(TK/Paud)	Fasos Fasum Tanah Bangunan pendidikan dan latihan (sekolah) Tanah Kosong untuk bangunan pendidikan- RPKD ke Yayasan Prima Causa seluas 2.000 m2	1	10.292.904.000,00

No.	SKPD	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor	Tahun Pembelian	Letak / Alamat	Status Tanah	Penggunaan	Asal Usul	Jumlah	Harga
			Kode Barang			Hak				
21	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Tanah Lapangan Sepak Bola	1.3.1.01.03.01.005	2003	ciherang - Ds Ciapus Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor	HAK PAKAI	(PINJAM PAKAI) - Pemerintah Kabupaten Bogor (Sarana Olahraga)	NON APBD	1	1.383.750.000,00
22	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Lain-Lain Tanah Kering	1.3.1.01.02.02.004	2003	Tanah Kosong Lainnya TANAH SEWA BABAKAN BARU KELURAHAN CIPAKU KEC BOGOR SELATAN		(Rumah Tinggal) Pemakaian Kekayaan Daerah-rumah tinggal	-	1	7.000.000.000,00
23	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002	2021	Jl. Nenas Raya Bantar Kemang Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Timur	hak pakai	(TK/Paud) Pemakaian Kekayaan Daerah-usaha Sarana Pendidikan TK Pertiwi	Sarana Pendidikan TK Pertiwi	1	3.343.137.000,00
24	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	2021	Jl. Pool Bina Marga Kel. Kayu Manis Kec. Tanah Sareal - Kota Bogor	HAK PAKAI	(Idle) Bangunan Perkantoran	Ruislah dengan Yayasan Danasha 591/BA.426-BKAD/2021 19/YD/V/2021	1	7.348.765.930,00
25	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Tanah Kaveling Tanah Matang	1.3.1.01.01.01.011	2023	Cimanggu Kecil RT.01/RW.07 Kelurahan Ciwaringin Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor	-	(SMP/Sederajat) Sarana Pendidikan	Inventarisasi BMD	1	1.415.700.000,00
26	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Lain-Lain Tanah Kering	1.3.1.01.02.02.004	2003	Bakom sari RW.12 Kel. harjasari Kec. Bogor Selatan (belakang pesantren madani)	HAK PAKAI	(Lain-lain Sarana Pendidikan dan Latihan) Tanah Kosong	Eks Tanah Bengkok Kertamaya	1	357.424.970,00
27	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Tanah Kaveling Tanah Matang	1.3.1.01.01.01.011	2023	Jln.Lodaya Ujung Kel.Babakan Kec.Bogor Tengah	HAK PAKAI	(TK/Paud) Sarana Pendidikan	Pengamanan tanah pemerintah yang dimanfaatkan dengan cara sewa oleh Yayasan Waskita Raksa Wacana untuk TK Alisya	1	2.493.000.000,00
28	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	2021	Jl. Pool Bina Marga Kel. Kayu Manis Kec. Tanah Sareal - Kota Bogor	HAK PAKAI	(Idle) Bangunan Perkantoran	Ruislah dengan Yayasan Danasha 591/BA.426-BKAD/2021 19/YD/V/2021	1	2.042.883.506,00
29	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Lain-Lain Tanah Kering	1.3.1.01.02.02.004	2021	Jl. KH. Abdullah Bin Nuh Kel. Cilendek Barat Kec. Kec. Bogor Barat - Kota Bogor	HAK PAKAI	(Idle)	Ruislah dengan Yayasan Danasha 591/BA.426-BKAD/2021 19/YD/V/2021	1	69.874.680.000,00
30	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	2021	Jl. Pool Bina Marga Kel. Kayu Manis Kec. Tanah Sareal - Kota Bogor	HAK PAKAI	(Idle) Bangunan Perkantoran	Ruislah dengan Yayasan Danasha 591/BA.426-BKAD/2021 19/YD/V/2021	1	9.717.733.377,00
31	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Tanah Tegalan	1.3.1.01.02.02.001	2003	Tanah Kosong yang tidak diusahakan Pasir jambu - Lokasi Pasir Jambu (Empat Bidang) Kel. Pasir Jambu Kec. Karadenan Kabupaten Bogor	Hak Milik	idle	NON APBD	1	2.351.756.810,00
32	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Lain-Lain Tanah Kering	1.3.1.01.02.02.004	2003	BABAKAN FAKULTAS KELURAHAN TEGALLEGA KEC. Bogor Tengah Jl. Malabar		(Rumah Tinggal) Pemakaian Kekayaan Daerah-rumah tinggal	-	1	2.340.000.000,00
33	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Lain-Lain Tanah Kering	1.3.1.01.02.02.004	2003	DEKENG JAYA KEL. GENTENG KEC. BOGOR SELATAN	HAK PAKAI	(Rumah Tinggal) Pemakaian Kekayaan Daerah-rumah tinggal	-	1	1.030.000.000,00
34	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Tanah Kaveling Tanah Matang	1.3.1.01.01.01.011	2023	Jl. Ciheuleut No. 25 Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur	Hak Pakai	(Jalan) sisa	Inventarisasi tanah pemerintah yang di manfaatkan untuk akses jalan masuk	1	368.160.000,00
35	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Lain-Lain Tanah Untuk Jalan	1.3.1.01.03.07.011	2021	Jl. Raya Parung Banteng Kel. Katulampa Kec. Bogor Timur	Hak Pakai	(Idle)	Sisa Pembebsan Lahan R.3	1	490.448.000,00
36	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1.3.1.01.03.07.004	2003	Jl. R3 Kel. Tanah Baru Kec. Bogor Utara - Kota Bogor	HAK PAKAI	(Idle)	Pembebasan Tahun 2006 Tanah Untuk Jalan Kotamadya On Ramp Spur Pakuan	1	1.078.200.000,00
37	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002	2003	Jl. Gang Aut Kel. Gudang Kec. Bogor Tengah	HAK PAKAI	idle	NON APBD	1	1.286.500.000,00
38	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	2003	Gang Kebon Kelapa RT. 01 RW.01 Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Timur	HAK PAKAI	(Rumah Tinggal) Tanah Sewa	-	1	621.892.650,00
39	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	2003	Jl. Sawojajar Kel. Pabaton Kec. Bogor Tengah	HAK PAKAI	(lain-lain Kantor Pemerintahan) Pemakaian Kekayaan Daerah-usaha	Milik Sendiri, disewakan ke Perumda Bank Kota Bogor	1	46.492.000,00
40	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	2003	Kel. Kedung Waringin Kec. Tanah Sareal	HAK PAKAI	(TK/Paud) TK Asri	NON APBD	1	164.500.000,00
41	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002	2003	Jl. Kebon Kopi Kel. Kebon Kelapa Kec. Bogor Tengah	HAK PAKAI	(idle)	NON APBD	1	120.499.632,00
42	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002	2003	JL. WANGUN KP. WANGUNSARI RT.05/04 Kel. Pamoyanan Kec. Bogor Selatan	HAK PAKAI	(Lain-lain Sarana Pendidikan dan Latihan) Pemakaian Kekayaan Daerah-usaha	eks SDN Wangunsari	1	102.900.000,00

No.	SKPD	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor	Tahun Pembelian	Letak / Alamat	Status Tanah	Penggunaan	Asal Usul	Jumlah	Harga
			Kode Barang			Hak				
43	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002	2003	Jl. Ledeng Sindangsari RT.01/X Kel. Kebon Kelapa Kec. Bogor Tengah - eks SDN Sindangsari 4	HAK PAKAI	(idle)	eks Bangunan Sekolah SDN Sindangsari (Ket. dri kolom no sertipikat, 5 (AN 898303))	1	261.910.600,00
44	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002	2003	Jl. Cempaka Kel. Kebon Kelapa Kec. Bogor Tengah	HAK PAKAI	(Idle) Tanah Kosong	NON APBD	1	1.163.245.000,00
45	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	2003	Jl. Pangeran Assogiri No. 374 16153 Kel. Tanah Baru Kec. Bogor Utara		(lain-lain Kantor Pemerintahan) belakang Kantor Kelurahan Tanah Baru	NON APBD	1	5.129.019.140,00
46	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002	2003	Jl. Artzimar II Kawung Luwuk RT.01/01 Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara - Eks SDN Kawung Luwuk 5	HAK PAKAI	(idle)	bangunan Sekolah Eks SDN Kawung Luwuk 5 - Pakai 102201020059	1	350.982.000,00
47	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002	2003	Kp. Ceger RT.04/XI - eks SDN Ceger 3 Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara	HAK PAKAI	(idle)	eks Bangunan Sekolah SDN Ceger 2	1	93.717.939,00
48	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Lain-Lain Tanah Untuk Taman	1.3.1.01.03.13.003	2003	Kel. Sempur Kec. Bogor Tengah	HAK PAKAI	(Idle) Tanah Dekat Asrama IPB	-	1	44.000.000,00
49	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1.3.1.01.03.07.004	2003	Jalan Dreded No. 42 Kel. Empang Kec. Bogor Selatan	HAK PAKAI	(Jalan) sisa Tanah Sewa CV. Delima Mandiri	-	1	2.686.086,00
SUBTOTAL PROPERTI INVESTASI TANAH									**49**	**213.767.403.459**
1	19.00.000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Lain-Lain Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.3.3.01.01.12.004	2014	Gedung Tempat berdagang Wisata Kuliner Bina Marga Lain-Lain Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Bangunan rehab Tahun 2017 = Rp. 224.481.500revit 2019 = Rp. 304.458.550+ Rp. 85.523.000	0	-	APBD	1	3.845.478.403,00
2	39.00.000 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.01.01.01.001	2003	Gedung Tempat berdagang Wisata Kuliner Bina Marga Lain-Lain Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Bangunan rehab Tahun 2017 = Rp. 224.481.500revit 2019 = Rp. 304.458.550+ Rp. 85.523.000	HAK PAKAI	-	APBD	1	563.008.000,00
SUBTOTAL PROPERTI INVESTASI GEDUNG DAN BANGUNAN									**2**	**4.408.486.403**
TOTAL									**51**	**218.175.889.862**

Perumda BPR Bank Kota Bogor
Laporan Keuangan
31 Desember 2024
dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Serta Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan

Laporan Auditor Independen

Halaman

Laporan Keuangan

Neraca 1

Laporan Laba Rugi 3

Laporan Perubahan Ekuitas 4

Laporan Arus Kas 5

Catatan atas Laporan Keuangan 7

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.	Nama	:	TOMMY INDRA GUNAWAN, S.E., M.M.
	Alamat kantor	:	Jl. R.E Martadinata No. 45 Kota Bogor
	Alamat rumah	:	Jl. Bojong Kaliki Kp.Rancabogo Wetan Rt.02 Rw.14 Ds.Pataruman Kec.Tarogong Kidul Kab.Garut
	Nomor Telepon Kantor	:	0251-832 4601
	Jabatan	:	Direktur Utama
2.	Nama	:	ANJAS ASMARA
	Alamat kantor	:	Jl. R.E Martadinata No. 45 Kota Bogor
	Alamat rumah	:	Jl. Situ Asih Kp. Pulo No. 104 Pancoran Mas, Depok
	Nomor Telepon Kantor	:	0251- 832 4601
	Jabatan	:	Direktur Kepatuhan

Untuk dan atas nama Perumda BPR Bank Kota Bogor menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perumda BPR Bank Kota Bogor;
2. Laporan keuangan Perumda BPR Bank Kota Bogor tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP);
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Perumda BPR Bank Kota Bogor telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan Perumda BPR Bank Kota Bogor tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
   c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh Perumda BPR Bank Kota Bogor sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi Perumda BPR Bank Kota Bogor.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bogor, 30 Januari 2025



TOMMY INDRA GUNAWAN, S.E., M.M.
Direktur Utama

ANJAS ASMARA
Direktur Kepatuhan

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SABAR & REKAN
No. IZIN USAHA : 1038/KM.1/2012

Jalan Saturnus Utara No. 4A
Margahayu Raya, Bandung - 40286
Telp. : 022-7561965
E-mail : sabardanrekan@gmail.com

No. : 00004/2.0923/AU.2/07/1531-2/1/I/2025

Laporan Auditor Independen

Direksi dan Pemegang Saham
Perumda BPR Bank Kota Bogor

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perumda BPR Bank Kota Bogor ("BPR"), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perumda BPR Bank Kota Bogor tanggal 31 Desember 2024, dan kinerja keuangan, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraph Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan BPR dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan BPR.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik Sabar & Rekan



Darwansah, SE., M.Ak., Ak., CA., CPA., CFI.
Ijin Akuntan Publik No. AP.1531
Ijin Usaha No. Kep. 1038/KM.1/2012

30 Januari 2025



PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
NERACA
31 Desember 2024

A S E T

	Catatan	2 0 2 4	2 0 2 3
		Rp	**Rp**
Kas	4	1.106.438.700	1.187.968.500
Pendapatan bunga yang akan diterima	3c,5	1.297.227.357	1.242.975.689
	3b,3d		
Penempatan pada bank lain :	3e,6		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		–	–
Pihak ketiga		106.078.227.638	98.363.929.726
Jumlah penempatan pada bank lain		106.078.227.638	98.363.929.726
Penyisihan kerugian		(181.224.602)	(254.222.593)
Bersih		105.897.003.036	98.109.707.133
Kredit yang diberikan	3b,3f,7		
Jumlah kredit yang diberikan		164.871.989.517	149.905.351.620
Provisi, Adm, Pend.bunga ditangguhkan		(4.187.073.520)	(3.639.082.844)
Kredit restrukturisasi		(108.146.433)	(198.293.689)
Penyisihan kerugian		(13.213.003.037)	(10.889.180.639)
Jumlah		147.363.766.527	135.178.794.448
Agunan yang diambil alih	8	883.830.364	293.843.700
Aset tetap bersih	3h,9	5.644.536.011	4.624.860.711
Aset tidak berwujud	10	–	–
Biaya dibayar dimuka	3i,11	672.632.163	531.174.722
Aset lain-lain	12	168.718.604	2.037.904.361
JUMLAH ASET		**263.034.152.762**	**243.207.229.264**

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
NERACA (Lanjutan)
31 Desember 2024

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

	Catatan	2024	2023
		Rp	Rp
KEWAJIBAN			
Utang bunga	13	252.392.960	177.614.541
Utang pajak	3m,18b	824.210.638	527.710.407
Titipan	14	2.673.976.081	118.748.297
Simpanan	3k,15	143.729.790.406	129.956.680.271
Simpanan dari bank lain	16	2.000.000.000	5.200.000.000
Kewajiban imbalan kerja	3l,19	–	215.083.062
Pinjaman yang diterima	20	25.693.530.716	20.344.192.622
Kewajiban lain-lain	17	33.138.810	152.937.884
Jumlah kewajiban		175.207.039.611	156.692.967.084
EKUITAS			
Modal			
Modal disetor	21	54.000.000.000	54.000.000.000
Saldo laba			
Cadangan	22	28.478.540.873	27.469.610.545
Belum ditentukan tujuannya		5.348.572.278	5.044.651.635
Jumlah ekuitas		87.827.113.151	86.514.262.180
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**263.034.152.762**	**243.207.229.264**

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
LAPORAN LABA RUGI
Untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024

	Catatan	2024	2023
		Rp	Rp
Pendapatan bunga :			
Bunga	3o,24	30.876.807.664	29.329.951.882
Provisi dan komisi	3o,24	2.344.328.501	2.495.771.960
Jumlah pendapatan bunga		33.221.136.165	31.825.723.842
Beban bunga	3o,25	(8.119.287.159)	(6.875.295.077)
Pendapatan bunga, bersih		25.101.849.006	24.950.428.765
Pendapatan operasional lainnya	26	2.887.484.748	1.806.404.950
Pendapatan operasional		27.989.333.754	26.756.833.715
Beban operasional :			
Pemasaran	28	(109.646.940)	(222.227.600)
Penyisihan penghapusan asset produktif	27	(3.460.091.940)	(2.713.419.083)
Administrasi dan umum	29	(15.959.166.020)	(16.158.802.713)
Lainnya	30	(1.552.907.710)	(1.444.339.087)
Jumlah beban operasional		(21.081.812.610)	(20.538.788.483)
Laba operasional		6.907.521.144	6.218.045.232
Pendapatan non operasional	31	148.856.377	340.783.791
Beban non operasional	32	(81.947.500)	(34.001.590)
Laba sebelum pajak penghasilan		6.974.430.021	6.524.827.433
Taksiran pajak penghasilan	3m 18a	(1.625.857.743)	(1.480.175.798)
Laba bersih		**5.348.572.278**	**5.044.651.635**

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024

	Modal saham	Saldo Laba		Saldo laba – belum ditentukan tujuan	Jumlah ekuitas
		Cadangan Umum	Cadangan tujuan		
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo per 31 Desember 2022	54.000.000.000	14.044.367.937	12.558.550.816	4.333.458.957	84.936.377.710
Penggunaan laba :					
Dividen	–	–	–	(2.383.402.426)	(2.383.402.426)
Pembentukan cadangan	–	433.345.896	433.345.896	(866.691.792)	–
Penggunaan jasa produksi	–			(346.676.717)	(346.676.717)
Penggunaan dana kesejahteraan	–	–	–	(433.345.896)	(433.345.896)
Penggunaan dana social dan lingkungan	–	–	–	(130.003.769)	(130.003.769)
Tantiem	–	–	–	(173.338.357)	(173.338.357)
Laba bersih	–	–	–	5.044.651.635	5.044.651.635
Saldo per 31 Desember 2023	54.000.000.000	14.477.713.833	12.991.896.712	5.044.651.635	86.514.262.180
Penggunaan laba :					
Dividen	–	–	–	(2.774.558.400)	(2.774.558.400)
Pembentukan cadangan	–	504.465.164	504.465.164	(1.008.930.328)	
Penggunaan jasa produksi	–	–	–	(403.572.130)	(403.572.130)
Penggunaan dana kesejahteraan	–	–	–	(504.465.164)	(504.465.164)
Penggunaan dana sosial dan lingkungan	–	–	–	(151.339.549)	(151.339.549)
Tantiem	–	–	–	(201.786.065)	(201.786.065)
Laba bersih	–	–	–	5.348.572.278	5.348.572.278
Saldo per 31 Desember 2024	54.000.000.000	14.982.178.997	13.496.361.876	5.348.572.278	87.827.113.151

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024

	2024	2023
	Rp	Rp
Arus kas dari aktivitas operasi		
Laba bersih	5.348.572.278	5.044.651.635
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih tahun berjalan menjadi kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi :		
Penyusutan aset tetap	577.652.520	436.893.817
Penyisihan kerugian (pemulihan) untuk :		
Penyisihan penempatan pada bank lain	42.490.037	151.815.821
Pemulihan penempatan pada bank lain	(115.488.028)	(73.130.648)
Penyisihan kredit yang diberikan	3.417.601.903	2.556.537.262
Pemulihan kredit yang diberikan	(1.093.779.505)	(691.873.103)
Laba operasi sebelum perubahan dalam aset dan kewajiban operasi	8.177.049.205	7.424.894.784
Perubahan aset dan kewajiban operasi :		
Penurunan (kenaikan) pendapatan bunga akan diterima	(54.251.668)	23.115.044
Penurunan (kenaikan) kredit yang diberikan	(14.508.794.477)	10.057.197.895)
Kenaikan penempatan pada bank lain	(38.444.010.364)	(8.614.730.160)
Penurunan (kenaikan) aset lain-lain	1.035.839.865	(1.162.835.667)
Kenaikan biaya dibayar dimuka	(141.457.441)	(430.944.510)
Kenaikan agunan yang diambil alih	(589.986.664)	(293.843.700)
Penurunan (kenaikan) piutang asuransi	833.345.894	(278.972.994)
Kenaikan (penurunan) utang bunga	74.778.419	(23.121.730)
Kenaikan titipan	2.555.227.784	56.861.897
Kenaikan utang pajak	296.500.231	201.689.057
Kenaikan simpanan	13.773.110.135	2.595.065.640
Kenaikan (penurunan) simpanan dari bank lain	(3.200.000.000)	700.000.000
Kenaikan (penurunan) kewajiban lain-lain	(119.799.074)	31.823.144
Penurunan kewajiban imbalan kerja	(215.083.062)	(1.051.234.898)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan) untuk aktivitas operasi	(30.527.531.217)	9.234.963.802

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024

	2024	2023
	Rp	Rp
Arus kas dari aktivitas investasi		
Pembelian aset tetap dan inventaris	(1.597.327.820)	(469.799.175)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(1.597.327.820)	(469.799.175)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Kenaikan pinjaman yang diterima	5.349.338.094	6.469.001.587
Pembagian dividen	(2.774.558.400)	(2.383.402.426)
Cadangan	(1.008.930.328)	(866.691.792
Kenaikan cadangan	1.008.930.328	866.691.792
Pembayaran jasa produksi	(403.572.131)	(346.676.717)
Pembayaran dana kesejahteraan	(504.465.164)	(433.345.896)
Pembayaran tantiem	(201.786.065)	(173.338.357)
Tanggung jawab sosial dan lingkungan	(151.339.549)	(130.003.769)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	1.313.616.785	3.002.234.422
Kenaikan (penurunan) bersih arus kas	(30.811.242.252)	11.767.399.049
Kas dan setara kas pada awal tahun	43.348.080.958	31.580.681.909
Kas dan setara kas pada akhir tahun	12.536.838.706	43.348.080.958
Kas dan setara kas terdiri dari :		
Kas	1.106.438.700	1.187.968.500
Giro pada bank lain	11.430.400.006	42.160.112.458
Kas dan setara kas pada akhir tahun	12.536.838.706	43.348.080.958

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024

1. U M U M

Perumda BPR Bank Kota Bogor (untuk selanjutnya disebut BPR), didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Bogor Nomor 12 tahun 1985 tentang pembentukan Perusahaan Daerah BPR Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor. Setelah dilakukan peninjauan serta perubahan modal BPR mengalami dua kali perubahan. Pada tahun 1995 atas dasar Peraturan Daerah Tingkat II Bogor untuk pertama kalinya mengalami perubahan atas Modal Dasar BPR serta beberapa ketentuan, yang kemudian pada tahun 2004 atas dasar Peraturan Daerah Tingkat II Bogor Nomor 03 tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah BPR Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor, BPR kembali mengalami perubahan atas modal dasar serta beberapa ketentuannya. BPR telah mendapat izin usaha dari Direktorat Jendral Moneter Departemen Keuangan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam surat No. S.Ket-529/DJM/III.3/7/1975 tanggal 3 Juli 1975 berdasarkan pertimbangan Direksi Bank Indonesia No. 8/15 UPBP/PPTR, tanggal 23 Juni 1975.

Berdasarkan Salinan Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2 Jawa Barat Nomor KEP-66/KR.02/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Penggunaan izin usaha atas nama PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor menjadi izin Usaha Atas Nama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor. Kegiatan utama BPR adalah dalam bidang perbankan dengan usaha menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan, memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah, melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya, menempatkan dananya pada lembaga keuangan lainnya, membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan pelayanan kas keliling (kas mobil, *mobile phone*, kantor Bank Kota Bogor nonpermanen), *payment point*, dan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu Automated Teller Machine (Anjungan Tunai Mandiri)/ tidak menggunkan kartu (cardless) dan/atau kartu debit, serta menjalankan jenis usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memberikan pinjaman jangka pendek kepada pedagang kecil dan pengusaha di pasar-pasar dan tempat lain. BPR berkedudukan di jalan RE Martadinata No. 45, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Jumlah pegawai pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebanyak 63 dan 64 orang.

PERUMDA BPR BANK KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2024

1. **U M U M** (Lanjutan)

Susunan Dewan Pengawas dan Direksi BPR per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

		2 0 2 4	2 0 2 3
Dewan Pengawas :			
Ketua	:	----------	Bhima Irsi Faliandri
Anggota	:	Euis Risnawati, SE	Euis Risnawati, SE
Anggota	:	Dani Rahadian, S.T., M.M	Dani Rahadian, S.T., M.M
Direksi			
Direktur Utama	:	Tommy Indra Gunawan, S.E., M.M	Tommy Indra Gunawan, S.E., M.M
Direktur Operasional	:	Bhima Irsi Faliandri	----------
Direktur Kepatuhan	:	Anjas Asmara	Anjas Asmara

2. **PERNYATAAN KEPATUHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Direksi BPR menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2024 dengan informasi komparatif pendekatan angka koresponding untuk tahun 2023 telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan telah memenuhi semua persyaratannya.

3. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN**

a. **Penyajian Laporan Keuangan**

Perumda Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Bogor menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat dengan Surat Edaran Bank Indonesia : No.11/37/DKBU tanggal 31 Desember 2009.

Laporan Keuangan entitas disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) serta prinsip dan praktek akuntansi Bank Perkreditan Rakyat yang berlaku umum di Indonesia.

3. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN** (Lanjutan)

a. **Penyajian Laporan Keuangan** (Lanjutan)

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) ini mengatur tentang penyajian dan pengungkapan informasi keuangan. Penyajian laporan keuangan tahun berjalan telah di modifikasi sesuai dengan ketentuan standar tersebut.

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung yang menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari giro/tabungan pada bank lain.

b. **Transaksi Dengan Pihak-pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa**

Dalam usahanya, Bank melakukan transaksi-transaksi dengan beberapa pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sesuai dengan SAK ETAP, yang dianggap sebagai pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut :

i. Dua entitas yang memiliki satu direktur atau anggota personel manajemen kunci secara umum.
ii. Dua ventura karena mereka berbagi pengendalian bersama atas joint venture.
iii. Pihak-pihak berikut dalam pelaksanaan urusan normal dengan entitas (meskipun pihak-pihak tersebut dapat mempengaruhi kebebasan entitas atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan).
    1. Penyandang dana
    2. Serikat dagang
    3. Departemen dan instansi pemerintahan.

3. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN** (Lanjutan)

b. **Transaksi Dengan Pihak-pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa** (Lanjutan)

Hubungan istimewa yang berkenaan dengan beberapa akun dalam laporan keuangan yaitu kredit yang diberikan, tabungan, deposito berjangka, dan sewa. Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa diperlakukan sama dengan transaksi dengan pihak ketiga.

c. **Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima**

Pendapatan bunga yang akan diterima adalah pendapatan bunga dari kredit dengan kualitas lancar (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain.

d. **Giro Pada Bank Lain**

Transaksi giro pada bank lain diakui sebesar nilai nominal. Giro pada bank lain disajikan di neraca sebesar nilai bruto tagihan bank.

e. **Penempatan Pada Bank Lain**

Penempatan Pada Bank lain adalah penempatan/ tagihan atau simpanan milik BPR pada bank lain dengan maksud untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional, dalam rangka memperoleh penghasilan, dan sebagai *secondary reserve*.

1. Tabungan Pada Bank lain adalah rekening tabungan BPR pada bank umum dan BPR lain dalam mata uang rupiah dengan tujuan untuk menunjang aktivitas operasional.
2. Deposito Pada Bank lain adalah Penempatan dana BPR pada bank umum dan BPR lain dalam bentuk deposito berjangka dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan.
3. Sertifikat Deposito pada Bank umum adalah penempatan dana BPR dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan.

3. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN** (Lanjutan)

f. **Kredit Yang Diberikan**

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga. Kredit dinyatakan sebesar pokok kredit ditambah biaya transaksi dikurangi dengan penyisihan kredit dan provisi kredit.

Pemberian dan penyaluran

Kredit disajikan sebesar pokok kredit/ baki debet dikurangi provisi ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi. Biaya transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR. Bunga kredit adalah imbalan yang dibayarkan oleh debitur atas kredit yang diterimanya. Provisi kredit adalah biaya yang harus dibayarkan debitur pada saat kredit disetujui.

Kualitas aset produktif

Penggolongan kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif oleh BPR telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2024 Tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat.Kualitas Aset Produktif dalam bentuk kredit ditetapkan dalam 5 golongan, yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

BPR wajib menetapkan Kualitas Aset Produktif yang sama terhadap beberapa rekening aktiva produktif untuk 1 debitur pada BPR yang sama.

Dalam hal terdapat perbedaan kualitas Aset produktif terhadap beberapa rekening aktiva 1 debitur pada BPR yang sama, BPR wajib menetapkan kualitas masing-masing Aset Produktif mengikuti kualitas aktiva produktif yang paling rendah.

Penyisihan aset produktif

Aset produktif terdiri dari penanaman dana bank dalam bentuk penempatan pada bank lain dan kredit yang diberikan. Penyisihan aset dibentuk berdasarkan manajemen terhadap masing-masing kualitas aset produktif pada setiap tanggal minimum penyisihan kerugian sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penggolongan Aset Produktif (Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet) dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif.

3. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN** (Lanjutan)

f. **Kredit Yang Diberikan** (Lanjutan)

Penyisihan aset produktif (lanjutan)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk pembentukan penyisihan aset produktif, sekurang-kurangnya :

Klasifikasi		2024 Persentase
Lancar	:	0,5 %
Dalam Perhatian Khusus	:	3%
Kurang lancar	:	10 %
Diragukan	:	50 %
Macet	:	100 %

Persentase penyisihan penghapusan di atas diterapkan terhadap saldo aktiva produktif setelah nilai agunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan kecuali untuk aset produktif yang diklasifikasikan lancar yang diterapkan terhadap saldo aktiva produktif tersebut.

g. **Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)**

Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) merupakan aset BPR yang diperoleh sehubungan dengan penyelesaian kredit bermasalah. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dinilai dengan harga taksiran pada saat pengambilalihan, nilai yang disajikan cukup wajar.

h. **Aset Tetap**

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli aset tetap termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan serta estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi relokasi. Pajak-pajak yang dapat dikreditkan dan semua diskon dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Penyusutan dimulai pada saat aset tetap tersedia untuk digunakan dan berhenti ketika aset tetap dihapuskan atau dijual. Penyusutan tidak berhenti ketika aset tidak digunakan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi, kecuali memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai perolehan suatu aset berdasarkan SAK ETAP.

3. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN** (Lanjutan)

h. **Aset Tetap** (Lanjutan)

Aset tetap disajikan sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Tarif penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus *(straight line method)* berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan rincian sebagai berikut :

	Masa manfaat tahun	% per tahun
Bangunan	20	5
Inventaris kantor	4 dan 8	12,5 dan 25
Kendaraan	4 dan 8	12,5 dan 25

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya perpanjangan hak pemilikan tanah ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang periode hak atas tanah dan umur ekonomis tanah.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

i. **Biaya Dibayar Dimuka**

Biaya dibayar dimuka diamortisasi berdasarkan periode penggunaanya dengan metode garis lurus (*straight line method*).

j. **Beban Ditangguhkan**

Beban yang ditangguhkan diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

3. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN** (Lanjutan)

k. **Simpanan**

Giro, tabungan dan deposito dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada nasabah. Sertifikasi deposito dinyatakan sebesar nilai nominal.

l. **Imbalan Kerja**

BPR diwajibkan untuk membentuk penyisihan imbalan kerja sebagaimana diatur dalam SAK ETAP Bab 23 "Imbalan kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut Bank diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada pegawainya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi pegawai pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

m. **Pajak Penghasilan**

BPR mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Bank harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. BPR tidak mengakui pajak tangguhan.

n. **Kewajiban Segera**

Kewajiban segera dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari masyarakat maupun dari bank lain. Kewajiban segera disajikan sebesar jumlah kewajiban bank.

o. **Pengakuan Pendapatan dan Beban Bunga**

Pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual, kecuali pendapatan bunga atas kredit dan aktiva produktif lainnya yang diklasifikasikan sebagai kurang lancar, diragukan dan macet *(non-performing)*. Pendapatan bunga yang diakui tetapi belum tertagih harus dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan *non-performing*. Pendapatan bunga atas aktiva *non-performing* yang belum diterima dilaporkan sebagai tagihan kontijensi dalam akun administratif.

3. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN** (Lanjutan)

o. **Pengakuan Pendapatan dan Beban Bunga** (Lanjutan)

Pendapatan bunga atas kredit yang diklasifikasikan sebagai aktiva produktif lainnya yang diklasifikasikan *non performing* diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima. Seluruh penerimaan yang berhubungan dengan kredit *non-performing* yang diklasifikasikan diragukan dan macet diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit. Kelebihan penerimaan dari pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Pendapatan bunga yang ditangguhkan dari kredit yang direstrukturisasi diakui sebagai pendapatan secara proporsional pada saat diterima pembayaran angsuran pokok.

4. **K A S**

	2024 Rp	2023 Rp
Uang tunai	1.106.438.700	1.187.968.500

Kas diasuransikan pada PT Asuransi Jasa Indonesia terhadap risiko kebongkaran dengan nilai pertanggungan yang memadai, manajemen menyatakan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang akan terjadi.

5. **PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA**

	2024 Rp	2023 Rp
Deposito	240.968.151	117.440.030
Kredit	1.056.259.206	1.125.535.659
Jumlah	1.297.227.357	1.242.975.689

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

	2024 Rp	2023 Rp
Giro		
Pihak ketiga :		
PT Bank Permata, Tbk	5.715.284.642	8.533.951.737
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	2.066.260.170	8.513.035.528
PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk	1.329.129.910	10.958.129.648
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	856.483.539	4.261.063.359
PT KB Bukopin, Tbk	677.157.279	-
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	545.609.818	3.907.065.168
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	229.474.648	5.985.867.018
PT Bank Permata Syariah	11.000.000	1.000.000
Jumlah giro pada bank lain	11.430.400.006	42.160.112.458
Tabungan dan deposito :		
Tabungan		
Pihak ketiga :		
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	678.704.203	2.461.777.166
PT BPR Karyajatnika Sadaya	373.429	19.411.213
PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk	-	3.623.878.889
Jumlah tabungan	679.077.632	6.105.067.268

6. **PENEMPATAN PADA BANK LAIN** (Lanjutan)

	2024 Rp	2023 Rp
Tabungan dan deposito (lanjutan) :		
Deposito :		
Pihak ketiga :		
PT KB Bank Bukopin, Tbk	11.000.000.000	-
PT BPD Banten (Perseroda), Tbk	10.000.000.000	-
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	5.000.000.000	2.000.000.000
PT BPD Jawa Barat, Tbk	4.668.750.000	4.668.750.000
PT BPR Kerta Raharja	4.000.000.000	2.000.000.000
Perumda BPR Garut	4.000.000.000	2.000.000.000
PD BPR Artha Galunggung	3.000.000.000	2.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	2.800.000.000	1.500.000.000
PT BPR Bank Jombang (Perseroda)	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Nusumma Jatim	2.000.000.000	2.000.000.000
Perumda BPR Bank Sumedang	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Kerta Raharja Gemilang	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Hariarta Sedana	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Kredit Mandiri Indonesia	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Subang Gemi Nastiti (Perseroda)	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPRS Bandar Lampung	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Majatama	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Kutai Timur	2.000.000.000	1.000.000.000
PT BPR Hitamajaya Argamandiri	2.000.000.000	500.000.000
PT BPR Eka Bumi Artha	2.000.000.000	-
PT BPRS Jam Gadang (Perseroda)	2.000.000.000	-
Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun	2.000.000.000	-
Perumda BPR Purwarkarta	2.000.000.000	-
PT BPR Bank Sleman (Perseroda)	2.000.000.000	-
PT BPR Indra Candra	2.000.000.000	-
PT BPRS Botani Bina Rahmah	2.000.000.000	-
PT BPR Jwalita Trenggalek	2.000.000.000	-
PT BPR KAS Indonesia	2.000.000.000	-
PT BPR Berkah (Perseroda)	2.000.000.000	-
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	1.000.000.000	2.430.000.000
PT BPR Mustaqim Aceh (Perseroda)	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPR Siliwangi Tasikmalaya	1.000.000.000	-
PT BPR Pekanbaru Madani	500.000.000	500.000.000
PT BPR Bahteramas Konawe	500.000.000	500.000.000
PT BPR Dana Pensiun TASPEN	500.000.000	500.000.000
Jumlah dilanjutkan	92.968.750.000	40.598.750.000

6. **PENEMPATAN PADA BANK LAIN** (Lanjutan)

	2024 Rp	2023 Rp
Tabungan dan deposito (lanjutan) :		
Deposito : (Lanjutan)		
Pihak ketiga : (Lanjutan)		
Jumlah lanjutan :	92.968.750.000	40.598.750.000
PT BPR Kota Pasuruan	500.000.000	-
PT BPR Baturaja (Perseroda)	500.000.000	-
PT BPR Dana Mandiri Bogor	-	1.000.000.000
PT.BPR Karya Utama Jabar	-	1.000.000.000
PT BPRS Bogor Tegar Beriman	-	1.000.000.000
PT BPRS Almadinah	-	500.000.000
PT Bank Jtrust Indonesia, Tbk	-	6.000.000.000
Jumlah deposito	93.968.750.000	50.098.750.000
Jumlah penempatan pada bank lain	106.078.227.638	98.363.929.726
Dikurangi : Penyisihan kerugian penempatan pada bank lain	(181.224.602)	(254.222.593)
Jumlah	105.897.003.036	98.109.707.133

Tingkat suku bunga tabungan selama tahun 2024 dan 2023 berkisar antara 1,50% - 4,50% (2024). dan 1,50% - 4,50% (2023).

Tingkat suku bunga deposito pada tahun 2024 dan 2023 berkisar antara 2,25% - 7,25 (2024) dan 2,00% - 6,75 (2023).

Perubahan penyisihan kerugian penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut :

	2024 Rp	2023 Rp
Saldo awal tahun	254.222.593	175.537.420
Penyisihan kerugian tahun berjalan	42.490.037	151.815.821
Pemulihan kerugian tahun berjalan	(115.488.028)	(73.130.648)
Saldo akhir tahun	181.224.602	254.222.593

Berdasarkan hasil evaluasi manajemen BPR, kolektibilitas atas seluruh penempatan pada bank lain tanggal 31 Desember 2024 digolongkan lancar. Manajemen BPR menyatakan bahwa jumlah penyisihan kerugian penempatan pada bank lain cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya penempatan pada bank lain tersebut.

7. KREDIT YANG DIBERIKAN

a. Berdasarkan jenis kredit

	2024 Rp	2023 Rp
Konsumsi	151.622.072.273	132.394.739.274
Modal kerja	8.076.378.044	9.788.378.638
Investasi	2.879.887.100	4.426.311.808
Konsumsi plus	2.293.652.100	3.295.921.900
Jumlah	164.871.989.517	149.905.351.620
Provisi, Administrasi, Pend.bunga ditangguhkan	(4.187.073.520)	(3.639.082.844)
Cadangan restrukturisasi	(108.146.433)	(198.293.689
Jumlah kredit yang diberikan	160.576.769.564	146.067.975.087
Dikurangi :		
Penyisihan kerugian	(13.213.003.037)	(10.889.180.639)
Jumlah bersih	147.363.766.527	135.178.794.448

b. Berdasarkan kolektibilitas

	2024 Rp	2023 Rp
Lancar	146.095.554.968	131.251.897.064
Dalam Perhatian Khusus	1.336.314.663	3.876.753.716
Kurang lancar	754.402.119	818.928.800
Diragukan	4.399.355.858	2.307.856.882
Macet	12.286.361.909	11.649.915.158
Jumlah	164.871.989.517	149.905.351.620
Provisi, Administrasi, Pend.bunga ditangguhkan	(4.187.073.520)	(3.639.082.844)
Cadangan restrukturisasi	(108.146.433)	(198.293.689
Jumlah kredit yang diberikan	160.576.769.564	146.067.975.087
Dikurangi :		
Penyisihan kerugian	(13.213.003.037)	(10.889.180.639)
Jumlah bersih	147.363.766.527	135.178.794.448

7. **KREDIT YANG DIBERIKA4N** (Lanjutan)

c. **Berdasarkan sektor ekonomi**

	2024 Rp	2023 Rp
Pendidikan	2.666.665.600	2.983.331.300
Perikanan	-	7.500.000
Industri pengolahan	242.998.400	349.082.184
Kontruksi	-	224.583.300
Perdangan besar dan eceran	6.713.406.744	6.897.771.454
Transportasi, pergudangan, komunikasi	-	330.175.708
Jasa-jasa	1.333.194.400	2.741.830.200
Aktivitas rumah sakit	-	675.000.000
Kegiatan usaha lainnya	153.915.724.373	135.696.077.474
Jumlah	164.871.989.517	149.905.351.620
Provisi, Administrasi, Pend.bunga ditangguhkan	(4.187.073.520)	(3.639.082.844)
Cadangan restrukturisasi	(108.146.433)	(198.293.689
Jumlah kredit yang diberikan	160.576.769.564	146.067.975.087
Dikurangi :		
Penyisihan kerugian	(13.213.003.037)	(10.889.180.639)
Jumlah bersih	147.363.766.527	135.178.794.448

d. **Berdasarkan jangka waktu**

	2024 Rp	2023 Rp
Kurang dari 1 tahun	8.036.136.896	5.115.204.596
Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	2.926.138.305	4.908.697.594
Lebih dari 2 tahun	153.909.714.316	139.881.449.430
Jumlah	164.871.989.517	149.905.351.62
Provisi, Administrasi, Pend.bunga ditangguhkan	(4.187.073.520)	(3.639.082.844)
Cadangan restrukturisasi	(108.146.433)	(198.293.689)
Jumlah kredit yang diberikan	160.576.769.564	146.067.975.087
Dikurangi :		
Penyisihan kerugian	(13.213.003.037)	(10.889.180.639)
Jumlah bersih	147.363.766.527	135.178.794.448

7. **KREDIT YANG DIBERIKAN** (Lanjutan)

e. **Berdasarkan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga**

	2024 Rp	2023 Rp
Kredit :		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2.127.177.400	3.292.697.100
Pihak ketiga	162.744.812.117	146.612.654.520
Jumlah	164.871.989.517	149.905.351.620
Provisi, Administrasi, Pend.bunga ditangguhkan	(4.187.073.520)	(3.639.082.844)
Cadangan restrukturisasi	(108.146.433)	(198.293.689)
Jumlah kredit yang diberikan	160.576.769.564	146.067.975.087
Dikurangi :		
Penyisihan kerugian	(13.213.003.037)	(10.889.180.639)
Jumlah	147.363.766.527	135.178.794.448

f. **Kredit bermasalah**

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 rincian kredit bermasalah dan penyisihannya menurut sektor ekonomi dan jenis penggunaan kredit.

Sektor ekonomi :

	2024			
	Kurang lancar Rp	Diragukan Rp	Macet Rp	Jumlah Rp
Perdangan besar dan eceran	24.948.153	3.620.000	5.144.545.098	5.173.113.251
Pendidikan	-	2.666.665.600	-	2.666.665.600
Jasa-jasa	-	-	213.221.500	213.221.500
Kegiatan usaha lainnya	729.453.966	1.729.070.258	6.928.595.311	9.387.119.535
Jumlah	754.402.119	4.399.355.858	12.286.361.909	17.440.119.886
Provisi, Pend.bunga ditangguhkan				(198.917.763)
Cadangan restrukturisasi				(57.694.783)
Penyisihan kerugian				(12.460.583.875)
Jumlah bersih				4.722.923.465

7. **KREDIT YANG DIBERIKAN** (Lanjutan)

f. **Kredit bermasalah (**Lanjutan**)**

Sektor ekonomi : (Lanjutan)

	2023			
	Kurang lancar Rp	Diragukan Rp	Macet Rp	Jumlah Rp
Industri pengolahan	-	-	17.149.784	17.149.784
Kontruksi	-	-	224.583.300	224.583.300
Perdangan besar dan eceran	53.382.000	327.458.139	5.243.418.022	5.624.258.161
Transportasi, pergudangan, komunikasi	-	-	330.175.708	330.175.708
Jasa-jasa	-	-	213.221.500	213.221.500
Kegiatan usaha lainnya	765.546.800	1.980.398.743	5.621.366.844	8.367.312.387
Jumlah	818.928.800	2.307.856.882	11.649.915.158	14.776.700.840
Provisi, Pend.bunga ditangguhkan				(142.461.207)
Cadangan restrukturisasi				(64.021.680)
Penyisihan kerugian				(10.096.919.751)
Jumlah bersih				4.473.298.202

Jenis kredit :

	2024			
	Kurang lancar Rp	Diragukan Rp	Macet Rp	Jumlah Rp
Investasi	-	2.666.665.600	213.221.500	2.879.887.100
Modal kerja	24.948.153	3.620.000	5.144.545.098	5.173.113.251
Kredit konsumsi	595.413.966	1.641.870.258	6.720.072.511	8.957.356.735
Kredit konsumsi plus	134.040.000	87.200.000	208.522.800	429.762.800
Jumlah	754.402.119	4.399.355.858	12.286.361.909	17.440.119.886
Provisi, Pend.bunga ditangguhkan				(198.917.763)
Cadangan restrukturisasi				(57.694.783)
Penyisihan kerugian				(12.460.583.875)
Jumlah bersih				4.722.923.465

7. **KREDIT YANG DIBERIKAN** (Lanjutan)

f. **Kredit bermasalah (**Lanjutan**)**

Jenis kredit : (Lanjutan)

	2023			
	Kurang lancar Rp	Diragukan Rp	Macet Rp	Jumlah Rp
Investasi	–	–	767.980.508	767.980.508
Modal kerja	53.382.000	327.458.139	5.260.567.806	5.641.407.945
Kredit konsumsi	765.546.800	1.938.248.743	5.454.494.044	8.158.289.587
Kredit konsumsi plus	–	42.150.000	166.872.800	209.022.800
Jumlah	818.928.800	2.307.856.882	11.649.915.158	14.776.700.840
Provisi, Pend.bunga ditangguhkan				(142.461.207)
Cadangan restrukturisasi				(64.021.680)
Penyisihan kerugian				(10.096.919.751)
Jumlah bersih				4.473.298.202

Rasio *Non Performing Loan* (NPL) pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

	2024 %	2023 %
NPL Gross	10,58	9,86
NPL Net	3,02	3,12

g. **Penyisihan kerugian kredit yang diberikan**

Perubahan penyisihan kerugian kredit yang diberikan adalah sebagai berikut :

	2024 Rp	2023 Rp
Saldo awal tahun	10.889.180.639	9.024.516.480
Penyisihan kerugian selama tahun berjalan	3.417.601.903	2.556.537.262
Pemulihan selama tahun berjalan	(1.093.779.505)	(691.873.103)
Saldo akhir tahun	13.213.003.037	10.889.180.639

7. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

g. Penyisihan kerugian kredit yang diberikan

Penyisihan kerugian kredit dibentuk berdasarkan hasil penelaahan manajemen BPR terhadap kualitas masing-masing akun kredit yang diberikan pada akhir tahun. Manajemen BPR menyatakan bahwa jumlah penyisihan kerugian kredit cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya kredit tersebut.

Berikut adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan :

a. Tingkat suku bunga per tahun untuk kredit yang diberikan rata-rata sebesar 15% (2024) dan 15% (2023).
b. Pendapatan bunga kredit yang diberikan selama tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 25.487.655.198 dan Rp 26.444.251.482 (lihat Catatan 24).
c. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diperkenankan Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut :

	2024 Rp
Pihak Terkait	8.608.977.766
Pihak Tidak Terkait	17.217.955.531
Kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait	25.826.933.297

Pada tanggal 31 Desember 2024 tidak ada kredit yang melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

8. AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

	2024 Rp	2023 Rp
Kredit yang diberikan	883.830.364	293.843.700

9. ASET TETAP

	2024			
	Saldo awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo akhir Rp
Biaya perolehan :				
Tanah	2.444.700.000	-	-	2.444.700.000
Bangunan	1.856.228.289	-	-	1.856.228.289
Inventaris Golongan I	1.268.983.350	263.143.820	-	1.532.127.170
Inventaris Golongan II	553.929.388	64.334.000	-	618.263.388
Kendaraan	856.710.600	1.269.850.000	-	2.126.560.600
Jumlah	6.980.551.627	1.597.327.820	-	8.577.879.447
Akumulasi penyusutan :				
Bangunan	708.222.324	92.811.414	-	801.033.738
Inventaris Golongan I	818.163.458	206.194.747	-	1.024.358.205
Inventaris Golongan II	376.481.676	51.238.257	-	427.719.933
Kendaraan	452.823.458	227.408.102	-	680.231.560
Jumlah	2.355.690.916	577.652.520	-	2.933.343.436
Nilai buku	4.624.860.711			5.644.536.011

	2023			
	Saldo awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo akhir Rp
Biaya perolehan :				
Tanah	2.444.700.000	-	-	2.444.700.000
Bangunan	1.827.154.614	29.073.675	-	1.856.228.289
Inventaris Golongan I	862.322.350	406.661.000	-	1.268.983.350
Inventaris Golongan II	519.864.888	34.064.500	-	553.929.388
Kendaraan	1.323.157.000	-	466.446.400	856.710.600
Jumlah	6.977.198.852	469.799.175	466.446.400	6.980.551.627
Akumulasi penyusutan :				
Bangunan	615.653.190	92.569.134	-	708.222.324
Inventaris Golongan I	629.508.518	188.654.940	-	818.163.458
Inventaris Golongan II	327.900.764	48.580.912	-	376.481.676
Kendaraan	812.181.027	107.088.831	466.446.400	452.823.458
Jumlah	2.385.243.499	436.893.817	466.446.400	2.355.690.916
Nilai buku	4.591.955.353			4.624.860.711

9. **ASET TETAP** (Lanjutan)

Kendaraan diasuransikan kepada PT Asuransi Sinar Mas terhadap risiko kehilangan dan risiko lainnya dan bangunan diasuransikan kepada PT Asuransi Artarindo terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan yang memadai. Manajemen menyatakan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang akan terjadi.

Beban penyusutan aset tetap yang dibebankan pada beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp 577.652.520 untuk tahun 2024 dan Rp 436.893.817 untuk tahun 2023.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap aset tetap pada tanggal 31 Desember 2024, manajemen BPR menyatakan bahwa tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai, oleh karena itu BPR tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai aset tetap.

10. **ASET TIDAK BERWUJUD**

	2024 Rp	2023 Rp
Software	302.005.000	302.005.000
Akumulasi amortisasi	(302.005.000)	(302.005.000)
Jumlah	–	–

11. **BIAYA DIBAYAR DIMUKA**

	2024 Rp	2023 Rp
Sewa	315.699.809	433.391.401
Pemeliharaan	123.252.840	–
Asuransi	11.481.574	16.059.571
Lainnya	222.197.940	81.723.750
Jumlah	672.632.163	531.174.722

12. **ASET LAIN-LAIN**

	2024 Rp	2023 Rp
Cetakan dan alat tulis kantor	32.720.350	83.392.300
Klaim Asuransi - Bintang Jasa Selaras	–	495.606.887
Klaim Asuransi – Nasional Life	–	337.739.007
Lainnya	135.998.254	1.121.166.167
	168.718.604	2.037.904.361

13. UTANG BUNGA

	2024 Rp	2023 Rp
Bunga deposito yang masih harus dibayar	252.392.960	177.614.541

14. TITIPAN

	2024 Rp	2023 Rp
Titipan potongan tunjangan kinerja	2.216.226.430	-
Titipan nasabah	415.404.580	118.748.29
Lainnya	42.345.071	-
	2.673.976.081	118.748.297

15. SIMPANAN

	2024 Rp	2023 Rp
Tabungan		
Tabungan Prima	69.382.133.890	-
Tabungan Siswa	1.298.159.008	844.600.937
Tabungan Berjangka Prima	1.054.247.508	-
Tabungan Arisan	285.250.000	-
Tabungan Umum	-	24.154.316.026
Tabungan Umum Organisasi	-	12.975.774.284
Tabungan Berseri	-	23.097.921.140
Tabungan Tasmas 2	-	1.198.017.637
Tabungan Tasmas 1	-	48.420.247
Jumlah tabungan	72.019.790.406	62.319.050.271
Deposito berjangka		
Menurut jangka waktu :		
1 bulan	2.960.800.000	2.321.500.000
3 bulan	2.677.700.000	14.178.700.000
6 bulan	15.685.000.000	6.575.450.000
9 bulan	1.605.000.000	2.115.000.000
12 bulan	48.781.500.000	42.446.980.000
Jumlah deposito berjangka	71.710.000.000	67.637.630.000
Jumlah simpanan	143.729.790.406	129.956.680.271

15. **SIMPANAN** (Lanjutan)

Tingkat suku bunga tabungan rata-rata untuk tahun 2024 dan 2023 masing – masing sebesar 3,20% dan 3,72% per tahun. Beban bunga yang dibayarkan selama tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 1.989.309.963 dan Rp 1.809.512.839 (lihat Catatan 25).

Tingkat suku bunga deposito rata-rata untuk tahun 2024 dan 2023 masing – masing sebesar 6,00 (2024) dan 5,27 (2023). Beban bunga yang dibayarkan selama tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 3.971.684.460 dan Rp 3.664.136.985 (lihat Catatan 25).

Simpanan berdasarkan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga :

	2024 Rp	2023 Rp
Tabungan :		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	856.201.590	1.637.421.421
Pihak ketiga	71.163.588.816	60.681.628.850
Jumlah	72.019.790.406	62.319.050.271
Deposito berjangka :		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2.190.500.000	2.125.000.000
Pihak ketiga	69.519.500.000	65.512.630.000
Jumlah	71.710.000.000	67.637.630.000
Jumlah simpanan	143.729.790.406	129.956.680.271

16. **SIMPANAN DARI BANK LAIN**

	2024 Rp	2023 Rp
Perumda BPR Bank Kulon Progo	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Daya Lumbung Asia	-	1.000.000.000
PT BPR Asri Cikupa Karya	-	1.000.000.000
Perumda BPR Majalengka	-	1.000.000.000
PT BPR Surya Kencana	-	200.000.000
Jumlah	2.000.000.000	5.200.000.000

Simpanan dari bank lain merupakan simpanan dalam bentuk deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan, dengan perpanjangan otomatis. Tingkat suku bunga rata-rata deposito dari bank lain sebesar 5,50% (2024) dan 5,27% (2023) per tahun.

17. KEWAJIBAN LAIN_LAIN

	2024 Rp	2023 Rp
Cadangan dana pendidikan	22.910.895	152.937.884
Lainnya	10.227.915	-
Jumlah	33.138.810	152.937.884

18. PERPAJAKAN

a. Taksiran perhitungan pajak penghasilan

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perhitungan laba menurut laporan keuangan sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut :

	2024 Rp	2023 Rp
Laba sebelum pajak penghasilan	6.974.430.022	6.524.827.433
Perbedaan waktu	215.083.062	39.950.000
Perbedaan tetap :		
Beban yang tidak dapat dikurangkan :		
Jamuan tamu	18.960.139	8.788.388
Sumbangan	–	2.650.000
Tunjangan pajak pph 21	758.571.644	723.720.227
Beban non operasional - lainnya	–	31.351.590
Jumlah perbedaan tetap	777.531.783	766.510.205
Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final		
Sewa	(52.920.000)	(91.783.791)
	(52.920.000)	(91.783.791)
Laba fiskal	7.914.124.867	7.239.503.847
Taksiran pajak penghasilan badan	1.625.857.743	1.480.175.798

18. **PERPAJAKAN (**Lanjutan**)**

a. **Taksiran perhitungan pajak penghasilan** (Lanjutan)

Taksiran Perhitungan Pajak Penghasilan Badan tahun 2024 dihitung berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

b. **Utang pajak**

	2024 Rp	2023 Rp
Taksiran pajak penghasilan badan	1.625.857.743	1.480.175.798
Dikurangi : Pajak dibayar dimuka	1.439.223.288	1.216.132.469
Pajak Penghasilan pasal 29	186.634.455	264.043.329
Utang pajak lainnya :		
PPh pasal 21	130.502.656	75.019.615
PPh pasal 23	1.849.782	1.285.608
PPh pasal 23 bunga deposito	69.735.463	62.831.445
PPh pasal 23 bunga tabungan	27.987.258	26.558.990
PPh pasal 4 ayat (2)	–	28.108.909
PPh pasal 25	407.501.024	69.862.511
Jumlah	824.210.638	527.710.407

19. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA

Penghitungan kewajiban imbalan kerja mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Bab 23 tentang "Imbalan Kerja,"

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik tersebut di atas besarnya Liabilitas Imbalan Kerja, dihitung berdasarkan masa kerja, tingkat diskonto, dan ekspektasi tingkat kenaikan gaji pada tanggal pelaporan. Berikut ini adalah mutasi kewajiban imbalan kerja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 :

	2024 Rp	2023 Rp
Saldo awal tahun lalu	215.083.062	1.266.317.961
Penambahan	321.017.788	39.950.000
Pengurangan	(536.100.850)	(334.510.964
Penyesuaian saldo awal	-	(756.673.935
Saldo pada akhir tahun	-	215.083.062

Perhitungan kewajiban imbalan kerja BPR terakhir dihitung oleh aktuaris Independent Tubagus Syafrial & Amran Nangasan dengan nomor laporan: 1963/ETAP-TBA.AN/I-2023 tanggal 16 Januari 2023. Kewajiban imbalan kerja dihitung dengan menggunakan asumsi sebagai berikut :

Jumlah pegawai tetap	:	54
Tingkat diskonto	:	7,22%
Umur pensiun normal	:	56 tahun
Kenaikan salary per tahun	:	10%

BPR telah mengikutsertakan pegawainya pada program pensiun Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Jumlah iuran dan pengembangan keikutsertaan program pensiun pada DPLK Manulife Indonesia per 31 Desember 2024 sebesar Rp 3.092.228.134. Manajemen BPR berkeyakinan bahwa saldo imbalan kerja tersebut cukup untuk memenuhi imbalan minimum sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku pada tanggal pelaporan.

20. PINJAMAN YANG DITERIMA

	2024 Rp	2023 Rp
PT Bank KB Bukopin, Tbk		
Kredit Baki Debet	11.098.448.819	-
PT BPD Jabar Banten, Tbk :		
Kredit Baki Debet - pokok	3.000.000.000	3.000.000.000
PT Bank Perrmata, Tbk		
Kredit Baki Debet - pokok	448.754.100	5.000.000.000
Pihak ketiga bukan bank (lainnya)		
PT Sarana Multigriya Finansial		
Kredit Baki Debet	11.291.875.045	12.344.192.622
Jumlah	25.839.077.964	20.344.192.622
Dikurangi : Biaya provisi dan transaksi	(145.547.248)	-
Jumlah	25.693.530.716	20.344.192.622

PT Bank Jabar Banten, Tbk:

Berdasarkan addendum perjanjian kredit No. 003/BOG-CC/PK/IV/2023 tanggal 28 April 2023, BPR memperoleh fasilitas Pinjaman modal kerja dari PT Bank Jabar Banten Tbk, jumlah fasilitas kredit sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah), dengan tingkat suku bunga sebesar 0,85% diatas suku bunga deposito yang menjadi jaminan yaitu sebesar 4,50%. per tahun, jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan. Pola pengembalian yang berikan dari PT Bank Jabar Banten, Tbk adalah pola pengembalian sekaligus, sehingga BPR wajib melunasi bunga kredit dengan cara diangsur setiap bulan dan melunasi pokok fasilitas kredit secara sekaligus pada tanggal 28 April 2025.

PT Bank Permata, Tbk

Berdasarkan surat perubahan pertama perjanjian pemberian fasilitas perbankan Nomor KK/23/116111/AMD/SME tanggal 27 Juli 2023, BPR memperoleh fasilitas pinjaman rekening koran dari PT Bank Permata, Tbk sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah), dengan Tingkat suku bunga sebesar 0,85% di atas suku bunga rekening giro yang dijaminkan di bank per tahun. Jangka waktu 12 bulan (dua belas bulan) sampai dengan 5 Agustus 2024.

PT Bank KB Bukopin, Tbk:

Berdasarkan akta perjanjian kredit atau pinjaman nomor 09 tanggal 6 Juni 2024, BPR memperoleh fasilitas Pinjaman modal kerja dari PT Bank KB Bukopin, Tbk, dengan bentuk kredit *installment* dan sifak kredit *uncommited loan*. Jumlah plafond pinjaman sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), dengan tingkat suku bunga sebesar 8,75%/tahun, berlaku selama 2 (dua) tahun pertama, selanjutnya sesuai ALCO (*asset dan liability committee*. Jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal pencairan kredit pertama.

21. MODAL

Komposisi kepemilikan modal BPR per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Pemegang saham	Persentase kepemilikan %	Jumlah Rp
Pemerintah Kota Bogor	100	54.000.000.000

22. CADANGAN

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 900.1.13.2/Kep.91-Ekon/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor tahun 2023, BPR telah menambah cadangan umum sebesar Rp 504.465.164 dan cadangan tujuan sebesar Rp 504.465.164 sehingga saldo cadangan pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp 28.478.540.873.

23. DIVIDEN

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 900.1.13.2/Kep.91-Ekon/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor tahun 2023, penetapan pembagian deviden tahun 2023, BPR telah membagikan laba untuk pemerintah daerah yang berasal dari laba tahun 2023 sebesar 55% dari Laba bersih setelah dikurangi pajak atau sebesar Rp 2.774.558.400.

24. PENDAPATAN BUNGA

	2024 Rp	2023 Rp
Penempatan pada bank lain :		
Deposito berjangka	4.960.260.519	2.472.184.676
Giro	388.077.090	332.569.328
Tabungan	40.814.857	80.946.396
Jumlah	5.389.152.466	2.885.700.400
Kredit yang diberikan :		
Kredit Konsumsi	24.641.188.837	24.100.855.045
Kredit Modal Kerja	510.104.411	600.593.187
Kredit Investasi	-	1.380.180.400
Kredit Konsumsi Plus	336.361.950	362.622.850
Jumlah	25.487.655.198	26.444.251.482
Jumlah pendapatan bunga	30.876.807.664	29.329.951.882
Pendapatan provisi :		
Provisi kredit	2.344.328.501	2.495.771.960
Jumlah	33.221.136.165	31.825.723.842

25. BEBAN BUNGA

	2024 Rp	2023 Rp
Bunga bank lain :		
Bunga pinjaman dari bank lain	694.940.231	133.434.856
Bunga simpanan dari bank lain	226.484.879	291.702.484
Jumlah bunga bank lain	921.425.110	425.137.340
Bunga simpanan :		
Deposito berjangka	3.971.684.460	3.664.136.985
Tabungan	1.989.309.963	1.809.512.839
Jumlah simpanan	5.960.994.423	5.473.649.824
Bunga bukan bank		
Pinjaman pihak ketiga bukan bank	871.477.858	703.664.668
Provisi / Transaksi	98.554.196	16.028.750
Lainnya	266.835.572	256.814.495
Jumlah bunga bukan bank	1.236.867.626	976.507.913
Jumlah	8.119.287.159	6.875.295.077

26. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

	2024 Rp	2023 Rp
Pemulihan penyisihan penghapusan aktiva produktif	1.209.267.533	765.003.751
Administrasi tabungan	1.003.769.863	522.245.815
Administrasi kredit	371.803.000	183.799.000
Penerimaan kredit yang dihapusbuku	18.548.123	10.803.200
Pendapatan jasa transaksi	66.814.107	75.928.675
Pendapatan *fee*	199.127.032	225.236.073
Pinalty deposito	18.142.948	23.375.759
Pendapatan operasional lainnya	12.142	12.677
Jumlah	2.887.484.748	1.806.404.950

27. BEBAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF

	2024 Rp	2023 Rp
Penyisihan kerugian kredit yang diberikan	3.417.601.903	2.556.537.262
Penyisihan kerugian penempatan pada bank lain	42.490.037	151.815.821
Kerugian restruktirisasi kredit	-	5.066.000
Jumlah	3.460.091.940	2.713.419.083

28. BEBAN PEMASARAN

	2024 Rp	2023 Rp
Beban pemasaran	109.646.940	222.227.600

29. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2024 Rp	2023 Rp
Gaji dan tunjangan	11.132.581.429	11.621.869.391
Premi asuransi	1.156.263.897	1.161.098.752
Sewa	864.003.223	688.304.380
Penyusutan	577.652.520	436.893.817
Pemeliharaan dan perbaikan	498.799.046	283.298.663
Listrik, telepon, internet, pos, fax, materai, dan koran	453.022.746	312.035.094
Pendidikan dan pelatihan	385.000.000	638.135.000
Barang cetakan, stensil, fotocopy	276.233.290	331.537.700
Alat tulis dan kantor	185.839.775	149.298.222
Perjalanan dinas	124.339.588	126.426.341
Administrasi antar bank	121.479.312	79.817.089
Kebersihan dan keamanan kantor	63.035.575	21.200.000
Pajak	61.040.619	30.070.757
Profesional fee	58.850.000	28.541.500
Seragam dinas	1.025.000	121.022.007
Lainnya	–	129.254.000
Jumlah	15.959.166.020	16.158.802.713

30. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

	2024 Rp	2023 Rp
Promosi	141.391.455	348.717.500
Rapat, pertemuan dan kegiatan lainnya	330.729.220	296.352.931
Iuran OJK dan asosiasi	138.739.090	157.808.367
Jamuan	18.960.139	8.788.388
Denda dan saksi	1.306.135	464.000
Lainnya	921.781.671	632.207.901
	1.552.907.710	1.444.339.087

31. PENDAPATAN NON OPERASIONAL

	2024 Rp	2023 Rp
Agunan yang diambil alih (AYDA)	11.914.875	–
Laba penjualan aset tetap	–	249.000.000
Lainnya	136.941.502	91.783.791
Jumlah	148.856.377	340.783.791

32. BEBAN NON OPERASIONAL

	2024 Rp	2023 Rp
Iuran dan sumbangan	53.641.500	2.650.000
Lainnya	28.306.000	31.351.590
	81.947.500	34.001.590

33. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah perusahaan dan perorangan yang memiliki keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung atau tidak langsung.

Dalam kegiatan usaha normal periode 31 Desember 2024, BPR melakukan transaksi usaha dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa diantaranya yaitu :

a. Kredit yang diberikan sebesar Rp 2.127.177.400 (Lihat Catatan 7).
b. Simpanan deposito berjangka sebesar Rp 2.190.500.000 dan Tabungan sebesar Rp 856.201.590 (Lihat Catatan 15).

34. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

Berdasarkan Peraturan LPS No. 1 Tahun 2023 tentang Program Penjaminan Simpanan, simpanan pada Bank konvensional yang dijamin berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu

Nilai Simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo yang tercatat pada pembukuan Bank pada tanggal pencabutan izin usaha Bank. Saldo yang dijamin untuk setiap Nasabah Penyimpan pada satu Bank paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No. 1 Tahun 2023 tentang Program Penjaminan simpanan, LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada bulan Januari, Mei dan September. Dalam hal diperlukan, LPS dapat menetapkan tingkat bunga Penjaminan di luar waktu yang ditentukan. LPS menetapkan tingkat bunga yang wajar untuk simpanan di BPR periode 1 Oktober 2024 – 31 Januari 2025 adalah sebesar 6,75%.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, BPR adalah peserta dari program penjaminan tersebut. Beban premi penjaminan LPS yang dibayar selama tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 266.835.572 dan Rp 256.814.495.

35. RASIO KECUKUPAN MODAL

BPR diwajibkan untuk memenuhi persyaratan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau CAR (*Capital Adequacy Ratio*) sebesar 12%. *Capital Adequacy Ratio* Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar 48,13% dan 51,68%.

Tabel berikut ini menunjukkan modal dan rasio kecukupan modal (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

	2024 Rp	2023 Rp
I. ASET TERTIMBANG MENURUT RESIKO (ATMR)		
1. ASET NERACA		
1.1. Kas	-	-
1.2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	-	-
1.3. Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat liquid berupa SBI, surat	-	-
utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tabungan	-	-
dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan	-	-
berdasarkan perjanjian antara BPR dan nasabah disertai dengan surat	-	-
Kuasa pencairan, dan logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan	-	-
dan baki debet; dan	-	-
1.4. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu)	-	-
tahun sejak tanggal pengambilalihan.	-	-
1.5. Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan yang	-	-
disimpan atau dibawah pengawasan BPR.	-	-
1.6. Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito berjangka,		
tabungan, dan tagihan lainnya kepada bank lain	21.215.645.528	19.672.785.945
1.7. Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah		-
1.8. Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah		-
(BUMN/BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit.		-
1.9. Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko/		-
rumah kantor yang diikat oleh hak tanggungan pertama.	734.180.836	537.159.450
1.10. Kredit kepada BUMN/BUMD atau kredit yang dijamin oleh BUMN/		-
BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak		-
memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20%		-
(dua puluh persen) sebagaimana tersebut di atas.		-
1.11. Kredit kepada Pegawai/Pensiunan		
1.12. Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko		-
Yang memiliki sertifikat yang dikuasai oleh BPR dan didukung dengan		-
Surat kuasa menjual namun tidak diikat dengan hak tanggungan		-
pertama.	1.874.424.915	2.524.075.550
1.13. Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil	91.230.860	150.118.430
1.14. Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu		-
bermotor yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan		-
pengikatan secara fidusia sesuai peraturan perundang-undangan.		-
1.15. Tagihan atau kredit lainnya yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko		-
diatas.	142.264.992.432	128.261.882.289
1.16. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet.	1.705.013.771	2.646.073.880
1.17. Aset tetap dan inventaris (nilai buku) dan aset tidak berwujud	5.644.535.984	4.624.860.711
1.18. Agunan yang diambil alih (AYDA) yang belum		
melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambialihan	1.237.600.000	293.843.700
1.19. Aset lainnya selain tersebut diatas	2.138.578.124	3.812.054.772
Jumlah ATMR	**176.906.202.450**	**162.522.854.727**

35. RASIO KECUKUPAN MODAL (Lanjutan)

	2024 Rp	2023 Rp
I. MODAL		
1.1. Modal Inti Utama		
1.1.1. Modal disetor	54.000.000.000	54.000.000.000
1.1.2. Cadangan Tambahan Modal	–	–
1.1.2.1. Agio	–	–
1.1.2.2. Dana setoran modal	–	–
1.1.2.3. Modal sumbangan	–	–
1.1.2.4. Cadangan umum	14.982.178.998	14.477.713.834
1.1.2.5. Cadangan tujuan	13.496.361.875	12.991.896.711
1.1.2.6. Laba tahun-tahun lalu	–	–
1.1.2.7. Laba tahun berjalan setelah dikurangi kekurangan PPAP (50%)	2.674.286.139	2.522.325.818
1.1.2.8. Pajak tangguhan (*deferred tax*)	–	–
1.1.2.9. *Goodwill*	–	–
1.1.2.10. Disagio	–	–
1.1.2.11. AYDA yang telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai yang tercatat pada neraca BPR	–	–
Jumlah modal inti utama	85.152.827.012	83.991.936.363
1.2 Modal Inti Tambahan	–	–
1.3 Modal Inti Tambahan	–	–
2. Modal Pelengkap		
2.1. Komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu (paling tinggi sebesar 50% dari modal inti)	–	–
2.2. Surplus revaluasi aset tetap	–	–
2.3. Penyisihan penghapusan aktiva produktif umum (Max. 1,25% dari ATMR)	936.950.645	913.206.000
Jumlah modal pelengkap	936.950.645	913.206.000
Jumlah modal	86.089.777.657	84.905.142.363
II. Modal Minimum (12% dari ATMR)	21.228.744.294	19.502.742.567
III. Jumlah Kelebihan (Kekurangan) modal	64.861.033.363	65.370.578.124
IV. Rasio Modal (CAR)		
(Jumlah modal / ATMR) x 100%	48,66%	52,24%
Rasio Modal Inti = (Jumlah Modal Inti / ATMR) x 100%	48,13%	51,68%
V. MIAPB (Rasio Modal Inti Terhadap Aset Produktif Bermasalah Neto) = (Jumlah modal inti/ aset produktif bermasalah) x 100%	488,26%	565,48%

35. **RASIO KECUKUPAN MODAL** (Lanjutan)

		2024	2023
VI. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)			
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	: 10% x Jumlah modal	8.608.977.766	8.487.332.069
Pihak ketiga	: 20% x Jumlah modal	17.217.955.531	16.974.664.138
Kelompok pihak ketiga	: 30% x Jumlah modal	25.826.933.297	25.461.996.207

36. **INFORMASI LAINNYA**

		2024 %	2023 %
	Rasio		
I.	**Permodalan**		
	Rasio kecukupan modal	48,13	51,68
II.	**Aktiva Produktif**		
	Kualitas Aktiva Produktif (KAP)	5,89	5,55
	Non Performing Loan	3,02	3,12
	Pemenuhan PPAP	100	100
III.	**Rentabilitas**		
	Return On Assets (ROA)	2,82	2,84
	Return On Equity (ROE)	6,28	5,98
	Net Interest Margin (NIM)	10,05	11,32
	Beban Operasi terhadap pendapatan (BOPO)	80,87	81,51
IV.	**Likuiditas**		
	Loan Deposit Rasio (LDR)	114.71	68,41
	Cash Rasio	36,45	31,64

37. MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan risiko mengacu kepada kepentingan strategis BPR secara keseluruhan. Pengelolaan risiko juga bukan semata-mata pemantauan, pelaporan dan evaluasi risiko-risiko yang telah terjadi, namun juga mendeteksi dan mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang. Per 31 Desember 2024 Perumda BPR Bank Kota Bogor mengelola 6 jenis risiko dengan nilai Profil Risiko peringkat 1 (sangat rendah).

Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko yang disebabkan oleh kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya terhadap BPR. Risiko kredit dapat timbul dari aktivitas fungsional BPR yaitu perkreditan (penyediaan dana) serta *treasury* dan investasi.

Manajemen risiko atas kredit yang dijalankan oleh BPR antara lain dengan cara :

1. Pengawas memberikan persetujuan dan melakukan evaluasi kebijakan Manajemen Risiko Kredit.
2. Pengawas melakukan evaluasi pelaksanakaan kebijakan Manajemen risiko kredit dan memastikan tindak lanjut.
3. Direksi Menyusun, melaksanakan kebijakan Manajemen risiko kredit dan melakukan pengkinian secara berkala.
4. Direksi mengambil tindakan mitigasi Risiko Kredit dan melakukan komunikasi kepada seluruh jenjang organisasi
5. Memiliki kecukupan organisasi Fungsi Kredit dan Fungsi Manajemen Risiko Kredit.
6. Direksi menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam penerapan Manajemen Risiko Kredit.
7. Memiliki kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang Sangat Memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi,misi,skala usaha dan kompleksitas bisnis,serta kecukupan SDM
8. Memiliki, melaksanakan prosedur Manajemen Risiko Kredit dan penetapan limit Risiko Kredit yang ditetapkan oleh Direksi secara konsisten, serta melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit secara berkala
9. Memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko Kredit sesuai ketentuan
10. Melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit yang melekat pada kegiatan usaha BPR terkait Risiko Kredit
11. Memiliki SIMR yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko Kredit serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala
12. SKAI melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko Kredit, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan
13. Sistem pengendalian intern terhadap Risiko Kredit telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi

37. **MANAJEMEN RISIKO** (Lanjutan)

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah potensi timbulnya kerugian sebagai akibat dari kejadian-kejadian yang melibatkan manusia, proses, sistem dan kejadian-kejadian di luar BPR. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perumda BPR Bank Kota Bogor, kemungkinan kerugian yang dihadapi dari Risiko Operasional tergolong Rendah. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Tingkat KPMR Operasional Bank Kota Bogor adalah Sangat Memadai.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul ketika BPR tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Risiko kepatuhan, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi pada pengenaan denda, hukuman, atau rusaknya reputasi. BPR melakukan identifikasi dan pengelolaan risiko kepatuhan. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perumda BPR Bank Kota Bogor, kerugian yang dihadapi dari Risiko Kepatuhan tergolong sangat rendah. Kualitas penerapan anajemen Risiko Kepatuhan Perumda BPR Bank Kota Bogor adalah sangat memadai

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah potensi timbulnya kerugian akibat dari ketidakmampuan BPR dalam membayar penarikan oleh nasabah, mendanai pertumbuhan aktiva dan memenuhi kewajiban sesuai kontrak melalui akses tak terbatas untuk pendanaan pada tingkat suku bunga pasar yang layak pada umumnya. Risiko Likuiditas juga timbul dari situasi di mana BPR tidak dapat mencairkan atau menjual aset karena pasar tidak bisa memperdagangkan aset tersebut.

Risiko ini melekat pada aktivitas perkreditan, khususnya pada kemampuan BPR dalam memenuhi komitmen kredit dan aktivitas pendanaan. Likuiditas BPR mempunyai peran yang sangat penting karena apabila BPR gagal dalam mengelola likuditasnya, maka kepercayaan masyarakat akan turun. Atas dasar tersebut diperlukan strategi khusus untuk menghindari kegagalan penyediaan likiuditas tersebut.

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank Kota Bogor, kerugian yang dihadapi dari Risiko Likuiditas tergolong rendah

37. **MANAJEMEN RISIKO** (Lanjutan)

Risiko Likuiditas (Lanjutan)

Risiko Inheren:

1. Rasio aset likuid terhadap total aset berisiko Rendah karena berada dibawah 15%
2. Rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar berisiko Rendah karena berada dibawah 20%
3. Rasio kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank (LDR) berisiko Rendah karena LDR lebih tinggi dari 90% dan kredit berkualitas tidak baik tidak signifikan.
4. Rasio 25 deposan dan penabung terbesar terhadap total dana pihak ketiga berisiko Sedang karena komposisi 25 deposan dan penabung terbesar lebih dari 25% (yaitu 44,33%) dan sebagian besar merupakan nasabah lama.
5. Rasio pendanaan non inti terhadap total pendanaan berisiko Rendah karena Rasio pendanaan non inti lebih besar dari 10% (yaitu 25,55%) namun tidak signifikan terhadap total pendanaan, dan apabila dalam hal terdapat penarikan dana sewaktu- waktu Bank Kota Bogor masih dapat mengcover risiko likuiditas dari pengelolaan total pendanaan.
6. Penilaian kebutuhan pendanaan Bank Kota Bogor pada situasi normal maupun krisis, dan kemampuan Bank Kota Bogor untuk memenuhi kebutuhan pendanaan berisiko Rendah karena Bank Kota Bogor mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal.
7. Penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar Bank Kota Bogor memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan berisiko Sangat Rendah karena akses Bank Kota Bogor pada sumber pendanaan memadai karena memiliki 3 fasilitas pinjaman dan dukungan terhadap likuiditas telah terpenuhi oleh Kuasa Pemilik Modal melalui modal yang disetor sebesar 54 Miliar Rupiah berdasarkan pasal 7 Perda Nomor 9 tahun 2020 tentang Perumda BPR Bank Kota Bogor

Risiko Reputasi

Risko reputasi merupakan risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif mengenai BPR.

Risiko Inheren:

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank Kota Bogor, kerugian yang dihadapi dari Risiko Reputasi tergolong Sangat Rendah dengan karakteristik antara lain:

37. **MANAJEMEN RISIKO** (Lanjutan)

Risiko Reputasi (Lanjutan)

Risiko Inheren: (Lanjutan)

1. Kredibilitas Bank Kota Bogor dan pihak yang berasosiasi dengan Bank Kota Bogor berisiko Sangat Rendah karena tidak terdapat pemberitaan negatif mengenai Bank Kota Bogor termasuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas, dan Kuasa Pemilik Modal di media massa (cetak dan elektronik) dan media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.
2. Signifikansi dan materialitas dampak yang ditimbulkan akibat kejadian reputasi berisiko Sangat Rendah karena tidak terdapat kejadian reputasi.
3. Administrasi dan tindak lanjut pengaduan nasabah berisiko Rendah karena Pengaduan nasabah diadministrasikan dengan cukup tertib dan informatif dan sebagian besar pengaduan telah diselesaikan
4. Signifikansi dan materialitas pengaduan nasabah berisiko Sedang karena frekuensi pengaduan nasabah minimal dan cukup material.
5. Transparansi informasi keuangan berisiko Sangat Rendah karena Laporan dan informasi keuangan yang disampaikan Bank Kota Bogor kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan dengan Bank Kota Bogor lengkap, akurat, kini, dan utuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Transparansi produk dan layanan Bank Kota Bogor berisiko Sangat Rendah karena Produk dan layanan Bank Kota Bogor memiliki skema sederhana, serta tidak membutuhkan pemahaman khusus nasabah atau mitra bisnis Bank Kota Bogor, dan Bank Kota Bogor memberikan informasi terkait spesifikasi produk dan layanan Bank Kota Bogor kepada nasabah atau mitra bisnis Bank Kota Bogor secara jelas dan lengkap

Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah merupakan akibat ketidaktepatan BPR dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan BPR dalam mengantisipasi perubahan.

Risiko Inheren

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank Kota Bogor, kerugian yang dihadapi dari Risiko Stratejik tergolong Rendah :

1. Penetapan strategi bisnis berisiko Rendah karena Bank Kota Bogor memiliki strategi baru dalam bidang jasa layanan yaitu berupa ATM Cardless , walaupun sampai Semester II Tahun 2024 masih dalam proses pengajuan perizinan ke Bank Indonesia.
2. Pertimbangan faktor eksternal dan internal dalam menyusun rencana dan model bisnis berisiko Rendah karena dalam penyusunan strategi telah mempertimbangkan sebagian besar faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis Bank Kota Bogor antara lain terbukti dengan tercapainya target total aset, penghimpunan dana, laba dan permodalan pada Semester II Tahun 2024.

37. **MANAJEMEN RISIKO** (Lanjutan)

Risiko Stratejik (Lanjutan)

Risiko Inheren: (Lanjutan)

3. Keunggulan kompetitif dan ancaman dari kompetitor berisiko Sedang karena Bank Kota Bogor memiliki keunggulan kompetitif yang moderat dari sisi penghimpunan dana terbukti pertumbuhan penghimpunan DPK sebesar 9,38% namun terdapat ancaman dari kompetitor yang memengaruhi pertumbuhan kredit Bank Kota Bogor sebesar 9,98% di bawah pertumbuhan kredit nasional.
4. Perbandingan realisasi dan target indikator keuangan utama sesuai ketentuan rencana bisnis , khususnya untuk faktor permodalan, kualitas aset, kredit, likuiditas, penyaluran kredit kepada UMKM, dan rentabilitas berisiko Rendah karena Deviasi rendah dibanding target kuantitatif
5. Rekam jejak (track record) keberhasilan Bank Kota Bogor dalam menerapkan keputusan strategis terkait dengan faktor pengembangan produk/ jasa baru, perubahan sasaran bisnis, investasi strategis, rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, serta pencapaian target bisnis berisiko Rendah.

38. **PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME**

Dalam rangka penyempurnaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) bagi BPR sesuai dengan perkembangan produk serta pelayanan yang berbasis teknologi informasi, risiko pemanfaatan BPR dalam pencucian uang dan pendanaan teroris semakin tinggi maka Otoritas Jasa Keuangan membuat peraturan No. 8 tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sedikitnya mencakup :
a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
b. Kebijakan prosedur.
c. Pengendalian intern.
d. Sumber daya manusia dan pelatihan.

BPR Telah mempunyai kebijakan dan Prosedur pelaksanaan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

39. TAGIHAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI

	2024 Rp	2023 Rp
Aset komitmen :		
Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik	47.974.245.900	4.423.000.000
Aset kontijensi :		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	6.805.600.784	5.660.073.910
Aset produktif yang dihapusbukukan	1.806.401.341	1.820.101.464
Lan-lain yang bersifat administratif	1.162.691.008	1.167.659.008
Jumlah	57.748.939.033	13.070.834.382

40. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)

Pada tanggal 1 Januari 2025, BPR mulai menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Penerapan SAK EP ini menggantikan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebelumnya yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Sebagai bagian dari transisi ke SAK EP, BPR telah melakukan penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi yang relevan dan melakukan penilaian terhadap dampak perubahan tersebut terhadap laporan keuangan. Perubahan kebijakan akuntansi ini mencakup, antara lain, pengakuan pendapatan, pengukuran aset dan kewajiban, serta pengungkapan informasi keuangan.

Dampak Penerapan SAK EP:
BPR telah menilai bahwa penerapan SAK EP akan berdampak pada beberapa pos dalam laporan keuangan, antara lain:

- Pengakuan Pendapatan: Sesuai dengan ketentuan dalam SAK EP, pengakuan pendapatan untuk beberapa transaksi akan dilakukan berdasarkan pendekatan yang berbeda, yang mungkin mempengaruhi waktu pengakuan pendapatan pada periode sebelumnya.
- Pengukuran Aset dan Kewajiban: Beberapa aset dan kewajiban akan diukur dengan dasar yang berbeda, yang dapat mempengaruhi nilai tercatat dari aset tetap dan kewajiban jangka panjang.
- Pengungkapan Informasi: SAK EP mengharuskan pengungkapan yang lebih lengkap dibandingkan dengan SAK ETAP yang berlaku sebelumnya, yang dapat mempengaruhi jumlah dan jenis informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

BPR telah melakukan persiapan yang diperlukan untuk memastikan bahwa penerapan SAK EP dilakukan dengan memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta akan terus melakukan evaluasi terhadap dampak implementasi standar ini terhadap laporan keuangan entitas di masa mendatang.

41. TANGGAL PENYELESAIAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan per 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 30 Januari 2025.

Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor
Blok F Trade Center Lantai 3 Jalan Dewi Sartika Kota Bogor 16124
Telp (0251) 8330313 Fax (0251) 8396836
Email info@pasarpakuanjaya.co.id
www.pasarpakuanjaya.co.id

Nomor	:	900/KEU/297-PPJ	Bogor, 25 April 2025
Lampiran	:	1 (satu) Berkas	
Sifat	:	Penting	
Perihal	:	Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2024 (Audited)	Kepada Yth, **Kepala BKAD Kota Bogor** Di - Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan surat dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor nomor: 900/1324-Bid-PenKeu tanggal 21 April 2025 perihal Penyampaian Laporan Keuangan TA 2024 (Audited). Dengan ini kami sampaikan Laporan Keuangan Perumda Pasar Pakuan Jaya Tahun 2024 (Audited) sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR UTAMA

PEMERINTAH KOTA BOGOR
PERUMDA PASAR PAKUAN JAYA

JENAL ABIDIN
NUP. 2403.8208.001

Tembusan Kepada Yth:
1. Arsip

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR

LAPORAN KEUANGAN / *FINANCIAL STATEMENT*

31 DESEMBER 2024 / *DECEMBER 31, 2024*
DAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT/
AND FOR THE PERIOD THAN ENDED

DAN / *AND*

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN /
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR ENDED
AND INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR ENDED
AND INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Halaman/
Pages

Daftar Isi ***Table of Contents***

Surat Pernyataan Direksi		*Board of Director's Statement*
Laporan Posisi Keuangan ….....	1	.....*Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi .....……	2	……*Statement of Profit or Loss*
Laporan Perubahan Ekuitas	3	.....*Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas .....……..	4	….....*Statement of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan.....……	5 – 25	.....*Notes to the Financial Statements*

SURAT PERNYATAN DIREKSI

Directors' Statement Letter

Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor
Blok F Trade Center Lantai 3 Jalan Dewi Sartika Kota Bogor 16124
Telp (0251) 8330313 | Fax (0251) 8396836
Email info@pasarpakuanjaya.co.id
www.pasarpakuanjaya.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNGJAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

STATEMENT OF DIRECTORS ' RESPONSIBILITY TO FINANCIAL STATEMENTS

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

FOR THE PERIOD ENDED DECEMBER 31, 2024

Kami yang bertandatangan dibawah ini :
Nama / *Name* : Jenal Abidin, S.Pt., M.P
Alamat Kantor / *Office Address* : Blok F Trade Center, Jl. Dewi Sartika Lantai 3, Jl. Dewi Sartika, Cibogor, Bogor Tengah, Kota Bogor 16124

Nomor Telepon / *Telephone Number* : (0251) 8330313
Jabatan / *Tittle* : Direktur Utama / *President Director*

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik;
3. - Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
   - Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Declare that :

1. *Responsible for the preparation and presentation of consolidated financial statements of Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor ended December 31, 2024;*
2. *The Consolidated Financial Statements have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards for Non-Public Accountability Entities;*
3. - *All information that has been published in the consolidated Financial Statements are complete and correct;*
   - *The Consolidated Financial statements do not contain information or material facts are not true, and do not eliminate any information or material fact;*
4. *Responsible for internal control systems Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.*

This statement was made with actual.

Bogor, 7 Maret 2025 / *March 7, 2025*

Direktur Umum/ *General Director*	Direktur Utama/ *President Director*	Direktur Operasional/ *Operational Director*
Samsudin, S.Hut., M.Si	**Jenal Abidin, S.Pt., M.P**	**Dr. Abdul Haris Maraden, SE., MM**

PEMERINTAH PASAR BOGOR
SEPULUH RIBU RUPIAH 10000
METERAI TEMPEL
6CE01AMX068332167

LAPORAN KEUANGAN

Financial Statements

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023 (Disajikan Kembali/ *restatement* (catatan/*note 4*)	31 Desember 2023 / December 31, 2023 Audit	
ASET					***ASSETS***
Aset Lancar					***Current Assets***
Kas dan setara kas	2d, 5	2.836.268.840	6.505.509.279	16.805.509.279	*Cash and cash equivalent*
Deposito	2e, 6	9.400.000.000	10.300.000.000	-	*Deposits*
Piutang usaha					*Account receivables*
Pihak ketiga	2g, 7	7.827.964.005	6.794.456.437	7.777.638.455	*Third parties*
Piutang lain-lain					*Others receivables*
Pihak ketiga		-	-	6.794.456.437	*Third parties*
Pajak dibayar dimuka	2n, 9a	19.960.633	201.879.160	201.879.160	*Prepaid taxes*
Biaya dibayar dimuka	2h, 8	16.000.000	58.753.920	58.753.920	*Prepaid expenses*
Total Aset Lancar		**20.100.193.478**	**23.860.598.796**	**31.638.237.251**	***Total Current Assets***
Aset Tidak Lancar					***Non-Current Assts***
Aset tetap - bersih	2j, 10	339.784.635.465	343.278.117.860	346.881.981.555	*Fixed assets - net*
Aset tak berwujud - bersih	11	215.805.093	229.000.979	229.000.979	*Intangible assets - net*
Aset tetap tersedia untuk dijual	12	2.004.789.500	2.004.789.500	-	*Fixed assets available for sale*
Total Aset Lancar		**342.005.230.058**	**345.511.908.339**	**347.110.982.534**	***Total Current Assets***
TOTAL ASET		**362.105.423.536**	**369.372.507.135**	**378.749.219.785**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS DAN EKUITAS					***LIABILITIES AND EQUITY***
Liabilitas Lancar					***Current Liabilities***
Utang usaha					*Account payables*
Pihak ketiga	13	234.035.415	234.035.415	234.035.415	*Third parties*
Utang lainnya					*Others payable*
Pihak ketiga	14	1.020.815.401	945.182.489	2.449.133.020	*Third parties*
Pihak berelasi	2f, 14	250.000.000	210.849.531	-	*Related parties*
Biaya yang masih harus dibayar	15	362.190.686	370.642.687	370.642.687	*Accrual payables*
Titipan retribusi		-	7.156.800.000	7.156.800.000	*Entrusted retribution*
Utang pajak	2n, 9b	2.459.702.494	3.667.296.948	3.667.296.948	*Taxes payable*
Pendapatan diterima dimuka	16	106.394.121	604.667.659	604.667.659	*Unearned revenue*
Total Liabilitas Lancar		**4.433.138.117**	**13.189.474.729**	**14.482.575.729**	***Total Current Liabilities***
Liabilitas Jangka Panjang					***Long Term Liabilities***
Imbalan pasca kerja	2o, 17	9.669.996.185	9.498.618.851	9.498.618.851	*Employee benefit*
Total Liabilitas Jangka Panjang		**9.669.996.185**	**9.498.618.851**	**9.498.618.851**	***Total Long Term Liabilities***
Total Liabilitas		**14.103.134.302**	**22.688.093.580**	**23.981.194.580**	***Total Liabilities***
Ekuitas					***Equity***
Modal	1d, 18	503.111.384.240	503.111.384.240	503.111.384.240	*Capital*
Pengukuran kembali aset tetap	19	(70.269.710.000)	(70.269.710.000)	(70.269.710.000)	*Fixed asset remeasurements*
Cadangan umum	20	1.751.110.933	1.420.367.906	1.420.367.906	*General allowance*
Saldo rugi		(86.590.495.939)	(87.577.628.591)	(79.494.016.941)	*Retained earnings*
Total Ekuitas		**348.002.289.234**	**346.684.413.555**	**354.768.025.205**	***Total Equity***
Total Liabilitas dan Ekuitas		**362.105.423.536**	**369.372.507.135**	**378.749.219.785**	***Total Liabilities and Equity***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
LAPORAN LABA RUGI
Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
As of December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	Catatan/ *Notes*	2023	
Pendapatan	34.102.658.494	2m, 21	38.008.305.606	*Incomes*
Beban operasional	(32.371.746.448)	2m, 22	(36.461.376.988)	*Operating expenses*
Laba usaha	**1.730.912.046**		**1.546.928.618**	***Operation Profit***
Pendapatan (beban) lain-lain				***Other income (expenses)***
Pendapatan lain-lain	1.588.255.311	2m, 23	1.224.130.703	*Other income*
Beban lain-lain	(136.091.353)	2m, 24	(57.398.285)	*Other expenses*
Total Pendapatan Lain-Lain, bersih	**1.452.163.958**		**1.166.732.418**	***Total Other Income, net***
Laba Sebelum Pajak	**3.183.076.004**		**2.713.661.036**	***Profit Before Income Tax***
Pajak kini	(652.475.890)	2n, 9c	(508.707.517)	*Income tax*
Laba Bersih	**2.530.600.114**		**2.204.953.519**	***Net Profit***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For The Year Ended December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal disetor / *fully paid capital*	**Cadangan umum / *General Allowance***	**Pengukuran kembali aset tetap / *Fixed Asset Remeasurements***	**Saldo Laba / *Retained earnings***	**Jumlah Ekuitas / *Total equity***	
Saldo 31 Desember 2022	**503.111.384.240**	**1.155.127.442**	**70.269.710.000**	**(76.534.816.490)**	**498.001.405.192**	***Balance as of December 31, 2022***
Koreksi:						***Correction:***
Penghapusan piutang usaha	-	-	-	(7.777.638.455)	(7.777.638.455)	*Write-off of trade receivables*
Saldo 1 Januari 2023	**503.111.384.240**	**1.155.127.442**	**70.269.710.000**	**(84.312.454.945)**	**490.223.766.737**	***Balance as of January 1, 2023***
Koreksi	-	-	(140.539.420.000)	(5.470.127.165)	(146.009.547.165)	*Correction*
Cadangan umum	-	265.240.464	-	-	265.240.464	*General allowance*
Laba tahun berjalan	-	-	-	2.204.953.519	2.204.953.519	*Profit for the year*
Saldo 31 Desember 2023	**503.111.384.240**	**1.420.367.906**	**(70.269.710.000)**	**(87.577.628.591)**	**346.684.413.555**	***Balance as of December 31, 2023***
Pembagian laba:						***Profit sharing:***
Dividen	-	-	-	(1.212.724.435)	(1.212.724.435)	*Dividend*
Cadangan umum	-	330.743.027	-	(330.743.027)	-	*General allowance*
Laba tahun berjalan	-	-	-	2.530.600.114	2.530.600.114	*Profit for the year*
Saldo 31 Desember 2024	**503.111.384.240**	**1.751.110.933**	**(70.269.710.000)**	**(86.590.495.939)**	**348.002.289.234**	***Balance as of December 31, 2024***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
STATEMENT OF CASH FLOWS
For The Year Ended December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	Catatan/ *Notes*	2023	
Laba Bersih Tahun Berjalan	**2.530.600.114**		**2.204.953.519**	***Net Profit for The Year***
Penyesuaian untuk:				***Adjustment for:***
Saldo laba			(110.902.593)	*Retained earngins*
Penyusutan dan amortisasi	4.194.176.007		4.343.201.875	*Depreciation and amortization*
Laba Operasi Sebelum Perubahan Dalam Aktivitas Operasi	**6.724.776.121**		**6.437.252.801**	***Profit Operation Before Changing in Activity***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Kenaikan (Penurunan) untuk:				***Increase (Decrease) for:***
Piutang usaha	(1.033.507.568)		4.533.280.773	*Account receivables*
Piutang lain-lain	-		2.843.592.181	*Others account receivables*
Biaya dibayar dimuka	42.753.920		(42.753.920)	*Prepaid expense*
Pajak dibayar dimuka	181.918.527		85.484.635	*Prepaid taxes*
Utang pajak	(1.207.594.454)		(618.703.571)	*Taxes payable*
Biaya yang masih harus dibayar	(8.452.001)		20.550.310	*Accrual payables*
Titipan retribusi	(7.156.800.000)		(4.738.835.991)	*Entrusted retribution*
Utang lainnya	75.632.912		(2.509.673.014)	*Other payables*
Pendapatan diterima dimuka	(498.273.538)		(225.720.989)	*Unearned revenue*
Imbalan pasca kerja	171.377.334		1.884.732.543	*Employment benefit*
Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	**(2.708.168.747)**		**7.669.205.758**	***Net Cash Flows Used in Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Kenaikan (Penurunan) untuk:				***Increase (Decrease) for:***
Perolehan Aset Tetap	(597.497.726)	10	(5.731.068.282)	*At cost fixed asset*
Deposito	900.000.000		(10.300.000.000)	*Deposit*
Aset tak berwujud	(90.000.000)		(60.000.000)	*intangible assets*
Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	**212.502.274**		**(16.091.068.282)**	***Net Cash Flows Provided by Investing Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Kenaikan (Penurunan) untuk:				***Increase (Decrease) for:***
Utang pihak berelasi	39.150.469		210.849.531	*Related parties payable*
Dividen	(1.212.724.435)		(972.548.370)	*Dividend*
Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan	**(1.173.573.966)**		**(761.698.839)**	***Net Cash Flows Used in Financing Activities***
PENURUNAN BERSIH KAS DAN BANK	**(3.669.240.439)**		**(9.183.561.362)**	***NET DECREASE CASH IN BANK***
Kas dan bank awal tahun	6.505.509.279		25.989.070.641	*Cash and bank at beginning Of the year*
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	**2.836.268.840**	5	**16.805.509.278**	***CASH AND BANK AT END OF YEAR***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Notes to Financial Statements

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1 UMUM

1. a Latar Belakang

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor ("Perusahaan") yang sebelumnya bernama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor didirikan di Bogor pada tanggal 7 Juli 2009, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 4 tahun 2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor Tanggal 15 Oktober 2019.

Laporan Keuangan Perusahaan disajikan dalam mata uang Rupiah.

1. b Dewan Pengawas dan Dewan Direksi

Struktur organisasi Perusahaan dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Bogor No.27 tahun 2009 tanggal 2 November 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya kota Bogor dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Pengawas

Susunan dewan pengawas berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 900.1.13.2/Kep.329-Bag.Ekon/2024 dan No. 900.1.13.2/Kep.359-Bag.Ekon/2024 tentang Penetapan Susunan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Periode 2024-2028, sebagai berikut:

Ketua	Ir. H. Gatut Susanta, MM.	*Head of Commisioners*
Anggota	Agustian Syah, S.STP	*Member*
Anggota	Sapta Bela Alfaraby, SE	*Member*

Susunan Direksi berdasarkan pada Surat Keputusan Walikota Bogor No. 900.1.13.3/KEP.89-Bag.Ekon/2024 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Periode 2024-2029 adalah sebagai berikut:

Dewan Direksi

Direktur Utama	Jenal Abidin, S.It., M.P.	*Head of Commisioners*
Direktur Operasional	Dr. Abdul Haris Maraden, S.E., M.M	*Operational Director*
Direktur Umum	Samsudin, S.Hut., M.S,	*General Director*

1 GENERAL

1. a Background

The Company regional of public (Perumda) Pasar Pakuan Jaya in Bogor City ("The Company") previously known as Regional Company (PD) Pasar Pakuan Jaya Bogor City was established in Bogor on July 7, 2009, based on the Bogor City Regulation No. 4 of 2009 dated July 7, 2009 concerning Establishment of Pasar Pakuan Jaya Regional Company and Regulation of Bogor City No. 18 of 2019 concerning Establishment the Company regional of public (Perumda) Pasar Pakuan Jaya in Bogor City dated October 15, 2019.

The Financial Statements of Company is expressed in Rupiah.

1. b Board of Supervisor and Directors

The Company's organization structural was formed based on Bogor Mayor Regulation No. 27 pf 2009 dated November 2, 2009 concerning the Organization and Work Procedures of the Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor in the composition of the city as follows:

Board of Supervisor

The composition of the supervisory body based on the Decree of the Mayor of Bogor No. 900.1.13.2/Kep.329-Bag.Ekon/2024 and No. 900.1.13.2/Kep.359-Bag.Ekon/2024 concerning the Determination of the Composition of Members of the Supervisory Board of the Company 2024-2028 Period, as follows:

The composition of the Directors is based on Bogor Mayor Decree No. 900.1.13.3/KEP.89-Bag.Ekon/2024 concerning the Appointment of Directors of the Company, the 2024-2029 period is as follows:

Board of Directors

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1 UMUM (lanjutan)

1. b Dewan Pengawas dan Dewan Direksi (lanjutan)

Dalam pelaksanaan tugasnya Direksi dibantu oleh 6 (enam) bagian, 1 (satu) satuan pengawas intern, 2 (dua) staff ahli dan 9 (Sembilan) unit pasar yakni:

- Bagian Umum & Kepegawaian
- Bagian Hukum & Humas
- Bagian Keuangan
- Bagian Usaha Jasa
- Bagian Teknik Pemeliharaan & Pembangunan
- Bagian Keamanan,Ketertiban & Kebersihan
- Satuan Pengawas Intern
- Staff Ahli
- Unit Pasar

Jumlah pegawai dan Pengurus Perusahaan periode 31 Desember 2024 dan 2023 sebanyak 130 orang dan 133 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

1 GENERAL (continued)

1. b Board of Supervisor and Directors (continued)

In carrying out its duties the Board of Directors is assisted by 6 (six) division, 1 (one) unit, 2 (two) professionals, and 9 (nine) markets namely:

- *General & Staff Division*
- *Law & PR Division*
- *Finance Division*
- *Service Business Division*
- *Maintence & Development Division*
- *Safety, Cleanliness, and Order Division*
- *Internal Control Unit*
- *Professional*
- *Unit Markets*

Number of staff and management Company for the period 31 December 2024 and 2023 is 130 people and 133 people, with the following composition:

Status Kepegawaian	**2024**	**2023**	***Employment Status***
Pengurus	6	6	*Manager*
Pegawai Tetap	120	118	*Permanent Employee*
Calon Pegawai	0	5	*Prospective Employee*
Kontrak	4	4	*Contract*
Jumlah	**130**	**133**	***Total***

Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

The composition of employees based on their level of education is as follows:

Tingkat Pendidikan	**2024**	**2023**	***Education***
Sarjana (S1 dan S2)	72	73	*Bachelor's Degree*
Sarjana Muda (D III)	15	15	*Associate Degree*
SLTA	43	45	*Senior High School*
Jumlah	**130**	**133**	***Total***

1. c Tujuan Pendirian

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 18 tahun 2019 Pasal 5 maksud dan tujuan Perusahaan adalah:

Tujuan Perusahaan:
- Membangun dan mengembangkan pasar dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- Turut serta dalam pembangunan daerah, menunjang kebijakan serta program Pemerintah Daerah Kota Bogor di bidang ekonomi dan perdagangan serta membantu terciptanya ketahanan pangan dan perlindungan konsumen di Daerah Kota;
- Menyediakan sarana dan prasarana pasar yang aman, nayaman, bersih dan teratur;
- Mendorong perekonomian Daerah Kota;

1. c Objectives

Based on the Regional Regulation (Perda) of Bogor City Number 4 of 2009 Article 4 and Article 6 the objectives and business fields of Company are:

The objectives of establishment
- *Improve the market services and infrastructure that are comfortable, clean and orderly*
- *participate in developer regional, support policy and goverment of bogor city program in economics and trade and help create food security and protection consument in regional city*
- *provide facilities and infrastructur that safe, comfortable, clean and regular*
- *Drive the Regional Economy*

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1 UMUM (lanjutan)

1. c Tujuan Pendirian (lanjutan)

Tujuan Perusahaan (lanjutan):

- Menunjang pembangunan Daerah Kota;
- Meningkatkan profesionalitas dan efisiensi pengelolaan pasar; dan
- Meningkatkan pendapatan asli daerah

Bidang usaha Perusahaan:
- Perusahaan menyelenggerakan usaha pengelolaan dan penyewaan sarana dan prasarana pasar, seperti tempat berdagang, perparkiran, tempat bongkar muat, pengelolaan kebersihan. Mandi Cuci Kakus (MCK), serta usaha lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pasar.
- Jenis usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota atas usulan Direksi.

Pasar yang dikelola oleh Perusahaan:
a. Pasar Baru Bogor
b. Pasar Kebon Kembang
c. Pasar Merdeka
d. Pasar Sukasari
e. Pasar Gunung Batu
f. Pasar Jambu Dua
g. Pasar Padasuka
h. Plaza Bogor
i. Pasar Devris
j. Pasar Taman Kencana
k. Pasar Pamoyanan
l. Pasar Tanah Baru

1. d Modal Perusahaan

Modal dasar Perusahaan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2019 adalah:

1 Uang sebesar Rp45.000.000.000 (Empat puluh lima milyar rupiah) dan telah dipenuhi seluruhnya.
2 Tanah, bangunan serta peralatan dan mesin senilai Rp218.756.732.240 (Dua Ratus Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah.

   a. Tanah dan bangunan senilai Rp218.629.683.000 (Dua Ratus Delapan Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
   b. Peralatan dan mesin senilai Rp127.049.240 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).

1 GENERAL (continued)

1. c Objectives (continued)

The objectives of establishment (continued)
- *Support regional development*
- *Improve the professionalism and efficiency of market management*
- *Increase local revenue*

The Company's line of business:
- *Company are conducts business of managing and leasing market facilities and infrastructure, such as trading places, parking lots, loading and unloading places, cleaning management as well as other businesses related to market operations.*
- *Other types of business as referred to in paragraph (1) shall be regulated by the Mayor upon the proposal of the Board of Directors.*

The markets that are managed by Company's
a. Pasar Baru Bogor
b. Pasar Kebon Kembang
c. Pasar Merdeka
d. Pasar Sukasari
e. Pasar Gunung Batu
f. Pasar Jambu Dua
g. Pasar Padasuka
h. Plaza Bogor
i. Pasar Devris
j. Pasar Taman Kencana
k. Pasar Pamoyanan
l. Pasar Tanah Baru

1. d Company Capital

The authorized capital of the Company based on Bogor City Regulation Number 18 of 2019 is:
1 Money of IDR 45,000,000,000 (forty five billion rupiah) and has been fulfilled entirely.
2 Land, buildings and equipment and machinery valued at Rp 218,756,732,240 (Two Hundred Eighteen Billion Seven Hundred Fifty Six Million Seven Hundred Thirty Two Thousand Two Hundred Forty Rupiah).
   a. Land and buildings valued at Rp.218,629,683,000 (Two Hundred Eighteen Billion Six Hundred Twenty Nine Million Six Hundred Eighty Three Thousand Rupiah).
   b. Equipment and machinery valued at Rp 127,049,240 (One Hundred Twenty-Seven Million Forty-Nine Thousand Two Hundred Forty-Rupiah).

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2024 Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2024 And For The Year Ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1 UMUM (lanjutan)

1 GENERAL (continued)

1. d Modal Perusahaan (lanjutan)

1. d Company Capital (continued)

Rincian penyertaan modal dasar berupa uang:

1. Modal dasar disetor sampai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan tahun 2010-2016 sejumlah Rp40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah).
2. Modal Dasar yang disetor sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Details of equity participation in the form of money:

1. *Authorized capital is paid up to the Bogor City Regulation Number 7 of 2015 concerning Amendments to the Bogor City Regulation Number 8 of 2013 concerning Regional Capital Participation to Company in 2010-2016 amounting to Rp40,000,000,000 (forty billion rupiah).*
2. *The authorized capital to be paid up is IDR 5,000,000,000 (five billion rupiah).*

Rincian penyertaan modal berupa tanah, gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin:

Details of equity participation in the form of land, buildings and buildings as well as equipment and machinery:

	Luas/ *Large (m^2)*	**Nilai/ *Value***	
Pasar Gunung Batu			***Pasar Gunung Batu***
Tanah	2.495	3.261.960.000	*Land*
Gedung	2.778	1.998.700.000	*Building*
Peralatan & Mesin	-	23.059.000	*Equipment & Vechile*
Jumlah		**5.283.719.000**	***Total***
Pasar Sukasari			***Pasar Sukasari***
Tanah	5.450	21.342.200.000	*Land*
Gedung	4.702	3.025.180.000	*Building*
Peralatan & Mesin	-	19.323.330	*Equipment & Vechile*
Jumlah		**24.386.703.330**	***Total***
Pasar Taman Kencana			***Pasar Taman Kencana***
Tanah	104	368.698.000	*Land*
Gedung	104	88.800000	*Building*
Jumlah		**457.498.000**	***Total***
Pasar Kebon Kembang			***Pasar Kebon Kembang***
Tanah	9.665	24.713.405.000	*Land*
Gedung	15.560	19.793.000.000	*Building*
Peralatan & Mesin	-	28.328.330	*Equipment & Vechile*
Jumlah		**44.534.733.330**	***Total***
Pasar Padasuka			***Pasar Padasuka***
Tanah	2.168	3.154.440.000	*Land*
Gedung	1.282	738.400.000	*Building*
Peralatan & Mesin	-	426.000	*Equipment & Vechile*
Jumlah		**3.893.266.000**	***Total***
Pasar Devris			***Pasar Devris***
Tanah	400	906.800.000	*Land*
Gedung	160	47.100.000	*Building*
Jumlah		**953.900.000**	***Total***
Pasar Jambu Dua			***Pasar Jambu Dua***
Tanah	6.124	17.006.300.000	*Land*
Gedung	3.844	3.916.100.000	*Building*
Peralatan & Mesin	-	700.000	*Equipment & Vechile*
Jumlah		**20.923.100.000**	***Total***

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024
Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024
And For The Year Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1 UMUM (lanjutan)

1 GENERAL (continued)

1. d Modal Perusahaan (lanjutan)

1. d Company Capital (continued)

	Luas/ *Large (m^2)*	**Nilai/ *Value***	
Pasar Baru Bogor			***Pasar Baru Bogor***
Tanah	7.367	25.739.000.000	*Land*
Gedung	27.594	35.869.700.000	*Building*
Peralatan & Mesin	-	48.353.580	*Equipment & Vechile*
Jumlah		**61.657.053.580**	***Total***
Pasar Merdeka			***Pasar Merdeka***
Tanah	5.985	14.034.000.000	*Land*
Gedung	6.290	8.311.000.000	*Building*
Peralatan & Mesin	-	6.859.000	*Equipment & Vechile*
Jumlah		**22.351.859.000**	***Total***
Pasar Pamoyanan			***Pasar Pamoyanan***
Tanah	2.700	2.643.000.000	*Land*
Gedung	294	26.800.000	*Building*
Jumlah		**2.669.800.000**	***Total***
Pasar Tanah Baru			***Pasar Tanah Baru***
Tanah	2.404	3.109.000.000	*Land*
Gedung	695	23.600.000	*Building*
Jumlah		**3.132.600.000**	***Total***
Pasar Kebon Kembang Blok F			***Pasar Kebon Kembang Blok F***
Tanah	4.800	17.483.000.000	*Land*
Gedung	6.081	9.128.600.000	*Building*
Jumlah		**26.611.600.000**	***Total***
Pasar Kebon Kembang Blok G			***Pasar Kebon Kembang Blok G***
Tanah	480	1.854.000.000	*Land*
Gedung	384	46.900.000	*Building*
Jumlah		**1.900.900.000**	***Total***
Pasar Jambu Dua			***Pasar Jambu Dua***
Tanah	7.302	44.884.663.000	*Land*
Pasar Taman Kencana			***Pasar Taman Kencana***
Tanah	2.584	22.786.392.000	*Land*
Plaza Bogor			***Plaza Bogor***
Tanah	7.320	99.284.907.000	*Land*
Gedung	25.709	72.398.690.000	*Building*
Jumlah		**171.683.597.000**	***Total***
JUMLAH		**458.111.384.240**	***TOTAL***

1. e Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan, yang diwakili oleh Jenal Abidin, S.Pt, M.P Direktur Utama, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh manajemen Perusahaan pada tanggal 7 Maret 2025

1. e Completion of the Financial Statements

The management of the Company, represented by Jenal Abidin, S.Pt, M.P President Director, is responsible for the preparation and presentation of these financial statements, which were completed and authorized by the Company's management for issue on March 7, 2025.

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntanbilitas Publik

Berdasarkan persyaratan dan kriteria dalam Standar Akuntasi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Perusahaan memenuhi kriteria sebagai Perusahaan tanpa akuntabilitas publik. Oleh karena itu manajemen Perusahaan memutuskan untuk menerapkan SAK ETAP sebagai basis dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan efektif tahun buku 1 Januari 2012.

Apabila dibandingkan dengan persyaratan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku dan diterapkan oleh Perusahaan untuk tahun-tahun buku sebelumnya maka persyaratan dalam SAK ETAP lebih sederhana. Demikian juga apabila dibandingkan dengan perkembangan terkini SAK yang saat ini sedang dalam proses konverjensi dengan International Financial Reporting Standard (IFRS), maka persyaratan dalam SAK ETAP juga lebih sederhana.

Perusahaan memilih untuk menerapkan SAK ETAP, dengan pertimbangan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP masih mampu mencerminkan substansi ekonomi dari kegiatan operasi dan bisnis Perusahaan. Pertimbangan lainnya adalah biaya dan manfaat dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP lebih efisien bagi Perusahaan.

Meskipun persyaratan dalam SAK ETAP lebih sederhana dibandingkan dengan SAK yang diterapkan sebelumnya maupun perkembangan terkini SAK tersebut, namun Perusahaan tetap mengedepankan penyajian wajar dan pengungkapan secara penuh atas informasi keuangan yang relevan dan andal bagi pemakai sebagaimana disyaratkan oleh standar tersebut. Oleh karena itu, tujuan penyajian laporan keuangan bagi sebagian besar pemakai tetap terpenuhi.

b Pernyataan Kepatuhan terhadap SAK ETAP

Manajemen Perusahaan menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2024 dengan angka komparatif 2023 telah disajikan sesuai dengan SAK ETAP dan telah memenuhi semua persyaratannya.

2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a Application of Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability

Based on the requirements and criteria in the Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP), the Company meets the criteria as a Company without public accountability. Therefore, the Company's management decided to implement SAK ETAP as the basis for preparing and presenting the Company's financial reports effective for the financial year 1 January 2012.

When compared with statements under Financial Accounting Standards (SAK) which has been implemented by The Company in the previous years, statements under SAK ETAP is more modest. Even when compared to the current development of SAK which is in the middle of a convergence with International Financial Reporting Standard (IFRS), SAK ETAP is still deemed to be more modest with its regulations.

The Company decided to implement SAK ETAP, with considerations that the informations presented in the financial statements using SAK ETAP is still able to present the economic substances in its operational and business activities fairly. Other consideration includes SAK ETAP which is deemed to make less expenditures and more benefits in efficiency to The Company.

Despite the modesty of SAK ETAP compared with the previously implemented, SAK and its current development, The Company still puts fair and complete presentation of relevant financial information upfront, as required by the standards. Therefore, the objective of financial statements presentation for its users are fulfilled.

b Statement of obedience to SAK ETAP

Management of The Company stated that the financial statements of year 2024 with the comparative value of year 2023 are presented in accordance with SAK ETAP and has fulfilled all of its requirements.

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Perusahaan terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Perusahaan tidak menyusun laporan laba rugi dan saldo laba, sebagaimana yang di ijinkan oleh SAK ETAP, karena terdapat transaksi yang diakui langsung dalam perubahan ekuitas.

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis berkesinambungan usaha dan biaya historis. Laporan keuangan juga disusun berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas.

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas yang menunjukan prestasi terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan.

Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah, masa pembukuan adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

d Kas dan Bank

Kas dan bank mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

e Deposito

Deposito mencakup simpanan yang hanya bisa di cairkan pada saat jatuh tempo. Investasi ini bersifat jangka pendek dengan jangka waktu kurang dari atau sama dengan satu tahun.

f Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang tertentu sebagai transaksi hubungan istimewa sebagaimana diatur SAK ETAP Bab 28, "Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa". Semua transaksi-transaksi signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persyaratan dan kondisi yang sama atau berbeda apabila dilakukan dengan pihak ketiga telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c Basis of Completion of Financial Statement

The Company's financial statements consist of Statements of Financial Position, Income Statement, Statement of Changes in Equity, Statements of Cash Flows, and Notes to Financial Statements. The company does not prepare an income statement and retained earnings, as permitted by SAK ETAP, because there are transactions that are recognized directly in changes in equity.

The surrounding financial statements use the basis of going concern of business and historical costs. The financial statements are also made in accordance with the accrual basis, excluding the statement of cash flow which uses the cash basis.

The cash flow statement presents information on historical changes in the entity's cash and cash equivalents, which shows the separate achievements of changes that occurred during one period of operating, investing and financing activities. Investments are generally classified as cash equivalents only if they are due within three months or less from the date of acquisition.

The financial statements are presented in Rupiah, the bookkeeping period is 1 January to 31 December.

d Cash and Bank

Cash and bank include cash, deposits which can be withdrawn at any time and other short-term liquid investments with maturities of three months or less.

e Deposit

Deposits include deposits that can only be disbursed when due. This investment is short term with a period of less than or equal to one year.

f Transaction with Related Parties

The Company conducts transactions with certain parties as special relationship transactions as stipulated in SAK ETAP Chapter 28, "Disclosures of parties that have special relationships". All significant transactions with parties that have a special relationship with the same or different terms and conditions if done with third parties have been disclosed in the financial statements.

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g Piutang Usaha

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah netto setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan review individual masing-masing saldo piutang pada akhir tahun. Piutang usaha dibedakan menjadi piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan piutang pada pihak ketiga.

h Biaya Dibayar Di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi berdasarkan metode penggunaannya dengan metode garis lurus.

i Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang sudah di tangan, tetapi belum dibukukan. Biasanya terjadi pada akhir bulan atau akhir periode pembukuan antara tanggal 27 s/d 31 setiap bulannya.

j Aset Tetap dan Penyusutannya

Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehannya yaitu harga beli termasuk semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap untuk digunakan. Aset dibangun sendiri dicatat sebesar seluruh nilai beban/ peralatan yang digunakan, biaya pengerjaan, beban bunga bank, serta biaya umum yang timbul dalam masa pembangunan. Pengeluaran untuk memperoleh aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran selama masa manfaat aset tersebut melalui penyusutan. pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh tanah hak milik, termasuk tanah yang berstatus hak guna bangunan, hak guna dan hak pakai yang pertama kali tidak boleh disusutkan. Kecuali tanah, penyajian aset tetap didasarkan pada harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Pengelompokan aset dan penyusutannya dihitung dengan mengacu pada Keputusan Direksi PERUMDA Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor Nomor 900/Kep.09.1-PDPPJ/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Kebijakan Akuntansi aset untuk Pengeluaran Barang Modal, aset Tetap dan penyusutannya. Metode penyusutan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:

	Tarif/*Tarif*	
Bangunan:		***Building:***
Permanen	5%	*Pernmanent*
Tidak Permanen	10%	*Non-permanent*
Bukan Bangunan:		***Non-Building***
Kelompok I	25%	*Category I*
Kelompok II	12.5%	*Category II*

2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g Accounts Receivable

Accounts receivable are presented in net value after deduction from impairment of doubtful accounts. Impairments are valued with consideration of empirical judgment, business and industrial prospects, financial position with emphasis on cash flows, solvability, and managed collaterals. Accounts receivable are segmented under related and third parties.

h Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized based on its period using straight-line method.

i Accrued Income

Revenue that has been hand in hand, but has not yet been recorded. Usually occurs at the end of the month or the end of the accounting period between the 27th to the 31st of every month.

j Fixed Assets and Depreciation

Fixed assets are recorded at cost, which is the purchase price including all costs incurred until the asset is ready for use. Assets built by themselves are recorded at the total value of the expenses / equipment used, construction costs, bank interest expenses, and general costs incurred during the construction period. Expenditures to obtain tangible fixed assets that have a useful life of more than 1 (one) year must be charged as a cost to obtain, collect and maintain income by allocating expenses over the useful life of the asset through depreciation. expenses for acquiring land, including land with building rights, usufruct and usufructuary rights, must not be depreciated for the first time. Except for land, the presentation of fixed assets is based on the acquisition cost after accumulated depreciation. The grouping of assets and their depreciation is calculated by referring to the Decree of the Directors of PERUMDA of Pakuan Jaya Market in Bogor City Number 900 / Kep.09.1-PDPPJ / 2011 dated February 16, 2011 concerning the Accounting Policies on assets for the Expenditures of Capital Goods, Fixed Assets and their depreciation. Depreciation method uses the straigh line method (straight line method) based on the economic benefits of the relevant fixed assets, namely as follows:

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j Aset Tetap dan Penyusutannya (lanjutan)

Kapitalisasi Beban Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai untuk meningkatkan kapasitas, efisiensi dan / atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai aset yang bersangkutan. Setelah diperoleh, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap seperti biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).

Pengeluaran barang modal adalah pengeluaran untuk pembelian barang siap pakai atau dibangun lebih dulu atau pengeluaran pengedaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi. Barang -barang tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual melainkan untuk digunakan dalam kegiatan normal perusahaan dengan batasan jumlah harga.

Nilai Satuan Minimum Pengeluaran Barang Modal dan Kapitalisasi Aset Tetap meliputi:

Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan diatas 10% dari nilai perolehan gedung dan bangunan tersebut. Dikecualikan atas hal tersebut (tetap diakui sebagai beban atau tidak dikapitalisasi) adalah pengeluaran untuk gedung dan bangunan oleh Perusahaan, seperti biaya penataan, perbaikan, rehab dan sejenisnya.

Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:
1. Alat-alat besar yang sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
2. Alat angkutan yang sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
3. Alat bengkel, alat ukur, alat keamanan yang sama dengan atau lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
4. Alat kantor dan rumah tangga yang sama atau lebih dari Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
5. Alat studio dan komunikasi yang sama atau lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
6. Pengeluaran untuk persatuan aset tetap lainnya berupa buku-buku koleksi / referensi yang sama dengan atau lebih dari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j Fixed Assets and Depreciation (continued)

Expenses Capitalization Become Fixed Assets

Capitalization is the determination of the accounting value of all expenses to obtain fixed assets until they are ready to use to increase capacity, efficiency and / or extend their technical life in order to increase the value of the assets concerned. Once obtained, there are still costs that arise during the use of fixed assets such as maintenance costs, additions, replacements or repairs.

Capital expenditures are expenditures for the purchase of ready-made or pre-built goods or expenditures for new deductions and the addition of fixed assets from the results of development, reclassification, renovation and restoration. These items are not intended to be sold but rather to be used in normal company activities with a limited amount of price.

The Minimum Unit Value for Capital Expenditures and Capitalization of Fixed Assets includes:

Expenditures for buildings and buildings that are equal to or more than Rp 10,000,000 (ten million rupiah) and above 10% of the acquisition value of the buildings and buildings. Excluded for that matter (still recognized as an expense or not capitalized) are expenditures for buildings and buildings by Company, such as the costs of structuring, repairs, rehabilitation and the like.

Expenditures for per unit of equipment and machinery are as follows:
1. *Large equipment equal to or more than Rp. 1,000,000.00 (one million rupiah)*
2. *Transport means which are equal to or more than Rp. 1,000,000.00 (one million rupiah)*
3. *Workshop tools, measuring tools, security devices that are equal to or more than Rp. 500,000.00 (five hundred thousand rupiah)*
4. *Office and household appliances which are the same or more than Rp. 200,000.00 (two hundred thousand rupiah)*
5. *The same studio and communication equipment or more than Rp. 500,000.00 (five hundred thousand rupiah)*
6. *Expenditures for each unit of other fixed assets in the form of collection / reference books that are equal to or more than Rp 100,000.00 (one hundred thousand rupiah)*

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k Aset lain-Lain

Aset lain-lain meliputi biaya-biaya yang berhubungan dengan pendirian Perusahaan, pra operasi termasuk biaya-biaya yang memberi manfaat untuk jangka waktu lebih dari satu tahun seperti biaya Riset dan Pengembangan. Terhadap biaya-biaya tersebut dilakukan amortisasi dengan estimasi masa manfaat ditetapkan tiga tahun.

l Liabilitas/Utang

Utang dinyatakan dengan lengkap agar laporan keuangan dapat menggambarkan seluruh kewajiban Perusahaan yang terutang pada akhir tahun. Semua kewajiban / Hutang yang diketahui harus dicatat tanpa memperhatikan apakah jumlahnya sudah dapat ditentukan secara tepat atau tidak. Jika kewajiban yang telah terjadi belum dapat ditentukan secara pasti jumlahnya maka dapat dinilai dengan taksiran yang wajar.

m Pengakuan Pendapatan dan Beban

Seluruh pendapatan, baik pendapatan usaha maupun diluar usaha diakui pada saat timbulnya transaksi dan/atau pada saat prestasi dinikmati walaupun penerimaan uangnya terjadi kemudian atau pada saat penerimaan uang untuk transaksi tunai. Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

n Pajak Penghasilan

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui adanya pajak tangguhan.

o Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan mengakui kewajiban imbalan pasca kerja sebagaimana diatur dalam SAK ETAP bab 23 "imbalan kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuann Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Dalam ketentuan tersebut Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pasca kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 adalah imbalan pasti.

Keuntungan/kerugian aktuaria diakui langsung di laporan laba rugi tahun berjalan.

2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k Other Assets

Other assets include costs related to the Company's establishment, pre-operations including costs that provide benefits for more than one year, such as Research and Development costs. Amortization of these costs is carried out with an estimated useful life of three years.

k Liability/Payables

Liabilities are stated in full so that the financial statements can reflect all of the Company's outstanding liabilities at the end of the year. All known obligations / debts must be recorded regardless of whether the amount can be determined precisely or not. If the obligations that have occurred cannot be determined with certainty then the amount can be assessed with a reasonable estimate.

m Recognition of Revenue and Expense

All revenues, both operating income and non-business income are recognized when the transaction arises and / or when the achievement is enjoyed even if the receipt of the money occurs later or when the money is received for cash transactions. Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

n Income Tax

The company recognizes liability for all income tax for the current period and the prior unpaid period. If the amount paid for the current period and the previous period exceeds the amount due for the period, the company must recognize the excess as an asset. The company does not recognize deferred tax.

o Post-Employment Benefits

The company recognizes post-employment benefit obligations as stipulated in SAK ETAP chapter 23 "employee benefits". Recognition of these obligations is based on the provisions of Labor Law No. 13/2003. Under these provisions the Company is required to pay employee benefits to employees when they stop working in the case of resignation, normal retirement, death and permanent disability. The amount of post-employment benefits is mainly based on the length of service and compensation of employees at the time of the completion of the employment relationship. Basically, employee benefits are based on Labor Law No. 13/2003 is a definite reward.

Actuarial gains / losses are recognized immediately in the statement of income for the year.

3 PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam tahun pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha

Perusahaan mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Entias mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi yang spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan. Provisi yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan penurunan nilai piutang.

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer tempat Perusahaan beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi penjualan dan beban dari produk yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen Perusahaan, mata uang fungsional Perusahaan adalah Rupiah.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

3 USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Judgments

In the process of applying the Company's accounting policies, management has made the following decisions, which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements:

Allowance for impairment of trade receivables

The Company evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Company uses judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Company expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment of trade receivables.

Determination of Functional Currency

The Company's functional currency are currency from primary economic environment in which the Company operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of given product. Based on the Company's management assessment, the Company's functional currency is Rupiah.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

3 PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

3 USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Income Tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

4 PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Setelah penerbitan laporan keuangan tahun yang berakhir 31 Desember 2023, Perusahaan telah menyajikan kembali laporan keuangan sehubungan dengan adanya penghapusan piutang pedagang, penghapusan bangunan pasar jambu dua dan penghentian aset tetap bangunan plaza bogor serta melakukan reklasifikasi atas pengelompokkan deposito, dan piutang lain-lain yang sebelumnya tidak dilakukan dalam laporan keuangan grup yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

4 RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS

After the publication of the financial report for the year ending 31 December 2023, the Company has restated the financial report in connection with the write-off of traders' receivables, the write-off of the guava market building and the termination of the fixed assets of the Bogor Plaza building as well as reclassifying the grouping of deposits and other receivables which was not previously carried out in the group's financial report ending on 31 December 2023.

	2023		
	(Setelah penyesuaian/ *After adjustment*)	(Sebelum penyesuaian/ *Before adjustment*)	
Kas dan setara kas	6.505.509.279	16.805.509.279	*Cash and cash equivalent*
Deposito	10.300.000.000	-	*Deposits*
Piutang usaha pihak ketiga	6.794.456.437	7.777.638.455	*Account receivables third parties*
Piutang lain-lain pihak ketiga	-	6.794.456.437	*Others receivables third parties*
Aset tetap - bersih	343.278.117.860	346.881.981.555	*Fixed assets - net*
Aset tetap tersedia untuk dijual	2.004.789.500	-	*Fixed assets available for sale*
Utang lainnya pihak ketiga	945.182.489	2.449.133.020	*Other payables third parties*
Utang lainnya pihak berelasi	210.849.531	-	*Other payables related parties*
Saldo rugi	(87.577.628.591)	(79.494.016.941)	*Retained earnings*

5 KAS DAN BANK

Kas dan Bank terdiri dari:

5 CASH AND BANKS

Cash and Banks consist of

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	
Kas	234.426.965	485.238.888	*Cash on hand*
Bank:			***Banks:***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	774.678.741	1.393.097.936	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Perumda Bank Kota Bogor	703.190.117	959.984.579	*Perumda Bank Kota Bogor*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawabarat dan Banten, Tbk	261.833.272	1.807.265.992	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawabarat dan Banten, Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	232.609.777	308.383.406	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia tbk	214.801.877	572.880.786	*PT Bank Rakyat Indonesia tbk*
PT Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk	149.969.727	149.412.537	*PT Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah indonesia	130.795.713	394.611.963	*PT Bank Syariah indonesia*
PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk	72.540.747	373.933.091	*PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk*
PT Bank Mega Syariah	30.893.330	31.029.850	*PT Bank Mega Syariah*
PT Bank Mega, Tbk	27.745.054	27.726.501	*PT Bank Mega, Tbk*
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	1.953.520	1.943.750	*PT Bank Danamon Indonesia, Tbk*
PT Bank DKI	830.000	-	*PT Bank DKI*
Jumlah	**2.836.268.840**	**6.505.509.279**	***Total***

6 DEPOSITO / *DEPOSITS*

Deposito terdiri dari: / *Deposits consist of*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Perumda Bank Kota Bogor	9.400.000.000	10.300.000.000	*Perumda Bank Kota Bogor*
Jumlah	**9.400.000.000**	**10.300.000.000**	***Total***

Suku bunga deposito sebesar 5,75% dengan jangka waktu 6 bulan dan berakhir tanggal 29 April 2025.

The deposit interest rate is 5.75% with a term of 6 months and ends on April 29 2025.

7 PIUTANG USAHA / *ACCOUNT RECEIVABLES*

Piutang usaha terdiri dari: / *Account receivables consist of*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Pihak ketiga:			***Third parties:***
PT Fortunindo Artha Perkasa	3.481.699.749	2.843.592.181	*PT Fortunindo Artha Perkasa*
PT Bogor Artha Makmur	2.600.864.256	3.950.864.256	*PT Bogor Artha Makmur*
CV Purnabri	1.745.400.000	-	*CV Purnabri*
Jumlah	**7.827.964.005**	**6.794.456.437**	***Total***

8 BIAYA DIBAYAR DIMUKA / *PREPAID EXPENSES*

Biaya dibayar dimuka terdiri dari: / *Prepaid expenses consist of*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Dana pengembangan	16.000.000	16.000.000	*Development Fund*
Lain-lain	-	42.753.920	*Others*
Jumlah	**16.000.000**	**58.753.920**	***Total***

9 PERPAJAKAN / *8 TAXATION*

Terdiri dari: / *Consist of*

a. Pajak dibayar dimuka / *a. Prapaid tax*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Pajak Pertamban Nilai	18.715.497	201.879.160	*Value Added Tax*
Pajak penghasilan pasal 21	1.245.136	-	*Income tax article 21*
Jumlah	**19.960.633**	**201.879.160**	***Total***

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Denda	2.158.536.085	3.250.393.525	*Penalty*
Pajak penghasilan pasal 29	223.741.483	291.785.442	*Income tax article 29*
Pajak penghasilan pasal 25	42.440.629	15.589.984	*Income tax article 25*
Pajak parkir	30.877.273	606.000	*Parking tax*
Pajak penghasilan pasal 23	3.292.334	4.190.648	*Income tax article 23*
Pajak penghasilan pasal 4 (2)	814.690	37.667.096	*Income tax article 4 (2)*
Pajak penghasilan pasal 21	-	67.064.253	*Income tax article 21*
Jumlah	**2.459.702.494**	**3.667.296.948**	***Total***

9 PERPAJAKAN (lanjutan)

Terdiri dari:

c. Beban pajak

8 TAXATION (continued)

Consist of

c. Tax expense

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	
Pajak kini	652.475.890	508.707.517	*Current taxes*
Jumlah	**652.475.890**	**508.707.517**	***Total***

Rekonsiliasi laba sebelum taksiran pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi, dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Reconciliation between earnings befote estimated income taxes, as presented in the statement of profit or loss, with the taxed income for the years ended December 31, 2024 and 2023 is as follows:

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	
Laba sebelum pajak	3.183.076.004	2.713.661.036	*Profit before income tax*
Koreksi fiskal			***Correction fiscal:***
Beda tetap			***Permanent difference***
Pendapatan final	(1.040.679.350)	(4.134.069.515)	*Final incomes*
Tunjangan pajak	405.651.516	392.397.508	*Tax benefits*
Kesejahteraan pegawai	180.647.500	75.828.241	*Employee welfare*
Beban representasi	1.130.462.250	1.190.134.215	*Reperesentation expenses*
Beban kendaraan	165.447.846	170.324.887	*Vehicle expenses*
Beban unit bisnis	376.758.690	319.414.975	*Unit business expenses*
Beban umum lain-lain	18.871.897	87.936.312	*Other general expenses*
Beban promosi	56.051.100	1.053.625	*Promotion expenses*
Beban iklan	24.900.000	-	*Advertising expenses*
Beban pajak	109.383.882	34.359.406	*Taxes expense*
Pendapatan bunga	(500.444.965)	(673.945.583)	*Interest incomes*
Beban lain-lain	118.110.044	14.934.600	*Others expense*
Beda waktu			***Temporary difference***
Imbalan kerja	1.703.363.321	2.273.755.978	*Employee benefits expense*
Penghasilan kena pajak	**5.931.599.735**	**2.465.785.685**	***Taxable income***
Pembulatan	**5.931.599.000**	**2.465.785.000**	***Roundded***
Beban pajak penghasilan:			***Income tax expense:***
Tarif PPh pasal 31E			***Tariff Wht art 31E***
Kena fasilitas	87.750.185	33.765.183	*Hit the facility*
Tidak kena fasilitas	564.725.705	474.942.335	*Not subject facility*
Jumlah	**652.475.890**	**508.707.518**	***Total***
Kredit pajak:			***Tax credit:***
Pajak penghasilan pasal 25	428.734.407	212.671.675	*Whitholding tax art 25*
Pajak penghasilan pasal 23	-	4.250.000	*Whitholding tax art 25*
Pajak penghasilan pasal 29	**223.741.483**	**291.785.843**	***Whitholding Tax Art 29***

10 ASET TETAP / *10 FIXED ASSETS*

Terdiri dari: / *Consist of*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*					
	1 Januari 2024/ *Januari 1, 2024*	Penambahan/ *Additon*	Pengurang/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclasification	31 Desember 2024 December 31, 2024	
Harga perolehan: Perolehan:						***Acquisition cost:***
Tanah	302.571.765.000	-	-	-	302.571.765.000	*Land*
Bangunan	75.242.283.308	550.615.721	-	-	75.792.899.029	*Building*
Kendaraan	2.243.917.273	-	-	-	2.243.917.273	*Vehicle*
Mebeulair	638.423.691	5.799.000	-	-	644.222.691	*Furniture*
Peralatan	2.029.474.957	41.083.005	-	-	2.070.557.962	*Equipment*
Jumlah	**382.725.864.229**	**597.497.726**	**-**	**-**	**383.323.361.955**	***Total***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Bangunan	35.414.335.505	3.796.466.818	-	-	39.210.802.323	*Building*
Kendaraan	1.515.963.743	210.507.504	-	-	1.726.471.247	*Vehicle*
Mebeulair	630.690.259	5.930.054	-	-	636.620.313	*Furniture*
Peralatan	1.886.756.862	78.075.745	-	-	1.964.832.607	*Equipment*
Jumlah	**39.447.746.369**	**4.090.980.121**	**-**	**-**	**43.538.726.490**	***Total***
Pengukuran kembali aset tetap	-				-	*Fixed Asset Remeasurement*
Nilai Buku	**343.278.117.860**				**339.784.635.465**	***Book Value***

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*					
	1 Januari 2022/ *Januari 1, 2022*	Penambahan/ *Additon*	Pengurang/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclasification	31 Desember 2023 December 31, 2023	
Harga perolehan: Perolehan:						***Acquisition cost:***
Tanah	302.571.765.000	-	-	-	302.571.765.000	*Land*
Bangunan	145.864.815.836	5.692.257.472	3.916.100.000	(72.398.690.000)	75.242.283.308	*Building*
Kendaraan	2.243.917.273	-	-	-	2.243.917.273	*Vehicle*
Mebeulair	638.423.691	-	-	-	638.423.691	*Furniture*
Peralatan	1.990.664.146	38.810.811	-	-	2.029.474.957	*Equipment*
Jumlah	**453.309.585.946**	**5.731.068.283**	**3.916.100.000**	**(72.398.690.000)**	**382.725.864.229**	***Total***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Bangunan	33.968.004.895	3.887.546.915	2.317.025.805	(124.190.500)	35.414.335.505	*Building*
Kendaraan	1.305.456.230	210.507.513	-	-	1.515.963.743	*Vehicle*
Mebeulair	617.014.181	13.676.078	-	-	630.690.259	*Furniture*
Peralatan	1.782.618.825	104.138.037	-	-	1.886.756.862	*Equipment*
Jumlah	**37.673.094.131**	**4.215.868.543**	**2.317.025.805**	**(124.190.500)**	**39.447.746.369**	***Total***
Pengukuran kembali aset tetap	70.269.710.000	-	140.539.420.000	70.269.710.000	-	*Fixed Asset Remeasurement*
Nilai Buku	**485.906.201.815**				**343.278.117.860**	***Book Value***

Berdasarkan surat Wali Kota Bogor No. 640/459-BKAD tanggal 30 Januari 2023 tentang persetujuan penghapusan dan pembongkaran barang daerah yang dipisahkan berupa aset bangunan pasar baru bogor, plaza bogor, jambu dua dan pasar Merdeka. Manajemen telah melakukan penghapusan bangunan pasar jambu dua, dan menghentikan pengakuan aset tetap bangunan plaza Bogor karena saudah tidak digunakan dan pedagang juga tidak ada (catatan 12). Dan untuk pasar Merdeka dan pasar baru bogor masih digunakan dan belum di bongkar atau dihapuskan.

Based on the letter of the Mayor of Bogor No. 640/459-BKAD dated January 30, 2023 concerning the approval of the elimination and demolition of separated regional goods in the form of assets of the new Bogor market building, Bogor plaza, Jambu Dua and Merdeka market. Management has eliminated the Jambu Dua market building, and stopped recognizing the fixed assets of the Bogor plaza building because it is no longer used and there are no traders (note 12). And for the Merdeka market and the new Bogor market are still in use and have not been dismantled or deleted.

11 ASET TAK BERWUJUD / *11 INTANGIBLE ASSETS*

Terdiri dari: / *Consist of*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*					
	1 Januari 2024/ *Januari 1, 2024*	Penambahan/ *Additon*	Pengurang/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclasification	31 Desember 2024 December 31, 2024	
Harga perolehan: Perolehan:						***Acquisition cost:***
Perangkat lunak	1.290.072.309	90.000.000	-	-	1.380.072.309	*Software*
Jumlah	**1.290.072.309**	**90.000.000**	**-**	**-**	**1.380.072.309**	***Total***
Akumulasi amortisasi						***Accumulated Amortization***
Perangkat lunak	1.061.071.330	103.195.886	-	-	1.164.267.216	*Software*
Jumlah	**1.061.071.330**	**103.195.886**	**-**	**-**	**1.164.267.216**	***Total***
Nilai Buku	**229.000.979**				**215.805.093**	***Book Value***

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*					
	1 Januari 2023/ *Januari 1, 2023*	Penambahan/ *Additon*	Pengurang/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclasification	31 Desember 2024 December 31, 2024	
Harga perolehan: Perolehan:						***Acquisition cost:***
Perangkat lunak	1.230.072.309	60.000.000	-	-	1.290.072.309	*Software*
Jumlah	**1.230.072.309**	**60.000.000**	**-**	**-**	**1.290.072.309**	***Total***
Akumulasi amortisasi						***Accumulated Amortization***
Perangkat lunak	933.737.998	127.333.332	-	-	1.061.071.330	*Software*
Jumlah	**933.737.998**	**127.333.332**	**-**	**-**	**1.061.071.330**	***Total***
Nilai Buku	**296.334.311**				**229.000.979**	***Book Value***

12 ASET ERSEDIA UNTUK DIJUAL / *12 AVAILABLE FOR SALE*

Terdiri dari: / *Consist of*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	
Bangunan Plaza Bogor	72.398.690.000	72.398.690.000	*Plaza Bogor Building*
Akumulasi penyusutan	(124.190.500)	(124.190.500)	*Accumulated depreciation*
Penurunan nilai	(70.269.710.000)	(70.269.710.000)	*Impairment*
Jumlah	**2.004.789.500**	**2.004.789.500**	***Total***

13 UTANG USAHA / *13 ACCOUNT PAYABLE*

Terdiri dari: / *Consist of*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Pihak ketiga:			***Related parties:***
CV. Dharmawangsa	97.164.144	97.164.144	*CV. Dharmawangsa*
CV. Kinarya Teknika	45.000.001	45.000.001	*CV. Kinarya Teknika*
CV. Marga Jaya	21.154.546	21.154.546	*CV. Marga Jaya*
Intan Selaras Consultant	14.000.000	14.000.000	*Intan Selaras Consultant*
CV. Minora	12.600.000	12.600.000	*CV. Minora*
lain-lain (dibawah 10 juta)	44.116.724	44.116.724	*Others (below 10 Milion)*
Jumlah	**234.035.415**	**234.035.415**	***Total***

14 UTANG LAINNYA / *14 OTHERS PAYABLE*

Terdiri dari: / *Consist of*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Pihak ketiga:			***Third parties:***
Titipan	881.113.442	862.693.308	*Deposits*
Jamsostek	78.797.710	82.489.181	*Social security*
Koperasi	60.904.249	-	*Koperasi*
Jumlah	**1.020.815.401**	**945.182.489**	***Total***
Pihak berelasi:			***Related parties:***
Pemerintah kota Bogor	250.000.000	210.849.531	*Bogor city giverment*
Jumlah	**1.270.815.401**	**1.156.032.020**	***Total***

15 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *15 ACCRUED EXPENSES*

Terdiri dari: / *Consist of*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Listrik	229.707.889	262.580.734	*Electricity*
Air	24.874.700	19.789.200	*Water*
Telepon	6.858.097	7.522.753	*Telephone*
Lain-lain	100.750.000	80.750.000	*Others*
Jumlah	**362.190.686**	**370.642.687**	***Total***

16 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA / *16 UNEARNED REVENUE*

Pendapatan diterima dimuka pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp106.394.121 dan Rp604.667.659

Unearned revenue in 2024 and 2023 amounted to Rp106,394,121 and Rp604,667,659, respectively.

17 IMBALAN PASCA KERJA / *17 EMPLOYEE BENEFIT*

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No.13/2003 tentang ketenagakerjaan, Perusahaan wajib memberikan imbalan pasca-kerja kepada karyawannya pada saat pemutusan hubungan kerja atau pada saat karyawan pensiun. Imbalan kerja ini diberikan berdasarkan masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja atau pensiun.

In accordance with the Law of the Republic of Indonesia No.13 / 2003 concerning employment, the Company is required to provide post-employment benefits to its employees at the time of termination of employment or when employees retire. Employee benefits are based on length of service and employee compensation at the time of termination of employment or retirement.

Perhitungan atas utang imbalan pasca kerja per 31 Desember 2024 dan 2023 dilakukan oleh PT. Padma Radya Aktuaria sebagai aktuaris independen dengan asumsi utama sebagai berikut:

The calculation of employee benefits debts per December 31, 2024 and 2023 by PT Padma Radya Aktuaria as of the independent actuarial with principle assumption consists of:

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	
Tingkat diskonto	7%	7,25%	*Discount Rate*
Tingkat kenaikan gaji	5%	6%	*Yearly Salaries Escalation Rate*
Tabel mortalitas	100% TMI3	100% TMI3	*Mortality Table*
Tingkat catat	5% TMI3	5% TMI3	*Disabled Rate*
Tingkat pengunduran diri	3% per tahun sampai usia 35 tahun kemudian menurun secara linier sampai 0% di usia 56	3% per tahun sampai usia 35 tahun kemudian menurun secara linier sampai 0% di usia 56	*Resigned Rate*
Tingkat ekspetasi imbal hasil aset	N/A	N/A	*Early retirement age*
Tkt. pengembalian pensiun normal	100%	100%	*The proportion of taking a normal*
Tingkat PHK Lainnya	Nil	Nil	*Others Level of Layoffs*
Usia pensiun normal	57	57	*Normal Pension Years Old*

Saldo Imbalan Pasca Kerja per 31 Desember 2024 dan 2023, terdiri dari:

The Balance of Employee Benefits as of December 31, 2024 and 2023 consist of:

Rekonsiliasi Saldo Awal dan Saldo Akhir dari Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti (NKKIP)

Reconciliation of Initial Balance and Final Balance of the Present Value of a Defined Benefit Obligation (NKKIP)

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti awal periode	9.498.618.851	7.613.886.308	*The Present Value of the Post-Employment Benefit*
Biaya Jasa Kini	1.375.440.095	1.385.201.484	*Current service cost*
Biaya Bunga	442.275.322	445.780.321	*Interest cost*
Biaya Jasa Lalu	358.811.907	152.361.436	*Past service costs*
Pembayaran Manfaat	(1.531.985.987)	(389.023.433)	*Payment of benefits*
Keuntungan(Rugi) Aktuarial	(473.164.003)	290.412.735	*Profit (Loss) Actuarial*
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti Akhir Periode	**9.669.996.185**	**9.498.618.851**	***Present Value of Defined Benefit Obligation at Period End***

17 IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan) / *17 EMPLOYEE BENEFIT (continued)*

Rekonsiliasi Beban yang diakui di Laporan Laba/Rugi

Reconciliation of expenses recognized in the Profit/Loss Statement.

Beban bersih yang diakui di Laporan Laba/Rugi

Recognized net expense in the profit(loss)

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	
Biaya Jasa Kini	1.375.440.095	1.385.201.484	*Current service cost*
Biaya Bunga	442.275.322	445.780.321	*Interest cost*
Biaya Jasa Lalu	358.811.907	152.361.436	*Past service costs*
Keuntungan(Rugi) Aktuarial	(473.164.003)	290.412.735	*Profit (Loss) Actuarial*
Jumlah Beban Imbalan Pasca Kerja	**1.703.363.321**	**2.273.755.976**	***Total Post-Employee Benefits***

18 MODAL / *18 CAPITAL*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor No.18 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pakuan Jaya Kota Bogor. Modal perusahaan terdiri atas:

Based on the Bogor City Regulation No.18 of 2019 concerning the inclusion of Regional Capital To the Bogor City Pakuan Jaya Regional Corporation. The company's capital consists of:

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	
Aset (catatan 1d)	458.111.384.240	458.111.384.240	*Assets (note 1d)*
Uang	45.000.000.000	45.000.000.000	*Money*
Jumlah	**503.111.384.240**	**503.111.384.240**	***Total***

19 PENGUKURAN KEMBALI ASET TETAP / *19 FIXED ASSET REMEASUREMENTS*

Saldo Pengukuran Kembali Aset Tetap menurut PUPR (640/2545-PUPR-PRB) pada tahun 2024 dan 2022 masing-masing sebesar Rp70.269.710.000 dan Rp 70.269.710.000

The balance fixed asset remeasurements according to PUPR (640/2545-PUPR-PRB) in 2023 and 2022 is Rp70.269.710.000 dan Rp70.269.710.000

20 CADANGAN UMUM / *20 GENERAL RESERVES*

Cadangan umum per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 merupakan penggunaan laba tahun sebelumnya sesuai dengan Peraturan Daerah No.4 tahun 2009 pasal 43 yaitu sebesar masing-masing 10%

General reserves as of December 31, 2024 and December 31, 2023 are the use of previous year's profits in accordance with Regional Regulation No. 4 of 2009, Article 43, which is 10% each.

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	
Cadangan umum	1.751.110.933	1.420.367.906	*General reserves*
Jumlah	**1.751.110.933**	**1.420.367.906**	***Total***

21 PENDAPATAN / *21 RVENUE*

Terdiri dari: / *Consist of:*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Kontribusi pihak ketiga	15.895.999.187	11.438.736.083	*Third party contribution*
Pengelolaan pasar	7.497.916.644	13.261.941.020	*Market management*
Parkir	5.666.532.362	5.623.819.834	*Parking*
Perijinan	1.264.002.382	476.393.846	*Licensing*
Sewa	1.218.946.944	3.686.069.258	*Rent*
Listrik	1.180.076.442	1.098.109.270	*Electricity*
Pengelolaan MCK	626.563.649	577.035.956	*MCK management*
Unit bisnis	258.271.580	-	*Business unit*
Sewa ruang	237.433.027	734.727.001	*Room rent*
Bongkar muat	203.954.864	1.075.718.021	*Unloading & Loading*
Kebersihan dan ketertiban	50.261.413	22.005.319	*Cleanliness*
Pengelolaan air	2.700.000	13.749.998	*Water management*
Jumlah	**34.102.658.494**	**38.008.305.606**	***Total***

22 BEBAN OPERASIONAL / *22 OPERATING EXPENSES*

Terdiri dari: / *Consist of:*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Beban pegawai	15.191.004.910	15.075.864.329	*Employee expeses*
Beban penyusutan	4.194.176.007	4.343.201.875	*Depreciation expenses*
Beban umum	3.899.420.132	4.278.520.617	*General expenses*
Beban kantor	1.878.700.580	2.438.491.806	*Office expenses*
Beban bangunan dan prasarana	1.741.404.193	4.324.967.151	*Building and infrastructure expenses*
Beban representasi	1.130.462.250	1.202.134.215	*Representation expenses*
Beban tenaga ahli	993.014.117	1.626.602.225	*Professional fee*
Beban kebersihan	617.523.515	417.992.800	*Cleanig expenses*
Beban pajak	608.056.382	512.160.406	*Tax expenses*
Beban sosialisasi	482.808.243	669.709.166	*Socialization expenses*
Beban pelatihan	421.149.000	398.250.000	*Training expenses*
Beban promosi	370.541.754	419.062.057	*Promotion expenses*
Beban kendaraan	330.895.692	377.952.573	*Vehicle expenses*
Beban perjalanan dinas	193.517.878	204.478.672	*Official travel expenses*
Beban kesejahteraan pegawai	180.647.500	75.828.241	*Employee walfare expenses*
Beban sewa	75.000.000	70.000.000	*Rent expeses*
Beban Inventaris kantor	63.424.296	26.160.855	*Equipment office expenses*
Jumlah	**32.371.746.448**	**36.461.376.988**	***Total***

23 PENDAPATAN LAIN-LAIN / *23 OTHERS INCOME*

Terdiri dari: / *Consist of:*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Bunga	500.444.965	673.945.583	*Interest*
Lain-lain	1.087.810.346	550.185.120	*Others*
Jumlah	**1.588.255.311**	**1.224.130.703**	***Total***

24 BEBAN LAIN-LAIN / *24 OTHERS EXPENSES*

Terdiri dari: / *Consist of:*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Administrasi bank	17.981.309	57.398.285	*Bank administration*
Lain-lain	118.110.044	-	*Others*
Jumlah	**136.091.353**	**57.398.285**	***Total***

25 SIFAT, SALDO, DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI / *25 NATURE, BALANCES, AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES*

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak - pihak berelasi, berdasarkan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak

In the normal course of business, the Company entered into business and financial transactions with related parties, which are conducted based on the agreed terms and conditions by both parties.

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of the relationship with the related parties are as follows:

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat dan hubungan/ *Nature and relationship*	Sifat transaksi/ *Nature of transaction*
Pemerintah Kota Bogor	Pemilik/*Owner*	Setoran modal, utang lain-lain pihak berelasi/ *Paid in capital, others payable related parties*

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Balances and transactions with related parties are as follows:

a. Utang lain-lain pihak berelasi / *a. Other payable related parties*

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Pemerintah Kota Bogor	250.000.000	210.849.531	*Bogor City Government*
Jumlah	**250.000.000**	**210.849.531**	***Total***
Persentase	1,77%	0,93%	*Percentage*

*) Persentase terhadap total utang/*Percentage to total payable*

26 STANDAR AKUNTANSI BARU / *26 NEW ACCOUNTING STANDARDS*

Efektif berlaku 1 Januari 2025 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik tidak berlaku dan diganti dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat.

Effective January 1, 2025, the Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability are no longer applicable and are replaced by the Financial Accounting Standards for Private Entities.

Perusahaan sedang menganalisa dampak penerapan standar akuntansi dan interpretasi tersebut di atas yang relevan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

The Company is still assessing the impact of these accounting standards and interpretations which relevant to the Company's financial statements

27 INFORMASI LAINNYA / *27 INFORMASI LAINNYA*

Pada tanggal 28 November 2024 perusahaan telah menerima surat Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dari kantor pajak. Sampai dengan proses audit selesai masih dalam proses klarifikasi.

On November 28, 2024, the company received a letter requesting clarification of data and/or information from the tax office. Until the audit process is completed, it is still in the clarification process.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Independent Auditors' Report

The original report included herein is in the Indonesian language.

Nomor/*Number*: 00009/3.0479/AU.2/05/1948-1/1/III/2025

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Pemegang Saham, Dewan Pengawas dan Direksi/
The Shareholders, Board of Supervisor and Directors

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor ("Perusahaan')** terlampir, yang terdiri dari laporan neraca tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas nya untuk tahun yang berakhir tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntanbilitas Publik (SAK ETAP).

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal lain

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 26 Januari 2024.

Opinion

We have audited the financial statements of ***Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor ("the Company")****, which comprise the statement of balance sheet as at December 31, 2024 and the statements of profit or loss, statement of changes in equity, and its statement of cash for the year then ended, and notes to the financial statements, including a material accounting policy information.*

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of December 31, 2024, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Financial Accounting Standards for Non-Public Accountabilty Entities.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other matters

The financial statements of Company as of December 31, 2023, and for the year then ended, were audited by another independent auditor who expressed an unqualified on those financial statements on January 26, 2024.

Tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntanbilitas Publik (SAK ETAP), dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan , manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Responsibilities of management for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Financial Accounting Standards for Non-Public Accountabilty Entities, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the company's financial reporting process.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada.

Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatements, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists.

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they cloud reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Sebagai bagian dan suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit, kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau mengabaikan pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketetapan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit, we also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainly exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainly exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap definisi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

00009

BUDIANDRU & REKAN

Maman Abdurahman, Ak., CPA.
Izin Akuntan Publik / *Public Accountant License No :* AP.1948

7 Maret 2025 / *March 7, 2025*

PERUSAHAAN UMUM DAERAH TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR

LAPORAN KEUANGAN DESEMBER 2024

Untuk Bulan Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Bulanan *(Un Audited)* Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan (PTP) Kota BogorPeriode Bulan Desember Tahun Anggaran 2024.

Laporan Bulanan *(Un Audited)* disusun dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD. Laporan ini berisikan Rekapitulasi dari kegiatan Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan (PTP) Kota Bogor sebagai bentuk pertanggung jawaban dan menjadi bahan evaluasi bagi internal perusahaan dalam melakukan langkah-langkah perbaikan dan upaya optimalisasi Layanan Transportasi Masyarakat *(Public Service Transportation)* dengan menjamin terciptanya rasa aman dan nyaman, serta terwujudnya manajemen yang berjalan secara efektif dan efisien guna menunjang kelancaran setiap kegiatan dan pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan (PTP) Kota Bogor.

Demikian Laporan Bulanan *(Un Audited)* Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan (PTP) Kota Bogor Periode Bulan Desember Tahun Anggaran 2024. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, namun kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat dan memberi kontribusi yang positif bagi perkembangan serta kemajuan Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan (PTP) Kota Bogor.

Akhir kata, kami berharap segenap pemangku kepentingan serta mitra strategis Perumda Transportasi Kota Bogor dapat saling bahu-membahu membangun Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan (PTP) Kota Bogor menjadi Perusahaan yang Mandiri dan Handal.

Terima Kasih

Bogor, Januari 2024
Direktur
PTP Kota Bogor

PEMERINTAH KOTA BOGOR
PERUMDA TRANSPORTASI PAKUAN

Rachma Nissa Fadliya, SE.,Ak., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

BAB I 3

PENDAHULUAN 3

1.1 Umum 3

1.2 Struktur Organisasi 5

BAB II 7

LAPORAN KEUANGAN 7

2.1 Posisi Keuangan 7

2.2 Laba (Rugi) Komprehensif 8

2.3 Arus Kas 9

BAB III 10

PENUTUP 10

LAMPIRAN 11

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Umum

Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 pada tanggal 12 April 2007 tentang "Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor" yang kemudian telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2008.

Modal Dasar Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor menurut Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 ditetapkan sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) yang telah terealisasikan seluruhnya hingga 31 Desember 2014.

Dari hasil kajian investasi daerah Nomor 102/BEST-BS/lap.FS/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 PDJT Kota Bogor diberikan penyertaan modal terakhir sebesar Rp 5.519.390.000,- (lima milyar lima ratus Sembilan belas juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah), yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 tahun 2015 tentang "Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor" dan telah dimanfaatkan oleh PDJT Kota Bogor pada tahun 2016, dan Laporan Posisi Keuangan PDJT Kota Bogor tanggal 31 Desember 2016 telah dilakukan Pemeriksaan Umum (General Audit) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Irwanto, Hary dan Usman berdasarkan surat nomor: 004/GA-PDJT/HSG/ HU/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal Proposal Audit Umum atas Laporan Keuangan. Dan sejak tahun 2017 PDJT Kota Bogor sudah tidak memiliki lagi modal yang bisa disetor.

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah dan untuk memberikan manfaat dalam pelayanan kepada masyarakat dalam bidang jasa transportasi dan menunjang pembangunan daerah. Melalui Penetapan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tanggal 21 Maret Tahun 2022 "Tentang Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan Kota Bogor", Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor berganti menjadi Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan Kota Bogor.

Berdasarkan pada penetapan Surat Keputusan Rencana Bisnis Perumda Trans Pakuan Kota Bogor nomor 900.1.13.2/Kep.341-Bag.Ekon/2024 pada tanggal 14 Oktober 2024. Rencana bisnis (BusinessPlan) yang telah disusun oleh Perumda Transportasi Pakuan Kota Bogor akan menjadi pedoman bagi Direksi dan seluruh pegawai dalam mengelola bisnis perusahaan, sehingga diharapkan perusahaan dapat berjalan dengan baik sesuai rencana yang telah disusun dan pada akhirnya dapat menghasilkan laba.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Permendagri Nomor 118 Tahun 2018, maka tujuan disusunnya rencana bisnis dan rencana kerja PTP adalah untuk:

a. Menunjukan gambaran mengenai bisnis PTP kepada para pemangku kepentingan;
b. Memberikan pedoman bagi Manajemen PTP dalam mengelola perusahaan;
c. Menentukan strategi bisnis;
d. Mengarahkan pengurus fokus pada tujuan yang ingin dicapai;
e. Membantu menghadapi persaingan usaha; dan
f. Menarik investor dan kreditur (Bank).

Arah dan tujuan pertumbuhan dan perkembangan PTP Kota Bogor dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (2024-2028) tercermin dalam Visi, Misi dan Program Kerja PTP Kota Bogor, sebagaimana dipaparkan berikut ini:

Visi PTP Kota Bogor Tahun 2024 – 2028 adalah **"Menjadi Perusahaan Jasa Transportasi publik yang sehat dan unggul, serta berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan pelayanan berkualitas untuk mendukung mobilitas dan konektivitas"**

Misi PTP Kota BogorTahun 2024 – 2028 adalah:

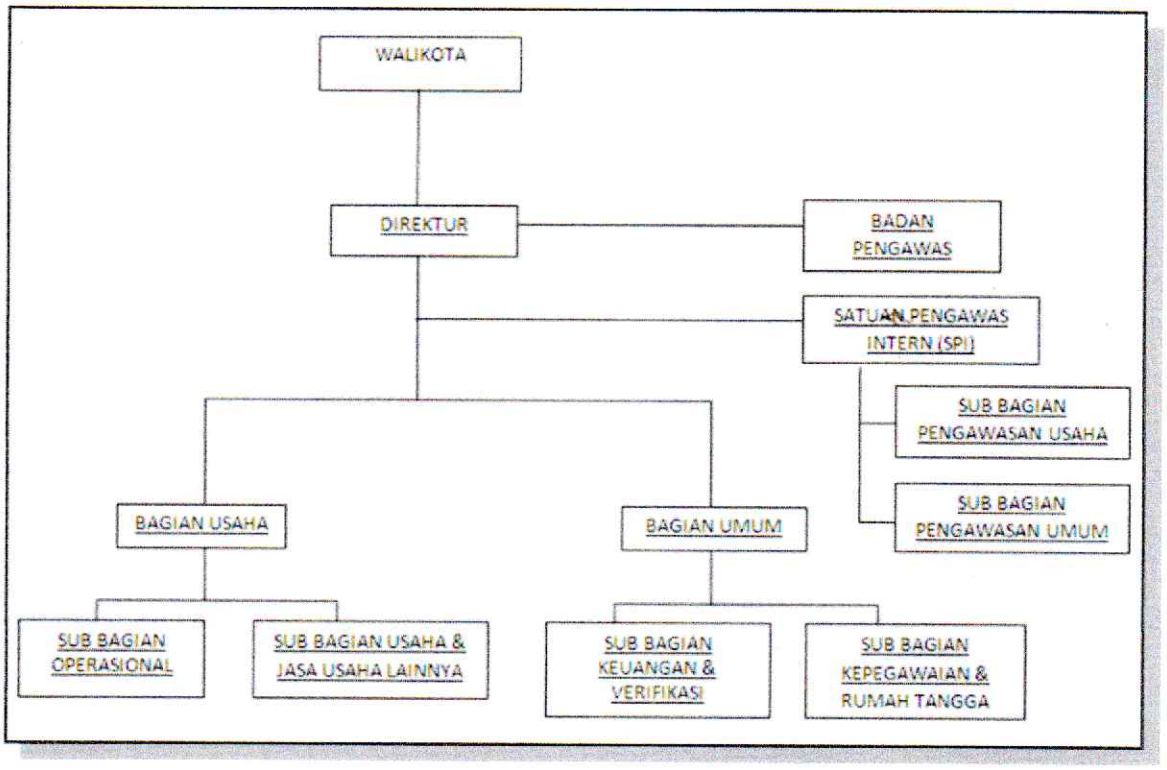
1. Melakukan Restrukturisasi PTP Kota Bogor yang meliputi Restrukturisasi Manajemen (Organisasi), Restrukturisasi Modal (Keuangan), dan Restrukturisasi Portofolio (Bisnis)
2. Membangun Kerja Sama Operasional dengan berbagai mitra strategis dalam mengembangkan bisnis di bidang jasa transportasi sebagai "Non Fare Box Business" untuk meningkatkan keuntungan perusahaan.
3. Meningkatkan kuaitas sumber daya manusia dan manajemen PTP Kota Bogor yang profesional.

1.2 Struktur Organisasi

Saat ini Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan (PTP) Kota Bogor belum ada perubahan dalam susunan Direksi dan tata organisasi perusahaan. Untuk struktur organisasi Perumda Transportasi Pakuan Kota Bogor masih mengacu kepada Peraturan Walikota Bogor No. 14 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor

Struktur Organisasi PTP Kota Bogor

Berdasar Peraturan Walikota Bogor Nomor 14 Tahun 2015



Pada saat awal perubahan struktur organisasi tahun 2015, berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 539.45-112 Tahun 2015 tanggal 27 Juli 2015 dilakukan Penunjukan Saudara. Suharto, ATD., MM (Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor) sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Direktur Perusahaan Daerah Jasa Transportasi kota Bogor, dan Bersama dibentuknya Tim Penyehatan PDJT Kota Bogor telah menyusun Rencana Bisnis (*Business Plan*) PDJT Kota Bogor 2016 – 2019 sampai dengan dilakukannya seleksi terbuka Direktur.

Pada akhir 2015 dilakukan seleksi terbuka jabatan Direktur PDJT Kota Bogor, dengan hasil dan di tetapkan melalui keputusan Walikota Bogor Nomor 539.45-11 Tahun 2016

tanggal 27 Januari 2016 tentang "Pengangkatan Saudara Krisna Kuncahyo , SE., AK., M.Si sebagai Direktur Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor Periode 2016-2020".

Masa jabatan Bapak Krisna Kuncahyo hanya berjalan kurang lebih 1 tahun, hal ini dikarenakan Bapak Krisna Kuncahyo mengundurkan diri pada Tanggal 5 Mei 2017 untuk kekosongan Direktur di lanjutkan oleh:

a. Plt Direktur Ibu Dra Rakhmawati, M.Si yang bertugas sejak bulan Juni 2017 - Februari 2018, di lanjutkan oleh;
b. Plt Direktur Bapak H. Bambang Budianto, SH., M.Si yang bertugas sejak bulan maret – September 2018, di lanjutkan oleh;
c. Plt Direktur Bapak H.Endang Suherman, SE., M.Si yang bertugas sejak bulan September 2018 - Januari 2020, di lanjutkan oleh;
d. Bapak H. Agus Suprapto, A.M.Tr.D.M.T berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 539.45-57 Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor Periode 2020-2024 ,dengan ketua (merangkap anggota), dan karena kekosongan jabatan Direktur PDJT Kota Bogor, maka ketua Dewan Pengawas PDJT Kota Bogor merangkap hingga;
e. Plt Direktur Bapak Eko Harry Wibisono, ATD, yang bertugas sejak 7 Juni 2021 s/d 2 Desember 2021 dilanjutkan Direktur baru.
f. Lies Permana Lestari, SE., MM. sebagai Direktur Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor Periode 2021 – 2025 berdasarkan Keputusan Walikota Bogor nomor 539/Kep.905-Ekon/2021 tanggal 1 Desember 2021 s/d 19 April 2022, di lanjutkan oleh;
g. Rachma Nissa Fadliya, S.E.Ak., M.Si Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Transportasi Kota Bogor berdasarkan Keputusan Walikota Bogor nomor 539/Kep.140-Ekon/2022 tanggal 21 April 2022.
h. Rachma Nissa Fadliya, S.E.Ak., M.Si sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Transportasi Kota Bogor Periode 2022 – 2027 berdasarkan Keputusan Walikota Bogor nomor 539/Kep.391-Ekon/2022 tanggal 16 Desember 2022.

BAB II
LAPORAN KEUANGAN

2.1 Posisi Keuangan

Laporan keuangan terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Perusahaan menyajikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas secara tersendiri. Laporan keuangan disusun berdasarkan basis kesinambungan usaha dan biaya historis. Laporan keuangan juga disusun berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas.

Laporan arus kas meyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang tejadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas. Perusahaan melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung.

Posisi Keuangan (*Un audited*) Perumda Transportasi Pakuan Kota Bogor Periode Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Posisi Keuangan Per 31 Desember 2024		
Aset	**Rp**	**877.867.600**
Kewajiban	**Rp**	**1.848.562.417**
Ekuitas	**-Rp**	**970.694.817**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**Rp**	**877.867.600**

a. Aset

Total Aset yang dicapai hingga Periode Desember 2024 sebesar **Rp. 877.867.600,00** Aset tersebut terdiri dari Aset lancar dan Asset tidak lancar

b. Kewajiban

c. **Ekuitas**

Ekuitas yang dicapai hingga Periode Desember 2024 sebesar (-) **Rp. (970.694.817,00).** Ekuitas terdiri dari Modal Dasar yang sudah disetor penuh oleh Pemkot Kota Bogor sebesar **Rp. 35.519.390.000,00** serta total kerugian tahun berjalan sebesar (-) **(-Rp. 36.641.862.040,00).** dan Laba berjalan (+) **Rp. 151.777.223,00**

2.2 Laba (Rugi) Komprehensif

Laba (Rugi) Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan (PTP) Kota Bogor Per Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Laba (Rugi) PTP Kota Bogor
Per Desember 2024
Dibandingkan dengan RKA Desember 2024

Uraian	Realisasi Desember 2024		RKA Desember 2024		Pencapaian
Pendapatan Usaha	Rp	2.908.250.458	Rp	2.877.922.000	101%
Beban Langsung	Rp	1.893.023.111	Rp	1.924.974.896	98%
Beban Tidak Langsung	Rp	936.688.079	Rp	962.703.574	97%
Pendapatan/ Biaya lain-lain	Rp	73.237.955	Rp	82.180.000	89%
Laba (Rugi) Bersih	Rp	151.777.223	Rp	58.371.742	260%

a. **Pendapatan Usaha**

Pendapatan Usaha Perumda Transportasi Pakuan Per Desember 2024 terealisasi sebesar **Rp.2.908.250.458,00** yaitu **101%** dari RKA Per Desember 2024 sebesar **Rp. 2.877.922.000,00.** Pendapatan usaha melebihi target yang ditetapkan dalam RKA hal ini disebabkan karena adanya kenaikan dari TPK 7 Cidangiang (Barangsiang) – Sentul City dan Feeder LRT Cibubur yang melebihi target RKA 2024

b. **Beban Langsung Usaha**

Beban Langsung Usaha Per Desember 2024 terealisasi sebesar **Rp. 1.893.023.111,00**. yaitu **98%** dari RKA Per Desember 2024 sebesar **Rp. 1.924.974.896,00**. Realisasi beban biaya langsung belum mencapai target karena belum berjalananya semua unit usaha

c. **Beban Tidak Langsung**

Beban Tidak Langsung Per Desember 2024 terealisasi sebesar **Rp. 936.688.079,00** yaitu **99%** dari RKA Per Desember tahun 2024 sebesar **Rp. 962.703.574,00.** Realisasi

beban tidak langsung PTP merupakan implementasi Perusahaan dalam menjalankan kegiatan administrasi perusahaan dan akselerasi terhadap Rencana Bisnis Perusahaan yang berjalan secara efektif, dengan tujuan meningkatkan pendapatan, efisiensi dan produktifitas.

d. Pendapatan (biaya) lain lain

Pendapatan (biaya) dari Luar Usaha Per Desember 2024 terealisasi sebesar **Rp. 73.237.955,00** yaitu **89%** dari RKA Per Desember 2024 sebesar **Rp. 82.180.000,00**

e. Laba (rugi) bersih

Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan (PTP) Kota Bogor Per Desember 2024 mengalami Laba (rugi) sebesar **(+) Rp. 151.777.223,00** atau **260%** dibandingkan RKA Per Desember 2024 sebesar **(+) Rp. 58.371.742,00** Laba (rugi) menunjukan nilai Positif dan lebih Tinggi dibanding dengan rencana anggaran hal ini dikarenakan Realisasi Pendapatan mengalami penaikan dan diikuti dengan Beban Langsung dan Tidak Langsung yang mengalami penurunan di bandingkan dengan RKA

2.3 Arus Kas

Proyeksi Arus Kas Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan (PTP) Kota Bogor sampai dengan Per Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Arus Kas Per 31 Desember 2024		
Kas bersih dari aktivitas operasi	-Rp	331.719.712
Kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	-
Kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	-
Saldo kas awal tahun	Rp	619.461.235
Saldo kas per Desember 2024	Rp	271.247.443

Sebagaimana Lampiran yang menggambarkan aktivitas keuangan Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan (PTP) Kota Bogor pada Tahun Anggaran 2024

BAB III
PENUTUP

Demikian Laporan Bulanan *(Un Audited)* Perumda Transportasi Pakuan (PTP) Kota Bogor Periode Bulan Desember Tahun Anggaran 2024 disusun memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 118 Tahun 2018 tentang "Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD" dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2019 tentang "Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah".

Terima Kasih

Bogor, Januari 2024
Direktur
PTP Kota Bogor

Rachma Nissa Fadliya, SE.,Ak., M.Si

LAMPIRAN



PERUSAHAAN UMUM DAERAH TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PERIODE 31 DESEMBER 2024

Uraian	No Re	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp	RKA Desember 2024 Rp	Uraian	No Ref	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp	RKA Desember 2024 Rp
ASSET					**PASIVA**				
ASSET LANCAR					**KEWAJIBAN LANCAR**				
Kas dan Bank	1	Rp 271.247.443	Rp 619.461.235	Rp 158.367.272	Utang Pihak ke 2	6	Rp 76.134.519	Rp 99.179.382	Rp 99.179.382
Piutang Lain-lain	2	Rp 71.991.073	Rp 8.319.475	Rp 8.319.475	Utang Pajak	7	Rp -	Rp -	Rp 14.051.788
Pajak dibayar dimuka	3	Rp 462.207.600	Rp 462.207.600	Rp 462.207.600	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	8	Rp 1.310.220.298	Rp 1.717.076.150	Rp 1.337.030.705
Biaya dibayar di Muka	4	Rp 4.528.500	Rp -	Rp -	Pendapatan Diterima Di muka	9	Rp 462.207.600	Rp 462.207.600	Rp 462.207.600
Jumlah Asset Lancar		**Rp 809.974.616**	**Rp 1.089.988.310**	**Rp 628.894.347**	**Jumlah Kewajiban Lancar**		**Rp 1.848.562.417**	**Rp 2.278.463.132**	**Rp 1.912.469.475**
ASSET TETAP	5				**KEWAJIBAN TIDAK LANCAR**				
Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp 199.519.000	Rp 199.519.000	Rp 199.519.000	Utang Lain-lain	10	Rp -	Rp -	Rp -
Kendaraan		Rp 6.257.714.520	Rp 6.257.714.520	Rp 6.257.714.520					
Bangunan		Rp 186.832.900	Rp 186.832.900	Rp 186.832.900	**EKUITAS**				
Inventaris/Perabot Kantor		Rp 564.681.480	Rp 548.187.400	Rp 548.187.400	Penyertaan Pemerintah Kota Bogor	11	Rp 35.519.390.000	Rp 35.519.390.000	Rp 35.519.390.000
Nilai Perolehan		Rp 7.208.747.900	Rp 7.192.253.820	Rp 7.192.253.820	Laba Ditahan/Akm. Kerugian		-Rp 36.641.862.040	-Rp 36.920.902.127	-Rp 36.795.334.088
Akumulasi Penyusutan		-Rp 7.140.854.916	-Rp 7.126.251.038	-Rp 7.126.251.038	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	12	Rp 151.777.223	Rp 279.040.087	Rp 26.267.284
					Laba/(Rugi) Berjalan Bagian Pemkot Bogor				Rp 32.104.458
Nilai Buku		**Rp 67.892.984**	**Rp 66.002.782**	**Rp 66.002.782**	**Jumlah Ekuitas**		**-Rp 970.694.817**	**-Rp 1.122.472.040**	**-Rp 1.217.572.346**
JUMLAH ASSET		**Rp 877.867.600**	**Rp 1.155.991.092**	**Rp 694.897.129**	**JUMLAH PASIVA**		**Rp 877.867.600**	**Rp 1.155.991.092**	**Rp 694.897.129**

Bogor, Januari 2024
Direktur
PTP Kota Bogor

PEMERINTAH KOTA BOGOR
PERUMDA TRANSPORTASI PAKUAN

Rachma Nissa Fadliya, SE.,Ak., M.Si

PERUSAHAAN UMUM DAERAH TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR
LAPORAN LABA RUGI
PER 31 DESEMBER NOVEMBER 2024

Akun	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	RKA Desember 2024	Pencapaian
PENDAPATAN	1				
Pendapatan Usaha Jasa Ang.Umum		Rp 2.492.832.827	Rp2.161.802.000	Rp 2.384.358.000	105%
Pendapatan Unit Usaha Lainnya		Rp 415.417.631	Rp 260.548.190	Rp 493.564.000	84%
Jumlah pendapatan		Rp 2.908.250.458	Rp2.422.350.190	Rp 2.877.922.000	101%
BEBAN USAHA	2				
Biaya langsung usaha		Rp 1.893.023.111	Rp1.418.248.706	Rp 1.924.974.896	98%
Biaya tidak langsung		Rp 936.688.079	Rp 742.405.335	Rp 962.703.574	97%
Jumlah beban usaha		Rp 2.829.711.190	Rp2.160.654.041	Rp 2.887.678.470	98%
Laba (rugi) operasi		**Rp 78.539.268**	**Rp 261.696.149**	**-Rp 9.756.470**	-805%
Pendapatan (beban) lain-lain	3				
Pendapatan lain-lain		Rp 129.514.354	Rp 103.939.945	Rp 128.680.000	101%
Beban lain-lain		-Rp 56.276.399	-Rp 86.596.007	-Rp 46.500.000	121%
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain		Rp 73.237.955	Rp 17.343.938	Rp 82.180.000	89%
Taksiran Pajak Penghasilan				Rp 14.051.788	0%
Laba (rugi) periode berjalan		**Rp 151.777.223**	**Rp 279.040.087**	**Rp 58.371.742**	260%

Bogor, Januari 2024
Direktur
PTP Kota Bogor

PERUMDA TRANSPORTASI PAKUAN

Rachma Nissa Fadliya, SE.,Ak., M.Si

PERUSAHAAN UMUM DAERAH TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

Uraian	Modal Penyertaan Pemerintah Kota Bogor	Saldo Rugi	Jumlah
Saldo Per 1 Januari 2023	35.519.390.000	- 36.920.902.127	- 1.401.512.127
Koreksi		-	-
Laba tahun berjalan	-	279.040.087	279.040.087
Saldo Per 31 Desember 2023	35.519.390.000	- 36.641.862.040	- 1.122.472.040
Koreksi			-
Laba tahun berjalan	-	151.777.223	151.777.223
Saldo Per 31 Desember 2024	**35.519.390.000**	**- 36.490.084.817**	**- 970.694.817**

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bogor, Januari 2024
Direktur
PTP Kota Bogor

Rachma Nissa Fadliya, SE.,Ak., M.Si

PERUSAHAAN UMUM DAERAH TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2024

	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				
Laba Sebelum Pajak	Rp	151.777.223	Rp	279.040.087
Penyesuaian untuk:				
koreksi RE	Rp	-	Rp	-
Penyusutan Aset Tetap	Rp	14.603.878	Rp	12.464.565
Beban Imbalan Kerja	Rp	-	Rp	-
Perubahan dalam Aset dan				
Liabilitas Operasi :	Rp	166.381.101	Rp	291.504.652
Piutang usaha	-Rp	63.671.598	-Rp	8.319.475
Piutang lain-lain			Rp	-
Persediaan	Rp	-	Rp	-
Pajak Dibayar Dimuka	Rp	-	Rp	-
Aset lainnya	Rp	-	Rp	-
Uang Muka & Biaya Dibayar Dimuka	-Rp	4.528.500	Rp	-
Utang Usaha	-Rp	23.044.863	-Rp	158.297.433
Utang non Usaha			Rp	-
Uang muka yang diterima	Rp	-	Rp	-
Cadangan pengembangan usaha	Rp	-	Rp	-
Utang pajak	Rp	-	-Rp	74.954.220
Biaya yang masih harus dibayar	-Rp	406.855.852	-Rp	85.322.349
Imbalan kerja	Rp	-	Rp	-
Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi	-Rp	331.719.712	-Rp	35.388.825
Pembayaran pajak badan				
Kas yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	-Rp	331.719.712	-Rp	35.388.825
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				
Penambahan (pengurangan) aset tetap	-Rp	16.494.080	-Rp	11.000.000
Kas Bersih yang Diperoleh Digunakan untuk	-Rp	16.494.080	-Rp	11.000.000
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				
Laba Ditahan			Rp	74.954.220
Pembayaran Utang Bank				
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk)				
Aktivitas Pendanaan	Rp	-	Rp	74.954.220
Kenaikan Bersih Kas dan Bank	-Rp	348.213.792	Rp	28.565.395
Kas dan Setara Kas - Awal Tahun	Rp	619.461.235	Rp	590.895.840
Kas dan Setara Kas - Akhir Tahun	Rp	271.247.443	Rp	619.461.235
	Rp	271.247.443	Rp	619.461.235

Bogor, Januari 2024
Direktur
PTP Kota Bogor

PEMERINTAH KOTA BOGOR
PERUMDA TRANSPORTASI PAKUAN

Rachma Nissa Fadliya, SE.,Ak., M.Si

PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN

Penjelasan Pos-pos Neraca

1 Kas dan Bank

Saldo Kas dan Bank per Desember 2024 adalah :

No	Uraian	30 Desember 2024 (Rp.)	31 Desember 2023 (Rp.)	RKA Desember 2024 (Rp.)
1	Kas Besar	Rp 34.178.488	Rp 23.181.600	Rp 158.367.272
2	Kas Besar BTS	Rp -	Rp -	Rp -
3	Kas di tangan Kondektur	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp -
4	Kas di tangan Tiketing	Rp -	Rp -	Rp -
5	Kas di tangan Pengemudi	Rp -	Rp -	Rp -
6	Bank :			
	- Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat	Rp 128.278.765	Rp 45.685.486	Rp -
	- Perumda BPR BKB (Bank Kota Bogor)	Rp 5.140.946	Rp 50.094.149	Rp -
	- Bank BNI	Rp 1.232.251	Rp -	Rp -
	- Bank BRI	Rp -	Rp -	Rp -
	- Bank Mandiri	Rp 1.916.993	Rp -	Rp -
	- Bank BCA	Rp -	Rp -	Rp -
7	Deposito dan Surat Berharga	Rp -	Rp -	Rp -
	- Perumda BPR BKB (Bank Kota Bogor)	Rp 100.000.000	Rp 500.000.000	Rp -
	Jumlah	**Rp 271.247.443**	**Rp 619.461.235**	**Rp 158.367.272**

2 Piutang Lain-lain

No	Uraian	30 Desember 2024 (Rp.)	31 Desember 2023 (Rp.)	RKA Desember 2024 (Rp.)
1	Piutang Penjualan Karcis	Rp 5.684.761	Rp 8.319.475	Rp 8.319.475
2	Piutang Penjualan Non Karcis	Rp 10.000.000	Rp -	Rp -
3	Piutang Pendapatan Advertising	Rp 56.306.312	Rp -	Rp -
4	Rupa-rupa Piutang lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah	**Rp 71.991.073**	**Rp 8.319.475**	**Rp 8.319.475**

3 Pajak Dibayar Dimuka

No	Uraian	30 Desember 2024 (Rp.)	31 Desember 2023 (Rp.)	RKA Desember 2024 (Rp.)
1	Pajak Dibayar Dimuka (PPN)	Rp 462.207.600	Rp 462.207.600	Rp 462.207.600
	Jumlah	**Rp 462.207.600**	**Rp 462.207.600**	**Rp 462.207.600**

4 Biaya dibayar di Muka

No	Uraian	30 Desember 2024 (Rp.)	31 Desember 2023 (Rp.)	RKA Desember 2024 (Rp.)
1	Sewa Dibayar Dimuka-Kantor	Rp -	Rp -	Rp -
2	Sewa Dibayar Dimuka-Loket	Rp -	Rp -	Rp -
3	Sewa Dibayar Dimuka-Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
4	Asuransi Tenaga Kerja	Rp -	Rp -	Rp -
5	Asuransi Kendaraan	Rp -	Rp -	Rp -
6	Asuransi Penumpang	Rp -	Rp -	Rp -
7	Rupa-rupa Biaya Dibyr Dimuka	Rp 4.528.500	Rp -	Rp -
8	Biaya Dibyr Dimuka Solar BBLK	Rp -	Rp -	Rp -
9	Biaya Dibyr Dimuka Solar HJBS	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah	**Rp 4.528.500**	**Rp -**	**Rp -**

5 Aktiva Tetap

No	Uraian	30 Desember 2024 (Rp.)	31 Desember 2023 (Rp.)	RKA Desember 2024 (Rp.)
1	Peralatan dan Perlengkapan	Rp 199.519.000	Rp 199.519.000	Rp 199.519.000
2	Kendaraan	Rp 6.257.714.520	Rp 6.257.714.520	Rp 6.257.714.520
3	Inventaris Kantor	Rp 564.681.480	Rp 548.187.400	Rp 548.187.400
4	Bangunan	Rp 186.832.900	Rp 186.832.900	Rp 186.832.900
	Jumlah Nilai perolehan	Rp 7.208.747.900	Rp 7.192.253.820	Rp 7.192.253.820
5	Akumulasi Penyusutan Bangunan Opera	-Rp 140.588.489	-Rp 131.246.837	-Rp 131.246.837
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan Kanto	-Rp 199.519.000	-Rp 199.519.000	-Rp 199.519.000
7	Akumulasi Penyusutan Kendaraan	-Rp 6.257.714.472	-Rp 6.257.714.472	-Rp 6.257.714.472
8	Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor	-Rp 543.032.955	-Rp 537.770.729	-Rp 537.770.729
	Jumlah Akumulasi Penyusutan	-Rp 7.140.854.916	-Rp 7.126.251.038	-Rp 7.126.251.038
	Nilai Buku	**Rp 67.892.984**	**Rp 66.002.782**	**Rp 66.002.782**

6 UTANG USAHA

No	Uraian	30 Desember 2024 (Rp.)	31 Desember 2023 (Rp.)	RKA Desember 2024 (Rp.)
1	Hutang Usaha	Rp -	Rp -	Rp 99.179.382
2	Service AC bus	Rp 1.245.000	Rp 1.245.000	Rp -
3	CV Sumber Rejeki / Deden / Anugrah Tek	Rp 1.839.500	Rp 1.839.500	Rp -
4	Engine turbo	Rp 12.500.000	Rp 12.500.000	Rp -
5	Hutang Spare Part	Rp 42.200.000	Rp 42.200.000	Rp -
6	Hutang Oli	Rp -	Rp -	Rp -
7	Hutang Accu	Rp -	Rp -	Rp -
8	Hutang Lain-lain	Rp 17.900.019	Rp 17.900.019	
9	Hutang Service Bus	Rp 450.000	Rp 5.520.000	Rp -
10	Hutang PT Kodjari	Rp -	Rp 17.974.863	Rp -
	Jumlah	**Rp 76.134.519**	**Rp 99.179.382**	**Rp 99.179.382**

7 Hutang Pajak

No	Uraian	30 Desember 2024 (Rp.)	31 Desember 2023 (Rp.)	RKA Desember 2024 (Rp.)
1	PPh Psl 21 Badan Pengawas	Rp -	Rp -	Rp -
2	PPh Psl 21 Direksi	Rp -	Rp -	Rp -
3	PPh Psl 21 Pegawai	Rp -	Rp -	Rp -
4	Pajak Penghasilan Psl 29 (PPh Badan)	Rp -	Rp -	Rp 14.051.788
	Jumlah	**Rp -**	**Rp -**	**Rp 14.051.788**

8 Biaya Yang Masih harus Dibayar Lainnya

No	Uraian	30 Desember 2024 (Rp.)	31 Desember 2023 (Rp.)	RKA Desember 2024 (Rp.)
1	Hutang Lainnya	Rp -	Rp -	Rp 1.337.030.705
2	Pesangon & Penghargaann Direksi tahu	Rp 45.227.550	Rp 45.227.550	Rp -
3	Beban Gaji Des 2016	Rp -	Rp 20.263.030	Rp -
4	Gaji Karyawan Jan 2017	Rp -	Rp 967.365	Rp -
5	Gaji Karyawan Feb 2017	Rp -	Rp 313.038.760	Rp -
6	Gaji Karyawan Mar 2017	Rp 265.712.999	Rp 331.443.844	Rp -
7	Gaji Karyawan Apr 2017	Rp 458.064.512	Rp 458.064.512	Rp -
8	Honor Direktur Jan 2017	Rp 14.835.715	Rp 14.835.715	Rp -
9	Honor Direktur Feb 2017	Rp 15.635.715	Rp 15.635.715	Rp -
10	Honor Direktur Mar 2017	Rp 15.635.715	Rp 15.635.715	Rp -
11	Honor Direktur Apr 2017	Rp 15.635.715	Rp 15.635.715	Rp -
12	Batuan Kesehatan Karyawan Tahun 2016	Rp -	Rp -	Rp -
13	Kekurangan Gaji Jan 2017	Rp 46.880.000	Rp 46.880.000	Rp -
14	Kekurangan gaji akibat penangguhan UM	Rp 134.668.980	Rp 134.668.980	Rp -
15	Beban Gaji Des 2021	Rp -	Rp -	Rp -
16	BPJS Kesehatan Mei-Des 2017	Rp 192.204.233	Rp 192.204.233	Rp -
17	BPJS Kesehatan Jan-Des 2018	Rp 102.871.345	Rp 102.871.345	Rp -
18	Biaya PAM, Listrik, Telepon YMH Dibaya	Rp -	Rp -	Rp -
19	Bagi Hasil KSO/KSM	Rp -	Rp -	Rp -
20	Beban Pembelian Solar	Rp -	Rp -	Rp -
21	Sewa Pool	Rp -	Rp -	Rp -
22	Pinjaman Koperasi	Rp -	Rp -	Rp -
23	Lain-lain	Rp 2.847.819	Rp 9.703.671	Rp -
	Jumlah	**Rp 1.310.220.298**	**Rp 1.717.076.150**	**Rp 1.337.030.705**

9 Pendapatan Diterima Dimuka

No	Uraian	30 Desember 2024 (Rp.)	31 Desember 2023 (Rp.)	RKA Desember 2024 (Rp.)
1	uang muka proyek	462.207.600	Rp 462.207.600	Rp 462.207.600
2	Pendapatan Diterima Dimuka	-	Rp -	Rp -
	Jumlah	**Rp 462.207.600**	**Rp 462.207.600**	**Rp 462.207.600**

10 Penyertaan Pemerintah Kota

Penyertaan Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2024 merupakan Penyertaan modal Pemerintah Kota Bogor sebagai Kekayaan Pemerintah Kota Bogor yang Dipisahkan berdasarkan Peraturan Daerah No 5 tahun 2007 yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah No. 11 tahun 2008 sebagai berikut :

No	Uraian	30 Desember 2024 (Rp.)
1	Nilai perolehan 10 unit bis	Rp 3.045.000.000
2	Nilai perolehan 20 unit bus	Rp 6.270.000.000
3	Nilai Perolehan 1 unit mobil Derek	Rp 218.200.000
4	Setoran Modal (APBD th 2007)	Rp 1.506.068.700
5	Setoran Modal (APBD th 2008)	Rp 2.600.000.000
6	Setoran Modal (APBD th 2009)	Rp 2.000.000.000
7	Setoran Modal (APBD th 2011)	Rp 2.000.000.000
8	Setoran Modal (APBD th 2012)	Rp 5.000.000.000
9	Setoran Modal (APBD th 2013)	Rp 4.000.000.000
10	Setoran Modal (APBD th 2014)	Rp 3.360.731.300
11	Setoran Modal (APBD th 2015)	Rp -
12	Setoran Modal (APBD th 2016)	Rp 5.519.390.000
	Jumlah	**Rp 35.519.390.000**

11 Laba/Rugi Berjalan

Laba (Rugi) per 31 Desember 2024 sebesar **Rp 151.777.223**

Bogor, Januari 2024
Direktur
PTP Kota Bogor

PEMERINTAH KOTA BOGOR
PERUMDA TRANSPORTASI PAKUAN

Rachma Nissa Fadliya, SE.,Ak., M.Si

PENJELASAN POS-POS LABA RUGI

1 Pendapatan Usaha

a. Pendapatan Angkutan Umum

Pendapatan Angkutan Umum Per Desember 2024 **Rp. 2.492.832.827** merupakan pendapatan dari hasil usaha perusahaan dengan rincian :

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp.)		31 Desember 2023 (Rp.)		RKA Desember 2024 (Rp.)	
1	Pendapatan Mitra BTS	Rp	423.540.000	Rp	423.540.000	Rp	423.540.000
2	Pendapatan Penjualan Bellanova	Rp	1.738.002.000	Rp	1.652.217.000	Rp	1.684.368.000
3	Pendapatan Feeder Bubulak-Cidangiang	Rp	313.177.371	Rp	86.045.000	Rp	257.700.000
4	Pendapatan Angkutan Listrik (ALIBO)	Rp	18.113.456	Rp	-	Rp	18.750.000
	Jumlah	**Rp**	**2.492.832.827**	**Rp**	**2.161.802.000**	**Rp**	**2.384.358.000**

b. Pendapatan Unit Usaha Lainnya

Pendapatan Unit Usaha Lainnya Per Desember 2024 **Rp. 415.417.631** merupakan pendapatan dari hasil usaha lainnya dengan rincian :

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp.)		31 Desember 2023 (Rp.)		RKA Desember 2024 (Rp.)	
1	Pendapatan Usaha Bengkel	Rp	135.830	Rp	8.348.190	Rp	6.750.000
2	Pendapatan Usaha Jasa Derek	Rp	-	Rp	5.000.000	Rp	-
3	Pendapatan Training	Rp	130.000.000	Rp	100.000.000	Rp	120.000.000
4	Pendapatan Pariwisata	Rp	36.000.000	Rp	58.000.000	Rp	48.000.000
5	Pendapatan Advertising	Rp	249.281.801	Rp	89.200.000	Rp	288.814.000
6	Pendapatan Pool Bubulak	Rp	-	Rp	-	Rp	30.000.000
	Jumlah	**Rp**	**415.417.631**	**Rp**	**260.548.190**	**Rp**	**493.564.000**
	TOTAL PENDAPATAN USAHA	**Rp**	**2.908.250.458**	**Rp**	**2.422.350.190**	**Rp**	**2.877.922.000**

2 Biaya Langsung Usaha

a. Biaya Langsung Angkutan Umum

Biaya Langsung Angkutan Umum Per Desember 2024 sebesar **Rp. 1.816.186.582** merupakan total biaya langsung Angkutan Umum yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp.)		31 Desember 2023 (Rp.)		RKA Desember 2024 (Rp.)	
	Biaya Langsung Angkutan Umum Bellanova						
1	Gaji Pegawai	Rp	403.834.094	Rp	364.653.178	Rp	521.746.116
2	Bahan Bakar	Rp	422.658.627	Rp	413.620.000	Rp	387.000.000
3	Pelumas	Rp	37.053.000	Rp	14.510.000	Rp	31.810.780
4	Ban	Rp	67.060.000	Rp	72.200.000	Rp	59.575.000
5	Pemeliharaan	Rp	133.421.611	Rp	152.976.985	Rp	102.313.000
6	Biaya Penyusutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-
7	Perpanjangan Surat Berharga	Rp	21.688.300	Rp	15.383.350	Rp	31.250.000
8	Harga Pokok Lainnya	Rp	230.638.276	Rp	179.997.183	Rp	199.920.000
	Jumlah	**Rp**	**1.316.353.908**	**Rp**	**1.213.340.696**	**Rp**	**1.333.614.896**
	Biaya Langsung Angkutan Feeder Bubulak & Cidangiang						
1	Biaya Pegawai	Rp	140.205.000	Rp	49.022.500	Rp	192.000.000
2	Bahan Bakar	Rp	172.900.000	Rp	78.112.630	Rp	155.900.000
3	Pelumas	Rp	-	Rp	-		
4	Ban	Rp	-	Rp	-		
5	Pemeliharaan	Rp	-	Rp	-		
6	Biaya Penyusutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-
7	Perpanjangan Surat Berharga	Rp	-	Rp	-	Rp	-
8	Harga Pokok Lainnya	Rp	70.966.625	Rp	35.911.780	Rp	58.760.000
	Jumlah	**Rp**	**384.071.625**	**Rp**	**163.046.910**	**Rp**	**406.660.000**
	Biaya Langsung Angkutan Listrik (Alibo)						
1	Honor Pegawai	Rp	94.500.000			Rp	94.800.000
2	HPP lainnya	Rp	21.261.049			Rp	20.000.000
	Jumlah	**Rp**	**115.761.049**	**Rp**	**-**	**Rp**	**114.800.000**
	Total Biaya Langsung Angkutan Umum	**Rp**	**1.816.186.582**	**Rp**	**1.376.387.606**	**Rp**	**1.855.074.896**

b. Biaya Langsung Unit Usaha Lainnya

Biaya Langsung Unit Usaha Lainnya Per Desember 2024 sebesar **Rp. 76.836.529** merupakan total Biaya Langsung Unit Usaha Lainnya yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp.)	31 Desember 2023 (Rp.)	RKA Desember 2024 (Rp.)
	Biaya Langsung Derek			
1	Biaya Pegawai	Rp -	Rp -	Rp -
2	Bahan Bakar	Rp -	Rp -	Rp -
3	Pelumas	Rp 152.000	Rp -	Rp -
4	Ban	Rp -	Rp -	Rp -
5	Pemeliharaan	Rp 1.544.000	Rp -	Rp -
6	Biaya Penyusutan	Rp -	Rp -	Rp -
7	Perpanjangan Surat Berharga	Rp -	Rp -	Rp -
8	Harga Pokok Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah	**Rp 1.696.000**	**Rp -**	**Rp -**
	Biaya Langsung Training			
1	Honor Trainer Biskita	Rp 15.925.000	Rp 16.500.000	Rp 18.000.000
2	By Konsumsi	Rp 10.353.500	Rp 8.872.050	Rp 10.900.000
3	Sewa Gedung	Rp 350.000	Rp 1.652.500	Rp 3.850.000
4	Biaya kegiatan lainnya	Rp 6.814.154	Rp 2.900.000	Rp 2.150.000
	Jumlah	**Rp 33.442.654**	**Rp 29.924.550**	**Rp 34.900.000**
	Biaya Langsung Pariwisata			
1	Biaya Pegawai	Rp -	Rp 1.765.000	Rp -
2	Bahan Bakar	Rp -	Rp 1.490.000	Rp -
3	Pelumas	Rp -	Rp 475.000	Rp -
4	Ban	Rp -	Rp -	Rp -
5	Pemeliharaan	Rp -	Rp 4.107.000	Rp -
6	Biaya Penyusutan	Rp -	Rp -	Rp -
7	Perpanjangan Surat Berharga	Rp -	Rp 91.200	Rp -
8	Harga Pokok Lainnya	Rp -	Rp 3.968.350	Rp -
	Jumlah	Rp -	Rp 11.896.550	Rp -
	Biaya Langsung Advertising			
1	Gaji Konsultan	Rp -	Rp -	Rp -
2	Biaya Maintenance	Rp 5.092.595	Rp -	Rp -
3	Lain-lain	Rp 30.656.500	Rp 40.000	Rp 35.000.000
4	Biaya Pajak Advertising	Rp 5.948.780		
	Jumlah	**Rp 41.697.875**	**Rp 40.000**	**Rp 35.000.000**
	Total Biaya Langsung Unit Usaha Lainnya	**Rp 76.836.529**	**Rp 41.861.100**	**Rp 69.900.000**
	TOTAL BIAYA LANGSUNG	**Rp 1.893.023.111**	**Rp 1.418.248.706**	**Rp 1.924.974.896**

3 Biaya Tidak Langsung Usaha:

Biaya Tidak Langsung Usaha per Desember 2024 sebesar **Rp. 936.688.079** merupakan total biaya tidak langsung usaha dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp.)	31 Desember 2023 (Rp.)	RKA Desember 2024 (Rp.)
1	Biaya Pegawai	Rp 334.479.258	Rp 277.907.711	Rp 401.052.455
2	Biaya Direksi	Rp 74.871.763	Rp 3.303.500	Rp 94.870.796
3	Biaya Pembina dan Badan Pengawas	Rp 50.189.922	Rp 31.109.910	Rp 58.500.000
	Jumlah	**Rp 459.540.943**	**Rp 312.321.121**	**Rp 554.423.251**
	Biaya Kantor :			
1	Biaya kantor & Rumah Tangga	Rp 113.196.044	Rp 94.201.072	Rp 86.085.744
2	Biaya Hubungan Langganan	Rp 17.416.500	Rp 9.479.600	Rp 17.370.431
3	Biaya Pemeliharaan	Rp 7.720.330	Rp 4.981.000	Rp 11.600.000
4	Biaya Bahan Bakar, Tol & Parkir	Rp 23.264.728	Rp 16.735.518	Rp 29.020.000
6	Biaya Perjalanan Dinas	Rp 77.394.034	Rp 42.314.623	Rp 68.000.000
7	Biaya Iuran/Berlangganan	Rp 1.552.490	Rp 1.458.990	Rp 3.550.000
8	Biaya Perijinan dan pajak	Rp 11.459.746	Rp 180.000	Rp 2.500.000
9	Biaya Penyusutan dan Amortisasi	Rp 14.603.878	Rp 12.464.565	Rp 13.904.148
10	Pos Pimpinan	Rp 32.550.001	Rp 31.775.000	Rp 30.000.000
11	Biaya Jasa Profesional	Rp 127.320.000	Rp 173.482.500	Rp 109.500.000
12	Kesejahteraan Karyawan	Rp 16.713.615	Rp 9.400.000	Rp 12.000.000
13	Bantuan dan Sumbangan	Rp 23.395.276	Rp 29.331.500	Rp 19.000.000
14	Pembinaan Karyawan	Rp 10.560.494	Rp -	Rp 4.000.000
15	Rupa-rupa Biaya Umum Lainnya	Rp -	Rp 4.279.846	Rp 1.750.000
	Jumlah	**Rp 477.147.136**	**Rp 430.084.214**	**Rp 408.280.323**
	TOTAL BIAYA TIDAK LANGSUNG	**Rp 936.688.079**	**Rp 742.405.335**	**Rp 962.703.574**

4 Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan lain-lain Per Desember 2024 sebesar **Rp. 129.514.354** merupakan pendapatan Lain-Lain di luar usaha dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp.)	31 Desember 2023 (Rp.)	RKA Desember 2024 (Rp.)
1	Bunga Deposito	Rp -	Rp 11.970.000	Rp -
2	Jasa Giro	Rp 13.496.522	Rp 7.868.821	Rp 13.680.000
3	Lain-lain	Rp 116.017.832	Rp 84.101.124	Rp 115.000.000
TOTAL PENDAPATAN LAIN - LAIN		**Rp 129.514.354**	**Rp 103.939.945**	**Rp 128.680.000**

5 Biaya Lain-Lain

Biaya Lain-lain Per Desember 2024 sebesar **Rp. 56.251.399** merupakan Biaya Lain-Lain diluar usaha dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp.)	31 Desember 2023 (Rp.)	RKA Desember 2024 (Rp.)
1	Biaya Pajak dan Administrasi Bank	Rp 1.770.034	Rp 2.538.528	Rp 14.051.788
2	Kerugian Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -
3	Rupa-rupa Biaya Lainnya	Rp 53.006.365	Rp -	Rp 46.500.000
4	Denda pajak	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah	Rp 54.776.399	Rp 2.538.528	Rp 60.551.788
5	Biaya Pengembangan	Rp 1.500.000	Rp 84.057.479	Rp -
TOTAL BIAYA LAIN - LAIN		**Rp 56.276.399**	**Rp 86.596.007**	**Rp 60.551.788**

Bogor, Januari 2024
Direktur
PTP Kota Bogor

PERUMDA TRANSPORTASI PAKUAN

Rachma Nissa Fadliya, SE.,Ak., M.Si

PERUSAHAAN UMUM DAERAH TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR

Laporan KAS Bulan Desember 2024

TANGGAL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal			**Rp 33.244.407**
				Rp 33.244.407
01/12/2024	Gosend kunci		Rp 18.500	Rp 33.225.907
	Pendapatan bellanova	Rp 2.328.000		Rp 35.553.907
	Solar Belanova 7511		Rp 300.000	Rp 35.253.907
	Solar Belanova 7511		Rp 300.000	Rp 34.953.907
	Solar Belanova 7529		Rp 300.000	Rp 34.653.907
	Solar Belanova 7529		Rp 250.000	Rp 34.403.907
	Biaya keamanan belanova		Rp 700.000	Rp 33.703.907
	Biaya kebersihan shelter		Rp 2.500.000	Rp 31.203.907
	jamuan rapat esb restauratr bertemu fajari (sempur)		Rp 314.974	Rp 30.888.933
02/12/2024	Pendapatan bellanova	Rp 2.268.000		Rp 33.156.933
	Solar Belanova 7511		Rp 300.000	Rp 32.856.933
	Solar Belanova 7511		Rp 300.000	Rp 32.556.933
	Solar Belanova 7529		Rp 300.000	Rp 32.256.933
	Solar Belanova 7529		Rp 300.000	Rp 31.956.933
	Tol Belanova 7215		Rp 250.000	Rp 31.706.933
	Tol Belanova 7223		Rp 250.000	Rp 31.456.933
	Gocar dari kantor ke kesatuan		Rp 18.500	Rp 31.438.433
	Gocar dari kesatuan ke kantor		Rp 23.500	Rp 31.414.933
	Pendapatan baranangsiang - cibubur	Rp 80.000		Rp 31.494.933
	Pendapatan bubulak - cibubur 1	Rp 172.000		Rp 31.666.933
	solar 7526 cibubur		Rp 350.000	Rp 31.316.933
	Solar cibubur 7530		Rp 400.000	Rp 30.916.933
	Tol cibubur 2395		Rp 500.000	Rp 30.416.933
	Tol cibubur 6918		Rp 550.000	Rp 29.866.933
	BBM Kendaraan Dinas		Rp 20.000	Rp 29.846.933
03/12/2024	Keperluan rumah tangga		Rp 65.000	Rp 29.781.933
	Jamuan rapat		Rp 180.000	Rp 29.601.933
	air minum kantor		Rp 474.000	Rp 29.127.933
	BBM Kendaraan Dinas		Rp 250.000	Rp 28.877.933
	seal roda depan dan belakang		Rp 250.000	Rp 28.627.933
	Pendapatan bellanova	Rp 2.400.000		Rp 31.027.933
	Solar Belanova 7511		Rp 250.000	Rp 30.777.933
	Solar Belanova 7511		Rp 300.000	Rp 30.477.933
	Solar Belanova 7529		Rp 300.000	Rp 30.177.933
	Solar Belanova 7529		Rp 300.000	Rp 29.877.933
	Tol Belanova 7215		Rp 200.000	Rp 29.677.933
	Tol Belanova 7223		Rp 250.000	Rp 29.427.933
	Pendapatan baranangsiang - cibubur	Rp 120.000		Rp 29.547.933
	Pendapatan bubulak - cibubur 1	Rp 236.000		Rp 29.783.933

	solar 7526 cibubur		Rp 300.000	Rp 29.483.933
	Solar cibubur 7530		Rp 300.000	Rp 29.183.933
04/12/2024	BBM Kendaraan Dinas		Rp 20.000	Rp 29.163.933
	Jamuan rapat koordinasi perparkiran		Rp 445.500	Rp 28.718.433
	BBM Kendaraan Dinas		Rp 200.000	Rp 28.518.433
	parkir dan tol		Rp 32.000	Rp 28.486.433
	pos pimpinan kadishub		Rp 1.500.000	Rp 26.986.433
	BBM Kendaraan Dinas		Rp 25.000	Rp 26.961.433
	Pendapatan bellanova	Rp 1.680.000		Rp 28.641.433
	Solar Belanova 7511		Rp 250.000	Rp 28.391.433
	Solar Belanova 7511		Rp 300.000	Rp 28.091.433
	Solar Belanova 7529		Rp 300.000	Rp 27.791.433
	Solar Belanova 7509		Rp 400.000	Rp 27.391.433
	Tol Belanova 7215		Rp 200.000	Rp 27.191.433
	Tol Belanova 7223		Rp 200.000	Rp 26.991.433
	Pendapatan baranangsiang - cibubur	Rp 100.000		Rp 27.091.433
	Pendapatan bubulak - cibubur 1	Rp 208.000		Rp 27.299.433
	solar 7526 cibubur		Rp 350.000	Rp 26.949.433
	Solar cibubur 7530		Rp 400.000	Rp 26.549.433
	Tol cibubur 2395		Rp 400.000	Rp 26.149.433
	alat kebersihan		Rp 61.200	Rp 26.088.233
	water pump		Rp 522.500	Rp 25.565.733
05/12/2024	BBM Kendaraan Dinas		Rp 20.000	Rp 25.545.733
	Biaya kebersihan kantor		Rp 300.000	Rp 25.245.733
	member card	Rp 270.000		Rp 25.515.733
	Biaya keperluan rumah tangga		Rp 258.400	Rp 25.257.333
	kertas		Rp 99.000	Rp 25.158.333
	kunci pintu bis (door Lock)		Rp 498.800	Rp 24.659.533
	Pendapatan bellanova	Rp 2.184.000		Rp 26.843.533
	Solar Belanova 7511		Rp 300.000	Rp 26.543.533
	Solar Belanova 7511		Rp 300.000	Rp 26.243.533
	Solar Belanova 7509		Rp 250.000	Rp 25.993.533
	Solar Belanova 7509		Rp 300.000	Rp 25.693.533
	Tol Belanova 7215		Rp 500.000	Rp 25.193.533
	Tol Belanova 7223		Rp 400.000	Rp 24.793.533
	Pendapatan baranangsiang - cibubur	Rp 120.000		Rp 24.913.533
	Pendapatan bubulak - cibubur 1	Rp 152.000		Rp 25.065.533
	solar 7526 cibubur		Rp 300.000	Rp 24.765.533
	Solar cibubur 7530		Rp 300.000	Rp 24.465.533
	Jamuan rapat dengan PT DBI		Rp 106.000	Rp 24.359.533
	Pulsa Cibubur		Rp 52.000	Rp 24.307.533
06/12/2024	Pendapatan bellanova	Rp 2.292.000		Rp 26.599.533
	Solar Belanova 7509		Rp 250.000	Rp 26.349.533
	Solar Belanova 7509		Rp 300.000	Rp 26.049.533
	Solar Belanova 7511		Rp 250.000	Rp 25.799.533
	Solar Belanova 7511		Rp 300.000	Rp 25.499.533
	SPPD Ole Suites Hotel		Rp 930.000	Rp 24.569.533

	Gaji cibubur		Rp 2.800.000	Rp 21.769.533
	Pendapatan baranangsiang - cibubur	Rp 100.000		Rp 21.869.533
	Pendapatan bubulak - cibubur 1	Rp 72.000		Rp 21.941.533
	solar 7526 cibubur		Rp 350.000	Rp 21.591.533
	Solar cibubur 7530		Rp 400.000	Rp 21.191.533
	Internet		Rp 444.390	Rp 20.747.143
	Pam		Rp 234.300	Rp 20.512.843
	BPJS		Rp 3.746.550	Rp 16.766.293
	Bjb	Rp 28.167.740		Rp 44.934.033
	sealer hitam		Rp 175.586	Rp 44.758.447
07/12/2024	Gosend Dokumen		Rp 23.500	Rp 44.734.947
	Oli mesin		Rp 3.600.000	Rp 41.134.947
	Service bus 03		Rp 450.000	Rp 40.684.947
	Service bus dan ganti oli bus 02, 04		Rp 950.000	Rp 39.734.947
	Pengganti transport pengantaran bis		Rp 100.000	Rp 39.634.947
	TBA 0.5 mm		Rp 45.000	Rp 39.589.947
	Pendapatan bellanova	Rp 1.860.000		Rp 41.449.947
	Solar Belanova 7509		Rp 250.000	Rp 41.199.947
	Solar Belanova 7509		Rp 300.000	Rp 40.899.947
	Solar Belanova 7511		Rp 300.000	Rp 40.599.947
	Solar Belanova 7511		Rp 300.000	Rp 40.299.947
08/12/2024	Pendapatan bellanova	Rp 1.680.000		Rp 41.979.947
	Solar Belanova 7509		Rp 250.000	Rp 41.729.947
	Solar Belanova 7509		Rp 300.000	Rp 41.429.947
	Solar Belanova 7511		Rp 300.000	Rp 41.129.947
	Solar Belanova 7511		Rp 300.000	Rp 40.829.947
	Tol Belanova 7215		Rp 250.000	Rp 40.579.947
	Tol Belanova 7223		Rp 250.000	Rp 40.329.947
09/12/2024	Pendapatan bellanova	Rp 2.388.000		Rp 42.717.947
	Solar Belanova 7509		Rp 300.000	Rp 42.417.947
	Solar Belanova 7509		Rp 250.000	Rp 42.167.947
	Solar Belanova 7511		Rp 300.000	Rp 41.867.947
	Solar Belanova 7511		Rp 300.000	Rp 41.567.947
	Tol Belanova 7215		Rp 250.000	Rp 41.317.947
	Tol Belanova 7223		Rp 200.000	Rp 41.117.947
	Ban Ori		Rp 4.650.000	Rp 36.467.947
	Ban set		Rp 1.850.000	Rp 34.617.947
	Penggantian transport		Rp 100.000	Rp 34.517.947
	Pendapatan baranangsiang - cibubur	Rp 180.000		Rp 34.697.947
	Pendapatan bubulak - cibubur 1	Rp 112.000		Rp 34.809.947
	solar 7526 cibubur		Rp 350.000	Rp 34.459.947
	Solar cibubur 7530		Rp 400.000	Rp 34.059.947
	Tol cibubur 2395		Rp 500.000	Rp 33.559.947
	Tol cibubur 6918		Rp 550.000	Rp 33.009.947
12/10/2024	bogor daily		Rp 1.500.000	Rp 31.509.947
	SPPD Trans Luxury Hotel		Rp 1.861.500	Rp 29.648.447

	Pendapatan baranangsiang - cibubur	Rp 120.000		Rp 29.768.447
	Pendapatan bubulak - cibubur 1	Rp 144.000		Rp 29.912.447
	solar 7526 cibubur		Rp 300.000	Rp 29.612.447
	Solar cibubur 7530		Rp 300.000	Rp 29.312.447
	Pendapatan bellanova	Rp 1.716.000		Rp 31.028.447
	Solar Belanova 7509		Rp 300.000	Rp 30.728.447
	Solar Belanova 7509		Rp 300.000	Rp 30.428.447
	Solar Belanova 7511		Rp 300.000	Rp 30.128.447
	Solar Belanova 7511		Rp 250.000	Rp 29.878.447
	Tol Belanova 7215		Rp 500.000	Rp 29.378.447
	Tol Belanova 7223		Rp 400.000	Rp 28.978.447
11/12/2024	Pendapatan baranangsiang - cibubur	Rp 200.000		Rp 29.178.447
	Pendapatan bubulak - cibubur 1	Rp 72.000		Rp 29.250.447
	solar 7526 cibubur		Rp 350.000	Rp 28.900.447
	Solar cibubur 7530		Rp 350.000	Rp 28.550.447
	Tol cibubur 2395		Rp 400.000	Rp 28.150.447
	Pendapatan bellanova	Rp 2.016.000		Rp 30.166.447
	Solar Belanova 7509		Rp 250.000	Rp 29.916.447
	Solar Belanova 7509		Rp 300.000	Rp 29.616.447
	Solar Belanova 7511		Rp 300.000	Rp 29.316.447
	Solar Belanova 7511		Rp 300.000	Rp 29.016.447
	Rapat paparan ekspos beauty kontes		Rp 134.750	Rp 28.881.697
	Setor BJB		Rp 445.000	Rp 28.436.697
12/12/2024	forum bumd		Rp 1.500.000	Rp 26.936.697
	jamuan lembur		Rp 97.000	Rp 26.839.697
	Pendapatan baranangsiang - cibubur	Rp 180.000		Rp 27.019.697
	Pendapatan bubulak - cibubur 1	Rp 72.000		Rp 27.091.697
	solar 7526 cibubur		Rp 300.000	Rp 26.791.697
	Solar cibubur 7530		Rp 300.000	Rp 26.491.697
	Pendapatan bellanova	Rp 1.752.000		Rp 28.243.697
	Solar Belanova 7509		Rp 300.000	Rp 27.943.697
	Solar Belanova 7509		Rp 300.000	Rp 27.643.697
	Solar Belanova 7511		Rp 300.000	Rp 27.343.697
	Solar Belanova 7511		Rp 250.000	Rp 27.093.697
	Tol Belanova 7215		Rp 200.000	Rp 26.893.697
	Tol Belanova 7223		Rp 200.000	Rp 26.693.697
	alat kebersihan		Rp 192.500	Rp 26.501.197
	air minum lapangan		Rp 86.000	Rp 26.415.197
	Biaya kebersihan kantor		Rp 300.000	Rp 26.115.197
13/12/24	Gaji cibubur		Rp 2.800.000	Rp 23.315.197
	jasa raharja		Rp 3.902.500	Rp 19.412.697
	Keperluan rumah tangga		Rp 159.000	Rp 19.253.697
	alat kebersihan		Rp 25.000	Rp 19.228.697
	BBM Kendaraan Dinas		Rp 200.000	Rp 19.028.697
	Mouse		Rp 409.920	Rp 18.618.777
	Jamuan rapat		Rp 28.750	Rp 18.590.027

	Pendapatan baranangsiang - cibubur	Rp 100.000		Rp	18.690.027
	Pendapatan bubulak - cibubur 1	Rp 20.000		Rp	18.710.027
	solar 7526 cibubur		Rp 350.000	Rp	18.360.027
	Solar cibubur 7530		Rp 400.000	Rp	17.960.027
	Pendapatan bellanova	Rp 2.772.000		Rp	20.732.027
	Solar Belanova 7509		Rp 250.000	Rp	20.482.027
	Solar Belanova 7509		Rp 300.000	Rp	20.182.027
	Solar Belanova 7511		Rp 300.000	Rp	19.882.027
	Solar Belanova 7511		Rp 300.000	Rp	19.582.027
	Tol Belanova 7215		Rp 700.000	Rp	18.882.027
	Tol Belanova 7223		Rp 700.000	Rp	18.182.027
	bjb	Rp 14.409.920		Rp	32.591.947
14/12/24	Pendapatan bellanova	Rp 1.788.000		Rp	34.379.947
	Solar Belanova 7509		Rp 300.000	Rp	34.079.947
	Solar Belanova 7509		Rp 250.000	Rp	33.829.947
	Solar Belanova 7511		Rp 300.000	Rp	33.529.947
	Solar Belanova 7511		Rp 250.000	Rp	33.279.947
15/12/24	Pulsa belanova		Rp 102.000	Rp	33.177.947
	Kunci Slot kamar mandi lapangan		Rp 20.000	Rp	33.157.947
	Pendapatan bellanova	Rp 1.968.000		Rp	35.125.947
	Solar Belanova 7509		Rp 300.000	Rp	34.825.947
	Solar Belanova 7509		Rp 300.000	Rp	34.525.947
	Solar Belanova 7511		Rp 300.000	Rp	34.225.947
	Solar Belanova 7511		Rp 250.000	Rp	33.975.947
	STNK bus (6 bus)		Rp 4.528.500	Rp	29.447.447
16/12/24	thermal		Rp 181.236	Rp	29.266.211
	Pengganti transport		Rp 43.500	Rp	29.222.711
	rapat penandatanganan MOU		Rp 121.200	Rp	29.101.511
	rapat penandatanganan MOU		Rp 121.200	Rp	28.980.311
	kopi kenangan rapat MOU		Rp 118.200	Rp	28.862.111
	Thermal Forte		Rp 105.000	Rp	28.757.111
	kingpen		Rp 1.613.100	Rp	27.144.011
	Lampu kantor		Rp 152.000	Rp	26.992.011
	Baterai ABC untuk Mouse		Rp 18.000	Rp	26.974.011
	Pendapatan bellanova	Rp 2.304.000		Rp	29.278.011
	Solar Belanova 7509		Rp 300.000	Rp	28.978.011
	Solar Belanova 7509		Rp 300.000	Rp	28.678.011
	Solar Belanova 7511		Rp 250.000	Rp	28.428.011
	Solar Belanova 7511		Rp 300.000	Rp	28.128.011
	Tambah angin		Rp 10.000	Rp	28.118.011
	Pendapatan baranangsiang - cibubur	Rp 80.000		Rp	28.198.011
	Pendapatan bubulak - cibubur 1	Rp 40.000		Rp	28.238.011
	solar 7526 cibubur		Rp 400.000	Rp	27.838.011
	Solar cibubur 7530		Rp 400.000	Rp	27.438.011
	Tol Cibubur 6918		Rp 600.000	Rp	26.838.011
	Tol Cibubur 2395		Rp 500.000	Rp	26.338.011
17/12/24	pengganti transport gebyar pajak		Rp 12.500	Rp	26.325.511
	Laundry peralatan solat		Rp 15.000	Rp	26.310.511

	Pendapatan bellanova	Rp 2.004.000		Rp 28.314.511
	Solar Belanova 7509		Rp 300.000	Rp 28.014.511
	Solar Belanova 7509		Rp 300.000	Rp 27.714.511
	Solar Belanova 7527		Rp 250.000	Rp 27.464.511
	Solar Belanova 7527		Rp 300.000	Rp 27.164.511
	Tol Belanova 7215		Rp 300.000	Rp 26.864.511
	Tol Belanova 7223		Rp 200.000	Rp 26.664.511
	accu		Rp 850.000	Rp 25.814.511
	Pendapatan baranangsiang - cibubur	Rp 160.000		Rp 25.974.511
	Pendapatan bubulak - cibubur 1	Rp 120.000		Rp 26.094.511
	solar 7526 cibubur		Rp 300.000	Rp 25.794.511
	Solar cibubur 7530		Rp 300.000	Rp 25.494.511
	Rapat pembahasan raperwali		Rp 105.750	Rp 25.388.761
	ATK		Rp 68.900	Rp 25.319.861
	Sumbangan Pihak Luar PC PMII		Rp 250.000	Rp 25.069.861
18/12/24	BBM Kendaraan dinas		Rp 25.000	Rp 25.044.861
	Pendapatan bellanova	Rp 2.256.000		Rp 27.300.861
	Solar Belanova 7527		Rp 250.000	Rp 27.050.861
	Solar Belanova 7509		Rp 300.000	Rp 26.750.861
	Solar Belanova 7527		Rp 300.000	Rp 26.450.861
	Solar Belanova 7527		Rp 300.000	Rp 26.150.861
	Tol Belanova 7215		Rp 200.000	Rp 25.950.861
	Tol Belanova 7223		Rp 200.000	Rp 25.750.861
	Pendapatan baranangsiang - cibubur	Rp 140.000		Rp 25.890.861
	Pendapatan bubulak - cibubur 1	Rp 152.000		Rp 26.042.861
	solar 7526 cibubur		Rp 350.000	Rp 25.692.861
	Solar cibubur 7530		Rp 400.000	Rp 25.292.861
	Tol Cibubur 2395		Rp 400.000	Rp 24.892.861
19/12/24	Pengganti transport Sosialisasi RPJPD		Rp 37.000	Rp 24.855.861
	sumbangan pihak luar amil zakat		Rp 500.000	Rp 24.355.861
	pulsa ijal		Rp 52.000	Rp 24.303.861
	survei anak pkl jakarta		Rp 219.000	Rp 24.084.861
	SPPD BPTJ Grand Orchard		Rp 480.000	Rp 23.604.861
	Pendapatan bellanova	Rp 2.172.000		Rp 25.776.861
	Solar Belanova 7509		Rp 250.000	Rp 25.526.861
	Solar Belanova 7509		Rp 300.000	Rp 25.226.861
	Solar Belanova 7527		Rp 300.000	Rp 24.926.861
	Solar Belanova 7527		Rp 300.000	Rp 24.626.861
	Tol Belanova 7215		Rp 200.000	Rp 24.426.861
	Tol Belanova 7223		Rp 200.000	Rp 24.226.861
	Pendapatan baranangsiang - cibubur	Rp 40.000		Rp 24.266.861
	Pendapatan bubulak - cibubur 1	Rp 152.000		Rp 24.418.861
	solar 7526 cibubur		Rp 300.000	Rp 24.118.861
	Solar cibubur 7530		Rp 300.000	Rp 23.818.861
	Vulkanisir		Rp 2.468.000	Rp 21.350.861
	filter solar atas		Rp 200.000	Rp 21.150.861

	Filter solar dkk		Rp 500.000	Rp 20.650.861
	aer accu		Rp 120.000	Rp 20.530.861
	service bus07, 08		Rp 650.000	Rp 19.880.861
	service bis 02 dan 03		Rp 450.000	Rp 19.430.861
	Pengganti Transport pengantaran bis		Rp 100.000	Rp 19.330.861
	Lembur pembuatan lampiran PKS dan Penyusunan RKA		Rp 111.000	Rp 19.219.861
	Biaya kebersihan kantor		Rp 300.000	Rp 18.919.861
	BBM kendaraan dinas mobil		Rp 250.000	Rp 18.669.861
20/12/24	Gaji cibubur		Rp 2.800.000	Rp 15.869.861
	Pendapatan baranangsiang - cibubur	Rp 100.000		Rp 15.969.861
	Pendapatan bubulak - cibubur 1	Rp 20.000		Rp 15.989.861
	solar 7526 cibubur		Rp 400.000	Rp 15.589.861
	Solar cibubur 7530		Rp 400.000	Rp 15.189.861
	service bus 07, 08		Rp 650.000	Rp 14.539.861
	Pengganti Transport pengantaran bis		Rp 100.000	Rp 14.439.861
	bjb	Rp 15.854.287		Rp 30.294.148
	Pendapatan bellanova	Rp 2.124.000		Rp 32.418.148
	Solar Belanova 7509		Rp 250.000	Rp 32.168.148
	Solar Belanova 7509		Rp 300.000	Rp 31.868.148
	Solar Belanova 7511		Rp 250.000	Rp 31.618.148
	Solar Belanova 7511		Rp 300.000	Rp 31.318.148
	Tol Belanova 7215		Rp 600.000	Rp 30.718.148
	Tol Belanova 7223		Rp 600.000	Rp 30.118.148
21/12/24	Pendapatan bellanova	Rp 2.484.000		Rp 32.602.148
	Solar Belanova 7509		Rp 300.000	Rp 32.302.148
	Solar Belanova 7509		Rp 300.000	Rp 32.002.148
	Solar Belanova 7511		Rp 250.000	Rp 31.752.148
	Solar Belanova 7511		Rp 300.000	Rp 31.452.148
22/12/24	Pendapatan bellanova	Rp 1.788.000		Rp 33.240.148
	Solar Belanova 7509		Rp 250.000	Rp 32.990.148
	Solar Belanova 7509		Rp 300.000	Rp 32.690.148
	Solar Belanova 7511		Rp 300.000	Rp 32.390.148
	Solar Belanova 7511		Rp 300.000	Rp 32.090.148
23/12/24	Pendapatan baranangsiang - cibubur	Rp 80.000		Rp 32.170.148
	Pendapatan bubulak - cibubur 1	Rp 260.000		Rp 32.430.148
	solar 7526 cibubur		Rp 350.000	Rp 32.080.148
	Solar cibubur 7530		Rp 400.000	Rp 31.680.148
	Tol Cibubur 2395		Rp 500.000	Rp 31.180.148
	Tol Cibubur 6918		Rp 300.000	Rp 30.880.148
	Pendapatan bellanova	Rp 2.064.000		Rp 32.944.148
	Solar Belanova 7509		Rp 300.000	Rp 32.644.148
	Solar Belanova 7509		Rp 300.000	Rp 32.344.148
	Solar Belanova 7511		Rp 250.000	Rp 32.094.148
	Solar Belanova 7511		Rp 300.000	Rp 31.794.148
	Tol Belanova 7215		Rp 250.000	Rp 31.544.148

	Tol Belanova 7223			Rp	200.000	Rp 31.344.148
	Keperluan rumah tangga			Rp	249.800	Rp 31.094.348
	Keperluan rumah tangga			Rp	78.500	Rp 31.015.848
24/12/24	Print laporan TW III			Rp	175.500	Rp 30.840.348
	Biaya kebersihan kantor			Rp	300.000	Rp 30.540.348
	air minum kantor			Rp	266.000	Rp 30.274.348
	Pendapatan baranangsiang - cibubur	Rp	100.000			Rp 30.374.348
	Pendapatan bubulak - cibubur 1	Rp	60.000			Rp 30.434.348
	solar 7526 cibubur			Rp	300.000	Rp 30.134.348
	Solar cibubur 7530			Rp	300.000	Rp 29.834.348
	Pendapatan bellanova	Rp	1.920.000			Rp 31.754.348
	Solar Belanova 7509			Rp	250.000	Rp 31.504.348
	Solar Belanova 7509			Rp	300.000	Rp 31.204.348
	Solar Belanova 7511			Rp	300.000	Rp 30.904.348
	Solar Belanova 7511			Rp	300.000	Rp 30.604.348
	Tol Belanova 7215			Rp	200.000	Rp 30.404.348
	Tol Belanova 7223			Rp	200.000	Rp 30.204.348
	PPh 21			Rp	29.573	Rp 30.174.775
25/12/24	Transport Natal			Rp	1.125.000	Rp 29.049.775
	Pendapatan bellanova	Rp	2.016.000			Rp 31.065.775
	Solar Belanova 7509			Rp	250.000	Rp 30.815.775
	Solar Belanova 7509			Rp	300.000	Rp 30.515.775
	Solar Belanova 7511			Rp	300.000	Rp 30.215.775
	Solar Belanova 7511			Rp	300.000	Rp 29.915.775
	Tol Belanova 7215			Rp	200.000	Rp 29.715.775
	Tol Belanova 7223			Rp	200.000	Rp 29.515.775
26/12/24	Insentif Lembur			Rp	150.000	Rp 29.365.775
	Pendapatan bellanova	Rp	2.016.000			Rp 31.381.775
	Solar Belanova 7509			Rp	250.000	Rp 31.131.775
	Solar Belanova 7509			Rp	250.000	Rp 30.881.775
	Solar Belanova 7511			Rp	300.000	Rp 30.581.775
	Solar Belanova 7511			Rp	300.000	Rp 30.281.775
	Tol Belanova 7215			Rp	100.000	Rp 30.181.775
27/12/24	By pelatihan pengemudi			Rp	2.466.287	Rp 27.715.488
	gaji cibubur			Rp	1.680.000	Rp 26.035.488
	sumbangan pihak luar PMII			Rp	500.000	Rp 25.535.488
	BJb	Rp	12.888.500			Rp 38.423.988
	Pendapatan baranangsiang - cibubur	Rp	180.000			Rp 38.603.988
	Pendapatan bubulak - cibubur 1	Rp	20.000			Rp 38.623.988
	solar 7526 cibubur			Rp	400.000	Rp 38.223.988
	Solar cibubur 7530			Rp	400.000	Rp 37.823.988
	Pendapatan bellanova	Rp	1.980.000			Rp 39.803.988
	Solar Belanova 7509			Rp	250.000	Rp 39.553.988
	Solar Belanova 7509			Rp	300.000	Rp 39.253.988
	Solar Belanova 7511			Rp	250.000	Rp 39.003.988
	Solar Belanova 7511			Rp	300.000	Rp 38.703.988
	Tol Belanova 7215			Rp	700.000	Rp 38.003.988
	Tol Belanova 7223			Rp	700.000	Rp 37.303.988

	By. Adm top up e toll		Rp 1.000	Rp 37.302.988
	Baterai ABC untuk lapangan		Rp 15.500	Rp 37.287.488
28/12/24	Pendapatan bellanova	Rp 2.052.000		Rp 39.339.488
	Solar Belanova 7509		Rp 250.000	Rp 39.089.488
	Solar Belanova 7509		Rp 300.000	Rp 38.789.488
	Solar Belanova 7511		Rp 250.000	Rp 38.539.488
	Solar Belanova 7511		Rp 300.000	Rp 38.239.488
	Service Bus 03 dan 04		Rp 400.000	Rp 37.839.488
	Service Bus 02 dan 09		Rp 850.000	Rp 36.989.488
	Pengganti transport		Rp 100.000	Rp 36.889.488
	Pompa solar		Rp 396.500	Rp 36.492.988
29/12/24	Pendapatan bellanova	Rp 1.752.000		Rp 38.244.988
	Solar Belanova 7509		Rp 250.000	Rp 37.994.988
	Solar Belanova 7509		Rp 300.000	Rp 37.694.988
	Solar Belanova 7511		Rp 250.000	Rp 37.444.988
	Solar Belanova 7511		Rp 300.000	Rp 37.144.988
30/12/24	Pendapatan bellanova	Rp 1.896.000		Rp 39.040.988
	Solar Belanova 7509		Rp 250.000	Rp 38.790.988
	Solar Belanova 7509		Rp 300.000	Rp 38.490.988
	Solar Belanova 7511		Rp 250.000	Rp 38.240.988
	Solar Belanova 7511		Rp 300.000	Rp 37.940.988
	Tol Belanova 7215		Rp 700.000	Rp 37.240.988
	Tol Belanova 7223		Rp 600.000	Rp 36.640.988
	Pendapatan baranangsiang - cibubur	Rp 280.000		Rp 36.920.988
	Pendapatan bubulak - cibubur 1	Rp 96.000		Rp 37.016.988
	solar 7526 cibubur		Rp 350.000	Rp 36.666.988
	Solar cibubur 7530		Rp 400.000	Rp 36.266.988
	Tol Cibubur 2395		Rp 498.500	Rp 35.768.488
	Tol Cibubur 6918		Rp 450.000	Rp 35.318.488
	By administrasi top up		Rp 1.500	Rp 35.316.988
	Air Minum lapangan		Rp 99.500	Rp 35.217.488
	Laundry		Rp 15.000	Rp 35.202.488
31/12/24	Gembok tutup aki kanan kiri		Rp 40.000	Rp 35.162.488
	piket tahun baru		Rp 900.000	Rp 34.262.488
	Pendapatan bellanova	Rp 2.364.000		Rp 36.626.488
	Solar Belanova 7509		Rp 300.000	Rp 36.326.488
	Solar Belanova 7509		Rp 300.000	Rp 36.026.488
	Solar Belanova 7511		Rp 250.000	Rp 35.776.488
	Solar Belanova 7511		Rp 300.000	Rp 35.476.488
	Pendapatan baranangsiang - cibubur	Rp 80.000		Rp 35.556.488
	Pendapatan bubulak - cibubur 1	Rp 80.000		Rp 35.636.488
	solar 7526 cibubur		Rp 300.000	Rp 35.336.488
	Solar cibubur 7530		Rp 300.000	Rp 35.036.488
	Snack rapat pembahasan RKA		Rp 858.000	**Rp 34.178.488**
				Rp 34.178.488

bank bjb

Account Activity

Period	01 Dec 2024 - 31 Dec 2024	Alamat	JL KH ABDULLAH BIN NUH
Corporate	PERUMDA TRANSPORTASI PAKUAN		004/011
Account	0002703963001 - PERUMDA TRANSPORTASI		BUBULAK
Product	Giro Umum IDR		
Branch	0000 - KANTOR PUSAT OPERASI		
Currency	IDR		
Print Date	02 Jan 2025 09:20:02	Oleh	SANTI SITI SADIYAH

No	Posting Date	Effective Date	Narasi	Debit Transaction	Credit Transaction	Balance
1	01 Dec 2024	01 Dec 2024	20241130BNINIDJA010O0193565160 TRF DARI BNINIDJA/KODJARI TATA ANGK Profesional Fee Bulan Nov 2024 Value Date 30112024		35,295,000.00	106,155,527.00
2	01 Dec 2024	01 Dec 2024	20241130BNINIDJA010O0198134229 TRF DARI BNINIDJA/KODJARI TATA ANGK Pelatihan Pramudi Bulan Nov 2024 Value Date 30112024		10,000,000.00	116,155,527.00
3	01 Dec 2024	01 Dec 2024	TRF KE BCA MARSE HENDRA SA NOREK 0954099799	2,957,360.00		113,198,167.00
4	01 Dec 2024	01 Dec 2024	BY TRF KE BCA MARSE HENDRA SAPUTRA NOREK 0954099799	6,500.00		113,191,667.00
5	01 Dec 2024	01 Dec 2024	TRF KE SANTI SITI S NOREK 0127993947100 tabungan kary rek bank kota bogor	300,000.00		112,891,667.00
6	01 Dec 2024	01 Dec 2024	TRF KE BUDI KURNIAWAN NOREK 0146751342100 gai per nov 2024	3,283,530.00		109,608,137.00
7	01 Dec 2024	01 Dec 2024	TRF KE WINDI OKTAVIANI NOREK 0142419981101 gaji per nov 2024	4,054,413.00		105,553,724.00
8	01 Dec 2024	01 Dec 2024	TRF KE AGUNG SATRIA AN NOREK 0009283714100 gaji per nov 2024	4,054,413.00		101,499,311.00
9	01 Dec 2024	01 Dec 2024	TRF KE RISKA ANDRIYANT NOREK 0136946722100 Gaji per nov 2024	4,054,413.00		97,444,898.00
10	01 Dec 2024	01 Dec 2024	TRF KE SANTI SITI S NOREK 0127993947100 Gaji per nov 2024	4,531,066.00		92,913,832.00
11	01 Dec 2024	01 Dec 2024	TRF KE JANUAR SETIAWAN NOREK 0129410841102 Honor per nov 2024	4,531,066.00		88,382,766.00
12	01 Dec 2024	01 Dec 2024	TRF KE SANTI SITI S NOREK 0127993947100 rek perantara gaji direktur	5,864,720.00		82,518,046.00

No	Posting Date	Effective Date	Narasi	Debit Transaction	Credit Transaction	Balance
13	02 Dec 2024	02 Dec 2024	20241202BBBAIDJA010O9965017718 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241129 000000 Pe		1,406,088.00	83,924,134.00
14	02 Dec 2024	02 Dec 2024	20241202BBBAIDJA010O9965017762 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241130 000000 PD		1,322,676.00	85,246,810.00
15	02 Dec 2024	02 Dec 2024	20241202BBBAIDJA010O9965017788 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241129 000000 PD		1,870,812.00	87,117,622.00
16	02 Dec 2024	02 Dec 2024	20241202BBBAIDJA010O9965017947 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241130 000000 Pe		1,406,088.00	88,523,710.00
17	02 Dec 2024	02 Dec 2024	20241202SYCAIDJ1010O9901867804 TRF DARI SYCAIDJ1/DUDY MIHARDJA SE member Des		270,000.00	88,793,710.00
18	03 Dec 2024	03 Dec 2024	20241203BBBAIDJA010O9965230797 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241202 000000 PD		1,846,980.00	90,640,690.00
19	03 Dec 2024	03 Dec 2024	20241203BBBAIDJA010O9965230824 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241202 000000 Pe		1,668,240.00	92,308,930.00
20	03 Dec 2024	03 Dec 2024	TRF KE PERUMDA TRANSPO NOREK 0002703963001		1,628,520.00	93,937,450.00
21	03 Dec 2024	03 Dec 2024	TRF KE PERUMDA TRANSPO NOREK 0002703963001		1,267,068.00	95,204,518.00
22	04 Dec 2024	04 Dec 2024	20241204BBBAIDJA010O9965439093 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241203 000000 Pe		1,596,744.00	96,801,262.00
23	04 Dec 2024	04 Dec 2024	20241204BBBAIDJA010O9965439160 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241203 000000 PD		2,025,720.00	98,826,982.00
24	04 Dec 2024	04 Dec 2024	TRF KE PERUMDA TRANSPO NOREK 0002703963001		1,004,916.00	99,831,898.00
25	05 Dec 2024	05 Dec 2024	20241205BBBAIDJA010O9965642853 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241201 000000 Pe		1,000,944.00	100,832,842.00
26	05 Dec 2024	05 Dec 2024	20241205BBBAIDJA010O9965642854 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241201 000000 PD		1,346,508.00	102,179,350.00
27	05 Dec 2024	05 Dec 2024	20241205BBBAIDJA010O9965642980 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241204 000000 PD		1,858,896.00	104,038,246.00
28	05 Dec 2024	05 Dec 2024	20241205BBBAIDJA010O9965643028 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241204 000000 Pe		1,549,080.00	105,587,326.00
29	05 Dec 2024	05 Dec 2024	TRF KE PERUMDA TRANSPO NOREK 0002703963001		1,137,978.00	106,725,304.00

No	Posting Date	Effective Date	Narasi	Debit Transaction	Credit Transaction	Balance
30	06 Dec 2024	06 Dec 2024	TRF KE FANI DEVIANTI NOREK 0132636532100 Honor 29 Nov sd 05 Desember 2024	759,211.00		105,966,093.00
31	06 Dec 2024	06 Dec 2024	TRF KE TEDI SUTIANDI NOREK 0132637601100 Honor 29 Nov sd 05 Desember 2024	733,657.00		105,232,436.00
32	06 Dec 2024	06 Dec 2024	TRF KE AGUNG TOPAN NOREK 0132634653100 Honor 29 Nov sd 05 Desember 2024	728,161.00		104,504,275.00
33	06 Dec 2024	06 Dec 2024	TRF KE ASTY DAMAYANTI NOREK 0132636842100 Honor 29 Nov sd 05 Desember 2024	624,295.00		103,879,980.00
34	06 Dec 2024	06 Dec 2024	TRF KE MELIYANA NOREK 0132637210100 Honor 29 Nov sd 05 Desember 2024	621,273.00		103,258,707.00
35	06 Dec 2024	06 Dec 2024	TRF KE YUDI ARDIYANSYA NOREK 0132638039101 Honor 29 Nov sd 05 Desember 2024	932,267.00		102,326,440.00
36	06 Dec 2024	06 Dec 2024	TRF KE FANI DEVIANTI NOREK 0132636532100 Honor 29 Nov sd 05 Desember 2024	900,887.00		101,425,553.00
37	06 Dec 2024	06 Dec 2024	TRF KE APIT NOREK 0132638942100 Honor 29 Nov sd 05 Desember 2024	894,139.00		100,531,414.00
38	06 Dec 2024	06 Dec 2024	TRF KE FANI DEVIANTI NOREK 0132636532100 Honor 29 Nov sd 05 Desember 2024	766,598.00		99,764,816.00
39	06 Dec 2024	06 Dec 2024	TRF KE ENDANG NOREK 0132638535100 Honor 29 Nov sd 05 Desember 2024	762,886.00		99,001,930.00
40	06 Dec 2024	06 Dec 2024	20241206BBBAIDJA010O9965863304 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241205 000000 PD		2,025,720.00	101,027,650.00
41	06 Dec 2024	06 Dec 2024	20241206BBBAIDJA010O9965863374 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241205 000000 Pe		1,489,500.00	102,517,150.00
42	06 Dec 2024	06 Dec 2024	TRF KE JANUAR SETIAWAN NOREK 0129410841102 rek perantara	28,167,740.00		74,349,410.00
43	06 Dec 2024	06 Dec 2024	20241206SUNIIDJA010O0243571215 TRF DARI SUNIIDJA/LISNA FLORENTINA member		540,000.00	74,889,410.00
44	06 Dec 2024	06 Dec 2024	TRF KE PERUMDA TRANSPO NOREK 0002703963001		1,342,536.00	76,231,946.00
45	09 Dec 2024	09 Dec 2024	20241209BBBAIDJA010O9965368191 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241206 000000 PD		2,061,468.00	78,293,414.00
46	09 Dec 2024	09 Dec 2024	20241209BBBAIDJA010O9965368192 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241206 000000 Pe		1,394,172.00	79,687,586.00

No	Posting Date	Effective Date	Narasi	Debit Transaction	Credit Transaction	Balance
47	09 Dec 2024	09 Dec 2024	20241209BBBAIDJA010O9965368289 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241207 000000 PD		1,537,164.00	81,224,750.00
48	09 Dec 2024	09 Dec 2024	20241209BBBAIDJA010O9965368365 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241207 000000 Pe		1,084,356.00	82,309,106.00
49	09 Dec 2024	09 Dec 2024	20241209BBBAIDJA010O9965368426 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241208 000000 PD		1,143,936.00	83,453,042.00
50	09 Dec 2024	09 Dec 2024	20241209BBBAIDJA010O9965368521 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241208 000000 Pe		905,616.00	84,358,658.00
51	10 Dec 2024	10 Dec 2024	TRF KE PERUMDA TRANSPO NOREK 0002703963001 Value Date 09122024		1,163,796.00	85,522,454.00
52	10 Dec 2024	10 Dec 2024	20241210BBBAIDJA010O9965620827 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241209 000000 Pe		1,286,928.00	86,809,382.00
53	10 Dec 2024	10 Dec 2024	20241210BBBAIDJA010O9965620870 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241209 000000 PD		1,703,988.00	88,513,370.00
54	11 Dec 2024	11 Dec 2024	TRF KE PERUMDA TRANSPO NOREK 0002703963001 Value Date 10122024		1,171,740.00	89,685,110.00
55	11 Dec 2024	11 Dec 2024	0013-800461-360/K751-0013 R AMELIA GITA R AMELIA GITA		445,000.00	90,130,110.00
56	11 Dec 2024	11 Dec 2024	20241211BBBAIDJA010O9965820418 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241210 000000 PD		1,906,560.00	92,036,670.00
57	11 Dec 2024	11 Dec 2024	20241211BBBAIDJA010O9965820450 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241210 000000 Pe		1,394,172.00	93,430,842.00
58	12 Dec 2024	12 Dec 2024	TRF KE PERUMDA TRANSPO NOREK 0002703963001 Value Date 11122024		1,155,852.00	94,586,694.00
59	12 Dec 2024	12 Dec 2024	20241212BBBAIDJA010O9965001826 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241211 000000 Pe		1,227,348.00	95,814,042.00
60	12 Dec 2024	12 Dec 2024	20241212BBBAIDJA010O9965001858 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241211 000000 PD		1,846,980.00	97,661,022.00
61	13 Dec 2024	13 Dec 2024	TRF KE PERUMDA TRANSPO NOREK 0002703963001 Value Date 12122024		846,036.00	98,507,058.00
62	13 Dec 2024	13 Dec 2024	20241213BBBAIDJA010O9965218492 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241212 000000 Pe		1,382,256.00	99,889,314.00
63	13 Dec 2024	13 Dec 2024	20241213BBBAIDJA010O9965218513 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241212 000000 PD		1,966,140.00	101,855,454.00

No	Posting Date	Effective Date	Narasi	Debit Transaction	Credit Transaction	Balance
47	09 Dec 2024	09 Dec 2024	20241209BBBAIDJA010O9965368289 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241207 000000 PD		1,537,164.00	81,224,750.00
48	09 Dec 2024	09 Dec 2024	20241209BBBAIDJA010O9965368365 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241207 000000 Pe		1,084,356.00	82,309,106.00
49	09 Dec 2024	09 Dec 2024	20241209BBBAIDJA010O9965368426 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241208 000000 PD		1,143,936.00	83,453,042.00
50	09 Dec 2024	09 Dec 2024	20241209BBBAIDJA010O9965368521 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241208 000000 Pe		905,616.00	84,358,658.00
51	10 Dec 2024	10 Dec 2024	TRF KE PERUMDA TRANSPO NOREK 0002703963001 Value Date 09122024		1,163,796.00	85,522,454.00
52	10 Dec 2024	10 Dec 2024	20241210BBBAIDJA010O9965620827 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241209 000000 Pe		1,286,928.00	86,809,382.00
53	10 Dec 2024	10 Dec 2024	20241210BBBAIDJA010O9965620870 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241209 000000 PD		1,703,988.00	88,513,370.00
54	11 Dec 2024	11 Dec 2024	TRF KE PERUMDA TRANSPO NOREK 0002703963001 Value Date 10122024		1,171,740.00	89,685,110.00
55	11 Dec 2024	11 Dec 2024	0013-800461-360/K751-0013 R AMELIA GITA R AMELIA GITA		445,000.00	90,130,110.00
56	11 Dec 2024	11 Dec 2024	20241211BBBAIDJA010O9965820418 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241210 000000 PD		1,906,560.00	92,036,670.00
57	11 Dec 2024	11 Dec 2024	20241211BBBAIDJA010O9965820450 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241210 000000 Pe		1,394,172.00	93,430,842.00
58	12 Dec 2024	12 Dec 2024	TRF KE PERUMDA TRANSPO NOREK 0002703963001 Value Date 11122024		1,155,852.00	94,586,694.00
59	12 Dec 2024	12 Dec 2024	20241212BBBAIDJA010O9965001826 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241211 000000 Pe		1,227,348.00	95,814,042.00
60	12 Dec 2024	12 Dec 2024	20241212BBBAIDJA010O9965001858 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241211 000000 PD		1,846,980.00	97,661,022.00
61	13 Dec 2024	13 Dec 2024	TRF KE PERUMDA TRANSPO NOREK 0002703963001 Value Date 12122024		846,036.00	98,507,058.00
62	13 Dec 2024	13 Dec 2024	20241213BBBAIDJA010O9965218492 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241212 000000 Pe		1,382,256.00	99,889,314.00
63	13 Dec 2024	13 Dec 2024	20241213BBBAIDJA010O9965218513 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241212 000000 PD		1,966,140.00	101,855,454.00

No	Posting Date	Effective Date	Narasi	Debit Transaction	Credit Transaction	Balance
64	13 Dec 2024	13 Dec 2024	TRF KE JANUAR SETIAWAN NOREK 0129410841102 rek perantara by operasional	14,409,920.00		87,445,534.00
65	13 Dec 2024	13 Dec 2024	TRF KE FANI DEVIANTI NOREK 0132636532100 Honor 06 Des sd 12 Desember 2024	545,159.00		86,900,375.00
66	13 Dec 2024	13 Dec 2024	TRF KE TEDI SUTIANDI NOREK 0132637601100 Honor 06 Des sd 12 Desember 2024	574,011.00		86,326,364.00
67	13 Dec 2024	13 Dec 2024	TRF KE AGUNG TOPAN NOREK 0132634653100 Honor 06 Des sd 12 Desember 2024	708,652.00		85,617,712.00
68	13 Dec 2024	13 Dec 2024	TRF KE ASTY DAMAYANTI NOREK 0132636842100 Honor 06 Des sd 12 Desember 2024	670,733.00		84,946,979.00
69	13 Dec 2024	13 Dec 2024	TRF KE MELIYANA NOREK 0132637210100 Honor 06 Des sd 12 Desember 2024	678,976.00		84,268,003.00
70	13 Dec 2024	13 Dec 2024	TRF KE YUDI ARDIYANSYA NOREK 0132638039101 Honor 06 Des sd 12 Desember 2024	669,423.00		83,598,580.00
71	13 Dec 2024	13 Dec 2024	TRF KE FANI DEVIANTI NOREK 0132636532100 Honor 06 Des sd 12 Desember 2024	704,852.00		82,893,728.00
72	13 Dec 2024	13 Dec 2024	TRF KE APIT NOREK 0132638942100 Honor 06 Des sd 12 Desember 2024	870,183.00		82,023,545.00
73	13 Dec 2024	13 Dec 2024	TRF KE FANI DEVIANTI NOREK 0132636532100 Honor 06 Des sd 12 Desember 2024	823,620.00		81,199,925.00
74	13 Dec 2024	13 Dec 2024	TRF KE ENDANG NOREK 0132638535100 Honor 06 Des sd 12 Desember 2024	833,743.00		80,366,182.00
75	14 Dec 2024	14 Dec 2024	TRF KE PERUMDA TRANSPO NOREK 0002703963001 Value Date 13122024		1,177,698.00	81,543,880.00
76	16 Dec 2024	16 Dec 2024	20241216BBBAIDJA010O9965741698 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241214 000000 Pe		1,406,088.00	82,949,968.00
77	16 Dec 2024	16 Dec 2024	20241216BBBAIDJA010O9965741713 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241213 000000 Pe		47,664.00	82,997,632.00
78	16 Dec 2024	16 Dec 2024	20241216BBBAIDJA010O9965741744 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241215 000000 Pe		1,227,348.00	84,224,980.00
79	16 Dec 2024	16 Dec 2024	20241216BBBAIDJA010O9965741752 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241215 000000 PD		1,394,172.00	85,619,152.00
80	16 Dec 2024	16 Dec 2024	20241216BBBAIDJA010O9965741758 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241213 000000 PD		1,775,484.00	87,394,636.00

No	Posting Date	Effective Date	Narasi	Debit Transaction	Credit Transaction	Balance
64	13 Dec 2024	13 Dec 2024	TRF KE JANUAR SETIAWAN NOREK 0129410841102 rek perantara by operasional	14,409,920.00		87,445,534.00
65	13 Dec 2024	13 Dec 2024	TRF KE FANI DEVIANTI NOREK 0132636532100 Honor 06 Des sd 12 Desember 2024	545,159.00		86,900,375.00
66	13 Dec 2024	13 Dec 2024	TRF KE TEDI SUTIANDI NOREK 0132637601100 Honor 06 Des sd 12 Desember 2024	574,011.00		86,326,364.00
67	13 Dec 2024	13 Dec 2024	TRF KE AGUNG TOPAN NOREK 0132634653100 Honor 06 Des sd 12 Desember 2024	708,652.00		85,617,712.00
68	13 Dec 2024	13 Dec 2024	TRF KE ASTY DAMAYANTI NOREK 0132636842100 Honor 06 Des sd 12 Desember 2024	670,733.00		84,946,979.00
69	13 Dec 2024	13 Dec 2024	TRF KE MELIYANA NOREK 0132637210100 Honor 06 Des sd 12 Desember 2024	678,976.00		84,268,003.00
70	13 Dec 2024	13 Dec 2024	TRF KE YUDI ARDIYANSYA NOREK 0132638039101 Honor 06 Des sd 12 Desember 2024	669,423.00		83,598,580.00
71	13 Dec 2024	13 Dec 2024	TRF KE FANI DEVIANTI NOREK 0132636532100 Honor 06 Des sd 12 Desember 2024	704,852.00		82,893,728.00
72	13 Dec 2024	13 Dec 2024	TRF KE APIT NOREK 0132638942100 Honor 06 Des sd 12 Desember 2024	870,183.00		82,023,545.00
73	13 Dec 2024	13 Dec 2024	TRF KE FANI DEVIANTI NOREK 0132636532100 Honor 06 Des sd 12 Desember 2024	823,620.00		81,199,925.00
74	13 Dec 2024	13 Dec 2024	TRF KE ENDANG NOREK 0132638535100 Honor 06 Des sd 12 Desember 2024	833,743.00		80,366,182.00
75	14 Dec 2024	14 Dec 2024	TRF KE PERUMDA TRANSPO NOREK 0002703963001 Value Date 13122024		1,177,698.00	81,543,880.00
76	16 Dec 2024	16 Dec 2024	20241216BBBAIDJA010O9965741698 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241214 000000 Pe		1,406,088.00	82,949,968.00
77	16 Dec 2024	16 Dec 2024	20241216BBBAIDJA010O9965741713 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241213 000000 Pe		47,664.00	82,997,632.00
78	16 Dec 2024	16 Dec 2024	20241216BBBAIDJA010O9965741744 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241215 000000 Pe		1,227,348.00	84,224,980.00
79	16 Dec 2024	16 Dec 2024	20241216BBBAIDJA010O9965741752 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241215 000000 PD		1,394,172.00	85,619,152.00
80	16 Dec 2024	16 Dec 2024	20241216BBBAIDJA010O9965741758 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241213 000000 PD		1,775,484.00	87,394,636.00

No	Posting Date	Effective Date	Narasi	Debit Transaction	Credit Transaction	Balance
81	16 Dec 2024	16 Dec 2024	20241216BBBAIDJA010O9965741763 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241214 000000 PD		1,215,432.00	88,610,068.00
82	16 Dec 2024	16 Dec 2024	20241216BBBAIDJA010O9965741797 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241213 000000 Pe		1,179,684.00	89,789,752.00
83	17 Dec 2024	17 Dec 2024	TRF KE PERUMDA TRANSPO NOREK 0002703963001 Value Date 16122024		1,219,404.00	91,009,156.00
84	17 Dec 2024	17 Dec 2024	20241217BBBAIDJA010O9965924160 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241216 000000 PD		1,787,400.00	92,796,556.00
85	17 Dec 2024	17 Dec 2024	20241217BBBAIDJA010O9965924182 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241216 000000 Pe		1,155,852.00	93,952,408.00
86	18 Dec 2024	18 Dec 2024	TRF KE PERUMDA TRANSPO NOREK 0002703963001 Value Date 17122024		967,182.00	94,919,590.00
87	18 Dec 2024	18 Dec 2024	20241218BBBAIDJA010O9965139137 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241217 000000 Pe		1,286,928.00	96,206,518.00
88	18 Dec 2024	18 Dec 2024	20241218BBBAIDJA010O9965139628 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241217 000000 PD		1,560,996.00	97,767,514.00
89	19 Dec 2024	19 Dec 2024	TRF KE PERUMDA TRANSPO NOREK 0002703963001 Value Date 18122024		875,826.00	98,643,340.00
90	19 Dec 2024	19 Dec 2024	20241219BBBAIDJA010O9965319495 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241218 000000 Pe		1,346,508.00	99,989,848.00
91	19 Dec 2024	19 Dec 2024	20241219BBBAIDJA010O9965319492 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241218 000000 PD		1,715,904.00	101,705,752.00
92	19 Dec 2024	19 Dec 2024	TRF KE PERUMDA TRANSPO NOREK 0002703963001		1,008,888.00	102,714,640.00
93	20 Dec 2024	20 Dec 2024	20241220BBBAIDJA010O9965495956 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241219 000000 PD		1,978,056.00	104,692,696.00
94	20 Dec 2024	20 Dec 2024	20241220BBBAIDJA010O9965495997 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241219 000000 Pe		1,322,676.00	106,015,372.00
95	20 Dec 2024	20 Dec 2024	TRF KE FANI DEVIANTI NOREK 0132636532100 Honor 13 Des sd 19 Desember 2024	699,310.00		105,316,062.00
96	20 Dec 2024	20 Dec 2024	TRF KE TEDI SUTIANDI NOREK 0132637601100 Honor 13 Des sd 19 Desember 2024	708,377.00		104,607,685.00
97	20 Dec 2024	20 Dec 2024	TRF KE AGUNG TOPAN NOREK 0132634653100 Honor 13 Des sd 19 Desember 2024	564,943.00		104,042,742.00

No	Posting Date	Effective Date	Narasi	Debit Transaction	Credit Transaction	Balance
98	20 Dec 2024	20 Dec 2024	TRF KE ASTY DAMAYANTI NOREK 0132636842100 Honor 13 Des sd 19 Desember 2024	592,696.00		103,450,046.00
99	20 Dec 2024	20 Dec 2024	TRF KE MELIYANA NOREK 0132637210100 Honor 13 Des sd 19 Desember 2024	714,422.00		102,735,624.00
100	20 Dec 2024	20 Dec 2024	TRF KE YUDI ARDIYANSYA NOREK 0132638039101 Honor 13 Des sd 19 Desember 2024	858,711.00		101,876,913.00
101	20 Dec 2024	20 Dec 2024	TRF KE FANI DEVIANTI NOREK 0132636532100 Honor 13 Des sd 19 Desember 2024	869,845.00		101,007,068.00
102	20 Dec 2024	20 Dec 2024	TRF KE APIT NOREK 0132638942100 Honor 13 Des sd 19 Desember 2024	693,717.00		100,313,351.00
103	20 Dec 2024	20 Dec 2024	TRF KE FANI DEVIANTI NOREK 0132636532100 Honor 13 Des sd 19 Desember 2024	727,795.00		99,585,556.00
104	20 Dec 2024	20 Dec 2024	TRF KE JANUAR SETIAWAN NOREK 0129410841102 rek perantara by oprsnl dan kantor	15,854,287.00		83,731,269.00
105	20 Dec 2024	20 Dec 2024	TRF KE ENDANG NOREK 0132638535100 Honor 13 Des sd 19 Desember 2024	877,269.00		82,854,000.00
106	21 Dec 2024	21 Dec 2024	TRF KE PERUMDA TRANSPO NOREK 0002703963001 Value Date 20122024		945,336.00	83,799,336.00
107	23 Dec 2024	23 Dec 2024	20241223BBBAIDJA010O9965048103 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241221 000000 Pe		1,298,844.00	85,098,180.00
108	23 Dec 2024	23 Dec 2024	20241223BBBAIDJA010O9965048119 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241222 000000 PD		1,215,432.00	86,313,612.00
109	23 Dec 2024	23 Dec 2024	20241223BBBAIDJA010O9965048148 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241221 000000 PD		1,537,164.00	87,850,776.00
110	23 Dec 2024	23 Dec 2024	20241223BBBAIDJA010O9965048154 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241222 000000 Pe		1,024,776.00	88,875,552.00
111	23 Dec 2024	23 Dec 2024	20241223BBBAIDJA010O9965048167 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241220 000000 Pe		1,191,600.00	90,067,152.00
112	23 Dec 2024	23 Dec 2024	20241223BBBAIDJA010O9965048170 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241220 000000 PD		1,560,996.00	91,628,148.00
113	23 Dec 2024	23 Dec 2024	TRF KE PERUMDA TRANSPO NOREK 0002703963001		1,008,888.00	92,637,036.00
114	24 Dec 2024	24 Dec 2024	20241224BBBAIDJA010O9965239452 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241223 000000 Pe		1,263,096.00	93,900,132.00

No	Posting Date	Effective Date	Narasi	Debit Transaction	Credit Transaction	Balance
115	24 Dec 2024	24 Dec 2024	20241224BBBAIDJA010O9965239495 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241223 000000 PD		1,477,584.00	95,377,716.00
116	24 Dec 2024	24 Dec 2024	TRF KE PERUMDA TRANSPO NOREK 0002703963001		707,016.00	96,084,732.00
117	27 Dec 2024	27 Dec 2024	TRF KE JANUAR SETIAWAN NOREK 0129410841102 rek perantara by operasional	12,888,500.00		83,196,232.00
118	27 Dec 2024	27 Dec 2024	TRF KE FANI DEVIANTI NOREK 0132636532100 Honor 20 Des sd 26 Desember 2024	517,956.00		82,678,276.00
119	27 Dec 2024	27 Dec 2024	TRF KE TEDI SUTIANDI NOREK 0132637601100 Honor 20 Des sd 26 Desember 2024	653,696.00		82,024,580.00
120	27 Dec 2024	27 Dec 2024	TRF KE AGUNG TOPAN NOREK 0132634653100 Honor 20 Des sd 26 Desember 2024	635,836.00		81,388,744.00
121	27 Dec 2024	27 Dec 2024	TRF KE ASTY DAMAYANTI NOREK 0132636842100 Honor 20 Des sd 26 Desember 2024	635,011.00		80,753,733.00
122	27 Dec 2024	27 Dec 2024	TRF KE MELIYANA NOREK 0132637210100 Honor 20 Des sd 26 Desember 2024	542,686.00		80,211,047.00
123	27 Dec 2024	27 Dec 2024	TRF KE YUDI ARDIYANSYA NOREK 0132638039101 Honor 20 Des sd 26 Desember 2024	636,020.00		79,575,027.00
124	27 Dec 2024	27 Dec 2024	TRF KE ENDANG NOREK 0132638535100 Honor 20 Des sd 26 Desember 2024	666,387.00		78,908,640.00
125	27 Dec 2024	27 Dec 2024	TRF KE FANI DEVIANTI NOREK 0132636532100 Honor 20 Des sd 26 Desember 2024	802,701.00		78,105,939.00
126	27 Dec 2024	27 Dec 2024	TRF KE FANI DEVIANTI NOREK 0132636532100 Honor 20 Des sd 26 Desember 2024	779,757.00		77,326,182.00
127	27 Dec 2024	27 Dec 2024	20241227BBBAIDJA010O9965852319 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241226 000000 PD		1,584,828.00	78,911,010.00
128	27 Dec 2024	27 Dec 2024	20241227BBBAIDJA010O9965852315 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241225 000000 Pe		929,448.00	79,840,458.00
129	27 Dec 2024	27 Dec 2024	20241227BBBAIDJA010O9965852322 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241224 000000 PD		1,477,584.00	81,318,042.00
130	27 Dec 2024	27 Dec 2024	20241227BBBAIDJA010O9965852301 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241225 000000 PD		1,036,692.00	82,354,734.00
131	27 Dec 2024	27 Dec 2024	20241227BBBAIDJA010O9965852328 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241224 000000 Pe		1,441,836.00	83,796,570.00

No	Posting Date	Effective Date	Narasi	Debit Transaction	Credit Transaction	Balance
132	27 Dec 2024	27 Dec 2024	20241227BBBAIDJA010O9965852360 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241226 000000 Pe		1,012,860.00	84,809,430.00
133	27 Dec 2024	27 Dec 2024	TRF KE FANI DEVIANTI NOREK 0132636532100 Honor 20 Des sd 26 Desember 2024	780,769.00		84,028,661.00
134	27 Dec 2024	27 Dec 2024	TRF KE PERUMDA TRANSPO NOREK 0002703963001		885,756.00	84,914,417.00
135	28 Dec 2024	28 Dec 2024	150 DB -Biaya Administrasi	25,000.00		84,889,417.00
136	30 Dec 2024	30 Dec 2024	20241230BBBAIDJA010O9965386743 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241228 000000 Pe		1,048,608.00	85,938,025.00
137	30 Dec 2024	30 Dec 2024	20241230BBBAIDJA010O9965386808 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241228 000000 PD		1,572,912.00	87,510,937.00
138	30 Dec 2024	30 Dec 2024	20241230BBBAIDJA010O9965386803 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241227 000000 Pe		1,227,348.00	88,738,285.00
139	30 Dec 2024	30 Dec 2024	20241230BBBAIDJA010O9965386829 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 678548 20241229 000000 Pe		893,700.00	89,631,985.00
140	30 Dec 2024	30 Dec 2024	20241230BBBAIDJA010O9965386844 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241227 000000 PD		1,382,256.00	91,014,241.00
141	30 Dec 2024	30 Dec 2024	20241230BBBAIDJA010O9965386953 TRF DARI BBBAIDJA/MIDTRANS Moka qris 676540 20241229 000000 PD		1,108,188.00	92,122,429.00
142	31 Dec 2024	31 Dec 2024	TRF KE PERUMDA TRANSPO NOREK 0002703963001		846,036.00	92,968,465.00
143	31 Dec 2024	31 Dec 2024	20241231BNINIDJA010O0160955227 TRF DARI BNINIDJA/KODJARI TATA ANGK Profesional Fee Bulan Des 2024		35,295,000.00	128,263,465.00
144	31 Dec 2024	01 Jan 2025	920 KR -Bunga		19,125.00	128,282,590.00
145	31 Dec 2024	01 Jan 2025	399 DB-Pajak Bunga	3,825.00		128,278,765.00

Bank Kota Bogor
Bank Perkreditan Rakyat

Rincian Mutasi Tabungan

Rekening	:	**201-001-000025332**
Nama	:	**PERUMDA TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR**
Alamat	:	**JL KH ABDULLAH BIN NUH NO.1 BUBULAK BOGOR BARAT - KOTA BOGOR, KOTA. JAWA BARAT**
Periode	:	**01 Desember 2024 s.d 31 Januari 2025**

NO	Tanggal	Kode	Debet	Kredit	Saldo	Keterangan
Saldo Awal					**4.820.979**	
1	12 Des 2024	11	0	313.334	5.134.313	Pembayaran Bunga Deposito via Tabungan 201 001 000025332 Rekening 303-001-000003670 a/n PERUMDA TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR (autodebet)
2	27 Des 2024	04	4.000	0	5.130.313	Administrasi Tabungan Prima Rekening 201-001-000025332 a.n PERUMDA TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR bulan Desember 2024
3	28 Des 2024	03	0	13.291	5.143.604	BUNGA TABUNGAN 25332 A.N PERUMDA TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR
4	28 Des 2024	05	2.658	0	5.140.946	PAJAK TABUNGAN 25332 A.N PERUMDA TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR
			6.658	**326.625**		

CABANG : BOGOR
REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN
PERIODE TGL : 01/12/2024
S/D : 31/12/2024

HAL : 1

NO. REKENING : 1838721514
NPWP : 2.647.354.6-404.000
MATAUANG : IDR

KEPADA YTH : PERUMDA TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR
JL H ABDULLAH BIN NUH
000000
BUBULAK 16115
Bogor Barat - Kota /Bogor

TGL TRANS	U R A I A N	DEBET	KREDIT	S A L D O
	SALDO AWAL			1.257.251,00
31 Dec	by System BY KEL REK	25.000,00-		1.232.251,00
			AKHIR DARI REKENING	

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
BNI
KANTOR CAPEM
[illegible]

Dipindai dengan CamScanner

rekening koran
account statement

mandiri

Kepada Yth / To
13301
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TRANSPORTASI
PAKUAN KOTA BOGOR
Jln.H Abdullah Bin Nuh
RT 004 RW 011
Bogor Barat
Bubulak BOGOR 16115

No. Rekening/Account Number : 133-00-2944341-4
Nama Produk/Product Name : Giro Rupiah IDR-Gov
Valuta/Currency : Indonesia Rupiah
Periode/Period : 1/12/24 s/d 31/12/24
Cabang/Branch : KCP Bogor Kapten Muslihat
No. Kartu/Card Number :
No. NPWP/NPWP Number : 026473546404000

HALAMAN: 1

Tgl. Date	Tgl. Val Val.Date	Rincian Transaksi / No. Referensi Description / Reference No.	Debet / Kredit Debet / Credit	Saldo Balance
		Saldo Pemindahan		
		** NO RECORD FOUND **		1,916,903.00

FFO 018

REKENING GIRO

KCP PURI BEGAWAN

PERUMDA TRANSPORTASI PAKUAN
BOGOR BARAT
BUBULAK
JL KH ABDULLAH BIN NUH
BOGOR 16115
INDONESIA

NO. REKENING	:	5735046222
HALAMAN	:	1/1
PERIODE	:	DESEMBER 2024
MATA UANG	:	IDR

CATATAN:

- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN	CBG	MUTASI	SALDO
01/12	SALDO AWAL			0.00

TRANSAKSI TIDAK TERSEDIA

SALDO AWAL	:	0.00	
MUTASI CR	:	0.00	0
MUTASI DB	:	0.00	0
SALDO AKHIR	:	0.00	

PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA)
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR

Jln. Siliwangi No. 121 Bogar 16142 Telp. (0251) 8324111 Fax. 8321575
e-mail : corporate@tirtapakuan.co.id web : www.tirtapakuan.co.id

Bogor, 23 April 2025
24 Syawal 1446 H

Nomor	:	900/396 -Keu-Perumda.TPKB
Sifat	:	Biasa
Lampiran	:	1 (satu) Berkas
Perihal	:	Laporan Keuangan Tahun 2024 *(Audited)*

Kepada
Yth. Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Bogor
Jl. Pemuda No. 31
Lt. 2-3
Kelurahan Tanah Sareal
Kecamatan Tanah Sareal
Kota Bogor

Sehubungan dengan surat dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor Nomor 900/1323-Bid.PenKeu tanggal 21 April 2025 perihal Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2024 *(Audited)*.

Dengan ini kami sampaikan Laporan Keuangan *(Audited)* Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor Tahun 2024 terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Di tandatangani secara elektronik oleh:
Direktur Utama

H. Rino Indira Gusniawan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA PAKUAN
KOTA BOGOR

LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL TERSEBUT

DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Badan Keuangan dan Aset Daerah

PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA PAKUAN
KOTA BOGOR

LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL TERSEBUT

DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Badan Keuangan dan Aset Daerah

Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor
Jl. Siliwangi No. 121 Kota Bogor 16142 – Jawa Barat – Indonesia
Telp: (0251) 8324111 (Hunting) Fax: (0251) 8321575
Website: https://www.tirtapakuan.co.id

Tirta Pakuan

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	
NERACA	1
LAPORAN LABA (RUGI)	2
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	3
LAPORAN ARUS KAS	4
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	5
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	

Badan Keuangan dan Aset Daerah

Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor
Jl. Siliwangi No. 121 Kota Bogor 16142 – Jawa Barat – Indonesia
Telp: (0251) 8324111 (Hunting) Fax: (0251) 8321575
Website: https://www.tirtapakuan.co.id

PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA)
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR

Jln. Siliwangi No. 121 Bogar 16142 Telp. (0251) 8324111 Fax. 8321575
e-mail : corporate@tirtapakuan.co.id web : www.tirtapakuan.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNGJAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: Rino Indira Gusniawan
Alamat Kantor	: Jl. Siliwangi No. 121 Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor
Nomor Telepon	: 0251-8324111
Jabatan	: Direktur Utama
Nama	: Rivelino Rizky
Alamat Kantor	: Jl. Siliwangi No. 121 Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor
Nomor Telepon	: 0251-8324111
Jabatan	: Direktur Umum
Nama	: Ardani Yusuf
Alamat Kantor	: Jl. Siliwangi No. 121 Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor
Nomor Telepon	: 0251-8324111
Jabatan	: Direktur Teknik

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik;
3. - Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
   - Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bogor, 26 Maret 2025

Direktur Umum	Direktur Utama	Direktur Teknik
Direktur Umum H. Rivelino Rizky	Materai 10rb	Direktur Teknik Ardani Yusuf, ST
	Direktur Utama H. Rino Indira Gusniawan	

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
NERACA
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Bank	*2d, 4*	79.138.902.313	86.443.411.865
Deposito	*2e, 5*	73.000.000.000	65.000.000.000
Piutang usaha, bersih	*2f, 6*	38.702.981.531	39.448.618.219
Piutang lain-lain	*7*	262.826.211	428.367.662
Pendapatan yang akan diterima	*8*	55.291.043	61.934.386
Persediaan	*2g, 9*	22.558.555.730	19.423.184.861
Biaya dibayar dimuka	*10a*	988.886.150	533.283.443
Jumlah Aset Lancar		**214.707.442.978**	**211.338.800.436**
Aset Tidak Lancar			
Biaya dibayar dimuka	*2p, 10b*	1.007.952.727	1.251.726.464
Aset tetap - bersih	*2h, 11*	571.706.724.930	501.981.709.011
Aset tak berwujud - bersih	*2j, 12*	799.617.680	-
Aset dalam penyelesaian	*2k, 13*	2.214.461.619	10.186.499.024
Uang jaminan	*14*	409.877.449	409.877.449
Properti investasi - bersih	*2i, 15*	62.303.870	69.291.220
Jumlah Aset Tidak Lancar		**576.200.938.275**	**513.899.103.168**
JUMLAH ASET		**790.908.381.253**	**725.237.903.604**
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Lancar			
Utang usaha	*2o, 16*	5.180.097.441	3.130.617.765
Utang lain-lain	*17*	544.215.456	643.212.556
Biaya yang masih harus dibayar	*18*	34.500.567.931	47.621.569.888
Utang pajak	*2t, 19a*	11.281.316.810	10.633.475.170
Titipan retribusi	*2u, 20, 41*	412.727.100	620.433.700
Pendapatan diterima dimuka	*21*	1.339.555.339	1.092.424.607
Utang jangka panjang yang jatuh tempo	*23a*	10.870.553.304	10.870.553.304
Utang jangka pendek lainnya	*22*	18.269.038.128	11.213.947.367
Jumlah Liabilitas Lancar		**82.398.071.509**	**85.826.234.357**
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang bank	*23b*	81.578.639.269	92.449.192.570
Jaminan pelanggan	*24*	2.899.950.175	2.915.386.525
Imbalan pasca kerja	*2n, 25*	43.159.561.266	37.822.315.284
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**127.638.150.710**	**133.186.894.379**
Jumlah Liabilitas		**210.036.222.219**	**219.013.128.736**
Ekuitas			
Modal pemerintah kota bogor	*26*	327.951.510.000	280.132.242.000
Modal pemerintah pusat	*26*	29.120.142.000	32.762.894.200
Cadangan umum	*27*	53.542.051.643	35.630.193.876
Saldo laba	*28*	111.140.254.122	106.522.708.315
Laba tahun berjalan	*29*	59.118.201.269	51.176.736.477
Jumlah Ekuitas		**580.872.159.034**	**506.224.774.868**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**790.908.381.253**	**725.237.903.604**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badan Keuangan dan Aset Daerah

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
LAPORAN LABA RUGI
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN			
Penjualan air	*2q, 30*	375.897.597.995	341.937.485.451
Penjualan non air	*2q, 31*	23.878.496.064	25.711.669.365
Jumlah Pendapatan		**399.776.094.059**	**367.649.154.816**
BEBAN LANGSUNG USAHA			
Beban sumber air	*2q, 32*	20.613.561.397	22.526.418.615
Beban pengolahan air	*2q, 33*	46.932.540.483	42.121.637.554
Beban transmisi dan distribusi	*2q, 34*	87.100.765.059	77.944.138.291
Beban perpompaan	*2q, 35*	3.691.722.819	2.419.595.810
Beban perencanaan teknik	*2q, 36*	7.917.702.228	9.896.751.717
Jumlah Beban Langsung Usaha		**166.256.291.986**	**154.908.541.987**
Laba Kotor		**233.519.802.073**	**212.740.612.829**
BEBAN TIDAK LANGSUNG			
Beban administrasi dan umum	*2q, 37*	128.436.279.990	119.053.352.680
Beban hubungan pelanggan	*2q, 38*	37.642.326.140	33.480.436.497
Jumlah Beban Tidak Langsung		**166.078.606.130**	**152.533.789.177**
Laba Usaha		**67.441.195.943**	**60.206.823.652**
Pendapatan (Beban) Lain-Lain			
Pendapatan lain-lain	*2q, 39*	12.095.158.947	7.194.312.663
Beban lain-lain	*2q, 40*	(107.417.901)	(68.765.838)
Jumlah Pendapatan Lain-Lain, bersih		**11.987.741.046**	**7.125.546.825**
Laba Sebelum Pajak		**79.428.936.989**	**67.332.370.477**
Pajak kini	*2t, 19b*	(20.310.735.720)	(16.155.634.000)
Laba Bersih		**59.118.201.269**	**51.176.736.477**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badan Keuangan dan Aset Daerah

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal Pemerintah		Cadangan Umum	Saldo laba	Laba Tahun Berjalan	Jumlah Modal
		Pusat	Kota Bogor				
Saldo Per 31 Desember 2022		32.762.894.200	280.132.242.000	33.361.316.942	93.223.150.505	45.377.538.686	484.857.142.333
Cadangan umum		-	-	2.268.876.934	-	(45.377.538.686)	(43.108.661.752)
Koreksi saldo laba		-	-	-	13.299.557.810	-	13.299.557.810
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	51.176.736.477	51.176.736.477
Saldo Per 31 Desember 2023		32.762.894.200	280.132.242.000	35.630.193.876	106.522.708.315	51.176.736.477	506.224.774.868
Pembagian laba tahun 2023:							
Setoran PAD	43	-	-	-	-	(25.588.368.239)	(25.588.368.239)
Cadangan umum	1c	-	-	17.911.857.767	-	(25.588.368.239)	(7.676.510.472)
Belum ditentukan penggunaannya		-	-	-	4.617.545.807	-	4.617.545.807
Tambahan modal	1b	-	47.819.268.000	-	-	-	47.819.268.000
Modal pemerintah pusat ditetapkan statusnya	1b	(3.642.752.200)	-	-	-		(3.642.752.200)
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	59.118.201.269	59.118.201.269
Saldo Per 31 Desember 2024	26	29.120.142.000	327.951.510.000	53.542.051.643	111.140.254.122	59.118.201.269	580.872.159.034

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badan Keuangan dan Aset Daerah

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Laba bersih tahun berjalan		59.118.201.269	51.176.736.477
Penyesuaian untuk:			
Beban penyusutan dan amortisasi		64.047.829.949	53.026.783.847
Laba operasi sebelum perubahan modal kerja		**123.166.031.218**	**104.203.520.324**
Perubahan modal kerja:			
Piutang usaha		745.636.688	(5.590.529.015)
Piutang Lain-lain		165.541.451	(298.147.611)
Pendapatan Yang Akan Diterima		6.643.343	(3.614.899)
Persediaan		(3.135.370.869)	2.516.150.837
Biaya Dibayar Dimuka		(455.602.707)	212.696.279
Sewa dibayar dimuka		243.773.737	(352.153.808)
Utang Usaha		2.049.479.676	(1.191.804.901)
Utang Lain-lain		(98.997.100)	(44.636.956)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar		(13.121.001.957)	21.667.236.601
Pendapatan Diterima Dimuka		247.130.732	408.426.754
Utang Pajak		647.841.640	1.829.743.945
Titipan Retribusi		(207.706.600)	(180.818.300)
Utang Jangka Pendek Lainnya		7.055.090.761	2.150.591.546
Uang Jaminan Pelanggan		(15.436.350)	2.214.818.784
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja		5.337.245.982	4.375.487.341
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**122.630.299.645**	**131.916.966.921**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Perolehan aset tetap	11	(140.956.060.993)	(121.568.946.639)
Penjualan aset tetap		7.243.510.320	1.285.890.978
Perolehan aset tak berwujud		(852.925.525)	-
Deposito		(8.000.000.000)	(3.000.000.000)
Aset Tetap dalam Penyelesaian		7.972.037.405	(6.636.593.900)
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi		**(134.593.438.793)**	**(129.919.649.561)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Utang bank		(10.870.553.301)	42.987.317.924
Modal Dikurangi Laba Tahun Berjalan		15.529.182.897	(32.077.980.876)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		**4.658.629.596**	**10.909.337.048**
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas		**(7.304.509.552)**	**12.906.654.408**
Kas dan setara kas awal tahun		86.443.411.865	73.536.757.457
Kas dan setara kas akhir tahun	4	**79.138.902.313**	**86.443.411.865**

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bahan Keuangan dan Aset Daerah

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1 UMUM

a Pendirian dan Informasi Umum

Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Bogor No. 5 Tahun 1977 tanggal 31 Maret 1977 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Bogor No. 07 Tahun 1977 seri D dan perubahan No. 4 Tahun 1990 tanggal 10 Januari 1990, Perda No. 04 tahun 2008 tanggal 28 April 2008 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor, kemudian Perda No. 16 tahun 2011 tanggal 07 Desember 2011 tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan Kota Bogor dan terakhir Peraturan Daerah Kota Bogor, Nomor 21 Tahun 2019, tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor.

Maksud, tujuan kegiatan usaha Perusahaan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 21 tahun 2019 pasal 6, 7 dan 8 adalah Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor memiliki maksud untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah, terutama di bidang penyediaan pelayanan Air Minum kepada masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya air berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Perusahaan memiliki tujuan untuk:

a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan pelayanan air minum untuk pemenuhan hajat hidup masyarakat; dan
c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Kegiatan usaha perusahaan adalah:

1 Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor melakukan kegiatan usaha utama yaitu penyediaan air minum.
2 Penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelenggaraan SPAM.
3 Dalam menyelenggarakan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlandasan:
  a. Kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM; dan
  b. Rencana induk SPAM
4 SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan tujuan:
  a. Tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air minum;
  b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
  c. Tercapainya kepantingan yang seimbang antara Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dan pemangku kepentingan; dan
  d. Tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum.
5 Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang mendukung secara finansial terhadap kegiatan usaha utama, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang sudah dimiliki dan/atau dikuasai Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor.
6 Wilayah operasional Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor adalah wilayah administrasi Kota Bogor, namun dapat dikembangkan ke wilayah lain di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7 Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Direksi.

Lokasi kantor pusat Perusahaan berada di Jl. Siliwangi No. 121, Bogor 16142

Visi dan Misi Perusahaan

Sesuai Keputusan Direksi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor No. 060/KEP.70/PERUMDA/2001 tanggal 21 November 2001, sebagai berikut:

Visi : Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor sehat melalui tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam mewujudkan pelayanan prima kepada pelanggan.

Misi : Meningkatkan cakupan pelayanan dengan terpenuhinya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas untuk mencapai masyarakat sehat, dan;
Meningkatkan kinerja melalui pengelolaan yang efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan dengan SDM yang berkualitas.

Moto kerja Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor adalah "Handal dalam Pekerjaan Prima dalam Pelayanan".

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1 UMUM (lanjutan)

b Modal

Modal perusahaan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 18 April 2024 tentang penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor pasal 3 modal dasar Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor berupa uang dan barang sebesar Rp 1.000.000.000.000, modal disetor Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 280.132.242.000 berupa uang dan barang dengan rincian sebagai berikut:

a. sampai dengan tahun 2010 sebesar Rp65.608.665.588,83 (enam puluh lima miliar enam ratus delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan koma delapan tiga rupiah);
b. Tahun 2011 sebesar Rp19.377.701.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu rupiah);
c. Tahun 2012 sebesar Rp29.708.435.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
d. Tahun 2013 sebesar Rp25.310.640.294,00 (dua puluh lima milar tiga ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);
e. Tahun 2014 sebesar Rp31.073.447.956,00 (tiga puluh satu miliar tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
f. Tahun 2015 sebesar Rp10.921.110.161,17 (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta seratus sepuluh ribu seratus enam puluh satu koma satu tujuh rupiah);
g. Tahun 2016 sebesar Rp52.898.242.000,00 (lima puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
h. Tahun 2017 sebesar Rp10.934.000.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah);
i. Tahun 2019 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
j Tahun 2020 sebesar Rp24.300.000.000,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2023 tanggal18 April 2024 Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dilakukan Penyertaan Modal dalam Bentuk Uang dan Penyertaan Modal atas Barang Milik Daerah kepada Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor sebesar Rp180.955.268.000,00 (seratus delapan puluh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Penyertaan Modal dalam Bentuk Uang yaitu sebesar Rp133.136.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh enam juta rupiah);
b. Penyertaan Modal atas Barang Milik Daerah dengan nilai Rp47.819.268.000,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pemenuhan Penyertaan Modal dalam Bentuk Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan secara bertahap sampai dengan Tahun 2027 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

a. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp35.271.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah);
b. Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah); dan
c. Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp81.365.000.000,00 (delapan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).

Total penyertaan modal Pemerintah Kota Bogor yang telah disetor:

Sampai dengan tahun 2020	280.132.242.000
Tahun 2024	47.819.268.000
Total	**327.951.510.000**

Modal Pemerintah Pusat Yang Belum Ditetapkan Statusnya

Adanya pengakuan penyertaan modal Pemerintah Pusat yang belum ada Berita Acara Serah Terima ke PEMDA Kota Bogor, dimana aset tersebut dioperasikan/digunakan sebesar Rp 29.120.142.200 terdiri dari:

- Pemasangan Pipa HDFE tahun 2010	12.885.773.000
- Instalasi Pengolahan Air Palsari tahun 2010	3.642.752.200
- Bangunan Prasedimentasi & Saluran Trandist	16.234.369.000
- Ditetapkan statusnya	(3.642.752.200)
Jumlah	**29.120.142.000**

Bank Kalimantan Barat Aset Daerah

1 UMUM (lanjutan)

c. Pembagian laba

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 21 Tahun 2019 tanggal 07 Desember 2019 tentang Pengelolaan PERUMDA Tirta Pakuan Kota Bogor Pasal 72 ayat (2) menetapkan penggunaan laba bersih setelah Pajak Penghasilan sebagai berikut :

- Pemenuhan dana cadangan peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor;
- Dividen yang menjadi hak daerah tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas; dan
- Bonus untuk pegawai ; dan / atau penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pembagian laba tahun 2023 ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota Bogor Nomor 900.1.13.2/Kep.154-Bag.Ekon/2024 tentang penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah Kota Bogor Tahun Buku 2023 tanggal 8 Mei 2024.

d. Susunan Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai

Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor merupakan perusahaan daerah milik Pemerintah Kota Bogor. Dalam menjalankan aktivitas perusahaan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas dan Direksi.

Dewan Pengawas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan Kota Bogor Bagian Ketiga Dewan Pengawas Pasal 19 ayat (1) & (2) menyatakan bahwa anggota Dewan Pengawas Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya **sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan . unsur lainnya dapat terdiri dari pejabat Pemerintah** pusat dan pejabat pemerintah daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Keputusan Walikota Bogor Nomor : 900.1.13.2/Kep.80-Bag.Ekon/2024 Tahun 2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Susunan Keanggotaan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA) Tirta Pakuan Kota Bogor Periode 2024-2028; dan Keputusan Walikota Bogor Nomor :900.1.13.2/Kep.330-Bag.Ekon/2024 Tahun 2024 tanggal 1 Oktober 2024 memutuskan dan menetapkan Susunan Keanggotaan Dewan Pengawas PDAM Tirta Pakuan periode **2020-2028 sebagai** berikut :

Ketua	:	Dr. Ir. Hj. Syarifah Sofiah Dwikorawati, M.Si
Anggota	:	Dr. Hendra Setiawan, SE., MM., CMA., CSRS
Anggota	:	Drs. Hanafi, M.Si

Dewan Direksi

Keputusan Walikota Bogor Nomor : 539.45-849 Tahun 2020 tentang pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Pakuan Kota Bogor Periode 2020-2025; memutuskan dan menetapkan mengangkat Direksi PERUMDA Tirta Pakuan periode 2020-2025 sebagai berikut :

Direktur Utama	:	H. Rino Indira Gusniawan
Direktur Umum	:	H. Rivelino Rizky
Direktur Teknik	:	Ardani Yusuf

Direktur Utama membawahi:
1 Direktur Teknik
2 Direktur Umum
3 Manajer Satuan Pengawasan Internal
4 Manajer QHSE
5 Sekretaris Perusahaan
6 Manajer Perencanaan & Pengembangan

Direktur Teknik membawahi 3 Departemen, terdiri dari:
1 Manajer Produksi
2 Manajer NRW Dan Transmisi dan Distribusi.
3 Manajer Perawatan

Direktur Umum membawahi 4 Departemen, terdiri dari:
1 Manajer Keuangan
2 Manajer Sumber Daya Manusia
3 Manajer Humas Dan Pelayanan Pelanggan
4 Manajer Perlengkapan

Bagian Keuangan dan Aset Daerah

1 UMUM (lanjutan)

Dalam tahun 2024 dan 2023 Jumlah karyawan Perumda Tirta Pakuan kota Bogor sebanyak 661 dan 665 orang, yang terdiri dari:

Status	2024	2023
- Pegawai Tetap	415	423
- PKWT	23	26
- Pegawai outsourcing	223	216
Jumlah	**661**	**665**

e Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan, yang diwakili oleh H. Rino Indira Gusniawan, Direktur Utama, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh manajemen Perusahaan pada tanggal 26 Maret 2025.

f Pernyataan Kepatuhan Penyusunan Laporan Keuangan

Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2024 dengan informasi komparatif pendekatan angka koresponden untuk tahun 2023 disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan telah memenuhi persyaratannya.

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP), yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK).

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3

b Periode Pembukuan

Periode Pembukuan (*Accounting Period*) adalah tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

c Klasifikasi Lancar dan Tidak Lancar

Perusahaan menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar.
Suatu aset disajikan lancar bila:

1 akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal;
2 untuk diperdagangkan; atau
3 akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar

Badan Pengelolaan Aset Daerah

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c Klasifikasi Lancar dan Tidak Lancar (lanjutan)

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

1 akan dilunasi dalam siklus operasi normal;
2 untuk diperdagangkan;
3 akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan;atau
4 tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai liabilitas tidak lancar.

d Kas dan Bank

Kas dan bank terdiri dari kas ditangan dan bank dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman, serta tidak dibatasi penggunaannya.

e Deposito yang Dibatasi Penggunaannya

Deposito yang dibatasi penggunaannya merupakan deposito berjangka dengan jatuh tempo lebih dari tiga bulan sejak tanggal penempatan dan digunakan sebagai jaminan serta dibatasi penggunaannya.

f Piutang Usaha

Piutang disajikan dengan nilai wajar yang dapat direalisasikan. Pada setiap tanggal pelaporan dilakukan penyisihan kerugian piutang secara kolektif/kelompok pelanggan (Pelanggan rumah tangga, niaga, sosial, industri, instansi pemerintah, dan lain-lain), yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul. Besarnya penyisihan kerugian piutang ditentukan berdasarkan rata-rata piutang tak tertagih untuk tiga tahun terakhir pada masing-masing kelompok pelanggan.

Piutang yang telah berumur lebih dari dua tahun dicadangkan penyisihannya sebesar 100% dan diusulkan kepada Dewan Pengawas untuk dihapusbukukan (*Write-off*). Penurunan nilai atau pemulihan penurunan nilai piutang diakui pada masing-masing kelompok pelanggan.

g Persediaan

Persediaan merupakan aset dalam bentuk bahan dan perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Persediaan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis yaitu: - Persediaan bahan operasi yang terdiri dari persediaan bahan kimia dan bahan operasi lainnya. - Persediaan bahan instalasi yang terdiri dari pipa, meter air, dan perlengkapan lapangan.

Persediaan diukur pada biaya perolehannya yang meliputi seluruh beban pembelian dan beban yang dapat dibebankan secara langsung serta beban lainnya untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi sekarang.

Metode pencatatan yang dianut terhadap persediaan bahan instalasi adalah *Perpectual Inventory Method*, sedangkan persediaan bahan operasi menggunakan *Physical Inventory Method*.

Barang/bahan yang dibeli untuk keperluan investasi termasuk pemeliharaan instalasi dikelompokan kedalam bahan instalasi. Pembebanan pemakaian bahan intalasi dan bahan kimia ke dalam pos beban dicatat dengan metode *First in First Out* (FIFO).

Alokasi persediaan ke aset tetap yang diakui sebagai beban selama umur manfaat aset tersebut dan menambah nilai aset hanya jika memenuhi kondisi sebagai berikut : memperpanjang umur ekonomis, meningkatkan kapasitas, mutu atau meningkatkan standar kerja.

Pada setiap tanggal pelaporan terhadap persediaan dilakukan penilaian kemungkinan terjadinya penurunan nilai persediaan, misalnya karena rusak atau usang. Persediaan yang menurun nilainya diukur pada harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual serta mengakui kerugian penurunan nilai dalam pos "kerugian penurunan nilai persediaan".

Bagian Keuangan dan Aset Daerah

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan yang meliputi harga beli, biaya hukum, dan broker, biaya impor, dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan, serta biaya-biaya yang dapat dibebankan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Sedangkan penyusutannya dilakukan berdasarkan Undang-undang Perpajakan (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994) yang secara rinci diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/1994 (telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan ketentuan mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tanggal 15 mei 2009). Pada setiap tanggal pelaporan terhadap aset tetap dilakukan penilaian kemungkinan terjadi penurunan nilai aset. Aset tetap yang mengalami penurunan diestimasi sesuai dengan nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual aset tersebut.

Penurunan nilai aset diakui sebagai beban laba rugi tahun berjalan dan dicatat dalam pos beban penurunan nilai aset.

Tarif penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Methode*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan
I Bukan Bangunan		
Kelompok 1	4 Tahun	25%
Kelompok 2	8 Tahun	12,50%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%
Kelompok 4	20 Tahun	5%
II Bangunan		
Permanen	20 Tahun	5%
Tidak Permanen	10 Tahun	10%

i Pengeluaran Barang Modal/Aset Tetap

Pengeluaran-pengeluaran untuk pembelian barang-barang berwujud dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu untuk digunakan dalam operasi perusahaan dengan Jumlah diatas Rp 200.000,00 dan mempunyai manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dimasukan sebagai pengeluaran untuk modal /aset tetap (dikapitalisasi).

j Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Aset tidak berwujud dapat diakui hanya jika memenuhi kriteria sebagai berkut:

1 Kemungkinan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor akan memperoleh manfaat ekonomis masa yang akan datang dari aset tersebut
2 Biaya perolehan aset atau nilai aset tersebut dapat diukur dengan handal.

Aset dapat diidentifikasikan sebagai aset tidak berwujud jika:

1 Dapat dipisahkan, yaitu kemampuannya untuk menjadi terpisah/terbagi dari perusahaan dan dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan atau ditukarkan melalui satu kontrak terkait aset atau kewajiban secara individual atau secara bersama, atau;
2 Muncul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dapat dipisahkan dari perusahaan atau dari hak dan kewajiban lainnya.

Aset tidak berwujud diukur sebesar biaya perolehan, yang meliputi harga beli, bea impor dan pajak yang tidak dapat dikreditkan, serta biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam rangka mempersiapkan aset sehingga siap digunakan sesuai dengan tujuan manajemen.

Aset tidak berwujud diamortisasi sesuai dengan umur manfaatnya, umur manfaat aset tidak berwujud yang berasal dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya tidak boleh melebihi periode hak kontraktual atau hak hukum tersebut, tetapi mungkin lebih pendek tergantung pada lamanya periode ekspektasi penggunaan aset tersebut. Jika hak kontraktual atau hak hukum lainnya untuk masa yang terbatas dapat diperbarui, maka umur manfaatnya termasuk periode yang diperbarui hanya jika terdapat bukti yang mendukung pembaruan hak tersebut yang dilakukan oleh Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor tanpa biaya yang signifikan. Aset tidak berwujud yang tidak dapat diestimasi umur manfaatnya, maka umur manfaatnya dianggap 10 tahun.

Badan Keuangan dan Aset Daerah

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k Aset Tetap Dalam Penyelesaian

Aset tetap dalam penyelesaian merupakan akumulasi pengeluaran dalam rangka pembangunan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan. Pada saat pekerjaan selesai, jumlah yang terakumulasi dalam perkiraan ini dipindahkan ke perkiraan aset tetap masing-masing.

l Properti Investasi

Propert investasi diakui sebagai aset pada saat diperoleh. Pada pengakuan awal, properti investasi diukur pada biaya perolehan. Biaya perolehan termasuk harga pembelian dan biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk memperoleh properti tersebut.

Pada setiap tanggal pelaporan perusahaan akan melakukan penilaian apakah terdapat indikasi penurunan nilai properti investasi.

m Aset Lain-lain

Pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam aset tetap, aset lancar, investasi/penyertaan maupun aset tidak berwujud, disajikan dalam kelompok aset lain-lain.

n Imbalan Pasca Kerja

Program pensiun pegawai PERUMDA Tirta Pakuan Kota Bogor diterapkan berdasarkan Keputusan Pendiri DAPENMA PAMSI No. 842/Kep.60-PDAM/2007 tanggal 16 Juli 2007 yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep. 174/KM.10/2007 tanggal 12 September 2007. Jumlah iuran normal dan iuran tambahan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan perhitungan liabilitas iuran sementara.

Imbalan Pasca Kerja pegawai lainnya mendapat uang penghargaan (kalineung) sesuai Surat Keputusan Direksi Bogor diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan UU Nomor 3 tahun 1992. seluruh imbalan kerja yang menjadi hak pekerja akibat dari jasa yang diberikan kepada perusahaan selama periode pelaporan diakui dan dicatat sebagai biaya.

Program Imbalan pasti, diberlakukan kepada Direksi dan seluruh karyawan, adalah program imbalan pasca kerja dimana PERUMDA menyediakan imbalan yang telah disepakati kepada pekerja atau mantan pekerja, dan resiko aktuarial serta resiko investasi secara substantif berada pada PERUMDA. dan kerugian aktuarial diakui selama periode berjalan laporan laba rugi.

Imbalan pasca kerja diakui sebagai liabilitas dan beban dalam laporan keuangan ketika karyawan telah memberikan jasanya dan perusahaan memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk memberikan imbalan pasca kerja di masa depan. Jenis imbalan pasca kerja yang umum mencakup pensiun, tunjangan kesehatan setelah pensiun, atau imbalan lainnya yang diberikan setelah masa kerja berakhir.

Kewajiban imbalan pasca kerja diukur menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Metode ini mempertimbangkan jasa yang telah diberikan oleh karyawan hingga tanggal pelaporan serta asumsi keuangan seperti tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, dan tingkat pengembalian aset program

o Pencatatan Utang/Liabilitas

Liabilitas jangka pendek dicatat sebesar kas/setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non kas yang diterima sebagai penukar dari liabilitas pada saat terjadinya. Liabilitas jangka panjang diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber data yang mengandung manfaat ekonomis akan dilakukan untuk menyelesaikan liabilitas yang jatuh tempo lebih dari satu tahun dan jumlah yang harus diselesaikan dapat dikur dengan andal. liabilitas bunga atas liabilitas jangka panjang yang timbul selama masa tenggang yang tidak akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun mendatang dicatat dalam perkiraan liabilitas bunga masa tenggang.

Liabilitas jangka panjang dicatat sebesar kas/setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non kas yang diterima sebagai penukar dari liabilitas pada saat terjadinya. Liabilitas jangka panjang dicatat berdasarkan realisasi perubahan dan ditambah dengan bunga masa tenggang yang tidak jatuh tempo dalam waktu satu tahun mendatang.

Badan Keuangan dan Aset Daerah

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p Kewajiban Diestimasi dan Kontijensi

Kewajiban diestimasi diakui didalam neraca sebagai kewajiban dan sebagai beban di dalam laporan laba rugi, apabila kemungkinan terjadi perusahaan akan disyaratkan untuk mentransfer manfaat ekonomis pada masa yang akan datang dengan jumlah kewajiban yang dapat diestimasi secara handal. Termasuk di dalam liabilitas diestimasi adalah pembayaran pesangon, uang penghargaan, jasa pengabdian, uang kompensasi dan pembayaran lainnya yang diberikan kepada karyawan dan Direksi pada saat yang bersangkutan berhenti atau berakhir masa jabatannya.

Kewajiban kontijensi merupakan liabilitas potensial yang belum pasti atau liabilitas kini yang tidak diakui karena tidak memenuhi salah satu atau kedua kondisi berikut : - Kemungkinan (lebih mungkin dibandingkan tidak mungkin) terjadi bahwa perusahaan akan disyaratkan untuk mentransfer manfaat ekonomis pada saat penyesuaian. - jumlah kewajiban dapat diestimasi dengan handal.

q Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan penjualan air diakui, dicatat, dan dilaporkan tiap-tiap bulan berdasarkan rekening tagihan air yang diterbitkan pada bulan yang bersangkutan, walaupun penerimaan uangnya baru terjadi kemudian, atau pada saat penerimaan uang untuk transaksi penjualan tunai.

Pendapatan sambungan baru dan pendapatan non air lainnya diakui dan dicatat seluruhnya sebagai pendapatan tahun berjalan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- Jika menurut prosedur yang berlaku pelanggan/calon pelanggan diisyaratkan membayar liabilitasnya secara tunai, maka pendapatan dicatat dan diakui pada saat pembayarannya.
- Jika menurut ketentuan yang berlaku pelanggan dapat memenuhi liabilitasnya dengan cara mengangsur, maka pengakuan serta pencatatan pendapatan dan piutang dilakukan penyesuaian hanya pendapatan piutang dan pendapatan pada tahun berjalan saja.
- Pendapatan atas keterlambatan pembayaran oleh pelanggan dicatat pada saat denda tersebut diterima (*Cash Basis*).
- Pengakuan pendapatan jasa giro diakui secara *Accrual Basis.*

Beban diakui dan dicatat dalam periode terjadinya transaksi.

r Beban yang Ditangguhkan

Beban yang ditangguhkan merupakan biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan operasi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor yang mempunyai manfaat untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.

s Kelangsungan Hidup Perusahaan (*Going Concern*)

Laporan keuangan ini disusun dengan anggapan bahwa Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor akan melanjutkan usahanya secara berkesinambungan (*going concern*). Tidak terdapat ketidakpastian yang material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor untuk melanjutkan usaha.

t Pajak Penghasilan

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Perusahaan tidak mengakui adanya pajak tangguhan.

u Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK Bab 33, "Pengungkapan pihak-pihak berelasi".

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Bahan Penyusunan dan Asset Daerah

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p Sewa

Sewa diklasifiasikan sebagai sewa pembiayaan jika persyaratan sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset sewaan kepada Perusahaan. Seluruh sewa lainnya diklasifiasikan sebagai sewa operasi.

Hak atas aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan diakui sebagai aset Perusahaan pada nilai wajar aset sewaan (atau, jika lebih rendah, pada nilai kini pembayaran sewa minimum) pada insepsi sewa. Liabilitas kepada pesewa tercakup dalam laporan posisi keuangan sebagai kewajiban sewa pembiayaan. Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya keuangan dan pengurang kewajiban sewa sehingga tercapai tingkat bunga konstan atas sisa saldo liabilitas. Beban keuangan dikurangkan dalam mengukur laba atau rugi. Aset yang dikuasai dalam sewa pembiayaan termasuk dalam aset tetap, didepresiasi dan dinilai untuk kerugian penurunan nilai dengan cara yang sama seperti aset yang dimiliki. Utang sewa dalam sewa operasi dibebankan ke laba rugi.

Sewa operasi: Pengakuan awal: Dalam sewa operasi, penyewa tidak mengakui aset dan liabilitas sewa di laporan posisi keuangan. Sebagai gantinya, sewa dibayar secara periodik dan biaya sewa diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi selama periode sewa;

3 PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam tahun pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan :

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer tempat Perusahaan beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi penjualan dan beban dari produk yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen Perusahaan, mata uang fungsional Perusahaan adalah Rupiah.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya

Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Perusahaan.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan

Badan Pengawasan dan Aset Daerah

4 KAS DAN BANK

Terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas		
Kas kecil	50.000.000	50.000.000
Kas ditangan	900.000	6.306.950
Sub Jumlah Kas	**50.900.000**	**56.306.950**
Bank (Rupiah)		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	16.090.630.786	9.263.442.534
PT Bank Nasional Indonesia Tbk	9.548.780.680	7.112.654.835
Perumda Bank Kota Bogor (catatan 41)	9.028.684.558	8.442.996.519
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	8.634.870.468	16.664.898.812
PT BPD Jawabarat Banten Tbk	7.404.303.381	7.072.667.414
PT Bank Jabar Banten Syariah	7.296.433.379	7.266.592.723
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	6.733.315.745	1.600.128.756
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	4.696.289.259	5.107.267.830
PT Bank Central Asia, Tbk	2.699.483.749	5.820.375.727
PT Bank OCBC NISP, Tbk	2.156.760.558	4.710.143.301
PT Bank Mega Syariah	1.661.442.937	1.608.648.884
PT Bank Pan Indonesia, Tbk	1.649.593.891	1.138.427.950
PT Bank KB Bukopin, Tbk	1.188.330.967	5.270.780.445
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	260.898.862	5.269.409.836
PT Bank SMBC Indonesia, Tbk	38.183.093	39.669.349
Sub Jumlah	**79.088.002.313**	**86.387.104.915**
Jumlah	**79.138.902.313**	**86.443.411.865**

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 tidak terdapat kas di bank yang dibatasi penggunaannya, Manajemen perusahaan telah menempatkan kas di Perumda Bank Kota Bogor yang merupakan pihak berelasi bagi perusahaan.

5 DEPOSITO

Terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	35.000.000.000	5.000.000.000
PT BPD Jawabarat Banten, Tbk	31.000.000.000	53.000.000.000
Perumda Bank Kota Bogor (catatan 41)	7.000.000.000	7.000.000.000
Jumlah	**73.000.000.000**	**65.000.000.000**

Perumda Bank Kota Bogor dengan Nomor Rekening/Bilyet 312-001-000003622, 312-001-000003623, 312-001-000003702, 312-001-000003741 dan 312-001-000003751 berjangka 1 (satu) tahun (06 Juni 2024; 07 Juni 2024; 19 September 2024 dan 09 Desember 2024, serta 23 Desember 2024) dengan tingkat suku bunga masing-masing 6,25 %, 6,255 % , 6,5 %, 6,5 %, & 6,5 %, untuk Deposito yang telah jatuh tempo secara otomatis diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang sama dengan tingkat bunga yang berlaku.

PT BPD Jawabarat Banten, Tbk Cabang Kota Bogor dengan Nomor Sertifikat A 750820 , A 985555, A916999 ; berjangka 1 (satu) bulan (22 Desember 2024 - 22 Januari 2025 dan 27 Desember 2024 - 27 Januari 2025 serta 29 Desember 2024-29 Januari 2025) dengan tingkat suku bunga 6,25 % / tahun , 6%/tahun, dan 6% untuk Deposito yang telah jatuh tempo secara otomatis diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang sama dengan tingkat bunga yang berlaku.

PT Bank Syariah Indonesia Kota Bogor dengan Nomor Sertifikat 00465031, berjangka 3 (tiga) bulan (29 Desember 2024 s/d 29 Maret 2025) dengan nisbah bank 48,00 % / tahun, Nomor Sertifikat 00626070, berjangka 3 (tiga) bulan (02 Desember 2024 s/d 02 Maret 2025) dengan nisbah bank 34,39 % / tahun, Nomor Sertifikat 00626188, berjangka 3 (tiga) bulan (02 November 2024 s/d 02 Februari 2025) dengan nisbah bank 33,06 % / tahun untuk Deposito yang telah jatuh tempo secara otomatis diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang sama dengan tingkat bunga yang berlaku.

Badan Keuangan dan Aset Daerah

6 PIUTANG USAHA

Terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Air	44.432.015.998	44.863.083.160
Non air	353.506.205	352.783.157
Ragu-ragu	1.437.360.500	2.192.373.750
Penyisihan piutang	(7.519.901.172)	(7.959.621.848)
Jumlah	**38.702.981.531**	**39.448.618.219**

Piutang ragu-ragu yaitu piutang air dan non air yang berumur lebih dari setahun, terdiri dari :

Air	1.284.720.700	2.004.828.750
Non air	152.639.800	187.545.000
Jumlah	**1.437.360.500**	**2.192.373.750**

Penyisihan piutang merupakan penyisihan atas tagihan air
PERUMDA Tirta Pakuan Kota Bogor telah melakukan opname atas saldo piutang rekening air dan rekening non air. Pelaksanaan opname atas saldo piutang tersebut dimaksudkan untuk menentukan besarnya penyisihan piutang yang berdasarkan piutang 3 (tiga) tahun ke belakang.

Dalam tahun 2024 telah dilakukan penghapusan Piutang Rekening Air dan Non Air yang berumur diatas 2 tahun berdasarkan Surat Keputusan Direksi PERUMDA Tirta Pakuan Kota Bogor Nomor 900/Kep.64-PERUMDA.TPKB/2024 tanggal 15 Agustus 2024, yaitu Piutang Rekening Air sebesar Rp. 1.969.567.800,00 dan Piutang Rekening Non Air sebesar Rp. 185.227.000,00. Dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas PERUMDA Tirta Pakuan Kota Bogor, berdasarkan Surat Nomor 900/019-DP.TPKB/2024 perihal Penghapusan Piutang.

7 PIUTANG LAIN-LAIN

Terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Uang Muka Workshop Dewas di Sumbar	37.770.000	-
Pengembalian uang muka kegiatan Lomba K3	33.012.500	-
Pengembalian Uang Muka survalience ISO 17025 QC	28.207.105	-
Uang Muka Munas V ASDEPAMSI	23.300.000	-
Pengembalian Uang Muka BBM Desember 2024	22.357.650	-
Pengembalian uang muka SPPD ke Bali	16.854.568	-
Pengembalian Uang Muka pelatihan Lemhanas	16.582.837	-
Pengembalian Uang Muka Media gathering 2024	15.767.500	-
Pengembalian Uang Muka operasional Humas Desember 2024	14.926.100	-
Uang Muka Operasional Bulan Agustus 2024 Dewas	10.000.000	-
Pengembalian uang muka ekstra fooding Desember2024	8.953.550	-
Pengembalian uang muka sosialisasi PB bulan Oktober 2024	6.574.500	-
Pengembalian Uang Muka team building	5.560.000	-
Pengembalian uang operasional Perlengkapan Oktober 2024	3.421.000	-
Pengembalian Uang Muka Desember 2024 Laboratorium	3.217.500	-
Pengembalian Uang Muka Operasional safety Breifing Desember 2024	2.387.500	-
Pengembalian Uang Muka operasional QHSE Desember 2024	2.300.000	-
Pengembalian uang muka Operasional Sekper Oktober 2024	2.025.000	-
Pengembalian Uang Muka bantuan stunting	1.380.400	-
Pengembalian Uang Muka Operasional Perawatan Desember 2024	273.800	-
Pengembalian Uang Muka Operasional Trandist Desember 2024	58.296	-
Pengembalian Uang Muka operasional Trandist November 2024	27.000	-
Pengembalian Uang Muka Operasional RT Desember 2024	19.290	-
Uang muka operasional PIU UWSSP	-	37.270.651
Pengembalian uang muka penyusunan HPS	-	8.301.000
Pengembalian uang muka operasional Dewas April 2023	-	1.545.550
Pengembalian uang muka lomba K3	-	18.793.000
Pengembalian Uang Muka kunker ke Austria	-	54.000.533
Jumlah dilanjutkan	**254.976.096**	**119.910.734**

Bukan Keuangan dan Aset Daerah

7 PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Jumlah lanjutan	**254.976.096**	**119.910.734**
Pengembalian uang muka operasional Sekper November 2023	-	3.707.000
Pengembalian uang muka gerakan pangan murah	-	12.015.192
Pengembalian uang muka Operasional trandist November 2023	-	1.500
Pengembalian uang muka perjalanan dinas ke Kepri	-	1.336.540
Pengembalian uang muka inventaris data calon pelanggan	-	7.154.496
Pengembalian Uang Muka operasional rumah tangga	-	9.004
Pengembalian Uang Muka Pajak STNK Desember2023	-	3.605.200
Pengembalian Uang Muka BBM Desember 2023	-	514.500
Pengembalian Uang Muka Desember 2023 Sub Dep Lab	-	798.200
Pengembalian Uang Muka Opr. Pengaman dalam	-	2.300.000
Pengembalian Muka Uang Inhouse Training	-	143.047.000
Uang Muka operasional perawatan	-	149.000
Pengembalian Uang Muka Operasional Perawatan	-	8.060.000
Pengembalian Uang Muka Operasional Humas	-	30.006.100
Pengembalian Uang Muka Pelatihan GIS	-	31.467.000
Uang Muka Operasional Bulan November 2023 Dewas	-	10.000.000
Rupa-rupa piutang lainnya	7.850.115	54.286.196
Jumlah	**262.826.211**	**428.367.662**

Dari jumlah piutang dinas tersebut diatas baru dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 183.906.096,- yaitu pada bulan Januari 2024 dan sisanya sebesar Rp. 182.799.366,- belum dapat dipertanggungjawabkan.

8 PENDAPATAN YANG AKAN DITERIMA

Pendapatan yang akan diterima merupakan pendapatan atas bunga deposito dari PT BPD Jawabarat dan Banten dan Perumda Bank Kota Bogor masing masing sebesar Rp 55.291.043 tahun 2024 dan Rp 61.934.386 pada tahun 2023.

9 PERSEDIAAN

Terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Bahan operasi		
Bahan Kimia	1.075.135.258	1.109.322.672
Alat Tulis Kantor	891.031.148	947.657.691
Suku Cadang	344.369.005	384.901.005
Rupa-rupa Bahan Operasi	269.955.912	76.953.332
Bahan Pembantu	47.004.238	40.882.532
Bahan Teknik Pipa/Pipa Persil	8.123.220	9.355.260
Meter Bekas	-	362.473.323
Sub Jumlah	**2.635.618.781**	**2.931.545.815**
Bahan Instalasi		
Rupa-rupa Bahan Instalasi	12.172.596.887	10.211.692.994
Meter Air	5.290.082.352	3.782.308.881
Pipa	2.498.015.747	2.499.779.839
Sub Jumlah	**19.960.694.986**	**16.493.781.714**
Cadangan Penurunan Nilai Bahan Instalasi	(37.758.037)	(2.142.668)
Jumlah	**22.558.555.730**	**19.423.184.861**

Jumlah persediaan per 31 Desember 2024 tersebut telah sesuai dengan hasil inventarisasi sesuai dengan *Logistic Information System* . Opname persediaan barang per 31 Desember 2024 sedang dalam proses.

Badan Keuangan dan Aset Daerah

10 BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
a. Jangka Pendek		
Asuransi bangunan	234.562.334	232.776.225
Asuransi kendaraan	91.887.416	172.885.218
Sewa kendaraan	73.304.400	-
Lainnya	589.132.000	127.622.000
Sub Jumlah	**988.886.150**	**533.283.443**
Detail biaya dibayar dimuka lainnya:		
CV Bela Persada - 20% DPT di Palasari	492.000.000	-
Kantor Kas Negara - Bea materai	97.132.000	127.622.000
Jumlah	**589.132.000**	**127.622.000**

Asuransi bangunan dan kendaraan dibayarkan kepada PT Asuransi Sinarmas.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
b. Jangka Panjang		
Sewa tanah	1.007.952.727	1.251.726.464

Sewa tanah milik PT. Kereta Api Indonesia di KM. 6+810 s/d 9+570 antara Batutulis-Maseng lintas Bogor; KM 52+265, KM 54+400 antara Cilebut Bogor, lintas Jakarta-Bogor, KM 2+8/9 antara Bogor-Batutulis, lintas Bogor-Yogyakarta sesuai dengan perjanjian No KL. 701/VI/103/DO.1/2021 tanggal 23 Juni 2021 , No KL. 701/VI/103/DO.1/2021 tanggal 23 Juni 2021.

Sewa tanah milik PT. Kereta Api Indonesia di KM. 6+810 s/d 9+570 antara Batutulis-Maseng lintas Bogor; KM 52+265, KM 54+400 antara Cilebut Bogor, lintas Jakarta-Bogor, KM 2+8/9 antara Bogor-Batutulis, lintas Bogor-Yogyakarta sesuai dengan perjanjian No KL. 701/XI/46/DO.1-2022 tanggal 03 November 2022.

Pengawasan keamanan operasional dan jalur kereta api pada perpotongan tidak sebidang (*crossing*) dan/atau persinggungan (sejajar) dengan jalur kereta api untuk penanaman pipa air sesuai dengan perjanjian No KL. 701/VIII/146/DO.1-2023 tanggal 21 agustus 2023.

Pemanfaatan lahan dan instalasi pengolahan air yang digunakan untuk pengolahan air minum di Jl Raya tajur nomor I Kecamatan Bogor Timur berupa tanah +/- 2.200 Meter persegi sesuai dengan perjanjian nomor : 690/SP.36 - PERUMDA TPKB/2024.

Penempatan jaringan pipa air HDPE diameter 16 dan 8 mm di ruas jalan raya Pajajaran STA 3+700 s.d 4+600 sesuai dengan perjanjian No KL. 701/VIII/146/DO.1-2023 tanggal 21 agustus 2023.

11 ASET TETAP

Terdiri dari:

	2024				
	Saldo awal 31-Des-23	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo awal 31-Des-24
Nilai Perolehan					
Tanah dan Hak atas Tanah	56.178.026.911	16.469.787.000	-	-	72.647.813.911
Instalasi Sumber Air	25.429.566.189	3.069.265.000	-	-	28.498.831.189
Instalasi Perpompaan	33.105.914.375	11.939.070.900	-	-	45.044.985.275
Instalasi Pengolahan Air	166.370.743.472	8.022.938.400	292.926.500	-	174.100.755.372
Instalasi Transmisi dan Distribusi	690.405.018.425	91.980.987.789	5.122.061.246	-	777.263.944.968
Bangunan dan Gedung	19.770.787.148	11.486.087.500	-	-	31.256.874.648
Peralatan dan Perlengkapan	15.950.145.686	1.945.222.500	-	-	17.895.368.186
Alat Pengangkutan dan Kendaraan	14.244.918.595	-	7.243.510.320	-	7.001.408.275
Perabot Inventaris Kantor	43.099.091.241	1.457.689.650	-	-	44.556.780.891
Aset tidak berwujud	-	852.925.525	-	(852.925.525)	-
Jumlah	1.064.554.212.042	117.223.974.264	12.658.498.066	(852.925.525)	1.198.266.762.715

Badan Pengelolaan Aset Daerah

11 ASET TETAP (lanjutan)

	2024				
	Saldo awal 31-Des-23	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo awal 31-Des-24
Akumulasi penyusutan					
Instalasi Sumber Air	11.185.101.961	1.655.977.167	-	-	12.841.079.128
Instalasi Perpompaan	14.650.054.737	3.691.722.819	-	-	18.341.777.556
Instalasi Pengolahan Air	97.000.935.143	8.508.121.077	30.513.177	-	105.478.543.043
Instalasi Transmisi dan Distribusi	368.830.017.827	55.677.300.091	4.663.747.640	-	419.843.570.278
Bangunan dan Gedung	10.822.930.995	1.155.678.420	-	-	11.978.609.415
Peralatan dan Perlengkapan	12.442.153.022	1.407.609.948	-	-	13.849.762.970
Alat Pengangkutan dan Kendaraan	11.152.155.753	908.427.557	6.792.276.178	-	5.268.307.132
Perabot Inventaris Kantor	36.201.193.850	2.460.214.170	-	-	38.661.408.020
Amortisasi Hak Atas Tanah	162.127.420	9.020.500	-	-	171.147.920
Aset tidak berwujud	-	53.307.845	-	(53.307.845)	-
Jumlah	**562.446.670.708**	**75.527.379.594**	**11.486.536.995**	**(53.307.845)**	**626.434.205.462**
Penurunan nilai	125.832.323				125.832.323
Nilai Buku	**501.981.709.011**				**571.706.724.930**

	2023				
	Saldo awal 31-Des-22	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo awal 31-Des-23
Nilai Perolehan					
Tanah dan Hak atas Tanah	56.178.026.911	-	-	-	56.178.026.911
Instalasi Sumber Air	21.664.477.429	3.765.088.760	-	-	25.429.566.189
Instalasi Perpompaan	24.771.146.775	8.334.767.600	-	-	33.105.914.375
Instalasi Pengolahan Air	156.822.068.622	9.548.674.850	-	-	166.370.743.472
Instalasi Transmisi dan Distribusi	595.525.076.390	94.879.942.035	-	-	690.405.018.425
Bangunan dan Gedung	19.056.037.148	714.750.000	-	-	19.770.787.148
Peralatan dan Perlengkapan	14.296.143.074	1.654.002.612	-	-	15.950.145.686
Alat Pengangkutan dan Kendaraan	14.277.418.595	-	32.500.000	-	14.244.918.595
Perabot Inventaris Kantor	40.427.370.459	2.671.720.782	-	-	43.099.091.241
Aset tidak berwujud	658.885.000	-	-	(658.885.000)	-
Jumlah	**943.676.650.403**	**121.568.946.639**	**32.500.000**	**(658.885.000)**	**1.064.554.212.042**
Akumulasi penyusutan					
Instalasi Sumber Air	10.183.083.605	1.002.018.356	-		11.185.101.961
Instalasi Perpompaan	12.230.458.928	2.419.595.809	-		14.650.054.737
Instalasi Pengolahan Air	88.779.264.602	8.221.670.541	-		97.000.935.143
Instalasi Transmisi dan Distribusi	332.714.984.280	36.115.033.547	-		368.830.017.827
Bangunan dan Gedung	9.976.387.477	846.543.518	-		10.822.930.995
Peralatan dan Perlengkapan	11.273.463.307	1.168.689.715	-		12.442.153.022
Alat Pengangkutan dan Kendaraan	9.991.828.559	1.160.327.194	-		11.152.155.753
Perabot Inventaris Kantor	32.870.905.556	3.330.288.294	-		36.201.193.850
Amortisasi Hak Atas Tanah	153.106.920	9.020.500	-		162.127.420
Aset tidak berwujud	658.885.000	-	-	(658.885.000)	
Jumlah	**508.832.368.234**	**54.273.187.474**	**-**	**(658.885.000)**	**562.446.670.708**
Penurunan nilai	125.832.323				125.832.323
Nilai Buku	**434.718.449.846**				**501.981.709.011**

Bagian Keuangan dan Aset Daerah

11 ASET TETAP (lanjutan)

Berdasarkan surat persetujuan dari Wali Kota Bogor Nomor 000.2.3.2/5248-BKAD tanggal 18 Oktober 2024 tentang persetujuan penghapusan barang daerah yang dipisahkan, Perusahaan telah melakukan penghapusan aset tetap berupa 14 unit kendaraan roda 4 dan 30 Unit kendaraan roda 2, serta 20.000 unit meteran bekas, keuntungan atas pelepasan aset tersebut sebesar Rp 3.784.854.695 dicatat sebagai pendapatan keuntungan penjualan aktiva tetap.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 18 April 2024 tentang penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor, pada tahun 2024 perusahaan telah memperoleh penyertaan modal dari Pemerintah Kota Bogor dalam bentuk aset tetap (Tanah dan bangunan serta jaringan induk distribusi air) sebesar Rp 47.819.268.000.

Manajemen perusahaan telah mengasuransikan bangunan dan kendaraan dari risiko kebakaran dan kecelakaan.

12 ASET TAK BERWUJUD

Terdiri dari:

	2024				
	Saldo awal 31-Des-23	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo awal 31-Des-24
Nilai Perolehan					
Perangkat lunak	658.885.000	-	-	852.925.525	1.511.810.525
Jumlah	**658.885.000**	-	-	**852.925.525**	**1.511.810.525**
Amortisasi					
Perangkat lunak	658.885.000	-	-	53.307.845	712.192.845
Jumlah	**658.885.000**	-	-	**53.307.845**	**712.192.845**
Nilai Buku	-				**799.617.680**

	2023				
	Saldo awal 31-Des-22	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo awal 31-Des-23
Nilai Perolehan					
Perangkat lunak	-	-	-	658.885.000	658.885.000
Jumlah	-	-	-	**658.885.000**	**658.885.000**
Amortisasi					
Perangkat lunak	-	-	-	658.885.000	658.885.000
Jumlah	-	-	-	**658.885.000**	**658.885.000**
Nilai Buku	-				-

13 ASET DALAM PENYELESAIAN

Terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
PT Rajawali - penataan lahan depan database	463.050.000	-
CV Bela Persada - DPT Palasari	373.969.200	234.656.000
PT Matrasarakan Sinergita - DED Jembatan Tipe F	239.814.000	239.814.000
PT Uta E Consultant - DED SPAM Danau Bogor Raya	239.580.000	239.580.000
PT Muara Consultant - FS SPAM Danau Bogor Raya	237.689.000	237.689.000
CV Dua Belas Konstruksi - Interior gedung TC	177.808.020	-
PT. Marga Sarana Bumi - Jasa konsultan supervisi Jabaru	-	180.955.500
PT Priangan Raya Utama	-	138.944.000
Alocita Mandiri	-	240.210.000
PT Ababa Pemerata - penertiban pipa dinas	-	96.886.000
CV Rival - pembuatan manhole meter induk	-	105.830.000
CV Rival - 70% pemasangan pipa HDPE bogor country	-	4.602.187.600
CV Vitaloka Junior - 70% pemagaran rumah pompa	-	67.551.400
PT Putra Bangsa Inovasi - pembangunan gudang cipaku	-	3.670.970.500
Sub Jumlah	**1.731.910.220**	**10.055.274.000**
Pemasangan saluran transdist untuk ganti meter pelanggan	438.162.589	41.784.665
Pemasangan saluran transdist untuk pelanggan	44.388.810	89.440.359
Jumlah	**2.214.461.619**	**10.186.499.024**

Bagian Keuangan dan Aset Daerah

14 UANG JAMINAN

Terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Uang jaminan listrik	349.539.649	349.539.649
Uang jaminan pekerjaan	60.000.000	60.000.000
Uang jaminan telepon	187.800	187.800
Uang jaminan pos dan giro	150.000	150.000
Jumlah	**409.877.449**	**409.877.449**

15 PROPERTI INVESTASI

Terdiri dari:

	2024				
	Saldo awal 31-Des-23	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo awal 31-Des-24
Nilai Perolehan					
Bangunan	139.747.000	-	-	-	139.747.000
Jumlah	**139.747.000**	-	-	-	**139.747.000**
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	70.455.780	6.987.350	-	-	77.443.130
Jumlah	**70.455.780**	**6.987.350**	-	-	**77.443.130**
Nilai Buku	**69.291.220**				**62.303.870**

	2023				
	Saldo awal 31-Des-22	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo awal 31-Des-23
Nilai Perolehan					
Bangunan	139.747.000	-	-	-	139.747.000
Jumlah	**139.747.000**	-	-	-	**139.747.000**
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	63.468.430	6.987.350	-	-	70.455.780
Jumlah	**63.468.430**	**6.987.350**	-	-	**70.455.780**
Nilai Buku	**76.278.570**				**69.291.220**

Properti investasi merupakan bangunan yang disewakan untuk gerai mesin ATM yang berlokasi di Jl. Siliwangi No. 121, Bogor 16142.

16 UTANG USAHA

Terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pihak ketiga:		
PT Mandala Adthya Utama	774.956.504	-
CV Rolet	587.209.121	157.909.876
CV SIS Gemilang	586.657.060	448.545.475
PT Banyu indo Andalan Persada	491.508.000	-
PT Inti Karunia Sentosa	485.969.000	-
CV Bayu Kahuripan Abadi	372.210.130	-
CV Daehan Co	327.529.444	-
PT Tunas Tirta Persada	310.383.443	-
PT Khlorin Inti	256.683.068	322.923.990
CV Bintang Jaya Sentosa	235.166.376	-
PT Jayaraya Kimia Inti	178.625.000	101.174.920
Jumlah dipindahkan	**4.606.897.146**	**1.030.554.261**

Badan Keuangan dan Aset Daerah

16 UTANG USAHA (lanjutan)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Jumlah pindahan	**4.606.897.146**	**1.030.554.261**
CV Maju Utama	172.600.560	115.752.000
CV Prima Multicons	171.590.802	-
CV Banteng Gading Amerta	126.140.400	-
CV Jasa Rakatama	91.081.299	-
CV Rekakova	11.787.234	-
PT Cakrawala Indopac	-	657.716.560
CV Putera Indo Jaya	-	55.944.000
PT Kereta Api Indonesia	-	116.550.000
CV Winduhaji Lestari	-	92.125.773
CV Nawaroe Bersaudara	-	136.582.249
PT Daun Biru Engineering	-	271.500.894
CV Cipta Kanaka Asri	-	653.892.028
Jumlah	**5.180.097.441**	**3.130.617.765**

17 UTANG LAIN-LAIN

Terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Bunga bank (IBRD World Bank)	543.668.056	612.465.556
DHHD terbuka	547.400	30.747.000
Jumlah	**544.215.456**	**643.212.556**

18 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Biaya YMH Dibayar lainnya	22.764.329.888	37.374.911.956
Hutang Masa Pemeliharaan	7.539.228.853	5.543.130.753
Biaya YMH Dibayar/DHHD Terbuka	4.161.542.162	4.669.472.626
Premi Asuransi	35.467.028	34.054.553
Jumlah	**34.500.567.931**	**47.621.569.888**

Biaya Yang Masih Dibayar lainnya merupakan tagihan pihak ke tiga atas masa pemeliharaan dan rupa-rupa lainnya

19 PERPAJAKAN

Terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
a. Utang pajak		
Pajak Penghasilan:		
Pasal 21	5.033.590.608	7.375.665.473
Pasal 25	4.237.978.122	2.817.573.064
Pasal 23	1.339.396.483	-
Pasal 29	235.542.777	391.918.684
Pasal 4 ayat (2)	16.647.149	21.399.948
Pajak Pertambahan Nilai	418.161.671	26.918.001
Jumlah	**11.281.316.810**	**10.633.475.170**

Saldo Hutang PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23, PPN, PPh pasal 4 ayat 2 per 31 Desember 2024 telah disetor pada bulan Januari 2024 sedangkan PPh Badan masih terhutang.

Bagian Keuangan dan Aset Daerah

19 PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban pajak

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pajak kini	20.310.735.720	16.155.634.000
Jumlah	**20.310.735.720**	**16.155.634.000**

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dengan laba kena pajak Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Laba sebelum pajak	79.428.936.989	67.332.370.477
Beda Permanen:		
Kesejahteraan Karyawan	4.093.008.399	6.483.643.767
Penyusutan Mess	5.617.765	5.617.765
Sumbangan	1.008.289.100	786.212.800
Sanksi administrasi	3.142.906.797	-
Bantuan dharmawanita persatuan perumda	150.000.000	-
Rupa-rupa biaya umum lainnya	9.894.050	-
Biaya Representasi Direksi	1.235.000.000	1.330.000.000
Biaya Telekomunikasi (pulsa)	179.257.854	189.240.262
PPh Pasal 4 (2)	107.286.372	42.500.000
Bunga deposito	(3.997.547.922)	(3.156.107.546)
Biaya Sosial & Kesejahteraan	613.773.500	-
Beda temporer		
Penyisihan Piutang Usaha	1.715.074.124	3.116.204.667
Penghapusan Piutang Usaha	(2.154.794.800)	(2.694.981.329)
Penyisihan uang katineung	9.291.165.268	-
Pembayaran uang katineung	(2.506.340.718)	-
Penghasilan Kena Pajak	**92.321.526.778**	**73.434.700.863**
Pembulatan	**92.321.526.000**	**73.434.700.000**
Pajak kini	**20.310.735.720**	**16.155.634.000**
Kredit pajak:		
Pajak Penghasilan Pasal	16.072.757.598	13.338.060.716
Utang Pajak Penghasilan Pasal 29	**4.237.978.122**	**2.817.573.284**

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum beban pajak penghasilan seperti yang dilaporkan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Laba sebelum pajak penghasilan	**79.428.936.989**	**67.332.370.477**
Pajak dihitung pada tarif pajak yang berlaku	17.474.366.138	14.813.121.505
Pengaruh pajak atas beda permanen	1.440.446.901	1.249.843.551
Pengaruh pajak atas beda temporer	1.395.922.852	92.669.134
Efek pembulatan	(83)	(190)
Beban Pajak Penghasilan	**20.310.735.808**	**16.155.634.000**

20 TITIPAN RETRIBUSI

Terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pihak berelasi:		
Pemerintah Kota Bogor	412.727.100	620.433.700
Jumlah	**412.727.100**	**620.433.700**

Badan Keuangan dan Aset Daerah

21 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Uang muka sewa kantor cabang BJB	518.018.006	-
Uang muka lain-lain	255.293.148	661.797.024
Uang muka sewa tanah PT.Bali Telkom	235.000.000	295.000.000
Uang muka sewa ATM BJB	110.691.663	-
Uang muka sewa ATM Mandiri	94.834.097	34.034.168
Uang muka sewa ATM BNI	86.625.000	27.499.998
Uang muka sewa ATM BRI	16.200.000	16.200.000
Uang muka sewa ATM Bank Kota Bogor	14.583.330	49.583.322
Uang muka Hankam	8.310.095	8.310.095
Jumlah	**1.339.555.339**	**1.092.424.607**

Jumlah tersebut merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa ruang ATM & sewa tanah berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Bank BNI No.: 695/SP.55-PERUMDA.TPKB/2024 tgl. 10 Juli 2024; Bank Mandiri No.690/SP.70-PERUMDA.TPKB/2024 Bulan 06 September 2024; Bank BRI No.:No.695/SP.02- PERUMDA.TPKB/2020, Tanggal 08 Januari 2020 ; PT. Bali Telekom No.:690/SP.44/PERUMDA/2023 tgl. 07 februari 2023 , Bank Kota Bogor nomor 690/SP.59-PERUMDA.TPKB/2023 tgl. 31 MEI 2023, Bank BJB nomor 695/SP.107-PERUMDA.TPKB/2023 tgl. 27 November 2023.

22 UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Imbalan paska kerja jangka pendek	11.633.420.646	6.793.740.768
Sambungan baru yang masih harus dipasang	4.024.145.812	2.721.668.239
Hutang jangka pendek pasang baru	2.405.570.631	1.362.868.580
Titipan rekening air	205.901.039	335.669.780
Jumlah	**18.269.038.128**	**11.213.947.367**

23 UTANG BANK

Terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
a. Bagian Utang Bank Jangka Pendek		
World Bank	5.484.766.179	5.484.766.179
PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk.	5.385.787.125	5.385.787.125
Jumlah	**10.870.553.304**	**10.870.553.304**
b. Bagian Utang Bank Jangka Panjang		
World Bank	43.878.129.422	49.362.895.598
PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk.	37.700.509.847	43.086.296.972
Jumlah	**81.578.639.269**	**92.449.192.570**

1) IBRD SLA 1226/DSMI/2009/2 November 2009

Hutang tersebut karena adanya perjanjian antara Pemerintah Kota Bogor dengan PERUMDA Tirta Pakuan Kota Bogor tentang Pelaksanaan Penerusan Pinjaman Pembiayaan UWSSP Kota Bogor dengan ketentuan :

Loan Agreement (NPPLN)	Ln 7730-ID/1 September 2009
Sub Loan (NPPP)	SLA 1226/DSMI/2009/2 November 2009
Pagu Pinjaman	Rp85.204.000.000

Bunga NPPLN LIBOR + Variable Spreed+5,02 % per tahun terhitung sejak penarikan pinjaman.
Bunga Tunggakan 0,5 % diatas tingkat suku bunga.
Jangka Waktu 24,5 tahun termasuk masa tenggang 9 tahun
Jumlah Hutang Pokok Pinjaman Penerusan, dibayar dalam 31 kali angsuran setiap 15 April dan 15 Oktober
Angsuran pertama mulai dibayarkan pada tanggal 15 Oktober 2018 dan terakhir pada tanggal 15 Oktober 2033.

Bagian Keuangan dan Akuntansi

23 UTANG BANK (lanjutan)

2) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa barat dan Banten Tbk

Saldo Hutang Jangka Panjang Per 31 Desember 2023 merupakan penarikan dana berdasarkan perjanjian kredit nomor 97 tanggal 20 Desember tahun 2023 PT BPD Jabar & Banten Tbk dengan PERUMDA Tirta Pakuan Kota Bogor dengan .

Pagu Pinjaman	Rp. 54.700.000.000
Suku bunga :	Suku bunga acuan menjadi beban PERUMDA Tirta Pakuan Kota Bogor ditambah subsidi bunga yang dibayarkan oleh Pemerintah
Suku bunga acuan	mengacu pada PerMenkeu nomor 60/PMK.08/2020
Jangka Waktu kredit	120 bulan TMT 20 Desember 2022 s/d 20 Desember 2032
Pembayaran pokok	setiap tanggal 23 tiap bulan sejak bulan Januari 2024

24 JAMINAN PELANGGAN

Uang jaminan pelanggan untuk tahun 2024 dan 2023 masing masing sebesar Rp2.899.950.175 dan Rp2.915.386.525, merupakan jumlah tersebut merupakan Uang Jaminan Pelanggan Air (UJPA) yang telah disetor oleh para pelanggan sampai dengan 31 Desember 2000, mulai tahun 2003 para pelanggan tidak dikenakan UJPA sesuai dengan Kep.Men OTDA No.8 Tahun 2000. Pengurangan terjadi karena dikompensasikan dengan tunggakan para pelanggan.

25 IMBALAN PASCA KERJA

Perhitungan atas utang imbalan pasca kerja per 31 Desember 2024 dan 2023 dilakukan oleh Dapenma Pamsi, dengan asumsi utama sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Tabel Mortalita	GAM - 1951 Male	Annuity 1949 Modified
Tingkat Bunga	7,50%	8,00%
Tingkat Kenaikan PhDP	4,50%	4,50%
Usia Pensiun normal	56	56
Maksimum Manfaat Pensiun Peserta	80% x PhDP	80% x PhDP
Maksimum Manfaat Pensiun Direksi	75% x PhDP	75% x PhDP
Mutasi kekayaan pendanaan:		
Saldo awal kekayaan	157.051.928.646	142.481.460.074
Kewajiban iuran jatuh tempo	10.053.012.920	10.005.294.029
Proporsi pengembangan (hasil usaha)	11.692.562.392	11.017.875.344
Pembayaran pensiunan	(8.343.540.311)	(6.599.181.954)
Proporsi selisih penilaian investasi	(1.640.123.602)	146.481.153
Saldo akhir kekayaan	168.813.840.045	157.051.928.646
Nilai Kini Aktuarial (NKA)	205.213.514.897	190.059.502.188
Jumlah Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	**36.399.674.852**	**33.007.573.542**

Perhitungan Uang jasa pengabdian atau uang penghargaan per 31 Desember 2024 dan 2023 mengacu pada surat keputusan Direksi Nomor 800/Kep.07-Peg.Perumda.TPKB/2023 tanggal 3 Januari 2023.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
a. Imbalan pasca kerja jangka pendek		
IPK Dapenma Pamsi	4.532.650.476	4.644.389.928
Jasa Pengabdian Katineung	7.100.770.170	2.149.350.840
Jumlah	**11.633.420.646**	**6.793.740.768**
b. Imbalan pasca kerja jangka panjang		
IPK Dapenma Pamsi	31.867.024.376	28.363.183.614
Jasa Pengabdian Katineung	11.292.536.890	9.459.131.670
Jumlah	**43.159.561.266**	**37.822.315.284**

Badan Keuangan dan Aset Daerah

26 MODAL

Terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pemerintah kota bogor	327.951.510.000	280.132.242.000
Pemerintah pusat	29.120.142.000	32.762.894.200
Jumlah	**357.071.652.000**	**312.895.136.200**

Detail setoran modal:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Modal Pemerintah pusat:		
Pemasangan Pipa HDPE distribusi dan retikulasi bantuan APBN 2009-2010 di lima kecamatan Kota Bogor, s/d Maret 2011 belum ada serah terima.	12.885.773.000	12.885.773.000
Instalasi Pengolahan Air (IPA) Lengkap Palasari, sesuai Berita Acara Serah terima sementara Pengelolaan Sementara Nomor 099/BASTP/PSPAM-IKK/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008.	-	3.642.752.200
Bangunan prasedimentasi dan jaringan perpipaan transmisi dan distribusi dia 100 mm di Ciherang Pondok kab Bogor, yang dibangun oleh SVNT pelaksana pengelolaan SDA Ciliwung-Cisadane Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum sesuai dengan amandemen II Mutual Check akhir (MC-100) No.KU08.10/PPKPAB/SNVTPVSDACC/XII/1403 tanggal 27 Des 2010 yang oleh PDAM telah dioperasikan sejak 31 Desember 2010.	16.234.369.000	16.234.369.000
Jumlah Modal Pemerintah Pusat	**29.120.142.000**	**32.762.894.200**
Modal Pemerintah Kota Bogor:		
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 18 April 2024 :		
Prasarana dan Sarana Sistem Penyediaan Air Bersih di Desa Tegal Gundil Kota Bogor, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima pengelolaan sementara Nomor : 02/BA/ca.09/1998 tanggal 25 Mei 1998.	644.946.000	644.946.000
Berasal dari nilai DIP : nilai tanah, bangunan, mesin dan perlengkapan, pipa induk, rupa-rupa pabrik air, persediaan, dll. Tahun 1987.	1.036.740.801	1.036.740.801
Penerimaan sarana dan prasarana, seperti bangunan konstruksi, pabrik air, kendaraan dll. (Berita Acara Nomor 64/BA/Pemb./1991/1992 tgl 25 April 1992).	457.433.050	457.433.050
Dana pendamping Pemda Provinsi Jabar pada Proyek P3KT, tahun 1995, 1996, dan 1997.	3.921.657.252	3.921.657.252
Bantuan Colombo Plan, tahun 1977, $2.900.500 dengan kurs Rp520,00.	1.508.260.000	1.508.260.000
Bantuan dari Negeri Belanda, tahun 1989, berupa komputer, alat laboratorium, peralatan bengkel, kendaraan dan logam detektor.	450.828.691	450.828.691
Modal awal berupa kekayaan dikurangi hutang atau kekayaan bersih .	518.176.260	518.176.260
Penyertaan Pemda Kota Bogor 1992 s/d 2009, setelah dikompensasi dengan hutang Rp471.186.802,67.	10.778.813.197	10.778.813.197
Setoran dari bagian laba Pemkot Bogor Tahun 2003 s/d tahun 2008.	24.143.699.078	24.143.699.078
Dana Pendamping tahun 2007 dan 2008.	2.848.275.259	2.848.275.259
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Program Hibah Air Minum, tahun 2010.	2.000.000.000	2.000.000.000
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Urban Water Suply & Sanitation Project (UWSSP), tahun 2010.	5.820.000.000	5.820.000.000
Setoran dari bagian laba Pemkot Bogor Tahun 2009.	10.862.102.432	10.862.102.432

Badan Keuangan dan Aset Daerah

26 MODAL (lanjutan)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Tambahan Penyertaan Modal tahun 2010. (Dana Pendamping)	617.733.568	617.733.568
Setoran dari bagian laba Pemkot Bogor Tahun 2010.	9.940.701.000	9.940.701.000
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Program Hibah Air Minum, tahun 2011.	3.000.000.000	3.000.000.000
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Program Bank Dunia, tahun 2011.	6.437.000.000	6.437.000.000
Setoran dari bagian laba Pemkot Bogor Tahun 2011.	12.279.435.000	12.279.435.000
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Program Hibah Air Minum, tahun 2012.	2.000.000.000	2.000.000.000
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Program Bank Dunia, tahun 2012.	5.429.000.000	5.429.000.000
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Pembebasan lahan Intake, tahun 2012.	10.000.000.000	10.000.000.000
Setoran dari bagian laba Pemkot Bogor Tahun 2012	15.122.405.000	15.122.405.000
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Pembebasan lahan Intake, tahun 2012.	4.088.235.294	4.088.235.294
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Pembebasan Reservoir Zona 4.	2.400.000.000	2.400.000.000
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Perluasan Jaraingan Distribusi	1.200.000.000	1.200.000.000
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Program Kehilangan Air	2.500.000.000	2.500.000.000
Setoran dari bagian laba Pemkot Bogor Tahun 2013.	17.651.447.957	17.651.447.957
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Program water hibah, tahun 2013.	6.000.000.000	6.000.000.000
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Perluasan Jaraingan Distribusi	5.300.000.000	5.300.000.000
Dana pendamping Pemda Kota Bogor pada Program Kehilangan Air	2.622.000.000	2.622.000.000
Pengembalian Kelebihan dana pendamping program kehilangan air	(500.000.000)	(500.000.000)
Penyertaan modal Pemkot Bogor Tahun 2015.	10.921.110.161	10.921.110.161
Penyertaan modal Pemkot Bogor Tahun 2016.	52.898.242.000	52.898.242.000
Penyertaan modal Pemkot Bogor Tahun 2017.	10.934.000.000	10.934.000.000
Penyertaan modal Pemkot Bogor Tahun 2019.	10.000.000.000	10.000.000.000
Penyertaan modal Pemkot Bogor Tahun 2020.	24.300.000.000	24.300.000.000
Penyertaan modal Pemkot Bogor Tahun 2024.	47.819.268.000	-
Jumlah Modal Pemerintah Kota Bogor	**327.951.510.000**	**280.132.242.000**
Mutasi Modal:		
Saldo per 31 Desember 2008	35.808.026.323	35.808.026.323
Tambahan Penyertaan Modal 2009	1.470.000.000	1.470.000.000
Pembagian Laba Tahun 2008	9.030.803.266	9.030.803.266
Saldo per 31 Desember 2009	**46.308.829.589**	**46.308.829.589**
Tambahan Penyertaan modal 2010	8.437.733.568	8.437.733.568
Tambahan Penyertaan modal sementara Pemerintah Pusat	16.528.525.200	16.528.525.200
Pembagian Laba Tahun 2009	10.862.102.432	10.862.102.432
Saldo per 31 Desember 2010	**82.137.190.789**	**82.137.190.789**

Badan Keuangan dan Aset Daerah

26 MODAL (lanjutan)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	82.137.190.789	**82.137.190.789**
Tambahan Penyertaan modal 2011	9.940.701.000	9.940.701.000
Tambahan Penyertaan (Dana Pendamping)	9.437.000.000	9.437.000.000
Tambahan Penyertaan modal sementara Pemerintah Pusat	16.234.369.000	16.234.369.000
Saldo per 31 Desember 2011	**117.749.260.789**	**117.749.260.789**
Tambahan Penyertaan modal 2012	12.279.435.000	12.279.435.000
Penyertaan Dana Pendamping Water Hibah	2.000.000.000	2.000.000.000
Penyertaan Dana Pendamping Bank Dunia	5.429.000.000	5.429.000.000
Penyertaaan Pembebasan lahan Intake	10.000.000.000	10.000.000.000
Saldo per 31 Desember 2012	**147.457.695.789**	**147.457.695.789**
Tambahan Penyertaan modal 2013	15.122.405.000	15.122.405.000
Penyertaan Pembebasan Lahan Intake	4.088.235.294	4.088.235.294
Penyertaan Dana Pendamping Reservoir Zona 4	2.400.000.000	2.400.000.000
Penyertaan Dana Pendamping Jaringan Distribusi	1.200.000.000	1.200.000.000
Penyertaan Program Kehilangan Air	2.500.000.000	2.500.000.000
Saldo per 31 Desember 2013	**172.768.336.083**	**172.768.336.083**
Tambahan Penyertaan modal 2014	17.651.447.956	17.651.447.956
Tambahan Penyertaan Program water hibah	6.000.000.000	6.000.000.000
Tambahan Penyertaan perluasan jaringan	5.300.000.000	5.300.000.000
Tambahan Penyertaan Program kehilangan air	2.622.000.000	2.622.000.000
Pengembalian kelebihan dana pendamping program kehilangan air	(500.000.000)	(500.000.000)
Saldo per 31 Desember 2014	**203.841.784.039**	**203.841.784.039**
Tambahan Penyertaan modal 2015	10.921.110.161	10.921.110.161
Saldo per 31 Desember 2015	**214.762.894.200**	**214.762.894.200**
Tambahan Penyertaan modal 2016	52.898.242.000	52.898.242.000
Saldo per 31 Desember 2016	**267.661.136.200**	**267.661.136.200**
Tambahan Penyertaan modal 2017	10.934.000.000	10.934.000.000
Saldo per 31 Desember 2018	**278.595.136.200**	**278.595.136.200**
Tambahan Penyertaan modal 2019	10.000.000.000	10.000.000.000
Saldo per 31 Desember 2019	**288.595.136.200**	**288.595.136.200**
Tambahan Penyertaan modal 2020	24.300.000.000	24.300.000.000
Saldo per 31 Desember 2020	**312.895.136.200**	**312.895.136.200**
Tambahan Penyertaan modal 2024	47.819.268.000	-
Instalasi Pengolahan Air Palsari tahun 2010	(3.642.752.200)	-
Saldo per 31 Desember 2024	**357.071.652.000**	**312.895.136.200**

27 CADANGAN UMUM

Terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Saldo awal	35.630.193.876	33.361.316.942
Penambahan	17.911.857.767	2.268.876.934
Saldo Akhir	**53.542.051.643**	**35.630.193.876**

Saldo Cadangan umum tersebut merupakan dana yang tersedia berasal dari pembagian laba bersih untuk cadangan umum PERUMDA Tirta Pakuan Kota Bogor sesuai dengan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 21 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengelolaan PERUMDA Tirta Pakuan Kota Bogor Pasal 27 ayat (2) menetapkan penggunaan laba bersih setelah Pajak Penghasilan.

Pembagian laba tahun 2023 ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota Bogor Nomor 900.1.13.2/Kep.154-Bag.Ekon/2024 tentang penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah Kota Bogor Tahun Buku 2023 tanggal 8 Mei 2024. Berdasarkan keputusan tersebut penggunaan laba tahun 2023 untuk pemenuhan dana cadangan ditetapkan sebesar 35%.

Badan Keuangan dan Aset Daerah

28 SALDO LABA

Terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Saldo awal	106.522.708.315	93.223.150.505
Penambahan	4.617.545.807	13.299.557.810
Saldo Akhir	**111.140.254.122**	**106.522.708.315**

Laba ditahan merupakan pembentukan sisa laba bersih setelah pajak penghasilan dengan peraturan daerah Nomor : 21 tahun 2019 tentang pengelolaan PERUMDA Tirta Pakuan Kota Bogor.

29 LABA TAHUN BERJALAN

Jumlah tersebut merupakan perhitungan laba perusahaan tahun2024 dan 2023 dengan perincian sebagai berikut :

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	79.428.936.989	67.332.370.477
Pajak Penghasilan badan	(20.310.735.720)	(16.155.634.000)
Laba Bersih	**59.118.201.269**	**51.176.736.477**

30 PENJUALAN AIR

Terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Harga air	319.233.632.195	286.842.438.151
Abodemen	56.633.583.800	55.067.310.300
Penjualan air lainnya	30.382.000	27.737.000
Jumlah	**375.897.597.995**	**341.937.485.451**

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 900.1.13.2/Kep.285-Ekon/2023 Tahun 2023 tanggal 26 September 2023 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor melakukan penyesuaian tarif air minum yang berlaku untuk rekening Oktober 2023 & ditagihkan bulan November 2023.

Penyesuaian tarif air minum tahun 2023 menjadi sebagai berikut :

No	Golongan Pelanggan	Pemakaian Air (Water Using)			
		0 s/d 10 m3	11 s/d 20 m3	21 s/d 30 m3	>30 m3
1	Sosial Umum (S1)	800	1.000	1.100	1.200
2	Sosial Khusus (S2)	1.800	2.700	3.000	3.200
3	Rumah Tangga (R1)	2.000	3.000	3.300	3.500
4	Rumah Tangga (R2)	2.500	3.500	4.500	4.700
5	Rumah Tangga (R3)	3.500	4.700	5.500	5.600
6	Rumah Tangga (R4)	4.000	5.900	6.200	6.300
7	Rumah Tangga (R5)	5.200	6.700	7.200	7.300
8	Rumah Tangga (R6)	7.500	10.600	11.000	11.300
9	Rumah Tangga (R7)	9.000	12.400	13.200	13.600
10	Rumah Tangga (R8)	10.300	14.200	15.000	15.400
11	Instansi Pemerintah (IP)	11.000	12.500	13.500	14.500
12	Niaga (N1)	9.900	13.500	16.000	16.500
13	Niaga (N2)	11.000	12.500	13.500	14.500
14	Niaga (N3)	12.100	19.000	23.000	23.500
15	Niaga (N4)	13.200	20.000	25.000	26.000
16	Indsutri (I1)	16.000	23.000	26.000	27.000
17	Industri (I2)	17.500	24.000	29.000	29.000

Bagian Keuangan dan Aset Daerah

31 PENJUALAN NON AIR

Terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Denda	12.104.252.655	10.327.743.400
Sambungan baru	9.849.085.232	13.384.787.515
PB bukaan kembali	728.306.795	634.445.135
Administrasi retikulasi	714.635.400	953.095.100
Reparasi ganti meter	156.730.120	136.219.270
Balik nama	13.347.278	11.533.296
Non air lainnya	312.138.584	263.845.649
Jumlah	**23.878.496.064**	**25.711.669.365**

32 BEBAN SUMBER AIR

Terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Biaya pegawai	13.141.626.320	14.436.777.945
Biaya penyusutan sumber air	1.664.614.666	1.010.655.855
Pajak pemanfaatan air	1.586.912.300	1.425.273.500
Biaya pemeliharaan bangunan dan Instalasi sumber air	1.311.580.819	2.539.303.418
Biaya operasi lainnya	1.098.561.750	1.013.976.400
Biaya bahan kimia	961.054.266	1.304.023.902
Biaya listrik/PLN	849.211.276	796.407.595
Jumlah	**20.613.561.397**	**22.526.418.615**

33 BEBAN PENGOLAHAN AIR

Terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Biaya pegawai	18.498.006.241	15.639.189.264
Pemakaian bahan kimia	11.881.930.310	9.342.543.053
Biaya penyusutan pengolahan air	8.477.607.900	8.221.670.542
Biaya listrik/PLN	5.094.220.154	4.103.910.274
Biaya pemeliharaan bangunan dan instalasi pengolahan air	2.482.136.938	4.463.110.491
Biaya operasional lainnya	498.638.940	351.213.930
Jumlah	**46.932.540.483**	**42.121.637.554**

34 BEBAN TRASNMISI DAN DISTRIBUSI

Terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Biaya penyusutan bangunan dan instalasi transmisi & distribusi	55.649.894.972	44.446.119.612
Biaya pegawai	18.124.454.053	17.513.872.341
Biaya pemeliharaan bangunan dan instalasi trandist	6.400.732.247	9.108.143.668
Biaya listrik/PLN	2.405.947.257	2.323.911.392
Biaya pemakaian bahan/perlengkapan	2.371.154.843	2,171.796.831
Biaya operasi lainnya	1.822.896.563	2.015.517.553
Biaya bukaan tutupan	325.685.124	364.776.894
Jumlah	**87.100.765.059**	**77.944.138.291**

Badan Keuangan dan Aset Daerah

35 BEBAN PERPOMPAAN

Terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Beban penyusutan	3.691.722.819	2.419.595.810
Jumlah	**3.691.722.819**	**2.419.595.810**

36 BEBAN PERENCANAAN TEKNIK

Terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Biaya pegawai	5.432.335.874	5.571.951.717
Rupa-rupa biaya perencanaan teknik	2.485.366.354	4.324.800.000
Jumlah	**7.917.702.228**	**9.896.751.717**

37 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

Terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Beban rupa-rupa umum	49.945.421.752	39.891.042.501
Beban pegawai	27.783.069.877	27.448.556.865
Beban kantor, listrik dan air	22.256.822.711	22.611.618.957
Beban keuangan	8.811.922.749	6.876.784.162
Beban direksi dan dewan pengawas	8.226.046.594	7.932.838.731
Beban penyusutan dan amortisasi	5.992.225.290	6.545.336.071
Beban pemeliharaan dan bahan bakar	3.705.696.893	4.630.970.726
Beban penyisihan piutang	1.715.074.124	3.116.204.667
Jumlah	**128.436.279.990**	**119.053.352.680**
Detail beban rupa-rupa umum:		
Biaya Imbalan Paska Kerja	18.064.252.805	10.300.547.373
Biaya rupa-rupa Umum	5.739.842.039	3.518.354.991
Biaya Jasa Profesional	3.665.088.025	3.264.472.702
Biaya Pendidikan,Pelaihan & Diklat	3.534.300.226	3.443.948.679
Lain-lain	2.876.673.145	3.684.188.321
Biaya Perjalanan Dinas	2.635.005.403	2.713.422.456
Iuran dana asuransi pegawai	2.368.168.185	2.258.269.198
Biaya Honor Tim	1.838.627.500	2.850.955.000
Biaya iuran berlangganan	1.419.544.300	1.353.192.200
Biaya Zakat Perusahaan	1.279.418.400	1.134.438.000
Representasi Direksi/Pos Pimpinan	1.235.000.000	1.330.000.000
Olah Raga	1.216.335.254	359.562.143
Biaya sewa	1.016.589.937	568.431.071
Sumbangan-sumbangan	1.008.289.100	786.212.800
Biaya PBB	641.182.406	611.507.118
Biaya Sosial & Kesejahteraan	613.773.500	247.650.000
Biaya asuransi Bangunan	279.688.691	188.876.008
Biaya asuransi kendaraan	191.262.702	188.066.772
Biaya Katinueng Karyawan/ti	130.994.781	935.767.630
Beban Pajak	107.286.372	42.500.000
Biaya rapat & Koordinasi	84.098.981	23.743.970
Retribusi pemakaian tanah	-	86.936.069
Jumlah	**49.945.421.752**	**39.891.042.501**

Badan Keuangan dan Aset Daerah

38 BEBAN HUBUNGAN PELANGGAN

Terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Biaya pegawai	31.798.512.694	28.150.378.597
Rupa-rupa biaya hubungan pelanggan	5.843.813.446	5.330.057.900
Jumlah	**37.642.326.140**	**33.480.436.497**

39 PENDAPATAN LAIN-LAIN

Terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pendapatan keuntungan penjualan aset tetap	3.784.854.695	1.285.890.978
Pendapatan bunga deposito	3.054.300.534	2.045.288.901
Pendapatan jasa giro	943.247.388	1.110.818.646
Pendapatan dari piutang yang telah dihapuskan	158.041.300	320.060.325
Rupa-rupa pendapatan lainnya	4.154.715.030	2.432.253.813
Jumlah	**12.095.158.947**	**7.194.312.663**

40 BEBAN LAIN-LAIN

Terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Biaya bank	9.433.900	8.749.500
Selisih kurang (lebih) opname persediaan	-	- 4.449.170
Kerugian lainnya	97.984.001	64.465.508
Jumlah	**107.417.901**	**68.765.838**

41 SIFAT, SALDO, DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak - pihak berelasi, berdasarkan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak.

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak berelasi	Sifat dan hubungan	Sifat transaksi
Pemerintah Kota Bogor	Pemilik	Setoran modal, titipan retribusi, dividen, dan penjualan
Perumda Pasar Pakuan Jaya	Perusahaan sepengendali	Penjulan
Perumda Bank Kota Bogor	Perusahaan sepengendali	Bank, deposito dan penjualan
Perumda Jasa Transportasi	Perusahaan sepengendali	Penjualan
RSUD Kota Bogor	Perusahaan sepengendali	Penjualan

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

a. Bank

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Perumda Bank Kota Bgor	9.028.684.558	8.442.996.519
Persentase	**1,14%**	**1,16%**

**) Persentase dari total aset*

b. Deposito

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Perumda Bank Kota Bgor	7.000.000.000	7.000.000.000
Persentase	**0,89%**	**0,97%**

**) Persentase dari total aset*

Bapenda Keuangan dan Aset Daerah

41 SIFAT, SALDO, DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI (lanjutan)

c. Titipan Retribusi

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pemerintah Kota Bogor	412.727.100	620.433.700
Persentase	**0,20%**	**0,28%**

**) Persentase dari total utang*

d Dividen

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pemerintah Kota Bogor	25.588.368.239	24.957.646.277

e Penjualan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pemerintah Kota Bogor	2.150.600	2.040.100
Perumda Pasar Pakuan Jaya	295.712.100	143.153.700
Perumda Bank Kota Bogor	2.736.500	2.272.700
Perumda Jasa Transportasi	2.691.600	785.000
RSUD Kota Bogor	279.527.200	287.268.100
Jumlah	**582.818.000**	**435.519.600**
Persentase	**0,15%**	**0,12%**

**) Persentase dari total penjualan*

42 STANDAR AKUNTANSI BARU

Efektif berlaku 1 Januari 2025 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik tidak berlaku dan diganti dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat.

Perusahaan sedang menganalisa dampak penerapan standar akuntansi dan interpretasi tersebut di atas yang relevan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

43 DIVIDEN (PENDAPATAN ASLI DAERAH)

Pembagian laba tahun 2023 ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota Bogor Nomor 900.1.13.2/Kep.154-Bag.Ekon/2024 tentang penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah Kota Bogor Tahun Buku 2023 tanggal 8 Mei 2024.

Perusahaan telah menyetorkan dividen ke Pemerintah Kota Bogor sebesar 50% dari laba bersih tahun 2023 sebesar Rp25.588.368.239

Badan Keuangan dan Aset Daerah

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00019/3.0479/AU.2/05/1948-1/1/III/2025

Dewan Pengawas dan Direksi
Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor** terlampir, yang terdiri dari laporan neraca tanggal 31 Desember 2024, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan, dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lainnya

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 di audit oleh auditor independen lain dengan laporan Nomor : 00354/2.1308/AU.2/11/1643-1/1/IV/2024 tanggal 1 April 2024 yang menyatakan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Nomor: 00019/3.0479/AU.2/05/1948-1/1/III/2025

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Nomor: 00019/3.0479/AU.2/05/1948-1/1/III/2025

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

BUDIANDRU DAN REKAN

00019

Maman Abdurahman, Ak., CPA.
Nomor Registrasi Akuntan Publik No AP. 1948

Jakarta, 26 Maret 2025

Badan Keuangan dan Aset Daerah